ᨕᨘᨀᨚᨈᨑᨚ ᨕᨘᨄᨑᨘᨔᨚ ᨅᨔᨑᨘᨔᨚ ᨀᨚᨔᨑᨚ

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024-2026

RPD 2024-2026

CETAKAN - I

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan dimasa transisi menuju pemilihan umum Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat demi terwujudnya keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Gubernur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Undonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

(1) Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan

tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I Pendahuluan;
   b. BAB II Gambaran Umum;
   c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
   d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
   e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
   f. BAB VI Pengembangan Wilayah;
   g. BAB VII Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
   h. BAB VIII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
   i. BAB IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   j. BAB X Penutup.

(2) Isi dan uraian Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
(2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah apabila:
a. hasil pengendalian evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksiting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;

c. perubahan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau

d. terjadi perubahan mendasar.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Maret 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 24 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ASLAM PATONANGI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 13

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan ..... I – 1
1.1. Latar Belakang ..... I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I – 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I – 6
1.4. Maksud dan Tujuan ..... I – 7
1.5. Proses Penyusunan Dokumen ..... I – 8
1.6. Sistematika Penulisan ..... I – 10

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah ..... II – 1
2.1. Kondisi Umum Daerah ..... II – 1
2.1.1. Aspek Geografi dfan Demografi ..... II – 1
2.1.2. Wilayah Rawan Bencana ..... II – 6
2.1.3. Kondisi Demografi ..... II – 9
2.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah ..... II – 12
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II – 18
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II – 18
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial ..... II – 38
2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga ..... II – 66
2.3. Aspek Pelayanan Umum ..... II – 66
2.3.1. Pelayanan Urusan Wajib Dasar ..... II – 66
2.3.2. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar ..... II – 116
2.3.3. Layanan Urusan Pilihan ..... II – 166
2.3.4. Penunjang Urusan ..... II – 195
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... II – 216
2.4.1. Indeks Layanan Infrastruktur ..... II – 216
2.4.2. Produktivitas Total Daerah ..... II – 217
2.4.3. Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga Perkapita ..... II – 218
2.4.4. Persentase Pengeluaran Komsumsi Non Pangan Perkapita ..... II – 219
2.4.5. Nilai Tukar Petani ..... II – 219
2.4.6. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa ..... II – 220
2.4.7. Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) ..... II – 221
2.4.8. Rasio Ketergantungan ..... II – 222
2.4.9. Angka Kriminilitas ..... II – 223
2.5. Capaian Indikator Pembangunan Daerah ..... II – 223
2.5.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022 ..... II – 223
2.5.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 -2022 ..... II – 228

2.5.3. Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... II – 251
2.5.4. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs) ..... II – 253

Bab III Gambaran Keuangan Daerah ..... III – 1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ..... III – 2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ..... III – 2
3.1.1.1. Pendapatan Daerah ..... III – 2
3.1.1.2. Belanja Daerah ..... III – 16
3.1.1.3. Pembiayaan daerah ..... III – 20
3.1.2. Neraca Daearh ..... III – 22
3.1.2.1. Aset ..... III – 24
3.1.2.2. Kewajiban ..... III – 24
3.1.2.3. Ekuitas Dana ..... III – 25
3.1.2.4. Rasiio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas) ..... III – 25
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... III – 27
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ..... III – 28
3.2.2. Analisis Pembiayaan ..... III – 29
3.3. Kerangka Pendanaan ..... III – 30
3.3.1. Asumsi Ekonomi, Sosial dam Fiskal ..... III – 30
3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja ..... III – 32
3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan ..... III – 41
3.3.4. Pendanaan Pembangunan Lainnya ..... III – 43
3.3.4.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ..... III – 43
3.3.4.2. *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ..... III – 44
3.3.4.3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ..... III – 51
3.3.4.4. Pembiayaan Utang Daerah ..... III – 52
3.3.4.5. Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke depan: Regional Infrastructure Development Fund (RIDF): ..... III – 52
3.4. Proyeksi Kebutuhan Investasi di Sulawesi Selatan dan P. Sulawesi ..... III – 53

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah ..... IV – 1
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... IV – 1
4.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Stabil ..... IV – 2
4.1.2. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IV – 2
4.1.3. Meningkatnya Persentase dan Jumlah Penduduk Kemiskinan ..... IV – 4

4.1.4. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran ..... IV – 5
4.1.5. Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat ..... IV – 6
4.1.6. Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal .... IV – 6
4.1.7. Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah ..... IV – 7
4.1.8. Menurunnya Kualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ..... IV – 7
4.2. Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ..... IV – 8
4.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar ..... IV – 8
4.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar ..... IV – 10
4.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan ..... IV – 14
4.2.4. Urusan Penunjang Pemerintahan ..... IV – 17
4.3. Isu Strategis ..... IV – 24
4.3.1. Isu Strategis Global ..... IV – 24
4.3.1.1. Perang Rusia – Ukraina ..... IV – 24
4.3.1.2. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)* ..... IV – 25
4.3.1.3. Perubahan Iklim ..... IV – 26
4.3.1.4. Transformasi Digital ..... IV – 27
4.3.2. Isu Strategis Nasional ..... IV – 28
4.3.2.1. Standar Pelayanan Minimal ..... IV – 28
4.3.2.2. Bonus Demografi ..... IV – 29
4.3.2.3. Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 ..... IV – 30
4.3.2.4. Isu Strategis Daerah ..... IV – 30

BAB V Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... V – 1

5.1. RPJPD Provinsi Sulawesi Selaran Tahun 2005-2025 ..... V – 1
5.1.1. Arah Pembangunan Lima Tahun Keempat (2020-2025) ..... V – 1
5.1.2. Sasaran Strategis RPJPD ..... V – 5
5.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 2024-2026 .. V – 17

BAB VI Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan ..... VI – 1

6.1. Arahan Nasional Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ..... VI – 1
6.2. Arahan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ..... VI – 10
6.3. Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ..... VI – 12
6.4. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ..... VI – 19
6.4.1. Capaian Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ..... VI – 19

6.4.2. Capaian Pembangunan Kawasan Bulukumba ..... VI – 23
6.4.3. Capaian Pembangunan Kawasan Watampone dan Sekitarnya ..... VI – 27
6.4.4. Pembangunan Kawasan Parepare dan Sekitarnya VI – 31
6.4.5. Pembangunan Kawasan Palopo dan Sekitranya .... VI – 36
6.4.6. Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ..... VI – 41

BAB VII Strategi Arah Kebijakan dan Program Prioritas ..... VII – 1

7.1. Strategis dan Arah Kebijakan ..... VII – 1
7.1.1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ..... VII – 5
7.1.2. Arah Kebijakan ..... VII – 7
7.2. Tema Pembangunan dan Program Prioritas ..... VII – 14
7.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah ..... VII – 14
7.2.2. Program Prioritas ..... VII – 14

BAB VIII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah ..... VIII – 1

8.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan ..... VIII – 1
8.2. Program Perengkat Daerah ..... VIII – 3

BAB IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ..... IX – 1

9.1. Indikator Kinerja Makro ..... IX – 1
9.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... IX – 1
9.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) ..... IX – 2
9.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... IX – 50

BAB X Penutup ..... X – 1

10.1. Pendoman Transisi ..... X – 1
10.2. Kaidah Pelaksanaan ..... X – 1

Daftar Tabel

Tabel II.1.	Data Wilayah Administrasi Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	II – 2
Tabel II.2.	Kondisi Kemiringan Lereng Provinsi Sulawesi Selatan	II – 3
Tabel II.3.	Kondisi Topografi di Provinsi Sulawesi Selatan	II – 4
Tabel II.4.	Kejadian Bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 6
Tabel II.5.	Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan	II – 7
Tabel II.6.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 9
Tabel II.7.	Jumlah Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 10
Tabel II.8.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 11
Tabel II.9.	Arahan Pengembangan Wilayah di Sulawesi Selatan	II – 17
Tabel II.10.	Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II – 19
Tabel II.11.	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 21
Tabel II.12.	Laju Pertumbahan PDRB Menurut Sektor Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 21
Tabel II.13.	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 23
Tabel II.14.	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 23
Tabel II.15.	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 24
Tabel II.16.	Perbandingan Laju Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II – 25
Tabel II.17.	PDRB PerKapita dan PDB Perkapita (ADHB) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2018-2022	II – 26
Tabel II.18.	Perkembangan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 27
Tabel II.19.	Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 29
Tabel II.20.	Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II – 30
Tabel II.21.	Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II – 32

Tabel II.22. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... II – 32
Tabel II.23. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022..... II – 33
Tabel II.24. Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022..... II – 33
Tabel II.25. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 35
Tabel II.26. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 35
Tabel II.27. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 36
Tabel II.28. Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 36
Tabel II.29. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 37
Tabel II.30. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 37
Tabel II.31. Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 37
Tabel II.32. Pertumbuhan PDRB Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 38
Tabel II.33. Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan dengan Nasional 2018-2022..... II – 38
Tabel II.34. Capaian IPM dan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022 ..... II – 39
Tabel II.35. Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 47
Tabel II.36. Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Sulawesi Selatan dan Nasional, 2018-2022 ..... II – 48
Tabel II.37. Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 49
Tabel II.38. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Periode Agustus) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2022 ..... II – 51
Tabel II.39. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022..... II – 53
Tabel II.40. Perbandingan Rasio Penduduk Bekerja (Periode Agustus) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II – 57
Tabel II.41. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 58
Tabel II.42. Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 59

Tabel II.43. Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 59
Tabel II.44. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2018 – 2022 ..... II – 60
Tabel II.45. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 64
Tabel II.46. Nilai SAKIP Provinsi ..... II – 64
Tabel II.47. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 65
Tabel II.48. Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO2Eq) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 66
Tabel II.49. Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 66
Tabel II.50. Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022..... II – 68
Tabel II.51. Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022..... II – 69
Tabel II.52. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022..... II – 70
Tabel II.53. Angka Anak Tidak Sekolah dan Masih Bersekolah Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 71
Tabel II.54. Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA dan Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 75
Tabel II.55. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-64 Tahun Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022 ..... II – 75
Tabel II.56. Jumlah sekolah Luar Biasa Bagi Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... II – 77
Tabel II.57. Jumlah Siswa Penyadang Disabilitas Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2022 ..... II – 77
Tabel II.58. Jumlah Siswa Berdasarkan Kelompok Umur Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 77
Tabel II.59. Jumlah Siswa Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Ketunaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022 ..... II – 77
Tabel II.60. Capaian Kinerja Program Urusan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 79
Tabel II.61. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 86
Tabel II.62. Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 89

Tabel II.63. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2022 ..... II – 91
Tabel II.64. Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 97
Tabel II.65. Luas Kawasan Kumuh Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 103
Tabel II.66. Pengurangan Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022 ..... II – 103
Tabel II.67. Capaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 108
Tabel II.68. Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022 ..... II – 110
Tabel II.69. Data Terdampak Bencana Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 111
Tabel II.70. Capaian Kinerja Program Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 114
Tabel II.71. Capaian Kinerja Program Urusan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 115
Tabel II.72. Capaian Kinerja Program Urusan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 119
Tabel II.73. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2018-2022 ..... II – 120
Tabel II.74. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022 ..... II – 121
Tabel II.75. Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 123
Tabel II.76. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 126
Tabel II.77. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 128
Tabel II.78. Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 129
Tabel II.79. Kapasitas dan Pengoperasian TPA Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 129
Tabel II.80. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 131
Tabel II.81. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 140
Tabel II.82. Capaian Kineja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 142

Tabel II.83. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 145
Tabel II.84. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 147
Tabel II.85. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 150
Tabel II.86. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022..... II – 152
Tabel II.87. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 155
Tabel II.88. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penanaman Modal dan Investasi Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2018–2022..... II – 158
Tabel II.89. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 160
Tabel II.90. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 160
Tabel II.91. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... II – 161
Tabel II.92. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... II – 162
Tabel II.93. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perpustakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... II – 164
Tabel II.94. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 166
Tabel II.95. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 169
Tabel II.96. Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) dan Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 170
Tabel II.97. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022 ..... II – 172
Tabel II.98. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... II – 176
Tabel II.99. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 179

Tabel II.100. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 183
Tabel II.101. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022 ..... II – 185
Tabel II.102. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 187
Tabel II.103. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 188
Tabel II.104. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 194
Tabel II.105. Segmen Batas yang Terselesaikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022 ..... II – 196
Tabel II.106. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sekretariat Dewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 200
Tabel II.107. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sekretariat Dewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 202
Tabel II.108. apaian Indikator Kinerja Program Urusan Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 203
Tabel II.109. Opini BPK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 206
Tabel II.110. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 208
Tabel II.111. IKM Pekayanan Pajak Kendaraan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022 ..... II – 208
Tabel II.112. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 208
Tabel II.113. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 211
Tabel II.114. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 213
Tabel II.115. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pengawasan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022 ..... II – 213
Tabel II.116. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pengelolaan Penghubung Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 214
Tabel II.117. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 216

Tabel II.118. Indeks Layanan Infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 217
Tabel II.119. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 217
Tabel II.120. Produktifitas Total Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 218
Tabel II.121. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 218
Tabel II.122. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 218
Tabel II.123. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 II – 219
Tabel II.124. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 219
Tabel II.125. Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 220
Tabel II.126. Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... II – 221
Tabel II.127. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 221
Tabel II.128. Rasio Ketergantungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2022 ..... II – 222
Tabel II.129. Angka Kriminalitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022..... II – 223
Tabel II.130. Capaian IKU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022..... II – 225
Tabel II.131. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (IKD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022..... II – 229
Tabel II.132. Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022 . II – 251
Hasil Analisis Terhadap Capaian Target Indikator TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022..... II – 255

Tabel III.1. Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2022 ..... III – 4
Tabel III.2. Rata - Rata Pertumbuhan Realiasasi dan Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022.... III – 18
Tabel III.3. Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2022 ..... III – 21
Tabel III.4. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2021 ..... III – 22
Tabel III.5. Rasio Lancar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021 (Dalam Jutaan)..... III – 25
Tabel III.6. Rasio Quick Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021 (Dalam Jutaan)..... III – 26

Tabel III.7. Rasio Kas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021 (Dalam Jutaan) ..... III – 26
Tabel III.8. Rasio Total Kewajiban dengan Ekuitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2021 ..... III – 27
Tabel III.9. Rasio Total Kewajiban dengan Aset Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2021 ..... III – 27
Tabel III.10. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2021 ..... III – 29
Tabel III.11. Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2021 ..... III – 29
Tabel III.12. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2021 ..... III – 29
Tabel III.13. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2021 ..... III – 30
Tabel III.14. Asumsi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2026 ..... III – 31
Tabel III.15. Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2026 ..... III – 32
Tabel III.16. Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2026 ..... III – 35
Tabel III.17. Target dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2026 ..... III – 39
Tabel III.18. Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2026 ..... III – 40
Tabel III.19. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 – 2026 ..... III – 42
Tabel III.20. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024-2026 ..... III – 43
Tabel III.21. Mitra Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Yang Mendukung Pembangunan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan ..... III – 44
Tabel III.22. Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Sulawesi 2021-2024 ..... III – 53

Tabel IV.1. Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ..... IV – 19

Tabel V.1. Sasaran dan Target RPJPD Sulawesi Selatan ..... V – 6
Tabel V.2. Tujuan dan Sasaran Pembangaunan 2024 – 2026 ..... V – 19

Tabel VI.1. Arahan Struktur dan Pola Ruang Nasional di Sulawesi Selatan ..... VI – 2
Tabel VI.2. Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Sulawesi Selatan ..... VI – 6

Tabel VI.3. Arahan Pengembangan Wilayah Sulawesi Selatan..... VI – 13
Tabel VI.4. Target Pembangunan Kawasan Tahun 2026..... VI – 42
Tabel VI.5. Rencana Kebutuhan Investasi Tahun 2026..... VI – 42
Tabel VI.6. Target Pembangunan Kawasan Makassar Tahun 2024-2026..... VI – 44
Tabel VI.7. Kebutuhan Investasi Kawasan Makassar Tahun 2024-2026..... VI – 45
Tabel VI.8. Target Pembangunan Kawasan Bulukumba Tahun 2024-2026..... VI – 46
Tabel VI.9. Kebutuhan Investasi Kawasan Bulukumba Tahun 2024-2026..... VI – 48
Tabel VI.10. Target Pembangunan Kawasan Pembangunan Watampone Tahun 2024 – 2026..... VI – 49
Tabel VI.11. Kebutuhan Investasi Kawasan Watampone Tahun 2024-2026..... VI – 50
Tabel VI.12. Target Pembangunan Kawasan Pembangunan Parepare Tahun 2024 – 2026..... VI – 51
Tabel VI.13. Kebutuhan Investasi Kawasan Parepare Tahun 2024-2026..... VI – 52
Tabel VI.14. Target Pembangunan Kawasan Pembangunan Palopo Tahun 2024 – 2026..... VI – 54
Tabel VI.15. Kebutuhan Investasi Kawasan Palopo Tahun 2024-2026..... VI – 55

Tabel VII.1. Tabel VII.1. Misi dan Kebijakan Prioritas RPJPD Sulawesi Selatan 2005 – 2025 Tahun keempat (2020 – 2025)..... VII – 1
Tabel VII.2. Tujuan Sasaran dan Strategi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026..... VII – 6
Tabel VII.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026..... VII – 8
Tabel VII.4. Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan..... VII – 16

Tabel VIII.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 Provinsi Sulawesi Selatan..... VIII – 2
Tabel VIII.2. Indikasi Rencana Program Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026..... VIII – 4

Tabel IX.1. Target Indikator Kinerja Makro Tahun 2024-2026 Provinsi Sulawesi Selatan..... IX – 1
Tabel IX.2. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 Provinsi Sulawesi Selatan..... IX – 2
Tabel IX.3. Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 – 2026 Provinsi Sulawesi Selatan..... IX – 3

Tabel IX.4. Penetapan Target Indikator SPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Permendagri No.100 Tahun 2018) ..... IX – 50

Daftar Grafik

Grafik II.1.	Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II – 19
Grafik II.2.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi dan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022	II – 20
Grafik II.3.	Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 22
Grafik II.4.	Perbandingan PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Wilayah Regional Sulawesi tahun 2022	II – 26
Grafik II.5.	Perkembangan Indeks Gini Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II – 27
Grafik II.6.	Perbandingan Indeks Gini Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022	II – 28
Grafik II.7.	Indeks gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 29
Grafik II.8.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II – 30
Grafik II.9.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022	II – 31
Grafik II.10.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode Maret Tahun 2022	II – 31
Grafik II.11.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 34
Grafik II.12.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II – 39
Grafik II.13.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 40
Grafik II.14.	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 41
Grafik II.15.	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan RLS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 41
Grafik II.16.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 42
Grafik II.17.	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan HLS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 42
Grafik II.18.	Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	II – 43
Grafik II.19.	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan UHH Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II – 44

Grafik II.20. Perkembangan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 44
Grafik II.21. Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 45
Grafik II.22. Perbandingan IPM Regional Sulawesi Tahun 2022 ..... II – 46
Grafik II.23. Perbandingan IPM Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022 ..... II – 46
Grafik II.24. Perkembangan Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 47
Grafik II.25. Perkembangan Angka Melek Huruf Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II – 48
Grafik II.26. Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 49
Grafik II.27. Perkembangan Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 50
Grafik II.28. Dimensi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 51
Grafik II.29. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II – 52
Grafik II.30. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 53
Grafik II.31. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II – 54
Grafik II.32. Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 54
Grafik II.33. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 55
Grafik II.34. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022 ..... II – 56
Grafik II.35. Rasio Penduduk yang Bekerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 56
Grafik II.36. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 57
Grafik II.37. Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Rasio Penduduk Bekerja dan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 58
Grafik II.38. Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Pelayanan Institusi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022. ..... II – 60

Grafik II.39. Perbandingan IPM Laki-laki dan IPM Perempuan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 61
Grafik II.40. Dimensi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 62
Grafik II.41. Perbandingan APM Laki-laki dan Perempuan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 63
Grafik II.42. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 67
Grafik II.43. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 68
Grafik II.44. Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022..... II – 69
Grafik II.45. Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022..... II – 70
Grafik II.46. Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022..... II – 71
Grafik II.47. Perkembangan Angka Anak Tidak Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 72
Grafik II.48. Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 72
Grafik II.49. Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Anak Usia 7-18 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Bersekolah Lagi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 73
Grafik II.50. Angka Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 II – 73
Grafik II.51. Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Putus Sekolah (APtS) dan Angka Melanjutkan (AM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 74
Grafik II.52. Kondisi Ruang Kelas Pendidikan SMA/SMK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 76
Grafik II.53. Pendidik Pada Jenjang SMA dan SMK yang Memiliki Ijazah ≥ S1 dan Bersertifikat Pendidik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 79
Grafik II.54. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 81
Grafik II.55. Jumlah Kematian Ibu dan Bayi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 81
Grafik II.56. Prevalensi Balita Stunting Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 82
Grafik II.57. Perbandingan Angka Stunting Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain Di Indonesia Tahun 2022..... II – 82

Grafik II.58. Prevalensi Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 83
Grafik II.59. Perbandingan Prevalensi Balita Gizi Buruk (Wasting) Sulawesi Selatan dan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022 ..... II – 83
Grafik II.60. Perbandingan Prevalensi Balita Gizi Kurang (Underweight) Sulawesi Selatan dan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022 ..... II – 84
Grafik II.61. Prevalensi Balita Gizi Buruk (Wasting) dan Gizi Kurang (Underweight) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 84
Grafik II.62. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 85
Grafik II.63. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II – 92
Grafik II.64. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Termasuk Aman dan Melalui Jaringan Perpipaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022 ..... II – 93
Grafik II.65. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II – 94
Grafik II.66. Kemantapan Jalan Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 96
Grafik II.67. Persentase Panjang Jalan Terisolir pada Ruas Jalan Provinsi yang Terakses Roda Empat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022 ..... II – 96
Grafik II.68. Perbandingan Capaian Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II – 99
Grafik II.69. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Berdasarkan Komponen Kelayakan di Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 100
Grafik II.70. Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 100
Grafik II.71. Rasio Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 101
Grafik II.72. Pengelompokan Rasio Rumah Layak Huni dan Jumlah Rumah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 101
Grafik II.73. Persentase Rumah Tangga Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II – 102
Grafik II.74. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 104
Grafik II.75. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 106

Grafik II.76. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 107
Grafik II.77. Rumah Tangga yang masih BABs Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 107
Grafik II.78. Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 109
Grafik II.79. Peningkatan Kesempatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022 ..... II – 117
Grafik II.80. Pencari Kerja yang Ditempatkan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 118
Grafik II.81. Daya Serap Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 118
Grafik II.82. Sebaran Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 125
Grafik II.83. Penduduk Ber-KTP Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 133
Grafik II.84. Penerbitan KTP-el Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 134
Grafik II.85. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 135
Grafik II.86. Bayi Berakta Kelahiran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 136
Grafik II.87. Bayi Ber Akte Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 136
Grafik II.88. Pasangan Ber Akte Nikah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 137
Grafik II.89. Penerbitan Akta Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 138
Grafik II.90. Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 139
Grafik II.91. Akta Kematian yang Diterbitkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 140
Grafik II.92. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 141
Grafik II.93. Jumlah Desa Status “Desa Mandiri” Tahun 2021 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 143
Grafik II.94. Jumlah Desa Status “Desa Tertinggal” Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 144
Grafik II.95. Jumlah PKK dan Posyandu Aktif Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 144

Grafik II.96. Total Fertility Rate (TFR) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 146
Grafik II.97. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Dalam Juta Jiwa ..... II – 148
Grafik II.98. Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022 ..... II – 153
Grafik II.99. Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 153
Grafik II.100. Jumlah UMKM yang Difasilitasi Perizinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 154
Grafik II.101. Jumlah Investor/Proyek Berskala Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 156
Grafik II.102. Realisasi PMA dan PMDN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 156
Grafik II.103. Jumlah Perizinan yang Diterbitkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 157
Grafik II.104. Jumlah Gedung Olahraga Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 159
Grafik II.105. Jumlah Atlet Berprestasi dan Prestasi Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 159
Grafik II.106. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 163
Grafik II.107. Jumlah Perpustakaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 164
Grafik II.108. Peningkatan SDM Pengelola Arsip Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 165
Grafik II.109. Jumlah Destinasi Wisata Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 167
Grafik II.110. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 168
Grafik II.111. Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022 ..... II – 170
Grafik II.112. Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022 ..... II – 173
Grafik II.113. Produksi Hasil Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 173
Grafik II.114. Populasi Ternak Besar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 174
Grafik II.115. Populasi Ternak Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 174
Grafik II.116. Populasi Ternak Unggas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022 ..... II – 175
Grafik II.117. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 178
Grafik II.118. Rumah Tangga Pengguna Listrik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 180

Grafik II.119. Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 180
Grafik II.120. Rumah Tangga Pengguna Listrik Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 181
Grafik II.121. Persentase Desa Berlistrik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 181
Grafik II.122. Rumah Tangga Pengguna Gas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 183
Grafik II.123. Nilai Ekspor Perdagangan (US $) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 185
Grafik II.124. Perkembangan Jumlah Industri Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 186
Grafik II.125. Jumlah Industri Kecil Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 186
Grafik II.126. Nilai Produksi Perikanan (Milyar Rupiah) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 190
Grafik II.127. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 190
Grafik II.128. Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 191
Grafik II.129. Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 192
Grafik II.130. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 192
Grafik II.131. Nilai Hilirisasi dan Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022 ..... II – 193
Grafik II.132. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Melek Aksara Al-Qur'an Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 198
Grafik II.133. Realisasi Pendapatan pada UPT Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 207
Grafik II.134. Perbandingan NTP Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II – 220
Grafik II.135. Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... II – 222

Grafik III.1. Perkembangan Pendapatan Daerah (Rp) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... III – 7
Grafik III.2. Postur Komponen Pendapatan Daerah (Rp) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... III – 7
Grafik III.3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Rp) Tahun 2018-2022 ..... III – 8
Grafik III.4. Postur PAD Provinsi Sulawesi Selatan (Rp) Tahun 2018-2022 ..... III – 9
Grafik III.5. Perkembangan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Rp) Tahun 2018-2022 ..... III – 10

Grafik III.6. Realisasi Retribusi Daerah Sulawesi Selatan (Rp) Tahun 2018-2022 ..... III – 11
Grafik III.7. Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Provinsi Sulawesi Selatan (Rp) Tahun 2018-2022 ..... III – 11
Grafik III.8. Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Rp) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... III – 12
Grafik III.9. Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak (Rp) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... III – 13
Grafik III.10. Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... III – 14
Grafik III.11. Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus (Rp) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... III – 14
Grafik III.12. Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah (Rp) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... III – 15
Grafik III.13. Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 ..... III – 16
Grafik III.14. Alokasi Pendanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021 (Milyar Rupiah) ..... III – 45

Grafik VI.1. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Makassar Tahun 2021-2022 ..... VI – 20
Grafik VI.2. Capaian Tingkat Kemiskinan Kawasan Makassar Tahun 2021-2022 (Maret) ..... VI – 21
Grafik VI.3. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Makassar Tahun 2021-2022 (Agustus) ..... VI – 22
Grafik VI.4. Capaian Rasio Gini Kawasan Makassar Tahun 2021-2022 (Maret) ..... VI – 22
Grafik VI.5. Capaian IPM Kawasan Makassar Tahun 2021-2022 .... VI – 23
Grafik VI.6. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Bulukumba Tahun 2021-2022 ..... VI – 24
Grafik VI.7. Capaian Tingkat Kemiskinan Kawasan Bulukumba Tahun 2021-2022 (Maret) ..... VI – 25
Grafik VI.8. Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Bulukumba Tahun 2021-2022 (Agustus) ..... VI – 26
Grafik VI.9. Capaian Rasio Gini Kawasan Bulukumba Tahun 2021-2022 (Maret) ..... VI – 26
Grafik VI.10. Capaian IPM Kawasan Bulukumba Tahun 2021-2022 VI – 27
Grafik VI.11. Capaian Pertumbuhan Ekonomi pada Kawasan Watampone Tahun 2021-2022 ..... VI – 28
Grafik VI.12. Capaian Tingkat Kemiskinan Kawasan Watampone Tahun 2021-2022 (Maret) ..... VI – 29
Grafik VI.13. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Watampone Tahun 2021-2022 ..... VI – 30

Grafik VI.14. Capaian Rasio Gini Kawasan Watampone Tahun 2021-2022 (Maret) ..... VI – 30
Grafik VI.15. Capaian IPM Kawasan Watampone Tahun 2021-2022 ..... VI – 31
Grafik VI.16. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Parepare Tahun 2021-2022 ..... VI – 32
Grafik VI.17. Capaian Tingkat Kemiskinan Kawasan Parepare dan sekitarnya Tahun 2021-2022 (Maret) ..... VI – 33
Grafik VI.18. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Parepare, Tahun 2021-2022 (Agustus) ..... VI – 34
Grafik VI.19. Capaian Rasio Gini Kawasan Parepare Tahun 2021-2022 (Maret) ..... VI – 35
Grafik VI.20. Capaian IPM Kawasan Parepare Tahun 2021-2022 ..... VI – 36
Grafik VI.21. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Palopo Tahun 2021-2022 ..... VI – 37
Grafik VI.22. Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota pada Kawasan Palopo dan sekitarnya, Tahun 2021-2022 (Maret) ..... VI – 38
Grafik VI.23. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Palopo Tahun 2021-2022 (Agustus) ..... VI – 39
Grafik VI.24. Capaian Rasio Gini Kawasan Palopo Tahun 2021-2022 (Maret) ..... VI – 40
Grafik VI.25. Capaian IPM Kawasan Palopo Tahun 2021-2022 ..... VI – 41

Daftar Gambar

Gambar I.1.	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan	I – 7
Gambar II.1.	Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	II – 1
Gambar II.2.	Peta Kelas Lereng Provinsi Sulawesi Selatan	II – 3
Gambar II.3.	Peta Topografi Provinsi Sulawesi Selatan.....	II – 4
Gambar II.4.	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Selatan.....	II – 5
Gambar II.5.	Pola Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.....	II – 13
Gambar III.1.	Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke depan	II – 53
Gambar VI.1.	Skenario Pengembangan Wilayah Sulawesi.....	IV – 9
Gambar VI.2.	Arahan Pengembangan Kawasan Pembangunan Makassar	IV – 43
Gambar VI.3.	Arahan Pengembangan Kawasan Bulukumba.....	IV – 46
Gambar VI.4.	Arahan Pengembangan Kawasan Watampone	IV - 49
Gambar VI.5.	Arahan Pengembangan Kawasan Parepare	IV – 51
Gambar VI.6.	Arahan Pengembangan Kawasan Pembangunan Palopo.....	IV – 53

Daftar Diagram

Diagram II.1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Regional Sulawesi Tahun 2022 ..... II – 20
Diagram II.2. Perbandingan Indeks Gini Wilayah Regional Sulawesi Tahun 2022 ..... II – 28
Diagram II.3. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan dengan Regional Sulawesi Tahun 2022 ..... II – 55
Diagram II.4. Jumlah Fasilitas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 85
Diagram II.5. Kondisi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 91
Diagram II.6. Tujuan dan Sasaran Pembangaunan 2024 – 2026 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 95
Diagram II.7. Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 132
Diagram II.8. Penerbitan KTP-el Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 133
Diagram II.9. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 202 ..... II – 135
Diagram II.10. Pasangan Ber Akte Nikah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 137
Diagram II.11. Jumlah Desa Berdasarkan Status Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 143
Diagram II.12. Jumlah Penumpang Angkutan Laut, Udara, dan Darat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 149
Diagram II.13. Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan (m3) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 177

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024-2026.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang maka pada tanggal 5 Desember 2022 telah terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencananaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru pada bagian kesatu mengamanahkan bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, agar Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026, sehubungan dengan hal tersebut maka Provinsi Sulawesi Selatan merupakan satu dari beberapa Provinsi di Indonesia yang periode Kepala Daerahnya berakhir tahun 2023 sehingga wajib Menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi Panduan dalam penyusunan RKPD tahun 2024 sampai dengan ditetapkanya kepala daerah hasil Pilkada serentak atau sampai dengan terbitnya Perda tentang RPJMD Prov. Sulsel.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengganti RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, dokumen RPD Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 memperhatikan beberapa hal penting yaitu: Penyelerasan target indicator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian indicator kinerja daerah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 penetuan tujuan dan sasaran didasarkan pada Visi Misi RPJPD, analisas sasaran pokok dan arah kebijkan RPJPD dan isu strategis actual

Sebagai gambaran awal penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 capaian ekonomi makro provinsi Sulawesi selatan tahun 2022 yaitu:

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang - Undang No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cata Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2018 Nomor 172);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencananaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tidak ada pasal maupun ayat yang mengatur terkait dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Keterkaitan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dengan dokumen lainnya secara vertikal berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanl (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPMN) Tahun 2005-2025. Keterkaitan secara horizontal yaitu berpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029.

Dalam pelaksanaannya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 akan mengakomodir dan disenergikan dengan beberapa target pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang belum diakomodir pada Perubahan RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 terutama untuk target pembangunan tahun 2024 dan 2025 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Prov. Sulsel dan Peratutan Daerah tentang RPJMD Prov. Sulsel.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 kemudian dijabarkan kedalam RENSTRA-PD Tahun 2024-2026 untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahunan dan Renja PD tahunan serta sebagai acuan penyusunan dokumen penganggaran yaitu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Selain itu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 serta RKPD Kabupaten/Kota Tahunan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar I.1.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

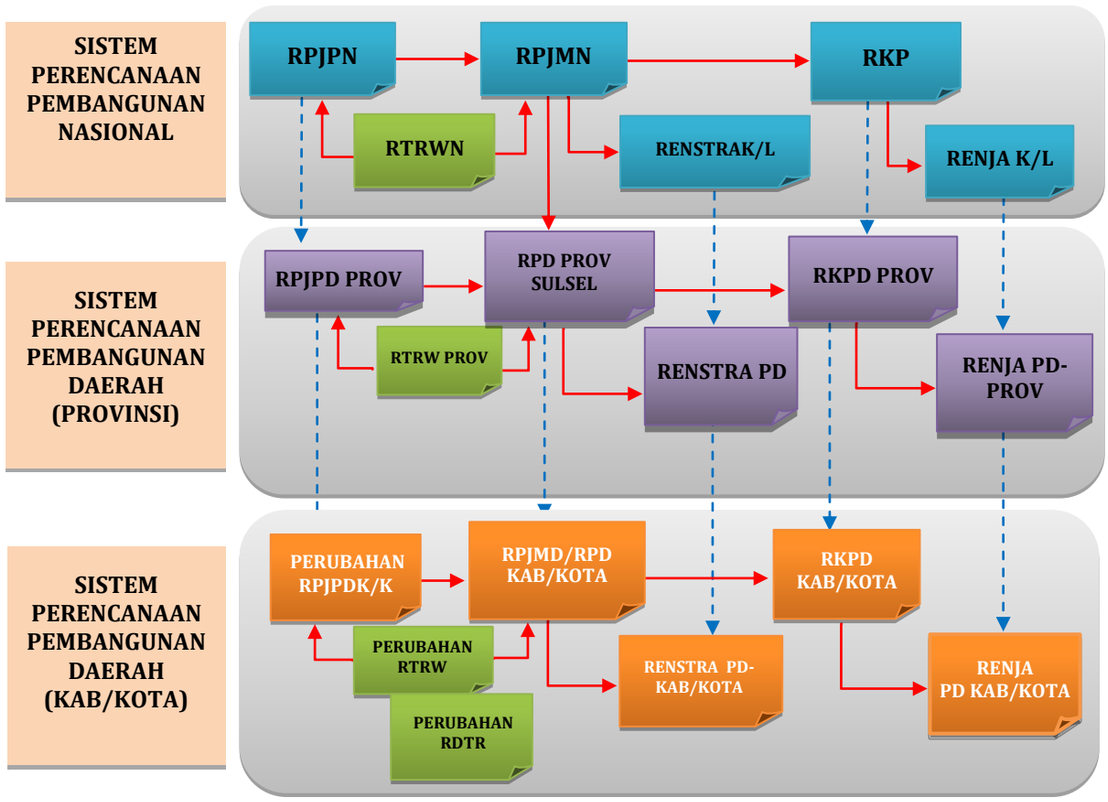

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025, sebagai pengganti Dokumen RPJMD, sebagai pedoman Penajabt Kepala Daerah dalam Menyusun rencana pembangunan daerah Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD untuk perencanaan tahunan sampai dengan ditetapkanya kepala daerah terpilih hasil pilkda serentak.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. Sebagai alat ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026
5. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah Tahun 2024-2026.
6. Menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dalam penyusunan RPD/Perubahan RPJMD dan RKPD/Perubahan RKPD Kabupaten/Kota.

7. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN.
8. Pedoman pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan untuk periode tahun 2024-2026.
9. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.5 PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencananaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru pada tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 meliputi:

a. Persiapan Penyusunan

   Tahapan persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 diawali dengan pembentukan tim penyusunan RPD Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 dengan melibatkan berbagai pihak terkait diantaranya Kepala Daerah, TAPD, OPD/Unit Kerja, Pemerintah Pusat (Kemendagri dan Bappenas), Tim Ahli (TGUPP dan Staf Khusus Gubernur), dan Mitra Pembangunan Daerah/NGO (USAID ERAT, BaKTI, USAID IUWASH, USAID MADANI, USAID MPHD, dan UNICEF).

   Selanjutnya dilakukan orientasi mengenai penyusunan RPD, orientasi penyusunan bertujuan untuk menyamakan persepsi antar tim penyusun, OPD dan Kab/kota terkait penyusunan dokumen sehingga sesuai dengan target yang akan dicapai.

   Penyusunan agenda kerja tim penyusun bertujuan untuk memastikan tahapan penyusunan sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Selanjutnya dilakukan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan berdasarkan SIPD sebagai bahan perumusan Rancangan Awal RPD Prov. Sulsel Tahun 2024-2026.

b. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

   Penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 serta resntra PD Tahun 2024-2026 dilakukan secara simultan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan. Rancangan RPD Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika paling sedikit memuat: Pendahuluan, Gambaran Umum, Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi Arah Kebijakan dan Program Prioritas, kerangka Pendanaan Pembangunan dan program Perangkat Daerah, Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah dan Penutup.

   Dalam penyusunan rancangan RPD Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 Bappelitbangda Prov. Sulsel berkoordinasi dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam penentuan program prioritas, program perangkat daerah dan target kinerja perangkat daerah.

   Rancangan yang telah disusun sesuai dengan sistematika selanjutnya akan dibahas dengan para pemangku kepentingan (Stakeholder) melalui forum konsultasi publik.

c. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Forum konsultasi public rancangan RPD Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 dilakukan untuk menyerap saran dan/atau masukan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) antara lain: Pemerintah Pusat, DPRD, OPD/Unit Kerja, TGUPP, Staf Khusus Gubernur, Kab/kota, Mitra Pembangunan/NGO, Unsur Perbankan dan Sektor Swasta, Perguruan Tinggi, Akademisi, Perwakilan Kelompok (Perempuan/Anak/Pemuda/Disabilitas) dan Tim Penyusun RPD Prov. Sulsel Tahun 2024 - 2026.

saran dan/atau masukan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) selanjutnya dituangkan dalam berita acara serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang hadir.

d. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Rancangan RPD Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan berdasarkan berita acara Forum Konsultasi Publik selanjutnya menjadi rancangan akhir RPD Prov. Sulsel Tahun 2024-2026.

Dalam perumusan rancangan akhir RPD Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 tim penyusun melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak terkait dengan melibuatkan Lembaga Mitra Pembangunan Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Prov. Sulsel antara lain: JICA, USAID ERAT, UNICEF, USAID MPHD, USAID MADANI, USAID IUWASH, Australia-Indonesia Centre (AIS), ICRAF, Save The Children Indonesia, AIHSP, IOM, BaKTI, TLKM, ICJ, Yayasaran Lestari Mulia, Yayasan PerDIK, YASMIB, PINUS, Yayasan Hadji Kalla, Forum Komunitas Hijau, PW Muslimat NU, Lembga Studi Kebijakan Publik, Koalisi Perempuan Indonesia Wil. Sulsel, FIK Ornop Sulsel, dan Yayasan Ruang Kerja Ukhuwah.

Rancangan akhir selanjutnya dilakukan Reviu oleh APIP, sebagai salah satu persyaratan pelaksanaan fasilitasi.

e. Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Sebelum ditetapkan menajdi peraturan kepala daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 dilakukan fasilitasi. Fasilitasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri RI melalui Direktirat Jenderal Bina Pembangunan untuk memastikan antara lain: Kepentingan umum, akuntabilitas, rasionalitas, efektivitas, efesiensi, partisipatif, kesinambungan, keselarasan, dan kesasuaian dengan peraturan perundang-unndangan. Hasil fasilitasi berupa Surat Hasil fasilitasi Menteri Dalam Negeri.

f. Penetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Dokumen Rancangan akhir yang telah dilakukan fasilitasi selanjutnya disempurnakan oleh tim penyusun sesuai hasil fasilitasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026.

Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2023.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; merupakan bagian yang menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan RPD yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan RPD, hubungan RPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RPD, proses penyusunan yang melibatkan stakeholder serta sistematika penulisan RPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; adalah bagian yang menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan aspek-aspek tersebut. Gambaran kondisi umum daerah dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian pada tahap perumusan berupa informasi yang relevan dan penting yang menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah dan kebutuhan perumusan strategi.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah; Memuat kinerja keuangan provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022; kebijakan pengelolaan keuangan provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022; kerangka pendanaan dan proyeksi kebutuhan investasi.

Bab IV Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah; menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama dalam arah kebijakan pembangunan, yang menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Bab V Tujuan Dan Sasaran; Memuat tentang tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026, serta cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome serta Indikatornya.

Bab VI Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan; menyajikan arah kebijakan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat evaluasi kewilayahan, analisis kewilayahan dan kebijakan pengembangan wilayah yang merupakan acuan perumusan program prioritas nasional dan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan yang tersebar pada kabupaten/kota dalam jangka menengah.

Bab VII Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program Pembangunan Daerah; Memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan cascading pada bab sebelumnya.

Bab VIII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah; Memuat kerangka pendanaan seluruh program perangkat daerah, dan daftar program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Bab IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Memuat Indikator Kinerja Makro; Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, dan Indikator Standar Pelayanan Minimal.

Bab X Penutup; menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Kaidah pelaksanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dokumen.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak dibagian selatan semenanjung pulau Sulawesi, merupakan salah satu lokasi wilayah yang strategis ditengah-tengah kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mempunyai luas wilayah sekitar 45.704,16 Km^2 dan secara administratif terbagi 21 wilayah Kabupaten, dan 3 wilayah kota. Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah dengan wilayah terluas dengan luasan sebesar 7.518,71 Km^2 atau sebesar 16,45 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan Kota Parepare merupakan daerah dengan wilayah terkecil dengan luasan sebesar 89,69 Km^2 atau 0,19 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara Geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak di antara $0^o12'$ Lintang Selatan -8^o Lintang Selatan dan $116^o48'$ Bujur Timur – $122^o36'$ Bujur Timur, dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar

Gambar II.1.
Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

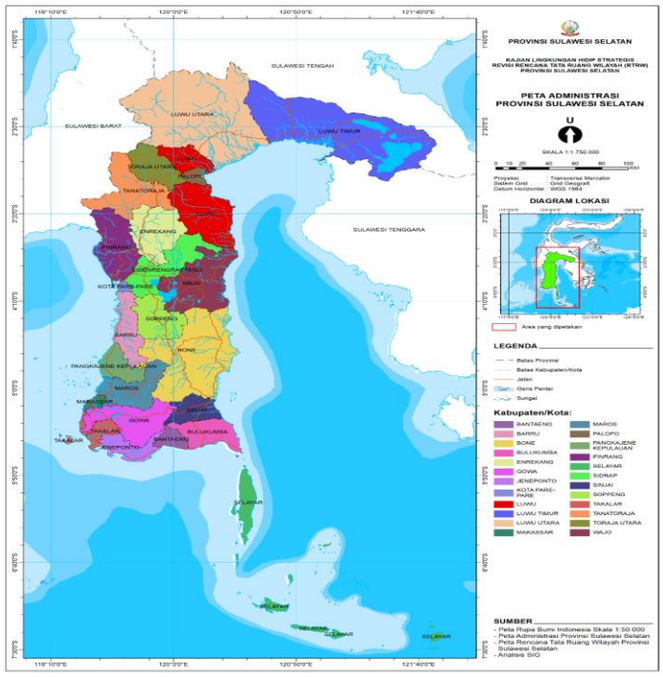

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Posisi geografis tersebut menjadikan Sulawesi Selatan sebagai hub distribusi barang dan jasa dari dan ke timur-barat Indonesia wilayah perdagangan dan jasa, karena posisi Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar merupakan salah satu jalur pelayaran internasional, dan berfungsi sebagai titik simpul transportasi laut dan udara yang menghubungkan Asia Timur dan Benua Australia.

Luasan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau yang menetapkan luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 45.330,55 Km^2 atau seluas 4.533.055 Hektar dengan jumlah penduduk sebesar 9.255.930 jiwa.

Tabel II.1.
Data Wilayah Administrasi Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Km^2	%	
1	Kepulauan Selayar	1.160,36	2,56	140.595
2	Bulukumba	1.175,53	2,59	455.184
3	Bantaeng	390,97	0,86	202.482
4	Jeneponto	796	1,76	416.345
5	Takalar	555,43	1,23	315.636
6	Gowa	1.813	4	774.043
7	Sinjai	865,24	1,91	267.343
8	Maros	1.442,95	3,18	389.580
9	Pangkajene Kepulauan	888,91	1,96	352.949
10	Barru	1.201,9	2,65	190.529
11	Bone	4.567,36	10,08	813.771
12	Soppeng	1.385,55	3,06	236.612
13	Wajo	2.608,71	5,75	400.118
14	Sidenreng Rappang	1.832,3	4,04	321.419
15	Pinrang	1.896,58	4,18	409.089
16	Enrekang	1.806,85	3,99	228.554
17	Luwu	2.902,07	6,4	373.656
18	Tana Toraja	2.043,62	4,51	270.984
19	Luwu Utara	7.422,42	16,37	330.600
20	Luwu Timur	6.745,92	14,88	306.082
21	Toraja Utara	1.289,13	2,84	255.743
22	Makassar	176,85	0,39	1.463.809
23	Pare Pare	89,67	0,2	155.380
24	Palopo	273,24	0,6	183.427
Sulawesi Selatan		**45.330,55**	**100**	**9.255.930**

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.1.1-6117 Tahun 2022

Topografi merupakan salah satu faktor pembatas pemanfaatan ruang untuk pembangunan. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis dan memiliki tingkat erosi yang tinggi yang dipengaruhi oleh kecepatan pengaliran air. Kondisi topografi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya memiliki permukaan yang bervariasi. Provinsi Sulawesi Selatan membentang dari ketinggian antara 0-500 mdpl berupa dataran rendah, 500-1000 mdpl merupakan dataran tinggi dan ketinggian diatas 1000 mdpl merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan.

Berdasarkan tingkat kemiringan, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kemiringan 0-2% menempati luasan terbesar, dimana Kabupaten Wajo mendominasi dalam tingkat kemiringan ini sebesar 203.225 Ha atau sekitar 15,27% dari total luasan dalam tingkat kemiringan 0-2% ini. Kemudian disusul tingkat kemiringan 15-30% dengan dominasi luasan berada di Kabupaten Luwu Utara sebesar 280.873 Ha atau sekitar 22,84% dari total luasan dalam tingkat kemiringan 15-30%. Selanjutnya tingkat kemiringan 5-15% didominasi oleh Kabupaten Luwu Timur dengan 171.832 Ha atau 16,84%. Sementara tingkat kemiringan 30- 40% menempati luasan terkecil.

Tabel II.2.
Kondisi Kemiringan Lereng Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kemiringan Lereng (%)	Luasan	
		Ha	%
1	0 – 2%	1.330.065,30	29,27
2	2 – 5%	406.193,15	8,94
3	5 – 15%	1.019.915,58	22,44
4	15 – 30%	1.229.223,73	27,05
5	30 -40%	264.084,14	5,81
6	> 40%	294.884,78	6,49
Sulawesi Selatan		**4.554.366,68**	**100**

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar II.2.
Peta Kelas Lereng Provinsi Sulawesi Selatan

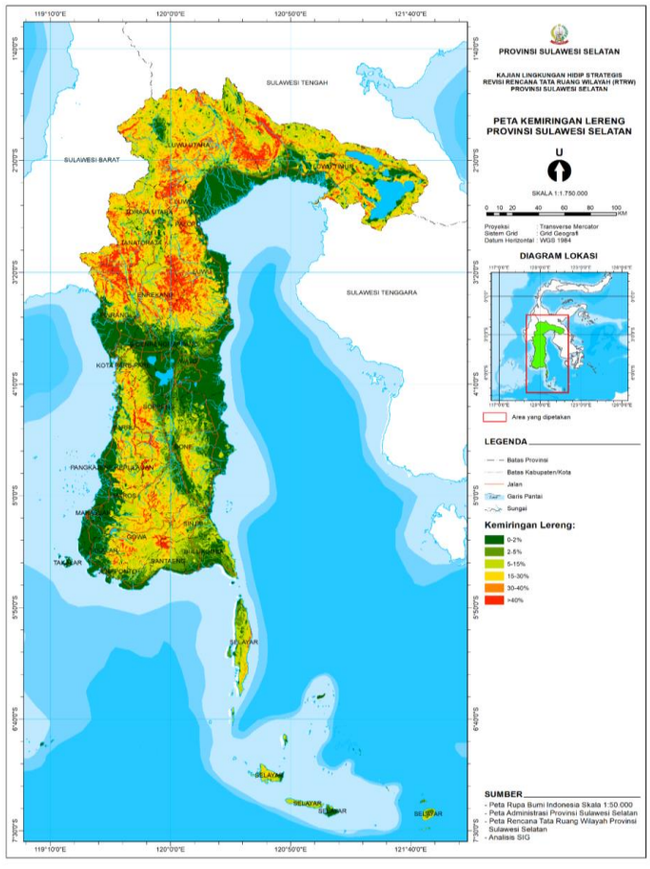

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan kondisi ketinggian lahan, wilayah Sulawesi Selatan terbagi dalam 7 (tujuh) kategori yang didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 0 –

300 mdpl seluas 2.176.516,80 Ha atau sebesar 47,89 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan ketinggian lahan yang paling kecil luasan wilayahnya adalah wilayah dengan ketinggian di atas 2.500 mdpl seluas 20.600,07 Ha atau sebesar 0,45 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan.

Tabel II.3.
Kondisi Topografi di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Elevasi (mdpl)	Luas Wilayah	
		Ha	%
1	-300	2.176.516,80	47,89
2	300 – 500	521.673,90	11,48
3	500 – 1000	759.588,35	16,71
4	1000 -1500	574.747,71	12,65
5	1500 – 2000	355.551,01	7,82
6	2000 – 2500	135.688,83	2,99
7	> 2500	20.600,07	0,45
Sulawesi Selatan		**4.554.366,68**	**100**

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar II.3.
Peta Topografi Provinsi Sulawesi Selatan

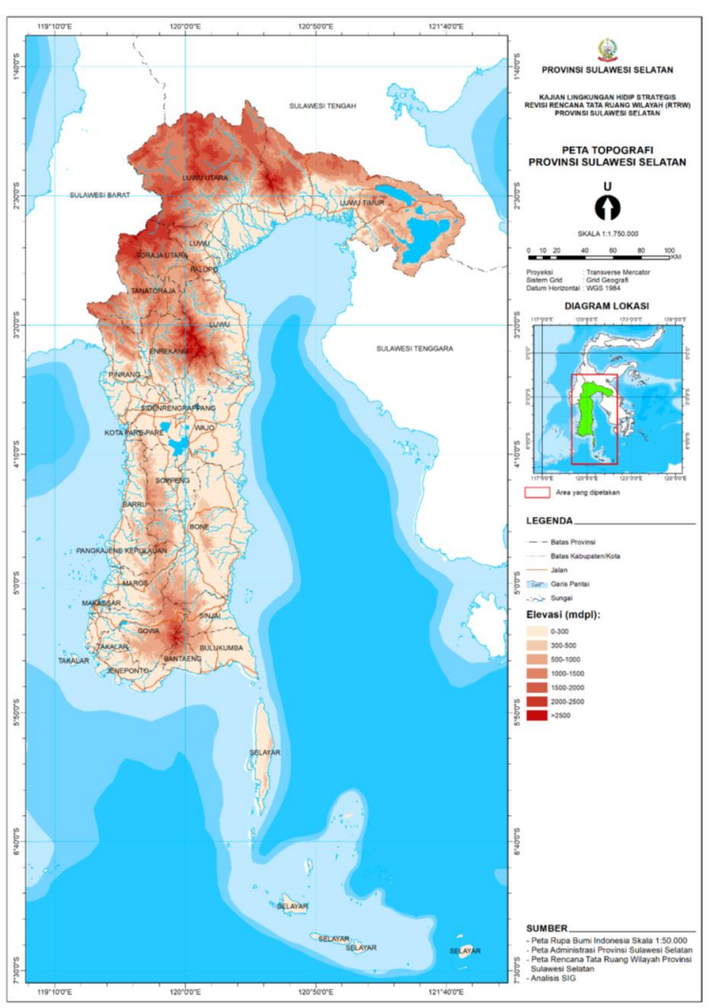

Sumber: Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Kondisi hidrologi Provinsi Sulawesi Selatan sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada di wilayah ini. Kondisi hidrologi

permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 73 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di 24 Kabupaten/kota, diantara DAS tersebut terdapat 2 DAS prioritas dari 15 DAS prioritas nasional yaitu DAS Jeneberang dan DAS Saddang. DAS Saddang merupakan DAS terbesar di Sulawesi Selatan dengan luasan sekitar 649.320 Ha yang melintasi 11 wilayah Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Maros, Pangkajene Kepulauan, Barru, Bone, Soppeng, Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Parepare.

Gambar II.4.
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Selatan

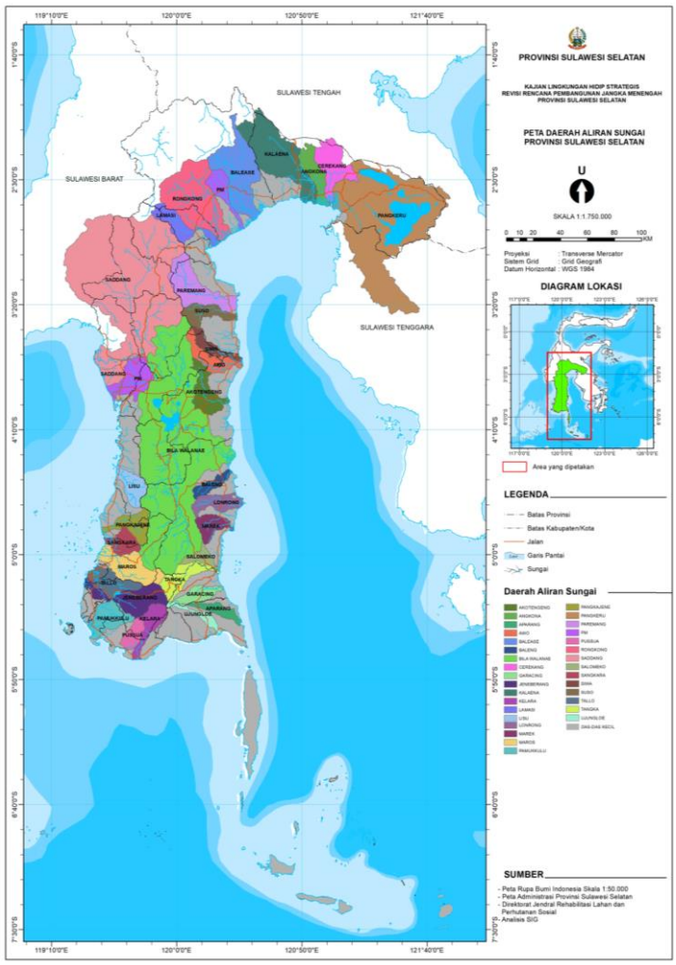

Sumber : KLHS Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan aspek klimatologi, Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan klasifikasi Oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim,yaitu: Tipe Iklim A, Tipe iklim ini dinotasikan sebagai iklim sangat basah dengan curah hujan rata-rata pada iklim tipe A adalah 3500 – 4000 mm/tahun. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Enrekang. Tipe iklim B, Tipe iklim ini dinyatakan sebagai iklim basah dengan curah hujan rata-rata 3000 – 3500 mm/tahun. Wilayah yang memiliki karakteristik iklim basah antara lain, yaitu: Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Bulukumba, dan

Bantaeng. Tipe iklim C, Tipe ini merupakan tipe iklim agak basah, dengan dengan curah hujan rata-rata 2500 – 3000 mm/tahun. Wilayah yang masuk ke dalam iklim C terdiri dari Kabupaten Wajo, Luwu, Tana Toraja, Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkajene Kepulauan, Enrekang, Maros, Makassar, Jeneponto, Sinjai, Gowa, Toraja Utara, Parepare, dan Kepulauan Selayar. Tipe iklim D, Tipe iklim ini memiliki curah hujan rata-rata 2000 – 2500 mm/tahun. Wilayah yang masuk ke dalam tipe iklim D meliputi Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Soppeng, Sinjai, Maros,Bulukumba, Jeneponto, Takalar, Makassar, Pangkajene Kepulauan, dan Gowa. Tipe iklim E, Tipe iklim ini merupakan iklim kering yang memiliki curah hujan rata-rata antara 1500 – 2000 mm/tahun. Tipe iklim E terdapat di Kabupaten Maros, Bone, Enrekang, Kepulauan Selayar, Bantaeng, dan Maros dengan curah hujan rata-rata 2500 – 3000 mm/tahun.

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan proses terbentuknya Pulau Sulawesi, maka terdapat garis sesar gempa memanjang dari perairan kanan dan kiri Pulau Selayar menuju ke utara melewati Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap, bercabang di Kabupaten Enrekang yang merupakan kawasan pengaruh gempa. Garis sesar gempa ini menunjukkan daerah rawan gempa di daerah yang melewatinya dan berpusat di Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara. Selain daripada itu garis sesar di sebelah barat Kabupaten Pinrang dan di sebelah selatan Selat Kota Makassar menyebabkan daerah pantai di Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar serta Kota Makassar rawan terhadap bencana Tsunami.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022, jumlah kejadian bencana di Sulawesi Selatan sebanyak 862 kejadian yang terdiri dari: bencana angin kencang sejumlah 232 kejadian, kebakaran sejumlah 202 kejadian, gempa bumi sejumlah 135 kejadian, banjir sejumlah 104 kejadian, tanah longsor sejumlah 96 kejadian, puting beliung sejumlah 69 kejadian, abrasi sejumlah 10 kejadian, cuaca ekstrim sejumlah 8 kejadian, dan banjir bandang sejumlah 5 kejadian, dan gelombang pasang sejumlah 1 kejadian. Tingkat kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Selatan menurut kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.4.
Kejadian Bencana
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kejadian									
		Banjir	Gelombang Pasang	Tanah Longsor	Banjir Bandang	Cuaca Ekstrim	Gempa Bumi	Kebakaran	Angin Kencang	Putting Beliung	Abrasi
1	Kepulauan Selayar	5	-	2	1	-	16	3	30	2	-
2	Bulukumba	2	1	1	-	-	1	7	8	6	1
3	Bantaeng	1	-	1	-	-	-	6	2	1	1
4	Jeneponto	3	-	2	-	-	-	4	1	8	-
5	Takalar	3	-	-	-	-	-	7	1	8	2
6	Gowa	-	-	5	-	-	-	3	-	-	-
7	Sinjai	3	-	12	-	-	-	1	8	-	-
8	Maros	3	-	1	-	-	-	2	4	5	-
9	Pangkajene	2	-	2	-	-	2	10	27	3	-

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kejadian									
		Banjir	Gelombang Pasang	Tanah Longsor	Banjir Bandang	Cuaca Ekstrim	Gempa Bumi	Kebakaran	Angin Kencang	Putting Beliung	Abrasi
	dan Kepulauan										
10	Barru	3	-	5	-	1	2	10	6	1	3
11	Bone	3	-	7	-	1	7	34	20	15	-
12	Soppeng	1	-	-	-	-	-	3	2	-	-
13	Wajo	9	-	-	-	-	-	11	26	1	1
14	Sidenreng Rappang	6	-	3	-	-	-	18	16	1	-
15	Pinrang	5	-	3	-	1	4	13	21	-	2
16	Enrekang	6	-	13	3	1	1	14	11	1	-
17	Luwu	15	-	6	-	-	1	-	4	3	-
18	Tana Toraja	-	-	17	-	1	-	9	10	6	-
19	Luwu Utara	24	-	1	-	-	6	14	8	2	-
20	Luwu Timur	3	-	3	-	3	90	8	5	-	-
21	Toraja Utara	-	-	8	-	-	3	5	4	3	-
22	Makassar	2	-	-	-	-	-	16	2	2	-
23	Parepare	2	-	3	-	-	2	2	15	-	-
24	Palopo	3	-	1	1	-	-	1	1	1	-
JUMLAH		**104**	**1**	**96**	**5**	**8**	**135**	**202**	**232**	**69**	**10**

Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat bencana di Provinsi Sulawesi Selatan untuk bencana yang sering terjadi di Sulawesi Selatan yakni angin kencang, kebakaran, dan gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Jika diamati pada distribusi peta rawan banjir dan longsor, dapat dilihat gambaran bahwa distribusi spasial kejadian banjir sering terjadi pada daerah-daerah yang relatif datar di seluruh wilayah Kabupaten khususnya di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara. Sedangkan untuk kejadian longsor umumnya terjadi pada morfologi perbukitan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada wilayah Kabupaten Tana Toraja.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi pascabencana dilakukan untuk memacu kembali perkembangan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan jalur evakuasi bencana pada struktur ruang wilayah dan kawasan rawan bencana pada pola ruang wilayah. Berdasarkan arahan peruntukan kawasan permukiman pada RTRWK, maka lokasi potensi relokasi pasca bencana pada Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

Tabel II.5.
Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/ Kota	Risiko Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
1	Kota Makassar	Banjir	Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Ujung Pandang, Biringkanaya, dan Wajo
		Cuaca Ekstrim	
		Tsunami	
2	Kota Parepare	Cuaca Ekstrim	Kel. Kampung Pisang, Kel. Ujung Lare, Kel. Lakessi, Kel. Kampung Baru, Kel. Watang Soreang, Kel. Ujung Bulu, Kel. Tiro Sompe, Kel. Mallusetasi, Kel. Cappa Galung, dan Kel. Ujung Sabbang.
		Longsor	
		Kebakaran	

No.	Kabupaten/ Kota	Risiko Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
3	Kota Palopo	Banjir	Kec. Telluwanua; Kec. Wara, Kec. Wara Selatan, Kec. Wara Barat, Kec. Wara Utara, Kec. Mungkajang, Kec. Sendana
		Longsor	
		Kebakaran	
		Kekeringan	
		Cuaca Ekstrim	
4	Barru	Longsor	Kelurahan Lalolang, Sepe'E, Lompo Riaja, Desa Batupute, dan Desa Nepo
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Kebakaran	
5	Soppeng	Cuaca Ekstrim	Desa Watu dan Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo; Desa Baringeng dan Desa Tetewatu di Kecamatan Lilirilau; Desa Panincong di Kecamatan Marioriawa;
		Gempa	
		Banjir	
		Longsor	
6	Wajo	Banjir	Kelurahan Maroangin, Kec. Pammana, Kelurahan Solo Kec. Bola, Kel. Jalang dan Salo Bulo Kec. Sajoanging, dan Kel. Peneki dan Kel. Botto, Kec. Takkalalla
		Cuaca Ekstrim	
		Gempa	
7	Sidenreng Rappang	Banjir	Desa Kulo, Kec. Kulo; Kaw. Baranti Kec. Baranti; Kaw. Bilokka, Kec. Panca Lautang
		Cuaca Ekstrim	
		Gempa	
8	Enrekang	Longsor	Desa Kalosi, Pana di Kec. Alla; Desa Baba di Kec. Cendana; Desa Kaluppang di Kec. Maiwa; Desa Kotu, Rurah, Cendana, Sossok, Singki di Kec. Anggeraja
		Cuaca Ekstrim	
		Banjir	
		Kebakaran	
9	Pinrang	Longsor	Kawasan Waetuoe, Kec. Lanrisang
		Cuaca Ekstrim	
		Banjir	
		Gempa	
10	Toraja Utara	Longsor	Kawasan Rantebua Sanggalangi, Kec. Rantebua
		Cuaca Ekstrim	
		Kebakaran	
11	Tana Toraja	Longsor	Kec. Makale Utara; Kec. Malimbong Belepe; Kec. Mappak; Kec. Mengkendek; Kec. Rano; Kec. Rantetayo
		Cuaca Ekstrim	
		Kebakaran	
12	Luwu	Longsor	Kec. Latimojong, Kec. Larompong, Kec. Larompong Selatan, Kec. Bajo, Kec. Bajo Barat, Kec. Suli, Kec. Suli Barat, Kec. Bastem, Kec. Bupon, Kec. Bua, Kec. Walenrang Utata, Kec. Walenrang Barat, Kec. Belopa, Kec. Belopa Utara, Kec. Kamanre, Kec. Ponrang, Kec. Ponrang Selatan, Kec. Walenrang Timur, Kec. Lamasi Timur, Kec. Bassesangtempe, Kec. Bassesangtempe Utara
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Abrasi	
13	Luwu Utara	Banjir	Desa Kapidi di Kecamatan Mappedeceng; Desa Pao di Kecamatan Malangke Barat; Desa Baebunta di Kecamatan Baebunta;
		Cuaca Ekstrim	
14	Luwu Timur	Kekeringan	Burau, Wonorejo, Kertoraharjo, Wasuponda, Solo, Kalaena dan Wawondula
		Banjir	
		Longsor	
		Gempa Bumi	
15	Gowa	Longsor	Kaw. Ballabatua, Kec. Bajeng Barat; Kaw. Pencong, Kec. Biring Bulu; Kaw. Ulugalung, Kec. Tompobulu; Kaw. Buki-Buki Kec. Tombolo Pao
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	

No.	Kabupaten/ Kota	Risiko Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
16	Takalar	Tsunami	Kec. Polombangkeng Utara; Kec. Polombangkeng Selatan; Kec. Mappakasunggu; Kec. Galesong Selatan, Kec. Mangarabombang
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
17	Bantaeng	Longsor	Kaw. Bonto Maccini, Kec. Sinoa; Kaw. Bonto Marannu, Kec. Ulu Ere; Kaw. Gantarang Keke, Kec. Gantarang Keke; Kaw. Ulugalung, Kec. Eremerasa
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
18	Bulukumba	Banjir	Kawasan Tanah Beru, Kec. Bontobahari; Kawasan Palampang, Kec. Rilau Ale
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
19	Sinjai	Longsor	Kaw. Manipi, Kec. Sinjai Barat; Kaw. Bulupoddo, Kec. Bulupoddo; Kaw. Bikeru, Kec. Sinjai Selatan
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
20	Bone	Banjir	Lalebbata, Kec. Lamuru; Kaw. Pompanua, Kec. Ajangale; Kaw. Bojo, Kec. Kajuara; Kaw. Appala, Kec. Barebbo; Kaw. Bengo, Kec. Bengo; Kaw. Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge
		Cuaca Ekstrim	
		Kebakaran	
21	Maros	Longsor	Kaw. Ladange; Kaw. Padaelo; Kaw. Samaenre; Kaw. Barugae; dan Kaw. Batu Putih, Kec. Mallawa
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
22	Pangkajene dan Kepulauan	Banjir	Kaw. Balang Lompo, Mattiro Sompe, Mattiro Bone, Kec. Liukang Tupabbiring, Kaw. Biraeng, Bontokio, Kalabbirang, Kec. Minasa Te'ne
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
23	Jeneponto	Banjir	Kec. Bangkala, Kec. Bangkala Barat, Kec. Binamu, Kec. Arungkeke, Kaw. Rumbia, Kec. Rumbia; Kaw. Paitana, Kec. Turatea; Kec. Kelara, Kec. Tamalatea; Kaw. Bontoramba, Kec. Bontoramba
		Cuaca Ekstrim	
		Angin Putting Beliung	
		Kekeringan	
24	Kepulauan Selayar	Longsor	Kaw. Matalalang, Kec. Bontoharu; Kaw. Polebungin, Kec. Bontomanai; Kaw. Buki, Kec. Buki
		Banjir	
		Tsunami	
		Kebakaran	

Sumber : Hasil Analisis RTRW Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan

2.1.3 Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, dimana Jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 sebesar 8.748.052 jiwa meningkat menjadi 9.225.747 jiwa pada Tahun 2022.

Tabel II.6.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kepulauan Selayar	133.315	134.286	137.071	137.974	139.145	0,86

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
2	Bulukumba	416.773	418.627	437.607	440.090	443.292	0,74
3	Bantaeng	186.525	187.472	196.716	197.886	199.399	0,78
4	Jeneponto	361.892	363.755	401.610	405.508	410.639	1,28
5	Takalar	293.136	295.078	300.853	302.695	305.077	0,80
6	Gowa	751.981	761.491	765.836	773.315	783.167	1,29
7	Sinjai	242.127	243.323	259.478	261.366	263.827	0,95
8	Maros	348.682	351.649	391.774	396.924	403.774	1,74
9	Pangkajene dan Kepulauan	331.979	334.597	345.775	348.230	351.426	0,93
10	Barru	173.357	173.965	184.452	185.525	186.910	0,76
11	Bone	751.323	753.694	801.775	806.750	813.188	0,81
12	Soppeng	228.153	228.686	235.167	235.574	236.049	0,21
13	Wajo	400.262	402.323	379.079	379.396	379.706	0,09
14	Sidenreng Rappang	296.684	298.842	319.990	323.194	327.416	1,32
15	Pinrang	374.460	376.784	403.994	407.371	411.795	1,10
16	Enrekang	205.254	206.881	225.172	227.520	230.622	1,38
17	Luwu	360.537	363.754	365.608	367.454	369.820	0,66
18	Tana Toraja	234.529	236.255	280.794	285.179	291.046	2,07
19	Luwu Utara	310.744	313.264	322.919	325.052	327.820	0,86
20	Luwu Timur	289.661	294.288	296.741	300.511	305.521	1,68
21	Toraja Utara	231.686	233.603	261.086	264.145	268.198	1,55
22	Makassar	1.503.664	1.521.091	1.423.877	1.427.619	1.432.189	0,33
23	Pare Pare	143.075	144.446	151.454	152.922	154.854	1,28
24	Palopo	178.253	181.395	184.681	187.331	190.867	1,90
Sulawesi Selatan		**8.748.052**	**8.819.549**	**9.073.509**	**9.139.531**	**9.225.747**	**0,96**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah rumah tangga di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2022 dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,21 persen dengan jumlah rumah tangga pada tahun 2022 mencapai 2.113.231 rumah tangga. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.7.
Jumlah Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kepulauan Selayar	33.713	34.050	34.196	34.490	34.752
2	Bulukumba	101.196	101.748	105.395	106.169	106.885
3	Bantaeng	45.808	46.057	48.114	48.485	48.838
4	Jeneponto	81.885	82.337	90.459	91.614	92.741
5	Takalar	68.368	69.013	69.259	69.810	70.333
6	Gowa	174.763	177.539	174.796	177.043	179.171
7	Sinjai	54.053	54.376	57.301	57.845	58.317
8	Maros	77.851	78.586	86.636	88.145	89.628

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga				
		2018	2019	2020	2021	2022
9	Pangkajene dan Kepulauan	74.390	75.025	76.965	77.678	78.354
10	Barru	41.273	41.440	43.724	44.054	44.373
11	Bone	170.461	171.296	180.185	181.639	182.982
12	Soppeng	56.938	56.994	58.879	59.001	59.090
13	Wajo	95.202	95.443	90.581	90.660	90.662
14	Sidenreng Rappang	70.576	71.248	75.141	76.131	77.101
15	Pinrang	87.152	87.742	93.409	94.434	95.391
16	Enrekang	45.823	46.172	50.164	50.853	51.538
17	Luwu	78.069	78.682	79.284	79.801	80.302
18	Tana Toraja	53.100	53.370	63.837	65.163	66.527
19	Luwu Utara	72.714	73.279	75.480	76.130	76.779
20	Luwu Timur	67.941	69.294	68.382	69.533	70.701
21	Toraja Utara	49.793	50.100	56.315	57.186	58.054
22	Makassar	341.460	345.653	322.223	323.275	324.310
23	Pare Pare	32.100	32.428	33.717	34.146	34.578
24	Palopo	39.444	40.303	40.257	41.023	41.824
Sulawesi Selatan		**2.014.073**	**2.032.175**	**2.074.699**	**2.094.308**	**2.113.231**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Adapun perbandingan rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut kabupaten/kota pada tahun 2022 berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan nilai sebesar 98,73 yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Tabel II.8.
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2022			
		Laki-Laki	Perempuan	Total Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	Kepulauan Selayar	69.362	71.519	140.881	96,98
2	Bulukumba	226.575	237.406	463.981	95,43
3	Bantaeng	101.746	104.448	206.194	97,41
4	Jeneponto	206.124	210.390	416.514	97,97
5	Takalar	156.184	163.532	319.716	95,51
6	Gowa	390.060	397.857	787.917	98,04
7	Sinjai	133.402	135.912	269.314	98,15
8	Maros	195.360	196.129	391.489	99,61
9	Pangkajene dan Kepulauan	173.201	179.897	353.098	96,28
10	Barru	94.251	97.644	191.895	96,52
11	Bone	397.186	416.920	814.106	95,27
12	Soppeng	115.860	124.389	240.249	93,14
13	Wajo	195.372	206.694	402.066	94,52
14	Sidenreng Rappang	158.642	162.973	321.615	97,34
15	Pinrang	202.875	208.517	411.392	97,29
16	Enrekang	116.254	112.462	228.716	103,37
17	Luwu	188.635	186.846	375.481	100,96
18	Tana Toraja	135.762	128.152	263.914	105,94
19	Luwu Utara	167.054	163.680	330.734	102,06
20	Luwu Timur	159.043	149.487	308.530	106,39
21	Toraja Utara	131.022	126.517	257.539	103,56
22	Makassar	727.938	736.463	1.464.401	98,84

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2022			
		Laki-Laki	Perempuan	Total Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
23	Pare Pare	78.321	79.121	157.442	98,99
24	Palopo	91.793	91.768	183.561	100,03
Sulawesi Selatan		**4.612.022**	**4.688.723**	**9.300.745**	**98,73**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2023

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal menuju provinsi yang terkemuka di Indonesia.

RPJMN 2020-2024 mengamanatkan pendekatan pengembangan wilayah melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi 2 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa serta Kota Makassar yang berada pada Pusat kegiatan Nasional (PKN); 2 Kabupaten dan 1 kota yang berada pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kabupaten Barru dan kabupaten Pangkep serta Kota Palopo; dan 5 Kabupaten yang berda pada Pusat Kegiatan Lokal yaitu Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Pinrang, Wajo, dan Soppeng. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW yang berada pada Kabupaten Bone dan Bulukumba, serta pengembangan PKL yang berada di Kabupaten Tana Toraja. Toraja Utara dan Sinjai. Sehingga melalui koridor pengembangan diharapkan terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional dan pola ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya. pembagian pemanfaatan ruang dalam beberapa kawasan sebagaimana terbuat dalam RTRW Provinsi Sulawesi selatan terlihat pada peta berikut.

Gambar II.5.
Pola Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

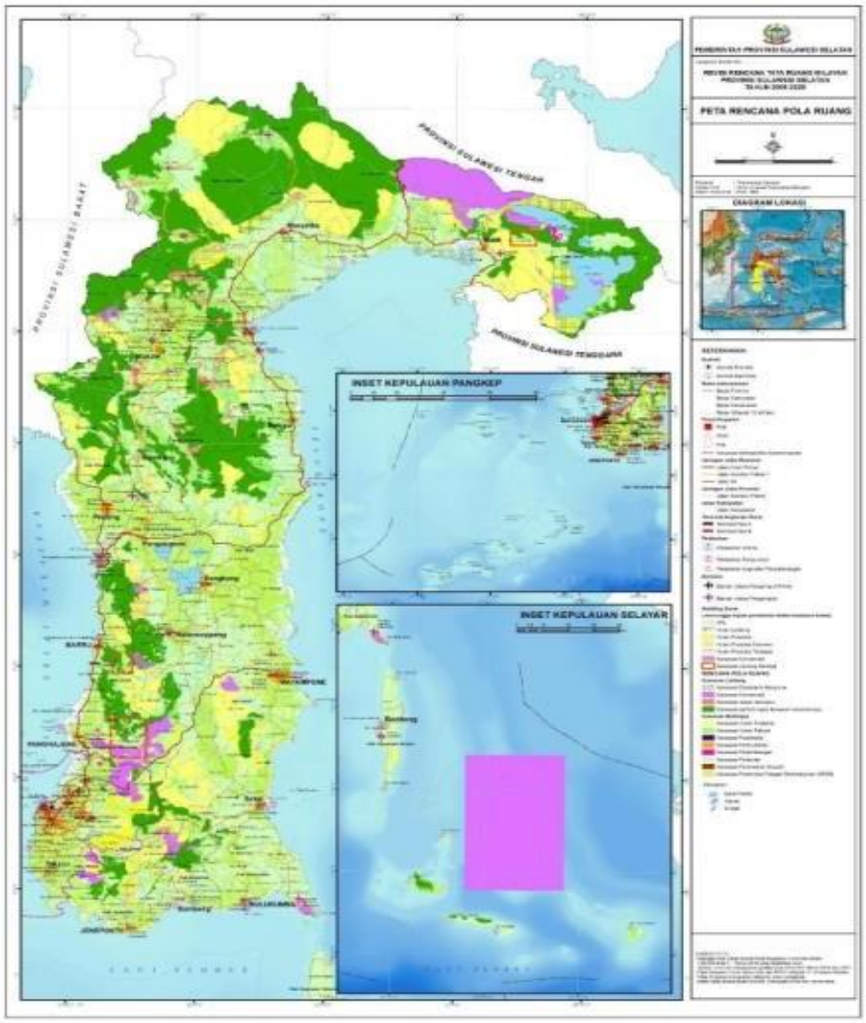

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2022 Tentang RTRWP Prov. Sulsel Tahun 2022-2041

1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah telah menetapkan lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk pengembangan komoditas tanaman pangan di Sulawesi Selatan yaitu lokasi pengembangan komoditas tanaman padi di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Wajo, sedangkan lokasi pengembangan komoditas tanaman jagung yaitu di Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone, Kabupaten Jeneponto dan Kota Palopo; sementara lokasi pengembangan komoditas kedelai yaitu di Kabupaten Jeneponto, Takalar, Gowa, Maros, Bone, Soppeng, dan Wajo; dan lokasi pengembangan komoditas ubi kayu di Kabupaten Bulukumba, Gowa, dan Kabupaten Maros.

Pengembangan komoditas pertanian hortikultura di arahkan, sebagai berikut:

- bawang merah pada Kabupaten Pinrang, Bone, Enrekang, Gowa, Jeneponto, dan Takalar;
- tanaman cabai pada Kabupaten Pinrang, Bone, Maros, Enrekang, dan Takalar;
- tanaman jeruk di Kabupaten Bulukumba, Bantaeng dan Pangkajene Kepulauan;
- perkebunan tebu diprioritaskan di Kabupaten Gowa, Takalar, dan Bone;
- perkebunan kopi di Kabupaten Sinjai, Bantaeng, Jeneponto;
- perkebunan kakao di Kabupaten Bone, Luwu Timur, Soppeng, Wajo, Luwu Utara, Luwu, dan Bulukumba;
- komoditas perkebunan lada di Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Luwu Timur;
- komoditas perkebunan cengkeh di Kabupaten Luwu, Sinjai, Wajo, dan Bone dan Kabupaten Bulukumba.

Sedangkan pengembangan komoditas prioritas peternakan di Sulawesi Selatan, untuk komoditas sapi potong diarahkan lokasinya di Kabupaten Bulukumba, Gowa, Sinjai, Bone, Pangkajene Kepulauan, Barru, Sidenreng Rappang, Wajo, Pinrang dan Maros. Sementara lokasi pengembangan komoditas peternakan sapi perah diarahkan di Kabupaten Enrekang dan lokasi pengembangan komoditas ayam buras diarahkan di Kabupaten Bantaeng.

Memperhatikan kontribusi pertanian terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan sebagai kontibutor utama terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, maka penting untuk menjaga keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Untuk itu dalam RTRWP Sulawesi Selatan ditetapkan keberadaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di 24 Kabupaten/kota dengan luasan 594.367 Hektar yang tersebar seluruh wilayah kabupaten/kota, kecuali Kota Makassar yang terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pangan berkelanjutan.

2. Kawasan Perikanan

Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan Sulawesi Selatan. Pengelolaan kawasan perikanan di Sulawesi Selatan diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan.

Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan dilakukan di perairan laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai meliputi perairan Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa dan Teluk Bone. Sedangkan perikanan budidaya berupa budidaya laut dan budidaya payau tersebar di wilayah perairan kabupaten/kota yaitu Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Pangkep, Barru, Palopo, Luwu, Sinjai, Luwu Timur, Makassar, Luwu Utara, Pinrang, Selayar, Takalar, Wajo, Bone, dan Maros.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan budidaya laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di

Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Barru, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone, Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, dan Kabupaten Pinrang.

Selain kawasan perikanan, pengembangan sumber daya kemaritiman dan kelautan di Sulawesi Selatan juga diarahkan untuk memprioritaskan pengembangan komoditas garam di Kabupaten Jeneponto, Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Kabupaten Takalar.

3. Kawasan Industri

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang menetapkan kawasan industri yang meliputi Kawasan peruntukan industri yang terdapat di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Takalar, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, dan Kota Pare Pare.

4. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusf dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam; wisata budaya dan wisata buatan.

Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Yang terdiri atas kawasan wisata di darat dan kawasan wisata di laut. Arahan pengembangan potensi pariwisata Sulawesi Selatan yang berada dalam kawasan strategis provinsi (KSP) untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi a). Kawasan Eduwisata Pucak di Kabupaten Maros; b). Kawasan agrowisata Bantaeng-Bulukumba-Sinjai; c). Kawasan agrowisata Barru di Kabupaten Barru; d). Kawasan agrowisata Enrekang di Kabupaten Enrekang; e). Kawasan agrowisata Bone-Wajo ; f). Kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan selayar; dan g) Kawasan Wisata Kabupaten Bulukumba dan sekitarnya. Sedangkan KSP untuk kepentingan sosial budaya khususnya kawasan wisata budaya dan agrowisata berada pada Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara dan taman miniatur Sulawesi Selatan dan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (Pasal 64). Pengembangan wisata laut di

Provinsi Sulawesi Selatan tersebar pada kabupaten dan kota yang berada pada wilayah Perairan Selat Makassar, Teluk Pare-Pare, Laut Flores dan Teluk Bone dengan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk usaha wisata edukasi, usaha wisata dayung, usaha wisata selam, usaha kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha jasa perjalanan wisata, usaha wisata snorkeling, usaha wisata tontonan, usaha wisata berenang, dan usaha wisata alam perairan.

5. Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan di Sulawesi Selatan berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang, meliputi: Sistem perkotaan nasional berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah, dan sistem perkotaan provinsi berupa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan Kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang terdiri atas: a. seluruh Wilayah Kota Makassar; b. seluruh Wilayah Kabupaten Takalar; c. sebagian Wilayah Kabupaten Gowa yang mencakup 11 (sebelas) Wilayah kecamatan meliputi Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo Selatan; dan d. sebagian Wilayah Kabupaten Maros yang mencakup 12 (dua belas) Wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale, Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncong Loe, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Cenrana. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi : a) Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan; b) Kawasan Perkotaan Jeneponto Kabupaten Jeneponto; c) Kota Palopo; d) Kawasan Perkotaan Watampone Kabupaten Bone; e) Kawasan Perkotaan Bulukumba Kabupaten Bulukumba; f) Kawasan Perkotaan Barru Kabupaten Barru; dan g) Kota Pare Pare.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi: a. Kawasan Perkotaan Bantaeng sebagai ibu kota Kabupaten Bantaeng; b. Kawasan Perkotaan Enrekang sebagai ibu kota Kabupaten Enrekang; c. Kawasan Perkotaan Masamba sebagai ibu kota Kabupaten Luwu Utara; d. Kawasan Perkotaan Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu; e. Kawasan Perkotaan Malili sebagai ibu kota Kabupaten Luwu Timur; f. Kawasan Perkotaan Pinrang sebagai ibu kota Kabupaten Pinrang; g. Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai ibu kota Kabupaten Sidenreng Rappang; h. Kawasan Perkotaan Benteng sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar; i. Kawasan Perkotaan Sinjai sebagai ibu kota Kabupaten Sinjai; j. Kawasan Perkotaan Watansoppeng sebagai ibu kota Kabupaten Soppeng; k. Kawasan Perkotaan Makale sebagai ibu kota Kabupaten Tana Toraja; l. Kawasan Perkotaan Rantepao sebagai ibu kota Kabupaten Toraja Utara; m. Kawasan Perkotaan Sengkang sebagai ibu kota Kabupaten Wajo; n.

Kawasan Perkotaan Siwa Kabupaten Wajo; o. Kawasan Perkotaan Batusitanduk Kabupaten Luwu; dan p. Kawasan Perkotaan Palattae Kabupaten Bone.

Tabel II.9.
Arahan Pengembangan Wilayah di Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/ Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
1	Kepulauan Selayar			Kawasan Perkotaan Benteng. Sektor unggulan agrion dustri dan perikanan
2	Bulukumba		Kawasan Perkotaan Bulukumba. Sektor unggulan Agroindustri, Pertanian, Pariwisata dan Perikanan	
3	Bantaeng			Kawasan Perkotaan Bantaeng. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
4	Jeneponto		Kawasan Perkotaan Jeneponto. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	
5	Takalar	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
6	Gowa	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
7	Sinjai			Kawasan Sinjai. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
8	Maros	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
9	Pangkep		Kawasan Perkotaan Pangkejene. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan dan Pariwisata	
10	Barru		Kawasan Perkotaan Barru. Sektor unggulan Agroindustri, perikanan, pertanian dan perkebunan	
11	Bone		Kawasan Perkotaan Watampone. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan dan Pertanian	
12	Soppeng			Kawasan Perkotaan Watansoppeng. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
13	Wajo			Kawasan Perkotaan

No.	Kabupaten/ Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
				Sengkang. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
				Kawasan Perkotaan Siwa Sektor Unggulan
14	Sidrap			Kawasan Perkotaan Pangkajene. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
15	Pinrang			Kawasan Perkotaan Pinrang. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
16	Enrekang			Kawasan Perkotaan Enrekang. Sektor unggulan pertanian dan perdagangan dan jasa
17	Luwu			Kawasan Perkotaan Batusitanduk. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
				Kawasan Perkotaan Belopa Sektor Unggulan
18	Tana Toraja			Kawasan Perkotaan Makale. Sektor unggulan perdagangan dan jasa dan pariwisata
19	Luwu Utara			Kawasan Perkotaan Masamba. Sektor unggulan Agropolitan dan Agroindustri
20	Luwu Timur			Kawasan Perkotaan Malili. Sektor unggulan agroindustri
21	Toraja Utara			Kawasan Perkotaan Rantepao Sektor Unggulan Perdagangan dan Jasa
22	Makassar	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
23	Pare Pare		Parepare. Sektor unggulan Agroindustri, Perdagangan dan Jasa	
24	Palopo		Palopo. Sektor unggulan Agroindustri, Perkebunan, Pertanian	

Sumber : RTRWN dan Revisi RTRWP Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami tren penurunan. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan

mencapai 7,04 persen, laju pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga tahun 2020 yaitu sebesar -0,71 persen. Angka pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah bagi Sulawesi Selatan. Pandemi Covid-19 yang melanda sejak akhir 2019 menjadi pemicu utama melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 4,64 persen pada tahun 2021, mencapai target yang ditetapan sebesar 4,10-5,5 persen. Hal ini menunjukkan mulai terjadinya pemulihan ekonomi secara signifikan dalam masa pandemic covid-19. Ekonomi Sulawesi Selatan Kumulatif selama tahun 2022 terhadap tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,09 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,64 persen. Pertumbuhan Positif terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 22,33 persen diikuti Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 17,74 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 14,69 persen; Jasa Perusahaan sebesar 14,16 persen. Dibandingkan dengan ekonomi Indonesia tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan lebih baik sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen.

Tabel II.10.
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	7,04	6,91	-0,71	4,64	5,09
Nasional	%	5,17	5,02	-2,07	3,7	5,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Grafik II. 1.
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022

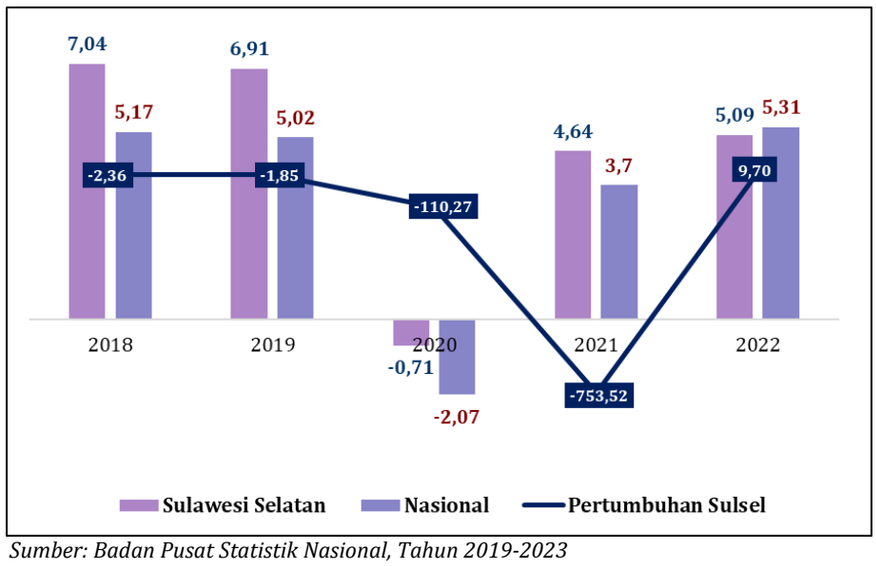

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Dibandingkan dengan provinsi lain pada wilayah setaranya pada level menengah, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih lebih baik daripada

Provinsi Kalimantan Barat, Banten, dan Bali. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 2.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022

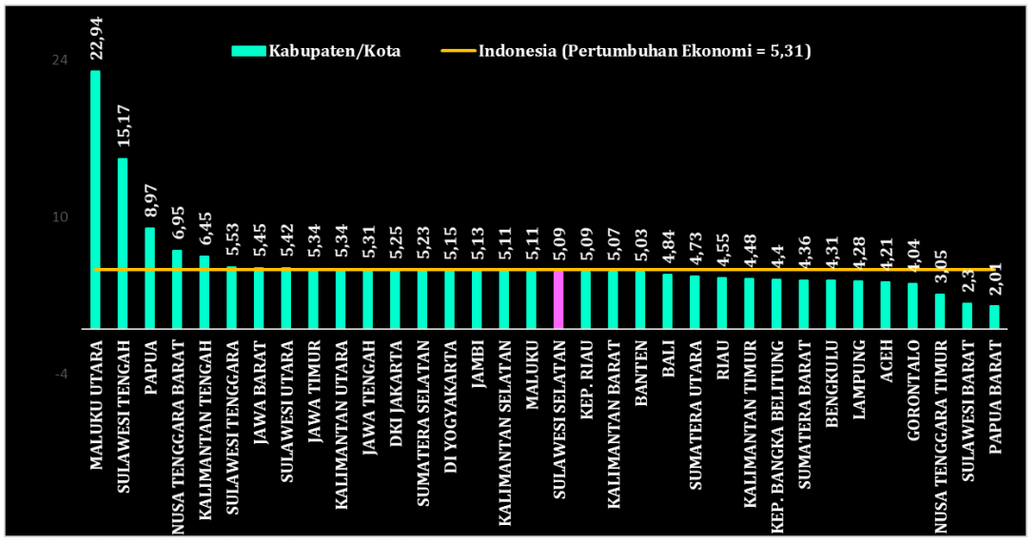

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Sulawesi Selatan berkontribusi sebesar 3,16 persen terhadap perekonomian nasional tahun 2022. Sedangkan seluruh provinsi pada Regional Sulawesi memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 7,03 persen dengan pertumbuhan sebesar 7,05 persen. Perbandingan pertumbuhan ekonomi wilayah regional sulawesi tahun 2022 disajikan pada grafik berikut.

Diagram II.1.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Regional Sulawesi Tahun 2022

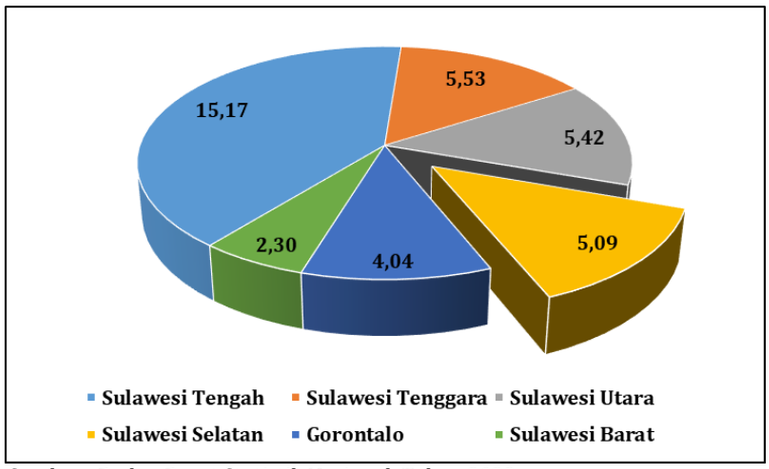

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2022 di Kabupaten Bantaeng sebesar 15,45 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten Luwu Timur sebesar 1,99 persen. Kota Makassar berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 34,47 persen, sedangkan Kabupaten Kepulauan Selayar berkontribusi

paling rendah sebesar 1,23 persen. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.11.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kep. Selayar	8,75	7,68	-1,78	4,02	3,67
2	Bulukumba	5,05	5,49	0,43	4,76	3,81
3	Bantaeng	8,13	10,75	0,52	8,86	15,45
4	Jeneponto	6,29	5,47	0,16	5,4	3,81
5	Takalar	6,66	6,87	-0,61	5,05	4,64
6	Gowa	7,14	7,46	1,76	7,26	4,59
7	Sinjai	7,44	6,12	1,55	5,23	4,87
8	Maros	6,19	1,24	-10,87	1,36	9,13
9	Pangkep	4,76	6,41	-1,69	3,46	4,93
10	Barru	7,11	7,41	0,87	4,77	5,11
11	Bone	8,91	7,01	-0,25	5,53	5,23
12	Soppeng	8,11	7,69	2,19	6,15	6,18
13	Wajo	1,08	4,06	-1,17	6,77	2,38
14	Sidrap	5,02	4,65	-0,59	5,54	4,86
15	Pinrang	6,91	6,53	0,44	5,04	4,52
16	Enrekang	3,26	5,43	1,25	6,36	3,71
17	Luwu	6,86	6,26	1.3	6,03	5,69
18	Tana Toraja	7,89	7,22	-0,28	5,19	5,12
19	Luwu Utara	8,39	7,11	-0,59	3,9	4,54
20	Luwu Timur	3,39	1,17	1,46	-1,39	1,99
21	Toraja Utara	8,07	7,56	0,17	4,05	5,27
22	Makassar	8,42	8,79	-1,27	4,47	5,4
23	Parepare	5,58	6,65	-0,08	4,41	5,93
24	Palopo	7,52	6,75	0,45	5,41	5,83
Sulawesi Selatan		**7,04**	**6,91**	**-0,71**	**4,64**	**5,09**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Berdasarkan sektor lapangan usaha sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2022 berasal dari sektor transportasi dan pergudangan sebesar 22,23 persen. Sektor lain yang juga cukup baik pertumbuhannya pada tahun 2022 adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,74 persen. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.12.
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Lapangan Usaha
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Sektor Lapangan Usaha		Pertumbuhan PDRB				
		2018	2019	2020	2021	2022
a	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,22	2,78	-0,71	6,4	2,29
b	Pertambangan dan Penggalian	1,11	2,68	0,54	-0,59	0,32
c	Industri Pengolahan	0,94	9,92	-4,57	3,02	9,86
d	Pengadaan Listrik dan Gas	7,26	6,21	2,59	10,87	14,69
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,49	1,73	6,61	4,07	6,48
f	Konstruksi	8,55	8,92	1,56	4,14	1,59
g	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	11,53	9,04	-3,07	6,5	6,55

Sektor Lapangan Usaha		Pertumbuhan PDRB				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Mobil dan Sepeda					
h	Transportasi dan Pergudangan	10,32	1,74	-21,46	5,17	22,23
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,71	6,42	-13,68	2,96	17,74
j	Informasi dan Komunikasi	11,99	10,99	10,84	6,39	5,25
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,67	4	2,43	1,14	1,15
l	Real Estat	4,63	5,42	3,79	2,58	3,86
m,n	Jasa Perusahaan	10,02	10,53	-10,05	6,23	14,16
o	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	9,96	9,98	-0,04	2,92	1,99
P	Jasa Pendidikan	9,77	6,93	5,73	3,67	2,38
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,59	8,05	10,06	7,77	8,64
r,s,t,u	Jasa Lainnya	13,13	9,73	-12,02	7,56	9,56
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**7,04**	**6,91**	**-0,71**	**4,64**	**5,09**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Grafik II. 3.
Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Lapangan Usaha
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

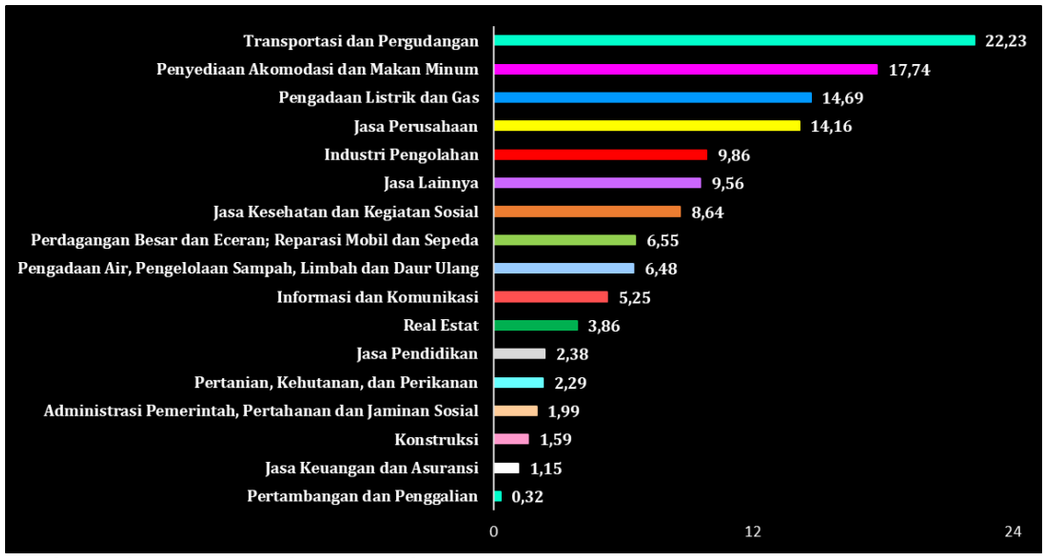

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Nilai PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp.360,87 Triliun, nilai tertinggi berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.71,97 Triliun, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2,29 persen, setelah mengalami kontraksi sebesar -0,71 persen pada tahun 2020. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.13.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Nilai PDRB-ADHK (Triliun Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	64,84	66,62	66,14	70,37	71,97
Pertambangan dan Galian	16,79	17,24	17,33	17,23	17,28
Industri Pengolahan	40,79	44,83	42,78	44,07	48,42
Pengadaan Listrik dan Gas	0,29	0,31	0,32	0,35	0,4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,36	0,37	0,39	0,41	0,44
Konstruksi	37,85	41,23	41,88	43,61	44,3
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	47,13	51,38	49,8	53,04	56,5
Transportasi dan Pergudangan	11,78	11,98	9,41	9,9	12,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,61	4,91	4,24	4,36	5,13
Informasi dan Komunikasi	21,03	23,34	25,87	27,52	28,97
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,75	11,19	11,46	11,59	11,72
Real Estate	10,7	11,28	11,7	12,01	12,47
Jasa Perusahaan	1,36	1,51	1,36	1,44	1,64
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	13,11	14,42	14,42	14,84	15,13
Jasa Pendidikan	17,22	18,41	19,47	20,18	20,75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,21	6,71	7,38	7,96	8,64
Jasa Lainnya	4,37	4,79	4,22	4,53	4,97
Total PDRB (ADHK)	**309,20**	**330,51**	**328,15**	**343,40**	**360,87**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 menunjukkan nilai Rp. 605,14 Triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp. 59,91 Triliun dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan, kontribusi terbesar berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.14.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Nilai PDRB-ADHB (Trilyun Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	103,96	107,66	109,46	122,97	133,72
Pertambangan dan Galian	22,17	23,3	23,54	25,9	30,87
Industri Pengolahan	59,45	66,43	64,32	68,14	78,09
Pengadaan Listrik dan Gas	0,3	0,32	0,32	0,37	0,43
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,46	0,48	0,51	0,54	0,59
Konstruksi	62,57	71,16	72,42	78,56	84,72
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	66,44	74,62	72,98	79,49	88,6
Transportasi dan Pergudangan	19,76	21,21	15,48	16,74	24,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,53	7,13	6,30	6,56	7,99
Informasi dan Komunikasi	22,78	25,49	28,31	30,3	32,34

Lapangan Usaha	Nilai PDRB-ADHB (Trilyun Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jasa Keuangan dan Asuransi	17,28	18,43	18,91	19,79	21,68
Real Estate	17,14	18,41	19,21	19,75	21,12
Jasa Perusahaan	2,11	2,37	2,18	2,35	2,8
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	20,65	23,33	23,75	24,67	25,33
Jasa Pendidikan	24,43	26,54	28,24	29,21	30,61
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,19	10,16	11,64	12,8	14,04
Jasa Lainnya	6,51	7,29	6,48	7,07	8,05
Total Nilai PDRB	**461,72**	**504,32**	**504,06**	**545,17**	**605,14**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 masih didominasi oleh empat lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,1 persen); Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,64 persen); Konstruksi (14 persen); serta Industri Pengolahan (12,9 persen). Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 63,64 persen. Persentase kontribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.15.
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Nilai PDRB-ADHB (Trilyun Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,77	21,35	21,72	22,55	22,1
Pertambangan dan Galian	4,86	4,62	4,67	4,75	5,1
Industri Pengolahan	13,02	13,17	12,76	12,5	12,9
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,09	0,1	0,1	0,1
Konstruksi	13,7	14,11	14,37	14,41	14
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,55	14,8	14,48	14,58	14,64
Transportasi dan Pergudangan	4,33	4,21	3,07	3,07	3,99
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,43	1,41	1,25	1,2	1,32
Informasi dan Komunikasi	4,99	5,05	5,62	5,56	5,35
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,78	3,65	3,75	3,63	3,58
Real Estate	3,75	3,65	3,81	3,62	3,49
Jasa Perusahaan	0,46	0,47	0,43	0,43	0,46
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	4,52	4,63	4,71	4,53	4,19
Jasa Pendidikan	5,35	5,26	5,6	5,36	5,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,36	2,02	2,31	2,35	2,32
Jasa Lainnya	0,96	1,45	1,29	1,3	1,33
Total Kontribusi PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus, nainya harga barang dan jas tersebut menyebabkan turunnya nilai uang sehingga infalsi dapat juga diartikan sebagai menurunnya nilai uang terhadap nilai barang dan jasa tertentu. Laju inflasi nasional sejak tahun 2018 hingga 2020 terus mengalami penurunan, namun laju inflasi mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 2022. Pada Desember 2022, gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan mengalami inflasi year on year sebesar 5,77 persen dengan Indeks Harga konsumen (IHK) sebesar 114,14 dari 5 kota IHK tercatat seluruh kota (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare dan Palopo) mengalami inflasi year on year. Inflasi year on year tertinggi terjadi di Kota Parepare sebesar 6,66 persen sedangkan inflasi year on year terendah terjadi di Bulukumba sebesar 4,12 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,95 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,21 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,83 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,04 persen; kelompok transportasi sebesar 16,72 persen; kelompok rekreasi, budaya dan olahraga sebesar 2,86 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,49 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,60 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada Desember 2022, antara lain bensin, angkutan udara, telur ayam ras, beras, rokok kretek filter, kontrak rumah, bawang merah, kue kering berminyak, tomat, dan sabun detergen bubuk/cair. Gambaran perkembangan Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.16.
Perbandingan Laju Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022

Laju Inflasi	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	3,50	2,35	2,04	2,40	5,77
Nasional	%	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

2.2.1.3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan indikator yang menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi penduduk ditahun tertentu. Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 605,14 triliun dan PDRB Perkapita mencapai Rp 65,59 juta. Sejak tahun 2018 hingga 2019 PDRB perkapita ADHB menunjukkan peningkatan, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,64 persen dari tahun sebelumnya, namun tahun 2021 hingga 2022 kembali

mengalami peningkatan sebesar 9,96 persen. Kondisi ini seiring dengan mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi yang telah mengalami penyesuaian terhadap kondisi covid 19 yang masih berlangsung hingga tahun 2021 ini. Perbandingan PDRB Perkapita dan PDB Nasional tahun 2018 hingga 2022 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.17.
PDRB PerKapita dan PDB Perkapita (ADHB)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi						
PDRB Perkapita (ADHB)	Juta	52,64	57,18	55,67	59,65	65,59
PDRB Perkapita (ADHK)	Juta	35,24	37,47	36,25	37,57	39,11
Nasional						
PDB Perkapita (ADHB)	Juta	55,99	59,32	57,29	62,26	71,03
PDB Perkapita (ADHK)	Juta	39,34	41,02	39,78	40,78	42,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

PDRB Perkapita (ADHK) Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan provinsi lain pada Regional Sulawesi pada tahun 2022 menduduki peringkat kedua setelah Sulawesi Tengah. Capaian laju pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK) Sulawesi Selatan dan Regional Sulawesi tahun 2022 disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 4.
Perbandingan PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita
Wilayah Regional Sulawesi Tahun 2022

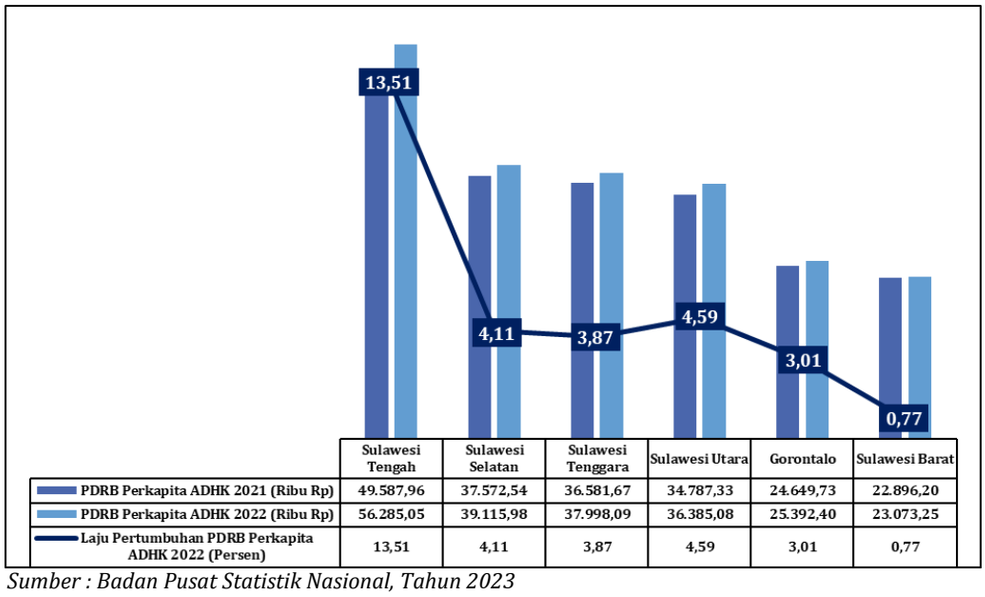

	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Utara	Gorontalo	Sulawesi Barat
PDRB Perkapita ADHK 2021 (Ribu Rp)	49.587,96	37.572,54	36.581,67	34.787,33	24.649,73	22.896,20
PDRB Perkapita ADHK 2022 (Ribu Rp)	56.285,05	39.115,98	37.998,09	36.385,08	25.392,40	23.073,25
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK 2022 (Persen)	13,51	4,11	3,87	4,59	3,01	0,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

2.2.1.4. Indeks Gini

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk diukur dengan Indeks Gini. Sejak September 2019, Indeks Gini Sulawesi Selatan terus mengalami

penurunan hingga September 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di Sulawesi Selatan. Indeks Gini pada periode September 2022 sebesar 0,365 menurun sebesar 0,412 poin dibanding Indeks Gini September 2021 serta mengalami persentase penurunan tertinggi selama periode 2019 hingga 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Selatan. Jika dilihat berdasarkan daerah, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar 0,378 lebih tinggi dibanding tingkat ketimpangan penduduk pedesaan sebesar 0,324. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.18.
Perkembangan Indeks Gini
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indeks Gini	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Perkotaan	Indeks	0,391	0,393	0,384	0,387	0,378
Perdesaan	Indeks	0,353	0,354	0,352	0,334	0,324
Perkotaan + Perdesaan	Indeks	0,388	0,391	0,382	0,377	0,365

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2019-2023

Mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga 2022 capaian Indeks Gini Sulawesi Selatan lebih baik daripada Indeks Gini Nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 5.
Perkembangan Indeks Gini Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022

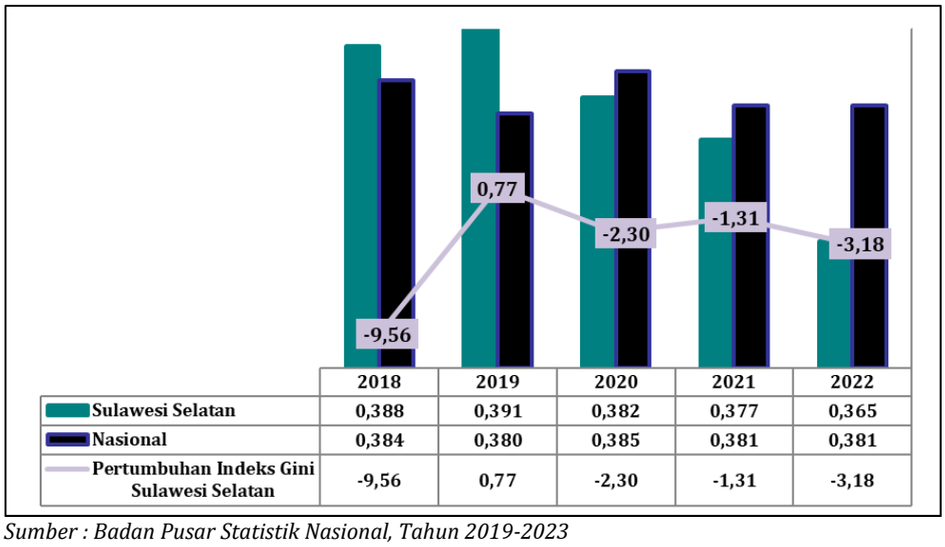

	2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	0,388	0,391	0,382	0,377	0,365
Nasional	0,384	0,380	0,385	0,381	0,381
Pertumbuhan Indeks Gini Sulawesi Selatan	-9,56	0,77	-2,30	-1,31	-3,18

Sumber : Badan Pusar Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Capaian Indeks Gini Sulawesi Selatan yang berada pada level rendah masih lebih baik dibandingkan 11 Provinsi lain pada wilayah setaranya yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB, Banten, Papua Barat, Papua, DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo dan DI.Yogyakarta. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 6.
Perbandingan Indeks Gini
Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022

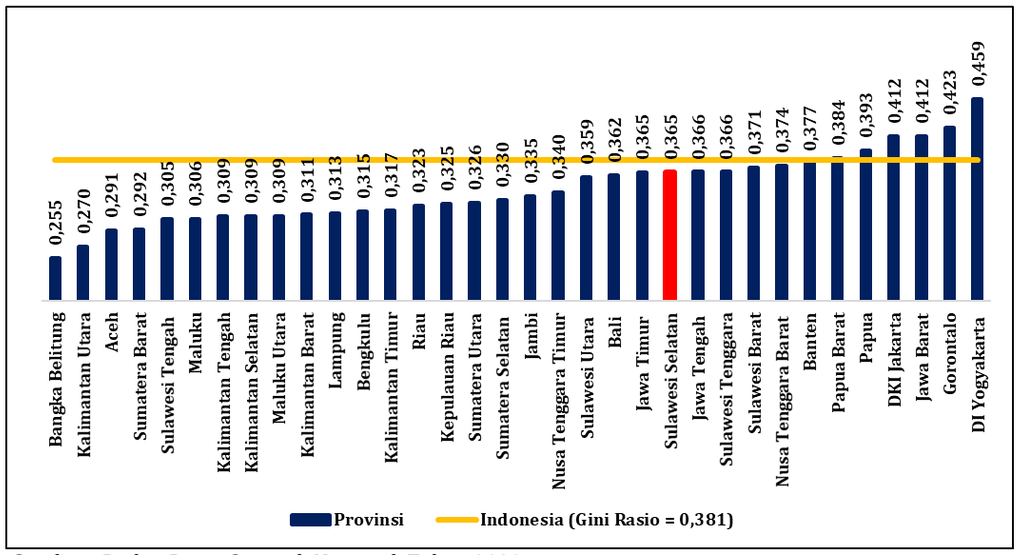

Sumber : Badan Pusar Statistik Nasional, Tahun 2023

Sedangkan jika dibandingkan dengan provinsi lain pada Regional Sulawesi, capaian Indeks Gini Sulawesi Selatan masih lebih baik daripada Sulawesi Tenggara (0,366), Sulawesi Barat (0,371), dan Gorontalo (0,423). Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Diagram II. 2.
Perbandingan Indeks Gini Wilayah Regional Sulawesi
Tahun 2022

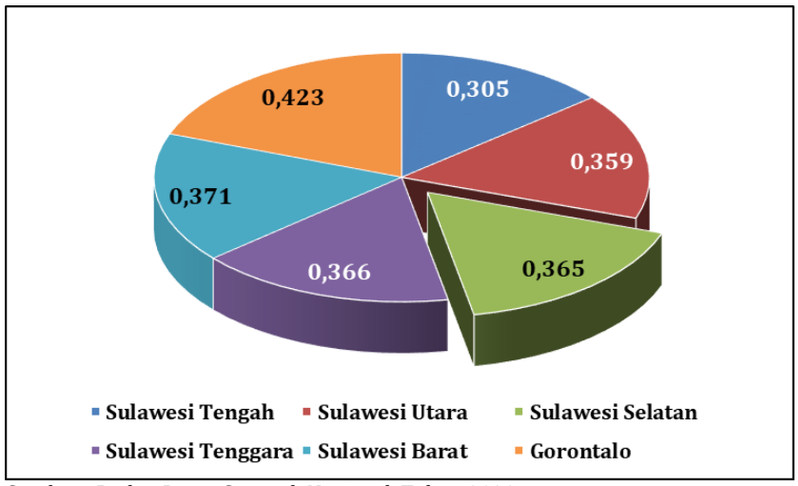

Sumber : Badan Pusar Statistik Nasional, Tahun 2023

Tahun 2022 Indeks Gini Kabupaten Takalar, Wajo, Barru, Gowa, dan Kota Palopo mengalami pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya yang menggambarkan terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 ketimpangan pendapataan tertinggi di Kota Makassar dengan capaian indeks sebesar 0,395 mengalami pertumbuhan negatif atau penurunan sebesar -1,27 dari tahun 2021. Sedangkan Kabupaten Bantaeng merupakan wilayah dengan nilai indek ketimpangan terendah dengan capaian 0,320 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,75 dari tahun 2021. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 7.
Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

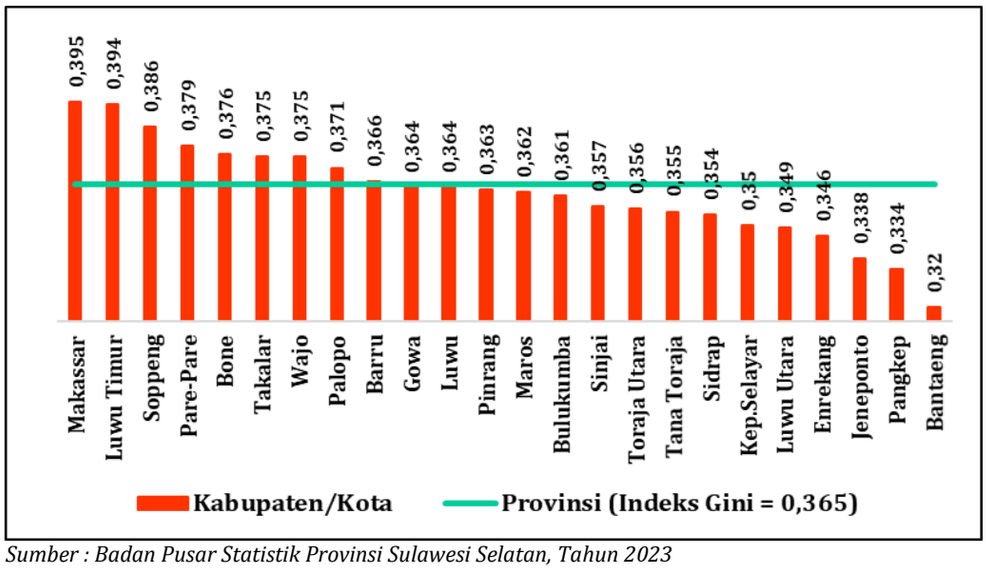

Sumber : Badan Pusar Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.2.1.5. Indeks Williamson

Indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pendekatan yang digunakan mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita masing-masing kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Nilai Indeks Williamson tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren penurunan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 0,567 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 0,01 poin. Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan membuka akses wilayah terisolir di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu sektor pendorong yang dapat menurunkan Indeks Williamson, data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.19.
Indeks Williamson
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Williamson	Nilai	0,622	0,639	0,620	0,568	0,567

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.6. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 8,66 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan meningkat 0,13 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 782,32 ribu orang, bertambah sebanyak 4,9 ribu orang terhadap Maret 2021 dan bertambah sebanyak 16,86 ribu orang terhadap September 2021. Tingkat kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan tren penurunan, namun berbeda dengan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan yang berfluktuasi pada periode September

2018 hingga 2022, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Secara umum, pada periode September 2018 hingga September 2019, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan mengalami penurunan sebesar -3,49 poin, namun pada tahun 2020 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Tahun 2021 tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan kembali mengalami penurunan sebesar -5,12 poin seiring dengan pemulihan ekonomi, namun pada tahun 2022 tingkat kemiskinan kembali mengalami peningkatan sebesar 1,52 poin dari tahun 2021. Data selengkapnya disajikan pada tabel dan grafik berikut.

Tabel II.20.
Tingkat Kemiskinan
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	8,87	8,56	8,99	8,53	8,66
Nasional	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Grafik II. 8.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

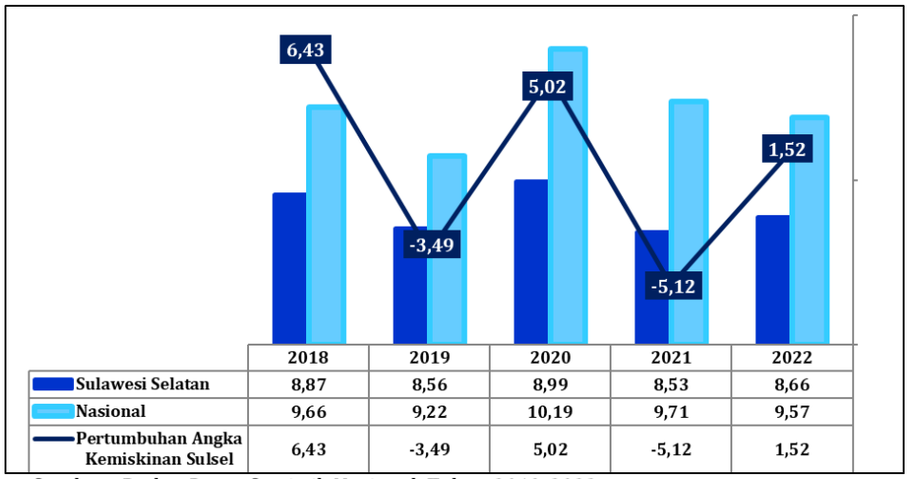

Sumber : Badan Pusar Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Grafik II. 9.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan
Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022

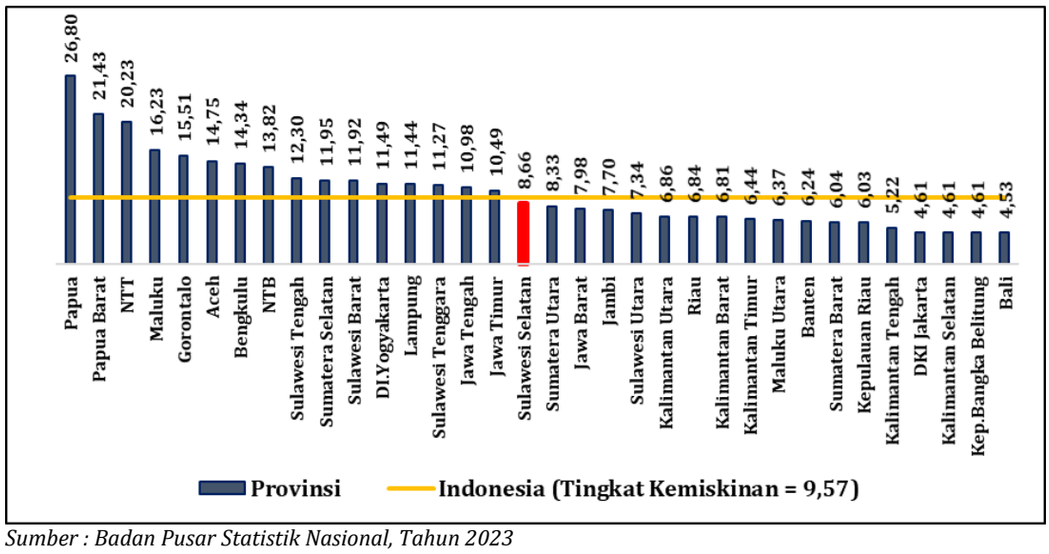

Sumber : Badan Pusar Statistik Nasional, Tahun 2023

Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan periode September tahun 2022 jika dibandingkan dengan wilayah setaranya pada level menengah menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dibanding 5 provinsi lainnya, namun lebih baik dibanding Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Lampung dan DI.Yogyakarta.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 tertinggi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 13,92 persen dengan jumlah penduduk miskin sejumlah 47.530 jiwa mengalami penurunan sebesar -2,52 persen dari tahun 2021. Sedangkan persentase penduduk miskin terendah di Kota Makassar dengan jumlah penduduk miskin 71.830 jiwa mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar -4,98 persen. Gambaran tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 10.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan
Periode Maret Tahun 2022

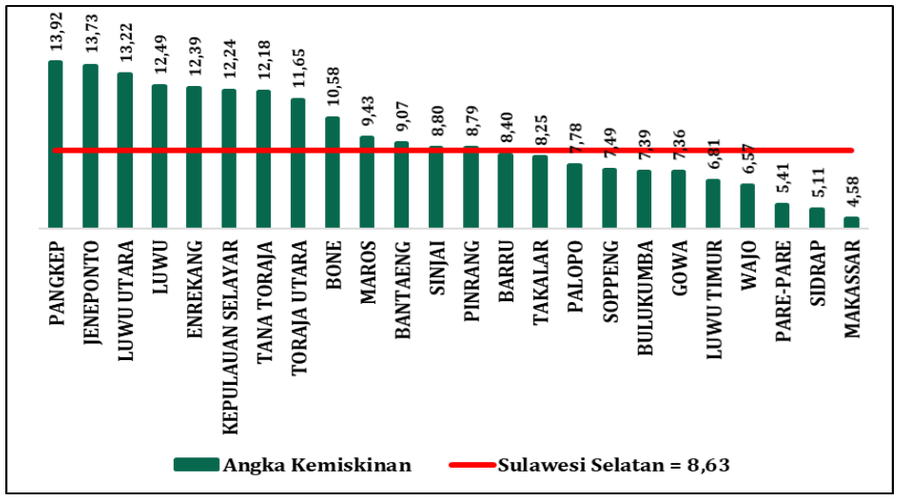

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan pada September 2022 adalah sebesar Rp.422.952,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,80 persen. Sementara jika dibandingkan September 2021, terjadi kenaikan sebesar 10,01 persen. Perkembangan garis kemiskinan tahun 2018 hingga tahun 2022 yang merupakan representasi jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel II.21.
Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan						
Perkotaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	327.725	354.770	375.463	403.751	443.717
Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	306.250	331.063	350.791	368.465	405.213
Perkotaan + Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	315.738	341.555	362.031	384.455	422.952
Garis Kemiskinan Nasional						
Perkotaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	425.770	458.380	475.477	502.730	552.349
Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	392.154	428.515	437.902	464.474	513.170
Perkotaan + Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	410.670	440.538	458.947	486.168	535.547

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Tabel II.22.
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	91,13	91,44	91,01	91,47	91,34
Nasional	%	90,34	90,78	89,81	90,29	90,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada periode Maret 2022 hingga

September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 1,50 mengalami peningkatan dibandingkan Maret 2022 sebesar 1,36. Berdasarkan wilayah, indeks kedalaman kemiskinan pada wilayah perdesaan sebesar 2,13 lebih tinggi dari pada perkotaan sebesar 0,76 pada September 2022. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.23.
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	1,68	1,63	1,65	1,40	1,50
Perkotaan	0,56	0,81	0,81	0,63	0,76
Perdesaan	2,52	2,26	2,32	2,04	2,13
Nasional	1,63	1,50	1,75	1,67	1,56
Perkotaan	1,08	1,02	1,26	1,23	1,16
Perdesaan	2,32	2,11	2,39	2,25	2,11

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode Maret 2022 hingga September 2022 mengalami peningkatan dari 0,32 menjadi 0,35. Indeks keparahan kemiskinan pada wilayah perdesaan sebesar 0,52 lebih tinggi daripada wilayah perkotaan sebesar 0,16 pada tahun 2022. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.24.
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Wilayah	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	0,51	0,43	0,46	0,34	0,35
Perkotaan	0,11	0,2	0,18	0,14	0,16
Perdesaan	0,82	0,62	0,68	0,5	0,52
Nasional	0,41	0,36	0,47	0,42	0,38
Perkotaan	0,25	0,23	0,31	0,29	0,26
Perdesaan	0,62	0,53	0,68	0,59	0,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Grafik II. 11.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

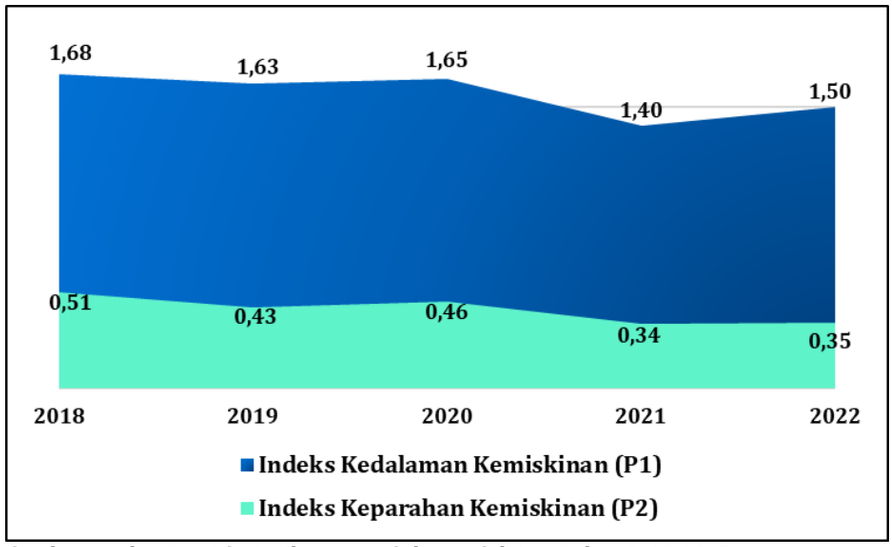

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Pada tahun 2018 hingga 2022 indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami tren fluktuasi, dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 yang merupakan capaian tertinggi selama 3 tahun terakhir. Namun indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 yang dipengaruhi oleh peningkatan laju inflasi yang menyebabkan kenaikan indeks harga kelompok pengeluaran, yang diantaranya makanan, minuman, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan kembali mengalami peningkatan yang menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk semakin jauh dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi.

2.2.1.7. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuasi dimana pada tahun 2022 sebesar 22,1 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar -1,99 persen. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya nilai PDRB dari sub sektor tanaman perkebunan, tanaman pangan dan tanaman hortikultura dari tahun 2021 sebesar. Data selengkapnya terlihat pada tabel berikut. Capaian kontribusi sektor pertanian khususnya pada komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung dan umbi-umbian menunjukkan trend penurunan sejak tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2022 kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB sebesar 5,91 mengalami penurunan sebesar -7,44 persen dari tahun 2021 kondisi ini dipengaruhi oleh gagal panen dibeberapa lokasi di Provinsi Sulawesi selatan akibat bencana banjir pada sentra-sentra produksi pangan seperti Kabupaten Soppeng, Wajo dan Sidrap. Capaian kontribusi sektor perkebunan terhadap

PDRB tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -0,49 persen. Kontribusi jenis komoditas yang mengalami peningkatan yaitu komoditas kelapa sawit (96.747 ton), kelapa (73.985 ton), karet (3.829 ton), dan pala (607 ton). Sedangkan komoditas kopi (30.007 ton), kakao (89.242 ton), dan tebu (5.042 ton), jambu mete (9.508 ton), lada (5.236 ton), dan tembakau (1.118 ton) mengalami penurunan jumlah produksi dari tahun 2021. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.25.
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	22,54	21,35	21,72	22,55	22,1
Kontribusi Sektor Pertanian (Tamanan Pangan) Terhadap PDRB	%	7,16	6,34	6,50	6,35	5,91
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	4,26	3,88	3,94	4,07	4,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.8. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Pencapaian tertinggi kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB periode tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,07 pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan sebesar 0,02 poin dengan capaian 0,05 persen pada tahun 2022. Pada sektor kehutanan upaya yang ditempuh dengan mengoptimalkan produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan (ekowisata).

Tabel II.26.
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	0,06	0,06	0,07	0,06	0,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.9. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,39 persen. Hal ini didorong oleh peningkatan kontribusi PDRB dari sub sektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi sebesar 19,35 persen dari tahun 2020 hingga 2022. Selain itu peningkatan kontribusi PDRB sub sektor pertambangan bijih logam tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 24,59 persen.

Tabel II.27.
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	4,8	4,62	4,67	4,75	5,1

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.10. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam periode tertentu. Terkait dengan perikanan semakin banyak jumlah usaha perikanan dan nilai investasinya akan memberikan dampak yang positif terhadap PDRB di provinsi Sulawesi Selatan. Kedua faktor itu merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan. Berikut ini dapat dilihat perkembangan kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan pada 5 tahun terakhir.

Tabel II.28.
Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	8,40	8,44	8,53	9,41	9,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi selatan terus mengalami peningkatan sejak 2018. Kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 9,43 persen pada tahun 2022. Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 mencapai 417.705 ton dengan nilai produksi Rp. 12,176 Triliun. Salah satu sub sektor yang berpotensi besar untuk dioptimalkan adalah perikanan budidaya, utamanya tambak udang, ikan, rumput laut. Pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya sebesar 4.082.794 ton dengan nilai produksi Rp. 19,275 Triliun dengan produksi tertinggi yaitu rumput laut sebesar 3.787.798 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 10,750 Milyar.

2.2.1.11. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,55 persen dengan capaian 14,64 persen pada tahun 2022. Peningkatan pada sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil

dan sepeda motor mengalami pertumbuhan sebesar 0,51 persen pada tahun 2022 mendukung peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Tabel II.29.
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	14,38	14,80	14,48	14,58	14,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.12. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 mencapai 12,9 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Sektor industri sendiri terdiri dari 16 jenis industri yang memberikan kontribusi yang bervariasi terhadap capaian PDRB tahun 2022 dengan capaian tertinggi pada sub sektor industri makanan dan minuman dengan capaian 7,68 persen mengalami pertumbuhan sebesar 4,06 persen dari tahun 2021.

Tabel II.30.
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	12,87	13,17	12,76	12,49	12,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.13. Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri di Sulawesi Selatan di Tahun 2021 mencapai 8,91 persen nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 9,3 persen. Kondisi ini disebabkan oleh pandemi covid 19 sehingga berdampak terhadap keterbatasan dan tingginya harga bahan baku, pengurangan tenaga kerja dan pemasaran produk. Tahun 2022 kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 4,5 persen dari tahun 2021 dengan capaian 9,31 persen.

Tabel II.31.
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri	%	6,79	7,35	7,35	8,91	9,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1.14. Pertumbuhan PDRB Industri

Pertumbuhan PDRB sektor industri di Sulawesi Selatan kembali mengalami perbaikan pada tahun 2021, setelah sebelumnya terkontraksi sebesar 4,57 persen pada tahun 2020. Capaian pertumbuhan PDRB sektor industri tahun 2022 mencapai 9,86 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021. Perbaikan pertumbuhan PDRB sektor industri didorong oleh tiga sub sektor dengan tingkat pertumbuhan positif dan terbesar yang terdiri dari sub sektor industri logam dasar sebesar 136,32 persen sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dan Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki sebesar 32,41 persen.

Tabel II.32.
Pertumbuhan PDRB Industri
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Perttumbuhan PDRB Industri	%	0,94	9,92	-4,57	3,02	9,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai 72,82, meningkat 0,58 poin (0,80 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (72,24). Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Peningkatan IPM tahun 2022 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya yang terdiri dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak.

Tabel II.33.
Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sulawesi Selatan dengan Nasional 2018-2022

Wilayah	Capaian					Rata-rata Pertumbuhan IPM
	2018	2019	2020	2021	2022	
Sulawesi Selatan	70,9	71,66	71,93	72,24	72,82	0,48
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	0,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Meskipun berada dibawah rata-rata nasional, IPM Sulawesi Selatan selama 6 tahun terakhir berstatus tinggi (70 ≤ IPM < 80) dan secara konsisten meningkat setiap tahunnya.

Grafik II. 12.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

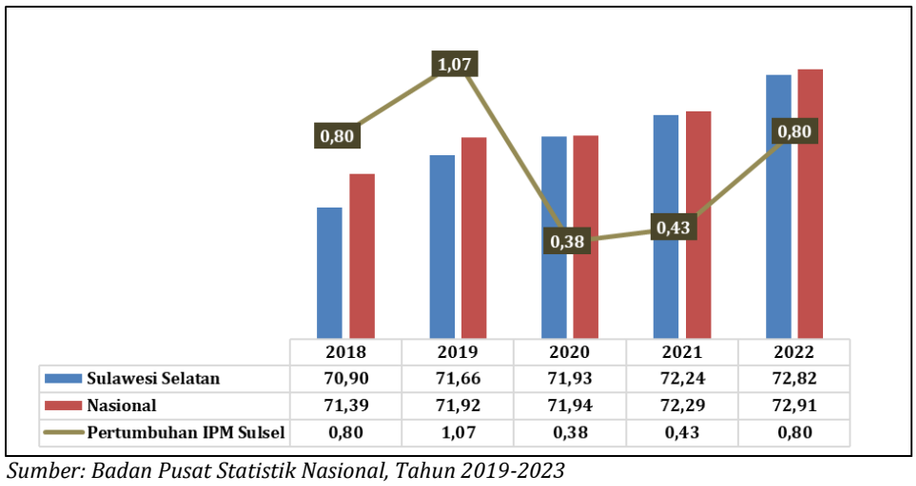

	2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	70,90	71,66	71,93	72,24	72,82
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91
Pertumbuhan IPM Sulsel	0,80	1,07	0,38	0,43	0,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Adapun Capaian masing-masing dimensi pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.34.
Capaian IPM dan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,08	70,43	70,57	70,66	70,97
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,34	13,36	13,45	13,52	13,53
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,02	8,26	8,38	8,46	8,63
Pengeluaran Perkapita (ADHK)	Ribu Rupiah/org	10.814	11.118	11.079	11.184	11.430
IPM	**Nilai**	**70.90**	**71.66**	**71.93**	**72,24**	**72,82**

Sumber :Badan Pusat Statitik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Seiring dengan meningkatknya IPM Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan IPM. Rata-rata peningkatan IPM sebesar 0,79 persen, dengan 4 kabupaten yang memiliki pertumbuhan IPM paling tinggi adalah Bulukumba dan Soppeng sebesar 1,03 persen, Bantaeng sebesar 1,01 persen dan Gowa sebesar 1,00 persen. sedangkan Kabupaten dengan pertumbuhan paling rendah adalah Kota Pare-pare sebesar 0,42 persen. Capaian IPM paling rendah saat ini adalah Kabupaten Jeneponto (65,13) dengan pertumbuhan sebesar 0,88 persen. Sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Makassar (83,12) dengan pertumbuhan yang lebih rendah sebesar 0,56 persen dibandingkan capaian tahun lalu.

Kota Makassar merupakan satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM ≥ 80). Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar masih menjadi pusat dari seluruh kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, hiburan, pemerintahan dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana Kota Makassar cukup memadai dalam mendukung pencapaian pembangunan manusia. Akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan sangat mudah dan terjangkau. Selama

periode tahun 2021-2022 terdapat 3 kabupaten yang mengalami perubahan status dari pembangunan IPM sedang ke tinggi yaitu Bulukumba, Wajo, dan Toraja Utara. Sebagian besar status pembangunan manusia kabupaten/kota di Sulawesi Selatan berada pada kategori "tinggi" 14 Kabupaten/Kota, sedangkan yang berstatus "sedang" sejumlah 9 Kabupaten.

Grafik II. 13.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

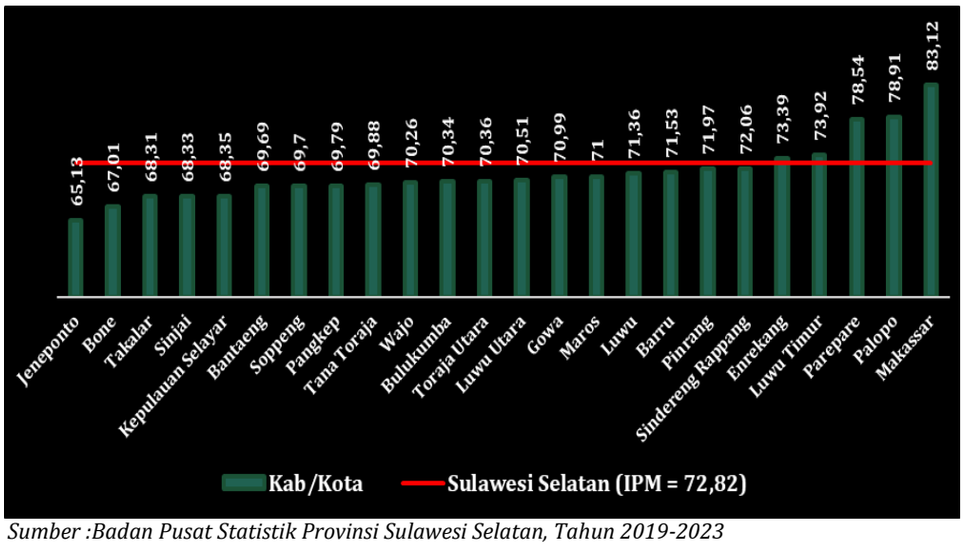

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah yang didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin tinggi/lama jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Pada tahun 2022 RLS Sulawesi Selatan sebesar 8,63 tahun tumbuh 2,01 persen dari tahun sebelumnya. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Sulawesi Selatan adalah selama 8,63 tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas 2.

Grafik II. 14.
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

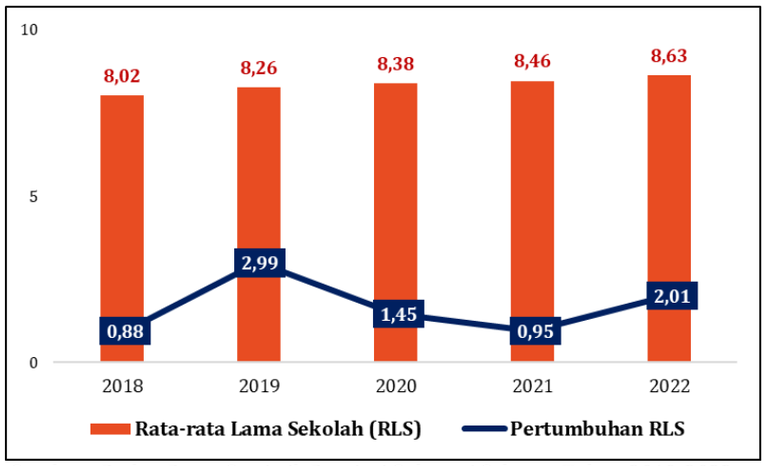

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Pertumbuhan positif merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Sulawesi Selatan yang lebih baik. Pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 2,01 persen, pertumbuhan paling tinggi dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas mengalami peningkatan sebesar 0,17 tahun, dari 8,46 tahun di tahun 2021 menjadi 8,63 tahun pada tahun 2022.

Grafik II. 15.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan RLS
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

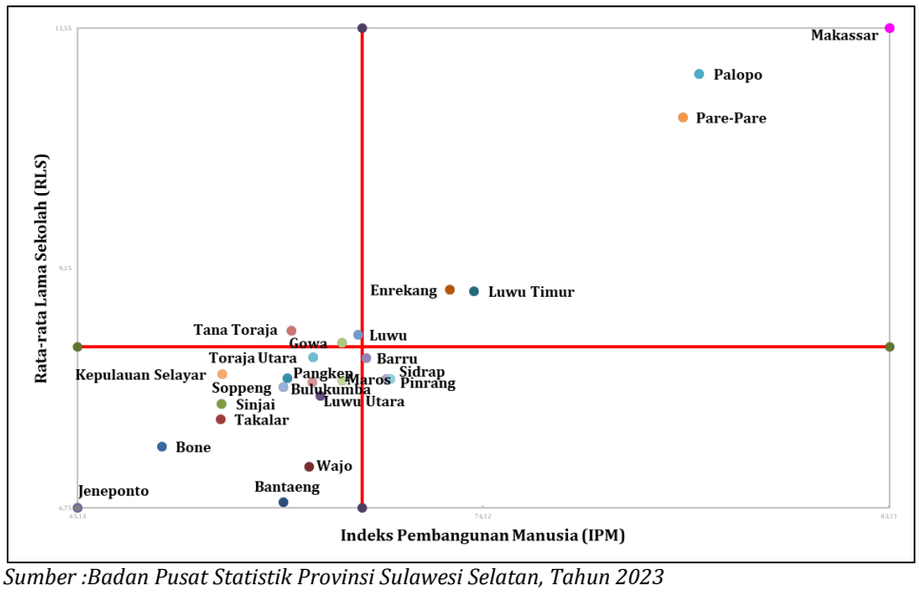

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Kota Makassar memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi yaitu 11,55 tahun. Penduduk Makassar rata-rata dapat menempuh pendidikan hingga jenjang SMA kelas 2. Hal ini didukung oleh keberadaan Kota Makassar yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan kota terbesar penduduknya di Indonesia bagian tengah dan timur sehingga fasilitas pendidikan dapat dikatakan sudah lebih maju. Kemudian diikuti oleh Kota Palopo (11,09 tahun) dan Kota Parepare (10,66 tahun). Artinya penduduk usia 25 tahun ke atas yang tinggal di ketiga kota ini rata-rata

telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA kelas 3. Sedangkan Kabupaten Jeneponto adalah kabupaten dengan RLS terendah tahun 2022 di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 6,75 tahun atau setara dengan lulusan SD.

Grafik II. 16.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

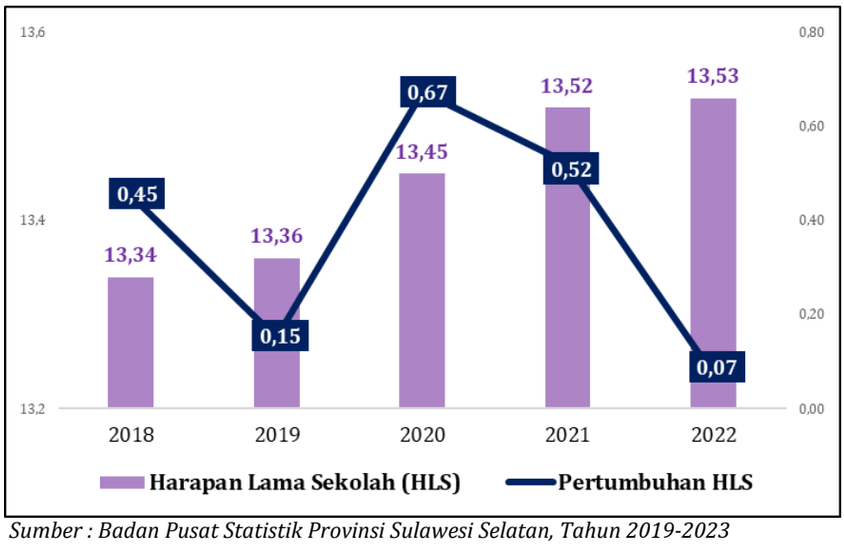

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Grafik II. 17.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan HLS
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

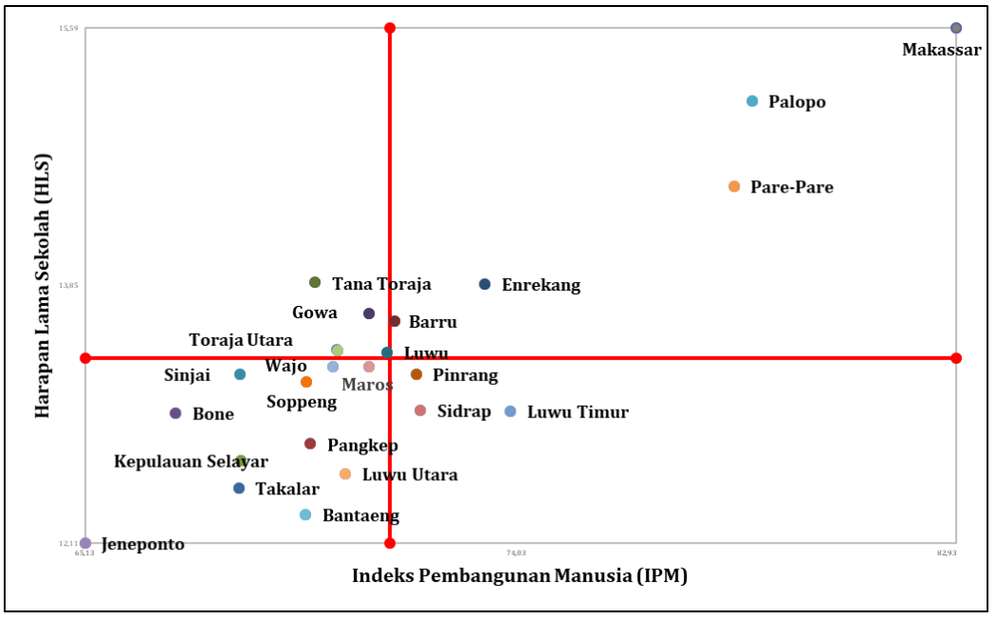

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Dimensi pengetahuan Sulawesi Selatan di tahun 2022 masih menunjukkan pertumbuhan yang positif walaupun pertumbuhannya tidak secepat tahun-tahun sebelumnya. Pada periode tahun 2018-2022 tren Harapan Lama Sekolah mengalami pertumbuhan positif namun dengan tren perlambatan pertumbuhan pada 2 tahun terakhir ini. Pada tahun 2022, Harapan Lama Sekolah tumbuh sebesar 0,07 persen atau mengalami pertumbuhan paling rendah sejak tahun 2018. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Sulawesi Selatan 2022 tumbuh sebesar 0,07 persen. Terdapat 7 kabupaten/kota yang pertumbuhan HLS nya lebih dari 1 persen juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan HLS Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bantaeng, Sinjai, Maros, Soppeng, Wajo, Enrekang, dan Luwu Timur.

Pada tahun 2022 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan menikmati pendidikan hingga selama 13,53 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma II. Jeneponto dan Bantaeng merupakan dua kabupaten dengan HLS terendah, masing-masing 12,11 tahun dan 12,30 tahun. Angka ini menunjukkan harapan bahwa penduduk umur 7 tahun ke atas akan dapat bersekolah hingga kelas 3 SMA. Sementara itu Kota Makassar, Palopo, dan Parepare memiliki angka HLS tertinggi di Sulawesi Selatan. Kota Makassar dengan HLS 15,59 tahun menggambarkan harapan penduduk berumur 7 tahun ke atas akan dapat menikmati pendidikan rata-rata hingga lulus diploma III.

Grafik II. 18.
Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

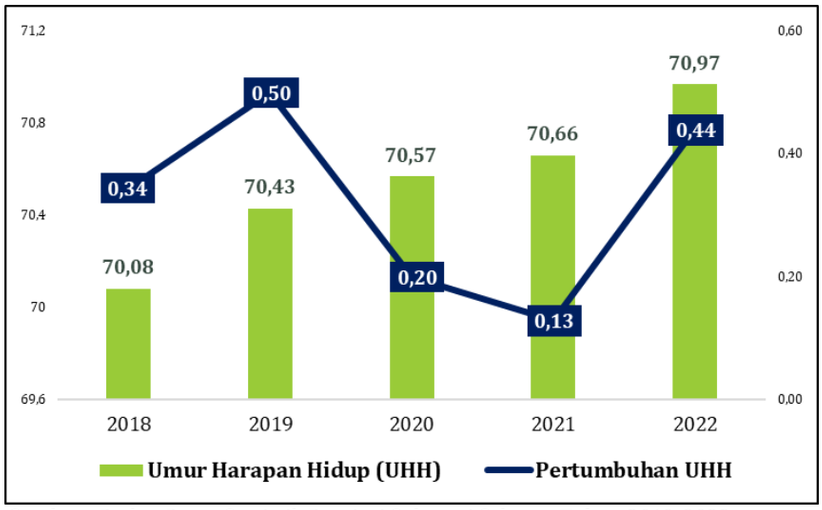

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup, selain angka kesakitan masyarakat yang merepresentasikan sejauh mana tingkat kesehatan masyarakat. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau Life Expectancy didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari sisi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 70,97 tahun, lebih lama 0,31 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Grafik II. 19.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan UHH
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

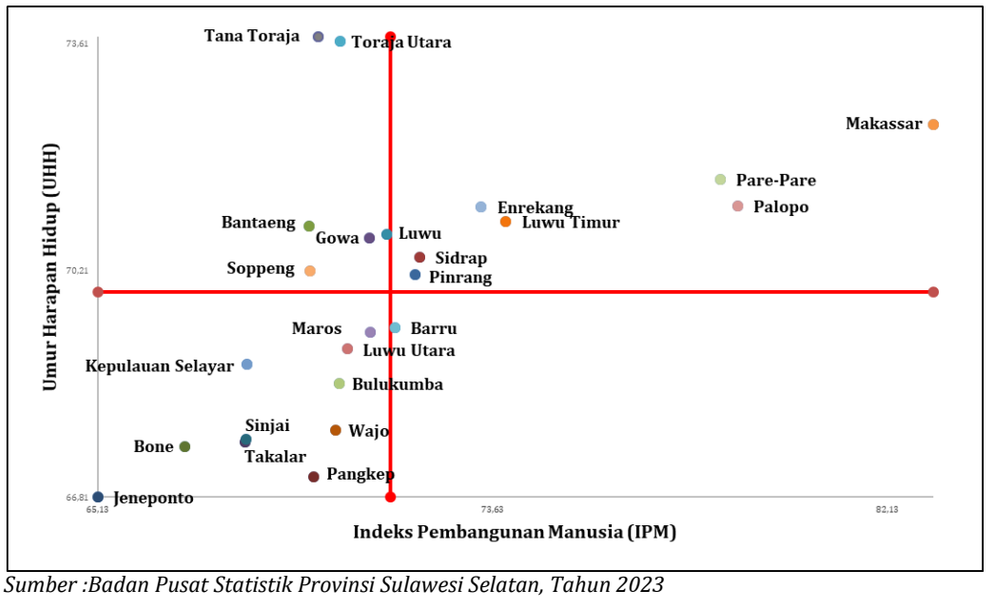

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Dalam konteks kewilayahan, ada 6 kabupaten/kota yang memiliki UHH lebih tinggi dari UHH Sulawesi Selatan dengan Umur Harapan Hidup tertinggi pada tahun 2022 adalah Tana Toraja (73,72 tahun) dan Toraja Utara (73,65 tahun). Berdasarkan teori ilmu demografi, disebutkan bahwa penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan memiliki umur yang lebih panjang dibanding mereka yang tinggal di wilayah dataran rendah. Selanjutnya Kabupaten Jeneponto dan Pangkajene Kepulauan yang merupakan wilayah dataran rendah masih mencatatkan UHH terendah bila dibandingkan kabupaten/kota lainnya yaitu dengan pencapaian UHH masing-masing sebesar 66,81 tahun dan 67,12 tahun. Hanya 6 kabupaten/ kota dengan pencapaian UHH di atas UHH Sulawesi Selatan yaitu Enrekang, Palopo, Parepare, Makassar, Toraja Utara , dan Tana Toraja. Sedangkan 18 kabupaten lainnya memiliki UHH dibawah UHH Sulawesi Selatan. Kabupaten Jeneponto, Pangkajene dan Kepulauan, Bone dan Takalar adalah 4 kabupaten dengan umur harapan hidup terendah di Sulawesi Selatan.

Grafik II. 20.
Perkembangan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

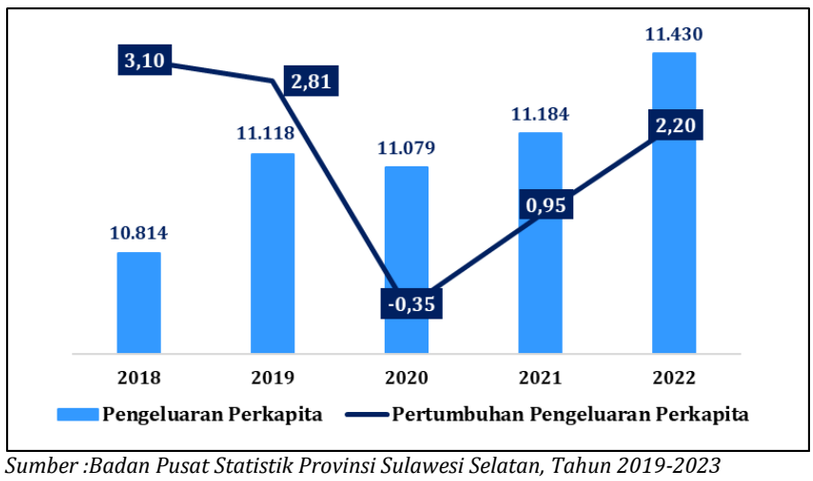

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Sulawesi Selatan mencapai Rp. 11,43 juta. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,20 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari dua tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pengeluaran per kapita Sulawesi Selatan mulai kembali menigkat setelah di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -0,35 persen. Tren pengeluaran per kapita disesuaikan di Sulawesi Selatan selama periode tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan pertumbuhan dan tahun 2019 hingga 2020 mengalami pertumbuhan negatif, kemudian pada tahun 2020 hingga 2022 tren pengeluaran per kapita disesuaikan mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita disesuaikan tumbuh positif sebesar 2,20 persen. Jika pada tahun 2018 pengeluaran per kapita penduduk sebesar 10,814 juta rupiah, maka pada tahun 2022 telah mencapai 11,430 juta rupiah.

Secara umum pengeluaran perkapita disesuaikan masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tren meningkat. Terdapat kesenjangan pengeluaran perkapita disesuaikan antara kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Daerah dengan pengeluaran perkapita disesuaikan terendah adalah Tana Toraja yaitu sebesar Rp 7,58 juta/kapita/tahun. Sementara itu Makassar memiliki pengeluaran perkapita disesuaikan terbesar yaitu mencapai Rp 17,41 juta/kapita/tahun. Pada tahun 2022, terdapat 10 kabupaten/kota dengan nilai pengeluaran perkapita disesuaikan lebih tinggi dari nilai provinsi yaitu Pangkep, Pinrang, Luwu Utara, Bantaeng, Sidrap, Wajo, Luwu Timur, Palopo, Parepare, dan Makassar. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 21.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan IPM dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2022

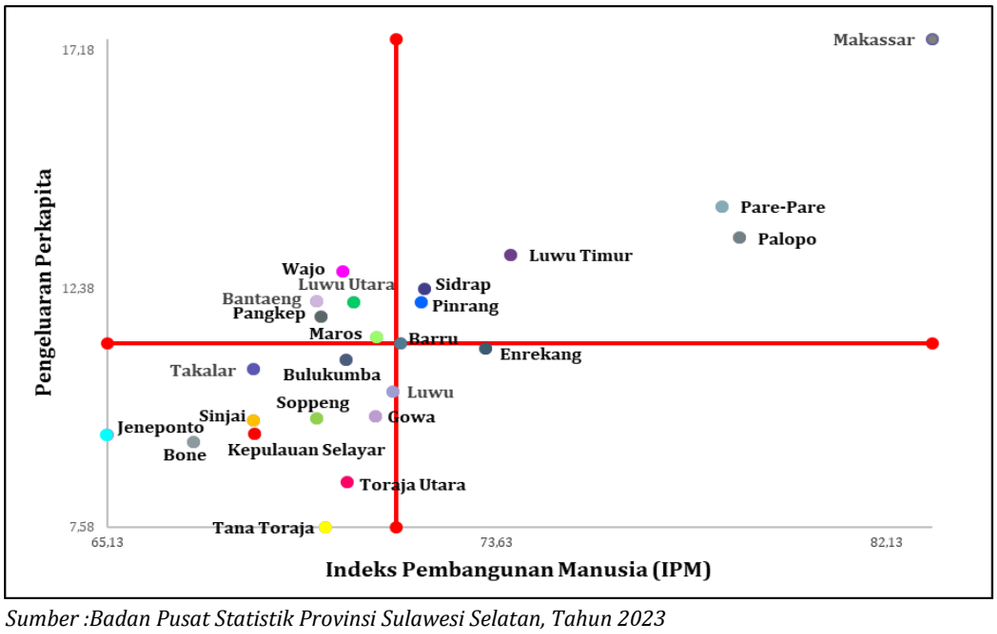

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pulau Sulawesi secara administratif terbagi menjadi 6 Provinsi dengan Provinsi Sulawesi Utara memiliki capaian angka IPM paling tinggi dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya. Adapun Sulawesi Selatan berada di urutan ke 2, satu peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Tenggara dan di

urutan selanjutnya ada provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

Grafik II. 22.
Perbandingan IPM Regional Sulawesi Tahun 2022

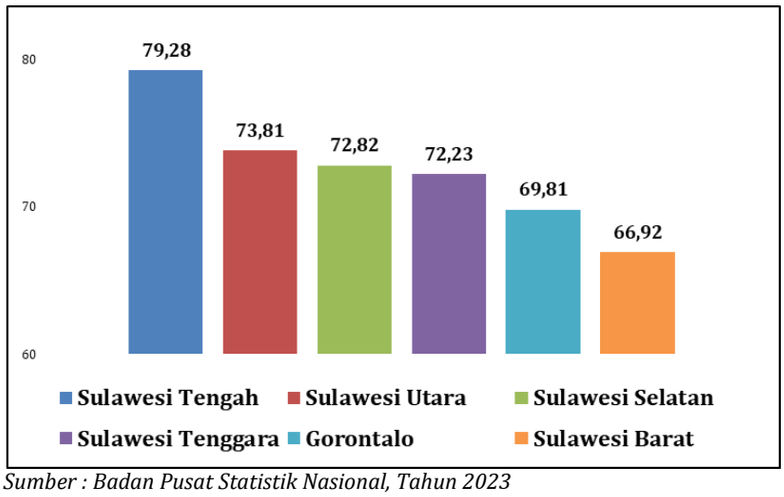

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Masih terdapat ketimpangan pembangunan manusia di Pulau Sulawesi, terdapat 2 provinsi yang berstatus pembangunan manusia "sedang" sementara 4 provinsi lainnya sudah berstatus "tinggi", termasuk Provinsi Sulawesi Tengah yang berubah statusnya menjadi tinggi pada tahun 2022 dengan capaian IPM sebesar 70,28.

Grafik II. 23.
Perbandingan IPM Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022

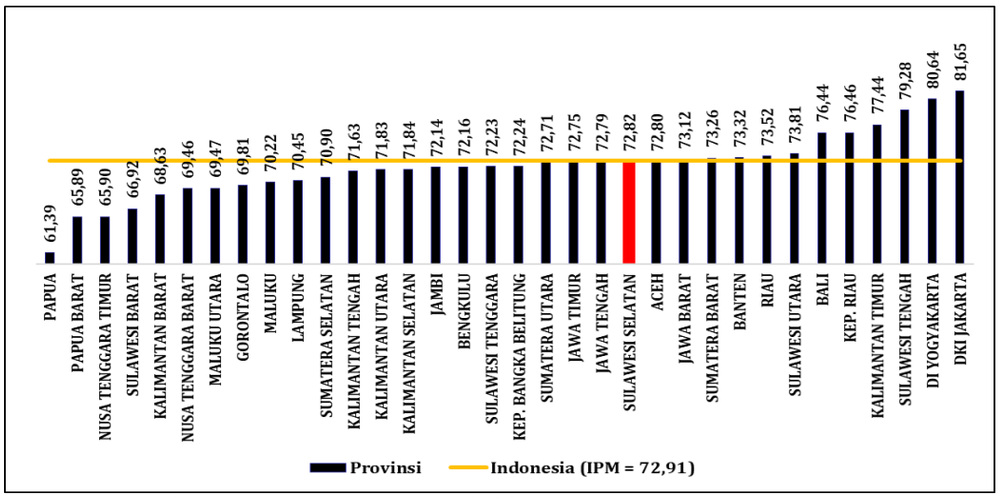

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Capaian IPM Sulawesi Selatan tahun 2022 berada di urutan ke-11 dibandingkan 34 provinsi lainnya. Jika dibandingkan dengan capaian wilayah setaranya pada level "menengah", capaian IPM Sulawesi Selatan tertingi dimana masih terdapat 10 Provinsi lainnya dengan capaian IPM lebih rendah.

2.2.2.2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan berdasarkan metode baru yang digunakan oleh BPS memperhitungkan 2 faktor yakni Harapan Lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS), merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan

akan didapatkan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. HLS dihitung pada rentang usia 7 tahun ke atas sesuai kebijakan program wajib belajar yang dijalankan oleh pemerintah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) merupakan ratarata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pemilihan rentang umur 25 tahun ke atas pada penghitungan RLS diasumsikan bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Tabel II.35.
Indeks Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pendidikan	Nilai	63,79	64,64	65,29	65,76	66,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Indeks pendidikan Provinsi Sulawesi selatan tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan. Tahun 2019 merupakan pertumbuhan tertinggi Indeks Pendidikan selama kurun waktu tersebut. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 24.
Perkembangan Indeks Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

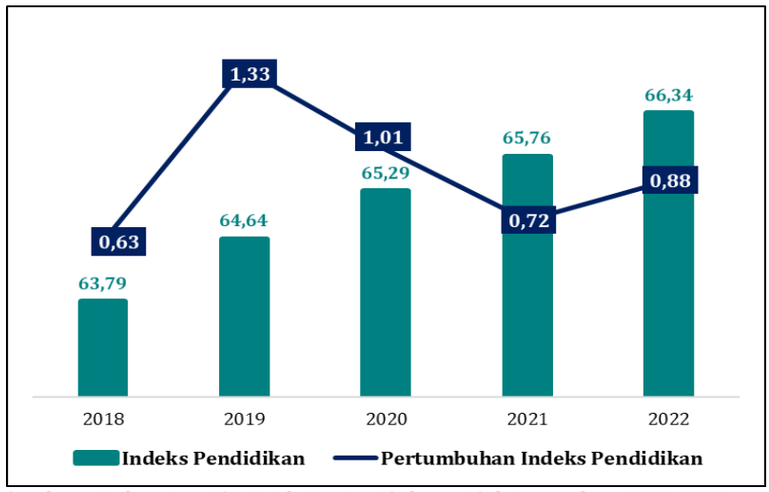

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.2.3. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan trend peningkatan namun pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 0,16 persen dengan nilai capaian sebesar 92,49 persen. Angka Melek Huruf di Sulawesi Selatan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 0,89 poin dengan capaian sebesar 93,31 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat

6,69 persen penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak dapat membaca dan menulis. Meskipun demikian tahun 2022 merupakan pertumbuhan angka melek huruf tertinggi pada periode tahun 2018 hingga 2022. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 25.
Perkembangan Angka Melek Huruf
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

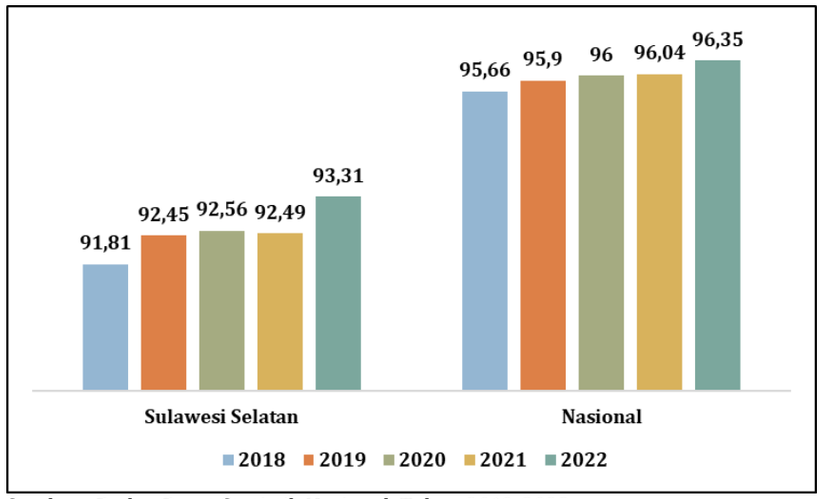

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, angka melek huruf Sulawesi Selatan masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional. Sehingga peningkatan kemampuan baca tulis bagi masyarakat khsususnya yang berusia 15 tahun keatas perlu mendapat perhatian mengingat penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.36.
Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas
Sulawesi Selatan dan Nasional, 2018-2022

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	91,81	92,45	92,56	92,49	93,31
Nasional	%	95,66	95,9	96	96,04	96,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Capaian terendah angka melek huruf pada tahun 2022 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 80,81 persen yang hanya mengalami peningkatan 0,25 poin dari tahun sebelumnya sedangkan capaian tertinggi di Kota Makassar sebesar 99,17 persen dengan peningkatan 0,94 poin dari tahun sebelumnya.

Grafik II. 26.
Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

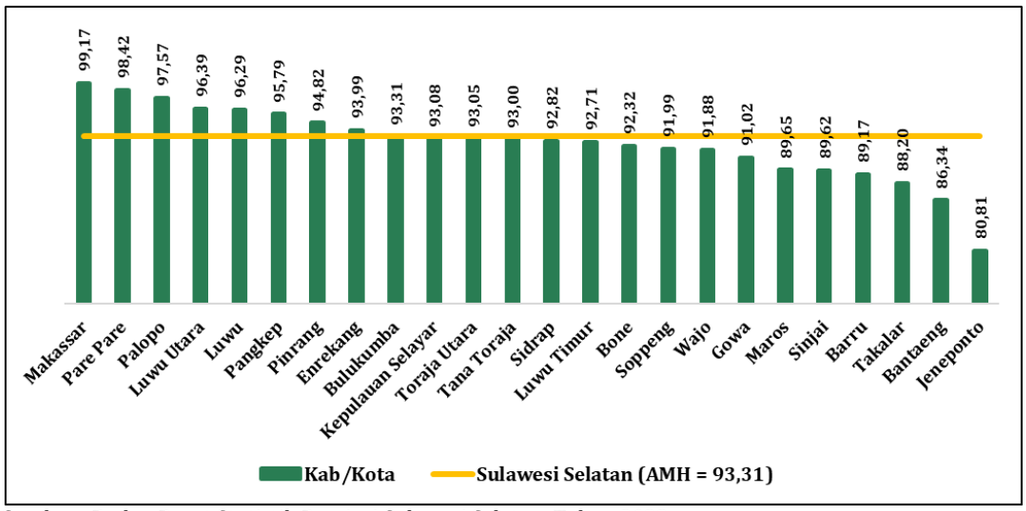

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.2.2.4. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan diukur menggunakan capaian umur harapan hidup dimana dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat hidup suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Tren umur harapan hidup saat lahir dari tahun 2018 hingga 2022 cenderung stabil pada kisaran 70 tahun dan meningkat setiap tahunnya. Tahun 2020 saat tahun pertama terjadi pandemi covid19, umur harapan hidup di Sulawesi Selatan masih tetap tumbuh dari tahun sebelumnya namun tidak secepat pertumbuhan di tahun 2019 yang mencapai 0,50 persen. Kemudian 2 tahun setelah pandemi terjadi, tren pertumbuhan UHH Sulawesi Selatan Kembali mengalami percepatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel II.37.
Indeks Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kesehatan	Nilai	77,05	77,58	77,80	77,94	78,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Perkembangan UHH terus menunjukkan peningkatan, pada tahun 2022, UHH telah mencapai 70,97 yang diinterpretasikan bahwa anak lahir hidup di Sulawesi Selatan memiliki peluang hidup sampai 70,97 tahun. Pada tahun 2018 Umur Harapan Hidup saat lahir di Sulawesi Selatan adalah 70,08 tahun dan pada tahun 2022 mencapai 70,97 tahun. Kondisi peningkatan UHH menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup lebih lama semakin tinggi karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat menjadi

salah satu penyebab meningkatnya UHH di Sulawesi Selatan. Gambaran peningkatan Indeks Kesehatan di Sulawesi Selatan selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 27.
Perkembangan Indeks Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

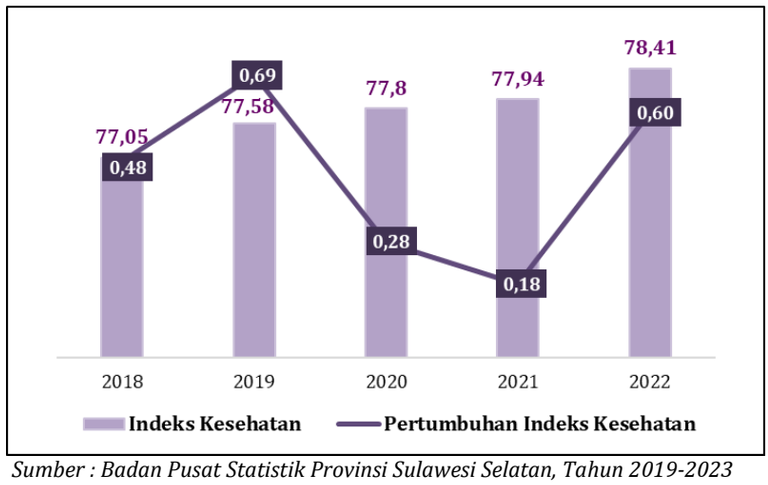

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.2.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sulawesi Selatan. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 6.889.399 orang, naik sebanyak 71.799 orang jika dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 4.559.375 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 2.330.024 orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 4.353.650 orang penduduk yang bekerja dan 205.725 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 146.593 orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 193.217 orang, sementara pengangguran turun sebanyak 46.624 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja, dan merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

Tabel II.38.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Periode Agustus)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	Orang	3.988.029	4.030.400	4.280.000	4.412.782	4.559.375
Bekerja	Orang	3.774.924	3.830.096	4.010.000	4.160.433	4.353.650
Pengangguran	Orang	213.105	200.304	269.817	252.349	205.725
Bukan Angkatan Kerja	Orang	2.340.550	2.376.885	2.468.484	2.404.818	2.330.024
Penduduk Usia Kerja	Orang	6.328.579	6.407.285	6.744.921	6.817.600	6.889.399
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,02	62,90	63,40	64,73	66,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 4.559.375 orang, naik 146.593 orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2022 mengalami peningkatan dibanding Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 66,18 persen, mengalami peningkatan 1,45 persen poin dibanding Agustus 2021. Penduduk yang bekerja sebanyak 4.353.650 orang, naik sebanyak 193.217 orang dari Agustus 2021. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 38,53 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 17,92 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 8,19 persen. Peningkatan TPAK disebabkan meningkatnya angkatan kerja. Peningkatan jumlah tenaga kerja sektor informal lebih tinggi daripada sektor formal dimana jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor formal pada tahun 2022 sebesar 1.586.772 jiwa mengalami peningkatan sebesar 3,75 persen poin dari tahun 2021. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor informal pada tahun 2022 sebesar 2.766.878 jiwa mengalami peningkatan sebesar 5,16 persen poin dari tahun 2021.

Grafik II. 28.
Dimensi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

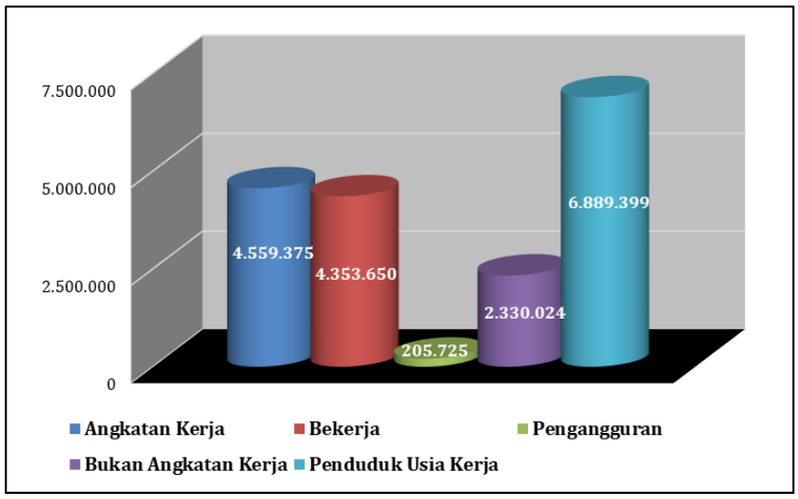

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Meskipun mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga 2022 namun TPAK Sulawesi Selatan masih berada dibawah TPAK Nasional.

Grafik II. 29.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

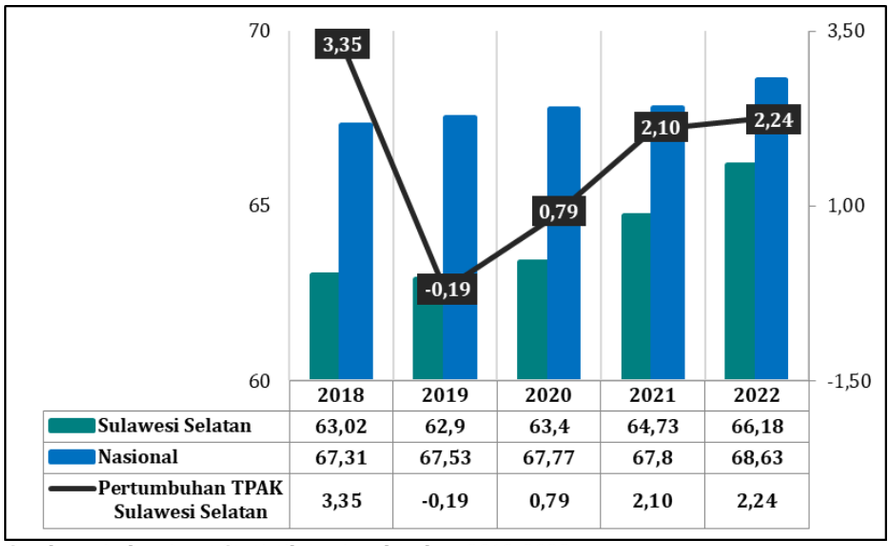

	2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	63,02	62,9	63,4	64,73	66,18
Nasional	67,31	67,53	67,77	67,8	68,63
Pertumbuhan TPAK Sulawesi Selatan	3,35	-0,19	0,79	2,10	2,24

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2019 hingga 2022 mengalami peningkatan, dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi pada tahun 2022 di Kabupaten Tana Toraja sebesar 85,11 persen dengan jumlah angkatan kerja sebesar 125.084 jiwa mengalami peningkatan sebesar 7,11 persen poin dari tahun 2021. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terendah di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 57,63 persen dengan jumlah angkatan kerja 132.672 jiwa mengalami penurunan sebesar 1,08 persen poin dari tahun 2021.

Grafik II. 30.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

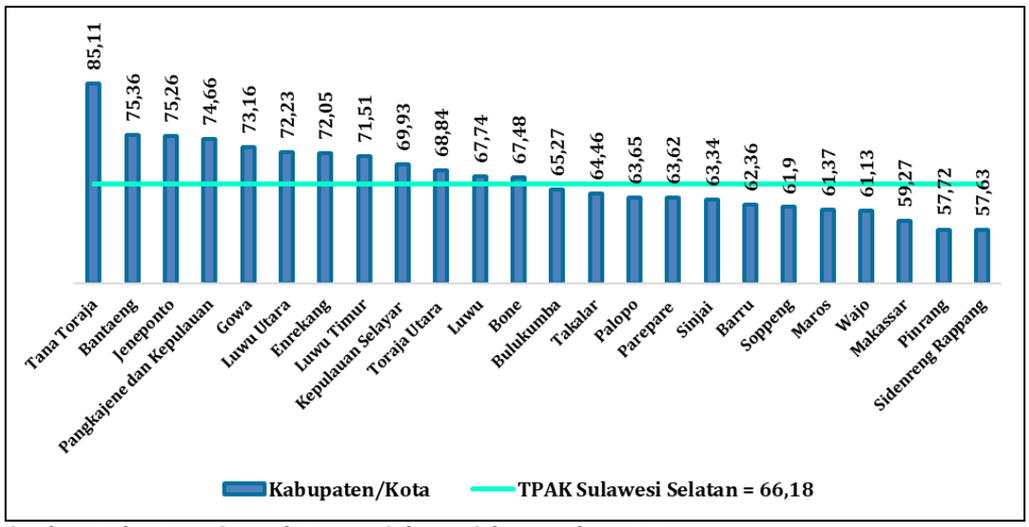

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Naik turunnya TPT dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Dalam tiga tahun terakhir, TPT periode Agustus Sulawesi Selatan terus menurun. Tercatat angka TPT Sulsel ditahun 2020 sebesar 6,31 persen, turun ditahun 2021 menjadi 5,72 persen kemudian kembali mengalami penurunan sebesar 1,21 persen poin mencapai 4,51 persen pada tahun 2022. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 4,51 persen merupakan pencapaian pertumbuhan negatif tertinggi selama periode 2018 hingga 2022 yaitu sebesar -21,15 persen. Data perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.39.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	4,94	4,62	6,31	5,72	4,51
Nasional	%	5,3	5,23	7,07	6,49	5,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Menggambarkan tren fluktuasi sejak tahun 2018 hingga 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional menunjukkan tren yang sama, namun capaian TPT Sulawesi Selatan masih berada dibawah capaian Nasional serta mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga 2022. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 31.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

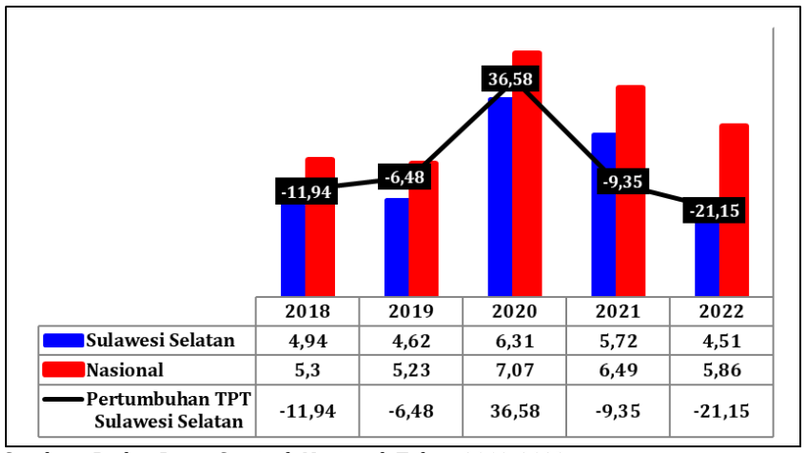

	2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	4,94	4,62	6,31	5,72	4,51
Nasional	5,3	5,23	7,07	6,49	5,86
Pertumbuhan TPT Sulawesi Selatan	-11,94	-6,48	36,58	-9,35	-21,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Jumlah pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -18,47 persen dengan jumlah 205.725 jiwa. Jumlah pengangguran terbuka tahun 2022 tertinggi di Kota Makassar sejumlah 86.267 jiwa, sedangkan yang terendah di Kabupaten Enrekang sejumlah 461 jiwa.

Grafik II. 32.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

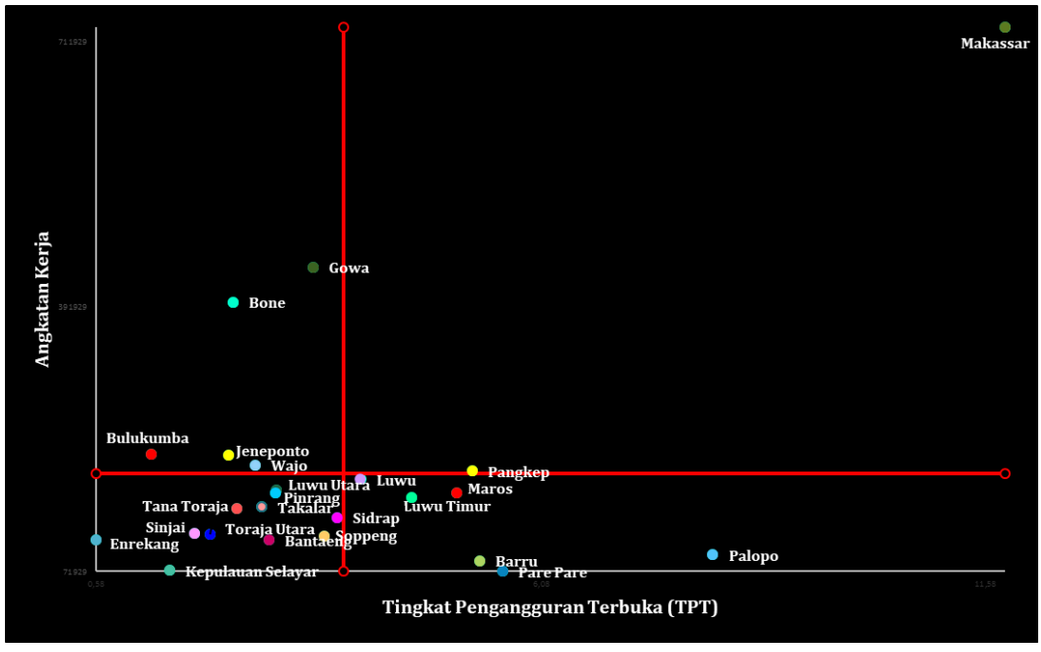

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan wilayah regional sulawesi, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi daripada 4 provinsi lain pada regional sulawesi. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Diagram II.3.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sulawesi Selatan dengan Regional Sulawesi Tahun 2022

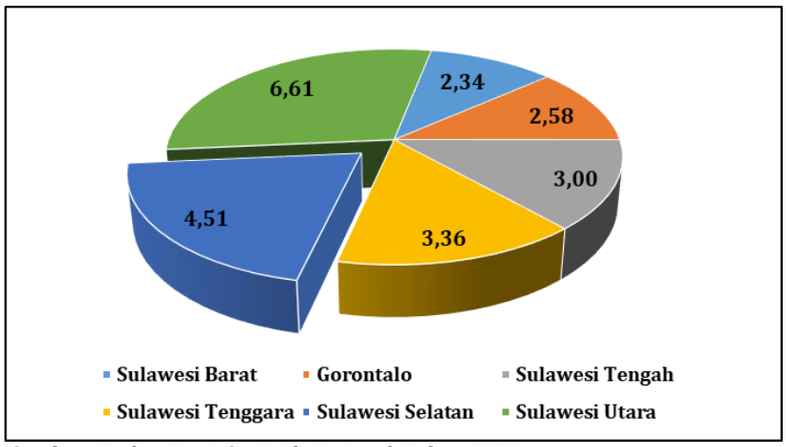

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2022 masing-masing Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari Agustus 2021 dengan angka penurunan tertinggi di Kabupaten Bulukumba (-1,88), Bone (-1,88), dan Sinjai (-1,81) dibanding Agustus 2021. Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan yang tertinggi di Kota Makassar sebesar 11,82 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Enrekang sebesar 0,58 persen. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 33.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

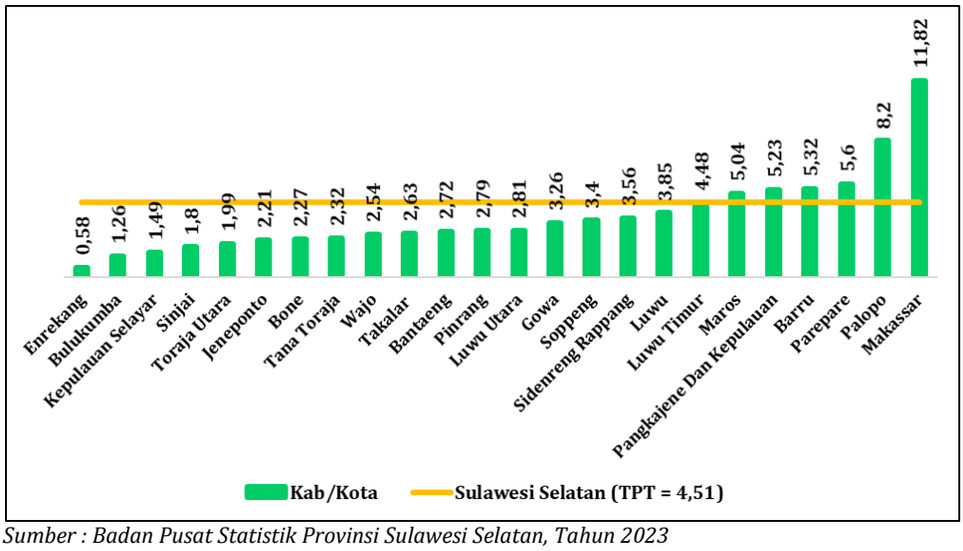

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan Tingkat Penganguran Terbuka seluruh provinsi, capaian TPT Sulawesi Selatan berada pada peringkat kedua pada wilayah setaranya di level menengah yang menggambarkan dimana terdapat 9 provinsi lainnya yang menunjukkan capaian TPT lebih tinggi pada tahun 2022. Provinsi dengan capaian TPT tertinggi adalah Sulawesi Barat (2,34), sedangkan TPT dengan capaian terendah adalah Jawa Barat (8,31). Perbandingan TPT

Sulawesi Selatan dengan wilayah setara dan provinsi lainnya tahun 2022 digambarkan pada grafik berikut.

Grafik II. 34.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia
Tahun 2022

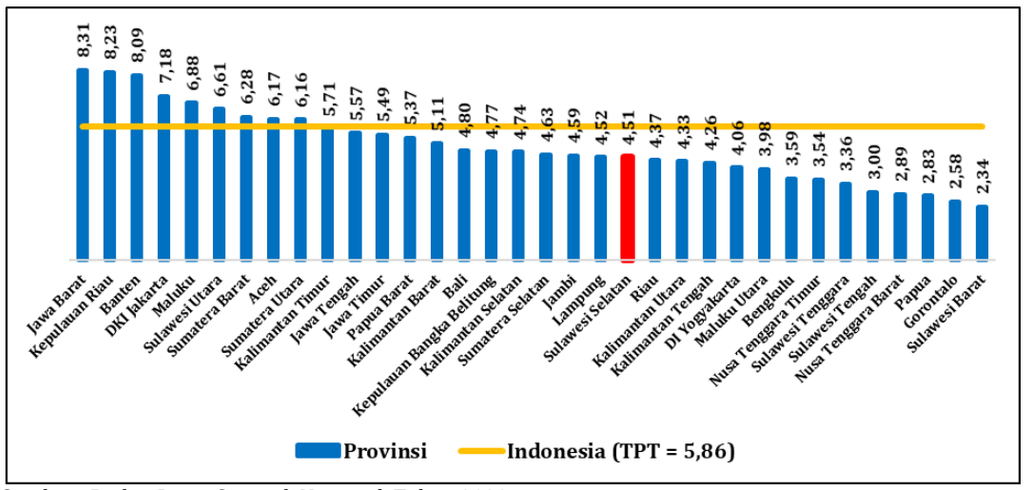

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

2.2.2.7. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan mulai adanya peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebagai bentuk usaha pemulihan ekonomi dalam menghadapi covid 19, kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya penyerapan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan utama tertentu dari tahun 2020 ke tahun 2021. Lapangan kerja utama yang mengalami penurunan penyerapan jumlah tenaga kerja adalah pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan sebesar 2,4 persen, sektor pengadaan listrik dan gas mengalami penurunan sebesar 19,24 persen, sektor transfortasi dan pergudangan mengalami penurunan sebesar 7,69 persen dan sektor real estate 14,33 persen.

Grafik II. 35.
Rasio Penduduk yang Bekerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

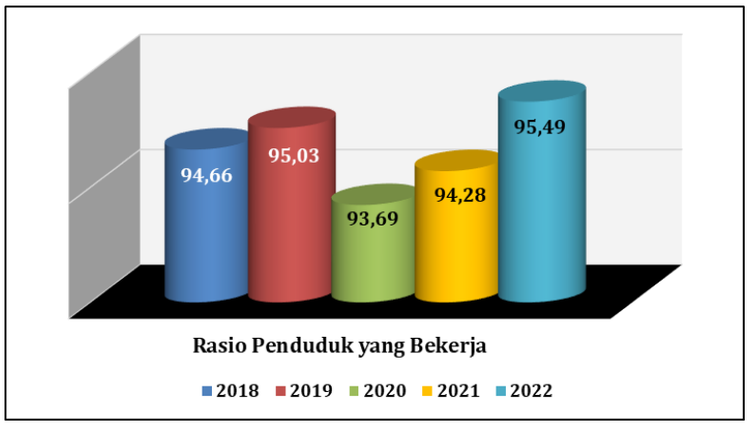

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Dibandingkan Agustus

2021 Rasio Penduduk yang Bekerja di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Tiga lapangan pekerjaan mengalami peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,01 persen poin); Pengangkutan dan Pergudangan (0,63 persen poin); dan Jasa Lainnya (0,44 persen poin).

Grafik II. 36.
Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

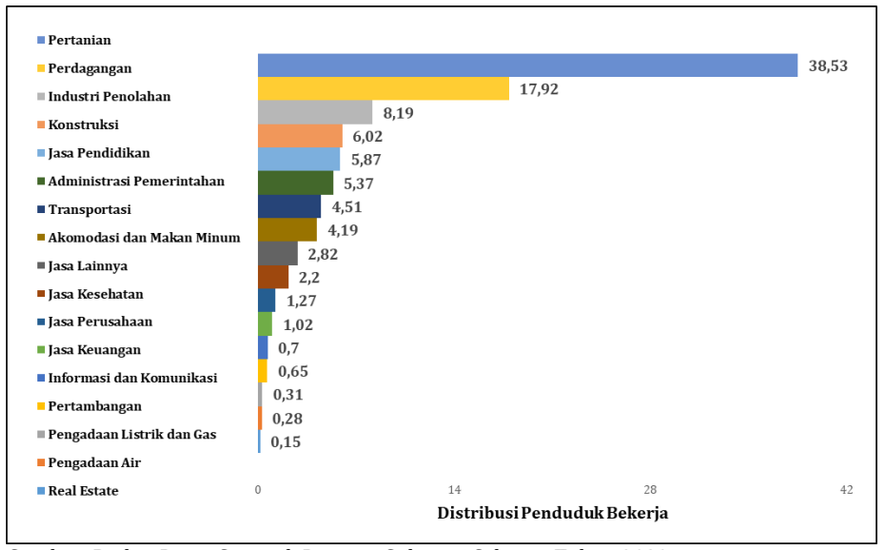

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 38,53 persen; Perdagangan Besar Dan Eceran sebesar 17,92 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 8,19 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2021.

Jika dibandingkan dengan capaian Nasional, rasio penduduk yang bekerja di Sulawesi Selatan berada diatas capaian Nasional pada tahun 2022. Data perbandingan rasio penduduk bekerja Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2018 hingga 2022 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.40.
Perbandingan Rasio Penduduk Bekerja (Periode Agustus)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	Perseratus Penduduk	94,66	95,03	93,69	94,28	95,49
Nasional	Perseratus Penduduk	94,66	94,72	93,69	95,06	94,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Tahun 2022 jumlah penduduk yang bekerja di Sulawesi Selatan sebesar 4.353.650 jiwa sedangkan jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja sebesar 205.725 jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja tertinggi di Kota

Makassar sebesar 643.368 jiwa dan yang terendah di Kota Pare-Pare sejumlah 67.904 jiwa. Rasio penduduk yang bekerja terendah di Kota Makassar sebesar 88,18 persen dari 729.635 angkatan kerja, sedangkan rasio penduduk yang berekrja tertinggi di Kabupaten Enrekang sebesar 99,42 dari 110.369 angkatan kerja. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 37.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan
Rasio Penduduk Bekerja dan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

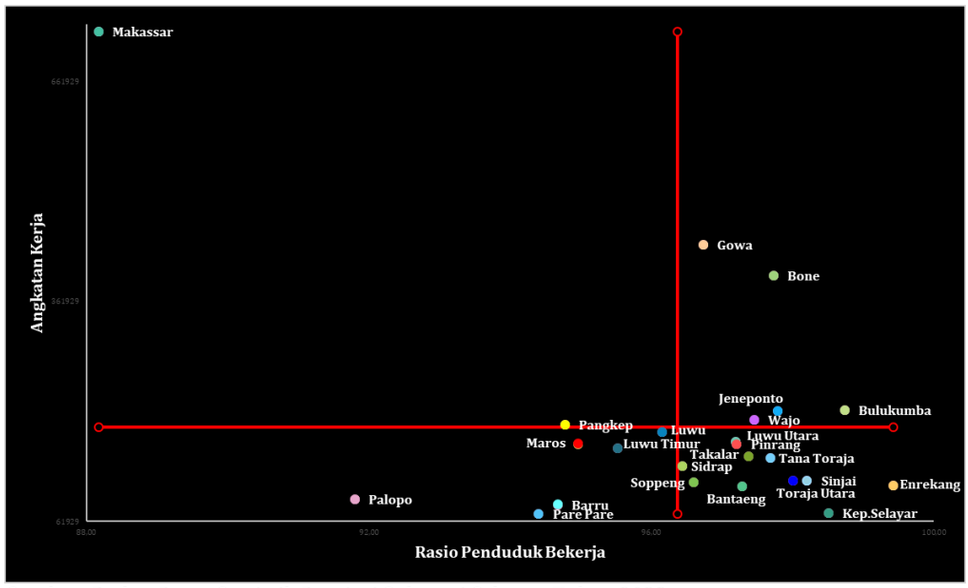

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.2.2.8. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan bekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja adalah merupakan jumlah tenaga kerja yang berusaha sendiri ditambah dengan jumlah pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (jumlah penduduk yang bekerja). Tahun 2022 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri sejumlah 994.371 jiwa dan tenaga kerja yang pekerja bebas keluarga sejumlah 738.968 jiwa, serta jumlah kesempatan kerja 4.353.650 jiwa dengan capaian 39,81 persen menunjukkan adanya peningkatan sebesar 6,67 poin dari tahun 2021. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.41.
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan
Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	%	36,50	36,90	36,90	37,32	39,81

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.2.2.9. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor B/567/PP.02/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022, nilai rata-rata Indeks Pelayanan Publik (IPP) Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 0,24 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021. Nilai IPP tersebut diperoleh melalui pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada 2 Unit Pelayanan Publik (UPP), yaitu DPMPTSP dan Samsat Makassar Wilayah I. Kedua UPP telah menerapkan seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik dengan baik yang meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, penyediaan Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta telah mengembangkan Inovasi Pelayanan Publik. Namun, masih terdapat beberapa indikator terkait komitmen dan jaminan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu ditingkatkan. Capaian indeks pelayanan publik tahun 2018 hingga 2022 selangkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.42.
Indeks Pelayanan Publik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pelayanan Publik	%	B- (3,49)	B (4)	B (4,02)	A- (4,10)	A- (4,34)

Sumber: Kemenpan RB, Tahun 2023

2.2.2.10. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur untuk menggambarkan persepsi penerimaan pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Berdasarkan nilai rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan pada 14 OPD/Unit Pelayanan Publik di Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai indeks mengalami peningkatan sebesar 5,37 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 serta merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2018.

Tabel II.43.
Indeks Kepuasan Masyarakat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	51,55	80,92	77,32	78,31 (B)	84,35 (B)

Sumber : Biro Organisasi Sektretariat Daerah, Tahun 2023

Adapun indeks kepuasan masyarakat yang dicapai dari masing-masing institusi yang terdiri dari institusi perizinan, pelayanan kependudukan, pelayanan kesehatan, pendapatan, sosial, perpustakaan menunjukkan rata-rata

capaian dalam kelompok kategori B. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 38.
Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Pelayanan Institusi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

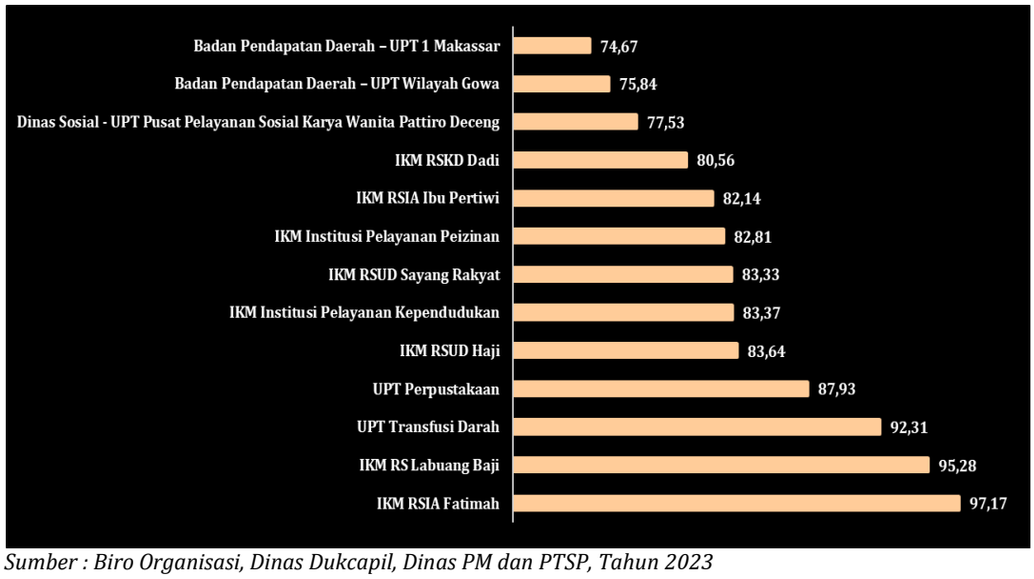

Sumber : Biro Organisasi, Dinas Dukcapil, Dinas PM dan PTSP, Tahun 2023

2.2.2.11. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Metodologi perhitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan UNDP yang mencakup dimensi antara lain: a) Dimesi Umur Panjang dan Sehat dengan indikator Umur Harapan Hidup pada saat lahir laki-laki dan perempuan; b) Dimensi Pengetahuan dengan indiktor Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah laki-laki dan perempuan; c) Dimensi Kehidupan yang Layak dengan indikator Perkiraan Pendapatan laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2018 hingga 2021 mengalami tren penurunan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara perempuan dan laki-laki semakin tinggi. Namun pada tahun 2022 capaian Indeks Pembangunan Gender mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan capaian 93,14 persen serta masih berada diatas capaian nasional. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.44.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2018 – 2022

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	93,15	93,09	92,86	92,85	93,14
Nasional	%	90,99	91,07	91,07	91,27	91,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Masih terdapatnya kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menyebabkan IPG Sulawesi Selatan masih berada di bawah angka 100 dalam kurun waktu 2018 hingga 2022. Meskipun capaian pembangunan perempuan masih belum mampu menyamai laki-laki, namun secara trend, perkembangan pembangunan manusia perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Fenomena penurunan IPG terjadi pada tahun 2019 hingga 2021 dimana dimana IPG Sulawesi Selatan turun sekitar 0,06 persen di tahun 2019, kemudian turun -0,25 persen di tahun 2020, dan -0,01 persen di tahun 2021, namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,31 persen. Tahun 2022 capaian IPG tertinggi di Kabupaten Sinjai dengan capaian 98,13 persen dimana perbandingan IPM Laki-Laki dan Perempuan paling rendah diantara kabupaten/kota lainnya dengan rasio IPM sebesar 0,98. Sedangkan capaian IPG terendah di Kabupaten Takalar sebesar 87,66 persen dengan rasio IPM Laki-Laki dan Perempuan sebesar 0,88. Nilai indeks jika semakin mendekati angka 1, maka kesenjangan pembangunan manusia antara Laki-Laki dan Perempuan semakin kecil. Gambaran perbandingan IPM Laki-Laki dan Perempuan serta capaian IPG di Sulawesi Selatan Tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 39.
Perbandingan IPM Laki-laki dan IPM Perempuan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

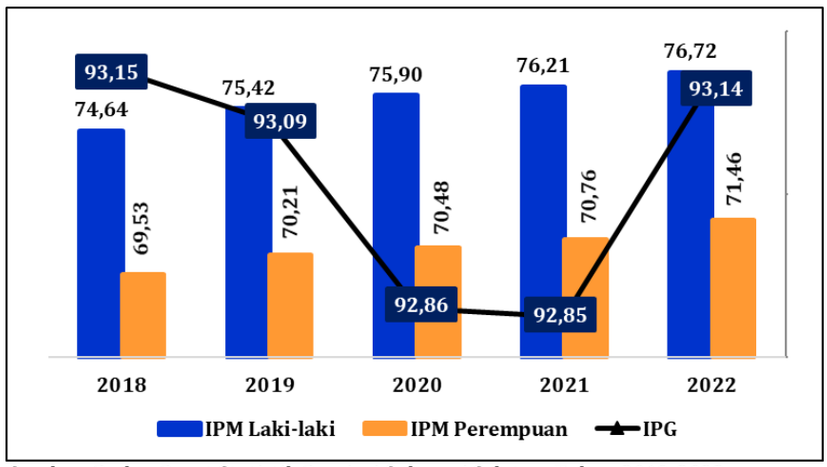

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Sejak tahun 2019 hingga 2021, pertumbuhan IPM laki-laki lebih cepat dibanding perempuan. Perkembangan dimensi Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 40.
Dimensi Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

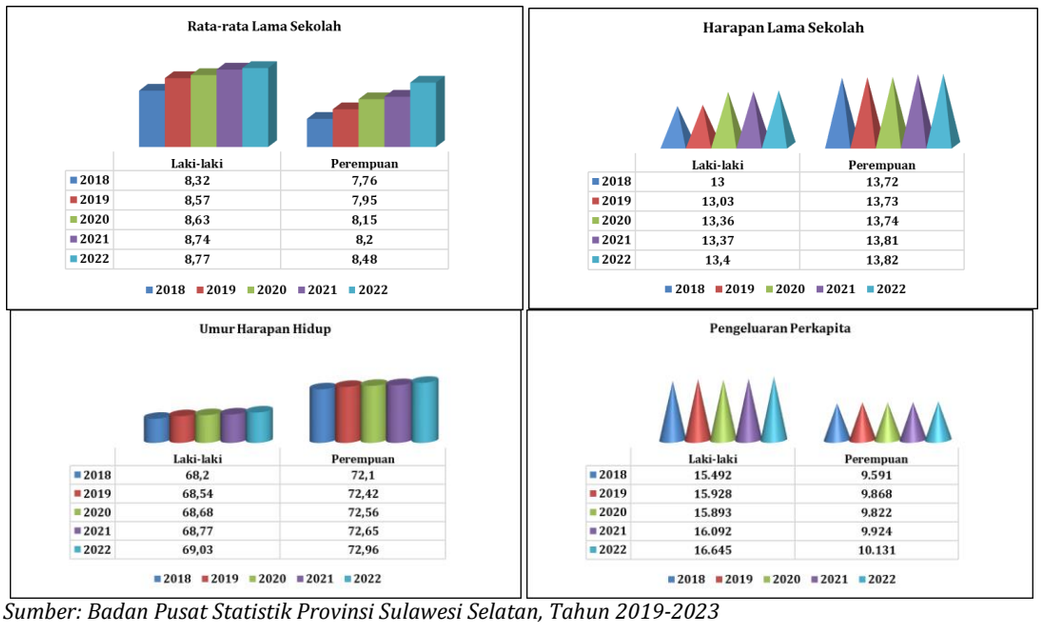

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Realita ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah tercatat dalam angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Secara rata-rata tahun 2022 laki-laki di Sulawesi Selatan sudah mampu mengenyam pendidikan hingga 8,77 tahun atau sekitar kelas 2-3 SMP, sementara perempuan masih sekitar 8,48 tahun. Meski demikian, secara rata-rata, dalam kurun 2018 hingga 2022 trend pertumbuhan RLS perempuan ternyata lebih cepat dibanding laki-laki. Peluang bersekolah anak perempuan sedikit lebih baik dibanding laki-laki. Pada tahun 2022, HLS perempuan tercatat 13,82 tahun, sementara laki-laki 13,4 tahun. Rendahnya peluang bersekolah laki-laki dibanding perempuan terkait fenomena diantaranya jumlah tenaga kerja anak laki-laki yang lebih tinggi dibanding perempuan. Kondisi ekonomi memaksa pekerja anak untuk bekerja, yang berimbas pada anak putus sekolah.

Dimensi kesehatan diwakili oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Secara genetik, perempuan mempunyai daya tahan kesehatan yang lebih baik dibanding laki-laki. Beberapa studi ilmiah telah membuktikannya, mulai dari segi kromosom, hormonal hingga gaya hidup, perempuan cenderung lebih unggul. Hal inilah yang menyebabkan secara umum umur harapan hidup perempuan lebih tinggi di banding laki-laki. Pada tahun 2022 UHH perempuan di Sulawesi Selatan telah mencapai 72,96 tahun, sementara laki-laki mencapai 69,03 tahun yang menggambarkan bahwa perempuan hidup lebih lama dibanding laki-laki. Secara akumulasi UHH di Sulawesi Selatan tahun 2022 telah mencapai usia 70,97 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,44 persen. Peningkatan UHH yang terjadi setiap tahunnya mengindikasikan kondisi kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan yang cenderung terus meningkat.

Ditinjau secara terpilah menurut gender dari tahun 2018 hingga 2022, pengeluaran perkapita yang disesuaikan atau Purchasing Power Parity (PPP) laki-laki jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Meski secara rata-rata pertumbuhan pengeluaran perkapita disesuaikan perempuan lebih tinggi

dibanding laki-laki, namun kesenjangan PPP laki-laki dan perempuan di Sulawesi Selatan masih cukup lebar. Tercatat di tahun 2022 pengeluaran perkapita disesuaikan laki-laki telah mencapai 16,645 juta rupiah, sementara perempuan sebesar 10,131 juta rupiah. Kondisi ini terkait fakta bahwa jumlah tenaga kerja perempuan yang memang lebih sedikit di banding laki-laki. Salah satu ukurannya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja. Dengan melihat kondisi ketenagakerjaan laki-laki dan perempuan, wajar apabila pengeluaran perkapita disesuaikan perempuan menjadi lebih rendah dibanding laki-laki.

Grafik II. 41.
Perbandingan APM Laki-laki dan Perempuan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

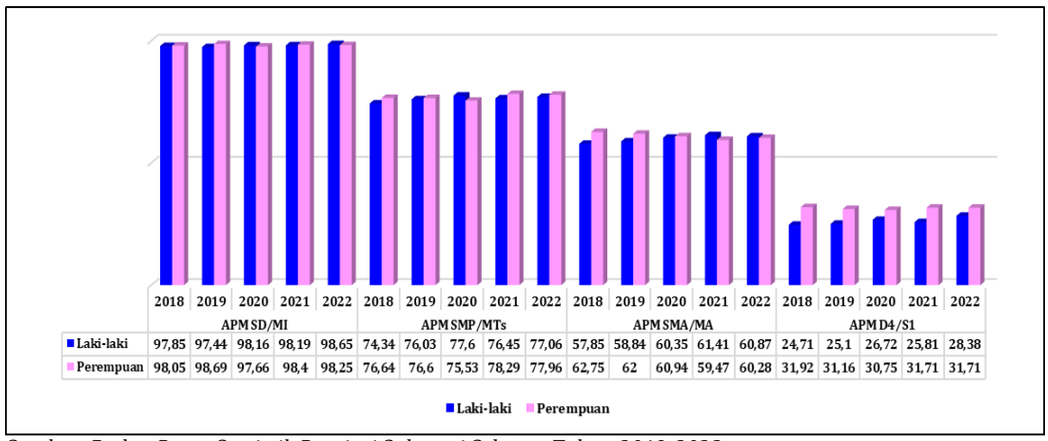

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Secara terpilah, APM perempuan untuk jenjang SD dan SMP tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Sedangkan pada jenjang SMA APM perempuan tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 serta lebih rendah daripada APM laki-laki. Perlu perhatian pada APM perempuan jenjang SMA yang telah mengalami penurunan sejak 2018 hingga 2022. Jika dibandingkan dengan laki-laki, maka APM perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, pada jenjang SD dan SMP, sementara untuk jenjang SMA masih di bawah APM laki-laki. Melihat komposisi APM perempuan dan laki-laki tahun 2022, terjadi sedikit pergeseran APM secara gender. Meski demikian, secara umum perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi menjadi penghalang untuk melaksanakan pendidikan. Kesempatan sekolah sudah merata bagi siapapun di wilayah Sulawesi Selatan.

2.2.2.12. Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KemenPANRB RI tahun 2023, bahwa hasil evaluasi KemenPANRB untuk tahun 2022, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel berupaya untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik, melalui perbaikan-perbaikan berkelanjutan. Hal

ini ditandai dengan meningkatnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi secara signifikan pada tahun 2022 sebear 4,98 poin dibandingkan tahun 2021 atau merupakan capaian tertinggi Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2018 hingga 2022. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 66,16 (B) belum mencapai target sebesar 78,00 (BB).

Tabel II.45.
Indeks Reformasi Birokrasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	%	B	B	B (60,07)	B (61,18)	66,16 (B)

Sumber : KemenPANRB, Tahun 2023

2.2.2.13. Nilai SAKIP Provinsi

Capaian nilai SAKIP di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar 2,04 poin dari nilai sebelumnya di tahun 2019. Kondisi ini memerlukan perbaikan yang signifikan untuk dapat mencapai target kriteria BB yang diharapkan pada tahun 2021. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KemenPANRB RI tahun 2023, capaian kinerja SAKIP pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,07 poin dari tahun 2021 atau menjadi capaian tertinggi nilai SAKIP dari tahun 2018 hingga 2022.

Tabel II.46.
Nilai SAKIP
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ Angka	B (64,28)	B (65,06)	B (63,02)	B (65,01)	B (68,08)

Sumber: KemenPANRB, Tahun 2023

2.2.2.14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan nilai yang fluktuatif, namun jika dikaji lebih lanjut fluktuasi nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya penambahan indikator yang pada tahun 2020 yaitu indikator indeks kualitas air laut (IKAL). Sehingga nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan dengan indikator pembangun Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan nilai, kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan nilai indeks kualitas air dan adanya penambahan 1 jenis indikator yaitu Indeks Kualitas Air Laut. Namun pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh peningkatan indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas air laut.

Tabel II.47.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Air	%	57,70	81,47	54,00	56,82	57,79
Indeks Kualitas Udara	%	88,67	88,69	88,73	89,13	90,35
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	60,41	61,14	63,56	55,40	55,46
Indeks Kualitas Air Laut	%	-	-	70,22	84,82	85,59
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	74,83	75,12	71,74	73,23	74,17

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2018-2023

2.2.2.15. Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen mendukung kebijakan nasional Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Dukungan tersebut diwujudkan dengan penetapan PERGUB Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan. Peraturan Gubernur ini antara lain mengatur pelibatan pemerintah kabupaten/kota dalam melaporkan kegiatan aksi mitigasi GRK dan menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahun 2030.

Berdasarkan hasil kaji ulang Rencana Aksi Daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD- GRK), target penurunan emisi GRK hingga tahun 2030 sebesar 3,5 juta ton CO^2 eq atau sebesar 5,6 persen terhadap nilai *Business as usual* (BAU). Berdasarkan data capaian indikator kinerja, potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Tahun 2019 sampai tahun 2021 dapat tercapai. Target penurunan emisi tahun 2022 adalah sebesar 1,198 juta ton CO2 eq dengan realisasi penurunan emisi GRK sebesar 1,36 juta ton CO2 eq. Tingkat capaian penurunan emisi gas rumak kaca (GRK) pada tahun 2022 adalah 113,52 persen dengan jumlah kegiatan/aksi mitigasi GRK yang dilaksanakan sebanyak 704 kegiatan.

Target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat tercapai setiap tahunnya tidak terlepas dari dukungan pemerintah kabupaten/kota. Sejak tahun 2020 kabupaten/kota secara aktif melaporkan kegiatan aksi mitigasi GRK yang yang dianggarkan melalui APBD masing-masing. Kegiatan yang telah dilaporkan melalui aplikasi AKSARA adalah yang dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pelaporan tersebut dilakukan secara berkala dan tepat waktu oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota setiap tahunnya untuk semua sektor, yaitu; sektor hutan dan lahan, sektor pertanian, sektor limbah, sektor transportasi, sektor energi dan sektor blue carbon. Provinsi Sulawesi Selatan termasuk provinsi yang aktif dan tepat waktu melaporkan aksi

mitigasi ke aplikasi AKSARA, sehingga pada tahun 2021 berhasil menjadi salah satu provinsi terbaik pelaporan AKSARA selama 1 dekade (2010-2020).

Perkembangan kondisi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 hingga 2022 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.48.
Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Potensi Penurunan emisi GRK	(Juta Ton CO2Eq)	0,84	0,89	0,96	1,13	1,36

Sumber: Pokja Pembangunan Rendah Karbon Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.2.3. Seni Budaya dan Olah Raga

Ketersediaan gedung lembaga sanggar kesenian diprovinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Data menunjukkan setiap 100.000 penduduk terdapat 5 lembaga sanggar seni di Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian pula halnya dengan jumlah gedung kesenian yang tidak mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022, kondisi ini disebabkan oleh titik berat pembangunan masih difokuskan pada kesehatan dan pemulihan ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan dan perbaikan daya beli masyarakat. Data selengkapnya terkait dengan perkembangan seni budaya dan olah raga di Sulawesi Selatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.49.
Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Lembaga Sanggar Kesenian	Lembaga/10.000 penduduk	0,0452	0,0471	0,0468	0,0468	0,0468
Jumlah gedung kesenian	Unit/10.000 penduduk	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Jumlah Gedung Olah Raga	Unit/10.000 penduduk	0,0025	0,0026	0,0074	0,0074	0,0074

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kepemudaaan dan Olahraga, Tahun 2023

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Pelayanan Urusan Wajib Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 3,89 persen capaian persentase jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pada tahun 2022 belum mencapai target nasional terkait pencapaian SPM Pendidikan sebesar 100 persen dengan

capaian 83,68 persen atau sejumlah 478.899 penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah dari total 478.899 penduduk usia 16-18 tahun.

Grafik II. 42.
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

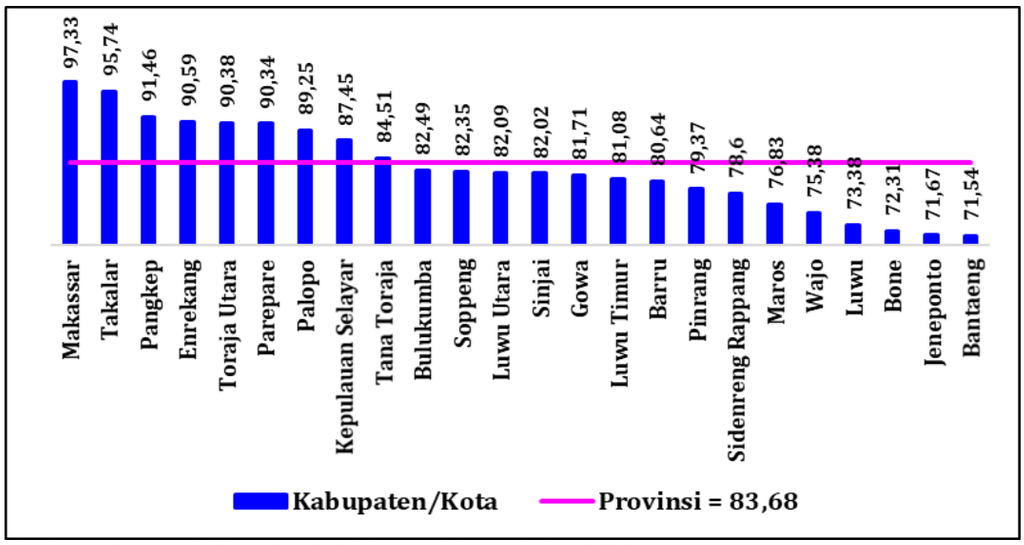

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pemenuhan standar layanan minimal urusan pendidikan yaitu persentase warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dimana persentase warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah tertinggi di Kota Makassar sebesar 97,33 persen dari sejumlah 80.989 warga negara usia 16-18 tahun. Sedangkan persentase warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar 71,45 persen dari sejumlah 8.375 warga negara usia 16-18 tahun.

Indikator kinerja pemenuhan standar layanan minimal urusan pendidikan terkait pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas yaitu persentase warga negara 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuasi dimana capaian tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 2,34 persen dengan capaian 82,73 persen namun belum mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 100 persen. Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus pada tahun 2022 sebesar 3.712 orang dari total 4.487 jumlah penduduk disabilitas usia 4-18 tahun. Persentase warga negara 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus tertinggi di Kota Makassar sebesar 89,98 persen dari 1.347 warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas. Sedangkan persentase warga negara 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus yang terendah di Kota Pare-Pare sebesar 77,78 persen dari sejumlah 117 warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 43.
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

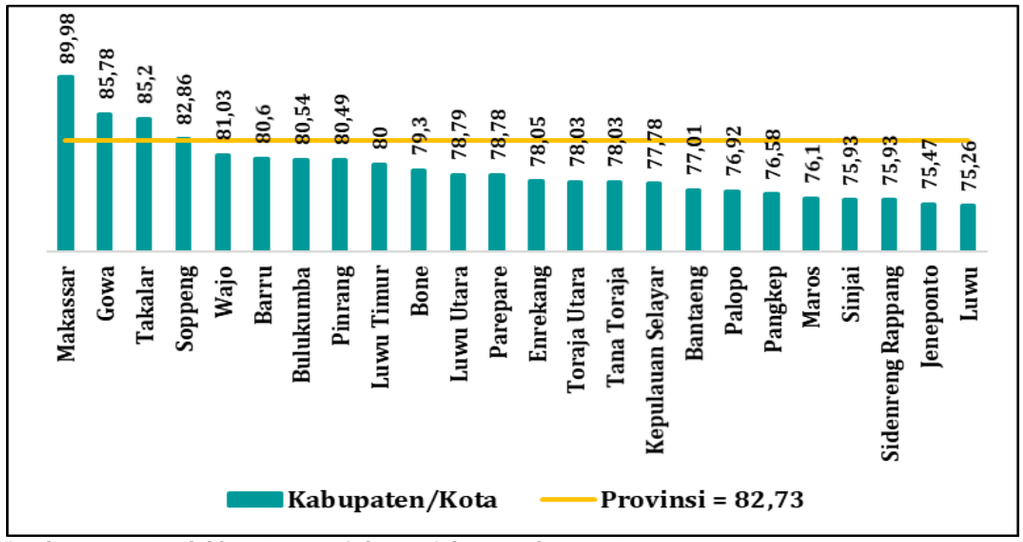

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Kinerja pembangunan pendidikan Sulawesi Selatan dapat digambarkan dari beberapa indikator keberhasilan antara lain angka partisipasi sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar. Angka partisipasi sekolah diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan. Tahun 2018 hingga 2022 Angka Partisipasi Kasar tertinggi dicapai pada jenjang pendidikan SD/MI. Adapun jenjang dengan APK terendah adalah PAUD baik di Sulawesi Selatan maupun nasional.

Tabel II.50.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan						
PAUD	%	32,16	29,74	31,79	29,41	30,56
SD/MI	%	110,28	108,46	106,99	106,85	106,71
SMP/MTs	%	86,97	84,22	86,97	86,82	86,19
SMA/SMK/MA	%	81,74	86,09	86,44	87,07	86,49
Nasional						
PAUD	%	37,92	36,93	37,52	35,59	35,28
SD/MI	%	108,61	107,46	106,32	106,2	106,27
SMP/MTs	%	91,52	90,57	92,06	92,8	92,11
SMA/SMK/MA	%	80,68	83,98	84,53	85,23	85,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Secara kewenangan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -0,58 poin atau -0,66 persen dari tahun 2021. Namun demikian Angka Partisipasi Kasar Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2022 masih diatas capaian nasional. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 44.
Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

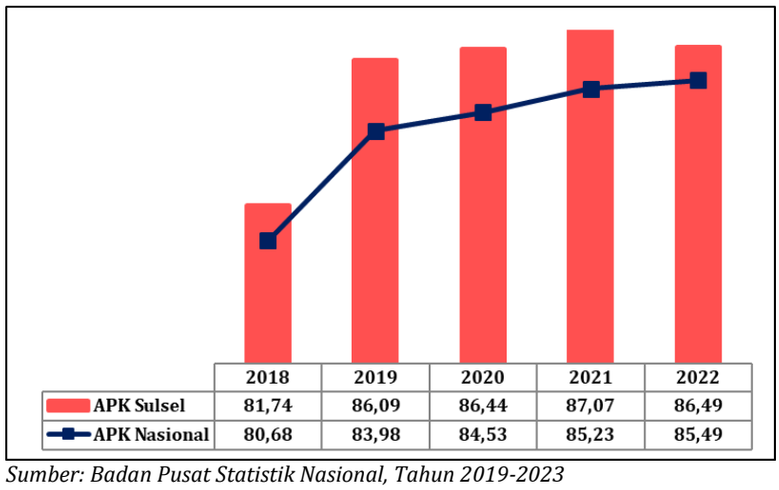

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM pada tiap jenjang pendidikan di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan APM Nasional.

Tabel II.51.
Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan						
SD Sederajat	%	98,03	98,06	97,98	98,26	98,41
SMP Sederajat	%	75,13	75,82	76,17	77,2	77,42
SM Sederajat	%	60,03	60,14	60,32	60,35	60,44
Nasional						
SD Sederajat	%	97,58	97,64	97,69	97,8	97,88
SMP Sederajat	%	78,84	79,4	80,12	80,59	80,89
SM Sederajat	%	60,67	60,84	61,25	61,65	61,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Capaian APM pada jenjang pendidikan SD sederajat tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan serta berada diatas capaian nasional. Sedangkan capaian APM SMP dan SM sederajat pada tahun 2018 hingga 2022 meskipun mengalami peningkatan namun berada dibawah capaian nasional. Secara kewenangan capaian APM SM sederajat tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,09 poin atau 0,15 persen dari tahun 2021, namun masih berada dibawah capaian nasional.

Grafik II. 45.
Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM)
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

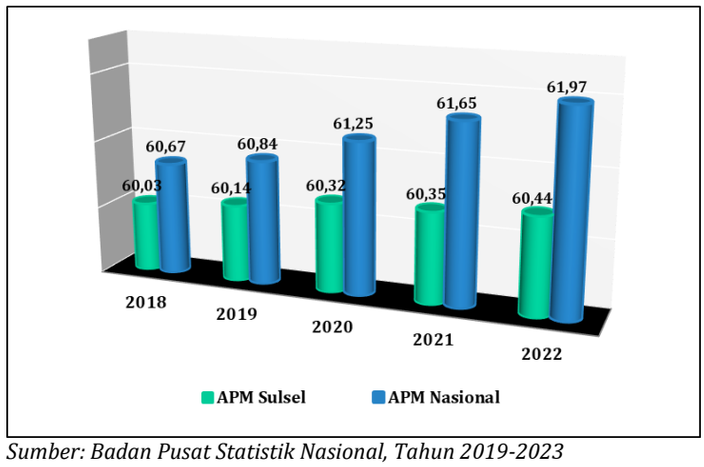

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah. Capaian Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan pada setiap kelompok umur menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga 2021.

Tabel II.52.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Jenjang Usia	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan						
Penduduk Usia 7-12 Tahun	%	99,25	99,23	99,25	99,29	99,43
Penduduk Usia 13-15 Tahun	%	93,13	93,22	93,34	93,55	93,2
Penduduk Usia 16-18 Tahun	%	70,18	70,85	70,89	71,21	70,81
Penduduk Usia 19-24 Tahun	%	33,72	34,44	34,51	35,08	35,07
Nasional						
Penduduk Usia 7-12 Tahun	%	99,22	99,24	99,26	99,19	99,1
Penduduk Usia 13-15 Tahun	%	95,36	95,51	95,74	95,99	95,92
Penduduk Usia 16-18 Tahun	%	71,99	72,36	72,72	73,09	73,51
Penduduk Usia 19-24 Tahun	%	24,4	25,21	25,56	26,01	25,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Grafik II. 46.
Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

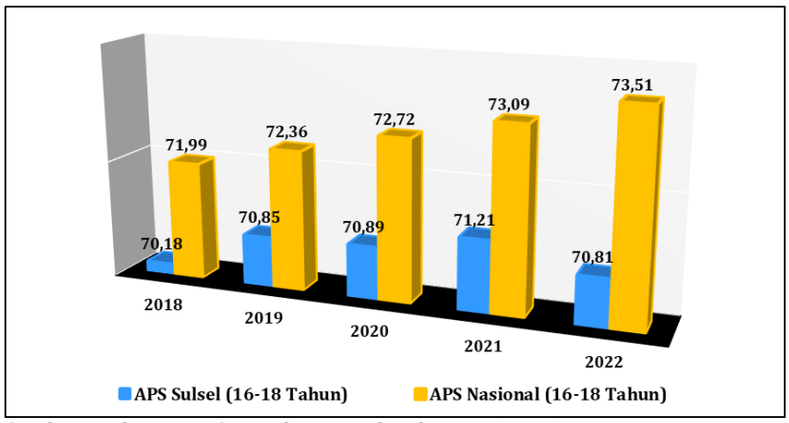

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Tahun 2018 hingga 2022 Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan masih lebih rendah dari capaian Nasional. Pada tahun 2022 Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia sekolah 16-18 tahun mengalami penurunan sebesar -0,4 poin atau -0,56 persen dari capaian tahun 2021.

Dimensi angka partisipasi sekolah yaitu terdiri dari anak usia 7-18 tahun yang masih sekolah, tidak/belum pernah sekolah, dan tidak bersekolah lagi. Berdasarkan data Susenas tahun 2018 hingga 2022, persentase anak yang tidak/belum pernah sekolah dan anak laki-laki usia 7-18 tahun lebih besar daripada anak perempuan usia 7-18 tahun. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.53.
Angka Anak Tidak Sekolah dan Masih Bersekolah Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Jenis Kelamin	Satuan	Anak Tidak Sekolah (Usia 7-18 tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tidak/Belum Pernah Sekolah						
Laki-laki	%	0,59	0,45	0,45	0,46	0,41
Perempuan	%	0,33	0,28	0,33	0,36	0,27
Tidak Bersekolah Lagi						
Laki-laki	%	10,08	1,71	9,11	9,67	9,71
Perempuan	%	7,41	1,18	8,06	8,15	8,83
Masih Bersekolah						
Laki-laki	%	89,34	97,84	90,44	89,87	89,88
Perempuan	%	92,26	98,53	91,6	91,49	90,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Grafik II. 47.
Perkembangan Angka Anak Tidak Sekolah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

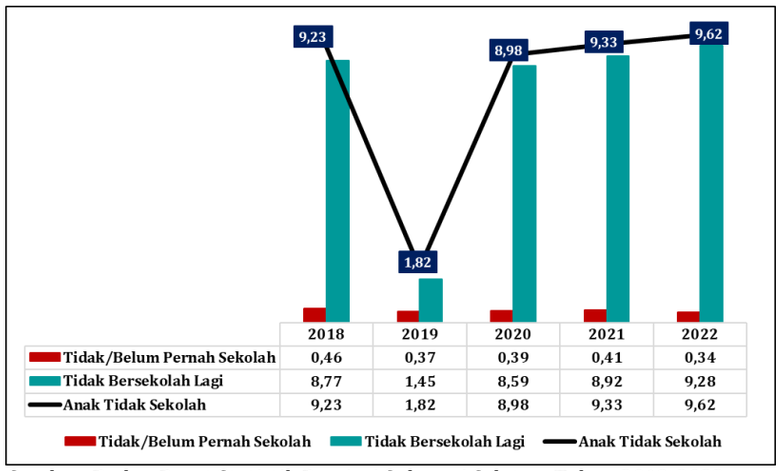

	2018	2019	2020	2021	2022
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,46	0,37	0,39	0,41	0,34
Tidak Bersekolah Lagi	8,77	1,45	8,59	8,92	9,28
Anak Tidak Sekolah	9,23	1,82	8,98	9,33	9,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Grafik diatas menggambarkan nahwa capaian angka anak tidak sekolah tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan tren peningkatan dengan pertumbuhan 3,11 persen dari tahun 2021 ke tahun 2022 dengan capaian 9,62 persen. Pada tahun 2022 anak usia 7-18 tahun yang masih bersekolah mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar -0,32 persen dengan capaian 90,38 persen. Hal tersebut berarti 9,62 persen sisanya sedang tidak duduk di bangku sekolah (anak tidak sekolah). Jika dirinci menurut partisipasi sekolah, terdapat sebesar 0,34 persen anak usia 7-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan sebesar 9,28 persen anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah lagi.

Grafik II. 48.
Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

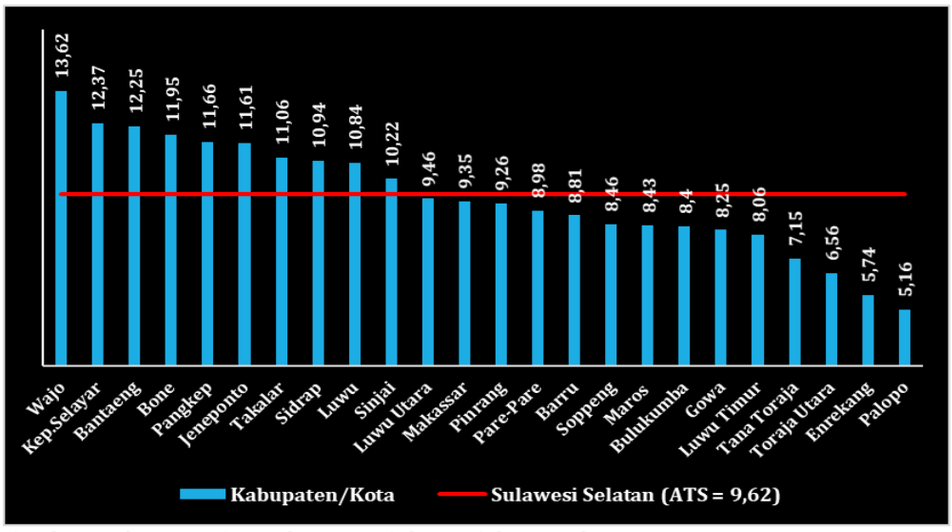

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Tahun 2022 terdapat 10 kabupaten dengan capaian angka anak tidak sekolah (ATS) usia 7-18 tahun yang berada diatas capaian provinsi yaitu Kabupaten Wajo, Kepulauan Selayar, Bantaeng, Bone, Pangkajene dan Kepulauan, Jeneponto, Takalar, Sidrap, Luwu, dan Sinjai.

Angka anak tidak sekolah tertinggi di Kabupaten Wajo mencapai 13,62 persen dengan rincian anak usia 7-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 0,61 persen, anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah lagi sebesar 11,75 persen, dan anak usia 7-18 tahun yang masih bersekolah sebesar 87,63 persen. Sedangkan capaian anak tidak sekolah (ATS) terendah di Kota Palopo mencapai 5,16 persen dengan rincian anak usia 7-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 0,63 persen, anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah lagi sebesar 4,52 persen, dan anak usia 7-18 tahun yang masih bersekolah sebesar 94,84 persen.

Grafik II. 49.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Anak Usia 7-18 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Bersekolah Lagi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

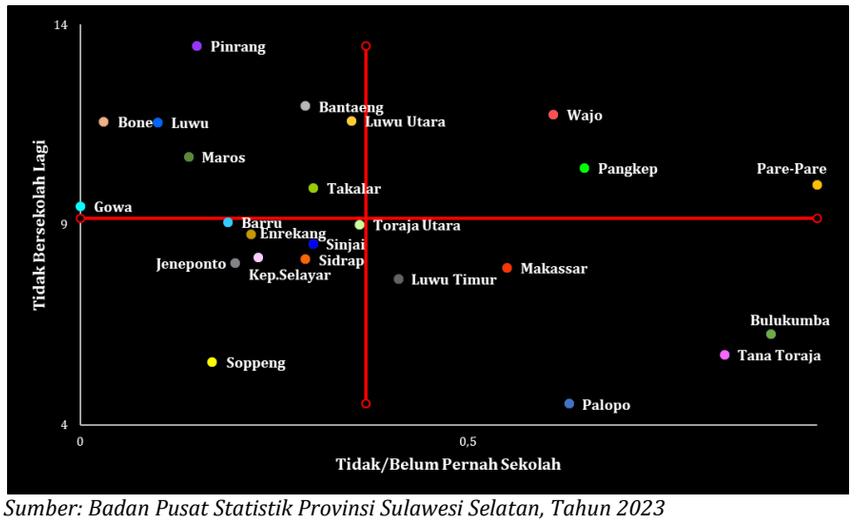

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan grafik pengelompokan wilayah anak usia 7-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi Kabupaten Pinrang adalah kabupaten yang tertinggi di Sulawesi Selatan dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah lagi pada tahun 2022. Sedangkan Kota Pare-Pare merupakan wilayah dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah tertinggi di Sulawesi Selatan.

Grafik II. 50.
Angka Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

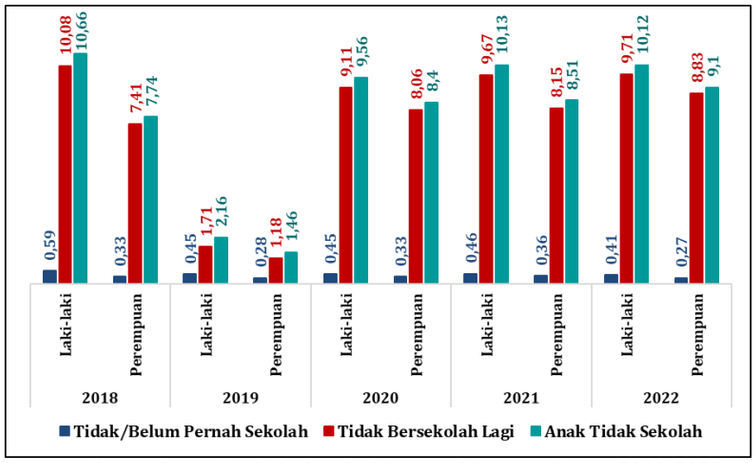

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Jika dipilah berdasarkan gender, tahun 2018 hingga 2022 angka anak tidak sekolah baik yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi untuk anak usia 7-18 tahun jenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Capaian angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuasi dimana pada tahun 2018 angka putus sekolah sebesar 1,10 persen dan mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 0,71 persen. Angka ini menunjukan adanya kondisi pemerataan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang semakin baik. Keberhasilan ini didukung adanya pendanaan dana BOS nasional yang setiap tahunnya meningkat dan adanya sebagian daerah menyediakan BOSDA. Pada tahun 2020 angka putus sekolah mengalami peningkatan menjadi 1,35 persen dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 1,02 persen, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 mencapai 3,62 persen atau 15.315 jumlah siswa yang putus sekolah. Angka putus sekolah di Sulawesi Selatan tertinggi di Kabupaten Wajo sebesar 8,73 persen dengan jumlah siswa yang putus sekolah sebesar 1.193 dari 13.671 jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Sedangkan angka putus sekolah terendah di Kabupaten Luwu Utara sebesar 1,47 persen dengan jumlah siswa yang putus sekolah sebesar 218 dari 14.844 jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.

Grafik II. 51.
Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Angka Putus Sekolah (APtS) dan Angka Melanjutkan (AM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

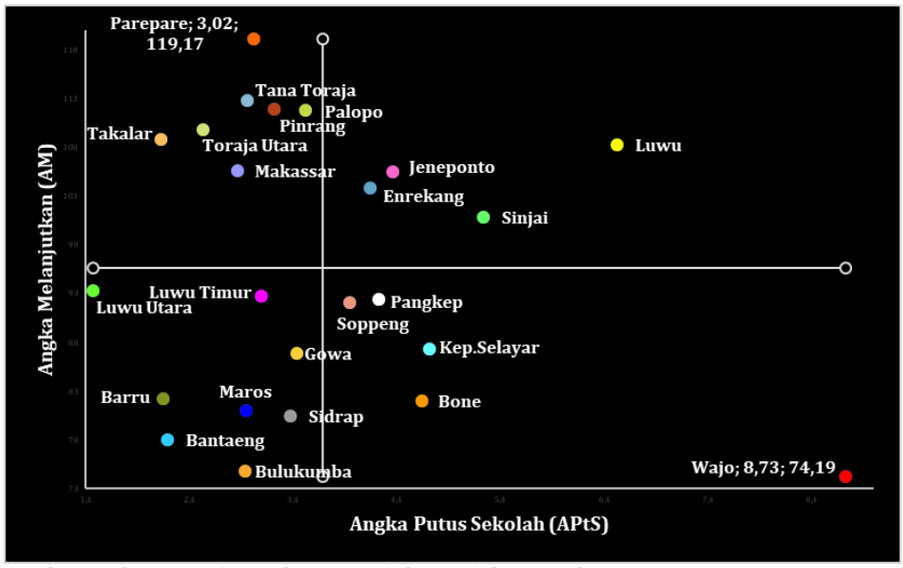

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Capaian Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2020 hingga 2022 mengalami tren peningkatan yang mencapai 147.718 jumlah siswa baru SMA/SMK/MA dari 154.943 jumlah siswa SMP/MTs kelas III yang menyelesaikan pendidikan pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan hingga tahun 2020 dimana salah satu penyebabnya adalah kondisi pandemic covid-19. Kondisi ini menunjukkan, menurunnya kemampuan masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat

SMA/MA/SMK. Pada tahun 2022 angka melanjutkan pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tertinggi di Kota Pare-Pare sebesar 119,17 persen atau sejumlah 3.258 siswa baru dari 2.734 yang menyelesaikan pendidikan tingkat SMP/MTs . Sedangkan angka melanjutkan pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA terendah di Kabupaten Wajo sebesar 74,19 persen atau sejumlah 4.633 siswa baru dari 6.245 siswa yang menyelesaikan pendidikan tingkat SMP/MTs.

Tabel II.54.
Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA dan
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka Putus Sekolah	%	1,10	0,71	1,35	1,02	3,62
Angka Melanjutkan	%	98,99	97,20	92,07	93,82	95,34

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Salah satu indikator penilaian mendasar dari tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah adalah dengan melihat angka melek huruf (AMH). Melek huruf sendiri adalah kemampuan membaca dan menulis, dimana seseorang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan seseorang hanya dapat membaca dan menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf. Indikator ini dapat dijadikan gambaran peningkatan kualitas sumber daya manusia disuatu daerah. Angka melek huruf Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,85 persen dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 94,55 persen.

Tabel II.55.
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-64 Tahun
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Banyaknya Penduduk Usia 15-64 Tahun yang Melek Huruf	Orang	5.281.145	5.404.659	5.523.289	5.598.898	5.675.232
Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	Orang	5.779.141	5.840.507	5.901.873	5.945.547	6.002.624
Angka Melek Huruf	**%**	**91,38**	**92,54**	**93,58**	**94,16**	**94,55**

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Hingga tahun 2022 jumlah bangunan gedung sekolah SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1.042 unit mengalami peningkatan sejumlah 15 unit dari tahun 2021 dengan persentase bangunan dengan kondisi baik sejumlah 60,63 persen untuk gedung SMA dari total 609 unit dan 61,49 persen untuk gedung SMK dari 433 unit mengalami peningkatan dari tahun 2021. Sedangkan persentase bangunan yang rusak ringan/sedang untuk gedung SMA sebesar 35,24 persen dan gedung SMK sebesar 35,58 persen mengalami penurunan dari tahun 2021. Namun kondisi bangunan yang rusak berat mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan capaian 4,13 persen

untuk gedung SMA dan 2,93 persen untuk gedung SMK. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan rehabilitasi gedung sekolah yang meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang laboratorium biologi, ruang parktik, ruang perpustakaan, dan ruang serbaguna.

Grafik II. 52.
Kondisi Ruang Kelas Pendidikan SMA/SMK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

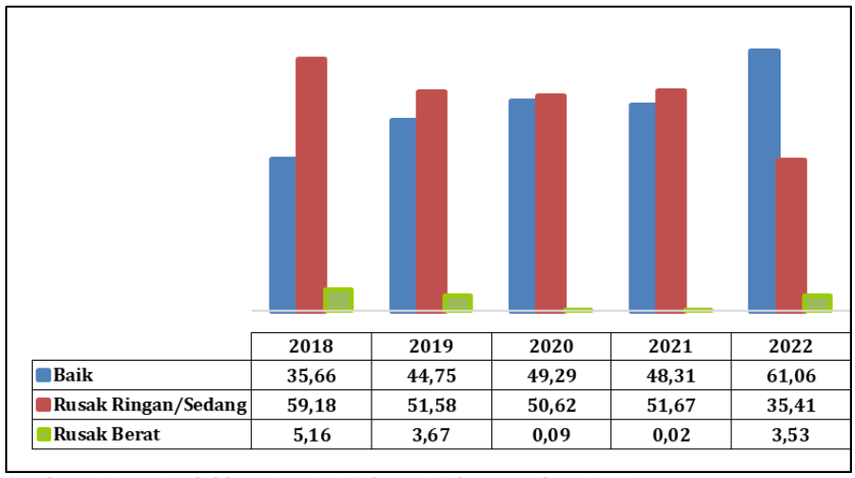

	2018	2019	2020	2021	2022
Baik	35,66	44,75	49,29	48,31	61,06
Rusak Ringan/Sedang	59,18	51,58	50,62	51,67	35,41
Rusak Berat	5,16	3,67	0,09	0,02	3,53

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah sekolah khusus bagi penyandang Disabilitas sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan, namun jumlah tersebut untuk proporsi pada jenjang SMPLB masih sangat kurang, sedangkan bila dibandingkan usia sekolah pada tingkat tersebut belum sebanding dengan jumlah sekolah yang tersedia. Hingga tahun 2022 jumlah total SLB berjumlah 249 unit. Data jumlah sekolah khusus bagi penyandang disabilitas selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.56.
Jumlah sekolah Luar Biasa Bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No.	Jenis Sekolah	Satuan	Jumlah SLB				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	SDLB	Unit	1	1	84	87	93
2	SMPLB	Unit	1	0	84	85	86
3	SMLB	Unit	79	82	84	73	70
Total SLB		**Unit**	**81**	**83**	**252**	**245**	**249**

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Siswa penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan SDLB merupakan jumlah siswa terbanyak sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2022 jumlah siswa penyandang disabilitas yang berpartisipasi pada jenjang pendidikan SDLB hingga SMLB mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk dapat mendorong motivasi bersekolah bagi penyandang disabilitas dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan memadai. Data siswa penyandang disabilitas berdasarkan jenjang pendidikannya selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.57.
Jumlah Siswa Penyadang Disabilitas Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2022

No.	Jenis Sekolah	Satuan	Jumlah Siswa				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	SDLB	Orang	3.102	2.970	2.821	2.501	2.555
2	SMPLB	Orang	1.037	1.014	1.023	1.033	1.253
3	SMLB	Orang	620	684	652	630	786
Total Siswa		**Orang**	**4.759**	**4.668**	**6.141**	**4.164**	**4.594**

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah siswa penyandang disabilitas berdasarkan kelompok umur di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2022 didominasi oleh siswa dengan usia 7–12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah untuk usia tersebut masih sangat dibutuhkan, mengingat bahwa data menunjukkan jumlah sekolah SDLB hanya sebanyak 93 unit pada tahun 2022. Untuk siswa penyandang disabilitas usia 16-18 tahun pada tahun 2022 sejumlah 512 orang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Data disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.58.
Jumlah Siswa Berdasarkan Kelompok Umur Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No.	Kelompok Umur	Satuan	Jumlah Siswa				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	< 7 Tahun	Orang	99	102	118	135	148
2	7 - 12 Tahun	Orang	1.820	1.816	1.796	1.801	2.407
3	13 - 15 Tahun	Orang	1.056	954	987	1.033	1.253
4	16 - 18 Tahun	Orang	885	913	876	630	512
5	> 18 Tahun	Orang	899	883	719	565	274
Total		**Orang**	**4.759**	**4.668**	**4.496**	**4.164**	**4.594**

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan jenis ketunaan, jumlah siswa terbanyak berdasarkan data tahun 2018-2022 adalah siswa tuna grahita dan tuna rungu. Khusus siswa tuna grahita pada tahun 2022 berjumlah 2.380 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Olehnya itu sarana prasarana khusus bagi penyandang tuna grahita dan tuna rungu dalam pelaksanaan pendidikan siswa disabilitas perlu menjadi perhatian.

Tabel II.59.
Jumlah Siswa Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Ketunaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022

No.	Jenis Ketunaan	Satuan	Jumlah Siswa				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tuna Netra	Orang	53	213	221	101	205
2	Tuna Rungu	Orang	419	1.038	1.083	1.183	1.047
3	Tuna Grahita	Orang	107	2.099	2.525	2.279	2.380
4	Tuna Daksa	Orang	4	289	282	483	311
5	Autisme	Orang	-	28	379	114	651

No.	Jenis Ketunaan	Satuan	Jumlah Siswa				
			2018	2019	2020	2021	2022
6	Tuna Ganda	Orang	31	1.001	1.113	4	0

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Tahun 2022 jumlah siswa yang bebas buta aksara Al-Qur'an yaitu 256.680 orang dari jumlah total siswa 277.044 orang atau sebesar 92,65 persen mengalami peningkatan dibanding dari tahun sebelumnya sebesar 23,5 persen. Capaian persentase siswa SMA/SMK yang bebas narkoba pada tahun 2022 sebesar 99,97 persen atau sejumlah 300.339 siswa SMA/SMK yang bebas narkoba dari total 300.441 siswa, mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 9,26 persen. Sedangkan jumlah SMA/SMK yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama yaitu 526 unit atau 73,46 persen pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan capaian 80 persen.

Dari total 1.042 unit sekolah tingkat pendidikan menengah terdapat sejumlah 42 sekolah yang masuk kategori wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang tidak menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK karena keterbatasan dan jangkauan terhadap teknologi informasi yang tidak memadai. Salah satu contoh penerapan penyelenggaraan dan pelayanan Pendidikan berbasis TIK bagi sekolah yang masuk kategori 3T adalah tidak melaksanakan ujian nasional berbasis teknologi informasi. Capaian persentase pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK pada tahun 2022 seebsar 634 unit atau 86,26 persen mengalami peningkatan sebesar 6,5 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra pada tahun 2022 sebesar 45,3 persen atau dengan sejumlah 674 satuan pendidikan (SMA/SMK).

Rasio guru terhadap Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah Tahun 2022 yaitu 1 : 13 yang menunjukkan bahwa 1 orang guru mempunyai beban kerja dalam mengajar dan mengawasi 13 murid. Jumlah murid SMA/SMK/MA pada tahun 2022 sebesar 422.190 orang, sedangkan jumlah guru jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 32.763 orang. Jumlah satuan pendidikan (SMA/SMK) yang telah memeperoleh izin penyelenggaraan pendidikan yaitu 674 dari 716 satuan pendidikan atau dengan capaian 94,13 persen. Pada tahun 2022 jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S.1/D.IV sebesar 24.614 guru dari total 24.823 guru pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA atau dengan capaian 99,16 persen. Jumlah guru SMA yang bersertifikat pada tahun 2022 sebesar 8.333 pendidik baik negeri atau swasta yang memiliki ijazah Diploma Empat (D.IV) atau Sarjana (S.1) serta Sertifikat Pendidik dari total 15.814 guru SMA atau dengan capaian 52,69 persen mengalami penurunan dari tahun 2021. Sedangkan jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) yang bersertifikat baik negeri maupun swasta yang memiliki ijazah Diploma Empat (D.IV) atau Sarjana (S.1) serta Sertifikat Pendidik pada tahun 2022 sebesar 4.864 dari total 10.381 pendidik atau dengan capaian 46,85 persen mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan capaian 52,24 persen. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 53.
Pendidik Pada Jenjang SMA dan SMK yang Memiliki Ijazah ≥ S1 dan Bersertifikat Pendidik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

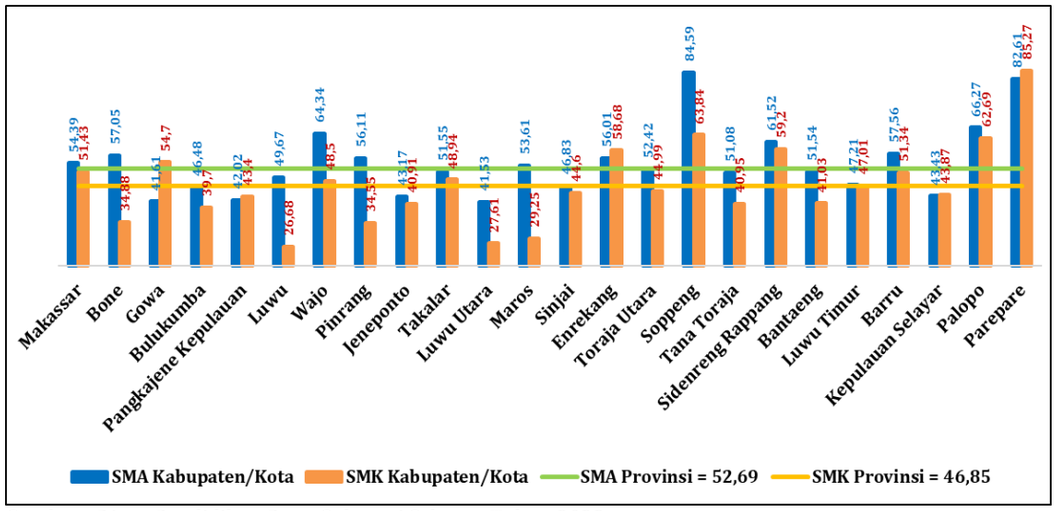

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pendidikan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.60.
Capaian Kinerja Program Urusan Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Qur'an	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	75	92,65
Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba	%	Belum dilakukan pengukuran	90	91	91,5	99,97
Persentase warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	%	74,23	75,25	76,62	80,55	83,68
Persentase warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	%	80	80	81	80,84	82,73
Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	50,05	80	73,46
Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	%	Belum dilakukan pengukuran	63	75	81	86,26

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Guru/ Murid	1:15	1:14	1:13	1:13	1:13
Jumlah Murid SMA/MA/SMK	Orang	290.422	295.634	415.158	422.588	422.190
Jumlah Guru SMA/MA/SMK	Orang	20.015	20.469	31.216	33.191	32.763
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S.1/D-IV	%	98,63	98,69	98,84	94,83	99,16
Persentase Guru SMA yang bersertifikat	%	53,76	53,78	51,02	56,07	52,69
Persentase Guru SMK yang bersertifikat	%	42,41	45,6	44,25	52,24	46,85
Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	94,13
Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	48,25	45,3

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.1.2 Kesehatan

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya pemberian imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. Imunisasi dasar pada bayi dilakukan pada saat bayi masih berusia kurang dari 12 bulan, dengan pemberian imunisasi meliputi BCG, DPT, Polio, Hepatitis, dan Campak. Bayi dikatakan mendapatkan imunisasi dasar lengkap terdiri dari BCG satu kali, DPT tiga kali, polio empat kali, hepatitis tiga kali dan campak satu kali. Untuk menilai status kelengkapan imunisasi dasar pada bayi dapat ditinjau dari cakupan imunisasi campak karena pemberian imunisasi campak merupakan imunisasi yang paling akhir diberikan setelah keempat imunisasi dasar pada bayi yang lain telah diberikan.

Tahun 2020 hingga 2022 cakupan desa/kelurahan UCI mengalami tren peningkatan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 94,3 persen dimana sejumlah 4 kabupaten/kota dengan capaian 100 persen desa/kelurahan UCI yaitu Kota Makassar (153 kelurahan) dan Parepare (22 kelurahan), serta Kabupaten Pinrang (109 desa/kel) dan Sinjai (80 desa/kel). Sedangkan capaian terendah jumlah desa/kelurahan UCI adalah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 74 desa/kel pemberian imunisasi dasar secara lengkap dari total 88 desa/kel atau dengan capaian 84,1 persen.

Grafik II. 54.
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

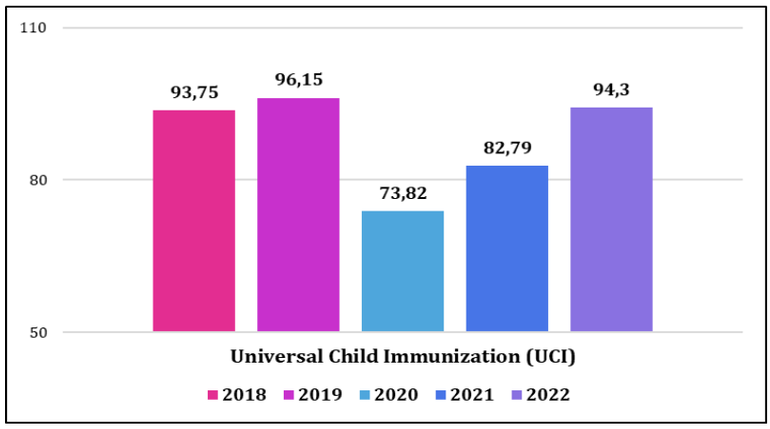

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2023

Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama angka kematian ibu. Pada tahun 2022 jumlah kematian ibu sebesar 174 jiwa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jumlah kematian ibu tertinggi di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 di Kota Makassar sebesar 21 kasus kematian mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 14 kasus. Kematian bayi adalah kematian anak kurang dari satu tahun. Kematian bayi diukur sebagai tingkat kematian bayi yang merupakan jumlah kematian anak di bawah satu tahun per 1000 kelahiran. Jumlah kematian bayi tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan dimana tahun 2022 mencapai 1.117 jiwa. Jumlah kematian bayi terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar 8 kasus kematian, sedangkan yang tertinggi di Kota Makassar sebesar 167 kasus kematian.

Grafik II. 55.
Jumlah Kematian Ibu dan Bayi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

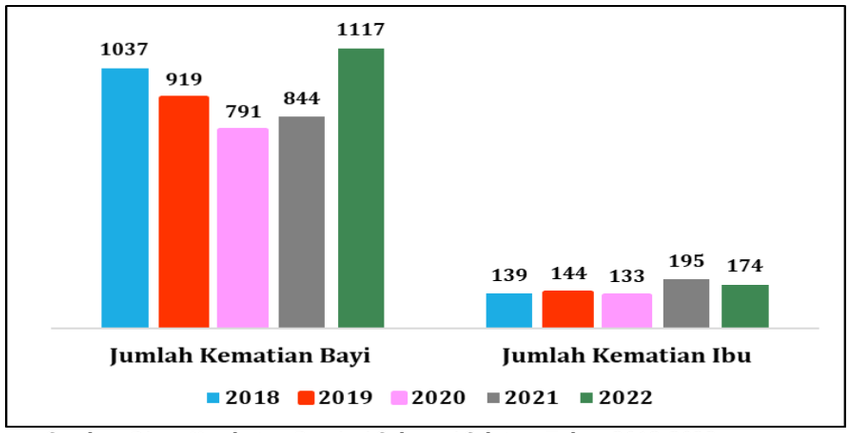

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2023

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 memberikan gambaran status gizi balita (stunting, wasting, underweight, overweight) dan determinannya meliputi indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Prevalensi balita stunting di Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren penurunan. Pada tahun 2020 tidak dilakukan survey terhadap capaian prevalensi balita stunting. Faktor pendorong yang mendukung

penurunan stunting ini adalah tersedianya alokasi makanan tambahan ibu hamil KEK bersumber dana Penugasan/DAK Fisik dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bersumber dari dana Dekonsentrasi/Kemenkes RI, tersedianya alokasi makanan tambahan balita gizi kurang bersumber dari dana Penugasan/DAK Fisik serta adanya data balita gizi kurang by name by address sasaran PMT dari data aplikasi e-PPGBM (aplikasi online Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Beberapa faktor penghambat diantaranya alokasi distribusi di tingkat Puskesmas belum merata sehingga masih ada puskesmas yang kelebihan/kekurangan stok PMT, masih ada puskesmas yang terlambat mendistribusikan PMT ke sasaran serta masih ada puskesmas yang tidak mendistribusikan PMT ke sasaran sesuai kebutuhan anak dan ibu hamil dengan alasan pemerataan.

Grafik II. 56.
Prevalensi Balita Stunting
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

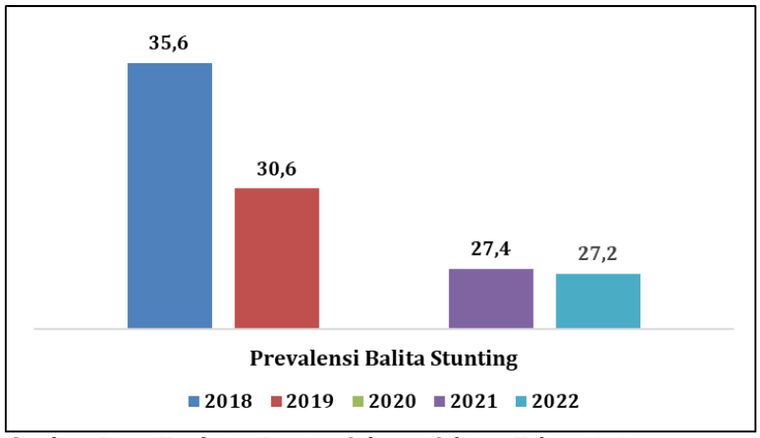

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Status gizi tingkat provinsi tahun 2022 menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan berada di peringkat 10 dengan angka stunting tertinggi diantara 34 provinsi. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 57.
Perbandingan Angka Stunting Sulawesi Selatan dengan
Provinsi Lain Di Indonesia Tahun 2022

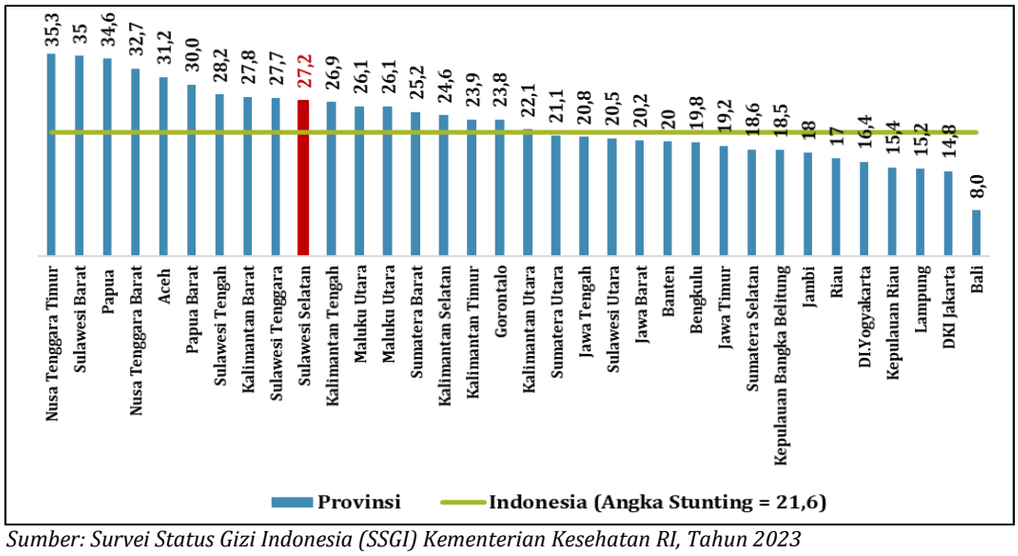

Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2023

Berdasarkan data SSGI tahun 2022, angka stunting tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,07 persen dari tahun 2021. Sejumlah 11 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan angka stunting yaitu Luwu Utara (52,82), Wajo (26,55), Tana Toraja (21,23), Luwu (17,11), Kepulauan Selayar (15,88), Pare-Pare (9,27), Sidenreng Rappang (7,48), Soppeng (5,91), Jeneponto (5,01), Toraja Utara (4,6), Pangkajene dan Kepulauan (3,32) persen. Sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya mengalami pertumbuhan negatif dimana penurunan angka stunting tertinggi di Kabupaten Barru sebesar -46,59 persen.

Grafik II. 58.
Prevalensi Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

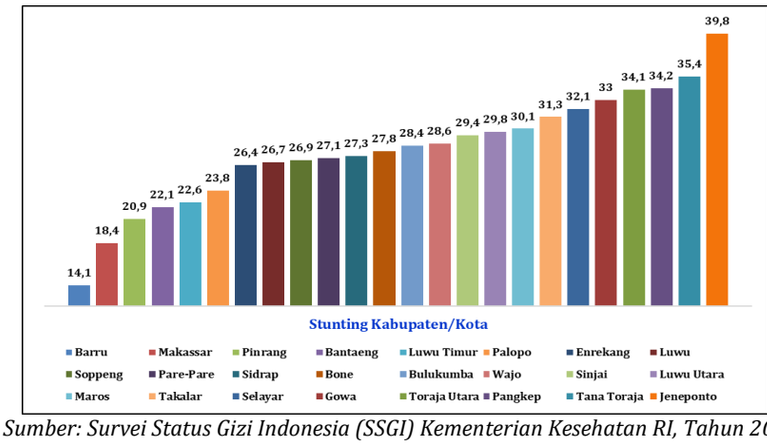

Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2022

Gizi Buruk (Wasting) adalah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan atau berat badan berdasarkan tinggi badannya rendah (kurus) dan menunjukkan penurunan berat badan (akut) dan parah. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia, pada tahun 2022 Sulawesi Selatan berada pada urutan ke-17 tertinggi dengan prevalensi Balita Gizi Buruk (Wasted) dari 34 provinsi di Indonesia serta mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 33,87 persen. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 59.
Perbandingan Prevalensi Balita Gizi Buruk (Wasting)
Sulawesi Selatan dan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022

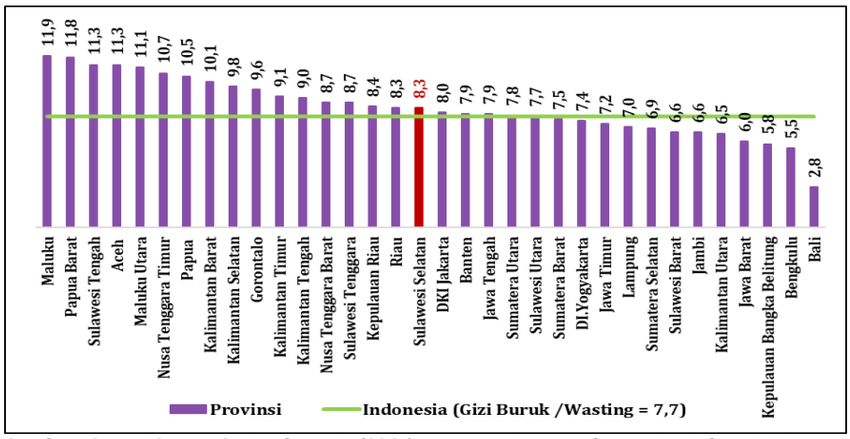

Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2023

Sedangkan Gizi Kurang (Underweight) adalah kondisi kegagalan bayi untuk mencapai berat badan ideal, yang kemudian juga bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, sesuai usianya, dalam jangka waktu tertentu. Gangguan ini bisa disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat-zat gizi yang dibutuhkan sesuai usianya. Status gizi anak dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu asupan makanan yang kurang dan penyakit infeksi. Asupan energi yang kurang dapat menyebabkan ketidakseimbangan negatif akibatnya berat badan lebih rendah dari normal atau ideal. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia, pada tahun 2022 Sulawesi Selatan berada pada urutan ke-11 tertinggi dengan prevalensi Balita Gizi Kurang (Underweight) dari 34 provinsi di Indonesia serta mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 14,21 persen.

Grafik II. 60.
Perbandingan Prevalensi Balita Gizi Kurang (Underweight)
Sulawesi Selatan dan Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2022

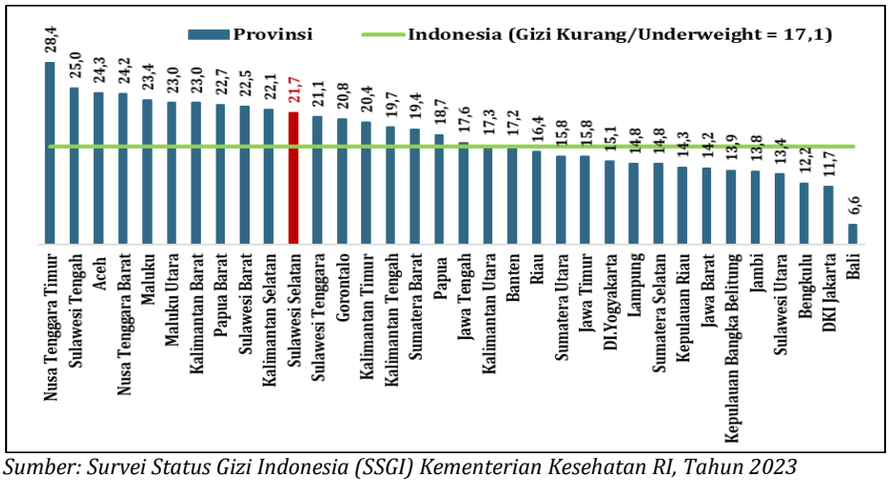

Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2023

Grafik II. 61.
Prevalensi Balita Gizi Buruk (Wasting) dan Gizi Kurang (Underweight)
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

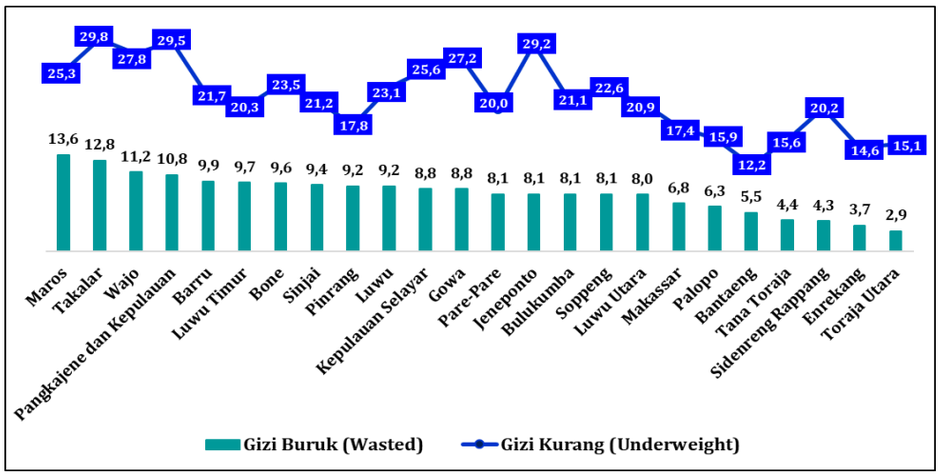

Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2023

Angka balita gizi buruk (wasting) di Sulawesi Selatan tahun 2022 tertinggi di Kabupaten Maros (13,6) mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 37,4 persen atau 3,7 poin. Sedangkan angka balita gizi buruk (wasting) terendah di Toraja Utara (2,9) mengalami peningkatan sebesar 38,1 persen atau 0,8 poin dari tahun 2021. Angka balita gizi kurang (underweight) di

Sulawesi Selatan tahun 2022 tertinggi di Kabupaten Takalar (29,8) mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 8,8 persen atau 2,4 poin. Sedangkan angka balita gizi kurang (underweight) terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar 12,2 tidak mengalami perubahan dari capaian tahun 2021.

Grafik II. 62.
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

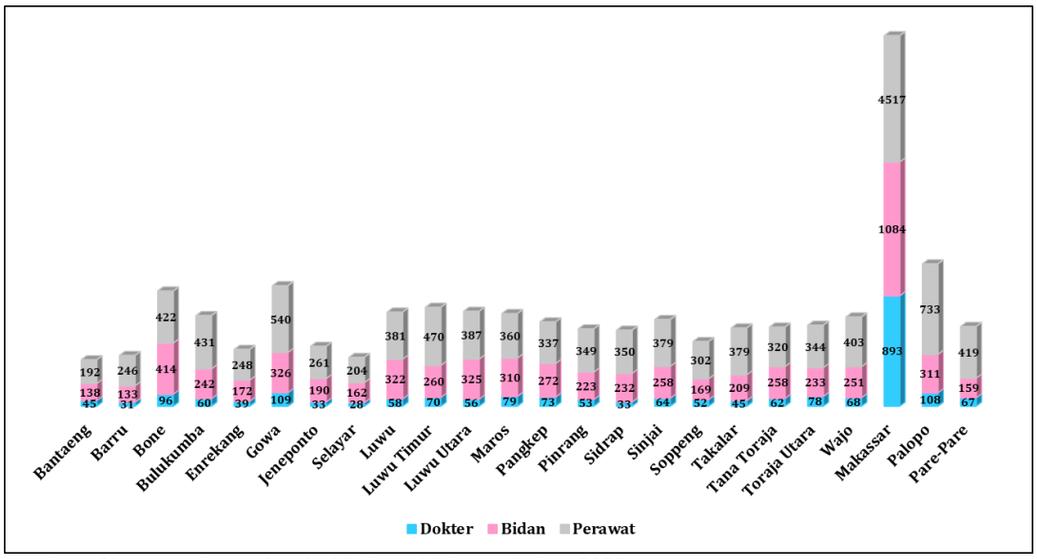

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jumlah tenaga kesehatan di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 terdiri dari Dokter sejumlah 2.300 orang, Perawat sejumlah 12.974 orang, dan Bidan sejumlah 6.653 orang. Jumlah fasilitas kesehatan pada tahun 2022 digambarkan pada diagram berikut ini.

Diagram II.4.
Jumlah Fasilitas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

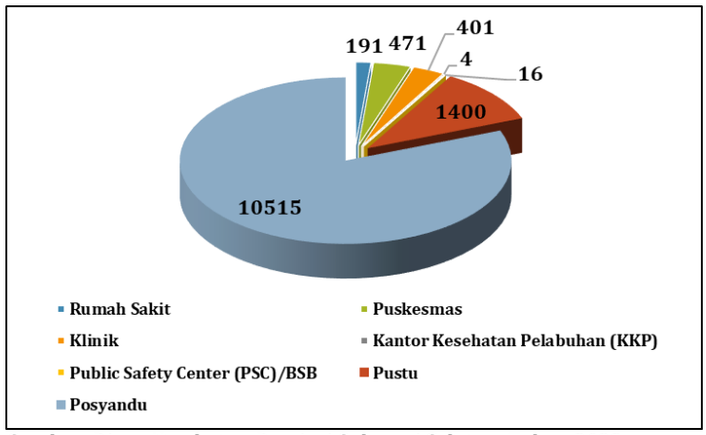

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Terkait pemenuhan standar pelayanan minimal yaitu pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak bencana, dimana pada tahun 2022 sejumlah 55.781 penduduk terdampak akibat bencana Kebakaran, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor, Banjir, Kecelakaan Transportasi, KLB dan Pohon Tumbang dengan jumlah wilayah terdampak sebanyak 93 wilayah dengan frekuensi 154 kejadian serta sejumlah 65 kejadian dengan resiko pengungsian

dengan jumlah pengungsi sebanyak 16182 orang. Dilaporkan juga luka ringan 133 orang, luka berat 4 orang dan korban meninggal 21 orang. Pada tahun 2022 telah dilakukan pembentukan Disaster Medical Tim (DMT) yang beranggotakan masing-masing dari Rumah Sakit pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) dan Rumah Sakit TNI/Polri Sebanyak 12 Tim yang diharapkan menjadi tim siap siaga dalam menghadapi ancaman bencana dan krisis kesehatan.

Tabel II.61.
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Bencana
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Jenis Kejadian Bencana	Frekuensi	Jumlah Pos Kesehatan	Penduduk Terdampak	Penduduk Terdampak yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
1	**Kebakaran**	66	6	2.116	2.116
2	**Angin Puting Beliung**	38	9	2.911	2.911
3	**Tanah Longsor**	12	2	1.086	1.086
4	**Banjir**	33	48	49.577	49.577
5	**Kecelakaan Transportasi**	1	-	12	12
6	**KLB**	3	-	74	74
7	**Pohon Tumbang**	1	0	5	5
Total		**154**	**65**	**55.781**	**55.781**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular dan keracunan pangan di Sulawesi Selatan yang dilaporkan sebanyak 83 kejadian yang terjadi di sejumlah 16 kabupaten/kota. Semua kejadian luar biasa penyakit menular dan keracunan pangan yang dilaporkan telah dilakukan penyelidikan kurang dari 24 jam. Namun masih diperlukan peningkatan kerjasama lintas program/sektor terkait dalam pelaksanaan investigasi KLB sehingga hasil penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan di lapangan lebih komprehensif.

Hingga tahun 2022 jumlah rumah sakit regional yang terbangun dan ditingkatkan sebanyak 2 unit yaitu Rumah Sakit Ainun Habibi Kota Pare-Pare dan Rumah Sakit La Mappapenning Kabupaten Bone. Progress pelaksanaan pembangunan rumah sakit di Kabupaten Bone yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 adalah pekerjaan konstruksi dengan capaian 40,12 persen. Pembangunan rumah sakit ini didukung dengan penyediaan sumber daya kesehatan baik pengadaan alat kesehatan yang memadai dan bermutu, penempatan tenaga kesehatan berkompeten dan alokasi pembiayaan pengelolaan rumah sakit tersebut. Ditargetkan tahun 2023 rumah sakit regional di Kabupaten Bone sudah dapat beroperasi. Jumlah rumah sakit di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sejumlah 120 unit dengan persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 80 persen dan yang belum terakreditasi sebesar 20 persen. Rumah sakit yang masih belum terakreditasi disebabkan karena beroperasional kurang dari 2 tahun dimana dalam regulasi diatur bahwa rumah sakit wajib terakreditasi maksimal 2 tahun setelah operasional. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 sehingga rumah sakit diberi kelonggaran/relaksasi akreditasi sampai dengan tahun 2023.

Peningkatan anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) diupayakan melalui program Aksi Stop Stunting yang sebelumnya disebut GAMMARA'NA (Gerakan Masyarakat Mencegah Stunting). Adapun bentuk intervensi langsung yang dilaksanakan pada tahun 2022 berupa pemberian paket intervensi gizi multivitamin untuk balita gizi kurang (kurus) sebanyak 25.072 baduta serta pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi gizi pada anak dimana sebanyak 240 orang tenaga pendamping gizi yang masing-masing sejumlah 10 orang ditempatkan pada 10 desa lokus di 24 kabupaten/kota.

Pada tahun 2022 capaian pemenuhan kebutuhan darah sebesar 82 persen yang didukung oleh mitra donor dan kegiatan donor darah sukarela yang lebih banyak berkontribusi dari tahun sebelumnya, selain itu ketersediaan kantong darah dan reagen juga cukup untuk menghasilkan produk darah yang aman dan siap pakai bagi pasien yang membutuhkan. Pencapaian indikator persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai standar didukung oleh implementasi akreditasi pada semua pemberi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta baik di tingkat pelayanan kesehatan primer maupun rujukan yang merupakan salah satu cara untuk menilai mutu dan kualitas pelayanan, manajemen institusi pelayanan kesehatan, penyelenggaraan program kesehatan, dan pelayanan klinis yang wajib dipenuhi secara berkesinambungan bagi fasilitas pemberi pelayanan. Selanjutnya didukung juga dengan implementasi pengukuran kelayakan untuk pemberian izin operasional rumah sakit dan registrasi yang disesuaikan dengan kebijakan dan SOP yang berlaku. Selain itu dilakukan peningkatan sumber daya baik transformasi kebijakan layanan kesehatan, pengalokasian anggaran untuk penyiapan sarana dan alat kesehatan yang bermutu dan sesuai standar dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam rangka upaya berkelanjutan memperbaiki sistem pelayanan dan kinerja yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, keselamatan, dan manajemen risiko. meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan, maupun pemulihan serta promosi kesehatan.

Tahun 2022 persentase jumlah rumah sakit yang memenuhi kelengkapan pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat kesehatan >60 persen untuk rumah sakit pemerintah sebesar 70 persen dan rumah sakit swasta sebesar 83 persen, sedangkan untuk rumah sakit TNI/POLRI 100 persen kelengkapan SPA masih <60 persen. Namun perlu diperhatikan terkait kualitas data dari kelengkapan tersebut, apakah dalam melakukan update data rumah sakit sudah menyesuaikan dengan data yang terdapat pada Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan dokumen pengadaan alat kesehatan serta telah melakukan update data terkait gedung dan sarana di Rumah Sakit. Untuk itu setiap hasil entri atau update data ASPAK pihak Dinas Kesehataan wajib melakukan validasi data ASPAK sesuai langkah-langka validasi untuk menjamin kualitas data ASPAK. Persentase pemenuhan rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk pada tahun 2022 mencapai 23,97 persen didukung dengan pemenuhan rasio tenaga kesehatan melalui bantuan aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) yang mendukung ketersediaan data. Peningkatan rasio juga didukung perekrutan tenaga PPPK dikabupaten dan perekrutan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan yang ada di fasyankes terutama pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan yang ada di

puskesmas, serta ditunjang dengan adanya penempatan Nakes Nusantara sehat di daerah terpencil. Cakupan pelatihan modul terakreditasi menjadi persyaratan pada aplikasi Sistem Informasi Akreditasi Pelatihan (SIAKPEL) dimana semua pelatihan yang terakreditasi wajib memiliki modul sehingga target pencapaian terpenuhi. Capaian persentase kompetensi sumber daya manusia kesehatan sebesar 100 persen dimana masing-masing instansi maupun fasyankes yang memberikan pelayanan wajib memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan aturan Permenkes nomor 83 tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan, serta Permenpan RB terkait uraian tugas masing-masing pejabat fungsional kesehatan. Meningkatnya Kompetensi teknis SDM dari tahun sebelumnya karena setiap tenaga kesehatan yang menduduki jabatan fungsional untuk kenaikan jenjang jabatan wajib mengikuti uji kompetensi sesuai Permenkes nomor 18 tahun 2017 khususnya bagi 9 jenis tenaga kesehatan yaitu perawat, perawat gigi, radiografer, teknisi elektoromedis, perekam medis,pembimbing kesehatan kerja,administrasi kesehatan, nutrisionis.

Pemenuhan sediaan farmasi didukung oleh pemenuhan 40 jenis obat sebagai parameter ketersediaan obat di puskesmas berdasarkan 10 besar pola penyakit. Selanjutnya didukung dengan tersedianya tenaga kefarmasian yang kompetensi di bidangnya serta pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar di Fasyankes. Capaian pemenuhan sediaan alat kesehatan dipengaruhi oleh : 1) Masih terbatasnya Alat Kesehatan Produk Dalam Negeri yang tayang di e-Catalog; 2) Banyaknya produk alkes dalam negeri yang tayang di e-catalog namun tidak dilengkapi dengan nilai TKDN; 3) Terbatasnya kapasitas produksi beberapa penyedia Alkes Produk dalam negeri yang tayang di e-catalog sehingga berdampak pada keterlambatan pengiriman barang sesuai dengan batas akhir kontrak. Pemenuhan sediaan makanan dan minuman didukung melalui pengalokasian anggaran untuk melaksanakan pembinaan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) di 24 kabupaten/kota dengan peningkatan produksi sediaan makanan minuman yang beranekaragam jenis dan telah memenuhi standar. Capaian persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS dilakukan dengan melakukan advokasi ke kabupaten/kota agar menerbitkan Kebijakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sesuai yang diamanatkan dalam Inpres nomor 1 tahun 2017 akibat efek pandemi juga yang mendorong terbitnya Kebjiakan PHBS sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. Selain itu didukung dengan pelaksanaan penggerakan masyarakat dalam mendukung terciptanya kluster germas minimal 3 kali setahun, dengan melibatkan lintas sektor Pendidikan, Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan Mitra Potensial.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan kesehatan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.62.
Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan	%	Belum dilakukan pengukuran	17	17	17	33,33
Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	%	70	85	82	75	80
Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	4,24	6,7	6,52	4,5	5,79
Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	%	100	100	100	100	100
Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	%	100	100	100	100	100
Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	12,13	12,79	11,95	12,1	9,66
Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	Rasio	29	27	18	23	23,97
Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi	%	70	75	80	85	87
Persentase Pemenuhan Sediaan Alat Kesehatan	%	100	100	100	100	85
Persentase Pemenuhan Sediaan Makanan Minuman	%	30	35	35	60	85
Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	%	29,16	45,83	62,5	66,7	87,5
Persentase Ketersediaan Stok Darah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Darah	%	78,85	78,85	79,00	68,19	82
Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	%	29,04	41,26	45,36	63,77	77,72
Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	%	81,43	90,38	90,38	91,49	90
Persentase tenaga medis yang tersertifikasi	%	39,22	55,67	69,38	71,34	72
Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	13,09	13,85	21,05	22,37	90
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	%	81,43	90,38	90,38	91,49	93,02
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat	%	100	100	100	100	100
Persentase tenaga kesehatan RSK yang telah memperoleh pendidikan kompetensi teknis	%	93,62	93,71	95,93	98,07	98,76
Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100
Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan	%	86,94	87,19	90,21	90,41	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian pemberian dan penggunaannya. Jaringan irigasi ada 2 (dua) yaitu;

1. Jaringan irigasi primer adalah membawa air dari bangunan sadap menuju saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada bangunan bagi yang terakhir.
2. Jaringan irigasi sekunder adalah membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran primer menuju petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan sadap terakhir.

Capaian kinerja jaringan irigasi diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel II.63.
Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2022

Kabupaten	Panjang Jaringan Irigasi yang Dibangun/Ditingkatkan/Direhabilitasi (Meter)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Maros	132,52	212	385	176	-
Pangkajene dan Kepulauan	752,99	379	1.293,33	-	-
Barru	916,85	760.122	700	4.024,21	-
Pinrang	1.168,17	852	2.371	13.649	-
Sidenreng Rappang	2.990,99	589,37	10.347	2.490,63	-
Toraja Utara	390,79	247	-	-	-
Luwu	3.833,87	4.061	2.218,5	7.236,72	130,4
Luwu Utara	328,82	2.787	2.272,5	8.100,3	2.349,5
Luwu Timur	4.354,71	3.934	-	-	1.000
Wajo	2.152.5	571	34.913,46	-	1.200
Soppeng	3.718,5	2.690	24.609,46	-	3.638,08
Bone	5.177,97	9.736,66	7.770	13.519,58	2.179,7
Sinjai	3.922,02	1.406,66	1.584,73	2.870,22	-
Bulukumba	776,84	589	231	4.571	-
Gowa	897,34	570	-	14.947	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Diagram II.5.
Kondisi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

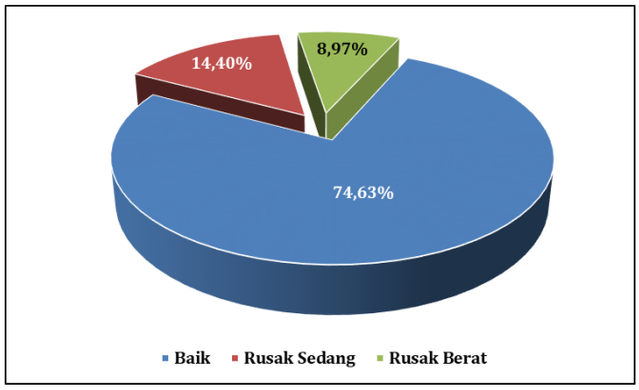

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada DI kewenangan Provinsi sebesar 473.650 meter dengan cakupan layanan irigasi sebesar 58.858 Ha. Jaringan irigasi kondisi baik pada tahun 2019 mencapai 72,71 persen mengalami penurunan kondisi berdasarkan hasil pendataan tahun 2020 menjadi 72,70 persen. Pendataan Kembali dilakukan tahun 2021 berbasis e-paksi sebagaimana digunakan secara nasional dan tercatat bahwa jaringan irigasi kondisi baik hingga tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 76,00 persen atau sepanjang 359.974 meter. Pada tahun 2021 panjang jaringan irigasi baru mengalami peningkatan sebesar sebesar 28.300 meter sehingga panjang jaringan irigasi menjadi 501.950 meter dengan cakupan layanan irigasi sebesar 61.513 Ha. Tahun 2022 jaringan irigasi kondisi baik di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 76 persen pada tahun 2021 menjadi 76,13 persen atau 444.637 meter dari total panjang jaringan irigasi di sulawesi selatan sebesar 595.789 meter, sedangkan kondisi rusak sedang mengalami penurunan dngan capaian 14,4 persen atau 85.793 meter serta kondisi rusak berat

mengalami penurunan dengan capaian 8,97 persen atau 53.442 meter. Tahun 2022 panjang saluran yang ditingkatkan sebesar 2.947 meter, panjang saluran yang direhabilitasi sebesar 15.416,21 meter, dan pembangunan Bendung dengan volume tampungan Bendung sebesar 3.532,73 m^3 serta luas lahan yang dialiri sebesar 800 Ha dan pembangunan Reservoir dengan volume tampungan Reservoir sebesar 400 m^3 dengan luas lahan yang dialiri sebesar 300 Ha. Tahun 2022 pembangunan Embung Pallae di Kabupaten Bone serta pembangunan Tanggul Sungaki Allu sepanjang 385 meter di Kabupaten Jeneponto.

Terkait pencapaian target cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai yang dilaksanakan melalui kegiatan normalisasi sungai pada tahun 2022 sepanjang 300 meter serta pembangunan Embung Pallae di Kabupaten Bone untuk tambahan debit air baku dengan kapasitas tampung 4.000 m^3.

Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Kebutuhan air minum curah merupakan kewenangan Pemerintah Privovinsi sebagaimana dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan.

Capaian akses rumah tangga terhadap air minum layak Berdasarkan data BPS, capaian akses rumah tangga terhadap air minum layak di Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 91,96 persen termasuk 46,39 persen akses air minum aman. Sedangkan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan pada tahun 2022 mencapai 25,15 persen. Hingga akhkir periode RPJMD 2018-2023 yaitu pada tahun 2023 ditargetkan capaian akses air minum layak sebesar 98,02 persen termasuk akses air minum aman sebesar 26,11 persen, serta capaian akses air minum layak melalui jaringan perpipaan sebesar 34,09 persen.

Grafik II. 63.
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

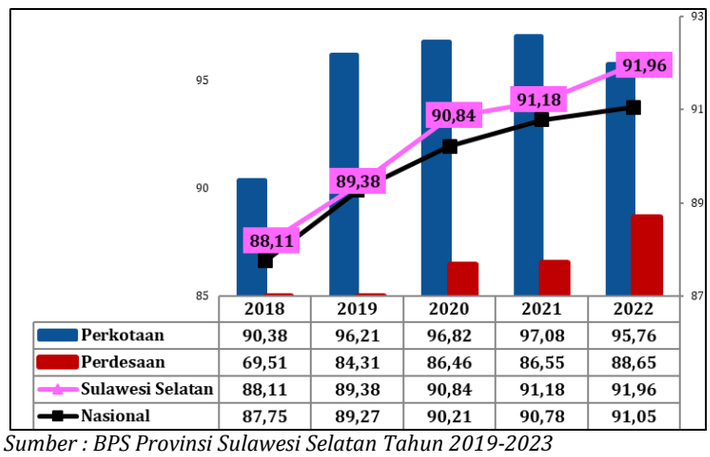

	2018	2019	2020	2021	2022
Perkotaan	90,38	96,21	96,82	97,08	95,76
Perdesaan	69,51	84,31	86,46	86,55	88,65
Sulawesi Selatan	88,11	89,38	90,84	91,18	91,96
Nasional	87,75	89,27	90,21	90,78	91,05

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Dalam rangka peningkatan akses air minum layak bagi rumah tangga pelaksanaan pembangunan SPAM Regional Mamminasata dengan kapasitas 1.100 liter/detik yang merupakan proyek multiyears 2022-2026 dengan cakupan wilayah pelayanan yaitu Kota Makassar meliputi 2 kecamatan, Kabupaten Maros meliputi 6 kecamatan, Kabupaten Gowa meliputi 8 kecamatan, dan Kabupaten Takalar meliputi 2 kecamatan. Sumber air baku SPAM Regional Mamminasata berasal dari Waduk Bili-Bili dengan rincian IPA Tompobalang Gowa, IPA Palangga Gowa, IKK Bontomarannu Borongloe Gowa, IKK Patalassang Gowa, IPA Sombaopu Makassar. Total penerima manfaat ±80.000 sambungan rumah atau 400.000 jiwa dengan rincian kapasitas Kota Makassar 600 liter/detik melayani 48.000 SR, Kabupaten Gowa 200 liter/detik melayani 16.000 SR, Kabupaten Maros 130 liter/detik melayani 10.400 SR, dan Kabupaten Takalar 70 liter/detik melayani 5.600 SR.

Grafik II. 64.
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Termasuk Aman dan Melalui Jaringan Perpipaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

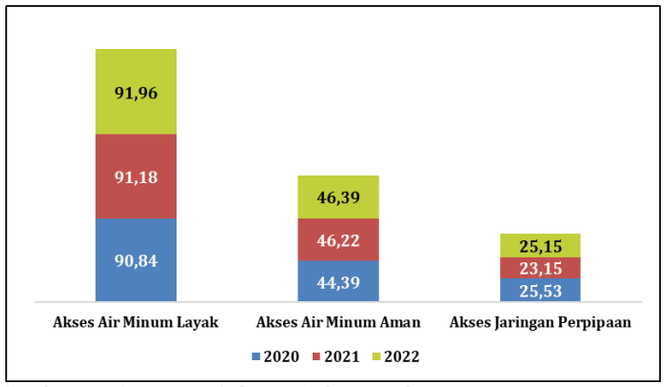

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

Layanan penanganan persampahan saat ini masih merupakan tugas Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat belum adanya layanan TPA Regional yang menjadi kewajiban layanan Pemerintah Provinsi. Peningkatan peran aktif Pemerintah di 24 Kabupaten/Kota, peran masyarakat dan usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan serta mengoptimalkan penyebaran informasi melalui berbagai media dan pembinaan langsung kepada masyarakat dilakukan setiap tahun. Pada tahun 2022 capaian akses penanganan sampah rumah tangga perkotaan mencapai 77 persen dan penguranagan sampah rumah tangga sebesar 23 persen. Hingga akhkir periode RPJMD 2018-2023 yaitu pada tahun 2023 ditargetkan capaian penanganan sampah di Sulawesi Selatan mencapai 80 persen serta capaian pengurangan sampah rumah tangga sebesar 20 persen.

Air limbah domestik adalah hasil buangan dari perumahan, perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenisnya. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik

sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Untuk saat ini, belum terdapat dan belum direncanakan untuk kebutuhan pemenuhan layanan regional dan seluruh layanan ALD masih di fokuskan pada penguatan layanan kabupaten/kota. Gambaran kondisi IPLT kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dimana sejumlah 8 kabupaten belum memiliki IPLT yaitu: Kabupaten Bone, Enrekang, Gowa, Kepulauan Selayar, Luwu, Pangkajene dan Kepulauan, Toraja Utara, dan Toraja Utara. Sejumlah 3 kabupaten yang IPLTnya belum berfungsi yaitu: Jeneponto, Luwu Timur, dan Takalar. Sejumlah 13 kabupaten/kota yang IPLTnya berfungsi yaitu: Kabupaten Bantaeng, Barru, Bulukumba, Maros (tidak optimal), Pinrang (overload), Sidrap, Sinjai, Soppeng, Tana Toraja, Wajo, Kota Makassar (overload), Palopo (tidak optimal), dan Parepare (tidak optimal).

Hingga akhkir periode RPJMD 2018-2023 yaitu pada tahun 2023 ditargetkan capaian akses sanitasi layak sebesar 92 persen termasuk akses sanitasi aman sebesar 7 persen. Penguatan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan air limbah domestik merupakan strategi yang dilakukan pemerintah provinsi dalam peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak dan aman di Sulawesi Selatan.

Grafik II. 65.
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

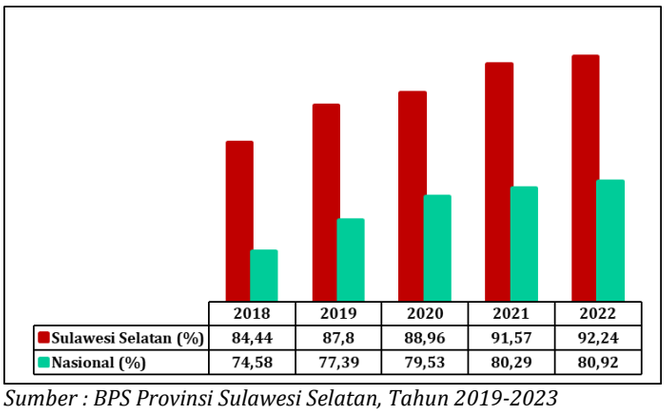

	2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan (%)	84,44	87,8	88,96	91,57	92,24
Nasional (%)	74,58	77,39	79,53	80,29	80,92

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Salah satu yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 adalah pengembangan pusat pertumbuhan baru dan pengembangan Kawasan strategis. Pengembangan Kawasan tersebut diwujudkan pada penyediaan sarana dan prasarana pada Kawasan Strategis serta pengembangan Rest Area. Adapun Kawasan strategis sebagaimana tertuang pada Perda Tata Ruang adalah : (1) Kawasan pusat bisnis terpadu CPI di Mamminasata, (2) Kawasan Pendidikan Tinggi Mamminasata, (3) Kawasan Wisata Kabupaten Bulukumba dan sekitanya, (4) Kawasan Pengembangan Peternakan SERA (Seko-Rampi), (5) Kawasan Pengembangan Pertenakan SIPAENRE (Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang), (6) Kawasan Minapolitan pesisir pantai Pangkajene Kepulauan-Maros-Barru Kawasan Agropolitan Kabupaten Enrekang dan Sekitarnya, (7) Kawasan Agropolitan Bantaeng dan Bulukumba, (8) Taman Miniatur Sulawesi Selatan di Situs Kerajaan Gowa

Benteng Sombaopu, (9) Kawasan wisata Budaya dan Agrowisata Toraja dan sekitarnya, (10) Kawasan Wisata Alam Malino di Kabupaten Gowa, (11) Kawasan Wisata Alam Lejja dan sekitarnya di Kabupaten Soppeng, (12) Kawasan Kebun Raya Pucak di Kabupaten Maros, (13) Kawasan Sungai Tello dan Sekitarnya, (14) Kawasan Danau Tempe dan sekitarnya, (15) Kawasan Danau Matano-Towuti dan sekitarnya, (16) Kawasan Lompobattang dan sekitarnya, (17) Kawasan Geopark Maros Pangkep, serta (18) Pengembangan Rest Area sebagai pusat pertumbuhan baru di beberapa lokasi. Adapun lokasi yang dilakukan intervensi hingga tahun 2022 adalah Kawasan CPI, Kawasan Wisata Bulukumba dan sekitarnya, Kawasan Seko Rampi, Kawasan Toraja dan Sekitarnya, Kawasan Kebun raya Pucak, Kawasan Danau Tempe, serta Kawasan Geopark Maros Pangkep, serta telah dilaksanakan pembangunan di 4 kawasan yaitu pembanguna mesjid 99 Kubah dikawasan CPI, Pembangunan Farm Field dikawasan GOR Sudiang, Pembangunan Islamic Center di Kabupaten Bone dan pembangunan Rest Area di Kabupaten Jeneponto dan Sidrap.

Diagram II.6.
Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

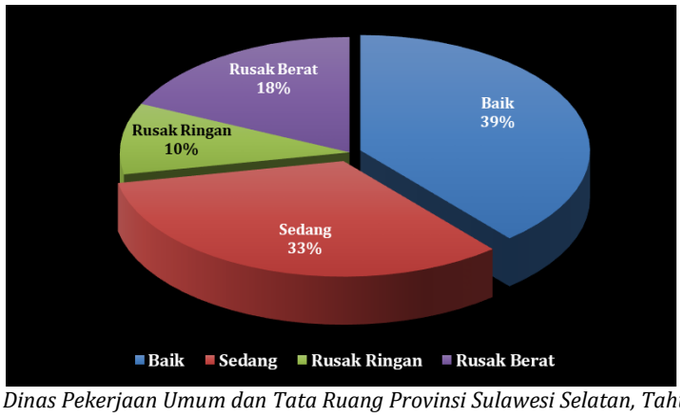

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Dalam pembangunan transportasi jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi jalan tidak mengalami perubahan panjang jalan berdasarkan SK tahun 2017 dengan jalan kewenangan Provinsi sepanjang 2.009,35 Km. Kondisi jalan mantap tahun 2018 sebesar 58,94 persen meningkat cukup signifikan mencapai 71,95 persen atau sepanjang 1.445,63 km pada tahun 2022. Kondisi kemantapan jalan adalah akumulasi dari kondisi baik dan kondisi sedang dimana panjang jalan kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 778,97 km. Sedangkan panjang jalan kondisi sedang pada tahun 2022 sebesar 666,66 km. Panjang jalan kondisi rusak ringan pada tahun 2022 sebesar 200,06 km mengalami penurunan dari tahun 2021, namun panjang jalan kondisi rusak berat mengalami peningkatan sebesar 966 persen dari tahun 2021 dengan capaian 363,66 km pada tahun 2022.

Grafik II. 66.
Kemantapan Jalan Provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

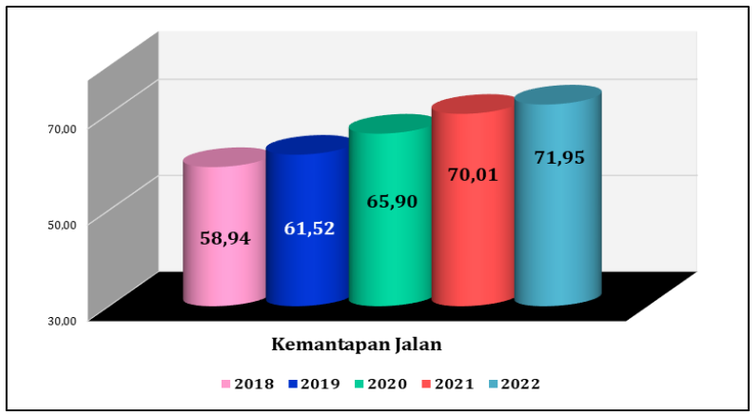

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Kondisi kemantapan jalan tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dengan rata-rata 3,25 persen, dimana pada tahun 2022 mencapai 71,95 persen. Hal ini didukung kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan kondisi rusak serta menjaga kondisi dan mencegah kerusakan jalan.

Ruas jalan terisolir (belum tembus/jalan tanah) kewenangan Provinsi di tahun 2020 terdiri dari 14 ruas dengan panjang ruas 543,07 km diantaranya; (1) Tuppu – Pao – Pamulungan – Batas Kab. Tana Toraja, (2) Sabang – Tallang, (3) Tallang – Sae, (4) Sae – Bts. Sulbar, (5) Ussu – Nuha – Beteleme Batas Prov. Sulteng, (6) Latuppa – Bonglo – Salulimbong – Pantilang, (7) Passobbo – Matangli – Masuppu, (8) Masuppu - Batas Kab. Pinrang, (9) Takkalasi – Bainange – Lawo, (10) Palampang – Munte – Botolempangan, (11) Bua – Bts. Kab. Toraja Utara, (12) Bts. Kab. Luwu – Tedong Bonga, (13) Rantepao – Pangalla – Baruppu – Bts. Prov. Sulbar, (14) Rantepao – Sa'dan – Batusitanduk.

Grafik II. 67.
Persentase Panjang Jalan Terisolir pada
Ruas Jalan Provinsi yang Terakses Roda Empat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

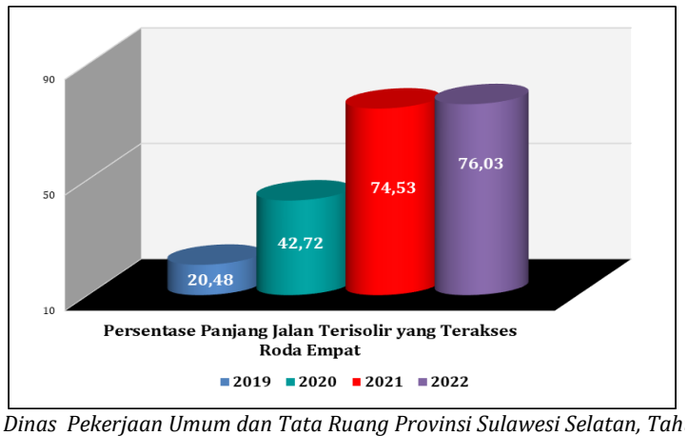

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Tahun 2021 masih tersisa kebutuhan pembangunan jalan yang belum tembus sepanjang 138,29 km. Pembangunan jalan terisolir menjadi prioritas utama tahun 2021 yang telah mencapai 74,53 persen. Hingga tahun 2022 persentase panjang jalan terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda

empat sebesar 76,03 persen atau 5,44 km, sehingga masih tersisa kebutuhan pembangunan jalan terisolir yang belum tembus sepanjang 130,17 km.

Capaian Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli pada tahun 2022 sebesar 12,12 persen dengan jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan sejumlah 200 orang dari jumlah tenaga ahli jasa konstruksi sejumlah 9.432 orang. Capaian rasio ketaatan pemanfaatan ruang mengalami peningkatan dari tahun 2021 dimana jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan pembangunan pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang yg telah direncanakan dengan capaian 0,86 persen pada tahun 2022.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.64.
Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	%	69,16	70	72,7	76	76,13
Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	%	100	100	100	100	100
Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pembinaan Layanan TPA (Kab/Kota)	%	100	100	100	100	100
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM)	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pembinaan Layanan Drainase Kab/Kota	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	16
Persentase Bangunan Pamerintah yang di Fasilitasi	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	75,04	85	100
Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	Kawasan	Belum dilakukan pengukuran	7	13	9	4

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	58,94	61,52	65,9	70,01	71,95
Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat	%	Belum dilakukan pengukuran	20,48	42,72	74,53	76,03
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Rasio	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	19,95	12,12
Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	Rasio	Belum dilakukan pengukuran	0,7	0,75	0,8	0,86

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pada tahun 2020 pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Penanganan Bencana Skala Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1707/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan penanganan bencana skala provinsi di Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Malangke Barat, dan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Bantuan keuangan tersebut dialokasikan untuk bantuan logistik, penyediaan hunian sementara (Huntara) serta pembangunan rumah baru atau hunian tetap (Huntap). Adapun yang telah mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah layak huni melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebanyak 50 unit rumah, serta 72 unit rumah dari pendanaan APBN melalui Kementerian PUPR. Pada tahun yang sama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan untuk penanganan banjir di Kabupaten Bantaeng yaitu pembangunan rumah layak huni sejumlah 69 unit.

Tahun 2021 telah tertangani warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni berupa terbangunnya 886 unit rumah dari pendanaan APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi warga negara korban banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2020 di Kabupaten Luwu Utara. Pada akhir tahun 2021 terjadi bencana alam gempa bumi di Kabupaten Selayar sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan sejumlah 8 Milyar rupiah untuk pembangunan rumah/hunian tetap (Huntap) sejumlah 160 unit rumah bagi warga negara yang terdampak bencana gempa di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain pembangunan Huntap untuk korban bencana, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun prasarana dan sarana utilitas bagi rumah korban bencana berupa pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 160 meter dan Jalan Lingkungan sepanjang 106 meter di Kabupaten Luwu Utara serta pembangunan sistem

jaringan air bersih pada daerah rawan bencana di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dengan panjang jaringan air bersih 13.180 meter serta cakupan rumah tangga terlayani sebesar 1.577 rumah tangga.

Tahun 2022 telah terbangun sejumlah 44 unit rumah layak huni untuk korban bencana masing-masing 11 unit di Kabupaten Jeneponto, Luwu Utara, Soppeng, dan Wajo. Selain itu untuk mendukung penyediaan PSU untuk mendukung daerah rawan bencana, maka dilaksanakan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 575 meter di Kabupaten Pangkep, Maros, Barru, dan Kota Makassar, serta pembangunan 2 unit jaringan air bersih dengan kapasitas masing-masing sebesar 3.000 liter/hari yang melayani sejumlah 80 rumah tangga di Kabupaten Pangkep. Capaian warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi hanya sebesar 30 persen disebabkan karena tidak terdapatnya program provinsi yang mengharuskan warga untuk direlokasi.

Capaian Akses Rumah Tangga terhadap Rumah Layak Huni (RLH) di Sulawesi Selatan Tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dengan capaian sebesar 69,9 persen pada tahun 2022. Capaian RLH Sulawesi Selatan tahun 2022 berada diatas capaian nasional sebesar 60,66 persen serta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,14 persen. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 68.
Perbandingan Capaian Rumah Layak Huni
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

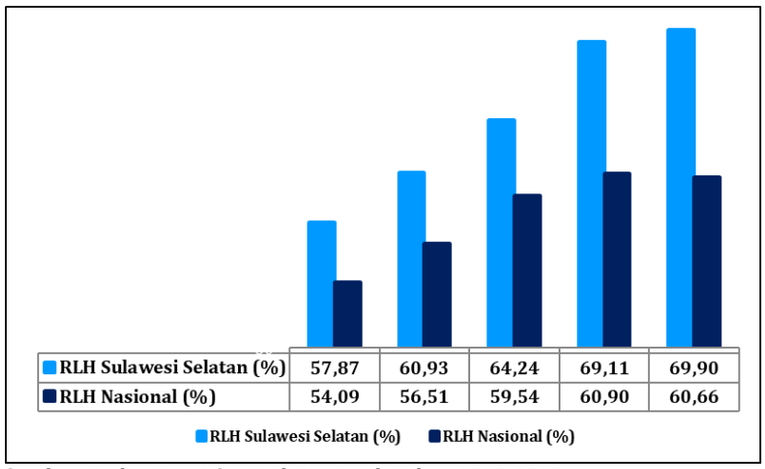

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Peningkatan akses RLH didukung oleh peningkatan masing-masing komponen kelayakan yang terdiri diri ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding), luas perkapita, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak. Salah satu komponen penentu rumah layak huni adalah ketahanan bangunan, yang dilihat dari bahan bangunan utama atap, dinding, dan lantai rumah terluas. Persentase rumah tangga di Sulawesi Selatan yang menempati rumah yang memenuhi syarat ketahanan bangunan di wilayah kota sebesar 91,02 persen lebih besar dibandingkan wilayah desa sebesar 82,35 persen. Rumah tangga yang menempati rumah dengan atap berupa beton, genteng, kayu/sirap, atau seng sebesar 97,46 persen. Rumah tangga yang menempati rumah dengan

dinding berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, atau batang kayu sebesar 88,75 persen. Sedangkan rumah tangga yang menempati rumah dengan lantai berupa marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin, tegel, teraso, kayu/papan, atau semen/bata merah sebesar 99,31 persen.

Grafik II. 69.
Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak
Berdasarkan Komponen Kelayakan di Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

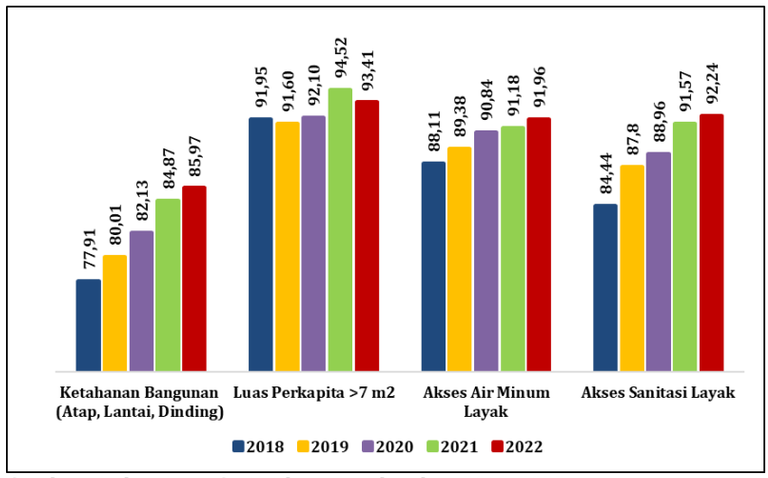

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Grafik II. 70.
Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

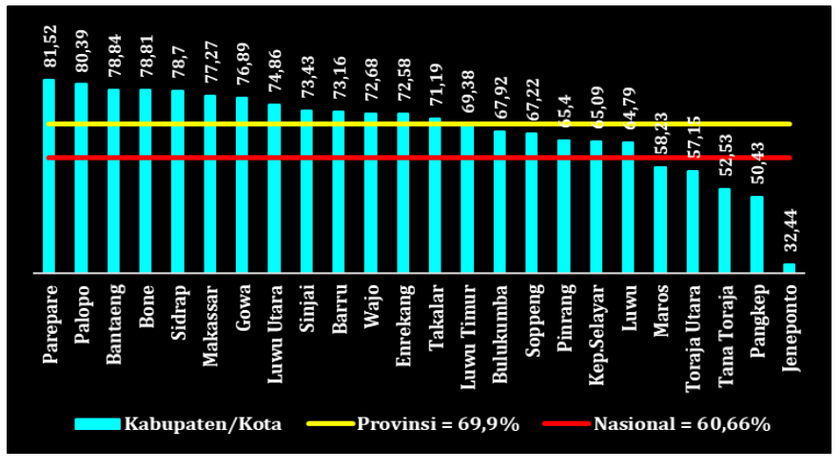

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak pada tahun 2022 tertinggi di Kota Parepare dengan capaian 81,52 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Jeneponto dengan capaian 32,44 persen. Sejumlah 11 Kabupaten dengan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dibawah capaian Provinsi yaitu Kabupaten Luwu Timur, Bulukumba, Soppeng, Pinrang, Kepulauan Selayar, Luwu, Maros, Toraja Utara, Tana Toraja, Pangkep, dan Jeneponto, serta sejumlah 5 Kabupaten yang berada dibawah capaian Nasional yaitu Kabupaten Maros, Toraja Utara, Tana Toraja, Pangkep, dan Jeneponto.

Rasio rumah layak huni merupakan perbandingan antara rumah layak huni dan jumlah penduduk, mengalami tren fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,33 persen. Pertumbuhan rasio rumah layak huni tertinggi pada tahun 2020 sebesar 9,5 persen kemudian

mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2021, namun kembali mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2022 sebesar 0,46 persen. Tahun 2022 rasio rumah layak huni tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 0,238 dengan jumlah 33.541 unit rumah layak huni dari total 35.132 unit rumah. Sedangkan rasio rumah layak huni terendah di Kabupaten Maros sebesar 0,131 dengan jumlah 51.340 unit rumah layak huni dari total 86.998 unit rumah.

Grafik II. 71.
Rasio Rumah Layak Huni
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

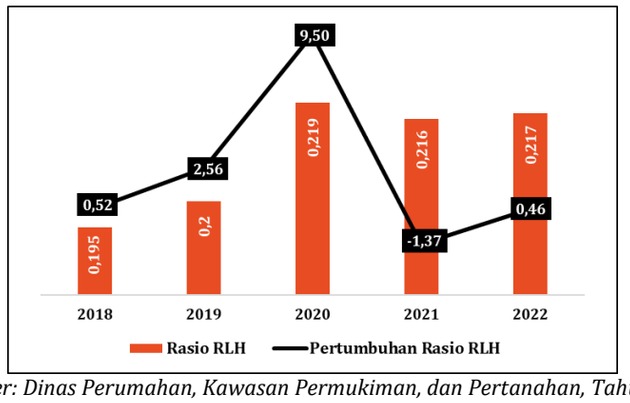

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2023

Grafik II. 72.
Pengelompokan Rasio Rumah Layak Huni dan Jumlah Rumah
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

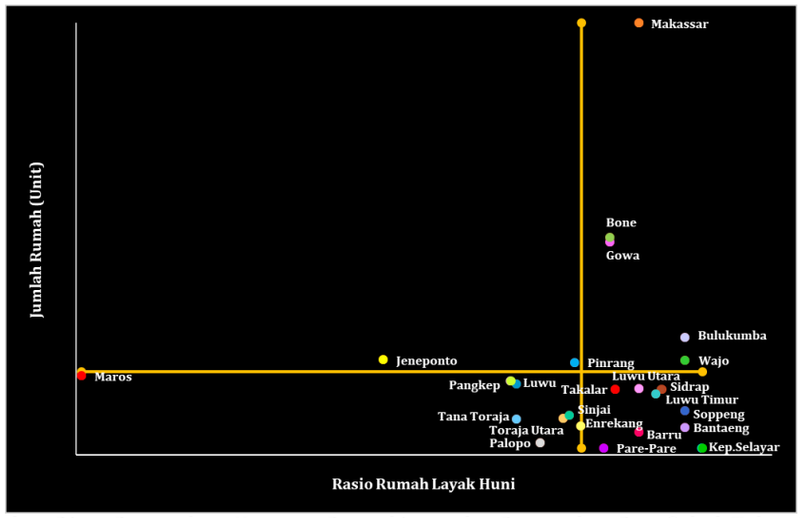

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Prov.Sulsel, Tahun 2023

Kabupaten/Kota dengan Rasio Rumah Layak Huni tetinggi pada tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan capaian 0,238 dari 35.132 unit rumah, sedangkan yang terendah di Kabupaten Maros dengan capaian 0,131 dari 86.998 unit rumah.

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha mendukung pencapaian penurunan luas Kawasan Kumuh pada tahun 2021 sebesar 18,03 persen atau 152,51 Ha kawasan kewenangan provinsi. Tahun 2021 kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha ini dilaksanakan melalui : a) Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 1.757,4 meter di Kabupaten Bantaeng, Bone, Gowa, Enrekang, Pinrang, dan Soppeng; b) Pembangunan

Drainase Lingkungan sepanjang 1.729,37 meter di Kabupaten Bantaeng, Bone, Gowa, Luwu Timur, Pinrang, dan Soppeng; c) Pengadaan Motor Pengangkut Sampah sejumlah 2 unit di Kabupaten Bantaeng.

Tahun 2022 kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha ini dilaksanakan melalui : a) Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 1.258 meter di Kabupaten Bone, Gowa, Soppeng, Wajo, Sinjai, Luwu Timur, Luwu Utara, Takalar, dan Kota Palopo; b) Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 2.225 meter di Kabupaten Enrekang, Gowa, Soppeng, Wajo, Jeneponto, Takalar, Maros, Luwu Utara, Bantaeng, Kota Makassar; c) Pengadaan Motor Pengangkut Sampah sejumlah 2 unit yang melayani 845 rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur.

Capaian penurunan luas kawasan kumuh hingga tahun 2022 sebesar 25,39 persen dari 1.183,79 Ha total luas kawasan kumuh kewenangan Provinsi. Persentase rumah tangga kumuh tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren penurunan serta dibawah capaian nasional. Berdasarkan data Susenas persentase rumah tangga yang menempati rumah kumuh pada tahun 2022 mencapai 4,58 persen mengalami penurunan sebesar 7,63 persen dari capaian tahun 2021. Persentase rumah tangga yang menpati rumah kumuh di wilayah perdesaan sebesar 5,75 persen lebih tinggi dari wilayah perkotaan sebesar 3,82 persen.

Grafik II. 73.
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Kumuh
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

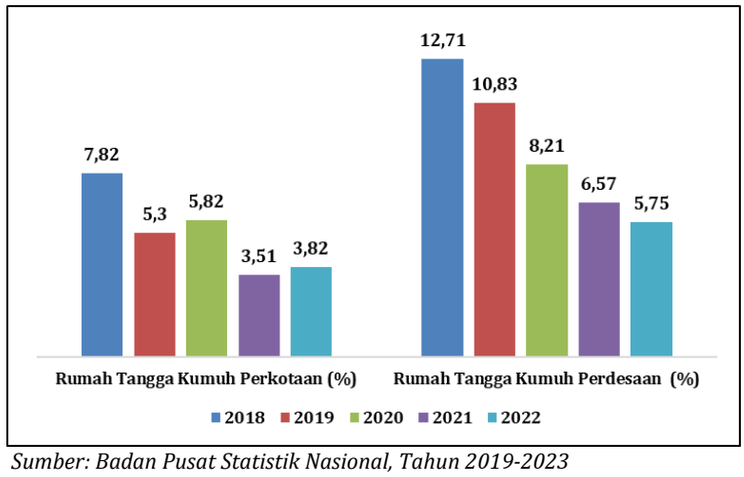

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 956/III/Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi menyatakan bahwa Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Sulawesi Selatan seluas 4.073 Ha tersebar di 20 kabupaten/kota, 49 kecamatan, 90 kelurahan, serta 97 kawasan dengan luas total 1.183,79 Ha. Tahun 2022 telah dilakukan penanganan pada kawasan kumuh kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, namun luas kawasan kumuh mengalami peningkatan luasan pada beberapa kabupaten/kota. Pada tahun 2022 total luas kawasan kumuh sebesar 6.747,6 Ha termasuk 1.294,98 Ha luas kawasan kumuh kewenangan provinsi. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.65.
Luas Kawasan Kumuh Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (Ha)	Jumlah Lokasi
1	Bantaeng	193,38	45,8	14
2	Barru	139,8	-	23
3	Bone	254,55	67,61	8
4	Bulukumba	131,62	10,84	13
5	Enrekang	259,9	15,62	27
6	Gowa	707,22	213,78	10
7	Jeneponto	648,4	86,2	44
8	Kepulauan Selayar	376,09	146,18	40
9	Luwu	231,27	10,43	29
10	Luwu Timur	271,3	33,57	26
11	Luwu Utara	148,44	70,7	20
12	Maros	105,56	34,93	10
13	Pangkajene dan Kepulauan	111,53	-	15
14	Pinrang	168,37	53,4	12
15	Sidenreng Rappang	570,57	36,27	105
16	Sinjai	160,61	24,66	13
17	Soppeng	97,85	37,99	8
18	Takalar	127,8	25,16	12
19	Tana Toraja	207,31	-	14
20	Toraja Utara	294,5	37,98	13
21	Wajo	295,98	59,72	51
22	Makassar	427,77	77,92	20
23	Palopo	425,32	95,03	28
24	Pare-Pare	392,46	-	5
Sulawesi Selatan		**6.747,6**	**1.294,98**	**560**

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel, Tahun 2023

Capaian pengurangan kawasan kumuh kewenangan provinsi tahun 2020 hingga 2022 sebesar 300,52 Ha atau 25,39 persen dari total luas kawasan kumuh sebesar 1.183,79 Ha yang tersebar di 20 kabupaten/kota, 52 kecamatan, 91 kelurahan, 97 kawasan melalui pendanaan APBD Provinsi, Program KOTAKU, dan CSR. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.66.
Pengurangan Kawasan Kumuh
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	Realisasi Pengurangan Kawasan Kumuh (Ha)			Tingkat Capaian	
			2020	2021	2022	Luas (Ha)	%
1	Bantaeng	45,8	-	24,16	3,54	27,7	2,34
2	Bone	67,61	-	12,34	4,03	16,35	1,38
3	Bulukumba	10,84	-	-	-	-	-

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	Realisasi Pengurangan Kawasan Kumuh (Ha)			Tingkat Capaian	
			2020	2021	2022	Luas (Ha)	%
4	Enrekang	15,62	-	4,4	6,28	10,68	0,9
5	Gowa	213,78	10,11	7,56	5,95	23,62	1,99
6	Jeneponto	86,2	-	2,4	5,66	8,06	0,68
7	Kep.Selayar	146,18	-	-	-	-	-
8	Luwu	10,43	-	-	-	-	-
9	Luwu Timur	33,57	-	5,65	4,8	10,45	0,89
10	Luwu Utara	70,7	-	-	6,18	6,18	0,52
11	Maros	34,93	-	1,2	2,79	3,99	0,34
12	Pinrang	53,4	-	8,45	-	8,45	0,71
13	Sidrap	36,27	-	-	-	-	-
14	Sinjai	24,66	1,68	-	3,19	4,87	0,41
15	Soppeng	37,99	13,39	21,35	6,35	41,09	3,47
16	Takalar	25,16	-	23,66	7,19	30,85	2,61
17	Toraja Utara	37,98	-	19,44	-	19,44	1,64
18	Wajo	59,72	-	6,34	15,47	21,81	1,85
19	Makassar	77,92	51,35	-	2	53,35	4,51
20	Palopo	95,03	-	-	13,63	13,63	1,15
Total		**1.183,79**	**76,53**	**136,93**	**87,06**	**300,52**	**25,39**

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel, Tahun 2023

Grafik II. 74.
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

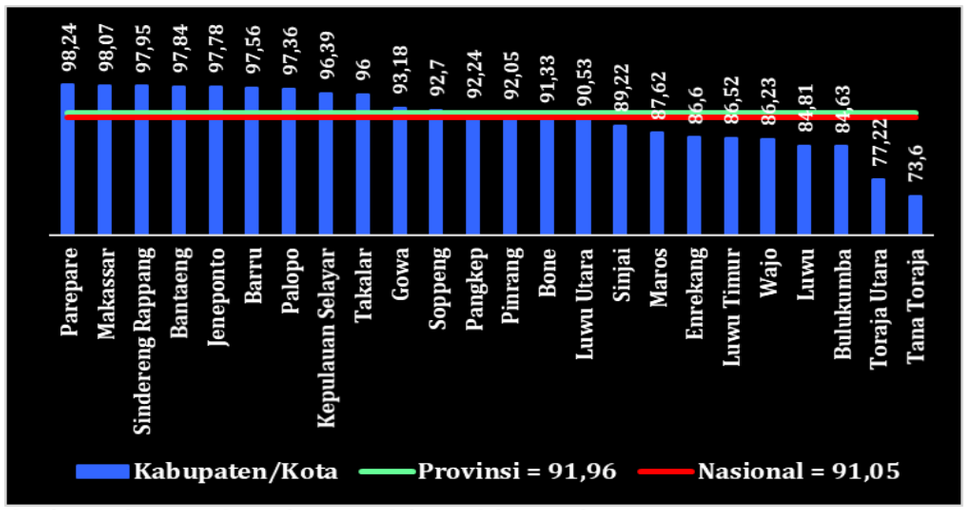

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022, capaian persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan capaian 91,96 persen serta masih diatas capaian nasional. Sejumlah 11 kabupaten masih berada dibawah capaian provinsi serta 10 kabupaten masih berada di bawah capaian nasional. Tahun 2023 ditargetkan akses rumah tangga terhadap

air minum layak di Sulawesi Selatan sebesar 98,02 persen serta ditargetkan dapat mencapai 100 persen pada tahun 2024.

Pemenuhan air minum layak/ARSINUM di kawasan pesisir dan kepulauan sejalan denga n amanah UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi dasar pokok pelaksanaan PSU Permukiman di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun instalasi Air Siap Minum (ARSINUM) di Kawasan pesisir dan kepulauan yang dimulai sejak tahun 2019 sejumlah 1 unit di Pulau Barrang Caddi Kota Makassar yang merupakan Bantuan Hibah dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2020 telah terbangun instalasi ARSINUM sejumlah 3 (tiga) unit di Pulau Samalona, Pulau Langkai, dan Pulau Lanjukang Kota Makassar. Masing-masing ARSINUM pada 4 lokasi terbangun memiliki kapasitas produksi 5.000 liter/hari atau 80 galon dengan cakupan pelayanan 625 rumah tangga. Tahun 2021 telah dibangun prasarana Air Bersih pada 4 (empat) lokasi yaitu 1 titik di Kabupaten Bone dengan kapasitas produksi 9.000 liter/jam yang cakupan pelayanannya mampu melayani 600 rumah tangga, serta pembangunan prasarana air bersih pada 3 (tiga) lokasi di Kabupaten Bulukumba masing-masing di Desa Jojolo Kecamatan Bulukumba, Desa Padang Kecamatan Gantara, dan Desa Matekko Kecamatan Gantara dengan kapasitas produksi masing-masing 3.000 liter/jam dengan cakupan layanan hingga 200 rumah tangga. Selain itu terdapat bantuan CSR untuk pembangunan instalasi ARSINUM dari PT.Sucofindo di Pulau Balang Datu Kabupaten Takalar sehingga pada tahun 2021 dengan cakupan layanan 625 rumah tangga.

Untuk mendukung fungsi hunian pada kawasan permukiman pada tahun 2021 telah dibangun PSU pada kawasan permukiman meliputi : a) Drainase Lingkungan sepanjang 3.576 meter di Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo; b) Jalan Lingkungan sepanjang 1.788 meter di Kabupaten Luwu, Toraja Utara, Bulukumba, Tana Toraja, dan Kota Palopo. Pada tahun 2022 telah dibangun PSU kawasan permukiman yang meliputi: a) Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 2.401 meter di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Gowa, Takalar, dan Kota Palopo; b) Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 1.236 meter di Kabupaten Luwu, Bone, Toraja Utara, Takalar, dan Luwu Utara; c) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kawasan permukiman berupa reservoir beton kapasitas 9.500 liter dengan panjang pipa distribusi 1.995 meter di Kabupaten Sinjai serta tandon kapasitas masing-masing 2.000 liter dengan total panjang pipa distribusi 4.427 meter di Kabupaten Sinjai, Jeneponto, Bone, dan Kota Makassar; d) Pembangunan PSU lainnya berupa pembangunan toilet 2 unit di Kabupaten Enrekang dan Kota Makassar serta Rehabilitasi Masjid di Kota Makassar. Selain itu dalam rangka pencapaian target program prioritas serta penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga yang bermukim di wilayah pesisir dan kepulauan serta daerah rawan air lainnya, telah dibangun sejumlah 10 unit instalasi air siap minum (ARSINUM) dengan kapasitas produksi 5.000 liter/hari atau 80 galon dengan cakupan layanan 625 rumah tangga di Kabupaten

Kepulauan Selayar, Pinrang, Enrekang, Jeneponto, Bulukumba, Barru, Pangkajene dan Kepulauan, dan Sinjai.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022, capaian persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan capaian 92,24 persen serta jauh diatas capaian nasional. Sejumlah 12 kabupaten masih berada dibawah capaian provinsi serta persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Kepulauan Selayar berada dibawah capaian nasional. Persoalan akses sanitasi merupakan persoalan rumit karena kewenangan provinsi terhadap penyediaan akses sanitasi terbatas pada penyediaan infrastruktur skala regional. Sedangkan untuk penyediaan infrastruktur pengolahan air limbah pada kawasan permukiman menjadi kewenangan kabupaten/kota. Usulan masyarakat terhadap penyediaan akses sanitasi hanya terbatas pada pembangunan/rehabilitasi drainase lingkungan yang peruntukannya untuk mengatasi banjir atau genangan pada kawasan permukiman. Sehingga pemerintah provinsi hanya melakukan pembinaan pada kabupaten/kota dalam penyediaan SPAL baik skala perkotaan, skala kawasan, skala permukiman, dan individual dalam rangka meningkatkan akses sanitasi layak dan aman bagi rumah tangga. Tahun 2023 ditargetkan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Sulawesi Selatan sebesar 92 persen serta ditargetkan mencapai 95 persen pada tahun 2024. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 75.
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

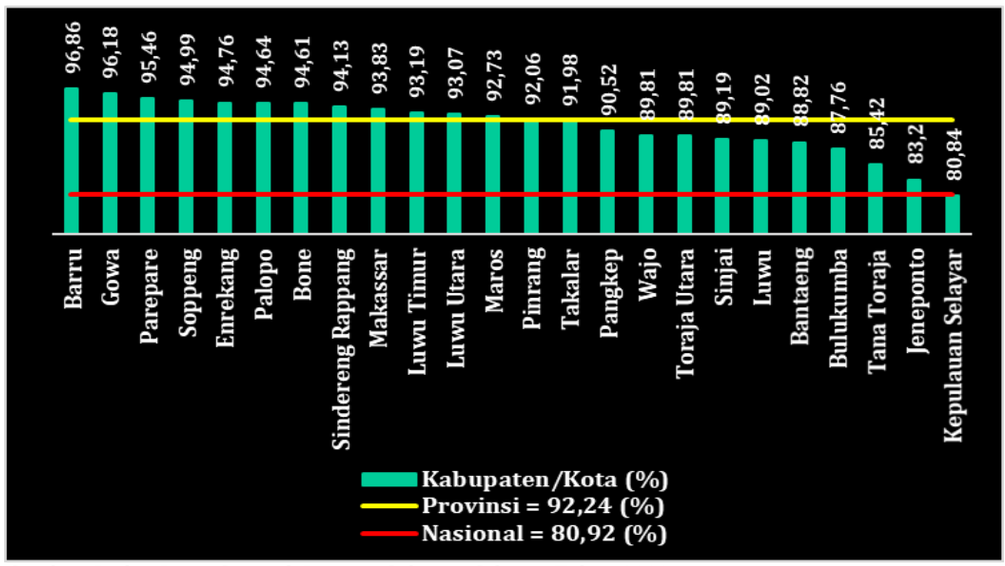

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Rumah tangga dengan akses sanitasi layak tertinggi di Kabupaten Barru dengan capaian 96,86 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan capaian 80,84 berada dibawah capaian Nasional. Sejumlah 12 kabupaten dengan akses sanitasi layak berada di bawah capaian Provinsi. Sedangkan rumah tangga dengan akses sanitasi aman terendah di Kabupaten Luwu Utara sebesar 1,08 persen serta sejumlah 6 kabupaten/kota

berada diatas capaian Provinsi. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 76.
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

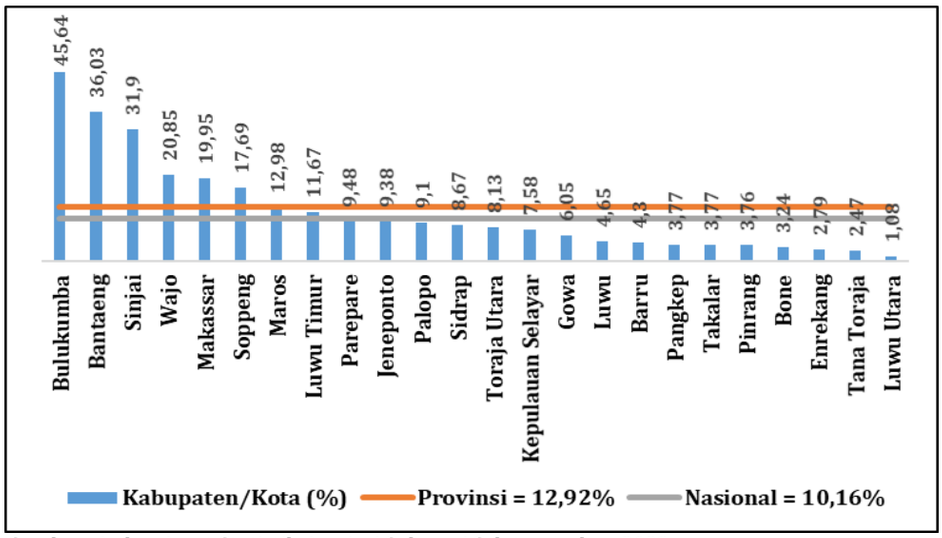

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 16,4 persen, persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai 3,69 persen. Persentase rumah tangga yang masih buang air besar semberangan di tempat terbuka tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 11,33 persen. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 77.
Rumah Tangga yang masih BABs Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

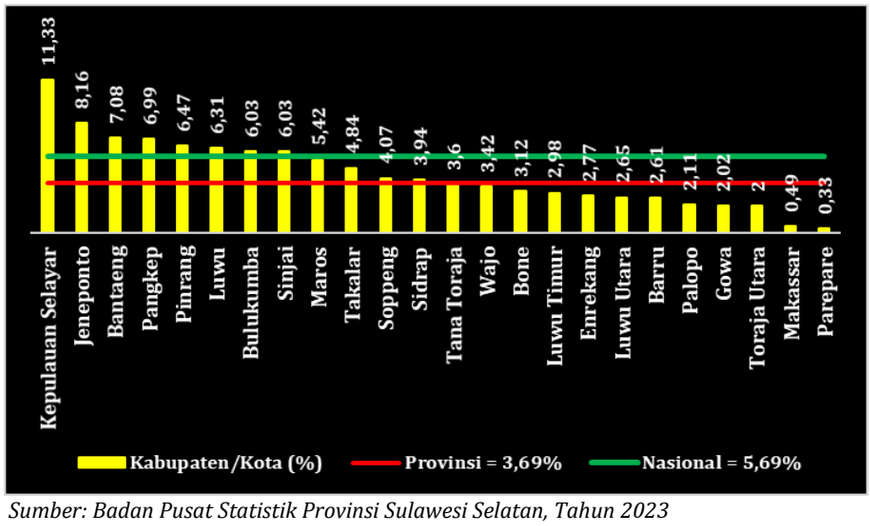

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Data capaian kinerja program pembangunan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.67.
Capaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenagan provinsi (SPM)	%	100	100	100	100	30
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi (SPM)	%	100	100	100	100	100
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	%	20,16	52,7	6,67	18,03	25,39
Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	%	Belum dilakukan pengukuran	100	100	100	100
Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	%	84,41	89,77	93,79	93,98	97,36
Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	%	Belum dilakukan pengukuran	17,1	17,1	195,9	80
Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	7,15	57,14

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel, Tahun 2023

2.3.1.5 Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya dengan menetapkan target dan indikator persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi. Pada tahun 2022 jumlah kasus penegakan perda pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 59 kasus yang terdiri dari Non Yustisi sebanyak 19 kasus dan Yustisi 40 kasus dari total

8 perda/perkada yang ditegakkan. Dalam pelaksanaan tersebut telah disediakan anggaran untuk memberikan layanan kepada warga negara akibat dari penegakan hukum perda dan perkada. Namun dalam pelaksaaan kegiatan penegakan perda/perkada tidak pernah ada warga yang terkena dampak dari kegiatan tersebut dikarenakan pelaksanaan selalu berdasar SOP dan secara Humanis. Jumlah pengamanan dan penertiban yang terlaksana sejumlah 206 kegiatan yang terdiri dari pengamanan aset provinsi sejumlah 7 aset, pengamanan unjuk rasa 35 kasus, pengamanan objek vital sejumlah 9 objek, patroli rutin dan wilayah sejumlah 75 kasus, dan pelaksanaan deteksi dini sejumlah 80 kasus.

Program Penanggulangan Bencana didukung oleh penyusunan kajian risiko bencana provinsi, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana. Dengan luas wilayah Sulawesi Selatan sebesar 45.704,16 km^2 jumlah pos pelayanan bencana kebakaran yang harus tersedia sebanyak 265 pos, dimana pada tahun 2022 telah tersedia sebanyak 98 pos pelayanan di kabupaten/kota. Sedangkan untuk evakuasi korban kebakaran dihitung dari waktu tanggap (Respon Time Rate) yaitu waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi tidak lebih 15 menit sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran disuatu tempat. Pada tahun 2022 sejumlah 784 kejadian kebakaran terjadi dan yang tertangani sesuai kategori waktu tanggap sejumlah 726 kasus.

Grafik II. 78.
Indeks Risiko Bencana
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

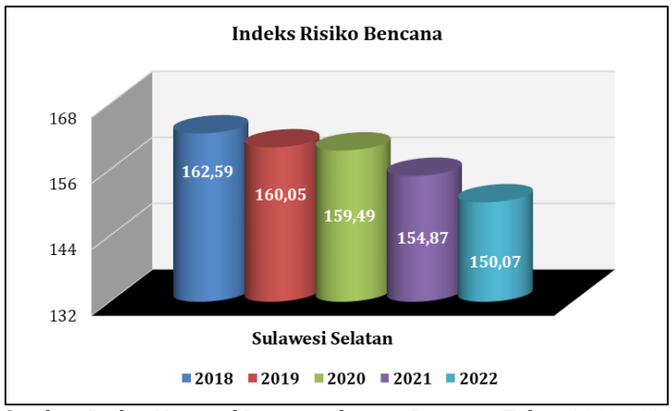

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2019-2023

Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis, karena berada pada persimpangan jalur lintas penumpang, perdagangan dan jasa dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Wilayah ini memiliki kondisi geografis yang bergunung-gunung dengan sarana prasarana jalan yang kurang baik. Secara umum faktor geologi dan kegempaan, wilayah Sulsel dilalui oleh Sesar Walanae melintang dari barat laut menuju tenggara. Ancaman bencana di Sulawesi Selatan antara lain: Gempa, Banjir, Tsunami, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan dan Gelombang Pasang, Cuaca Ekstrim dan Abrasi. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren penurunan nilai indeks dengan rata-rata penurunan sebesar 3,13 poin, namun IRB

Sulawesi Selatan termasuk dalam kelas risiko tinggi terhadap bahaya, kerentanan dan kapasitas. Capaian tahun 2022 nilai indeks risiko bencana Sulawesi Selatan sebesar 150,07 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 4,8 poin namun masih dalam kategori indeks risiko tinggi.

Pengkajian Risiko Bencana merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi dan tingkat risiko bencana di suatu daerah atau kawasan. Metode yang digunakan dengan menggabungkan komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas. Tahun 2022 IRB Kabupaten/Kota mengalami penurunan dari tahun 2021 dimana sejumlah 15 kabupaten dan 2 kota dengan tingkat risiko bencana tinggi di Sulawesi Selatan serta 6 kabupaten dan 1 kota dengan indeks risiko bencana sedang. Peningkatan indeks risiko bencana terjadi di Kabupaten Bantaeng sebesar 3,76 poin, Gowa sebesar 0,71 poin, dan Luwu sebesar 0,20 poin. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.68.
Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	2020		2021		2022	
		Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko
1	Luwu	192,23	Tinggi	187,71	Tinggi	187,91	Tinggi
2	Palopo	211,20	Tinggi	198,94	Tinggi	186,68	Tinggi
3	Wajo	179,20	Tinggi	179,20	Tinggi	179,20	Tinggi
4	Luwu Timur	202,00	Tinggi	195,10	Tinggi	176,14	Tinggi
5	Bone	191,20	Tinggi	183,85	Tinggi	173,75	Tinggi
6	Pangkajene Kepulauan	168,40	Tinggi	168,40	Tinggi	168,40	Tinggi
7	Sinjai	165,60	Tinggi	165,60	Tinggi	165,60	Tinggi
8	Bulukumba	163,20	Tinggi	163,20	Tinggi	163,20	Tinggi
9	Luwu Utara	185,25	Tinggi	169,57	Tinggi	155,01	Tinggi
10	Jeneponto	151,20	Tinggi	151,20	Tinggi	151,20	Tinggi
11	Kepulauan Selayar	155,20	Tinggi	155,20	Tinggi	151,12	Tinggi
12	Tana Toraja	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi
13	Toraja Utara	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi
14	Barru	180,40	Tinggi	162,65	Tinggi	149,41	Tinggi
15	Maros	157,93	Tinggi	157,93	Tinggi	148,96	Tinggi
16	Pinrang	179,20	Tinggi	161,57	Tinggi	148,84	Tinggi
17	Pare-Pare	155,20	Tinggi	155,20	Tinggi	148,84	Tinggi
18	Enrekang	150,00	Tinggi	144,23	Tinggi	136,13	Sedang
19	Soppeng	131,20	Sedang	131,20	Sedang	131,20	Sedang
20	Takalar	135,04	Sedang	131,33	Sedang	128,38	Sedang
21	Kota Makassar	131,78	Sedang	127,18	Sedang	119,49	Sedang
22	Sidenreng Rappang	119,20	Sedang	119,20	Sedang	119,20	Sedang
23	Gowa	114,42	Sedang	106,27	Sedang	106,98	Sedang
24	Bantaeng	107,73	Sedang	102,20	Sedang	105,96	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2021-2023

Pada Tahun 2022 dilaksanakan peningkatan kapasitas aparat sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan penaggulangan bencana, yang mana kegiatan tersebut meliputi kegiatan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan, sosialisasi dan edukasi bencana di wilayah rawan bencana yaitu di Kabupaten Gowa dan Kota Pare-pare, serta pelaksanaan kegiatan workshop

pengkajian dan perhitungan kerugian pasca bencana. Selain itu juga sebagai bentuk respon cepat dalam melakukan evakuasi tanggap darurat, dilaksanakan operasi darurat di wilayah yang tertimpa bencana yang mencakup 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Persentase tanggap darurat bencana yang tertangani merupakan indikator kinerja pada kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan pada sub kegiatan respon cepat penanganan darurat bencana dan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dijabarkan sebagai berikut:

a. Jumlah total bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2022 adalah 862 kejadian dengan jenis bencana Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Angin Kencang, Puting Beliung, Kebakaran, Abrasi, Cuaca Ekstrim, Gelombang Pasang, dan Gempa Bumi yang tersebar pada 24 kabupaten/kota yang disikapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelayanan respon cepat dan bantuan logistik pada 24 Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 9.000 paket yang terdiri dari Logistik Pangan sebanyak 3.000 paket, Perlengkapan Bayi sebanyak 2.000 paket, Perlengkapan Keluarga sebanyak 2.000 paket dan Shelter Kit sebanyak 2.000 paket.
b. Jenis sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap Bencana yang tersedia sejumlah 6 jenis, antara lain: mobil tangki air, mobil single cabin, perahu polythylene besar, perahu polythylene kecil, perlengkapan Tim Reaksi Cepat dan pelampung.
c. Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan Pelatihan Manajemen Logistik Bencana dan Manajemen Posko Tanggap Darurat Bencana sebanyak 75 orang yang melibatkan aparatur BPBD dan OPD terkait dari 24 Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Pada tahun 2022.

Tabel II.69.
Data Terdampak Bencana Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana	Jumlah		
			Kejadian	Korban	Sarana
1	Kepulauan Selayar	Banjir	5	4	129
		Banjir Bandang	1	0	52
		Tanah Longsor	2	0	3
		Angin Kencang	30	34	178
		Putting Beliung	2	10	6
		Kebakaran	3	17	1
		Gempa Bumi	16	484	1.228
2	Sinjai	Banjir	3	1	1
		Tanah Longsor	12	14	8
		Angin Kencang	8	36	56
		Kebakaran	1	0	0
3	Bulukumba	Banjir	2	0	350
		Tanah Longsor	1	0	0
		Angin Kencang	8	18	18
		Putting Beliung	6	28	14
		Kebakaran	7	48	13
		Abrasi	1	1	1
		Gelombang Pasang	1	8	9

No	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana	Jumlah		
			Kejadian	Korban	Sarana
		Gempa Bumi	1	0	0
4	Bantaeng	Banjir	1	0	0
		Tanah Longsor	1	0	0
		Angin Kencang	2	0	14
		Putting Beliung	1	158	44
		Kebakaran	6	8	10
		Abrasi	1	0	0
5	Jeneponto	Banjir	3	8	32
		Tanah Longsor	2	7	5
		Angin Kencang	1	0	2
		Putting Beliung	8	59	67
		Kebakaran	4	15	16
6	Takalar	Banjir	3	0	1.746
		Angin Kencang	1	25	7
		Putting Beliung	8	61	138
		Kebakaran	7	25	11
		Abrasi	2	0	113
7	Gowa	Tanah Longsor	5	19	21
		Kebakaran	3	7	4
8	Makassar	Banjir	2	2.601	304
		Angin Kencang	2	11	4
		Putting Beliung	2	18	4
		Kebakaran	17	715	140
9	Maros	Banjir	3	40	13
		Tanah Longsor	1	18	2
		Angin Kencang	4	0	66
		Kebakaran	2	11	2
10	Pangkajene dan Kepulauan	Banjir	2	32	9
		Tanah Longsor	2	2	2
		Angin Kencang	27	22	19
		Putting Beliung	3	0	10
		Kebakaran	10	15	12
		Gempa Bumi	2	0	0
11	Barru	Banjir	3	24	209
		Angin Kencang	6	38	80
		Tanah Longsor	5	5	2
		Kebakaran	10	52	17
		Putting Beliung	1	0	11
		Abrasi	3	18	19
		Cuaca Ekstrim	1	6	3
		Gempa Bumi	2	0	0
12	Pare-Pare	Banjir	2	120	433
		Tanah Longsor	3	28	10
		Angin Kencang	15	0	7
		Kebakaran	2	12	2
		Gempa Bumi	2	0	0
13	Sidenreng Rappang	Banjir	6	19	4
		Tanah Longsor	3	879	212
		Angin Kencang	16	48	214
		Putting Beliung	1	0	23
		Kebakaran	18	68	20
14	Wajo	Banjir	9	25.564	8.956
		Angin Kencang	26	206	137
		Putting Beliung	1	0	60
		Kebakaran	11	14	18
		Abrasi	1	0	0
15	Pinrang	Banjir	4	0	0
		Tanah Longsor	3	0	20
		Angin Kencang	21	10	23

No	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana	Jumlah		
			Kejadian	Korban	Sarana
		Kebakaran	13	15	15
		Abrasi	2	0	177
		Cuaca Ekstrim	1	0	80
		Gempa Bumi	4	0	0
16	Soppeng	Banjir	1	20.085	5.322
		Angin Kencang	2	1	1
		Kebakaran	3	10	6
17	Bone	Banjir	3		
		Tanah Longsor	7	1	1
		Angin Kencang	20	6	33
		Putting Beliung	15	229	78
		Kebakaran	34	177	64
		Cuaca Ekstrim	1	0	18
		Gempa Bumi	7	0	0
18	Enrekang	Banjir	6	0	93
		Banjir Bandang	3	117	48
		Tanah Longsor	13	81	42
		Angin Kencang	11	23	10
		Putting Beliung	1	35	8
		Kebakaran	14	53	23
		Cuaca Ekstrim	1	0	0
		Gempa Bumi	1	0	0
19	Tana Toraja	Tanah Longsor	17	140	56
		Angin Kencang	10	23	12
		Putting Beliung	6	18	5
		Kebakaran	9	29	7
		Cuaca Ekstrim	1	0	1
20	Toraja Utara	Tanah Longsor	8	0	0
		Angin Kencang	4	0	1
		Putting Beliung	3	0	4
		Kebakaran	5	7	6
		Gempa Bumi	3	0	0
21	Luwu	Banjir	15	8	1.918
		Tanah Longsor	6	0	256
		Angin Kencang	4	0	32
		Putting Beliung	3	342	83
		Gempa Bumi	1	0	0
22	Palopo	Banjir	3	0	1.094
		Banjir Bandang	1	0	1.749
		Tanah Longsor	1	0	0
		Angin Kencang	1	0	0
		Putting Beliung	1	1	1
		Kebakaran	1	1	1
23	Luwu Utara	Banjir	24	14.050	3.805
		Tanah Longsor	1	0	17
		Angin Kencang	8	15	11
		Putting Beliung	2	14	4
		Kebakaran	14	51	14
		Gempa Bumi	6	0	0
24	Luwu Timur	Banjir	3	38	8
		Tanah Longsor	3	7	1
		Angin Kencang	5	100	93
		Kebakaran	8	113	18
		Cuaca Ekstrim	3	12	6
		Gempa Bumi	90	0	0
Jumlah Total			**862**	**67.521**	**31.087**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Data capaian kinerja program pembangunan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.70.
Capaian Kinerja Program Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)	%	80	89	100	100	100
Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100
Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	37	64,8
Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	%	100	100	100	100	100
Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	%	100	100	100	100	100
Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.1.6 Sosial

Standar pelayanan minimal urusan sosial mengamanatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis. Pada tahun 2022 populasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) 415.310 orang dan populasi yang terdaftar dalam program keluarga harapan, program bantuan bersyarat untuk pengentasan kemiskinan yang bersumber dari kemensos sebesar 364.414. Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan melampaui target dengan capaian 360 orang yang terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 60 Orang, LKS sebanyak 120 Orang, SLRT sebanyak 60 Orang dan TKSK sebanyak 120 orang. Jumlah Pemulangan orang terlantar sebanyak 174 orang dipulangkan ke daerah asal. Jumlah penyandang Disabilitas terlantar sebanyak 224 orang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti seperti pangan dan sandang, serta pemberian alat bantu kepada disabilitas sebanyak 39 orang. Jumlah anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di UPT Dinas Sosial sebanyak 425 orang serta anak terlantar

yang mendapatkan rehabilitasi sosial LKSA sebanyak 1.551 orang. Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi di dalam panti Mappaksunggu Pare-Pare yaitu sebanyak 75 orang dan terealisasi sesuai target yang ditentukan. Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial yang berada di 8 LKS Mitra Kerja Dinas Sosial sebanyak 1.222 orang. Jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi dalam panti Mattirodeceng yaitu sebanyak 100 orang. Jumlah populasi PPKS sebanyak 415.310 orang dan yang mendapatkan bantuan jaminan social (PKH) sebanyak 365.669 orang. Jumlah orang tua tunggal yang mengajukan proses pengangkatan anak WNI yaitu sebanyak 38 orang.

Pada tahun 2022 jumlah korban bencana yang terdampak sebanyak 26.921 orang dan semua korban terdampak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2022. Kabupaten Luwu Utara adalah kabupaten dengan jumlah korban bencana tertinggi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial setelah tanggap darurat bencana provinsi sebesar 9.562 jiwa kemudian Kabupaten Pinrang sejumlah 5.350 jiwa, Kota Palopo sejumlah 3.937 jiwa, dan Kabupaten Wajo sejumlah 2.178 jiwa. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 2 TMP/MPN dan terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan sosial tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.71.
Capaian Kinerja Program Urusan Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	%	100	100	100	100	100
Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	%	99,05	60,97	38,91	65	100
Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	100	100	100	55,66	58
Persentase warga negara penyandang disabiltas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti (SPM)	%	8,21	20,83	35,12	100	100
Persentase warga negara Anak Terlantar yang	%	3,09	30,09	3,88	100	100

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti (SPM)						
Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna susila didalam panti (SPM)	%	11,3	11,35	100	100	100
Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia didalam panti (SPM)	%	100	100	100	100	100
Persentase Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi tuna sosial di dalam panti	%	6,9	5,52	100	100	100
Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	%	62,4	50,4	75,45	88,04	3,6
Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	%	100	100	96,96	100	100
Persentase warga negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saaat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	%	100	100	15,63	100	100
Persentase TMP yang dikelola	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2 Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1. Ketenagakerjaan

Capaian persentase kabupaten/kota yang menyusun perencanaan tenaga kerja makro sebesar 66,67 persen dimana sejumlah 16 kabupaten/kota yang masih aktif dan 7 kabupaten/kota yang telah habis masa berlakunya dan 1 Kabupaten tidak menyusun karena tidak tersedia anggaran. Dari 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan semua menyusun perencanaan tenaga kerja makro. Capaian perusahaan yang menyusun perencanaan tenaga kerja mikro sebesar 12 persen dimana dari 25 perusahaan terdapat 3 perusahaan yang telah menyusun perencanaan tenaga kerja mikro. Capaian persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan sebesar 83,33 persen dimana jumlah pencari kerja yang dilatih

sebanyak 60 orang dan jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan sebanyak 50 orang.

Grafik II. 79.
Peningkatan Kesempatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

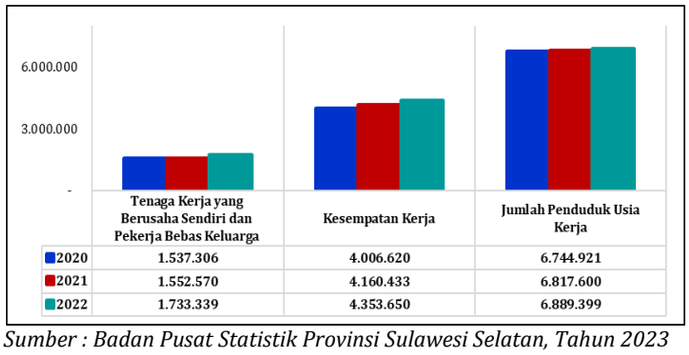

	Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga	Kesempatan Kerja	Jumlah Penduduk Usia Kerja
2020	1.537.306	4.006.620	6.744.921
2021	1.552.570	4.160.433	6.817.600
2022	1.733.339	4.353.650	6.889.399

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga pada tahun 2022 mengalami peningkatan 1,24 persen poin dari tahun sebelumnya dengan jumlah 1.733.339 orang.

Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri pada tahun 2021 adalah sebesar 81,25 persen lebih tinggi 6,25 persen dari target 75,00 persen. Dari total 320 orang peserta pelatihan yang berbasis kewirausahaan yang telah mandiri sebanyak 212 orang, meliputi pelatihan kewirausahaan sebanyak 12 orang dan pelatihan kelompok usaha mandiri (KUM) sebanyak 200 orang dan sisanya sebanyak 60 orang baru mulai merintis usaha. Pada tahun 2022 jumlah tenaga kerja yang dilatih kewirausahaan sebanyak 20 orang dan seluruhnya telah mandiri berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh UPT BPK.

Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan mengalami peningkatan dari tahun 2020. Berdasarkan hasil monitoring di 24 kabupaten/kota jumlah pencari kerja sebesar 311.117 orang dan yang ditempatkan sebesar 17.424 orang yang terdiri dari AKAL (Antar Kerja Antar Luar) sebanyak 14.108 orang, AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) sebanyak 3.120 orang, Disabilitas sebanyak 19 orang dan PMI (Pekerja Migran Indonesia) sebanyak 177 orang. Tahun 2022 persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan capaian 9,49 persen. Dimana jumlah pencari kerja yang terdaftar sebesar 39.679 orang dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebesar 31.650 orang yang terdiri dari AKAD/AKL sebesar 26.306 orang, Disabilitas sebanyak 52 orang dan PMI sebanyak 5.292 orang. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2022 tertinggi di Kota Makassar sebesar 9.484 orang, sedangkan yang terendah di Kabupaten Enrekang sejumlah 1 orang. Capaian jumlah pencari kerja yang ditempatkan menurut kabupaten/kota disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 80.
Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

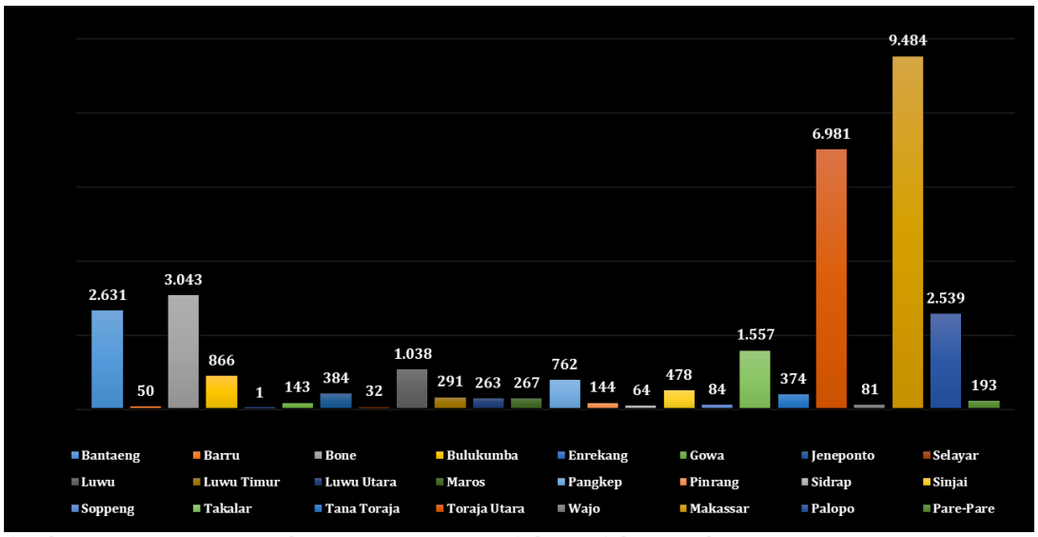

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Persentase daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja. Persentase daya serap tenaga kerja pada tahun 2022 sebesar 63,19 persen dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 6.889.399 orang dan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 4.889.399 orang mengalami peningkatan sebesar 2,61 persen dari tahun 2021. Daya serap tenaga kerja pada tahun 2022 tertinggi di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone. Sedangkan daya serap tenaga kerja terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Barru, dan Kota Palopo.

Grafik II. 81.
Daya Serap Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

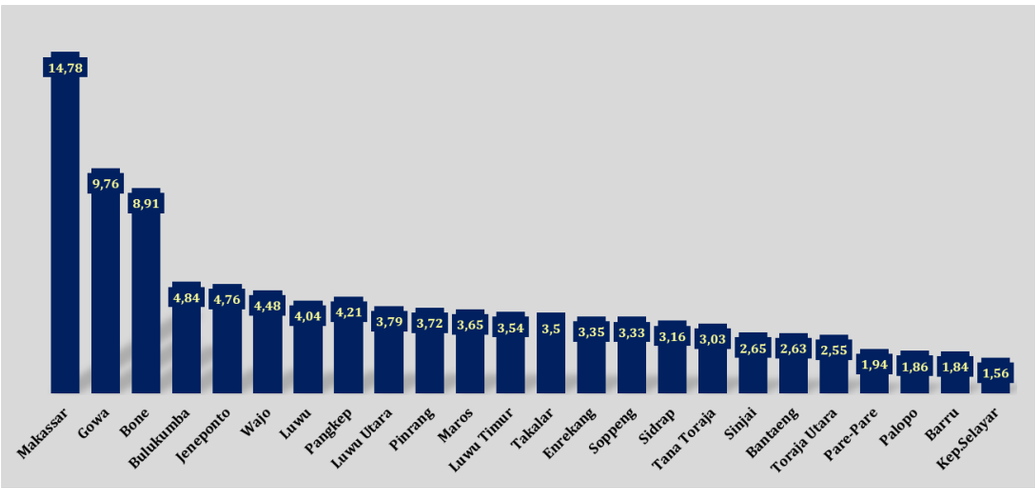

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan pada tahun 2021 adalah sebesar 60,98 persen melampaui 3,88 persen dari target 57,10 persen. Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama sebesar 60,98 persen yang diukur dari jumlah kasus yang dicatatkan sebanyak 41 kasus dan jumlah kasus yang diselesaikan

dengan Perjanjian Bersama sebanyak 25 kasus dan sisanya adalah anjuran. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sebesar 63,38 persen, dimana jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sebesar 9.592 perusahaan serta jumlah perusahaan yang terdaftar di WLKP Online sebanyak 15.133 perusahaan.

Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek merupakan rasio antara jumlah pekerja/buruh yang mengikuti jamsostek dibagi dengan total jumlah pekerja, pada tahun 2021 persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek adalah sebesar 47,12 persen lebih tinggi 0,52 persen dari target 46,60 persen. Berdasarkan data BPJS yang tercatat jumlah pekerja/buruh sebanyak 2.265.109 orang dan yang menjadi peserta jamsostek sebanyak 1.067.251 orang. Tahun 2022 persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi Program Jamsostek adalah sebesar 49,43 persen. Jumlah pekerja yang mengikuti Program Jamsostek meliputi PU, BPU dan Jakon sebesar 1.168.024 orang dari proyeksi PU, BPU dan Jakon sebanyak 2.865.109 orang. Capaian persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan sebesar 20,93 persen. Jumlah perusahaan yang terdaftar di WLKP Online sebanyak 15.133 perusahaan dan jumlah perusahaan yang telah diperiksa sebanyak 3.167 perusahaan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan ketenagakerjaan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.72.
Capaian Kinerja Program Urusan Ketenagakerjaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	%	95,83	95,83	95,83	91,67	66,7
Persentase Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	10	12
Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	73	83,33
Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	81,25	100
Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	%	3,19	4,36	3,29	5,60	9,49
Persentase daya serap tenaga kerja	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	20,87	61,58	63,19
Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	60,98	63,38

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
bidang ketengakerjaan						
Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	%	64,51	63,55	77,99	47,12	49,43
Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	62,59
Persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuasi, dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 76,37 persen lebih rendah dari capaian nasional. Peningkatan capaian IDG pada tahun 2022 didukung oleh peningkatan dimensi keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 4,56 persen dari tahun sebelumnya dengan capaian 27,06. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021 yang disebabkan oleh menurunnya capaian IDG dari dimensi pendapatan perempuan dan keterlibatan perempuan di parlemen. Dimana pada tahun 2020 pendapatan perempuan sebesar 32,55 persen menurun menjadi 32,51 persen pada tahun 2021, serta keterlibatan perempuan dalam parlemen mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 8,87 persen dengan capaian 25,88 persen pada tahun 2021. Masih perlunya peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan proporsi laki-laki dan perempuan yang seimbang, serta partisipasi dan pengambilan keputusan dari aspek ekomoni yang mempertimbangkan kesetaraan posisi pekerjaan dan pendapatan laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2022 capaian IDG tertinggi di Kota Palopo sebesar 79,1 persen sedangkan yang terendah di Luwu Utara dengan capaian 43,96 persen. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.73.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2018-2022

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	%	69,14	76,01	76,32	74,76	76,37
Nasional	%	72,10	75,24	75,57	76,26	76,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Tabel II.74.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten dan Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/Kota	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kepulauan Selayar	64,69	68,03	70,06	68,07	68,71
Bulukumba	66,78	69,89	68,22	67,1	70,32
Bantaeng	80,53	80,27	80,26	81,2	80,21
Jeneponto	72,37	68,04	68,24	68,68	68,94
Takalar	70,55	70,66	68,78	70,67	73,39
Gowa	61,06	78,31	77,97	79,71	78,35
Sinjai	70,24	72,48	73,46	73,59	73,78
Maros	65,48	69,93	72,43	72,38	71,63
Pangkep	56,20	57,03	59,44	59,94	64,12
Barru	69,24	63,41	63,96	63,98	65,24
Bone	63,16	58,55	56,86	57,55	59,09
Soppeng	73,75	71,45	71,15	70,54	71,07
Wajo	61,07	55,09	56,24	56,3	55,83
Sidenreng Rappang	52,71	56,80	56,86	56,39	56,71
Pinrang	61,73	67,92	68,11	68,43	65,12
Enrekang	59,36	58,28	60,32	56,51	62,98
Luwu	63,58	55,89	57,15	57,29	58,03
Tana Toraja	74,14	69,32	68,5	68,77	70,68
Luwu Utara	46,24	38,92	38,11	41,11	43,96
Luwu Timur	46,06	50,76	50,76	54,09	55,4
Toraja Utara	56,15	62,58	60,98	62,75	64,21
Kota Makassar	67,89	78,32	77,61	76,59	78,15
Kota Pare-Pare	66,62	73,86	74,06	70,86	71,21
Kota Palopo	74,87	77,53	77,47	73,1	79,1

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan. Sejak tahun 2017 hingga 2019 di Sulawesi Selatan hanya ada satu layanan yang terstandarisasi yakni UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan untuk di Kabupaten/Kota memiliki layanan Perlindungan Perempuan berupa P2TP2A yang dikelola oleh Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah. Tahun 2020 beberapa Kabupaten/Kota telah membentuk UPT PPA sesuai dengan Edaran Mendagri dan hingga tahun 2021 terdapat 6 kabupaten/kota yang membentuk Layanan Perlindungan Perempuan yang terstandarisasi. Pada tahun 2022 sejumlah 27 persen tersedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi, yaitu: Yayasan Kalla, Yasmib, Muslimat, Kohati HMI, BKOW, Perempuan Gereja/PWKI, Dharmayukti Karini, Jalasenastri dan PKK.

Pengarusutamaan Gender merupakan sebuah strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender baik dalam skala nasional maupun skala regional maupun di tingkat daerah. Keberhasilan Penerapan 7 Prasyarat PUG di daerah yang terdiri dari: a) Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung penerapan PUG; b) Kebijakan daerah yang mendukung penerapan PUG, c) Kelembagaan Pokja PUG/Focal Point, d) Sumber daya yang terdiri dari sumber

daya manusia terkait kapasitas perencana/program/bidang teknis dalam memahami PUG melalui PPRG serta sumber daya anggaran terkait alokasi anggaran dalam memperkuat PUG, Data pilah, Alat Analisis, dan Partisipasi masyarakat, maka setiap daerah akan mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan beberapa kategori. Hingga tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai kategori tertinggi yaitu Mentor atau 7 Prasyarat PUG tersebut diatas telah berjalan dan salah satu wujud nyata penerapan PUG telah berhasil di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dimana sejak tahun 2020 hingga 2022 telah dilaksanakannya Musrenbang Perempuan serta masyarakat/lembaga masyarakat pemerhati perempuan telah diberi ruang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah.

Layanan Perlindungan Perempuan selanjutnya disebut UPTD PPA yang berfungsi sebagai sebagai unit layanan teknis menyelenggarakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjalankan fungsi menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban. Hingga tahun 2022 Provinsi dan sejumlah 13 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bone, Luwu Utara, Wajo, Lutim, Sinjai, Enrekang, Takalar, Soppeng, Bulukumba, Barru, Maros, Gowa, Kota Makassar yang telah membentuk UPT. Namun dengan adanya keterbatasan sumberdaya di Kabupaten/Kota, maka untuk menstandarkan lembaga layanan sesuai dengan standar ISO belum dapat dilaksanakan.

PUSPAGA sebagai tempat pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera di Sulawesi Selatan. Layanan ini dikatakan terstandarisasi apabila telah memiliki antara lain: 1) Tenaga profesional seperti tenaga konselor, baik psikolog atau sarjana profesi bidang psikologi; 2) Bimbingan Konseling atau Pekerja Sosial yang telah memahami Konvensi Hak Anak. Kabupaten/Kota yang telah menyediakan layanan pembelajaran keluarga yang terstadarisasi adalah Kabupaten Maros, Gowa, Barru, Wajo, Bone, Sidrap, Luwu Utara, Kota Makassar dan Pare-Pare.

Menyediakan Data Gender dan Anak merupakan salah satu bagian dari tujuh prasyarat PUG dan juga sekaligus sebagai alat dalam Menyusun Gender Budget Statement. Penyediaan data gender dan anak tahun 2017 hingga 2018 kabupaten/kota belum meyediakan data secara terpilah hal ini dimana minimnya pembinaan ke kabupaten/kota terkait data pilah. Hingga tahun 2022 sejumlah 22 kabupaten/kota telah menyediakan data gender dan anak terupdate, sejumlah 16 kabupaten/kota telah menyediakan kelembagaan sistem data gender dan anak secara mandiri yang terdiri dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Maros, Pangkep, Bone, Soppeng, Sidrap, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Kota Pare-Pare, Palopo dan Makassar. Pengembangan kelembagaan penyediaan data terpilah gender dan anak sampai ke level Desa/Keluarahan dengan membentuk relawan SAPA dengan tugas dan fungsi melakukan pengumpulan dan analisa data terpilah gender dan anak. Sehingga mempermudah tim data/forum data OPD dalam menggunakan data terpilah dalam proses perencanaan sampai monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) merupakan komitmen dalam menghormati dan memenuhi hak anak dan merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA), serta untuk mengetahui sejauh mana daerah berkomitmen dalam pengarusutaman Hak Anak, maka setiap tahunnya dilakukan evaluasi KLA dengan memperhatikan 5 Kluster. Hingga tahun 2022 sejumlah 21 kabupaten/kota atau sebesar 87,5 persen daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu Kabupaten Bone, Bantaeng, Sinjai, Sidrap, Luwu Utara, Maros, Bulukumba, Gowa, Soppeng, uwu Timur, Barru, Pangkep, Kep. Selayar, Jeneponto, Enrekang, Pinrang, Kota Makassar, Palopo dan Pare-Pare.

Layanan Perlindungan Anak Korban Kekerasan selanjutnya disebut UPTD PPA yang berfungsi sebagai sebagai unit layanan teknis menyelenggarakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjalankan fungsi menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban. Hingga tahun 2022 Provinsi dan sejumlah 13 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bone, Luwu Utara, Wajo Luwu Timur, Sinjai, Enrekang, Takalar, Soppeng, Bulukumba, Barru, Maros, Gowa, dan Kota Makassar telah membentuk UPT. Namun dengan adanya keterbatasan sumberdaya di kabupaten/kota untuk menstandarkan Lembaga layanan sesuai dengan standar ISO belum dapat dilaksanakan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.75.
Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	%	65	0	54	58	25
Persentase kab/kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG	%	62,5	62,5	75	83,33	71
Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi	%	0	0	54	58	37,5
Persentase kab/kota yang menyediakan layanan peningkatan kualitas keluarga	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	91,67	91,67
Persentase Kab/kota yang menyediakan Data Gender	%	Belum dilakukan pengukuran	80	82	82,5	85

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
dan Anak yang terupdate						
Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	58,33	58,33	66,7	62,5	87,5
Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	%	8,3	12,5	16,6	58	58,3

Sumber : DP3A, Dalduk dan KB Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.3. Pangan

Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun didukung oleh anggaran DAK Fisik Pertanian pemerintah pusat untuk kabupaten/kota (anggaran langsung ke kelompok tani) berupa pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat pada kelompok tani yang memenuhi syarat. Pada tahun 2021 dilaksanakan pembangunan lumbung pangan masyarakat sejumlah 25 lumbung sedangkan pada tahun 2022 jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibangun mengalami peningkatan dengan jumlah 58 lumbung.

Selain itu Dinas Ketahanan Pangan mempunyai cadangan pangan pemerintah provinsi sebanyak 140 ton yang dititip di Badan Urusan Logistik (Bulog). Ketersediaan beras di provinsi Sulawesi Selatan mampu memenuhi kebutuhan penduduk sehingga masuk dalam kategori aman. Faktor pendukung capaian ketersediaan pangan utama adalah bergantung pada produksi padi dan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Ketersediaan beras pada tahun 2021 mengalami surplus beras, situasi dimana tingkat ketersediaan pangan lebih besar daripada total kebutuhan. Komoditi jagung juga mengalami surplus. Begitu pula dengan ketersediaan jagung mencapai 61,83 persen melampaui target sebesar 9,04 persen. Berbeda dengan ketersediaan kedelai mengalami defisit yakni situasi dimana tingkat ketersediaan pangan kedelai lebih kecil dari total kebutuhan. Capaian ketersediaan kedelai tahun 2021 sebesar 13,62 persen tidak mencapai target sebesar 26,22 persen. Faktor penghambat pencapaian target disebabkan karena Sulawesi Selatan bukan merupakan daerah sentra produksi kedelai. Selain itu walaupun areal luas tanam diperluas akan tetapi banyak pertanaman puso akibat banjir. Sebab lain akibat rendahnya produksi kedelai menyebabkan harga kedelai naik, dalam prespektif ketahanan pangan terkendala dalam akses ketersediaan dan akses distribusi. Tahun 2022 jumlah ketersediaan pangan tidak mencapai target yang dipengaruhi oleh jumlah produksi pertanian dan jumlah penduduk yang menurun, namun meskipun demikian jumlah ketersediaan pangan Sulawesi Selatan melebihi jumlah kebutuhan konsumsi. Berdasarkan neraca pangan tahun 2022, necara beras sebanyak 759.916 ton, neraca jagung sebanyak 662.137 ton dan jumlah produksi kedelai sebanyak 4.006 ton (untuk pangan kedelai tidak dilakukan perhitungan neraca karena tidak masuk kategori pangan pokok strategis).

Ketersediaan Energi dan Protein Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ketersediaan energi dan protein melebihi angka kecukupan gizi (AKG) berdasarkan standar nasional sebesar 2.150 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 57 gram/kapita/hari bila dikonsumsi. Tingkat ketersediaan energi sudah melebihi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkanyaitu 2.150 kkal/kapita/hari. Ketersediaan energi bersumber dari beras dan jagung pada tahun 2022 mencapai 3.593 kkal/kapita/hari mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 1,07 persen. Tingkat ketersediaan protein pada tahun 2022 sudah melebihi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan yaitu 57 gram/kapita/hari. Ketersediaan protein bersumber dari telur, susu, daging sapi, daging ayam dan ikan dengan capaian 171,65 gram/kapita/hari pada tahun 2022 mengalami penurunan -15,44 persen dari tahun 2021.

Grafik II. 82.
Sebaran Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

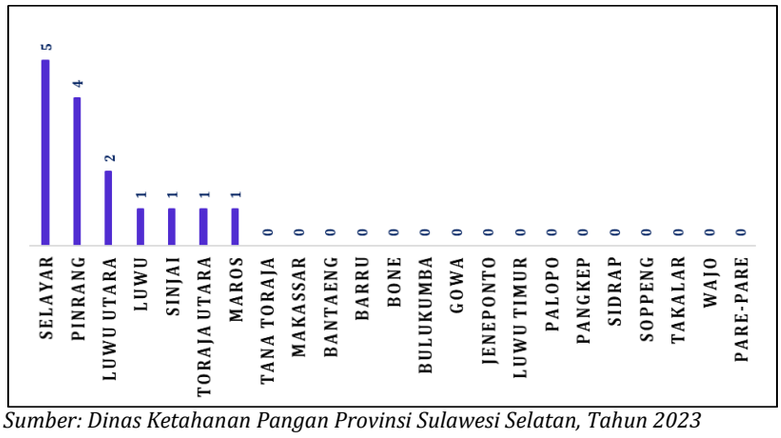

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pada tahun 2020 jumlah daerah rawan pangan sebanyak 22 kecamatan dan tertangani hanya 7,49 persen. Tidak mencapai target jumlah rawan pangan bertambah 5 kecamatan/daerah. Jumlah daerah rawan pangan pada tahun 2021 teridentifikasi melalui peta FSVA naik sebanyak 27 daerah/kecamatan dan penanganan daerah rawan pangan hanya 25,64 persen. Terdapat Bantuan Pertanian Keluarga pada 20 Kelompok tani untuk mengintervensi 27 daerah rawan pangan berdasarkan peta kerentanan dan ketahanan pangan tahun 2021. Dukungan Peta ketahananan pangan dan kerentanan pangan untuk mengetahui titik pemantapan ketersediaan pangan beragam, bergizi dan seimbang dan daerah rawan pangan. Bantuan yang diserahkan ke masyarakat (20 Kelompok Tani) di tahun 2021 dalam hal penanganan kerawanan pangan melalui program pertanian keluarga (Family Farming) dan penguatan daerah yang dekat dengan daerah rawan pangan. Daerah rawan pangan mengalami peningkatan dari 22 daerah rawan pangan di tahun 2020 menjadi 27 daerah rawan pangan di tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa penanganan daerah rawan pangan belum maksimal. Tahun 2022 telah dilaksanakan sinkronisasi dengan kabupaten/kota dalam penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas–FSVA yang diperoleh 3 kecamatan kategori rentan rawan pangan (Prioritas 2) dan 13 kategori Agak Rentan Rawan Pangan (Prioritas 3). Mengalami penurunan dari tahun 2021 jumlah daerah rawan pangan pada tahun 2022 sebesar 15 lokasi yang tersebar

di Kabupaten Jeneponto (5 lokasi), Pinrang (4 lokasi), Luwu Utara (2 lokasi), dan Kabupaten Luwu, Maros, Sinjai, dan Toraja Utara masing-masing sejumlah 1 lokasi rawan pangan.

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis kimia dan benda lain yang dapat menganggu, merugikan dan membahayakan Kesehatan manusia. Dukungan Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kima dan fisik pada pangan segar melalui pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang dilengkapi dengan peraturan perundang-unfangan dibidang mutu keamanan pangan. Dukungan Stakeholder terkait dalam hal ini kelompok Wanita Tani, Balai POM dan Pelaku Usaha merespon baik kegiatan pengambilan dan pengujian sampel. Pada tahun 2022 dari 30 sampel yang diuji semuanya lolos uji pestisida dan formalin. Telah diterbitkan 1 Sertifikat Prima 3 dan 47 Nomor Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pangan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.76.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun	%	14,93	15,19	14,98	14,58	29,15
Ketersediaan Beras	%	388,24	363,76	332,21	363,8	367,91
Ketersediaan Jagung	%	44,33	47,88	53,27	61,83	55,04
Ketersediaan Kedelai	%	22,55	24,96	13,66	13,62	18,23
Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/ kapita/ hari	3.572	3.879	3.168	3.484,4	3.593
Ketersediaan Protein Perkapita	gr/ kapita/ hari	103,75	139,92	86,16	94,78	171,65
Jumlah Daerah Rawan Pangan	%	14	16	22	27	15
Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data Timpang)	%	5,21	16,29	7,49	25,64	74,07
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100	100	100	100	100
Skor Pola Pangan Harapan	%	82,60	83,40	83,7	80,40	81,38

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.4. Pertanahan

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

yaitu terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Tahapan persiapan menjadi kewenangan Gubernur yaitu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lokasi Pembangunan. Pengadan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi sejumlah 8 kegiatan pengadaan tanah antara lain proyek prioritas provinsi dan proyek strategis Nasional yang permohonannya diajukan pada akhir tahun 2021 tetapi dilakukan perpanjangan dan penetapan lokasinya pada tahun 2022. Adapun kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimaksud antara lain :

1. Pembangunan Jalan Bypass Mamminasata di Kabupaten Maros seluas ± 15,21 Ha;
2. Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare (Segmen E) untuk Kabupaten Maros dan Kota Makassar seluas ± 83,94 Ha;
3. Pembangunan Runway Bandara Bua di Kabupaten Luwu seluas ± 18 Ha;
4. Pembangunan Akses Jalan Bandara Bua-Toraja Utara di Kabupaten Luwu seluas ± 8,37 Ha;
5. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Baliase di Luwu Utara seluas ± 30,15 Ha;
6. Pembangunan Genangan Tanggul Hulu Bendung D.I Gilireng di Kabupaten Wajo seluas ± 67,43 Ha;
7. Pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar seluas ± 307,27 Ha;
8. Pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Gowa seluas ± 47 Ha.

Jumlah Sengketa Tanah diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang di fasilitasi Tahun 2022 terdapat 6 pengaduan, dan presentase aduan yang terfasilitasi sebesar 100 persen. Kegiatan Penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota serta kegiatan Konsolidasi dan Koordinasi yang dilakukan pada Tahun 2022 antara lain :

1. Melakukan Koordinasi terkait tentang Permohonan Persetujuan Izin Pelepasan Tanah Kas Desa di Kabupaten Wajo.
2. Melakukan identifikasi lokasi infrastruktur prioritas PemProv sebagai dasar penyusunan database penatagunaan tanah di Kab Bone.
3. Melakukan identifikasi lokasi infrastruktur prioritas PemProv Sulawesi Selatan sebagai dasar penyusunan database penatagunaan tanah Kab. Sinjai.
4. Melakukan identifikasi lokasi infrastruktur prioritas PemProv Sulawesi Selatan sebagai dasar penyusunan database penatagunaan tanah Kab. Bulukumba.
5. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaaan Tanah di Kabupaten Soppeng.
6. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaaan Tanah di Kabupaten Soppeng.
7. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kosolidasi Tanah Kewenangan Provinsi di Kabupaten Takalar.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pertanahan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.77.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	140	83,3	100	50,39
Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	60	100	83,33	100	100
Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel, Tahun 2023

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Dokumen RPPLH memuat tentang latar belakang, kondisi wilayah dan lingkungan hidup, permasalahan dan isi pokok lingkungan hidup, serta arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan untuk 30 tahun mendatang. Pada tahun 2018 DPLH Prov.Sulsel telah menyusun dokumen RPPLH Sulawesi Selatan untuk 2017-2047, sehingga target tersedianya dokumen RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan telah tercapai pada tahun 2017. Skenario RPPLH Prov.Sulsel adalah untuk Periode I (tahun 2017-2026), Periode II (tahun 2027-2036), dan Periode III (tahun 2037-2047). Dengan adanya tahapan verifikasi dokumen RPPLH maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan penyusunan peraturan daerah tentang RPPLH. Tahun 2022 direncanakan untuk menyusun naskah akademik Ranperda RPPLH, di tahun 2023 penyelesaian penyusunan RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Peraturan Daerah. Tahapan pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup pada tahun 2022 sebesar 60 persen dimana pada tahapan ini dilakukan pra verifikasi di KLHK terhadap Draft Dokumen RPPLH yang telah disusun sebelumnya berdasarkan Surat Edaran MenLHK No. 5 Tahun 2016.

Berdasarkan pembagian urusan Pokja Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan merupakan koordinator inventarisasi aksi mitigasi khusus sektor limbah. Beberapa kegiatan aksi mitigasi sektor pengelolaan limbah yang dilakukan inventarisasi antara lain TPS 3R, TPST, Bank Sampah, Pengomposan serta didukung dengan kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim). Persentase penurunan emisi GRK tahun 2022 sebesar 7,85 persen yang diperoleh dari sejumlah kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK yaitu kegiatan TPS3R sebesar 667,88 Ton CO2 Eq, TPST sebesar 5.271,15 Ton CO2 Eq, Rumah Kompos sebesar 1.120,37 Ton CO2 Eq, Bank sampah sebesar 486,47 Ton CO2 Eq, ProKlim sebesar 251,77 Ton CO2 Eq serta sektor

informail (pengepul) sebesar 6.3290 Ton CO2 Eq. Total jumlah penurunan Emisi GRK pada tahun 2021 sebesar 14.126,72 Ton CO2 Eq.

Tabel II.78.
Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No	Kegiatan	Jumlah Penurunan Emisi (Ton CO_2 Eq)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	TPS3R	0,155	325,07	3,77	53,38	667,88
2	TPST	0,303	2,85	1,78	765,8	5.271,15
3	Rumah Kompos	0	0,133	0,778	309,67	1.120,37
4	Bank Sampah	127,99	0,342	1.328,67	200,28	486,47
5	ProKlim	0	0	0	3.895,29	251,77
6	Aplikasi Aksara	117,63	163,92	778,29	1.911	0
7	Sektor Informal (Pengepul)					6.329,08
Total					**7.135,42**	**14.126,72**

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Capaian persentase tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi) pada tahun 2022 sebesar 92,85 persen atau sebanyak 320 jenis tanaman koleksi yang berada di kebun Raya Pucak dari target 350 jenis hingga tahun 2023.

Target sampah perkotaan yang tertangani sebesar 73 persen sedangkan capaian tahun 2022 sebesar 55,48 persen yang berasal dari jumlah sampah yang ditangani sebesar 765.570 ton/tahun dibagi dengan timbulan sampah sebesar 1.380.553,36 ton. Kapasitas infrastruktur layanan persampahan serta sistem pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah di kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.79.
Kapasitas dan Pengoperasian TPA Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas (Ton/Hari)	Sistem Pengoperasian
1	Kepulauan Selayar	10	Controll Landfill (Over)
2	Bulukumba	30	Sanitary Landfill (Over)
3	Bantaeng	21	Sanitary Landfill
4	Jeneponto	27	Controll Landfill
5	Takalar	9	Sanitary Landfill
6	Gowa	238	Open Dumping
7	Sinjai	19	Controll Landfill (Over)
8	Maros	49	Controll Landfill
9	Pangkajene dan Kepulauan	30	Controll Landfill
10	Barru	10	Controll Landfill (Over)
11	Bone	57	Controll Landfill (Over)
12	Soppeng	25	Controll Landfill (Over)
13	Wajo	59	Sanitary Landfill

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas (Ton/Hari)	Sistem Pengoperasian
14	Sidenreng Rappang	57	Sanitary Landfill (Over)
15	Pinrang	36	Sanitary Landfill
16	Enrekang	45	Controll Landfill
17	Luwu	51	Controll Landfill
18	Tana Toraja	16	Open Dumping
19	Luwu Utara	14	Controll Landfill (Over)
20	Luwu Timur	9	Controll Landfill
21	Toraja Utara	11	Controll Landfill
22	Makassar	603	Controll Landfill
23	Parepare	57	Controll Landfill (Over)
24	Palopo	72	Controll Landfill

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Target cakupan limbah yang dikelola pada tahun 2022 sebesar 4.000.000 ton. Adapun limbah yang dihasilkan sebesar 5.002.706,88 ton (termasuk FABA dan Slug nikel) sedangkan belum dikelola lanjut atau bersisa sebesar 68.075,35 ton. Target ketaatan pemrakarsa usaha terhadap izin lingkungan dan Izin PPLH tahun 2022 sebanyak 25 persen dimana jumlah pemrakarsa yang taat sebanyak 16 usaha dan target pengawasan usaha sebanyak 65 usaha, sedangkan realisasi pemrakarsa usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH sebanyak 21 usaha dan pengawasan usaha/kegiatan dan 71 usaha/kegiatan yang diawasi terdiri dari 65 pengawasan langsung dan 6 pengawasn tidak langsung.

Target persentase pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH sebanyak 73,61 pada tahun 2022 yang terdiri dari 53 MHA yang dibina sedangkan total MHA yang dibina sampai dengan tahun 2023 sebanyak 72 MHA dan realisasi sebanyak 53 MHA yang dibina. Target Cakupan lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH sebanyak 154 instansi lembaga dan organisasi, yang dilakukan penyuluhan sebanyak 134 instansi lembaga dan organisasi pada tahun 2022. Target cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan pada tahun 2022 sebanyak 30 rekomendasi dan penanganan pengaduan yang tertangani pada tahun 2022 sebanyak 30 rekomendasi. Pada tahun 2022 jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan sebesar 111 pengharagaan dari pelaksanaan kegiatan adiwiyata, kalpataru, adipura, proklim dan proper.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan lingkungan hidup tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.80.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	20	60
Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	3,4	3,88	7,85
Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	85,71	92,85
Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	66,91	73,33	72,83	82,32	54,48
Cakupan limbah yang dikelola	%	0	57	69	16,79	98,64
Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	12	40	60	20	29,6
Persentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	Belum dilakukan pengukuran	13,8	27,7	29,16	73,61
Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	%	97,4	0	0	64,29	87
Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang diberikan	Penghargaan	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	111
Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan salah satu identitas resmi yang wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin sebagai bukti diri bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Untuk memenuhi hal tersebut pemerintah senantiasa memberi dukungan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan akses pelayanan publik yang mensyaratkan penggunaan KTP-el serta mendorong masyarakat untuk segera memiliki KTP-el. Di sisi lain, pengadaan blangko KTP-el yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga ketersediaan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota sangat tergantung akan alokasi anggaran pengadaan blangko KTP-el di Ditjen kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan

pendistribusiannya ke instansi pelaksana di Kabupaten/Kota. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2022 Jumlah Penduduk Wajib KTP-el Provinsi Sulawesi Selatan sejumlah 6.673.253 jiwa dari total 9.300.745 jiwa penduduk. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el sejumlah 6.634.515 jiwa atau sebesar 99,42 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 3,1 persen. Sehingga jumlah penduduk wajib KTP di Sulawesi Selatan yang belum memiliki KTP-el sejumlah 290.958 jiwa. Pencapaian ini didukung melalui sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait kepemilikan KTP-el yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Diagram II.7.
Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

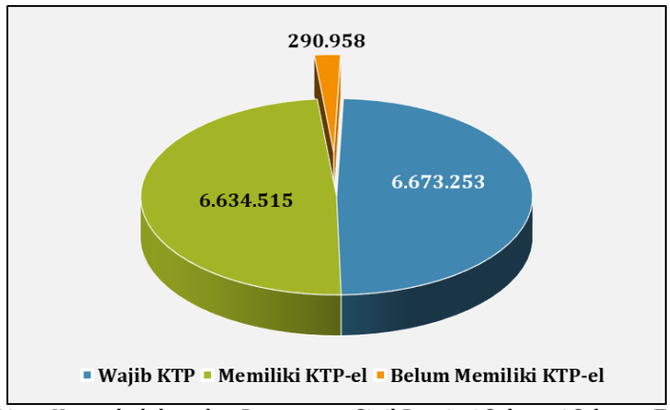

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang merupakan Identitas Wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin sebagaimana telah dijelaskan pada Nomor 1 (satu) diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai Instansi yang menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi kependudukan di daerah wajib memberikan pelayanan tersebut. Capaian tertinggi penduduk yang memiliki KTP-el di Kota Pare-Pare dengan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el sejumlah 114.974 jiwa, sedangkan yang belum memiliki KTP-el sebesar 608 jiwa. Sedangkan capaian terendah di Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el sejumlah 17.061 jiwa sedangkan yang belum memiliki KTP-el sebesar 26.963 jiwa. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 83.
Penduduk Ber-KTP Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

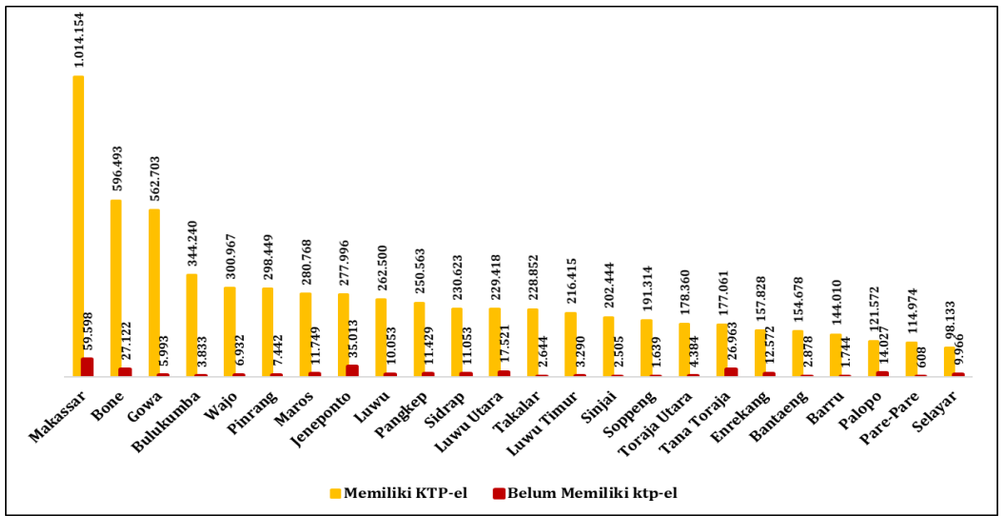

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Perekaman KTP-el merupakan kegiatan perekaman Sidik Jari, Scan Retina Mata, Tanda Tangan serta Data Pribadi yang dilakukan oleh Penduduk Wajib KTP-el ataupun belum menjadi wajib KTP-el. Perekaman ini dimaksudkan untuk mencegah KTP-el ganda atau KTP-el yang dipalsukan sehingga menciptakan keakuratan data yang yang nantinya akan mendukung program pembangunan pemerintah. Data Demographic yang diterbitkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri merupakan dasar dalam menetapkan hasil Perekaman KTP-el setiap bulannya.

Diagram II.8
Penerbitan KTP-el
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

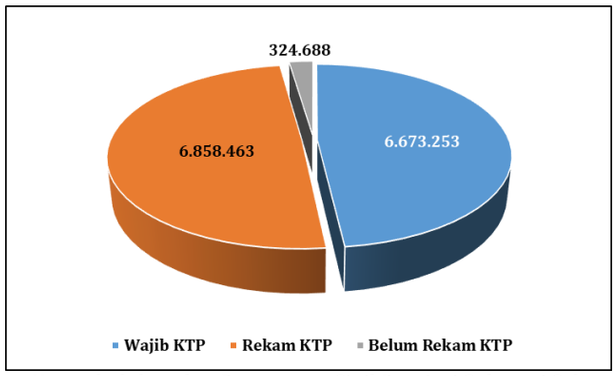

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah Penduduk Wajib KTP-el Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 6.673.253 jiwa yang ditargetkan dari total jumlah penduduk 9.300.745 jiwa dan yang telah telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 6.858.463 atau 102,78 persen mengalami peningkatan sebesar 0,58 persen dari capaian tahun sebelumnya.

Capaian tertinggi penduduk yang melakukan rekam KTP-el di Kabupaten Soppeng dengan jumlah penduduk yang telah melakukan rekam KTP-el sejumlah 204.837 jiwa, sedangkan yang belum melakukan rekam KTP-el sebesar 2.806 jiwa. Sedangkan capaian terendah di Kota Palopo dengan jumlah

penduduk yang telah melakukan rekam KTP-el sejumlah 124.767 jiwa sedangkan yang belum melakukan rekam KTP-el sebesar 14.747 jiwa. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 84.
Penerbitan KTP-el Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

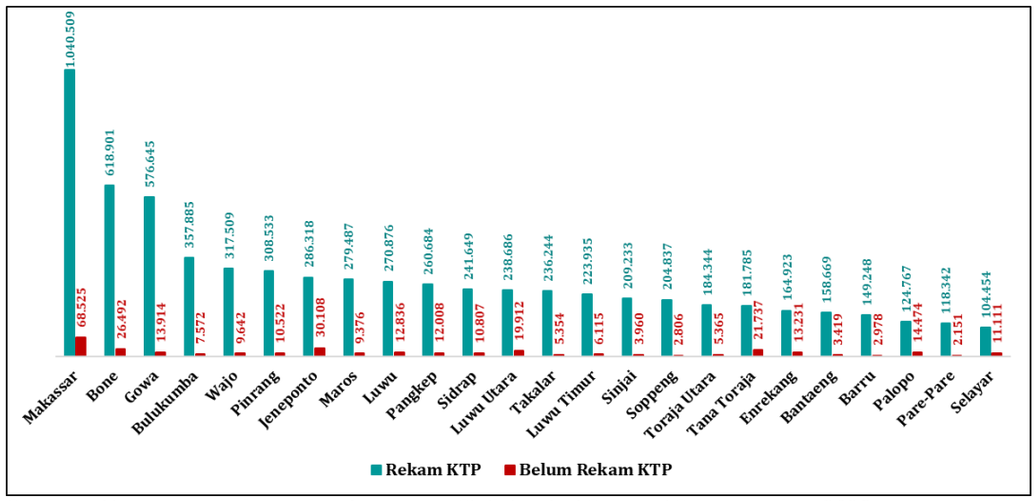

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan Kartu yang secara resmi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk anak berusia kurang dari 17 Tahun dan atau belum menikah. Pada dasarnya fungsi KIA ini sama dengan KTP-el dan KIA terbagi 2 (dua) yaitu KIA untuk anak 0-5 tahun dan KIA untuk anak 5-17 Tahun kurang 1 hari, sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Berdasarkan Permendagri tersebut kegunaan dari KIA antara lain sebagai upaya untuk meningkatkan pendataan warga negara sebagai perlindungan dan pelayanan publik dan sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara khusunya terhadap anak-anak. Pada tahun 2022 berdasarkan Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Disdukcapil Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sebanyak 1.448.945 jiwa telah memiliki KIA dari 2.668.009 jiwa penduduk usia 0-17 Tahun dengan persentase kepemilikan KIA sebesar 54,29 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 35,25 persen. Gambaran selengkapnya disajikan pada diagram berikut.

Diagram II.9.
Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

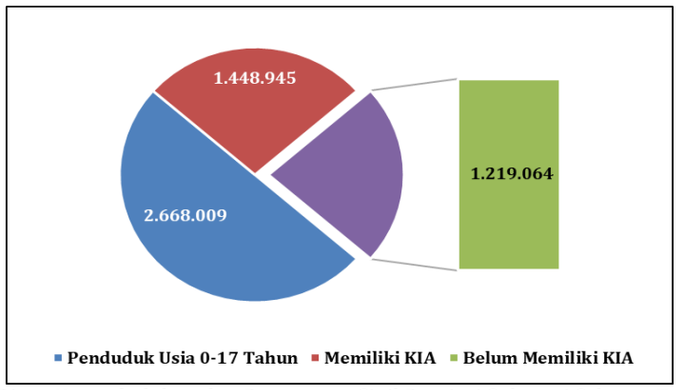

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Capaian kepemilikan kartu identitas anak (KIA) pada tahun 2022 tertinggi di Kota Pare-Pare sebesar 78,87 persen dengan jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki KIA sejumlah 47.031 jiwa dan yang belum memiliki KIA sejumlah 699 jiwa. Sedangkan capaian terendah di Kabupaten Takalar sebesar 24,74 persen dengan jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki KIA sejumlah 38.933 jiwa dan yang belum memiliki KIA sejumlah 56.136 jiwa. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 85.
Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

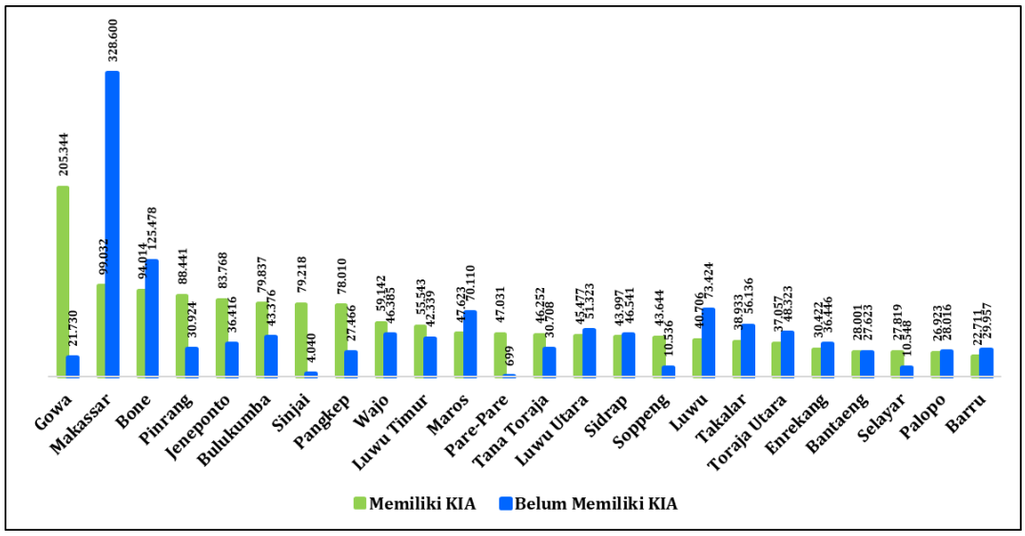

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkait hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Akte kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya. Untuk itu, pelayanan terkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudah termasuk dengan adanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namun dalam beberapa hal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran dan pemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukan pengurusan akta kelahiran bayinya setelah lahir.

Grafik II. 86.
Bayi Berakta Kelahiran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

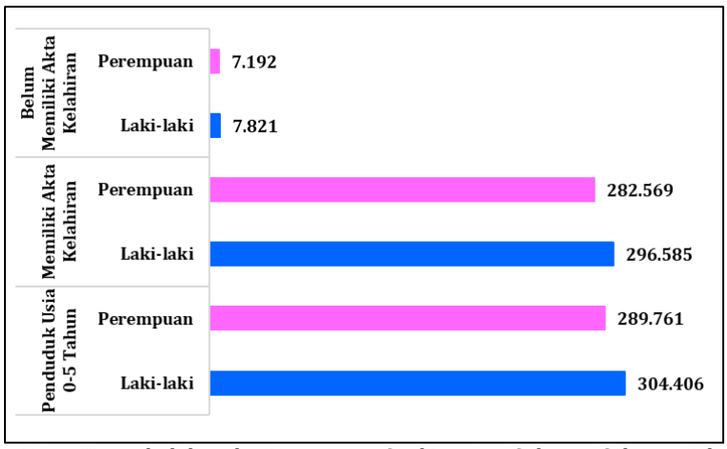

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Bayi berakte kelahiran adalah penduduk yang berusia 0-5 tahun kurang 1 hari yang telah memiliki akte kelahiran. Pada tahun 2022 jumlah bayi (penduduk 0-5 Tahun) di Sulawesi Selatan berjumlah 594.167 jiwa dan yang telah memiliki akte kelahiran sejumlah 579.154 jiwa atau 97,47 persen sehingga bayi yang belum memiliki akta kelahiran sejumlah 15.013 jiwa. Capaian tertinggi kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-5 tahun di Kabupaten Sinjai dan Pare-Pare sebesar 99,99 persen. Sedangkan capaian terendah di Kabupaten Toraja Utara sebesar 91,89 persen dengan jumlah bayi yang memiliki akta kelahiran sejumlah 16.759 jiwa dari total 18.220 jiwa penduduk usia 0-5 tahun. Sehingga masih terdapat 1.461 jiwa penduduk usia 0-5 tahun yang belum memiliki akta kelahiran. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 87.
Bayi Ber Akte Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

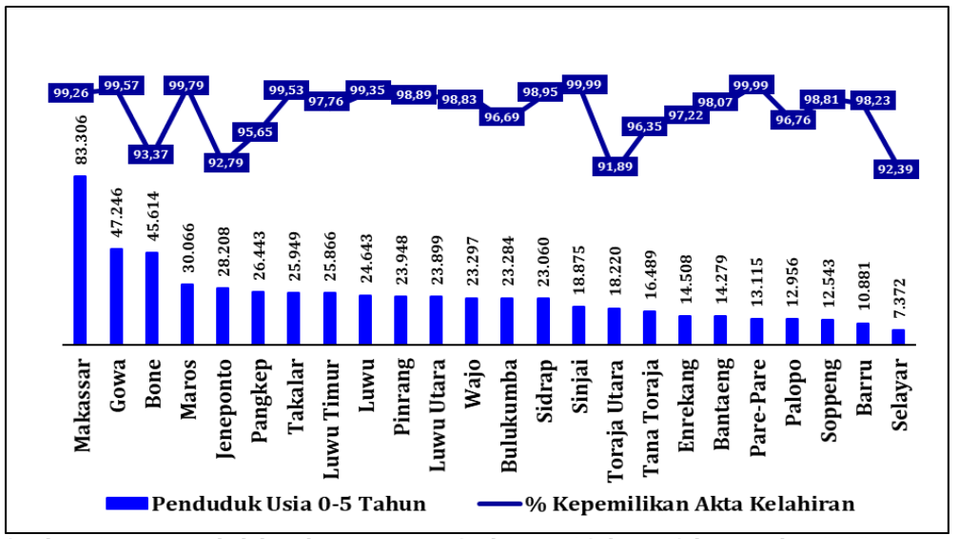

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di kantor urusan agama (KUA). Sedangkan bagi yang bergama

Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu, pencatatan perkawinannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta Perkawinan sangat penting bagi setiap penduduk yang telah menikah sebab merupakan alat bukti otentik kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Adanya program nasional percepatan penerbitan akta kelahiran, secara tidak langsung mendorong peningkatan rasio pasangan berakte nikah sebab seharusnya pemohon akta kelahiran melampirkan buku nikah/akta perkawinan orang tuanya. Masih banyaknya akte perkawinan yang telah diterbitkan sebelumnya secara konvensional dan belum terintegrasi dengan SIAK, menyebabkan datanya perkawinannya belum tercatat dalam SIAK. Demikian halnya dengan Akte perkawinan untuk penduduk muslim sepenuhnya dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA), adapun data hasil pelayanan penerbitan buku nikah yang dilakukan KUA belum sepenuhnya terintegrasi dengan data base dinas kependudukan dan pencatatan sipil (SIAK). Pada tahun 2022 ini jumlah penduduk atau pasangan telah menikah sebanyak 4.251.504 jiwa dan pasangan nikah yang beragama diluar agama Islam yang memiliki buku nikah dan atau nikah siri sebanyak 1.694.494 jiwa dengan persentase sebesar 39,86 persen. Gambaran selengkapnya disajikan pada diagram berikut.

Diagram II.10.
Pasangan Ber Akte Nikah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

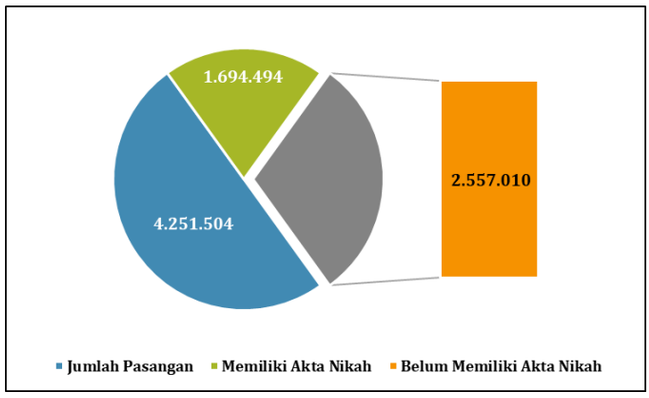

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Grafik II. 88.
Pasangan Ber Akte Nikah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

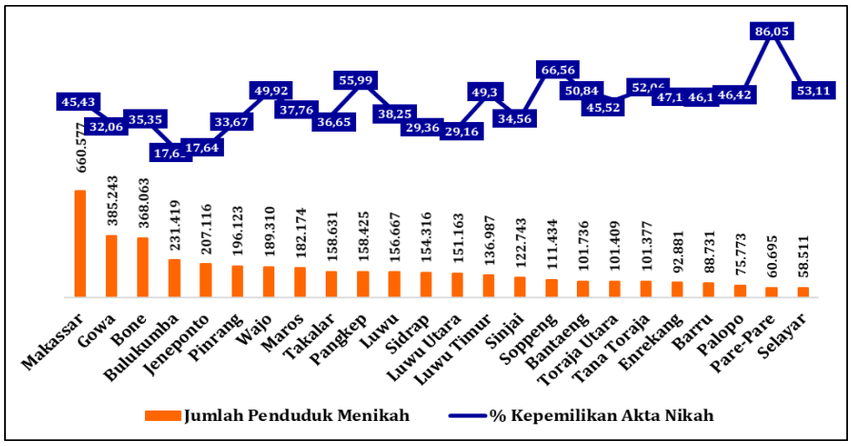

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Capaian tertinggi pasangan yang memiliki akta nikah di Kota Pare-Pare sebesar 86,05 persen dengan jumlah 52.228 jiwa dari total 60.695 jiwa yang telah menikah. Sedangkan yang terendah di Kabupaten Bulukumba sebesar 17,63 persen dengan jumlah 40.790 jiwa dari total 231.419 jiwa yang telah menikah. Sehingga masih terdapat 190.629 jiwa yang belum memiliki akta nikah di Kabupaten Bulukumba.

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Terkait dengan penerbitan akta kelahiran ini merupakan seluruh penduduk wajib memiliki Akta Kelahiran. Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri merupakan dasar untuk menentukan persentase penerbitan akta kelahiran. Capaian persentase penerbitan akta kelahiran tahun 2022 sebesar 104,39 persen. Berdasarkan DKB Semester II tahun 2022 target jumlah penduduk yang berusia 0-18 tahun di Sulawesi Selatan berjumlah 2.812.348 jiwa dan yang telah diterbitkan akta kelahirannya mencapai 2.935.831 jiwa. Capaian tertinggi di Kabupaten Bantaeng dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang diterbitkan akta kelahirannya sejumlah 66.773 jiwa dari target 57.727 jiwa penduduk usia 0-18 tahun. Sedangkan capaian terendah di Kota Palopo sebesar 88,29 persen atau sejumlah 51.576 jiwa penduduk usia 0-18 tahun yang diterbitkan akta kelahirannya dari target 58.420 jiwa penduduk usia 0-18 tahun. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 89.
Penerbitan Akta Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

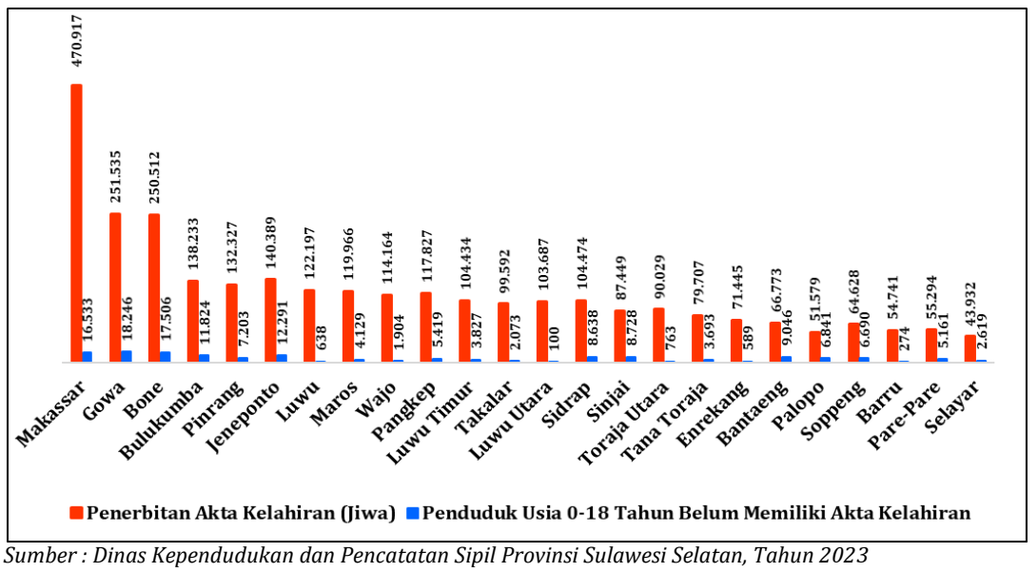

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Capaian indikator persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran tahun 2022 mencapai 96,51 persen. Berdasarkan DKB Semester II tahun 2021 jumlah penduduk yang berusia 0-17 Tahun di Sulawesi Selatan saat ini berjumlah 2.812.348 jiwa dan yang telah memiliki akte kelahiran mencapai 2.714.066 jiwa dengan persentase sebesar 96,51 persen. Capaian tertinggi penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Sinjai dengan capaian 99,96 persen atau sejumlah 78.689 jiwa yang memiliki akta kelahiran daan yang belum memiliki akta

kelahiran sebesar 32 jiwa. Sedangkan capaian terendah penduduk usia 0-17 tahun yang telah memiliki akta kelahiran di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang telah memiliki akta kelahiran sejumlah 35.835 jiwa dan yang belum memiliki akta kelahiran sebesar 5.478 jiwa.

Grafik II. 90.
Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

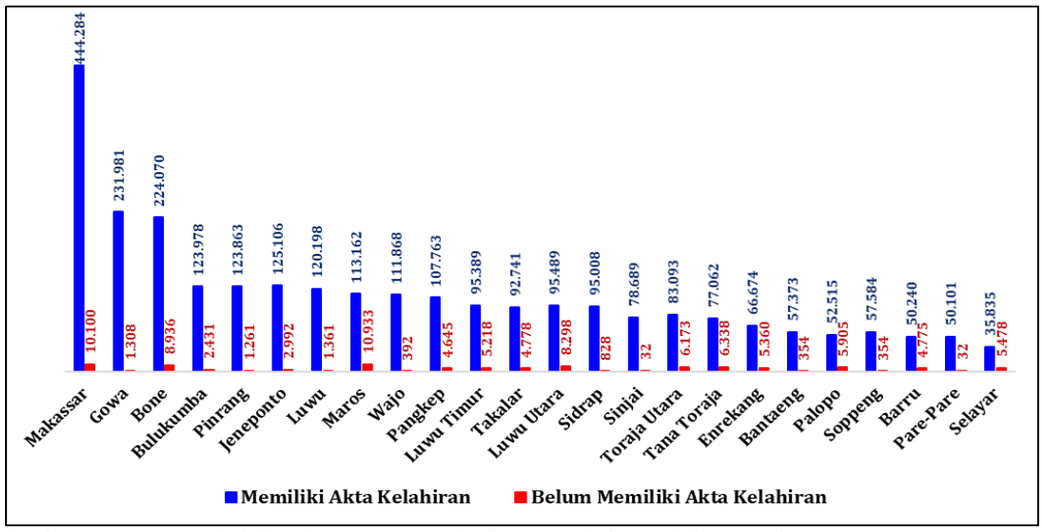

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Akta Kematian merupakan Akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan atas meninggalnya seseorang. Akta kematian memberikan memberikan manfaat bagi Ahli Waris diantaranya Penetapan status janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat menikah lagi, Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), baik bagi isteri atau suami maupun anak, Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya dan persyaratan untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi, Perbankan, Pensiun. Masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan masih menganggap tidak pentingnya akta kematian sehingga untuk perhitungan persentase akta kematian ini yaitu jumlah Akta Kematian yang diterbitkan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang melaporkan kematian keluarganya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dikalikan 100 persen.

Berdasarkan laporan keluarga penduduk yang meninggal ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2022 jumlah dokumen akta kematian yang diterbitkan sejumlah 252.186 dokumen dengan rincian jumlah laki-laki sebesar 140.994 dokumen dan jumlah perempuan sebesar 111.192 dokumen dengan jumlah akta kematian yang diterbitkan tertinggi di Kabupaten Wajo sebesar 19.404 dokumen dan yang terendah di Kabupaten Enrekang sejumlah 3.593 dokumen.

Grafik II. 91.
Akta Kematian yang Diterbitkan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

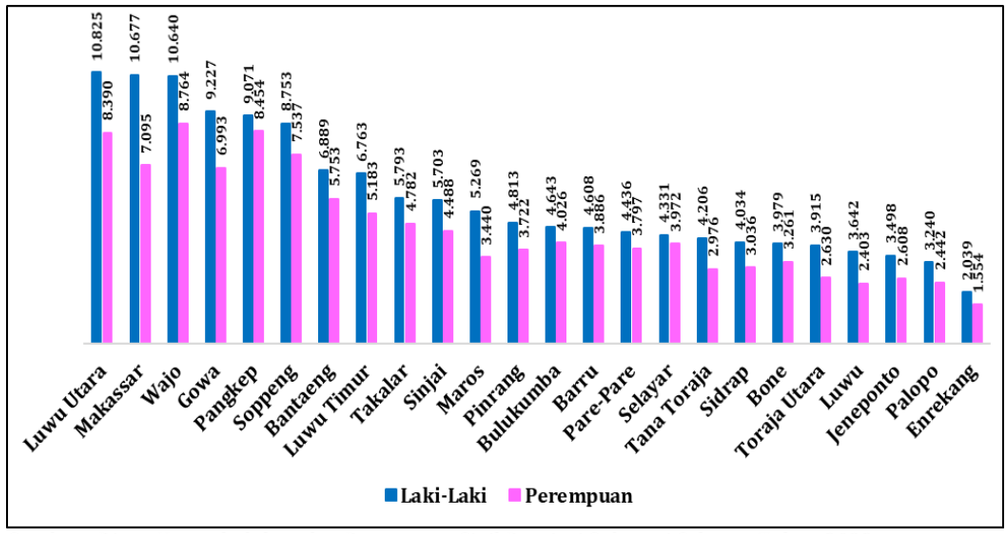

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pemanfaatan data kependudukan adalah pemanfaatan data dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui system informasi administrasi kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh menteri dalam negeri. Dalam impelementasi pemberian hak akses, menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan akses kedalam basis data melalui Data Warehouse (DWH) yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan melalui jaringan komuniksi data. Dalam implementasi pemanfaatan data kependudukan telah diatur terkait tatacara dan kewenangan pemberian hak akses data kependudukan yang mana kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan perjanjian kerjasama pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan kepada Dinas atau Lembaga Pengguna skala provinsi atau badan hukum yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pusat sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan data Kependudukan.

Tabel II.81.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bantaeng	200.457	201.115	201.688	201.960	206.194
2	Barru	180.509	182.373	187.392	189.877	191.895
3	Bone	869.301	809.441	812.719	813.211	814.106
4	Bulukumba	437.209	439.292	441.010	448.218	463.981
5	Enrekang	236.312	226.776	227.825	228.087	228.716
6	Gowa	755.235	759.872	763.387	768.868	787.917
7	Jeneponto	412.570	413.769	415.174	415.462	416.514
8	Kepulauan Selayar	138.420	139.470	140.077	140.322	140.881
9	Luwu	378.987	370.675	372.609	372.876	375.481
10	Luwu Timur	299.975	300.374	302.039	304.938	308.530
11	Luwu Utara	368.801	327.994	329.590	329.934	330.734

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
12	Maros	383.921	386.408	388.330	388.738	391.489
13	Pangkajene Kepulauan	362.364	350.208	351.877	352.229	353.098
14	Pinrang	401.858	405.671	407.236	408.109	411.392
15	Sidenreng Rappang	316.951	319.285	320.537	320.761	321.615
16	Sinjai	259.385	261.220	263.141	266.479	269.314
17	Soppeng	236.156	237.115	239.391	237.875	240.249
18	Takalar	290.450	293.732	301.765	311.949	319.716
19	Tana Toraja	285.687	287.245	288.202	270.597	263.914
20	Toraja Utara	245.490	247.157	252.200	255.140	257.539
21	Wajo	372.512	374.888	378.024	392.437	402.066
22	Makassar	1.659.777	1.480.480	1.487.256	1.463.089	1.464.401
23	Palopo	187.236	181.949	182.827	183.056	183.561
24	Pare-Pare	147.322	148.634	151.763	154.524	157.442
Sulawesi Selatan		**9.426.885**	**9.145.143**	**9.206.059**	**9.218.736**	**9.300.745**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan pada tahun 2021 dengan jumlah 70 responden diperoleh nilai IKM sebesar 83,37 mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan kategori BAIK.

Grafik II. 92.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

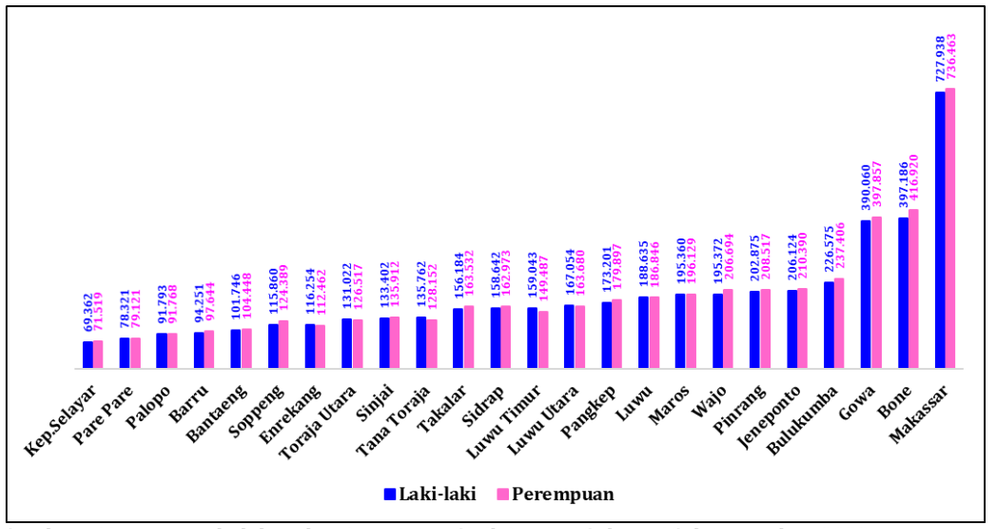

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Profil Kependudukan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No.65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, merupakan suatu upaya pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil dari pengelolaan informasi administrasi khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Profil Kependudukan diterbitkan berdasarkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) yang telah ditunggalkan dan dibersihkan oleh kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui penyajian profil kependudukan pemerintah berharap informasi terkait data kependudukan dapat diakses dan digunakan oleh semua pihak khususnya untuk mendukung perencanaan dan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik di provinsi Sulawesi Selatan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut

Tabel II.82.
Capaian Kineja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	%	87	94	94	96,43	99,42
Persentase penerbitan KTP	%	87	94	94	96,43	99,42
Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk	%	92,32	97,90	99,80	102,18	102,78
Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	16,47	40,14	54,29
Persentase Bayi ber akte kelahiran	%	87	92	94	96,89	97,47
Persentase Pasangan ber akte nikah	%	14	29	32	39,52	39,86
Persentase penerbitan akta kelahiran	%	38	43	46	49,52	104,39
Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	%	Belum dilakukan pengukuran	84,51	89,27	93,99	96,51
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	Belum dilakukan pengukuran	43,35	46,54	49,52	51,02
Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	%	Belum dilakukan pengukuran	100	100	100	100
Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	%	100	100	100	100	100
Persentase Penyajian Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian persentase cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik tahun 2021 sebesar 98,89 persen atau 2.230 desa dari 2.255 jumlah total desa. Faktor pendorong pencapaian target karena adanya dukungan dan sinergitas pemerintah baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten. Ketersediaan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja apparat desa dan fungsi

pelayanan kepada masyarakat. Tahun 2022 dilaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.

Diagram II.11.
Jumlah Desa Berdasarkan Status Desa
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

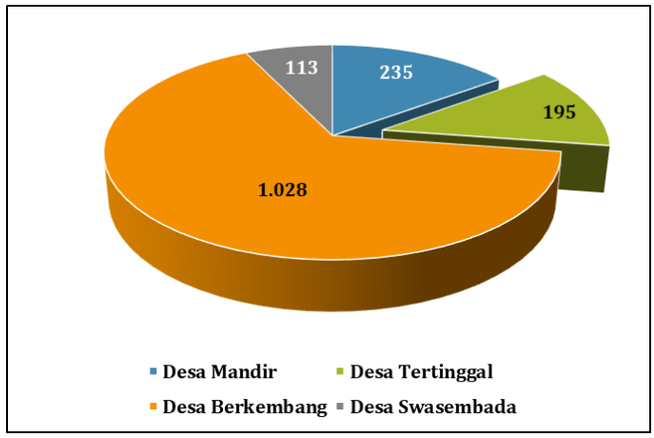

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Capaian persentase peningkatan status desa mandiri untuk tahun 2021 sebesar 4,96 persen atau 112 desa mandiri dari total 2.255 jumlah desa. Sedangkan tahun 2022 jumlah desa mandiri mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 123 desa dengan capaian 235 desa mandiri.

Capaian status desa mandiri tertinggi di Kabupaten Bone dengan peningkatan jumlah desa mandiri sebesar 23 desa. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 93.
Jumlah Desa Status "Desa Mandiri" Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

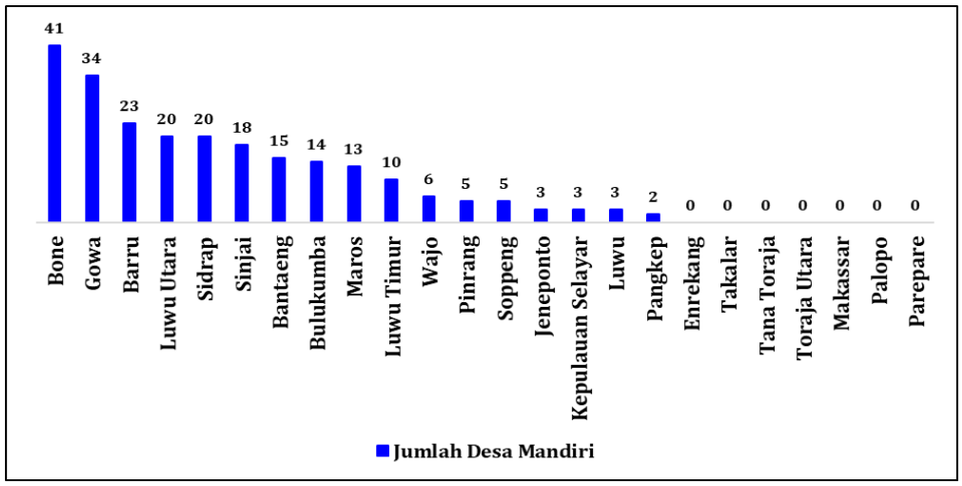

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Capaian target persentase pengentasan desa tertinggal pada tahun 2021 melampaui target dengan capaian 11,88 persen dimana target pada tahun 2021 sejumlah 450 desa tertinggal dari 2.255 desa sementara jumlah desa tertinggal pada tahun 2021 sejumlah 268 desa. Pada tahun 2022 dilaksanakan program penataan desa dalam rangka pengentasan desa tertinggal, dimana jumlah desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 73 desa dari tahun 2021 dengam

jumlah desa tertinggal sejumlah 195 desa. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 94.
Jumlah Desa Status "Desa Tertinggal" Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

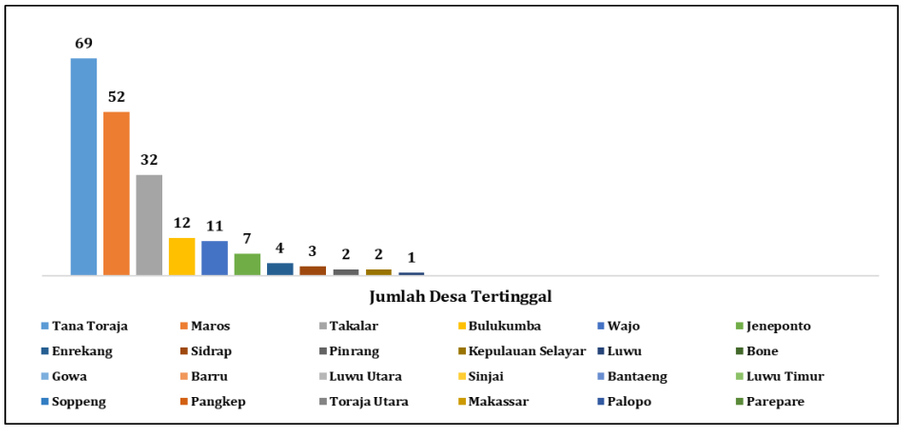

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Capaian persentase desa yang menjalin Kerjasama untuk tahun 2021 melampaui target dengan capaian 0,62 persen atau 14 kerjasama desa dan 47 kawasan perdesaan. Pada tahun 2022 melalui program peningkatan kerjasama Desa persentase desa yang menjalin kerjasama mengalami peningkatan dengan jumlah 98 Kerjasama Desa dan 50 Kawasan Perdesaan atau 4,3 persen. Sejumlah 3.344 PKK merupakan PKK aktif hingga tahun 2022 serta jumlah posyandu aktif sebesar 10.007 dari total 10.310 unit posyandu atau dengan capaian 97,06 persen. Keaktifan posyandu didukung dengan alokasi pendanaan dalam rangka pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 95.
Jumlah PKK dan Posyandu Aktif Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

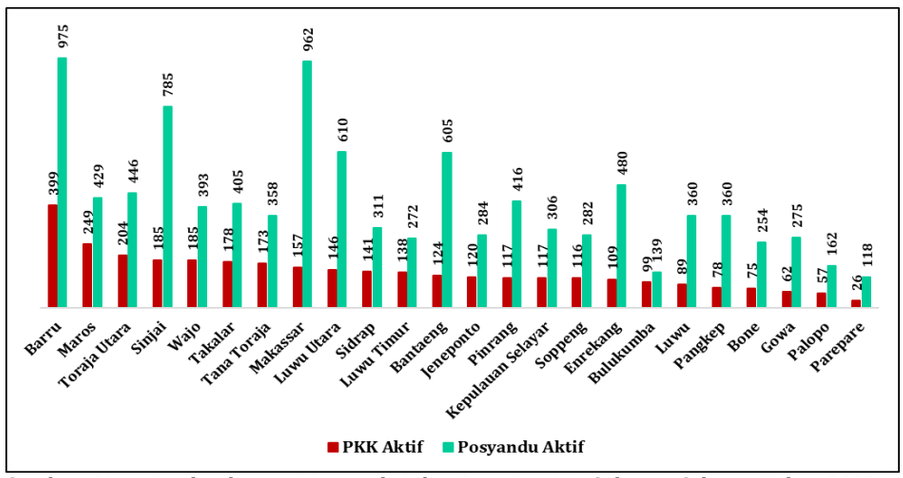

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Capaian persentase BUM Desa yang difasilitasi tahun 2021 sebesar 5,90 persen atau 90 BUMDes yang difasilitasi dari total 1.524 BUMDes. Tahun 2022 sejumlah 48 BUMDes yang difasilitasi atau 3,14 persen dengan jumlah BUMDes yang difasilitasi tertinggi di Kabupaten Bone sejumlah 4 BUMDes. Tahun 2021

capaian persentase desa yang difasilitasi sebesar 34,1 persen atau 769 desa yang difasilitasi dari 2.255 total jumlah desa. Pada tahun 2022 sejumlah 1.135 aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya melalui bimtek pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pelaksanaan profil desa dan kelurahan dan *capacity building* pengelolaan keuangan desa bagi kepala desa. Capaian persentase desa yang difasilitasi mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 47,5 persen dengan capaian 50,33 persen. Capaian persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya dalam hal ini adalah Kelompok Binaan LPM pada tahun 2021 sebesar 1,51 persen atau 46 kelompok dari 3,038 kelompok binaan LPM. Fasilitasi kelembagaan masyarakat dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) dan lembaga adat dengan capaian tahun 2022 sejumlah 44 Kelompok Binaan atau dengan capaian 1,44 persen.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.83.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	4,08	17,38	17,38	98,89	99,42
Persentase peningkatan status desa mandiri	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	4,96	5,45
Persentase pengentasan desa tertinggal	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	11,88	48,75
Persentase Desa yang menjalin kerjasama	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	0,62	4,3
Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
Persentase Posyandu Aktif	%	99,89	99,89	99,89	97,06	97,06
Persentase BUM Desa yang difasilitasi	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	5,9	3,14
Persentase Desa yang difasilitasi	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	34,1	50,33
Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	1,51	1,44

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari lima daerah penyangga nasional untuk pencapaian target TFR pada tahun 2020. Untuk pencapaian TFR tahun 2022 ini masih menggunakan data TFR tahun sebelumnya yakni 2,29 namun belum mencapai target TFR Nasional tahun

2022 sebesar 2,21. Untuk menurunkan TFR Sulawesi Selatan, maka Dinas PPPA Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk lebih optimal melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas. Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pembinaan ke kabupaten/kota untuk menyusun GDPK dalam rangka sinkronisasi kebijakan kependudukan di wilayah Sulawesi Selatan untuk mendukung penurunan TFR sesuai target nasional.

Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin, atau pasangan suami istri yang istrinya berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause. Kegiatan pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi telah dilaksanakan di piloting kampung KB Desa/Kelurahan yang telah disepakati oleh Kepala Daerah masing-masing kabupaten/kota. Pembinaan dilakukan kepada Kepala Desa beserta perwakilan aparatnya, penyuluh KB, petugas lapangan KB, kader kespro yang berasal dari bidan desa, kader PKK, kader tribina BKB, BKR, BKL dan UPPKS. Pada tahun 2022 pembinaan promosi dan konseling kespro dilaksanakan di 4 kabupaten/kota yaitu: a) Kampung KB Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang; b) Kampung KB Paggae Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Tmur, Kabupaten Bone; c) Kampung KB Desa Kaloling, Kecamatan Gantarengkeke, Kabupaten Bantaeng; d) Kampung KB Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

Grafik II. 96.
Total Fertility Rate (TFR) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

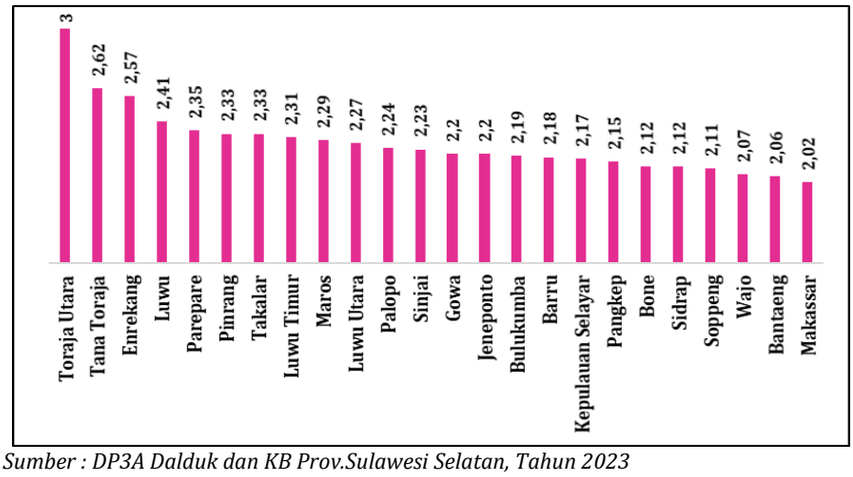

Sumber : DP3A Dalduk dan KB Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Indeks IBangga di Sulawesi Selatan diterapkan pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 16,7 persen atau sejumlah 4 kabupaten/kota dengan persentase IBangga yang cukup baik.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi

kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), unit peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan mengundang Pembina/Pengelola/ Kader/Calon Fasilitator Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS kabupaten/kota percontohan dengan jumlah peserta 40 orang yang terdiri dari Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Gowa. Kegiatan lainnya yaitu Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK, dengan sasaran pembina/pengelola/kader pendamping keluarga dalam penyiapan pengasuhan 1000 HPK kabupaten/kota dengan jumlah peserta 24 orang dari Kabupaten Bantaeng, Bone, Pinrang, Kepulauan Selayar dan Kota Makassar.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.84.
Capaian Indikator Kinerja Program
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	20,83	20,83
Persentase PUS peserta KB Aktif	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	71,86	70,02	61,23
Persentase kab/kota yang meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	48,13	53,92	89,05

Sumber : DP3A Dalduk dan KB Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.9. Perhubungan

Program Buy The Service (BTS) Teman Bus yang merupakan program *pull strategy* pemerintah Pusat sejak akhir tahun 2021 untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum, memberikan kenyamanan bertransportasi serta memperluas jaringan ke berbagai tujuan di wilayah Mamminasata. Program ini berupa pembelian layanan operator swasta oleh Kementerian Perhubungan agar masyarakat tertarik menggunakan transportasi umum untuk berbagai tujuan. Program ini mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pengguna transportasi perkotaan. Capaian persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan tahun 2019 hingga 2022 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 dengan capaian 72 persen saat program BTS ini dikenalkan.

Capaian persentase layanan angkutan darat tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian 97 persen. Jumlah

angkutan umum darat (termasuk penyeberangan) tidak mampu menampung jumlah penumpang, khususnya pada musim mudik seperti saat hari raya. Jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2022 dengan pertumbuhan arus penumpang tertinggi pada tahun 2022 selama priode 2018 hingga 2020 dengan capaian sebesar 14 juta jiwa. Peningkatan ini dikarenakan terlayaninya 17 trayek AKDP yang menghubungkan wilayah di Sulawesi Selatan, semakin membaiknya kondisi pandemi Covid-19, meningkatnya mobilitas masyarakat setelah dilonggarkannya persyaratan perjalanan dengan menggunakan angkutan darat serta perbaikan layanan angkutan umum terutama angkutan perkotaan. Arus penumpang diproyeksikan akan terus meningkat mengingat semakin terkendalinya kondisi pandemi, membaiknya perekonomian, tingginya mobilitas masyarakat dan upaya pemerintah untuk memperbaiki layanan pengguna jasa perhubungan. Gambaran peningkatan arus penumpang angkutan umum disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 97.
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

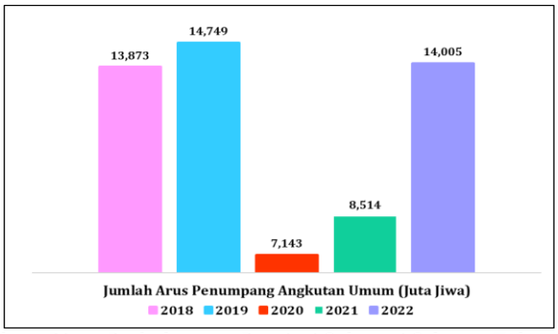

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Peningkatan arus penumpang angkutan darat mengalami berbagai kendala diantaranya kurangnya pengawasan terhadap angkutan umum berplat hitam, merebaknya terminal liar dan penurunan fungsi terminal angkutan darat. Fungsi terminal sebagaimana disebutkan dalam Permenhub No 132 Tahun 2015 bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan yang satu ke moda atau kendaraan yang lain, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi (pelataran parkir, ruang tunggu, papan informasi, toilet, toko, loket) serta fasilitas parkir bagi kendaraan pribadi atau kendaraan penumpang. Namun demikian fasilitas penunjang terminal tersebut belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Meskipun dengan kondisi tersebut jumlah penumpang melalui terminal Tipe B pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,3 persen dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 500.981 orang.

Diagram II.12.
Jumlah Penumpang Angkutan Laut, Udara, dan Darat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

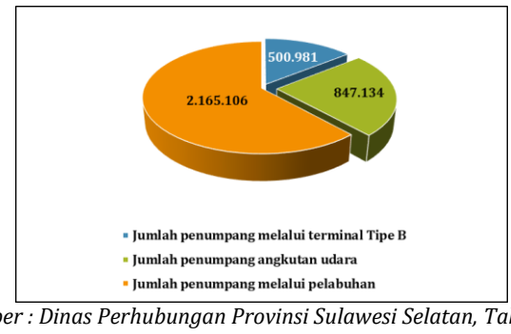

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pemeliharaan prasarana keselamatan jalan secara berkala adalah hal yang sangat penting untuk memastikan prasarana tersebut berfungsi secara optimal. Berdasarkan peraturan menteri perhubungan No 13 tahun 2014 tentang rambu lalu lintas pasal 68 (2) menyebutkan bahwa umur teknis rambu lalu lintas paling lama 5 tahun, namun umur teknis dapat berkurang karena beberapa faktor seperti kotor, miring, rusak, atau tertutup obyek lain. Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 3,07 persen. Cakupan fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik tersebut mendukung penurunan kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 sejumlah 2.550 kejadian kecelakaan. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu sejumlah 6.762 kejadian. Jumlah pengadaan rambu dan fasilitas keselamatan lainnya pada tahun 2022 terdiri dari Deliniator/Patok Tikungan Pipa Plastik sejumlah 295 buah di Kabupaten Bone, Marka Jalan sepanjang 4.950 meter dan Rambu-rambu lalu lintas darat di kawasan Mamminasata. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas pada 45 ruas jalan provinsi yang merupakan implementasi atas PHJD (Program Hibah Jalan Daerah) melaui kegiatan survei lalu lintas adalah untuk mendapatkan jumlah lalu lintas harian yang mewakili jumlah lalu lintas tahunan rata-rata atau *Average Annual Daily Traffic* (AADT) untuk memetakan kepadatan lalu lintas di lokasi tersebut. Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi tahun 2018 hingga 2022 tidak mengalami perubahan sejumlah 15 ruas.

Kategori terminal yang tertuang dalam PM 132 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal angkutan jalan adalah Terminal tipe A, Terminal tipe B dan Terminal Tipe C. Terminal Tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi sesuai UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan. Jumlah Terminal tipe B yang terkelola belum sesuai dengan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan no 1755/VIII/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe B di Provinsi Sulawesi Selatan; yang menetapkan 16 lokasi terminal di seluruh Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan terkendalanya penyerahan aset terminal Tipe B dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah Provinsi. Terdapat 7 lokasi Terminal Tipe B yang telah diserahterimakan, sejumlah 4 unit diantaranya telah terkelola yakni Terminal Cappabungaya Kabupaten Gowa, Terminal Sasayya Kabupaten Bantaeng, Terminal Paletteang Kabupaten Pinrang dan Terminal Lawawoi Kabupaten Sidrap. Agar terminal dapat terus melaksanakan fungsinya secara optimal pada tahun 2022 dilaksanakan

rehabilitasi dan pemeliharaan terminal meliputi terminal Cappabungaya di Kabupaten Gowa, terminal Lawowoi di Kabupaten Sidrap, dan terminal Sasayya di Kabupaten Bantaeng.

Meskipun sempat mengalami penurunan saat pemberlakuan pembatasan mobilitas akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021, namun jumlah arus penumpang melalui pelabuhan menunjukkan peningkatan di tahun 2022, bahkan melampaui arus penumpang di tahun 2017 dan 2018. Sementara itu pengelolaan pelabuhan pengumpan regional dan penyeberangan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan terus dioptimalkan. Terdapat 2 pelabuhan penyeberangan yang dikelola dan 9 (sembilan) pelabuhan pengumpan regional yang telah diserahkan Personil, Pembiayaan, sarana Prasarana dan Dokumen (P3D) di 2023 dan sementara berproses penandatanganan BASTnya. Kesebelas (11) pelabuhan inilah yang menjadi pelabuhan strategis di Sulawesi Selatan. Dari 11 pelabuhan strategis tersebut pada tahun 2018-2020, 10 persen diataranya telah dikelola yaitu Pelabuhan penyeberangan Bira dan pada tahun 2021-2022 meningkat 18 persen dengan dikelolanya Pelabuhan Pattumbukan. Pada tahun 2022 dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional dilaksanakan kegiatan pembangunan ruang tunggu pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Selayar, kajian teknis alur pelayaran Bira di Kabupaten Bulukumba, dan kajian teknis alur pelayaran Pattumbukang di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyelesaian Standar Pelayanan Minimal kepelabuhanan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang penyelenggaraan pelabuhan Pengumpan. Capaian persentase penyelesaian pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan 100 persen. Faktor pendorong pencapaian target terkait sarana dan prasarana perhubungan yang bersifat teknis SOP pelaksanaan pengadaan dan persyaratan teknisnya telah diatur dalam peraturan menteri perhubungan serta diturunkan dalam peraturan jenderal terkait.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan perhubungan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut

Tabel II.85.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	19	10	11,5	41	72
Persentase Layanan Angkutan Darat	%	80	87	90	94	97
Jumlah penumpang melalui terminal Type B per tahun	Orang	1.001.151	829.122	580.872	499.277	500.981
Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	%	5,33	5,16	5,03	3,05	3,07

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	Ruas	12	15	15	15	15
Jumlah Terminal Bis terkelola (Terminal type B)	Terminal	2	4	5	7	7
Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan	Orang	1.768.413	1.686.838	658.933	1.355.919	2.165.106
Jumlah pelabuhan strategis provinsi (pelabuhan pengumpan regional dan penyeberangan)	Lokasi	11	11	11	11	11
Persentase pelabuhan yang beroperasi (pengumpan regional)	%	10	10	10	18	18
Persentase penyelesaian pedoman standar pelayanan Sarana dan prasarana transportasi	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelaksanaan PPID setiap badan publik, maka PPID utama melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan informasi public PPID pada OPD lingkup pemerintah provinsi dengan tujuan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada PPID pelaksana terkait urgensi keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PPID melalui kegiatan pembinaan cluster tahun 2021 yaitu dari sejumlah 53 perangkat daerah yang wajib melakukan pengelolaan pelaksanaan PPID untuk memberi pelayanan informasi kepada pemohon informasi, sejumlah 28 persen yang telah memiliki sarana secara umum dan 57 persen secara administrasi dimana 17 perangkat daerah memiliki ruangan PPID serta 30 perangkat daerah memiliki SK PPID. Pada tahun 2022 jumlah OPD yang melapor ke PPID sejumlah 55 OPD mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan tingkat pelaporan ke PPID sebesar 65 persen. Jumlah sengketa informasi yang diselesaikan pada tahun 2022 sebesar 24 sengketa. Sedangkan jumlah layanan informasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang terdiri dari Konten sejumlah 766, Berita (Media Cetak dan Online) sejumlah 875, Advetorial sejumlah 266.

Pada Tahun 2021 sebanyak 86 aduan dan secara keseluruhan telah ditindaklanjuti dengan disampaikan kepada OPD terkait dan dimonitoring secara berkala. Jumlah aspirasi terdiri dari jumlah aduan masyarakat pada aplikasi baruga aduan masyarkat dan aplikasi lapor spam yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Rendahnya jumlah aspirasi atau terkait pengaduan masyarakat pada SP4N LAPOR! disebabkan adanya aplikasi serupa fungsinya yang dikelola oleh pihak Kab/Kota bahkan OPD baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan masih rendahnya sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Pada tahun 2022 penggunaan Baruga dihentikan dan dialihkan ke SP4N LAPOR!

berdasarkan arahan dari Pemerintah Pusat. Layanan Pengaduan Masyarakat difokuskan kepada satu jenis kanal saja yaitu SP4N LAPOR!. Sejumlah 64 laporan yang masuk ke SP4N LAPOR!, dari 64 laporan sebanyak 59 laporan berhasil ditindaklanjuti.

Capaian indikator Kinerja Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021 sebesar 2,05 atau kategori Cukup. Nilai SPBE dengan target sebelumnya tidak terpenuhi disebabkan oleh: a) Bertambahnya indikator penilaian SPBE sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator berdasarkan Permenpan RB No 59 Tahun 2020; b) Provinsi Sulsel masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait arsitektur SPBE; c) Provinsi Sulsel masih belum memiliki perencanaan strategis yang mengatur terkait SPBE; d) Provinsi Sulsel masih belum memiliki tata kelola yang mengatur terkait pada pembangunan aplikasi SPBE, layanan jaringan intra dan penggunaan system penghubung layanan dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan. Tahun 2022 capaian Indeks SPBE mencapai 2,35 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE, dimana: 1) Arsitektur SPBE Provinsi Sulawesi Selatan rampung pada Bulan Desember 2022, sedangkan penilaian indeks SPBE pada Bulan Mei/Juni 2022; 2) Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2022 tentang SPBE terbit pada Bulan Desember 2022 sedangkan penilaian Indeks SPBE pada Bulan Mei/Juni 2022; 3) Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko terbit pada Bulan Juli 2022 sedangkan penilaian Indeks SPBE pada Bulan Mei/Juni 2022; 4) Peraturan Gubernur SMKI sampai saat ini masih dalam bentuk draft.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan komunikasi dan informatika tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.86.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	%	50	60	70	80	90
Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	%	100	100	100	100	100
Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks	Belum dilakukan pengukuran	2,66	3,08	2,05	2,35

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prov.Sulsel, Tahun 2023

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Untuk melindungi masyarakat pelaku usaha pada akses permodalan salah satunya adalah mendorong dan memfasilitasi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi di Sulawesi Selatan untuk lebih akuntable dengan cara fasilitasi KSP/USP Koperasi tersebut dalam legalitas usaha simpan pinjam. Merupakan kewajiban seluruh KSP/USP Koperasi memiliki izin usaha simpan pinjam tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 11 tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam di berikan kepada Koperasi yang bergerak pada sektor simpan pinjam, hingga tahun 2022 terdapat 12 persen Koperasi dan UKM yang memiliki izin usaha simpan pinjam.

Hingga tahun 2022 jumlah koperasi aktif sebesar 4.898 unit mengalami peningkatan dari tahun 2021. Sedangkan jumlah koperasi tidak aktif sebesar 4.338 unit juga mengalami peningkatan dari tahun 2021. Sejumlah 20 persen koperasi aktif primer provinsi diberikan infomasi/sosialisasi terkait peraturan dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terupdate informasi dan peraturan yang berlaku saat ini. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 98.
Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

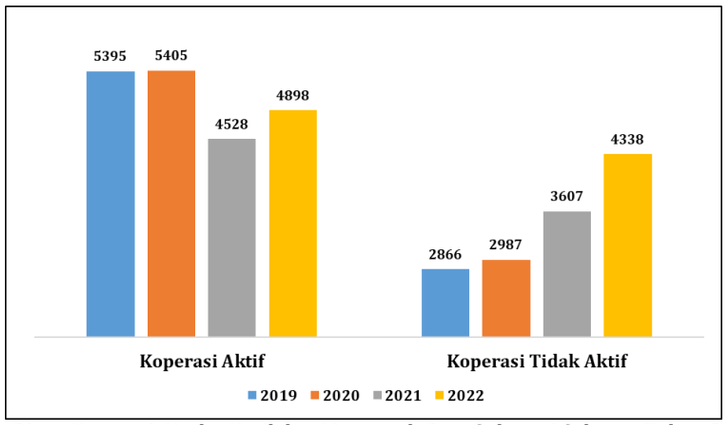

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2023

Grafik II. 99.
Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

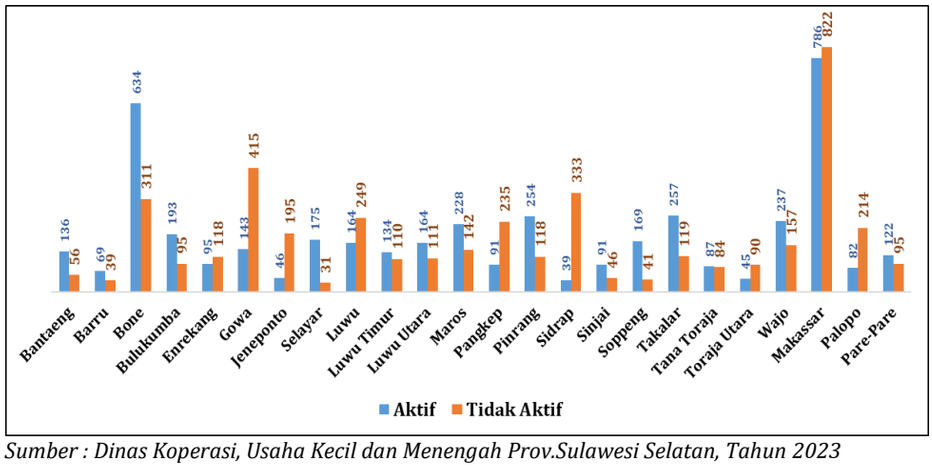

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Sertifikat penilaian kesehatan koperasi menjadi syarat wajib pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas dilakukan minimal setahun sekali. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi setiap tahunnya dilakukan bersamaan dengan pengawasan dan pemeriksaan koperasi namun penilaian kesehatan koperasi hanya dilakukan kepada koperasi yang teah melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Tahun 2022 dilakukan penilaian pada koperasi/KSP dengan berkriteria sehat, dalam hal ini dilanjutkan dengan pemberian sertfikat koperasi berkriteria sehat dan cukup sehat hal ini juga merupakan catatan dari tingkat keaktifan pengurusan dan pembina dalam melakukan pemantauan pada kelembagaan koperasi dengan capaian persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT sebesar 20 persen atau sejumlah 244 unit KSP/USP Koperasi dengan kriteria sehat. Koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan manajer koperasi, dan juga pada koperasi baru sehingga koperasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Grafik II. 100.
Jumlah UMKM yang Difasilitasi Perizinan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

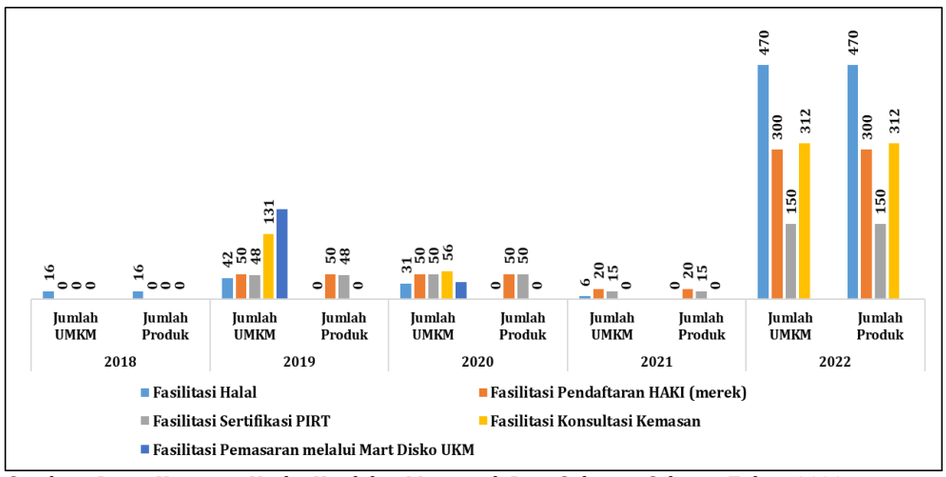

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi pemberdayaan usaha, permodalan dan sertfikasi SKKNI diberikan sehingga dapat meningkatkan kompetensi koperasi dan pengurus Koperasi. Tahun 2022 sejumlah 105.072 usaha kecil yang diberikan pelatihan dan pendidikan hal ini sesuai dengan kewenangan para pelaku usaha kecil. Sejumlah 15.411 unit usaha yang diberikan pendampingan kelembagaan usaha, UKM terstadarisasi sertifikasi usaha, dan usaha yang bermitra diberikan pada koperasi dengan kriteria usaha kecil.

Cakupan promosi produk UMKM dalam dukungan pemasaran dan promosi untuk terlibat dapat pameran promosi produk UMKM unggulan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3 persen pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Jumlah promosi produk UMKM sebesar 77.052 unit pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sejumlah 38.570 unit.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.87.
Capaian Indikator Kinerja Program
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	%	5	9	10	39	12
Persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	%	5	9	10	36	10
Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	15	20	20	30	20
Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhannya terhadap peraturan perundang undangan	%	5	20	20	20	20
Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT	%	15	20	15	35	20
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi	%	15	20	20	20	20
Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	%	4	7	7	31	20
Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	%	4	7	5	30	10
Cakupan UMKM yang diberdayakan	%	1	2	4	15	10
Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha	%	4	7	5	30	11
Cakupan promosi produk UMKM	%	0,1	0,3	0,2	1,7	3

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.12. Penanaman Modal dan Investasi

Pengelolaan potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yakni pada tahun 2019 sebesar 40 persen, naik pada tahun berikutnya sebesar 60 persen dan pada tahun 2021 naik menjadi 75 persen. Rendahnya potensi investasi yang dimanfaatkan oleh calon investor pada tahun 2019 dan 2020 disebabkan karena belum tersedianya data dan informasi yang memadai dan masih banyaknya data potensi daerah yang belum diperbaharui. Adapun kenaikan pemanfaatan potensi investasi pada tahun 2021 merupakan hasil dari

pemanfaatan teknologi informasi dalam menyebarluaskan potensi dan peluang investasi daerah serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha daerah untuk membangun kemitraan dengan investor besar. Tahun 2022 pengelolaan potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor mencapai 60 persen akibat adanya penyempurnaan dari pemanfaatan teknologi dan sistem pengelolaan investasi yang lebih baik.

Grafik II. 101.
Jumlah Investor/Proyek Berskala Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

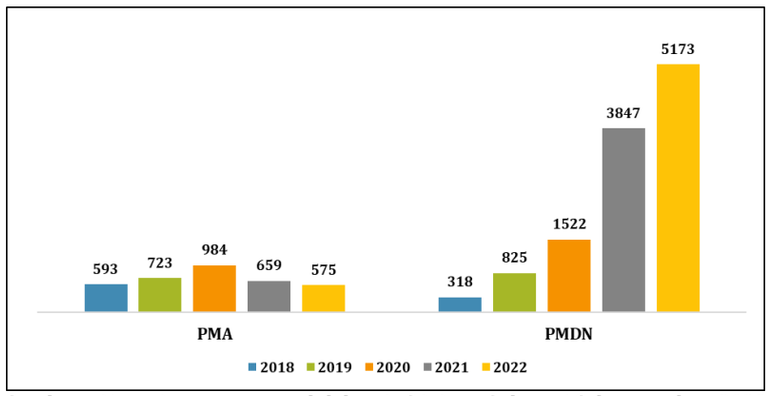

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023

Capaian realisasi investasi sektor PMA yang diraih pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuasi dimana tren peningkatan mulai tahun 2020 hingga 2022 dengan capaian Rp. 6,73 triliun pada tahun 2022. Jumlah realisasi PMDN berdasarkan rilis dari Kementrian Investasi/BKPM tahun 2022 Capaian realisasi investasi sektor PMDN mengalami tren peningkatan mulai tahun 2018 hingga 2021 dengan rata-rata peningkatan sebesar 55,47 persen. Tahun 2022 jumlah realisasi PMDN mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar -37,6 persen dengan capaian 7,53 triliun.

Grafik II. 102.
Realisasi PMA dan PMDN
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

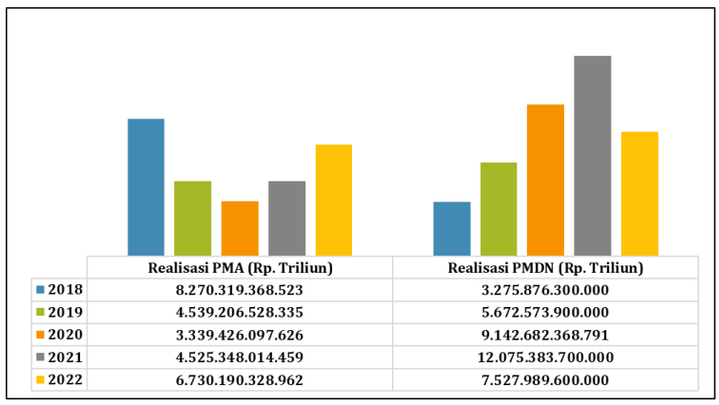

	Realisasi PMA (Rp. Triliun)	Realisasi PMDN (Rp. Triliun)
2018	8.270.319.368.523	3.275.876.300.000
2019	4.539.206.528.335	5.672.573.900.000
2020	3.339.426.097.626	9.142.682.368.791
2021	4.525.348.014.459	12.075.383.700.000
2022	6.730.190.328.962	7.527.989.600.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023

Capaian ketepatan waktu penyelesaian dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2022 persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perizinan dan

non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP belum mencapai target dengan capaian 80 persen. Beberapa dokumen yang penyelesaiannya belum tepat waktu diakibatkan oleh pertimbangan teknis yang kadang terlambat dikeluarkan oleh OPD teknis, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi waktu penyelesaian dokumen perizinan. Jumlah izin yang diterbitkan pada tahun 2018 hingga 2022 sebesar 139.428 izin. Pada tahun 2022 jumlah izin yang diterbitkan sebesar 30.691 izin. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk institusi pelayanan perizinan tahun 2022 sebesar 82,81 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -0,94 persen.

Grafik II. 103.
Jumlah Perizinan yang Diterbitkan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

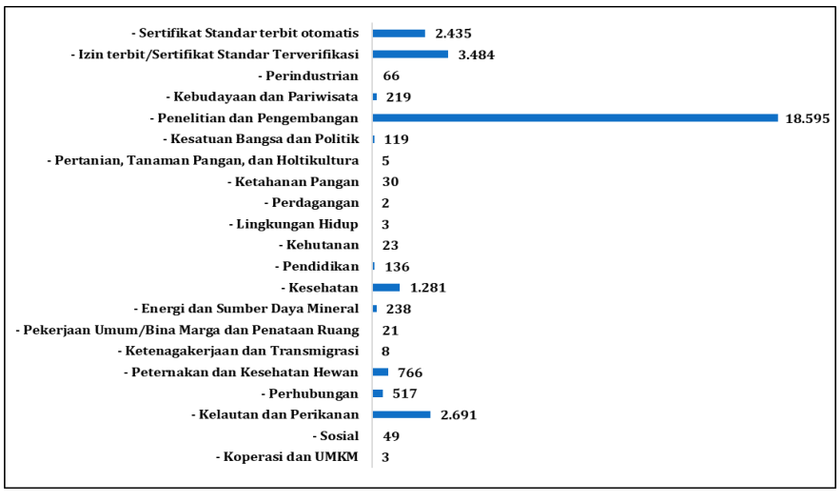

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023

Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah kurang lebih sebesar 15.700 perusahaan. Dari keseluruhan perusahaan tersebut persentase ketaatan perusahaan PMA dan PMDN pada peraturan penanaman modal pada tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren peningkatan mencapai 55 persen atau 2.001 perusahaan pada tahun 2022. Masih rendahnya ketaatan perusahaan dalam hal ini mengirimkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) diakibatkan oleh pemberlakuan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana salah satunya adalah perubahan pada pelaporan sistem manual menjadi pelaporan online. Hal ini belum banyak diketahui oleh para pelaku usaha, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada pelaku usaha.

Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal pada tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren peningkatan mencapai 85 persen pada tahun 2022. Pencapaian ini didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola data dan informasi pendukung penanaman modal serta meningkatnya koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten dan kota serta pelaku usaha melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan secara rutin.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan penanaman modal dan investasi tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.88.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penanaman Modal dan Investasi Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2018–2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor	%	Belum dilakukan pengukuran	40	60	75	85
Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	8,3	4,54	3,39	4,52	6,73
Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	3,27	5,67	9,14	12,07	7,52
Persentase Ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai SOP	%	Belum dilakukan pengukuran	76	78	78	80
Persentase Perusahaan yang taat terhadap ketentuan peraturan penanaman modal	%	Belum dilakukan pengukuran	40	45	50	55
Persentase Ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	%	Belum dilakukan pengukuran	65	70	80	85

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Capaian indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri didukung oleh kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan kewenangan provinsi. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dengan capaian 0,24 persen pada tahun 2022 dimana jumlah pemuda yang berwirausaha sebanyak 5.531 orang dari sejumlah 2.284.971 pemuda di Sulawesi Selatan.

Peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa sangat ditentukan pada pembinaan pemuda saat ini. Jumlah pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial tahun 2022 sebesar 96.726 orang. Pembinaan pemuda dilakukan dengan melibatkan pemuda yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam pembangunan. Capaian indikator tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial didukung melalui kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat provinsi dimana capaian tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami tren peningkatan, namun pada tahun 2022 tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial sebesar 3,81 persen mengalami penurunan dari tahun 2021 karena kurangnya kegiatan kepemudaan yang diinisiasi oleh organisasi pemuda secara mandiri. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, disiplin, dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa. Pembinaan organisasi

pramuka di Sulawesi Selatan dilakukan melalui program pengembangan kapsitas kepramukaan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. Organisasi gerakan Pramuka telah terbentuk dan aktif mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Capaian indikator organisasi pramuka yang aktif sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian 100 persen. Jumlah organisasi pramuka aktif tahun 2022 sejumlah 25 organisasi.

Grafik II. 104.
Jumlah Gedung Olahraga Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

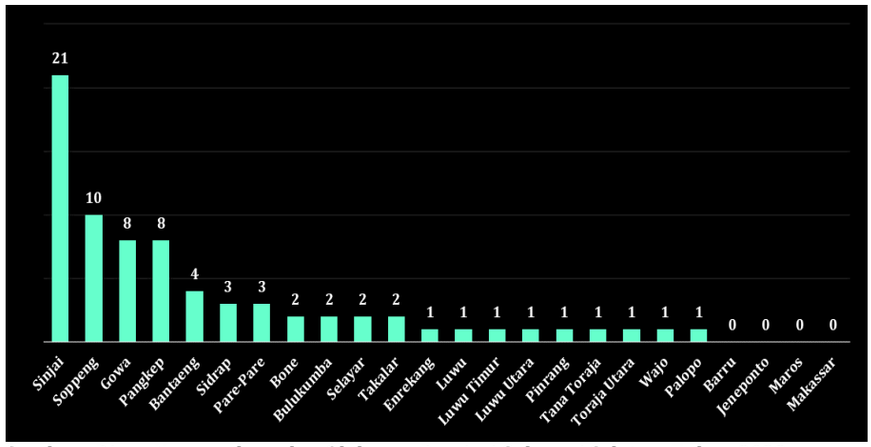

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Ketersediaan sarana prasarana olahraga sangat penting untuk menunjang peningkatan prestasi olahraga. Penyusunan Detail Enggenering Design (DED) kapasitas 40 ribu penonton telah diselesaikan pada tahun 2021 dan diikuti dengan penyelesaian Additional Desain Kapasitas 20 ribu penonton pada tahun 2022.

Grafik II. 105.
Jumlah Atlet Berprestasi dan Prestasi Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

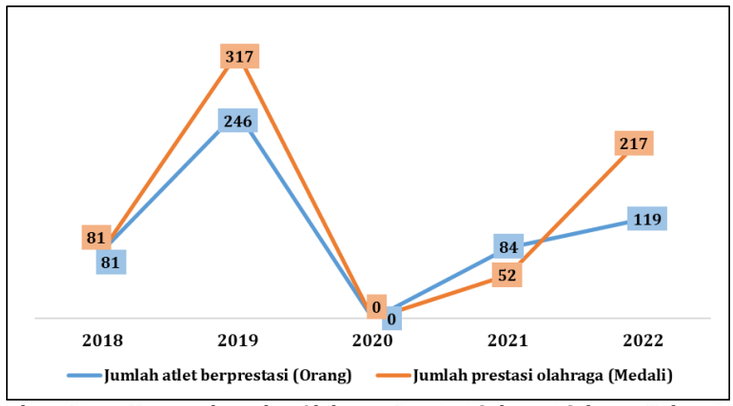

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pembinaan cabang olah raga prestasi pada tahun 2019 hingga 2021 menjadi bagian dari binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sebelumnya dikelola oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Pencapaian prestasi cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga berfluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022. Perolehan medali pada tahun 2018

sebanyak 81 medali, tahun 2019 memperoleh 317 medali, perolehan ini mengalami peningkatan yang signifikan karena kegiatan Pra PON menjadi bagian dari tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kualitas pelatih dan intensitas latihan bagi para atlet dibutuhkan untuk meningkatkan pencapaian target prestasi olahraga kedepan. Namun persentase peningkatan prestasi olahraga mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan tidak adanya penyelenggaraan event olahraga, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan perolehan 52 medali. Pada tahun 2022 peningkatan prestasi olahraga kembali mengalami peningkatan dengan capaian 3,17 persen atau sejumlah 217 medali diperoleh pada tahun 2022.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.89.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,07	0,16	0,21	0,21	0,24
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	%	1,06	1,09	2,33	4,23	3,81
Persentase Peningkatan Prestasi olah raga	%	4,1	2,9	-1	-0,84	3,17
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	0	10	15	30	30
Persentase organisasi pramuka aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.14. Statistik

Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dengan capaian sebesar 80 persen pada tahun 2022 berdasarkan jumlah data statistik sektoral yang terkumpul dari total kebutuhan data. Masih ada sebagian OPD yang belum memahami cara menyusun data statistik sektoral sesuai prinsip SDI.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan statistik tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.90.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	30	35	40	50	80

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Prov.Sulsel, Tahun 2023

2.3.2.15. Persandian

Persentase komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian merupakan jumlah pengguna tanda tangan elektronik dari jumlah pengguna layanan jaring komunikasi sandi. Pada tahun 2022 sebanyak 32 perangkat daerah dari 46 Perangkat Daerah atau sebesar 69,57 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021. Peningkatan didukung oleh meningkatnya kebutuhan terhadap layanan persandian yang terdiri dari layanan jaring komunikasi sandi dan pemanfaatan tanda tangan elektronik melalui aplikasi persuratan. Selain itu didukung dengan berjalannya sistem layanan keamanan informasi dan dukungan peningkatan peralatan dan kompetensi SDM pengelola keamanan siber dan SPBE serta pelatihan CSIRT. Selain itu di tahun 2022 juga bidang telah melakukan assesment terhadap sistem informasi milik pemerintah melalui kegiatan Vulnerability Assesement dan Penilaian Indeks Keamanan Informasi. Adapun kendala yang dihadapi karena masih minimnya jumlah SDM yang berkompeten dan masih minimnya peralatan dan tools/sistem yang mendukung operasional sistem monitoring keamanan jaringan dan aplikasi serta masih belum diterbitkannya regulasi terkait sistem manajemen keamanan informasi lingkup pemerintah provinsi.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan persandian tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.91.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Persandian
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian	%	25	30	35	50	69,57

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Prov.Sulsel, Tahun 2023

2.3.2.16. Kebudayaan

Pada tahun 2021 jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi dari 12 Karya Budaya yang diusulkan sejumlah 11 Karya Budaya dari 6 Kabupaten di Sulawesi Selatan yang berhasil ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Tahun 2022 jumlah karya budaya hanya terdapat 2 karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi dari 7 karya budaya yang ditargetkan untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Belum tercapainya target yang ditetapkan disebabkan oleh banyaknya usulan karya budaya oleh pemerintah kabupaten/kota yang dinilai belum memenuhi syarat dalam penetapan WBTB oleh Kementerian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Capaian persentase lembaga sejarah yang difasilitasi pada tahun 2022 sebesar 3,89 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021 serta mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa lembaga di

kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan daerah terkait dengan perlindungan sejarah/adat.

Tahun 2021 capaian indikator persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dari target 5 Cagar Budaya yang ditargetkan untuk dilesatarikan mencapai 6 Cagar budaya yang dilestarikan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung melalui kegiatan Pembuatan Galeri Museum La Pawawoi Karaeng Sigeri Kabupaten Bone dan Perbaikan Ringan Rumah Adat Saoraja Bilokka Kabupaten Sidrap, Perbaikan Rumah Adat Bugis, Perbaikan Rumah Adat Mandar, Pemeliharaan Museum Karaeng Pattingalloang, dan Pemeliharaan Baruga Benteng Somba Opu. Tahun 2022 hanya terdapat 3 cagar budaya yang dilestarikan dari 8 cagar budaya yang ditargetkan untuk dilakukan pelestarian. Hal ini disebabkan masih banyaknya cagar budaya di kabupaten/kota yang belum ditetapkan atau menjadi cagar budaya skala/peringkat provinsi, walaupun telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 10 kali, dimana pada tahun sebelumnya tidak ada penyelenggaraan festival seni dan budaya. Jumlah lembaga sanggar kesenian pada tahun 2022 belum ada peningkatan dari tahun sebelumnya dengan jumlah 468 lembaga. Capaian persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan pada tahun 2022 sebesar 7,5 persen melalui pelibatan beberapa sanggar seni pada beberapa kegiatan-kegiatan seni budaya sebagai bentuk pembinaan sanggar kesenian.

Tahun 2021 capaian indikator persentase kunjungan ke museum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan ke sekolah-sekolah (SD dan SMP) melalui kegiatan Museum Masuk Sekolah/Belajar Bersama di Museum, selain itu beberapa kegiatan pameran yang menarik minat masyarakat berkunjung ke museum. Tahun 2022 sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Selatan akibat adanya pelonggaran penerbangan dalam negeri dan obyek-obyek wisata dibuka kembali serta pencabutan status PPKM, juga mempengaruhi jumlah kunjungan di museum provinsi.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan kebudayaan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.92.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	1,9	0,34
Persentase Sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	7,5

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Lembaga sejarah yang difasilitasi	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	2,2	3,89
Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	0,57	0,29
Persentase Kunjungan ke musium	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	615,99

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.17. Perpustakaan

Capaian Jumlah pengunjung Perpustakaan baik elektronik dan konvensional pada tahun 2021 sejumlah 154.913 yang merupakan pengunjung dengan jenis kelamin Perempuan dan Laki-laki sesuai dengan Rekap data statsistik triwulan pada Unit Pelayanan terpadu Perpustakaan Umum di 4 Gedung layanan Perpustakaan yang ada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah ini merupakan perhitungan data dari layanan perpustakaan umum dan juga layanan perpustakaan elektronik yang menjadi solusi pemenuhan kebutuhan pemustaka yang terbatasi oleh kebijakan pemerintahan dalam masa pandemi covid-19. Tahun 2022. Capaian indikator program pembinaan perpustakaan yaitu jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 dengan jumlah pengunjung pada tahun 2022 mencapai 228.583 orang. Sejumlah 1.325.445 orang pemustaka yang ada pada layanan perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan dan perpustakaan daerah serta sejumlah 228.583 orang pemustaka layanan perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik II. 106.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

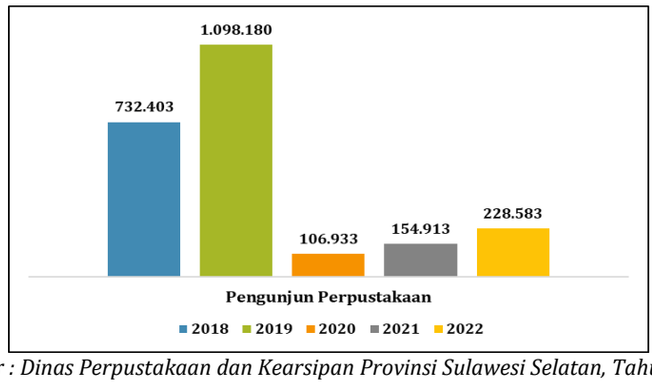

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Grafik II. 107.
Jumlah Perpustakaan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

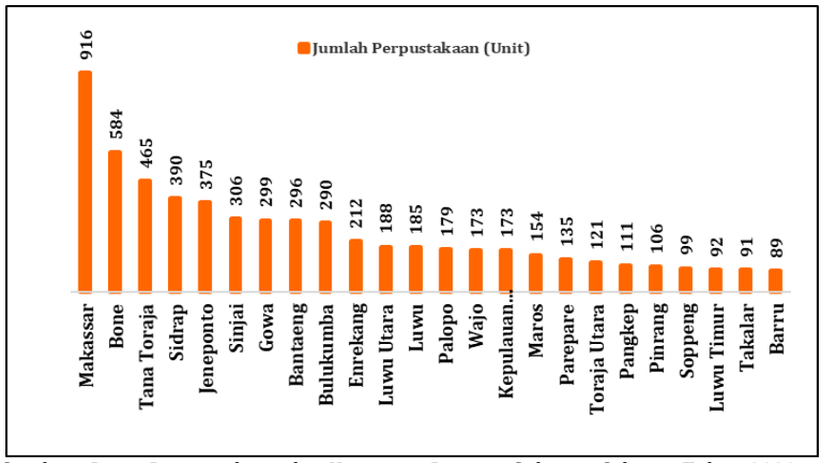

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai beberapa jenis layanan perpustakaan, antara lain layanan perpustakaan umum, layanan perpustakaan Abd. Rasyid Dg Lurang, layanan perpustakaan ibu dan anak, serta layanan PP-IPTEK. Pemustaka yang datang berkunjung tidak hanya langsung ke perpustakaan tetapi dapat juga mengunjungi layanan website maupun Instagram. Rasio perpustakaan walaupun naik dibanding tahun lalu, akan tetapi belum rasional bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Diperlukan pengembangan perpustakaan di tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota. Serta peningkatan jumlah koleksi buku perpustakaan. Jumlah perpustakaan pada tahun 2022 yang tersebar di kabupaten/kota mencapai 6.029 unit mengalami peningkatan dari tahun 2021 sejumlah 2.324 unit.

Capaian persentase Naskah Kuno yang dilestarikan tahun 2020 hingga 2022 mengalami tren peningkatan, dimana capaian tahun 2021 jumlah naskah kuno dapat dilestarikan sebanyak 1.213 lembar atau sebesar 80,86 persen dari target keseluruan adalah 1.500 lembar. Faktor pendorong pencapaian target karena banyaknya permintaan dari masyarakat dan minat dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menginginkan pelestarian naskah kuno. Pada tahun 2022 capaian persentase naskah kuno yang dilestarikan sebesar 100 persen. Hal ini disebabkan naskah kuno yang dilestarikan hanya 1 jenis, yaitu naskah lontaraq dengan jumlah judul sebanyak 4.049 naskah.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan perpustakaan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.93.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perpustakan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	732.403	1.098.180	106.933	154.913	228.583
Persentase naskah kuno yang di lestarikan	%	54,33	42,33	30,1	80,86	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.2.18. Kearsipan

Jumlah Perangkat Daerh yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2021 adalah sebesar 33,30 persen atau 25 perangkat daerah, melampaui target yang ditetapkan sebesar 18,87 persen. Hal ini disebabkan oleh aktifnya dan respons positif dari Lembaga Kearsipan Daerah yang menindaklanjuti kebijakan pemerintah tentang pentingnya pengelolaan arsip secara baku di masing-masing instansi pemerintah untuk kemudahan dalam menelusuri arsip sebagai alat bukti dalam administrasi pemerintah dan juga sebagai identitas bangsa. Keaktifan para arsiparis dalam melaksanakan pembinaan pada instansi pemerintah dan juga swasta dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis. Pembinaan ini dilakukan sebagai langkah tertib arsip pada instansi sesuai dengan kebijakan pemerintah yang di tuangkan dalam Perka ANRi, dan juga merupakan indikator penilaian Reformasi Birokrasi bagi instansi pemerintah.

Pada tahun 2022 melalui program pengelolaan arsip capaian perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mencapai 79,49 persen. Instrumen yang dinilai dalam mengelola arsip secara baku cukup banyak, salah satu diantaranya yaitu pemusnahan arsip. Perangkat daerah yang telah melaksanakan pemusnahan arsip bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sejumlah 31 perangkat daerah mengalami peningkatan dari tahun 2021 sejumlah 25 perangkat daerah. Untuk nilai pengawasan kearsipan dengan kategori B keatas pada Pemda diraih oleh 3 lembaga kearsipan daerah, yaitu Kota Parepare, Kabupaten Bone dan Luwu Timur. Untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai pengawasan kearsipan dengan kategori Baik (77,59).

Grafik II. 108.
Peningkatan SDM Pengelola Arsip
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

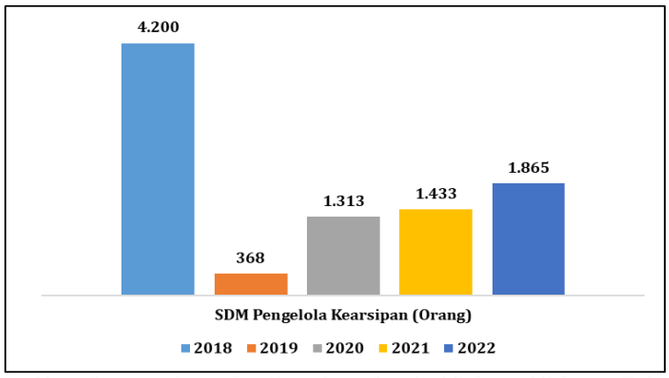

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Data capaian kinerja program pembangunan urusan kearsipan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.94.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	65	56	29,54	64,1	79,49

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Pariwisata

Pada tahun 2022 capaian persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan capaian 0,62 persen. Masih terdapat beberapa destinasi pariwisata yang membutuhkan bantuan pengembangan namun belum memiliki dokumen perencanaan yang lengkap, seperti RIPPAR Kabupaten/Kota. Selain itu beberapa destinasi, khususnya destinasi wisata alam masih belum jelas dasar kepemilikannya, mengingat Pembagunan/ Pengembangan Destinasi Wisata di Kabupaten/Kota yang bukan aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Hibah. Jumlah destinasi wisata pada tahun 2022 sejumlah 980 destinasi mengalami peningkatan dari tahun 2021 sejumlah 926 destinasi.

Kawasan wisata halal menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai capaian pada urusan layanan pilihan untuk pariwisata. Wisata halal merupakan konsep yangr relatif baru yang merupakan adopsi dari negara-negara non organisasi Konferensi Islam (OKI) yang melihat potensi besar dari pertumbuhan Muslim Dunia. Capaian tahun 2021 menunjukkan nilai yang belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 12,5 persen atau 3 Kabupaten/kota dari 24 kabupaten/kota yang terdapat di Sulawesi Selatan, namun capaian yang diperoleh pada tahun 2021 baru pada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Hal ini dipengaruhi oleh persyaratan yang ditetapkan untuk wisata halal berupa hotel, tempat ibadah sajian dalam restoran belum sepenuhnya disesuaikan dengan konsep wisata halal yang ditetapkan, disamping itu sosialisasi terhadap kawasan wisata halal baru dilaksanakan pada 2 kabupaten tersebut. Pada tahun 2022 capaian persentase kabupaten/kota yang memiliki kawasan wisata halal sebesar 12,5 persen mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penerapan konsep wisata halal/ramah muslim dapat terlaksana dengan baik melalui Sosialisasi serta Fasilitasi, hal ini dapat tercapai dikarenakan adanya koordinasi dengan pihak kab./kota serta para pelaku industri pariwisata, khususnya yang bergelut di urusan wisata halal/ramah muslim.

Grafik II. 109.
Jumlah Destinasi Wisata Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

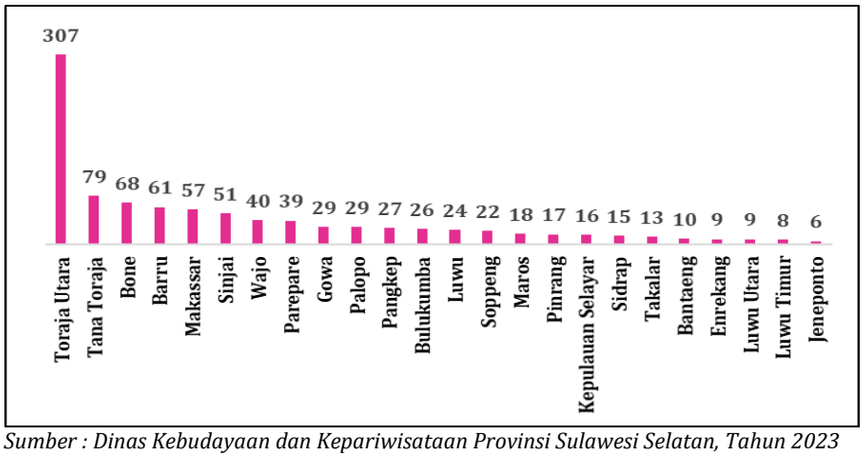

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Kunjungan wisatawan nusantara atau wisatawan domestik di Sulawesi Selatan tahun 2021 mulai mengalami perbaikan seiring dengan usaha pemulihan ekonomi pada masa pandemic covid-19, kebijakan kelonggaran dalam pembatasan aktivitas mendorong masyarakat lokal untuk melakukan kunjungan pada obyek-obyek wisata lokal yang mulai dilakukan pembenahan kembali. Kunjungan wisatawan mancanegara masuk ke Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2021, kondisi ini tidak terlepas dari pandemic covid-19, yang memberlakukan kebijakan pembatasan dan larangan masuk ke Indonesia. Kondisi ini juga berdampak terhadap tidak tercapainya target yang ditetapkan yaitu jumlah kunjungan wisata sebanyak 87.500 kunjungan pada tahun 2021. Adanya pelonggaran penerbangan dalam negeri, sehingga membuka peluang untuk wisatawan domestik berkunjung ke destinasi-destinasi wisata, khususnya di sulawesi selatan. Tahun 2022 tercatat jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebesar 7.590.063 kunjungan dari target sebanyak 2.067.550 kunjungan. Terbatasnya orang untuk melakukan perjalanan juga menjadi salah satu persoalan sulitnya tercapai kunjungan wisatawan ke Sulawesi Selatan terutama wisatawan mancanegara, karena beberapa negara masih membatasi keluar masuk warganya sehingga menjadikan target kunjungan wisatawan mancanegara hanya dapat dicapai sebanyak 70.997 kunjungan atau 75,73 persen dari target 93.750 kunjungan. Tahun 2022 rata-rata lama kunjungan wisata sejumlah 3 hari mengalami peningkatan dari tahun 2021 sejumlah 1 hari. Selain itu peningkatan dari tahun sebelumnya juga terjadi pada peningkatan PAD pariwisata dimana pada tahun 2022 mencapai 299.770.000 rupiah serta peningkatan kontribusi PDRB sektor Pariwisata tahun 2022 sebesar 11,86 persen dari tahun 2021 dengan capaian 1,32 persen.

Grafik II. 110.
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

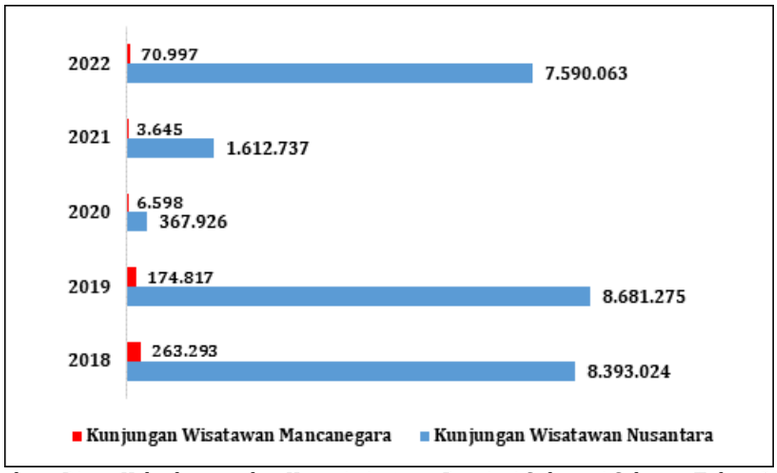

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Terdapat 17 sub sektor ekonomi kreatif di Indonesia yang terdiri dari pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, music, seni rupa, desain produk, fesyen, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi, telivisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan dan aplikasi. Dari ke 17 sub sektor tersebut, 3 sub sektor yang dikembangkan di Provinsi Sulawesi Selatan, melalui kegiatan workshop desian produk ekonomi kreatif (Sub sektor desain produk), workshop fotografi ekonomi kreatif (sub sektor fotografi) dan workshop pengembangan ekonomi kreatif untuk sub sektor fashion. Tahun 2021 capaian persentase sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sebesar 17,64 persen mengalami peningkatan dari tahun 2020. Tahun 2022 peningkatan kualitas SDM sub sektor ekonomi kreatif yang sedang berkembang saat ini di masyarakat adalah sub sektor fotografi, kriya dan desain produk. Ketiga sub sektor ekonomi kreatif ini memiliki komunitas yang cukup banyak, sehingga fokus pengembangan SDM dan Supporting di tahun 2022 diarahkan pada tiga sub sektor dimaksud.

Kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM sektor Pariwisata bagi sejumlah 154 orang SDM Pariwisata pada tahun 2021. Adapun untuk Tahun 2022 jumlah SDM sektor pariwisata yang dilatih sejumlah 165 orang, melalui beberapa kegiatan antara lain : (1) Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Selam) sebanyak 70 Orang; (2) Pelatihan Pengelola Usaha Homestay & Pondok Wisata sebanyak 70 orang; dan (3) Pembinaan Pokdarwis dan Usaha Jasa Pariwisata sebanyak 25 Orang. Peningkatan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan SDM di sektor ekonomi kreatif mengalami peningkatan jumlah SDM yang dilatih pada tahun 2021 yaitu sebanyak 78 orang. Tahun 2022 jumlah SDM ekonomi kreatif yang dilatih sebanyak 150 orang melalui 3 (tiga) kali pelaksanaan kegiatan, yaitu (1) Workshop Fotografi 50 Orang; (2) Workshop Kriya sebanyak 50 orang; dan (3) Workshop Desain Produk sebanyak 50 Orang. Hal ini dikarenakan peluang ekonomi yang dihasilkan melalui usaha ekonomi kreatif semakin meningkatkan minat masyarakat (khususnya masyarakat milenial) untuk berkecimpung dalam sektor ekonomi kreatif.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pariwisata tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.95.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pariwisata
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	%	0,3	0,2	0,4	0,2	0,62
Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal	%	0	4,2	8,3	8,3	12,5
Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	%	134	114	4,21	77,16	367,1
Kunjungan Wisata (Wisatawan Mancanegara)	%	131	58,27	4,52	4,17	75,73
Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	13	19	13	17,64	18,75
Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan	%	1,22	1,08	0	1,45	1,55
Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	%	12	15	11	12	14,92

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.3.1 Pertanian

Pengembangan tanaman Talas Satoimo dilaksanakan oleh pemerintah Sulawesi Selatan karena tanaman ini memiliki kandungan kolagen dan antioksidan tinggi dan merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan. Produksi talas satoimo tahun 2021 sejumlah 6.104 ton mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 7.214 ton disebabkan oleh perubahan iklim yang berakibat banjir pada beberapa wilayah yang menjadi lokasi penanaman komoditas ini seperti Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Bone dan Soppeng, sementara itu jenis komoditas ini tidak dapat terkena banjir selama musim tanam 5 bulan. Pada tahun 2022 pengembangan talas satoimo tidak di laksanakan karena tidak ada proposal/permintaan dari petani. Pengembangan Jeruk Keprok Selayar sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkantan luas areal penanaman. Pada tahun 2022 luas areal pengembangan jeruk kopyor sebesar 130,02 Ha mengalami peningkatan dari tahun 2021. Peningkatan ini didukung oleh pengembangan kawasan dan pengembangan jeruk selayar berbasis pekarangan yang dilakukan melalui pengadaan dan perakitan bibit jeruk selayar.

Tabel II.96.
Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) dan Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB*	%	22,54	21,35	21,72	22,55	22,1
Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB	%	7,16	6,34	6,50	6,33	5,91
Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Hortikultura) terhadap PDRB	%	1,12	1,11	1,13	1,13	1,11
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	4,26	3,88	3,94	4,07	4,05
NTP Sub Sektor Tanaman Pangan	%	102,25	100,54	100,66	94,17	91,34
NTP Sub Sektor Hortikultura	%	106,14	113,85	107,97	105,02	125,36
NTP Sub Sektor Perkebunan Rakyat	%	95,64	95,62	99,25	107,09	120,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Tahun 2022 produktivitas tanaman padi dan jagung mengalami peningkatan dari tahun 2021 sedangkan produktivitas tanaman kopi dan kakao mengalami penurunan dari tahun 2021. Capaian untuk tanaman padi didorong oleh bantuan benih bersertifikat, pupuk yang tepat, peningkatan SDM petani dan penyuluh, penanganan serangan hama dan penyakit serta pola taman yang baik. Untuk komoditas jagung, capaian yang melampaui target dipengaruhi oleh penggunaan benih jagung yang bersertifikat, pemakaian pupuk yang tepat dan berimbang, menanganan serangan hama dan penyakit serta peningkatan SDM dan penyuluh pertanian.

Grafik II. 111.
Produksi Tanaman Perkebunan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022

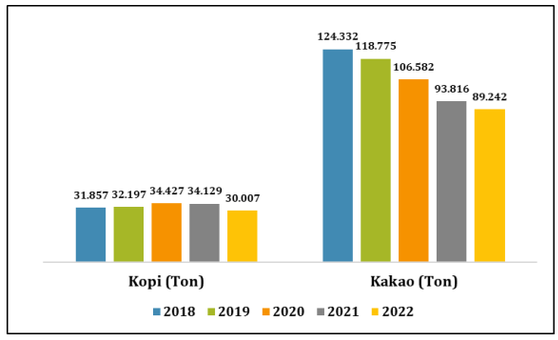

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Produksi tanaman kopi tahun 2018 hingga 2020 mengalami tren peningkatan, namun pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami tren penurunan, sedangkan produksi tanaman kakao tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren penurunan. Produksi tanaman kopi terbesar di Kabupaten Enrekang dengan jumlah produksi sebesar 8.463 ton pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -13,1 persen dari tahun 2021, sedangkan produksi tanaman kakao

terbesar di Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah produksi sebesar 29.232 ton pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 2,3 persen dari tahun 2021.

Capaian peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian tahun 2020 cukup tinggi yaitu 10.401 unit mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 18.384 unit. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya bantuan alat-alat pertanian baik dari sumber pendanaan APBD maupun dari APBN. Demikian halnya pada tahun 2022 meskipun mengalami penurunan dari tahun 2021 jumlah permintaan untuk pemenuhan kebutuhan alat dan mesin pertanian oleh kelompok tani berupa Hand Traktor, Combine Harvester, Cultivator, Handsprayer, Traktor Roda 4, Mesin Pompa Air 4 Inch dengan jumlah bantuan alsintan yang didistribusikan sebesar 14.111 unit.

Peningkatan ketersediaan pupuk tahun 2018 hingga 2021 mengalami tren peningkatan, hal ini menjawab kelangkaan pupuk yang sering dikeluhkan petani dalam aktivitas pertanianya. Tahun 2022 besaran jumlah bantuan pupuk yang disalurkan berdasarkan permintaan bantuan yang diajukan oleh kelompok tani dalam rangka upaya peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan jumlah 277.446 kg pupuk organik padat, 99.992 liter pupuk organik/hayati cair.

Nilai hilirisasi produk tanaman pangan pada tahun 2022 sebesar 147.321.223.500 rupiah mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar -62,5 persen dimana penurunan produksi dan nilai produk tanaman pangan dan hortilkultura berpengaruh terhadap penurunan nilai hilirisasi produk tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan nilai hilirisasi produk tanaman perkebunan pada tahun 2022 sebesar 7.408.901.000 rupiah mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 20,6 persen. Peningkatan produksi dan nilai produk tanaman perkebunan berpengaruh terhadap peningkatan nilai hilirisasi produk perkebunan. Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian melalui program pembangunan jaringan irigasi tersier, pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani, dan pembangunan embung. Pada tahun 2022 dilaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier sejumlah 122 paket pekerjaan, pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani sejumlah 451 paket pekerjaan, serta pembangunan embung sejumlah 78 paket pekerjaan, dan pembangunan sumur bor sejumlah 97 paket pekerjaan.

Rendahnya tingkat serangan OPT merupakan upaya bagaimana memaksimalkan fungsi dan peran POPT dalam mengantisipasi secara dini serangan-serangan OPT yang dihadapi. Serangan OPT dipicu oleh kurang tepatnya pengendalian OPT yang dilakukan petani secara swadaya. Dalam hal pengendalian OPT secara swadaya banyak ditemukan petani menggunakan pestisida yang tidak sesuai dengan aturan, seperti jenis pestisida yang digunakan tidak tepat, pencampuran pestisida dengan berbagai jenis pencampur seperti deterjen, oli, dan lainnya yang justru akan memicu terjadinya resistensi.

Capaian penggunaan bibit padi padi bersertifikat menggambarkan seberapa besar penggunaan bibit bersertifikat yang sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan produksi dan dipengaruhi oleh program mandiri

benih dimana program ini diharapkan dapat merangsang petani untuk menggunakan benih padi bersertifikat disetiap jadwal pertamanannya. Tahun 2022 capaian persentase penggunaan benih padi bersertifikat sebesar 68 persen mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan capaian 76,49 persen. Rasio ketersediaan penyuluh pertanian dan pelaku utama petani penyuluh/KEP relatif sama selama 5 tahun terakhir, kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan jumlah penyuluh dan kelompok tani yang dibina, hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 orang penyuluh membina 2 kelompok tani.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pertanian tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.97.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanian
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton)	Ton	0	0	7.214	6.104	0
Luas Areal Pengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)	Ha	345,43	550,88	568,63	630,99	130,02
Produktifitas Padi	Kw/Ha	50,12	50,03	48,23	49,46	51,27
Produktifitas Jagung	Kw/Ha	55,89	56,49	54,04	55,31	56.83
Produtifitas Kopi	Kg/Ha	669	612	628	647	563,88
Produktifitas Kakao	Kg/Ha	807	792	776	814	725
Cakupan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	Unit	198	713	10.401	18.462	14.111
Peningkatan Ketersediaan Pupuk	Ton	132,63	256,34	381,30	775,23	22.658
Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan	Rp	0	0	0	392.483.722	147.321.223.500
Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan	Rp (000)	9.231.917	9.176.092	6.766.032.	6.144.952	7.408.901
Persentase Penurunan Serangan OPT (%)	%	1,11	1,11	1,79	2	2
Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat	%	75	63	0	76,49	68
Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani, Penyuluh/KEP	Rasio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sulsel, Tahun 2023

2.3.3.2. Peternakan

Nilai hilirasi produksi peternakan tahun 2018 hingga 2021 mengalami tren peningkatan, namun pada tahun 2022 menurunnya capaian produksi peternakan menyebabkan nilai hilirisasi produksi peternakan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Faktor perkembangan ekonomi yang melambat berdampak pada turunnya daya beli dan rendahnya perkembangan usaha hotel, restoran dan kantin. Nilai hilirisasi produksi peternakan tahun 2019 hingga 2022 disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 112.
Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

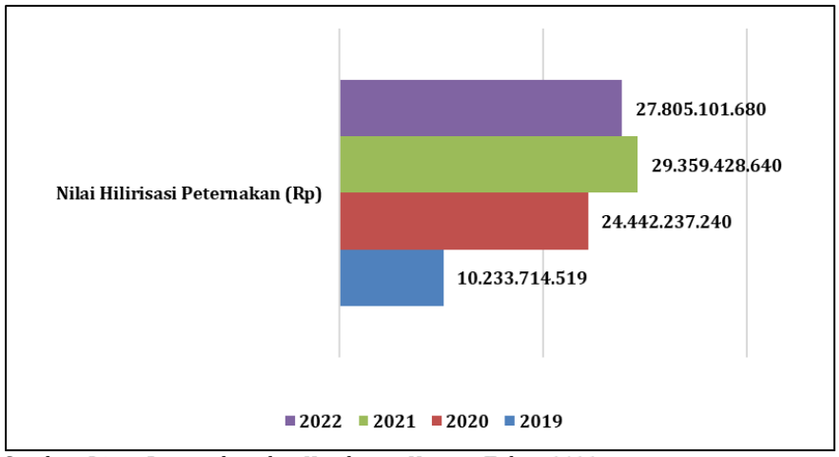

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2023

Tahun 2018 hingga 2022 capaian produksi peternakan (daging, telur, susu) mengalami tren berfluktuasi dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah produksi dari tahun 2021. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum maksimalnya operasional hotel, restoran dan kantin yang berdampak pada hambatan distribusi daging ke konsumen yang hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga. Produksi daging asal unggas terutama daging ayam broiler merupakan komoditi paling berperan dalam penurunan jumlah produksi. Jumlah produksi daging tertinggi di Kabupaten Maros sebesar 33,4 ton dan Kota Makassar sebesar 33,2 ton. Jumlah produksi telur tertinggi di Kabupaten Sidrap dengan jumlah produksi sebesar 56,8 ton dan Kabupaten Pinrang sebesar 33,6 ton. Sedangkan produksi susu hanya terdapat di 4 kabupaten saja dimana yang tertinggi di Kabupaten Enrekang sebesar 2,12 ton. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 113.
Produksi Hasil Peternakan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

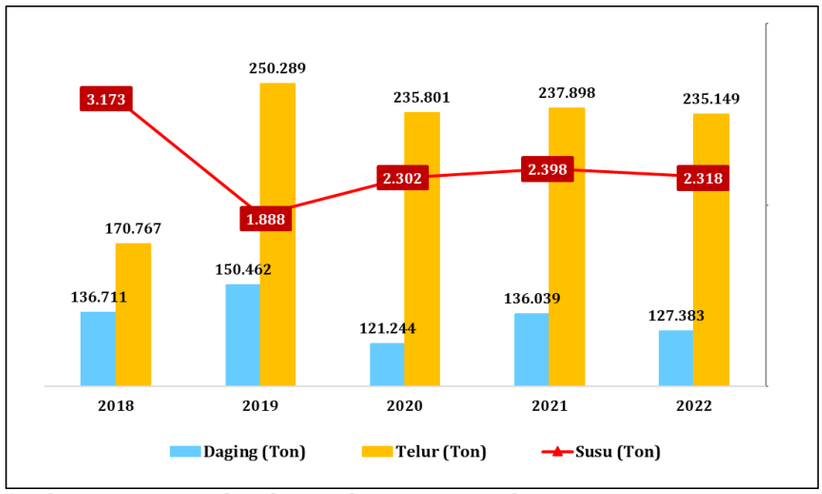

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2023

Grafik II. 114.
Populasi Ternak Besar
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

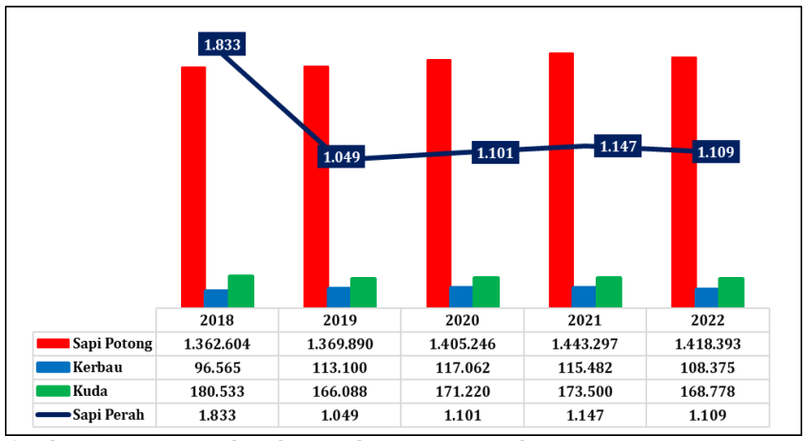

	2018	2019	2020	2021	2022
Sapi Potong	1.362.604	1.369.890	1.405.246	1.443.297	1.418.393
Kerbau	96.565	113.100	117.062	115.482	108.375
Kuda	180.533	166.088	171.220	173.500	168.778
Sapi Perah	1.833	1.049	1.101	1.147	1.109

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2023

Untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak besar, pada tahun 2021 dilaksanakan pendistribusian sapi bali betina sejumlah 221 ekor yang didistribusikan untuk kelompok ternak di Kabupaten Bone, Takalar, Enrekang, Wajo, Sidrap, dan Barru. Tahun 2022 tidak ada alokasi anggaran untuk pendistribusian ternak besar.

Dalam rangka peningkatan populasi dan produksi ternak kecil, pada tahun 2021 dilaksaakan pendistribusian ternak kecil pada kelompok ternak yang meliputi: 1) Kambing Jantan sejumlah 43 ekor di Kabupaten Enrekang, Bone, Sidrap, dan Jeneponto; 2) Kambing Betina sejumlah 285 ekor di Kabupaten Gowa, Enrekang, Bone, Sidrap, dan Jeneponto; 3) Babi Betina sejumlah 75 ekor di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Pada tahun 2022 tidak ada pendistribusian ternak kecil untuk kelompok ternak karena keterbatasan alokasi anggaran.

Grafik II. 115.
Populasi Ternak Kecil
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

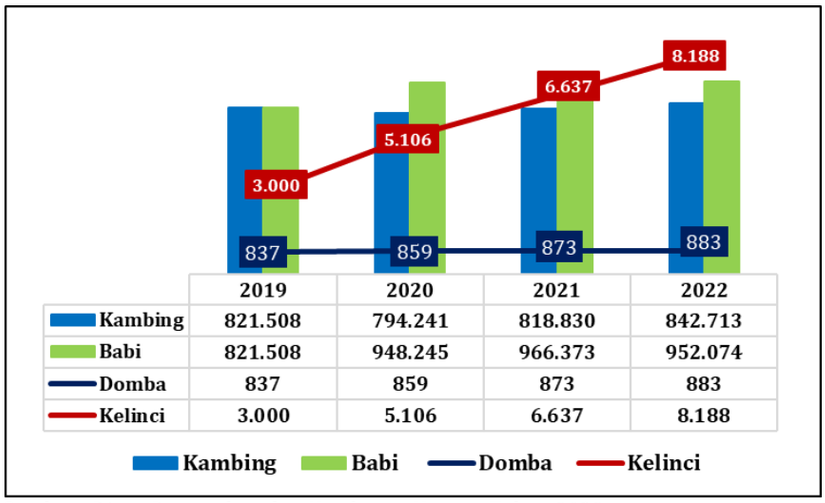

	2019	2020	2021	2022
Kambing	821.508	794.241	818.830	842.713
Babi	821.508	948.245	966.373	952.074
Domba	837	859	873	883
Kelinci	3.000	5.106	6.637	8.188

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2023

Grafik II. 116.
Populasi Ternak Unggas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

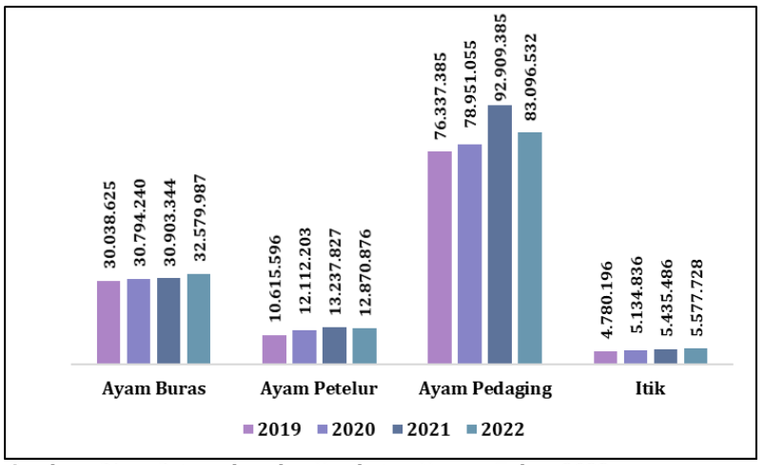

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2023

Dalam rangka peningkatan populasi ternak unggas, pada tahun 2021 dilaksanakan pendistribusian ternak unggas untuk kelompok ternak unggas yang meliputi: 1) Ayam Lokal sejumlah 1.875 ekor di Kabupaten Takalar, Maros, Gowa, dan Pangkep; 2) Itik sejumlah 10.683 ekor di Kabupaten Takalar, Maros, Gowa, Sinjai, Jeneponto, Bone, Sidrap, dan Pangkep; 3) Ayam Petelur sejumlah 5.600 ekor di Kabupaten Wajo, Sidrap, dan Jeneponto. sedangkan pada tahun 2022 pengembangan populasi ternak unggas sejumlah 7.625 ekor bagi kelompok ternak yang tersebar di Kabupaten Bone, Pangkep, Sidrap, Takalar, dan gowa yang terdiri dari ternak itik dan ayam petelur. Selain itu untuk mendukung penyediaan infrastruktur peternakan unggas pada tahun 2022 telah dilaksanakan pembangunan kandang closed house pada Kabupaten Bone sejumlah 2 unit dan Kabupaten Wajo sejumlah 1 unit serta pengembangan kawasan peternakan Pucak di Kabupaten Maros dalam rangka penyediaan prasarana peternakan.

Jumlah kasus penyakit hewan menular stategis yang ditangani di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan capaian 12.341 kasus. Hal ini ditunjang oleh kesiapan sumberdaya manusia dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang yang terdiri atas obat hewan, vaksin dan vitamin serta materi pendukung lainnya. Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah bentuk ancaman dalam pengembangan komoditas peternakan sehingga selalu menjadi prioritas utama dalam penanganan kesehatan hewan. Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) tahun 2022 menunjukkan terjadi penurunan kasus dengan capaian 1.331 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa pola pemeliharaan di tingkat peternak sudah menerapkan konsep biosekuriti dan higiene sanitasi dimana dilakukan pembatasan lalu lintas keluar masuk kandang untuk mencegah penyebaran penyakit yang lebih meluas.

Capaian pada indikator unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan di provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan persentase yang belum mencapai target pada tahun 2021. Kondisi ini disebabkan karena masih rendahnya dukungan kebijakan daerah dan system pengawasan yang dapat

mendorong pencapaian target terhadap usaha unit obat hewan yang beroperasi. Capaian tahun 2022 masih sama dengan capaian ditahun sebelumnya, penyebabnya yaitu masih rendahnya dukungan kebijakan daerah dan sistem pengawasan yang dapat mendorong pengawasan yang dimaksud. Usaha distribusi atau layanan obat hewan tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan jumlah yang besar, sehingga diperlukan suatu sistem yang lebih mudah dalam pelaksanaannya. Sistem tersebut tidak dapat dipisahkan dengan sistem perizinan lainnya.

Rasio ketersediaan penyuluh terhadap kelompok tani/ternak adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dalam suatu wilayah tertentu dibandingkan dengan jumlah kelompok tani/ternak yang harus dilayani oleh penyuluh tersebut. Rasio ini dapat menjadi indikator untuk mengevaluasi apakah terdapat cukup banyak penyuluh pertanian yang tersedia untuk mendukung kegiatan pertanian di suatu daerah. dari perolehan data pada tahun 2022, dapat diinterpretasikan bahwa 1 penyuluh untuk 14 kelompok tani/ternak. Hal ini masih dianggap ideal mengingat kondisi wilayah bisa sangat bervariasi di setiap daerah. Semakin luas wilayah yang harus dilayani oleh penyuluh pertanian, maka semakin banyak pula jumlah penyuluh yang dibutuhkan.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan peternakan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.98.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Peternakan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Daging	Ton	136.711	150.462	121.244	136.039	127.383
Produksi Telur	Ton	170.767	250.289	235.801	237.898	235.149
Produksi Susu	Ton	3.173	1.888	2.302	2.398	2.318
Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan	Rp	0	10.233.714.519	24.442.237.240	29.359.248.640	27.805.101.680
Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Kasus	9.403	5.961	31.376	12.341	1.331
Persentase Unit Usaha yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan	%	0	0	0	21	21
Rasio Ketersediaan Penyuluh Terhadap Kelompok Tani/Ternak	Rasio	1:4	1:3	1:6	1:10	1:14

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.3.3. Kehutanan

Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren peningkatan dengan capaian 71,14 persen luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2022 baik yang ada di dalam dan diluar kawasan sejumlah 13.003,2 Ha

sehingga luas lahan kritis yang direhabiltasi menjadi 277.042,97 Ha dari luas total lahan kritis sebesar 389.426,8 Ha.

Tahun 2018 hingga 2020 persentase luas kerusakan hutan mengalami tren menurun, meskipun pada tahun 2021 mengalami peningkatan namun persentase kerusakan hutan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,03 persen. Hal ini didukung oleh upaya pengamanan dan perlindungan hutan berupa patroli dan penyuluhan berupa sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dimana kerusakan hutan yang terjadi pada tahun 2021 seluas 1.431,99 Ha menurun menjadi 580,79 Ha dari total 1.780.029 Ha luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya. Hal ini didorong oleh kegiatan rehabilitasi dan pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas penebangan liar yang sering terjadi pada kawasan hutan. Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara pada tahun 2022 sebesar 724 Ha melalui pembuatan dan pemeliharaan tanaman hutan rakyat dan pembuatan dan pemeliharaan tanaman mangrove.

Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada tahun 2022 sebesar 8.102,81 Ton mengalami peningkatan produksi dari tahun 2021 yang didukung dengan adanya penambahan jumlah izin pemungutan HHBK yang berdampak langsung dengan jumlah produksi di industri-industri yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung jumlah penerimaan dari sektor kehutanan pada tahun 2022 mencapai Rp.91.654.000,-. Produksi hasil hutan bukan kayu diperoleh dari produksi kelompok rotan, kelompok getah dan kelompok resin.

Diagram II.13.
Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan (m^3)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

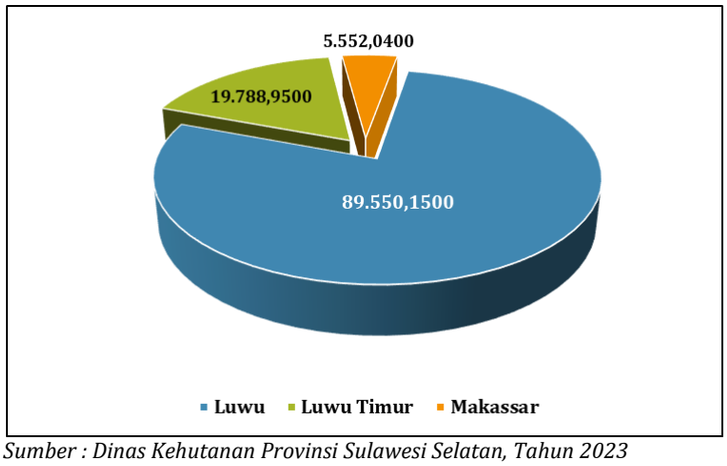

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan pada tahun 2022 sebesar 111.444,19 Ton mengalami penurunan produksi dari tahun 2021 yang disebabkan berkurangnya potensi bahan baku serta daya beli masyarakat yang semakin berkurang dimana sebagian masyarakat yang beralih ke penggunaan baja ringan. Produksi hasil hutan kayu olahan berasal dari kelompok komoditi kayu gergajian, kayu lapis dan veener, dengan nilai produksi tersebsar berasal dari kayu lapis.

Grafik II. 117.
Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

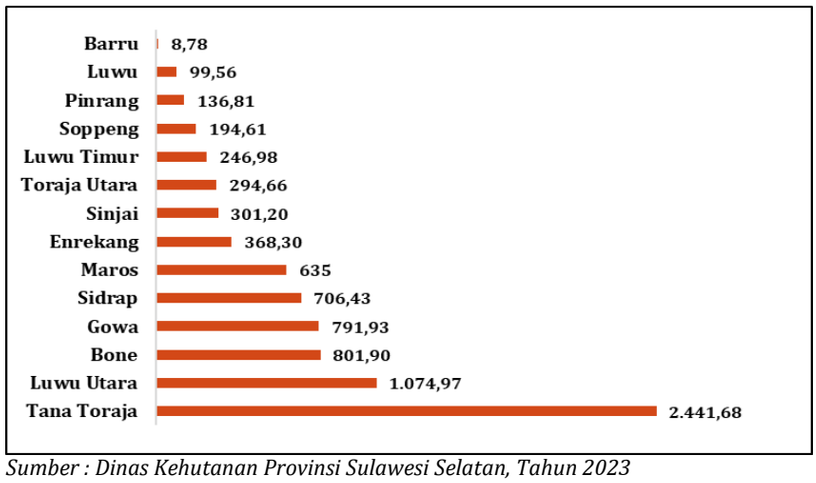

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata tahun 2022 sejumlah 2 jenis dimana tidak adanya perubahan atau penambahan jenis yang diukur sesuai target indikator tahun ini yaitu satu jenis tumbuhan/Flora dan satu jenis hewan/Fauna.

Capaian persentase jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan mengalami tren peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022 dengan capaian 26,8 persen pada tahun 2022. Hal ini disebabkan jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang diberikan akses legal meningkat dalam pengelolaan hutan pada tahun 2022. Jumlah pemegang izin perhutanan sosial pada tahun 2022 sebesar 505 kelompok sedangkan jumlah usulan pemegang izin perhutanan sosial sebesar 1.884. Pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor antara lain: a) Adanya pembinaan yang dilaksanakan secara intensif terkait hak dan kewajiban pemegang persetujuan dari UPT KPH baik oleh pendamping KPS maupun penyuluh kehutanan pada areal pemegang persetujuan perhutanan sosial; b) Sosialisasi pengelolaan perhutanan sosial sesuai permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 kepada pemegang persetujuan baik yang dilaksanakan oleh BPSKL Sulawesi maupun Dinas Kehutanan melalui Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial; c) Kemampuan pemegang izin dalam mengakses teknologi informasi yang makin berkembang terkait Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Pada tahun 2022 untuk mendukung pengembangan perhutanan sosial dilaksanakan kegiatan pembangunan rumah pemeliharaan ulat sutera sejumlah 5 unit, pengadaan bibit aren, jahe, dan kopi serta penyediaan sarana dan prasarana alat ekonomi produktif.

Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2015 tentang pengelolaan Daerah Alirn Sungai (DAS) disebutkan bahwa terdapat 7 DAS Lintas Provinsi, 27 DAS Lintas Kabupaten, dan 507 DAS Kabupaten. Jumlah DAS yang direhabilitasi dari tahun 2019 hingga tahun 2022 tidak mengalami perubahan DAS yang direhabilitasi yang terletak di lokasi DAS yang telah ditentukan yaitu DAS Jeneberang dan DAS Saddang, sedangkan DAS lainnya tetap dipertahankan kondisinya.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan kehutanan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.99.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kehutanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	217.998,77	238.506,77	251.016,77	264.039,77	277.042,97
Luas total hutan dan lahan kritis	Ha	448.471	427.963	415.453	402.430	389.426,8
Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	48,61	55,73	60,42	65,61	71,14
Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	310.783,90	362.264,23	12.440	1.431,99	580,79
Luas Kawasan Hutan	Ha	2.145.031	2.078.486	1.780.029	1.780.029	1.780.029
Persentase Kerusakan Hutan pertahun	%	14,49	17,43	0,7	0,08	0,03
Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Ton	0	632.869,29	3.920,13	2.688,57	8.102,81
Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	m^3	0	215.731,05	20.801,62	137.931,37	111.444,19
Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	Jenis	Belum dipetakan	2	2		
Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	%	Belum dilakukan pengukuran	12,19	15,80	24,04	26,8
Jumlah DAS yang direhabilitasi	DAS	0	2	2	2	2

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Persentase rumah tangga pengguna listrik di provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 menunjukkan kecenderungan peningkatan, dimana capaian tahun 2021 sebesar 98,2 persen. Tahun 2022 jumlah rumah tangga yang telah menikmati layanan listrik sejumlah 4.940 KK atau persentase rumah tangga yang berlistrik telah mencapai 99,89 persen yang bersumber dari Listrik PLN dan Non PLN) sedangkan rumah tangga yang belum terlayani penerangan merupakan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang berada di kepulauan dan pegunungan serta rumah tangga yang tidak mampu selain wilayah 3T meskipun terdapat jaringan PLN.

Grafik II. 118.
Rumah Tangga Pengguna Listrik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

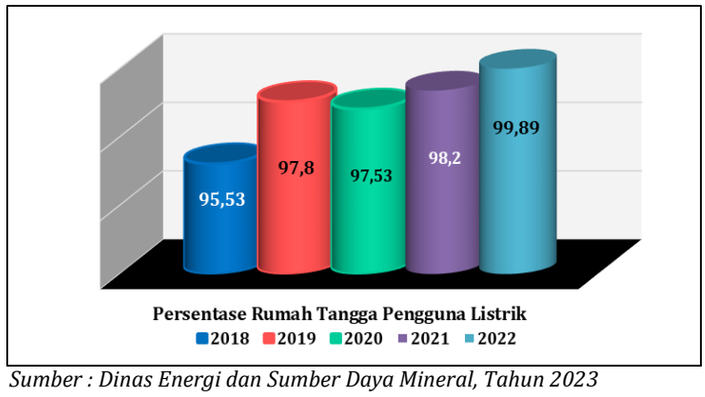

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2023

Capaian persentase rumah tangga pengguna listrik PLN di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan untuk wilayah perdesaan sejak tahun 2018 hingga 2022. Sedangkan untuk wilayah perkotaan persentase rumah tangga pengguna listrik PLN tahun 2018 hingga 2020 mdngalami peningkatan namun pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan dengan capaian 98,82 persen pada tahun 2022. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 119.
Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

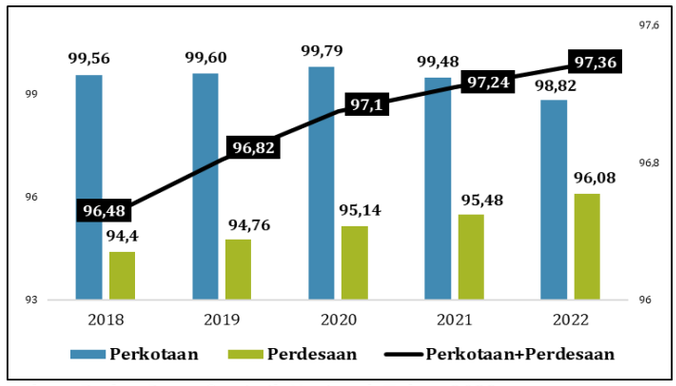

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

Rumah tangga pengguna listrik tahun 2022 tertinggi di Kota Pare-Pare yang telah mencapai 100 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 96,16 persen. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 120.
Rumah Tangga Pengguna Listrik Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

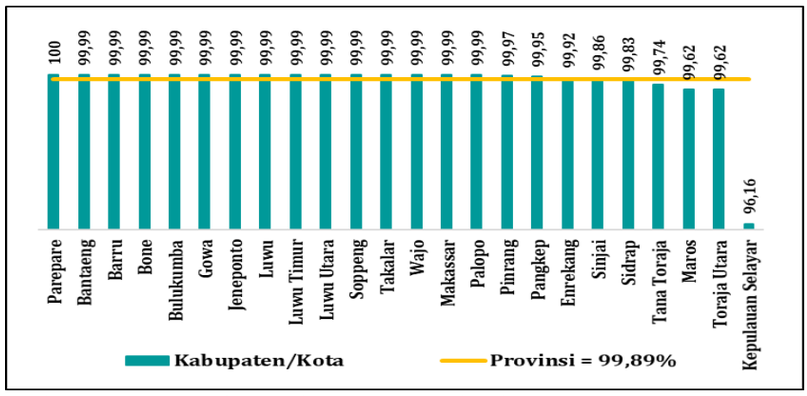

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2023

Persentaase desa berlistrik di Sulawesi Selatan mengalami tren peningkatan selama kurun waktu 5 tahun meskipun belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terdapat desa yang berada di wilayah kepulauan dan desa terpencil yang belum terjangkau listrik sebesar 1,51 persen. Tahun 2022 persentase desa berlistrik mencapai 100 persen yang berarti bahwa sejumlah 2.255 desa di Sulawesi Selatan telah terakses listrik baik yang bersumber dari listrik PLN maupun Non PLN. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 121.
Persentase Desa Berlistrik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

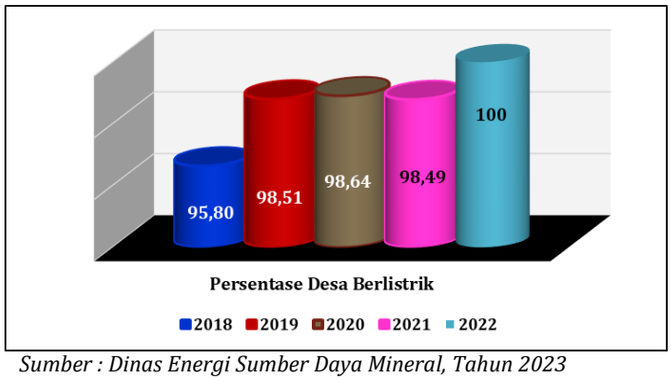

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Tahun 2023

Dalam rangka konsevasi energi untuk memelihara kelestarian sumber daya alam yang berupa sumber energi melalui kebijakan pemilihan teknologi dan pemanfaatan energi secara efisien, rasional dan bijaksana untuk mewujudkan kemampuan penyediaan energi, penggunaan energi secara efisien dan merata serta kelestarian sumber-sumber energi di Sulawesi Selatan dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain: a) Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga sejumlah 15 unit yang tersebar di Kabupaten Bone, Jeneponto dan Sidrap; b) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) sejumlah 5 unit di Kabupaten Barru dan 13 unit di Kabupaten Pangkep; c) Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya di Pulau Samalona Kota Makassar; d) Pembangunan PLTS Rooftop Offgrid 3 kWp di Kabupaten Bone; e) Pengadaan Genset di Kabupaten Pangkep; f) Pengadaan

PLTS Hybrid sejumlah 2 unit di Kabupaten Jeneponto; dan g) Pengadaan Genset 300 kVA di Pulau Barrang Caddi Kota Makassar.

Capaian Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu) tahun 2021 menunjukkan nilai 320 Ha, capaian ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebsar 100.000 Ha, kondisi ini disebabkan oleh kewenangan provinsi untuk sector minerba telah dialihkan ke pemerintah pusat sehingga dinas ESDM Provinsi hanya melakukan fungsi penyiapan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kegiatan layanan perizinan air tanah dengan metode pemberian rekomendasi teknis pengusahaan air tanah yang didasarkan pada hasil evaluasi dan kajian teknis sebagai pertimbangan dalam proses penerbitan izin usaha pengusahaan air tanah. Semakin banyaknya pelaku usaha melakukan perizinan usaha air tanah sehingga konservasi air tanah demi lingkungan dapat tercapai. Disamping itu pendataan cakupan air tanah berwawasan konservasi sehingga cekungan air tanah menjadi acuan pembuatan tata ruang yang baik. Tahun 2022 luas wilayah izin usaha pertambangan (komoditas batuan, non logam, non logam jenis tertentu) sebesar 130.000 Ha. Penentuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu) mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020 dengan adanya penambahan pelaku usaha pertambangan yang berizin sehingga bertambah luasan. Namun pada tahun 2021 hingga 2022 capaian 0 persen disebabkan karena kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan telah beralih ke pemerintah pusat. Tahun 2019 hingga 2022 penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya mineral dan batubara mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 379.181.399.147 rupiah.

Capaian penggunaan gas rumah tangga di Sulawesi Selatan mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan, kondisi ini disebabkan oleh masih terdapat 10 persen masyarakat pedesaan dan daerah terpencil masih menggunakan kayu bakar dan minyak tanah serta penyediaan gas elpiji 3 kg yang belum mencapai daerah terpencil. Pada tahun 2022 jumlah pengguna gas rumah tangga telah mencapai 93,4 persen baik gas elpiji maupun biogas. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan masyarakat telah beralih dari bahan bakar minyak tanah dan kayu bakar ke gas elpiji untuk kebutuhan rumah tangga, ditunjang dengan makin meratanya jangkauan distribusi elpiji bersubsidi 3 kg hingga ke pelosok-pelosok desa.

Grafik II. 122.
Rumah Tangga Pengguna Gas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

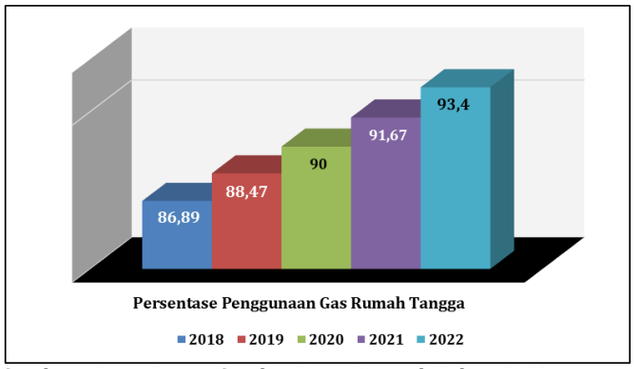

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Tahun 2023

Data capaian kinerja program pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.100.
Capaian Indikator Kinerja Program
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	95,53	97,8	97,53	98,2	99,89
Persentase Desa Berlistrik	(%)	95,8	98,51	98,64	98,49	100
Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah Berbasis Konservasi	(%)	94	98,18	235	100	100
Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	Ha	130	0	0	320	130.000
Penentuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	Ha	3.473,87	3.979,06	5.535,08	0	0
Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	%	86,89	88,47	90	91,67	93,4

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.3.5. Perdagangan

Capaian rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) tahun 2021 menunjukkan nilai 0 yang berarti bahwa tidak terdapat izin usaha perdagangan minuman keras yang dikeluarkan untuk diperdagangkan secara bebas. Tahun 2022 jumlah rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan sejumlah 1 rekomendasi (PT. Sulawesi Sumber Segar) dari 2 rekomendasi yang ditargetkan. Surat keterangan asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) merupakan sertifikat asal barang yang menyatakan asal dari barang yang diekspor. Tahun 2022 jumlah rekomendasi penerbitan SKA sebesar 5.013 dokumen dari target 4.800 dokumen. Capaian ini didukung oleh makin banyaknya pengusaha/eksportir yang memanfaatkan preferensi tarif

yaitu fasilitas pengurangan atau pembebasan bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional serta menigkatnya ekspor komoditi di Sulawesi Selatan.

Sarana distribusi perdagangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan telah tersedia di Sulawesi Selatan. Sarana perdagangan tersebut adalah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, perkulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditas dan sarana lainnya seperti terminal. Olehnya itu capaian untuk persentase ketersediaan sarana distribusi perdagangan adalah 100 persen dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dimana capaian tahun 2022 didukung oleh termanfaatkannya/tersewakan 3 sarana dan prasarana pusat distribusi regional oleh para pengusaha dan UKM yaitu pasar tradisional Jompi'e Pare-Pare, PDR Gudang Kima, dan Ballroom CCC yang mana ketiga sarana tersebut merupakan sumber PAD.

Tahun 2018 hingga 2022 capaian persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya mencapai 100 persen. Hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain: a) Telah dilaksanakan pemantauan harga terhadap 22 komoditi/bahan pokok guna menjaga stabilitas harga di pasaran; b) Telah dilaksanakan pasar murah menyambut hari besar keagamaan di 5 kabupaten yaitu Jeneponto, Bone, Palopo, dan Toraja, dan telah mendistribusikan 1300 paket di masing-masing kabupaten dengan harga per paket sebesar Rp. 50.000,-.

Capaian persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen mengalami tren peningkatan pada tahun 2020 hingga 2022 yang mencapai 88 persen pada tahun 2022. Jumlah barang beredar yang sesuai dengan ketentuan sebesar 26.400 unit dari yang di targetkan sebesar 30.000 unit. Capaian persentaase jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar perdagangan retail pada tahun 2022 sebesar 50 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh karena produk UMKM yang memiliki standar untuk memasuki pasar retail hanya sejumlah 46 pelaku usaha yang tersebar di Gelael, Baji Pamai dan Toko Satu Sama.

Nilai Ekspor Perdagangan tahun 2020 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2022 sebesar 2.358.937.318 US $, melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 1.584.085.320 US $ yang dipengaruhi oleh meningkatnya nilai ekpor khususnya dari sektor tambang Nikel sebesar 1.625.353.632 US $ dengan volume 304.471,48 Ton yang diekspor ke negara China, India, Jepang, dan Korea. Nilai ekspor sub sektor pertanian sejumlah 10 jenis dan sub sektor perikanan sejumlah 17 jenis sebesar 432.567.010,2 US $ dengan volume ekspor 161.072,09 Ton. Sedangkan nilai ekspor sektor industri sejumlah 39 jenis sebesar 300.915.510,89 US $ dengan volume ekspor 279.852.656,13 Ton.

Grafik II. 123.
Nilai Ekspor Perdagangan (US $)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

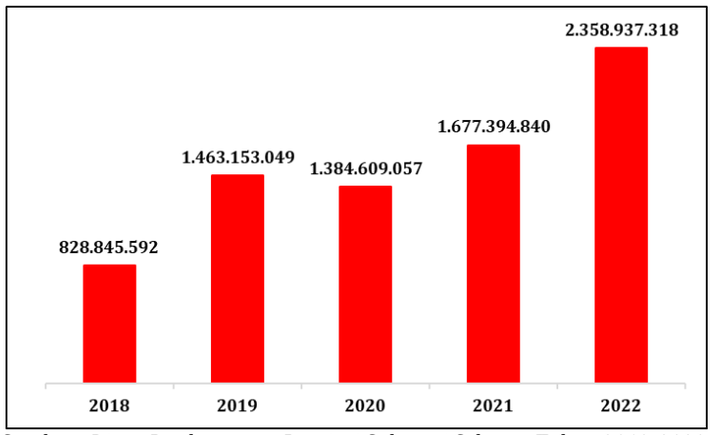

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Data capaian kinerja program pembangunan urusan perdagangan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.101.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	%	20	0	20	0	50
Persentase Penerbitan SKA	%	100	100	100	116,4	104,44
Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	100	100	100	100
Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya	%	100	100	100	100	100
Nilai Ekspor Perdagangan	US $	828.845.592	1.463.153.049	1.384.609.057	1.677.394.840	2.358.937.318
Persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen	%	100	64,53	35,22	75	88
Persentase jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar Perdagangan retail	%	75	75	87,5	100	50

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.3.6. Perindustrian

Capaian persentase pertumbuhan jumlah industri tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dari -11,21 persen pada tahun 2020 menjadi 49,52 persen pada tahun 2021. Kondisi ini disebabkan karena perkembangan industri baru mulai bertumbuh seiring usaha pemulihan ekonomi.

Grafik II. 124.
Perkembangan Jumlah Industri Kecil
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

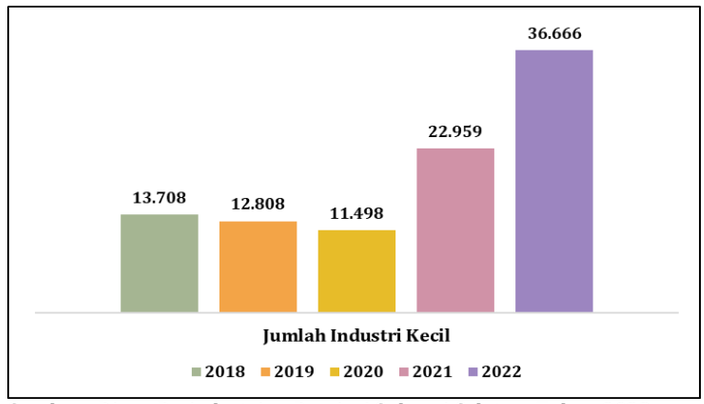

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sulawei Selatan, Tahun 2023

Tahun 2022 capaian persentase pertumbuhan industri sebesar 35 persen dari sejumlah 23.143 unit industri pada tahun 2021 menjadi 35.850 unit industri pada tahun 2022. Pertumbuhan ini didukung oleh maraknya kemunculan start up baru di kalangan generasi muda pasca pandemi dimana lebih banyak memanfaatkan media sosial sebagai media untuk berjualan produk secara online. Hingga tahun 2022 jumlah industri besar sejumlah 75 unit, industri menengah sejumah 109 unit, dan industri kecil sejumlah 36.666 unit.

Grafik II. 125.
Jumlah Industri Kecil Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

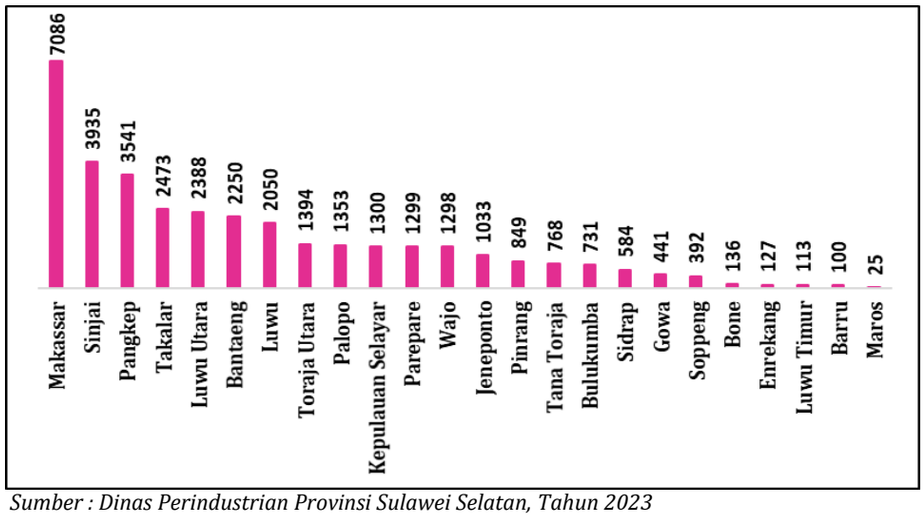

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sulawei Selatan, Tahun 2023

Tahun 2020 hingga 2022 persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 2,1 persen. Hal ini disebabkan banyaknya para pelaku industri utamanya industri kecil yang berlomba-lomba untuk menstandarisasi produknya dengan tujuan untuk menambah peminat dan untuk mengakses pasar yang lebih luas.

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) merupakan suatu mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Tahun 2019 hingga 2022 capaian persentase peningkatan pengelolaan SIINAS mengalami tren

peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 2,2 persen. Peningkatan ini didukung oleh mulai tumbuhnya kesadaran para pelaku industri memanfaatkan pendataan industri untuk membantu mereka untuk mendapatkan fasilitasi dari pihak manapun melalui pendataan SIINAS, namun masih diperlukan usaha-usaha pengelolaan terhadap sistem informasi tersebut agar dapat berfungsi lebih optimal.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan perindustrian tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.102.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perindustrian
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pertumbuhan jumlah industri	%	3,18	-6,92	-11,21	49,52	35,44
Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	%	8	6	1,4	1,78	2,1
Persentase peningkatan pengelolaan SIINAS	%	0	1	1,4	1,97	2,2

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sulawei Selatan, Tahun 2023

2.3.3.7. Transmigrasi

Pada tahun 2022 penempatan transmigrasi sebesar 111 KK yang terdiri dari TPA 60 KK dan TPS 51 KK. Penempatan transmigrasi yaitu: a) UPT Bekkae SP.2 Kabupaten Wajo sebanyak 19 KK TPS; b) UPT Mahalona SP.1 SKPC Kabupaten Luwu Timur sebanyak 50 KK TPA yang terdiri dari Provinsi Lampung sebanyak 10 KK, Provinsi Banten sebanyak 15 KK, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10 KK dan Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 15 KK; c) TPS sebanyak 42 KK UPT Mahalona SP.1 SKPC Kabupaten Luwu Timur. Terlaksananya kegiatan Bimtek Ketransmigrasian di Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur dan terbitnya draft naskah perjanjian kerja sama antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Capaian persentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri sebesar 100 persen melalui kegiatan Pembinaan Usaha Ekonomi Lokasi Transmigrasi di Kimtrans Mahalona SP.1 Kabupaten Luwu Timur, Kimtrans Mahalona SP.1 SKP C Kabupaten Luwu Timur, dan Kimtrans Lantang Tallang Kabupaten Luwu Utara. Capaian persentase ketersediaan data sarana dan prasarana sebesar 100 persen melalui tersedianya Data dan informasi luas lahan permukiman transmigrasi, dan jumlah lokasi transmigrasi.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan transmigrasi tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.103.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penempatan transmigrasi	%	100	100	0	100	100
Persentase Transmigrasi yang dilatih untuk dapat lebih mandiri	%	100	100	100	100	100
Persentase Ketersediaan data sarana dan prasarana transmigrasi	%	100	100	100	100	100
Persentase Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawei Selatan, tahun 2023

2.3.3.8. Kelautan dan Perikanan

Produksi garam rakyat tahun 2018 hingga 2020 mengalami tren fluktuasi dimana capaian tertinggi produksi garam rakyat pada tahun 2019 kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 yang disebabkan karena tingginya curah hujan yang menghambat proses produksi serta bencana banjir yang terjadi pada sentra produksi garam di Sulawesi Selatan seperti di Kabupaten Jeneponto. Dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan pengadaan sarana ionisasi garam bagi kelompok usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar, Pangkajene dan Kepulauan, dan Takalar, serta pengadaan dan sarana prasarana inovasi usaha garam bagi kelompok usaha di Kabupaten Jeneponto, Takalar, dan Kepulauan Selayar. Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengadaan sarana prasarana usaha garam kapasitas 100 ton yang berumber dari DAK di Kabupaten Takalar, Jeneponto, Pangkajene dan Kepulauan.

Capaian persentase pelabuhan perikanan yang memiliki sarana prasarana yang sesuai dengan standar operasional pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini didorong oleh usaha perbaikan sarana pelabuhan perikanan yang terus dilaksanakan baik melalui dukungan anggaran APBD maupun APBN. Nilai produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan ditahun 2021 seiring dengan peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2021. Kondisi ini didorong oleh kontribusi dari komuditi budidaya bandeng dan rumput laut yang cukup baik. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan tahun 2022 mencapai 49,49 persen, meskipun demikian belum mencapai target disebabkan terkendala pada persyaratan administrasi proposal, ketidak sesuaian lokasi yang diusulkan dengan yang dipersyaratkan, kontruksi tambatan perahu yang diusulkan tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia. Upaya yang harus dilakukan adalah koordinasi dengan pihak penyuluh untuk pendampingan dan pembinaan kelompok dan verifikasi awal pemenuhan syarat penerima bantuan.

Luas kawasan konservasi yang dikelola Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2019 hingga 2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 67,29 persen. Kawasan konservasi tersebut terdiri atas: 1) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi Pulau Lanjukang di sebagian perairan sekitar Pulau Lanjukang di Kota Makassar, Pulau Sembilan di sebagian perairan sekitar Kepulauan Sembilan di Kabupaten Sinjai, Pulau Tanakeke di sebagian perairan sekitar Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar, Pulau Panikiang di sebagian perairan sekitar Pulau Panikiang di Kabupaten Barru, Liukang Tangaya di sebagian perairan sekitar Kecamatan Liukang Tangaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pulau Kakabia di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 2) Kawasan konservasi perairan yang meliputi Teluk Bone di Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai, Bilongka di Kabupaten Luwu, Liukang Tuppabiring di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pasi Gusung di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kayuadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tanalili di Kabupaten Luwu Utara, dan kawasan konservasi perairan daerah Malili di Kabupaten Luwu Timur. Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan pada tahun 2022 mencapai 100,19 persen dimana terdapat perubahan data baseline awal yang kemudian disesuaikan dengan luas kawasan konservasi perairan daerah yang telah ditetapkan baik melalui SK Pencadangan KKPD oleh gubernur dan Penetapan KKPD oleh Menteri KKP RI.

Tahun 2019 hingga 2022 capaian persentase pelabuhan perikanan yang memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 68,42 persen yang didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung operasional PPI, penetapan kelembagaan dan petugas kesyahbandaran untuk mengoptimalkan pelayanan di pelabuhan. Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan tahun 2022 antara lain tempat pemasaran ikan di PPI Lonrae Kabupaten Bone, pelelangan ikan di TPI Sumpangbinangae Kabupaten Barru, pembangunan jalan kompleks di PPI Lonrae Kabupaten Bone, tempat pemasaran ikan di PPI Beba Kabupaten Takalar, dan pekerjaan jaringan dan instalasi listrik di PPI Beba Kabupaten Takalar.

Capaian nilai produksi perikanan tangkap terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022 seiring dengan peningkatan nilai hasil tangkapan nelayan. Selain didukung oleh meningkatnya penyediaan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap serta modernisasi alat tangkap bagi nelayan, peningkatan nilai produksi perikanan tangkap merupakan dampak dari peningkatan produksi perikanan tangkap khususnya komoditi Tuna, Cakalang, Tongkol. Tahun 2022 penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap melalui penyediaan kapal perikanan tangkap Kapal > 5 GT untuk kelompok nelayan di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Bulukumba, Luwu, Takalar, serta pengadaan alat tangkap dan mesin untuk kelompok nelayan di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Grafik II. 126.
Nilai Produksi Perikanan (Milyar Rupiah)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

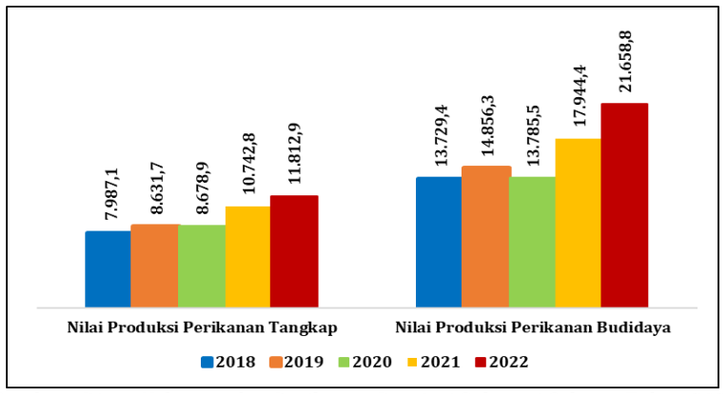

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Nilai produksi perikanan budidaya mengalami tren peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2022 dimana tahun 2022 merupakan nilai produksi perikanan budidaya tertinggi pada periode tersebut yang mencapai 21.658,79 milyar rupiah. Nilai produksi perikanan budidaya yang terus meningkat merupakan dampak dari peningkatan nilai produksi budidaya rumput laut.

Grafik II. 127.
Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

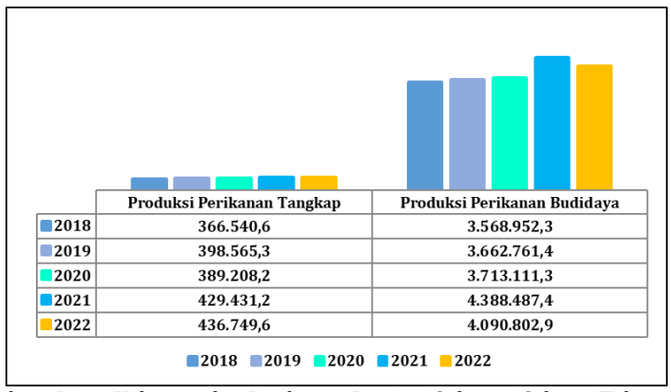

	Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Budidaya
2018	366.540,6	3.568.952,3
2019	398.565,3	3.662.761,4
2020	389.208,2	3.713.111,3
2021	429.431,2	4.388.487,4
2022	436.749,6	4.090.802,9

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Tahun 2019 hingga 2022 produksi perikanan tangkap mengalami tren peningkatan dengan jumlah produksi sebesar 436.749,6 ton pada tahun 2022. Beberapa hal yang diperkirakan berdampak pada peningkatan hasil tangkapan adalah meningkatnya pelayanan dipelabuhan sehingga jumlah kapal yang berlabuh di PPI meningkat dan kegiatan tersebut dapat tercatat dengan baik, bantuan sarana penangkapan ikan kepada 64 kelompok berupa kapal, mesin, alat tangkap (jaring, pancing, purse seine, gill net, perangkap kepiting, alat tangkap pancing rawai) dan alat bantu tangkap (fish finder, rumpon) yang merupakan salah satu bantuan stimulus dalam rangka peningkatkan produksi perikanan tangkap di Kota Makassar, Palopo, Parepare, Kabupaten Maros, Takalar, Luwu Utara, Bantaeng, Luwu, Bulukumba, Bone, Kepulauan Selayar, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, dan Jeneponto.

Tahun 2018 hingga 2021 produksi perikanan budidaya mengalami tren peningkatan sebagai dampak dari aktivitas budidaya perikanan baik budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya ikan air tawar yang berkembang dengan

baik dan didukung oleh usaha mengembalikan kejayaan udang windu yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang mendorong peningkatan hasil budiddaya khususnya udang. Penyediaan sarana percontohan budidaya udang windu di Kota Makassar, Kabupaten Bone, Barru, Bulukumba, Jeneponto, Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Takalar, Wajo, Gowa, dan Sinjai.

Grafik II. 128.
Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

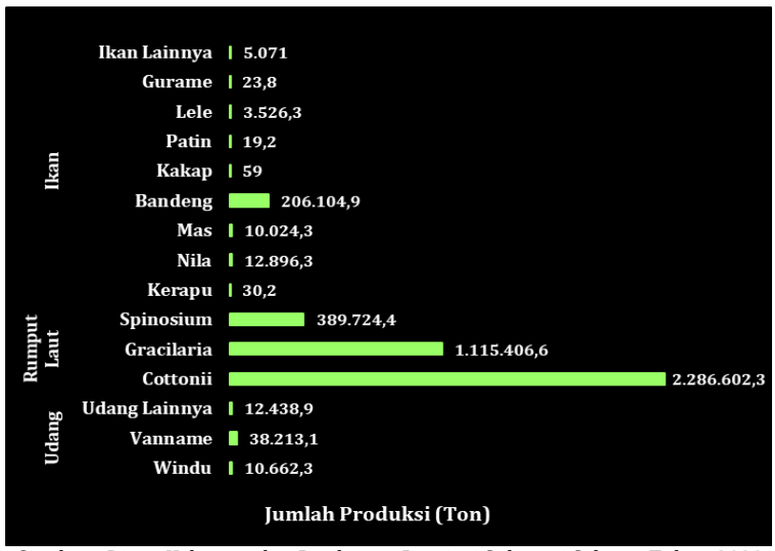

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Untuk mendukung peningkatan produksi budidaya rumput laut, udang dan bandeng dilaksanakan pembinaan kelompok pembudidaya berupa bantuan sarana prasarana rumput laut di Kabupaten Pangkep, Luwu, Luwu Timur, Sinjai, Kepulauan Selayar, Bulukumba, Jeneponto, Takalar, Bantaeng, Luwu Utara, Sinjai, dan Kota Palopo serta bnatuan sarana prasarana udang windu di Kabupaten Bone, Barru, Bulukumba, Jeneponto, Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Takalar, Wajo, Gowa, Sinjai, dan Kota Makassar pada tahun 2022. Namun demikian pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya mengalami penurunan sebesar 297.684,5 ton dari tahun 2021.

Produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan, namun capaian tertinggi persentase produksi kelompok nelayan pada tahun 2018 mencapai 47,66 persen. Pengaruh perubahan cuaca ekstrim yang menghambat aktivitas nelayan dalam melaksanakan kegiatan penagkapan ikan yang sering terjadi menyebabkan terjadinya penurunan produksi kelompok nelayan. Capaian tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa produksi perikanan dari kelompok nelayan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan produksi perikanan yang berasal bukan dari kelompok nelayan seperti perusahaan penangkapan yang diusahakan oleh pihak swasta, serta produksi ikan yang berasal dari kegiatan budidaya perikanan. Jumlah produksi ikan kontribusi kelompok nelayan tahun 2022 mencapai 128.535,41 ton dari total jumlah produksi ikan di daerah sebesar 436.749,6 ton. Produksi ikan, rumput laut dan udang kelompok nelayan tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren peningkatan.

Grafik II. 129.
Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

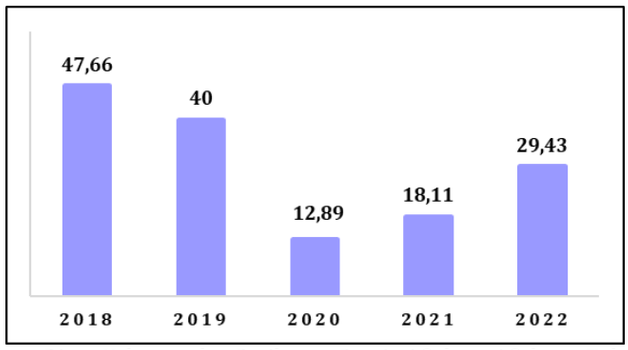

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Grafik II. 130.
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

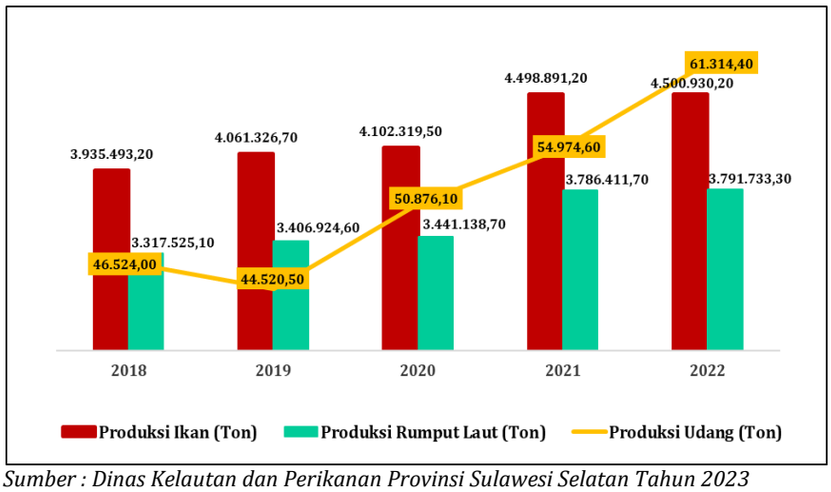

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Persentase ketersediaan benur berkualitas mengalami penurunan pada dua tahun terakhir yang dipengaruhi oleh kondisi perubahan iklim yang cukup ekstrim sehingga mempengaruhi pertumbuhan kualitas benur pada lokasi-lokasi pembenihan yang ada. Selain itu penurunan ketersediaan benur berkualitas dipengaruhi oleh sarana produksi (kolam perbenihan) sedang direhabilitasi, sering terjadi gagal panen akibat serangan penyakit dan fluktuasi suhu yang tidak stabil. Upaya yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan sarana prasarana produksi, meningkatkan kualitas benur dan membuat jaminan bebas virus melalui hasil Uji PCR, monitoring kualitas air secara periodik agar perubahan suhu dapat lebih cepat tertangani dan dikendalikan.

Cakupan bina kelompok nelayan tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuasi dimana capaian tahun 2022 merupakan capaian tertinggi pada periode tersebut yaitu 29,43 persen. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah persyaratan teknis bantuan tidak dapat dipenuhi oleh kelompok yang diusulkan. Selain itu keterbatasan anggaran karena untuk mendukung program prioritas lainnya seperti penyediaan sarana prasarana pelabuhan sehingga pengalokasian anggaran tidak sepenuhnya terpenuhi untuk pembinaan kelompok nelayan. Upaya yang dilakukan untuk mendorong pemenuhan persyaratan kelompok adalah koordinasi dengan pihak kabupaten/kota dan

penyuluhan untuk usulan kelompok nelayan yang sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan.

Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengalami peningkatan disebabkan bertambahnya jenis komponen pelaku usaha yang diperiksa dan bertambahnya pelaku usaha yang diperiksa dengan tingkat kepatuhan yang meningkat. Kendala yang dihadapi adalah dari hasil patroli mayoritas kapal yang diperiksa tidak patuh terkait dokumen/izin kapal. Upaya yang dilakukan adalah membuka gerai perizinan di Pelabuhan dan CDK untuk memudahkan nelayan unuk mengakses pengurusan dokumen kapal/perizinan kapal yang dibutuhkan.

Grafik II. 131.
Nilai Hilirisasi dan Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

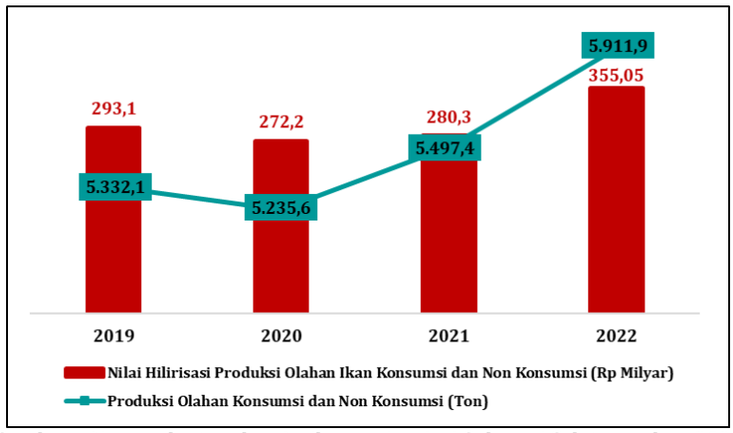

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Capaian nilai hilirisasi produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021, meskipun nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh proses pemulihan ekonomi yang baru mulai pasca pandemic covid 19 ditahun 2021 termasuk halnya disektor perikanan. Tahun 2022 nilai hilirisasi produksi olahan yang terus meningkat dampak dari peningkatan produksi olahan. Selain itu pada tahun 2022 terjadi lonjakan harga produk olahan rajungan.

Capaian produk olahan konsumsi dan non konsumsi dari sektor perikanan menunjukkan capaian telah mengalami peningkatan setelah sebelumnya ditahun 2020 sedikit menurun dibanding capaian tahun 2019 namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021. Hal ini didorong oleh meningkatnya produksi kelompok pengolah hasil perikanan dan pembinaan yang dilakukan untuk mendorong keterampilan masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah produk perikanan dengan menghasilkan olahan berupa keupuk ikan, abon ikan, hasil olahan rumput laut dan lain sebagainya, termasuk hasil olahan non konsumsi seperti kerajinan tangan dari kulit kerang yang mulai dikembangkan khususnya pada obyek-obyek wisata laut. Tahun 2022 produksi olahan konsumsi dan non konsumsi terus meningkat didukung jumlah UPI di Sulawesi Selatan sebanyak 1.353 UPI.

Capaian bina mutu produk perikanan menunjukkan capaian yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022. Saat ini tidak ada

penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan sertifikat kesehatan (health certificate) dikarenakan adanya pelimpahan kewenangan ke UPT BKIPM KKP berdasarkan UU 23 tahun 2014, terdapat peralatan pengujian rusak. Upaya yang akan dilakukan berupa koordinasi dengan pelaku usaha dalam rangka pembinaan dan akan diusulkan alokasi anggaran untuk perbaikan peralatan pengujian.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan kelautan dan perikanan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.104.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Produksi garam rakyat	Ton	86.712	140.338,87	45.310,5	1.155,2	3.282,93
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan	%	0	6,52	8,70	28,28	49,49
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan	Klp	50	55	21	60	86
Jumlah Kelompok nelayan	Klp	311	314	314	314	314
Cakupan Bina kelompok nelayan	%	16,08	17,52	6,69	18,47	27,39
Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	173.412	174.620	50.174,24	77.770,07	128.535,41
Jumlah Produksi ikan di daerah	Ton	366.541	436.551	389.208.20	429.431,20	436.749.6
Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	47,66	40	12,89	18,11	29,43
Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	%	0	67,28	67,29	67,29	100,19
Nilai produksi perikanan tangkap	Rp Milyar	7.987,1	8.631,7	8.678,9	10.742,8	11.812,9
Produksi perikanan tangkap	Ton	366.540,6	398.565,3	389.208,2	429.431,2	436.749,6
Persentase Pelabuhan perikanan yang memiliki sarana prasarana sesuai standar operasional	%	0	15,79	47,37	63,16	68,42
Nilai Produksi perikanan budidaya	Rp Milyar	13.729,4	14.856,3	13.785,5	17.944,4	21.658,79
Produksi perikanan budidaya	Ton	3.568.952,3	3.662.761,4	3.713.111,3	4.388.487,4	4.090.802,9
Persentase ketersediaan benur berkualitas	%	Belum diukur	90	100,65	96,9	78,51
Persentase Kepatuhan pelaku usaha kp terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	Belum diukur	50,13	63,07	69,18	95,15
Nilai Hilirisasi produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp Milyar	Belum diukur	293,1	272,2	280,3	355,05

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi	Ton	0	5.332,1	5.235,6	5.497,4	5.911,6
Persentase Pembinaan mutu produk perikanan	%	-	20,11	40	53,77	69,05

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawei Selatan, Tahun 2023

2.3.4. Penunjang Urusan

2.3.4.1. Sekretariat Daerah

Program prioritas RPJMD Perubahan 2018-2023 sejumlah 63 program yang dilaksanakan oleh 40 perangkat daerah. Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah tahun 2019 hingga 2022 mencapai 100 persen. Pada tahun 2022 Biro Organisasi telah memfasilitasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terbit produk hukum dan rancangan produk hukum terkait penataan kelembagaan perangkat daerah, antara lain :

a. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
b. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c. Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
d. Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
e. Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
f. Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Unit Pengelola Islamic Centre Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
g. Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Unit Pengelola Centre Point Of Indonesia Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
h. Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Unit Layanan Brigade Siaga Bencana Provinsi Sulawesi Selatan;
i. Dokumen Keterangan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

j. Tersusunnya daftar usul Penyesuaian Jabatan Fungsional hasil penyetaraan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
k. Tersusunnya proposal urgensi Rencana Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Urusan pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi melalui kegiatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pelaksanaan otonomi daerah, dan fasilitasi kerjasama daerah tahun 2018 hingga 2022 mencapai 100 persen dimana sejumlah urusan pemerintahan, yaitu:

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial.
b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal dan Investasi, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan.
c. Urusan Pilihan: Pariwisata, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi, Kelautan dan Perikanan.

Segmen batas yang terselesaikan sejak tahun 2019 hingga 2021 yang menjadi urusan Biro Pemerintahan sebagai berikut:

Tabel II.105.
Segmen Batas yang Terselesaikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

No	Segmen	Pengesahan
1	Kab.Maros – Kota Makassar	Permendagri 40 Tahun 2019
2	Kota Makassar – Kab.Takalar	Permendagri 41 Tahun 2019
3	Kab.Gowa – Kab.Maros	Permendagri 42 Tahun 2019
4	Kab.Jeneponto – Kab.Takalar	Permendagri 77 Tahun 2019
5	Kota Pare-Pare – Kab.Sidrap	Permendagri 42 Tahun 2020
6	Kab.Pinrang – Kab. Sidrap	Permendagri 43 Tahun 2020
7	Kab.Enrekang – Kab. Sidrap	Permendagri 44 Tahun 2020
8	Kab.Wajo – Kab. Luwu	Permendagri 14 Tahun 2021
9	Kab.Bone – Kab. Sinjai	Permendagri 15 Tahun 2021

Sumber: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Prov.Sulsel, Tahun 2023

Tahun 2022 tidak ada segmen batas yang terselesaikan dimana sejumlah 21 segmen masih dalam tahapan Penetapan Permendagri serta sejumlah 16 segmen batas tahapan penyusunan Draft Permendagri, sehingga masih membutuhkan fasilitasi rapat pembahasan dengan tim PBD Pusat, PBD Provinsi, dan PBD Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2020 persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan mencapai 90,59 persen, namun pada tahun 2021 hanya mencapai 80 persen. Hal tersebut disebabkan karena terdapat rumusan kebijakan yang masih dalam proses yaitu pemberian diskon penerbangan

untuk ruter penerbangan Balikpapan-Tana Toraja. Faktor Pendukung peningkatan persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan adalah pelaksanaan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dapat dimaksimalkan. Tahun 2019 dan 2020 bantuan hibah yang diberikan hanya untuk sarana keagamaan, masing-masing sejumlah 130 bantuan hibah sarana keagamaan pada tahun 2019 dan sejumlah 24 bantuan hibah sarana keagamaan pada tahun 2020. Tahun 2021 bantuan hibah sebesar Rp. 8.545.000.000,- diberikan kepada sejumlah 32 lembaga keagamaan, Rp. 31.397.000.000,- diberikan kepada sejumlah 287 sarana keagamaan, serta Rp. 5.750.000.000,- diberikan kepada 12 lembaga pendidikan. Tahun 2022 dihasilkan 8 dokumen rumusan kebijakan dari 9 dokumen yang ditargetkan atau dengan capaian 88,89 persen. Sedangkan bantuan hibah sebesar Rp. 13.135.000.000,- diberikan kepada 34 lembaga keagamaan, Rp. 20.860.000.000,- diberikan kepada sejumlah 231 sarana keagamaan, serta Rp. 3.250.000.000,- diberikan kepada sejumlah 5 lembaga pendidikan pada tahun 2022.

Tahun 2018 hingga 2022 persentase penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Qur'an mengalami tren peningkatan. Namun pada tahun 2020 seiring dengan pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia mengakibatkan pergerakan masyarakat yang dibatasi termasuk dunia Pendidikan sehingga mengalami penurunan -4,17 persen dari tahun 2019 yang kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 setelah pemerintah mulai melonggarkan pergerakan masyarakat. Faktor Pendukung Peningkatan Persentase usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al Quran, antara lain: a) Kebijakan pemerintah untuk mewajibkan calon siswa tingkat SMP untuk menyetorkan sertifikat mengaji; b) Peningkatan sarana prasarana rumah ibadah (masjid) melalui bantuan hibah.

Pada tahun 2022 penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran mencapai 45,94 persen dimana penduduk perempuan usia 15 tahun ketas yang melek aksara Al-Quran sebesar 46,69 persen lebih tinggi daripada penduduk laki-laki usia 15 tahun ketas yang melek aksara Al-Quran sebesar 45,14 persen. Angka penduduk usia 15 tahun ketas yang melek aksara Al-Qur'an pada tahun 2022 tertinggi di Kabupaten Soppeng dengan capaian 77,65 persen serta yang terendah di Kabupaten Toraja Utara sebesar 2,3 persen dan Tana Toraja sebesar 3,65 persen karena mayoritas penduduk di kabupaten tersebut non muslim. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II. 132.
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Melek Aksara Al-Qur'an
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

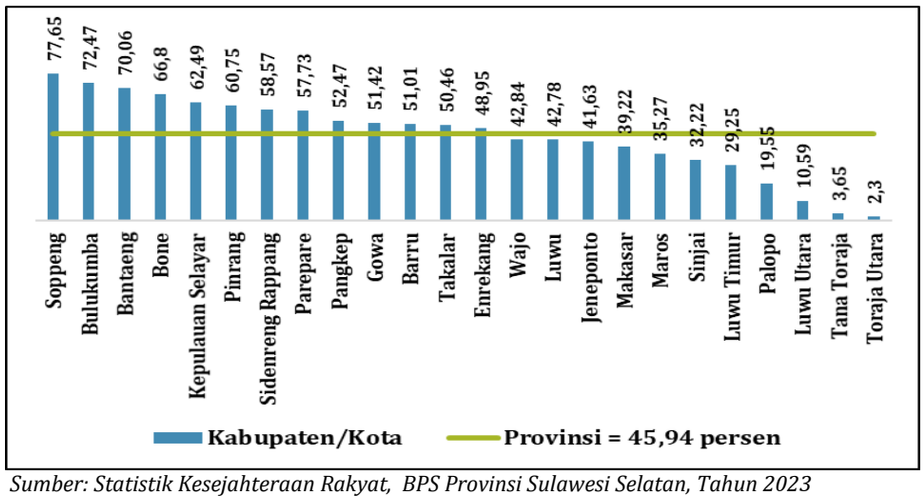

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Kejahatan kesusilaan di Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuasi dimana berdasarkan data statistik kriminal, diperoleh jumlah kasus kejahatan kesusilaan pada tahun 2018 sebesar 316 kasus, kemudian meningkat menjadi 371 kasus pada tahun 2019. Pada tahun 2020 sebagaimana data yang dirilis BPS melalui Statistik Politik dan Keamanan Sulawesi Selatan akumulasi kejahatan pemerkosaan dan kesusilaan sebanyak 305 kasus. Tahun 2021 jumlah kasus jahatan terhadap kesusilaan mengalami penurunan sebanyak 208 kasus kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 sejumlah 302 kasus kejahatan. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kesusilaan yang ada ditengah-tengah masyarakat tentu merupakan hal yang positif, meskipun dari hal tersebut ikut mempengaruhi peningkatan kasus kesusilaan yang dilaporkan, namun secara tidak langsung dapat mempengaruhi penurunan kasus kedepannya, karena dengan adanya laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan penangkapan pelaku untuk selanjutnya diproses secara hukum.

Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi pada penataan peraturan perundang-undangan dicapai melalui upaya pemenuhan dokumen pendukung untuk penilaian reformasi birokrasi pada penataan peraturan perundang-undangan yang meliputi: a) Menginventarisasi dan mengidentifikasi Perda tahun 2018-2020; b) Inventarisasi 22 Pergub yang telah dicabut; c) Identifikasi Perda yang tidak harmonis sejumlah 10 Perda; d) Tindak lanjut hasil identifikasi Perda yang tidak harmonis; e) Menyusun Analisis Kebutuhan Perda tahun 2023; dan f) Menyusun Daftar Perda dan Pergub tahun 2022. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Nomor B/741/RB.06/2022 Tanggal 6 Desember 2022, Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, maka dapat diketahui untuk komponen penilaian Pengungkit terdapat peningkatan kualitas hasil antara pada tahun 2022 meskipun tidak tercantum nilai penataan peraturan perundang-undangan pada dokumen hasil penilaiaan, namun nilai dari reformasi hukum yang dikeluarkan oleh kemenkumham diperoleh nilai sangat memuaskan, sehingga nilai untuk penataan peraturan perundang-

undangan telah memenuhi target RPJMD untuk tahun 2022 dengan nilai 4 pada penataan peraturan perundang-undangan.

Capaian indikator persentase perkara hukum yang difasilitasi pada tahun 2018 hingga 2022 mencapai 100 persen melalui pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah hukum dan fasilitasi penyelesaian masalah non litigasi dan HAM. Jumlah Perkara yang ditangani Biro Hukum pada tahun 2022 sejumlah 21 perkara yang terdiri atas 4 perkara PTUN dan 17 Perkara Perdata. seluruh perkara telah ditangani oleh Biro Hukum diantaranya: a) Perkara perdata yang sementara proses PK tergugat sejumlah 3 perkara; b) Perkara Perdata Sementara proses Kasasi penggugat sejumlah 1 perkara; c) Perkara Perdata sementara proses banding tergugat sejumlah 4 perkara; dan d) Perkara perdata sementara proses Pengadilan Negeri Makassar sejumlah 3 perkara. Sedangkan sejumlah 9 perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Mengalami tren peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022 dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,32 persen capaian indikator rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan dicapai melalui penguatan ketersediaan pasokan di kabupaten/kota dengan melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk memenuhi kebutuhan pangan strategisnya. Bupati/Walikota dan Anggota TPID senantiasa memantau harga pangan agar stabilitas pangan kabupaten/kota terkendali. Untuk menjaga stabilitas pangan strategis maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat melaksanakan operasi pasar dan pasar murah yang bekerjasama dengan Bulog, distributor dan agen dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pada Hari Besar Keagamaan. Perlunya pengawasan dilaksanakan oleh TPID Provinsi, Kabupaten/Kota dan Satgas Pangan, sehingga tidak terjadi penimbunan komoditas pangan yang dapat menyebabkan inflasi. Mendorong digitalisasi Sistem Informasi Harga Pangan yang mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha. Bersama dengan FORKOPIMDA melakukan pengawasan terhadap penyaluran, Ketersediaan, Stabilitas Harga dan Ketersediaan BBM dan gas Elpigi 3 kg baik di Sulawesi Selatan. Bupati/Walikota bekerjasama dengan ulama/pemuka agama agar masyarakat tidak melakukan konsumsi yang berlebihan selama Natal dan Tahun Baru. Bupati/Walikota melakukan MOU dengan Bulog terkait penjualan beras bagi ASN agar dapat mendorong penyerapan gabah di kabupaten/kota.

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah yang menjadi tonggak capaian lima tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan target pembangunan. Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah sebesar 98 persen selama 3 tahun terakhir melalui pelaksanaan program Ranperda Perubahan Penyertaan Modal Pemda, Ranperda Perubahan Bentuk Perusda Agribisnis ke Perseroda, Ranperda Pendirian PI, Pergub tentang Optimalisasi Manajemen RS dengan sistem BLUD. Tersedianya dokumen pendukung kebijakan Bidang Perekonomian, dokumen pendukung kebijakan Bidang Pelayanan Dasar, dokumen pendukung kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar, meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah,

meningkatnya capaian kinerja Program Perangkat Daerah, serta terpenuhinya Tindak Lanjut Hasil Temuan LHP (temuan bahan material).

Capaian target persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana pembangunan daerah pada tahun 2021 sebesar 99,94 persen belum mencapai target yang ditetapkan. Faktor penghambat pencapaian target antara lain kurangnya ketelitian admin SiRUP dalam melakukan penginputan kegiatan yang akan dilelang/dipihakketigakan. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya capaian persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana pada tahun 2022 mencapai 100 persen dimana pengadaan berdasarkan RUP yang diusulkan masing-masing OPD sudah berproses melalui UKPBJ sehingga capaianpengadaan barang/jasa mencapai target yang ditetapkan. Jumlah paket pengadaan di SIRUP sebesar 12.133 paket yang terdiri dari 243 paket proses tender/seleksi, 9.033 paket pengadaan langsung, 94 paket penunjukan langsung, 2.685 paket ePurchasing, dan 78 paket dikecualikan.

Tahun 2021 capaian persentase kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa belum mencapai target dengan capaian 99 persen disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya: a) masih terdapat kekurangan dalam penyelesaian masalah, b) prasarana dan sarana yang belum memadai, c) keterbatasan petugas pelayanan. Mengalami penurunan sebesar 0,34 persen dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 persentase kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa sebesar 98,66 persen. Dalam penilaian survey kepuasan pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa tahun 2022 dimana persentase survey kepuasan layanan mencapai nilai rata-rata 98,66 persen diperoleh pada pengisian survey layanan. Berdasarkan nilai yang dicapai, maka dalam hal pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nilai persentase kepuasan layanan yaitu adanya pertambahan pengguna layanan sedangkan sarana dan prasara kurang memadai. Tahun 2022 capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan dengan nilai 72,40 dengan kategori BAIK, mengalami peningkatan nilai indeks dari tahun 2021 dengan nilai 71,55 dengan kategori BAIK.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan sekretariat daerah tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.106.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	%	Belum dilakukan pengukuran	100	100	100	100
Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	%	100	100	100	100	100
Persentase Rumusan	%	Belum dilakukan	Belum dilakukan	90,59	80	88,89

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan		pengukuran	pengukuran			
Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran	%	36,36	36,67	35,14	39,22	45,94
Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan	%	316 kasus	17 (371 kasus)	20 (305 kasus)	34,17 (208 kasus)	4,43 (302 kasus)
Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan	Angka	2,29	2,4	2,4	3,9	4
Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan	%	60	65	70	75	79,32
Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah	%	97	97	98	98	98
Persentase Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana pembangunan daerah	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	99,94	100
Persentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	99	98,66

Sumber: OPD Lingkup Sekretariat Daerah, Tahun 2023

2.3.4.2 Sekretariat Dewan

Waktu pembahasan setiap RNAPERDA dan konsultasi ke Kementerian dan Lembaga dalam proses pembahasannya yang cukup lama sehingga persentase PROLEGDA yang terealisir belum mecapai target pada tahun 2021 atau sebesar 73,33 persen. Ketidaksiapan OPD pemrakarsa Ranperda dalam menyiapkan dokumen Naskah Akademik dan Draft Ranperda sebagai kelengkapan dalam pengajuan Ranperda serta Ranperda yang diajukan tidak tepat sehingga pada tahun 2022 persentase PROLEGDA yang terealisasi mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 2,23 persen atau dengan capaian sebesar 73,33 persen.

Seluruh program kerja DPRD terintegrasi dengan RPJMD 2018-2023 dan RKPD sehingga capaian target kinerja tahun 2018 hingga 2022 mencapai 100 persen.

Salah satu tugas DPRD adalah pembahasan rancangan PERDA sebelum ditetapkan diantaranya KUA PPAS dan APBD. Capaian kinerja persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya tahun 2018 hingga tahun 2020 mencapai 100 persen namun mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan

capaian 75 persen. Jumlah Ranperda yang terproses pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) berjumlah 18 Ranperda dengan rincian sejumlah 11 Ranperda telah selesai dibahas, sejumlah 2 Ranperda masih dalam tahapan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah 5 Ranperda dalam tahap konsultasi di Kemendagri sehingga capaian persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya pada tahun 2022 mencapai 100 persen.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan sekretariat dewan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.107.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sekretariat Dewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PROLEGDA yang terealisir	%	3,33	81,25	37,5	75	73,33
Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD	%	100	100	100	100	100
Persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya	%	100	100	100	75	100

Sumber : Sekretariat Dewan Provinsi Sulawei Selatan, Tahun 2023

2.3.4.2. Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 terdapat 223 (dua ratus dua puluh tiga) Program dan berdasarkan Peraturan Daerah No 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 terdapat 223 program.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 terdapat 223 program dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 8) terdapat 222 program.

Tahun 2022 persentase peningkatan capaian kinerja program seluruh perangkat daerah sebesar 0,5 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pencapaian target didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan setiap triwulan serta koordinasi antara TAPD dan Perangkat Daerah yang dilakukan secara rutin.

Kesesuaian Program Perangkat Daerah terhadap Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada tahun 2022 telah mencapai target tahunan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor pendukung dimana terjalinnya koordinasi yang baik antara OPD mitra pelaksana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mulai dari tahap Penyusunan sampai Monitoring dan Evaluasi.

Kesesuaian Program Perangkat Daerah terhadap Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA pada tahun 2022 telah mencapai target tahunan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor pendukung dimana terjalinnya koordinasi yang baik antara OPD mitra pelaksana Bidang Ekonomi dan SDA mulai dari tahap Penyusunan sampai Monitoring dan Evaluasi.

Kesesuaian Program Perangkat Daerah terhadap Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada tahun 2022 telah mencapai target tahunan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor pendukung dimana terjalinnya koordinasi yang baik antara OPD mitra pelaksana Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mulai dari tahap Penyusunan sampai Monitoring dan Evaluasi.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan perencanaan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.108.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perencanaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan APBD	%	100	100	100	100	100
Persentase peningkatan capaian kinerja program	%	-8,62	5,54	-8,49	3,68	0,5
Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang PPM	%	100	100	100	100	80
Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan SDA	%	100	100	100	100	90
Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	99	90

Sumber : BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawei Selatan, Tahun 2023

2.3.4.3. Keuangan

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Persetujuan bersama Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai aturan yang

ada yakni disetujui bersama pada tanggal 30 November 2022. Hal ini dapat dicapai melalui dukungan, kordinasi dan sinergi yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta kerja sama yang baik dengan pihak legislatif DPRD Provinsi, sehingga Ranperda APBD dapat disetujui bersama tepat waktu yakni 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota. Berdasarkan capaian tahun 2022 ini terlihat bahwa 24 kabupaten/kota telah menyampaikan Ranperda dan Ranperkada APBD tepat waktu hal ini di dorong dengan komitmen yang tinggi dari kabupaten/kota untuk dapat menyampaikan Ranperda dan Ranperkada APBD sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Berdasarkan capaian tahun 2022 sejumlah 24 kabupaten/kota telah menyampaikan Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban APBD tepat waktu hal ini di dorong dengan komitmen yang tinggi dari kabupaten/kota untuk dapat menyampaikan Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban APBD sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan data realisasi belanja daerah tahun 2022 hingga Desember dari alokasi belanja daerah sebesar Rp. 9.561.417.164.808,00, telah terealisasi sebesar Rp. 8.957.991.587.570,32 atau capaian sebesar 93,69 persen. Dari capaian tersebut terlihat bahwa Persentase Serapan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik dan di harapkan mampu mencapai target setelah Realisasi Belanja APBD Audited, Kemampuan daerah untuk menyerap belanja sesuai target sangat di tentukan oleh pencapaian target pendapatan. Realisasi Belanja pada APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 menunjukkan kenaikan yang signifikan hingga awal Desember pada akhir tahun anggaran 2022. Persentase serapan belanja daerah tahun anggaran 2022 akan terus naik dengan pengimputan realisasi pada tiap-tiap OPD perangkat Daerah terkhusus pada pengimputan realisasi Dana Bantuan Operasional Pendidikan baik di Lembaga Pendidikan maupun Bantuan Operasional Sekolah sehingga Persentase serapan

belanja daerah dapat mencapai target 95 persen. Pencapaian realisasi anggaran ini tidak lepas dari komitmen pimpinan terkait kinerja pendapatan dan percepatan serapan anggaran disetiap OPD yang terkait dengan priorotas dan target rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan capaian tahun 2022 Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai aturan yang ada yakni penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat waktu . Hal ini dapat di capai dengan adanya dukungan, koordinasi dan sinergi yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kerja sama yang baik dengan pihak legislatif DPRD Provinsi, sehingga Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dapat disampaiakan tepat waktu yakni 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Manajemen Aset daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan area intervensi yang mengelola dan menentukan rentang dan tingkat aset yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategis dan target kinerja pengelolaan barang milik daerah yang ingin dicapai. Dilihat dari data manajemen aset daerah badan keuangan dan aset daerah pada area intervensi yang terbagi dari beberapa indikator antara lain data base aset, pengelolaan aset, sertifikasi aset dan penertiban aset yang mencapai 91,53 persen yang telah mencapai target yang telah di tentukan. Pencapaian ini tidak lepas dari proses pengelolaan, inventarisasi dan penatausahaan barang milik daerah serta peran dari tiap-tiap perangkat daerah yang aktif dalam mendukung kegiatan rekonsiliasi aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Terkait dengan bidang tanah yang bersertifikat, Sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan permohonan penerbitan Sertifikat tanah kepada 24 Kepala Kantor Pertananahan Kabupaten/Kota, progres persertifikatan tanah pemerintah provinsi Sulawesi selatan berjumlah 916 bidang tanah dengan rincian 742 bidang tanah yang telah bersetifikat dan 174 bidang tanah yang belum bersertifikat. Persentase Tanah Pememerintah Provinsi yang Telah bersertifikat yang di targetkan dalam dokumen perencanaan telah mencapai target dengan capaian 81,04 % Dari capaian kinerja yang telah dihasilkan. Ada beberapa faktor yang mendorong pencapaian tersebut antara lain dukungan dari Korsupgah KPK melalui Rencana Aksi Program Penertiban Aset Daerah, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) atas penanganan hukum secara litigasi/non litigasi terhadap penyelesaian aset bermasalah serta Badan Pertanahan Nasional melalui MoU Bidang Pertanahan yang memperlancar proses inventarisasi dan pengamanan dari aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pihak ketiga. Selain

itu, SDM yang dimiliki oleh BKAD dan pengelola barang di seluruh OPD lingkup Pemprov SulSel juga turut andil dalam membantu menghimpun dan menertibkan administrasi pengelolaan barang dan aset daerah yang dimiliki dengan memanfaatkan sistem informasi. Meskipun demikian masih ada juga beberapa faktor penghambat yang dirasakan dalam pengelolaan aset ini yakni terkait masih adanya beberapa bidang aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tumpang tindih dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota telah mensertifikatkan lahan tersebut, demikian juga beberapa aset milik Pemerintah yang dikuasai ataupun diserobot oleh Pihak Ketiga bahkan ada yang telah mensertifikatkan selain atas nama Pemerintah Provinsi.

Capaian untuk indikator opini BPK terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 menunjukkan capaian yang yang sesuai target yang diharapkan yaitu WTP setelah sebelumnya mendapat opini WDP. Hal ini disebabkan oleh penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntabilitas pemerintah, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung pada material serta lancer dalam melakukan pengendalian intern yang memadai. Opini BPK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 hingga 2021 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.109.
Opini BPK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	%	WTP	WTP	WDP	WTP	Belum Rilis

Sumber: BPK RI, 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian Pendapatan Daerah dibandingkan dengan komponen pendapatan transfer dan komponen lain lain Pendapatan Daerah yang sah, hal ini menunjukkan kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. AD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Setelah merebaknya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan PAD pada tahun 2020, pengelolaan PAD pada tahun 2021 berhasil meningkat kembali sebagai dampak titik balik mulai pulihnya perekonomian negara dan daerah. Hal ini tergambar dari persentase peningkatan PAD tahun 2021 dari target sebesar 5 persen, dapat dicapai sebesar 14,88 persen. Realisasi penerimaan PAD tahun 2021 juga telah melampaui realisasi PAD pada masa sebelum pandemi di 2019. Capaian persentase peningkatan PAD tersebut ditunjang oleh pertumbuhan pembayaran pajak yang merupakan hasil upaya digitalisasi pembayaran pajak secara non tunai diantaranya melalui QRIS yang sejalan dengan kebutuhan wajib pajak di masa pandemi. Pertumbuhan penerimaan

pajak daerah juga ditunjang kenaikan harga nikel serta membaiknya mobilitas masyarakat yang berdampak pada naiknya konsumsi BBM. Selain pajak daerah, pertumbuhan PAD yang tinggi pada tahun 2021 juga didukung meningkatnya penerimaan sektor Lain-Lain PAD yang Sah berupa pembayaran klaim pada unit-unit Rumah Sakit Daerah yang berstatus BLUD serta hasil upaya optimalisasi melalui pemanfaatan aset-aset daerah yang berpotensi PAD melalui mekanisme sewa Barang Milik Daerah.

Grafik II. 133.
Realisasi Pendapatan pada UPT Pendapatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

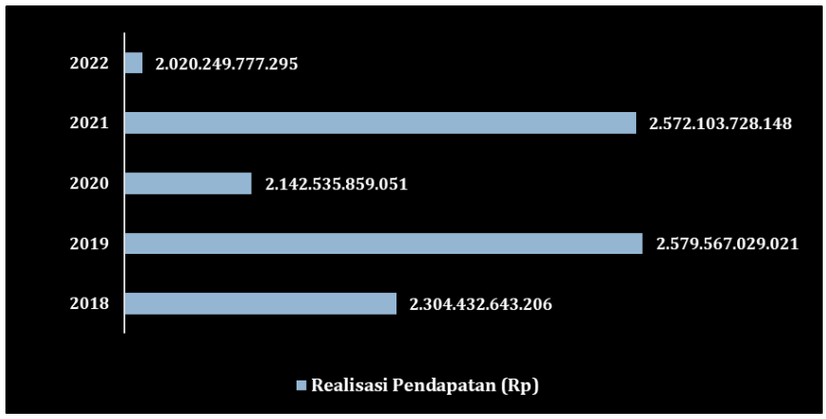

Sumber : Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Tahun 2022 persentase PAD terhadap Pendapatan mengalami peningkatan sebesar 21,16 persen dari tahun 2021 atau dengan capaian sebesar 54,1 persen. Secara Umum Capaian Pendapatan yang dikelola masing masing UPT Pendapatan telah mencapai target sesuai yang diharapkan dengan capaian 97,47 persen pada periode Desember tahun 2022 dengan total realisasi pendapatan pada UPT pendapatan kabupaten/kota sebesar Rp. 2.020.249.777.298,-.

Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 menunjukkan peningkatan sebesar 3,11 poin dari capaian tahun 2020. Berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, terdapat 4 komponen penyusun pendatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari keempat komponen tersebut, factor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 adalah komponen pajak daerah yang mengalami peningkatan 14,88 persen dan komponen retribusi daerah dengan peningkatan sebesar 14,39 persen.

Tabel II.110.
Persentase PAD Terhadap Pendapatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	42,67	43,23	41,54	44,65	54,1

Sumber : Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Realisasi PAD tahun 2022 sebesar Rp. 4,86 Trilyun atau sebesar 94,38 persen dari target sebesar Rp. 5,15 Trilyun. Meski tidak mencapai 100 persen, namun dibandingkan tahun 2021 terjadi peningkatan PAD sebesar Rp. 457,63 Trilyun atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,83 persen. Pajak Daerah berkontribusi sebesar 88,5 persen atas peningkatan PAD tahun 2022 dengan peningkatan terbesar bersumber dari jenis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kegiatan Masyarakat berupa angka, yang ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Untuk mendapatkan nilai IKM, yakni dengan membagi antara total dari nilai persepsi per unsur dengan total unsur yang terisi, lalu hasilnya dikalikan nilai penimbang. Nilai IKM atas pelayanan pajak kendaraan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022 dengan capaian 79,98 persen pada tahun 2022.

Tabel II.111.
IKM Pekayanan Pajak Kendaraan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
IKM Pelayanan Pajak Kendaraan	%	Belum disurvey	77,1	76,63	79,26	79,98

Sumber : Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu di bidang pendapatan PAD tahun 2018 hingga 2022 mencapai 100 persen disebabkan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja telah dianalisis, disusun dan disahkan sebelum batas waktu yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan laporan dapat direviu oleh atasan dan menghasilkan laporan yang berkualitas.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan keuangan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.112.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Keuangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota dalam menyampaiakan Ranperda dan Ranperkada APBD untuk dievaluasi tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Tingkat Kepatuhan	%	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi tepat waktu						
Persentase Serapan Belanja Daerah	%	96,37	95,58	88,87	94,5	93,69
Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	91,53	91,53
Persentase Tanah Pemprov yang sudah bersertifikat	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	56,22	81,62
Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD	%	100	100	100	100	100
Persentasi Peningkatan PAD	%	7,33	4,82	-6	14,06	9,58

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.4.4. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren fluktuatif dimana capaian tahun 2022 sebesar 63 persen belum mengalami peningkatan dari tahun 2021. Pemenuhan Kebutuhan ASN dilakukan secara terbuka dan kompetitif melalui jalur CASN yaitu CPNS dan PPPK baik PPPK jabatan fungsional guru maupun PPPK jabatan fungsional lainnya. Pada tahun 2021, telah dibuka sekitar 349 formasi jalur CPNS, 63 Formasi jalur PPPK Jabatan Fungsional dan 8.350 formasi untuk jalur PPPK Jabatan Fungsional Guru. Tahun 2022 telah dibuka sekitar 10.463 Formasi jalur PPPK, 49 Formasi jalur PPPK Jabatan Teknis, 10,385 formasi untuk jalur PPPK Jabatan Fungsional Guru dan 29 formasi untuk jalur PPPK tenaga kesehatan. Penetapan formasi ini berdasarkan jenis jabatan dengan mempertimbangkan kebutuhan unit kerja, Jumlah ASN yang akan pensiun, Anjab dan ABK, serta prioritas pembangunan/potensi daerah. Adanya komitmen pimpinan dan staf, budaya organisasi serta peraturan-peraturan petunjuk pelaksanaan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pengadaan CPNS maupun PPPK dalam rangka pemenuhan kebutuhan ASN sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Persentase ASN yang menduduki jabatan Strukutural dan Fungsional Berbasis Talenta Tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dimana

pada tahun 2022 mencapai 90 persen meningkat sebesar 7,45 persen dari tahun 2021 melalui pelaksanaan Assestment terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Jenjang Madya, Muda dan Pertama. Persentase ASN yang menduduki jabatan Strukutural dan Fungsional Berbasis Talenta tahun 2021 sebesar 83,76 persen meningkat sebesar 1,76 poin dari tahun 2020 sebesar 82 persen melalui pelaksanaan Assestment terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Jenjang Madya, Muda Dan Pertama. Pelaksanaan Assement ini dilaksanakan terhadap Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana yang potensial dalam Pengisian Talent Pool dan Talent management telah di laksanakan sejak tahun 2020 guna mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas. Dimana ASN sebagai tokoh utama dalam menjalankan tugas pemerintahan wajib memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pada tahun yang akan datang.

Dengan berlakuknya Permenpan No.8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS diperlukan dukungan perangkat daerah untuk menyelesaikan penilaian pada masing-masing indikator penilaian yang terdapat pada aplikasi e-kinerja. Persentase ASN Berkinerja Baik dan Sangat Baik tahun 2021 sebesar 90,38 persen meningkat sebesar 0,38 poin dari tahun 2020 sebesar 90 persen disebabkan realisasi capaian kinerja pegawai secara kualitatif tercapai dan di tahun 2021 jumlah ASN mengalami Penurunan hal ini disebabkan adanya ASN yang sudah memasuki Usia Pensiun. Pada Tahun 2020 Jumlah ASN Berkinerja Baik dan Sangat Baik sebanyak 8.801 Orang mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 8.852 Orang. Persentase ASN Berkinerja Baik dan Sangat Baik tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren peningkatan selama 3 tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,86 persen dengan capaian sebesar 93 persen pada tahun 2022. Peningkatan ini didukung oleh realisasi capaian kinerja pegawai secara kualitatif tercapai dan pada tahun 2022 jumlah ASN mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah ASN Berkinerja Baik dan Sangat Baik sejumlah 8.852 Orang dan pada tahun 2022 sejumlah 9.728 Orang.

Mengalami peningkatan 1,12 poin dari tahun 2020 capaian target SDM aparatur yang lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural mencapai 100 persen pada tahun 2021. Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur diperlukan penyusunan regulasi terkait norma standar prosedur dan kriteria pengembangan SDM. Jumlah Pejabat Struktural 1.575 orang, jumlah ASN Provinsi Sulawesi Selatan 22.975 orang, jumlah peserta yang telah mengikuti Diklat 262 orang. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2021 sebesar 0,17 persen. Cakupan SDM Apatatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural mengalami tren peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022 yang mencapai 100 persen pada tahun 2022. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh terbentuknya model maupun metode baru terkait dengan pengembangan kompetensi ASN (Corporate University) serta mengimplementasikan sistem diklat satu pintu dimana BPSDM merupakan sebagai leading sektor dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.113.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN	%	Belum diukur	57	56	63	63
Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta	%	Belum diukur	80	82	83,76	90
Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	Belum diukur	88	90	90,83	93
Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	%	87,3	89,58	98,88	100	100

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.4.5. Penelitian dan Pengembangan

Pencapaian target indikator implementasi rencana kelitbangan disebabkan oleh kesesuaian program kelitbangan yang direncanakan pada RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 dengan program kelitbangan yang diturunkan ke RKPD Perubahan Tahun 2022. Sejumlah 17 kegiatan kelitbangan yang ditindaklanjuti pada tahun 2022. Pengalokasian anggaran pada Bidang Penelitian dan Pengembangan didominasi oleh kegiatan penelitian dan pengembangan yang disesuaikan dengan permasalahan dalam pembangunan di Sulawesi Selatan serta kebutuhan bahan rumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sejumlah 18 inovasi perangkat derah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan yang terkirim ke Kementrian Dalam Negeri dibagi dengan 43 inovasi yang diusulkan dalam rangka pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID). Jumlah inovasi baik yang terkirim maupun yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan antusias dalam menghasilkan inovasi serta didukung oleh keseriusan Bappelitbangda mewujudkan pemerintah daerah yang inovatif melalui Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah dan Bimbingan Teknis/Coaching Penginputan IID. Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan penghargaan kepada 6 OPD terinovatif pada Lomba Inovasi Tingkat OPD Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Bappelitbangda.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan penelitian dan pengembangan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.114.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	%	11,32	11,32	5,67	11,32	11,32

Sumber: BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.4.6. Pengawasan

Capaian persentase penyelesaian tindak lanjut perangkat daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP tahun 2020 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 76,29 persen melampaui jumlah target tahun 2022 sebesar 75.4 persen. Hal ini dipengaruhi oleh adanya komitmen inspektorat dan perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung dengan regulasi dan peran komitmen pimpinan. Penyelesaian Tindaklanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP dilakukan dengan menyusun kegiatan monitoring ataupun koordinasi tindaklanjut sebagai upaya koordinasi intensif pengelolaan tindaklanjut dengan seluruh perangkat kerja.

Capaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota mengalami tren fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022 dengan capaian sebesar 69,55 persen mengalami penurunan sebesar 0,49 poin dari tahun 2021 yang mencapai 70,04 persen serta belum mencapai target yang ditetapkan. Belum tercapainya target persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan Umum dan teknis kabupaten/kota disebabkan beberapa LHP atas Pemeriksaan Reguler kabupaten/kota terbit diakhir tahun sehingga belum dapat tertindaklanjuti sampai dengan tanggal 31 Desember.

Capaian persentase OPD yang Nilai SAKIPnya meningkat tahun 2018 hingga 2022 mencapai 100 persen. Inspektorat melakukan penilaian SAKIP terhadap seluruh perangkat daerah. Hasil evaluasi capaian nilai SAKIP merupakan wujud komitmen perangkat daerah dalam memenuhi ketersediaan dokumen dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. Selain itu, adanya pendampingan yang dilakukan intens dari Biro Organisasi, BAPPELITBANGDA dan Inspektorat. Faktor adanya dukungan dan kontribusi dari Inspektorat yang melakukan pendampingan dan pengawasan SAKIP OPD setiap triwulan.

Peran penting komitmen pimpinan dalam melaksanakan kebijakan terkait pengawasan menjadi salah faktor terlaksanannya tugas-tugas dibidang pengawasan. Kebijakan Pengawasan Pemerintah telah disusun menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah dan telah disahkan oleh kepala daerah menjadi peraturan

gubernur untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh inspektur menyusun tim Pengawasan Prioritas Daerah. Kebijakan Pengawasan Pemerintah telah disusun menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah dan telah disahkan oleh kepala daerah menjadi peraturan gubernur untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh inspektur menyusun tim Pengawasan Prioritas Daerah.

Pada tahun 2021 jumlah pengaduan yang berasal dari beberapa perangkat daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 21 pengaduan dan sampai akhir Desember 2021 telah ditindaklanjuti 100 persen dalam bentuk 21 laporan hasil pemeriksaan. Pengaduan ini dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi yang secara umum dalam bentuk pemeriksaan terhadap indisipliner, penyalahgunaan wewenang jabatan, pelanggaran kode etik dan gratifikasi kepada perangkat daerah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang pengaduan masyarakat, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengoptimalkan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Consulting dan sosialisasi yang intens. Tahun 2022 Inspektorat Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti seluruh Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap OPD baik secara langsung ataupun dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi Go Clean yang memudahkan masyarakat memantau hasil laporan pengaduan masyarakat.

Presentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 sejumlah 8 pengaduan yang telah ditindaklanjuti 100 persen yang keluarannya dalam bentuk 8 laporan hasil pemeriksaan. Jenis pemeriksaan pada tahun 2021 meliputi indisipliner, perceraian, pengadaan barang dan jasa. Dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang pengaduan masyarakat, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengoptimalkan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Consulting dan sosialisasi yang intens. Tahun 2022 Inspektorat Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti seluruh Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti baik secara langsung ataupun dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi Go Clean yang memudahkan masyarakat memantau hasil laporan pengaduan masyarakat.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan pengawasan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.115.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pengawasan
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	%	67,92	67,92	64,56	73,93	76,29

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	%	64,13	68,83	68,1	70,04	69,55
Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat	%	100	100	100	100	100
Persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	%	100	100	100	100	100
Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.4.7. Pengelolaan Penghubung

Pada tahun 2021 capaian persentase pelayanan tamu daerah belum mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya: a) Belum optimalnya pembangunan gedung Kantor, Mess dan Anjungan TMII di Jakarta, b) Keterbatasan unit mobil dinas dan jumlah kamar, c) Adanya pandemi covid-19, d) Belum optimalnya kualitas dan Kompetensi ASN maupun tenaga magang. Tahun 2022 persentase pelayanan tamu daerah mencapai 83 persen berdasarkan data Indeks Kepuasan Masyarakat melalui kuisioner terhadap tamu Badan Penghubung Daerah.

Kurangnya sarana dan prasarana promosi kebudayaan dan pariwisata daerah, belum efektifnya koordinasi pelayanan dengan pihak terkait, masih rendahnya kemampuan SDM aparat dalam bidang teknologi informasi, dukungan stakeholder dalam Kebudayaan daerah belum optimal, TMII tutup selama masa PPKM, pandemic covid-19, serta masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah menjadi faktor penghambat pencapaian target kinerja persentase peningkatan promosi dan kerjasama daerah pada tahun 2020 dan 2021. Tahun 2022 tidak ada capaian peningkatan promosi dan kerjasama daerah disebabkan tidak adanya penangungjawab dari kegiatan dimaksud.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan penghubung tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.116.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pengelolaan Penghubung Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pelayanan tamu daerah	%	77	50	13	20	83
Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah	%	100	50	0	0	0

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.3.4.8. Pemerintahan Umum

Capaian persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara tahun 2021 mencapai 75 persen melalui pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. Jumlah peserta gerakan bela negara sejumlah 500 orang. Tahun 2022 persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian 100 persen.

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2021 dengan capaian 99,73 persen. Sejumlah 100 orang mengikuti pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Faktor penghambat pencapaian target diantaranya kualitas DPT Pemilu, mobilisasi masyarakat untuk golongan putih atau tidak memilih serta antusiasme masyarakat yang menurun pada hari pemilu. Tahun 2022 tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Faktor keberhasilan peningkatan capaian adalah karena masifnya pendidikan politik baik yang dilakukan oleh parpol dan lembaga-lembaga pemerintah.

Peran aktif dari tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam FKUB serta dukungan dari seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan mendorong pencapaian target kinerja hingga tahun 2022 mencapai 100 persen. Pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaa narkoba di tingkat kabupaten/kota mendorong pencapaian target kinerja 100 persen penurunan penyalahgunaan narkoba. Dukungan terkait kebijakan penyalaghunaan narkoba melalui penetapan PERDA tentang Penyalahgunaan Narkotika diperlukan untuk mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja program.

Dukungan dari tokoh-tokoh agama khususnya yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka koordinasi fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah menjadi faktor pendorong capaian target kinerja persentase wilayah sulsel berpotensi konflik agama yang ditangani mencapai 100 persen hingga tahun 2022. Tahun 2021 capaian kinerja penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat melampaui target kinerja dengan jumlah kasus tahun 2020 sebesar 80 kasus menurun menjadi 21 kasus pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendorong diantaranya; a) Optimalisasi peran forum kewasapadaan dini daerah maupun forum kewaspadaan dini masyarakat dalam deteksi dini

potensi konflik yang ada, b) Meningkatnya sinergitas forum-forum yang ada di masyarakat seperti FOKDM, FKUB, FPK dan forum keagamaan lainnya, c) Meningkatnya sosialisasi konflik di masyarakat. Kinerja FKUB dan instansi terkait sangat baik dalam mengatasi perselisihan-perselisihan antara maupun intra umat beragama sehigga tidak membesar menjadi konflik.

Kinerja instansi terkait yang tergabung dalam FORKOPIMDA, FKDD dan Forum lainnya sangat baik dalam meredam permasalahan-permasalahan kecil sehingga tidak membesar menjadi konflik sehingga capaian penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat mengalami peningkatan dan mencapai 100 persen pada tahun 2022.

Data capaian kinerja program pembangunan penunjang urusan pemerintahan umum tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.117.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	75	100
Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	99,73	115,29
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaaan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100
Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100
Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100
Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	73,75	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks layanan infrastruktur tahun 2021 menunjukkan capaian sebesar 79,44, kondisi ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 79,5 persen. Kondisi ini disebabkan karena indikator kemantapan jalan dan konektivitas jalan provinsi yang merupakan indikator pembangun dari indeks layanan infrastruktur yang tidak mencapai target. Tidak tercapainya target pada indikator kemantapan jalan dipengaruhi oleh laju kerusakan jalan yang lebih tinggi dibanding pembangunan dan pemeliharaan yang dilakukan, tingginya laju kerusakan jalan disebabkan oleh beberapa factor diantaranya bencana banjir dan beban jalan yang tidak sesuai dengan kemampuan jalan. Tahun 2022 capaian indeks layanan infrastruktur sebesar 80,39 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 1,19 persen. Tahun 2022 terdapat

penambahan komponen penghitung indeks layanan infrastruktur yaitu indikator persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebagai indikator infrastruktur layanan dasar. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.118.
Indeks Layanan Infrastruktur
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kemantapan Jalan	%	14,74	15,38	15,65	17,50	14,39
Konektivitas Jalan Provinsi	%	16,28	17,58	19,40	17,84	Tidak menjadi komponen penghitung
Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Regional	%	20	20	20	20	20
Rasio Jaringan Irigasi	%	3,17	3,29	3,38	4,45	3,38
Persentase RT dengan akses air minum layak	%	Belum menjadi komponen penghitung				13,79
Persentase RT dengan akses sanitasi layak	%	Belum menjadi komponen penghitung				13,84
Rasio Eletrifikasi Desa	%	19,2	19,7	19,64	19,65	14,98
Indeks Layanan Infrastruktur	**Nilai**	**73,38**	**75,95**	**78,07**	**79,44**	**80,39**

Sumber : BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Tabel II.119.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Kondisi baik	Km	720.29	785.35	698,85	783,31	778,97
Panjang jalan Keseluruhan	Km	2.009,35	2.009,35	2.009,35	2.009,35	2.009,35
Mantap	Km	1.184,44	1.236,15	1.328,58	1.406,74	1.445,63
	%	58,95	61,52	66,12	70,01	71,95
Tidak Mantap	Km	824,91	773,2	670,81	602,62	563,72
Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	35,85	39,84	34,78	38,98	38,76

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tahun 2023

2.4.2 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,55 persen. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan angkatan kerja serta

peningkatan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB). Data selebgkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.120.
Produktifitas Total Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja (Jiwa)	3.988.029	4.030.400	4.275.807	4.412.782	4.559.375
PDRB ADHK (Rp.Milyar)	309.156,19	330.506,38	328.154,57	343.402,51	360.874,18
Produktifitas Total Daerah (Rp.1000/Angkatan Kerja)	77.521,05	82.003,37	76.746,81	77.819,96	79.149,92

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2023

Tabel II.121.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	Orang	3.988.029	4.030.400	4.276.437	4.412.782	4.559.375
Bekerja	Orang	3.774.924	3.830.096	4.006.620	4.160.433	4.353.650
Pengangguran	Orang	213.105	200.304	269.817	252.349	205.725
Bukan Angkatan Kerja	Orang	2.340.550	2.376.885	2.468.484	2.404.818	2.330.024
Penduduk Usia Kerja	Orang	6.328.579	6.407.285	6.744.921	6.817.600	6.889.399
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,01	62,9	63,40	64,73	66,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.4.3 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Capaian Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Peningkatan jumlah rumah tangga mempengaruhi peningkatan jumlah pengeluaran rumah tangga makanan dan bukan makanan dalam sebulan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.122.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Rumah Tangga	Rp	1.016.244	1.022.418	1.057.864	1.104.097	1.142.611
Jumlah Rumah Tangga	Ruta	2.014.073	2.032.175	2.074.699	2.094.308	2.113.231
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Rp/Ruta	0,504	0,503	0,509	0,527	0,541

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

2.4.4 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi non pangan menunjukkan persentase capaian yang berfluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022, dengan rata-rata persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita sebesar 51,37 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi non pangan sedikit lebih besar dibanding dengan pengeluaran konsumsi pangan. Pengeluaran terbesar dari Dari 6 komponen pengeluaran konsumsi non pangan berapa pada biaya untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.123.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Kelompok Komoditas Non Pangan	Rp.	520.779	534.484	541.681	570.615	576.388
Total Pengeluaran	Rp.	1.016.244	1.022.418	1.057.864	1.104.097	1.142.611
Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita	%	51,25	52,27	51,21	51,68	50,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

2.4.5 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Nilai tukar petani ini merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib). Nilai tukar juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Nilai tukar petani Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemic covid 19, namun pada tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan meskipun nilai tukar petani sub sektor tanaman pangan mengalami penurunan. Secara keseluruhan nilai tukar petani di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2022 masih dibawah rata-rata nilai tukar petani nasional.

Tabel II.124.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Tukar Petani Sulawesi Selatan	Ribu Rp	102,29	103,05	96,97	98,55	100,39

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Tukar Petani Nasional	Ribu Rp.	102,46	103,21	101,65	104,64	107,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Grafik II. 134.
Perbandingan NTP Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022

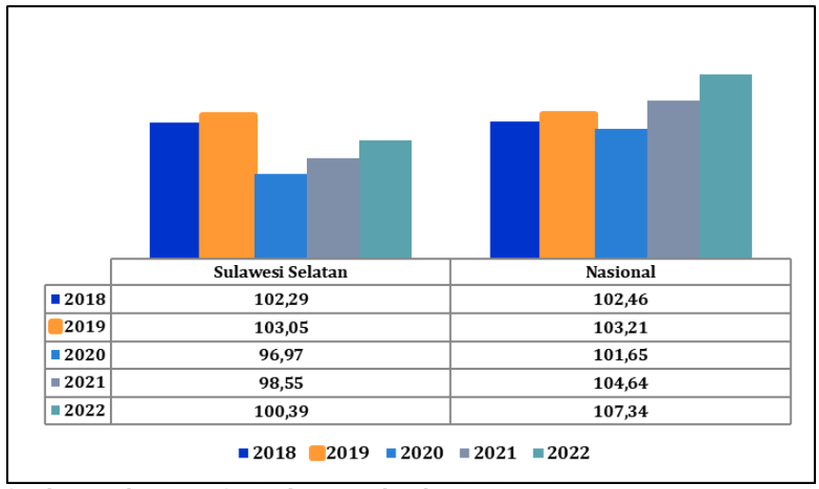

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Tabel II.125.
Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Sub Sektor	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanaman Pangan	99,45	95,31	95,96	94,16	91,77
Hortikultura	106,99	104,48	106,28	105,03	117,87
Tanaman Perkebunan	96,16	94,26	95,90	107,11	117,56
Peternakan	109,97	99,66	100,38	101,41	104,46
Perikanan	104,16	105,61	97,54	104,19	109,70
Perikanan Tangkap	107,63	107,16	99,64	107,43	109,27
Perikanan Budidaya	103,08	106,33	96,06	101,90	110,00

Sumber : Satistik NTP Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

2.4.6 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Capaian persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021. Namun pada tahun 2022 persentase desa berstatus swasembada mengalami penurunan sebesar -19,9 persen atau dengan capaian 113 desa swasembada dari sejumlah 3.051 total desa. Desa swasembada merupakan desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Meskipun capaian yang diperoleh telah mengalami peningkatan namun persentasenya masih sangat kecil jika dibanding jumlah keseluruhan desa yang ada di Provinsi

Sulawesi Selatan, hal ini disebabkan karena pada umumnya desa berstatus swasembada baru dikemukan pada beberapa desa yang merupakan ibukota kecamatan. Data selengkapnya pada atbel berikut.

Tabel II.126.
Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Desa	Desa	3.049	3.051	3.051	3.051	3.051
Jumlah Desa Swasembada	Desa	81	81	100	141	113
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	2,66	2,65	3,28	4,62	3,7

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tahun 2023

2.4.7 Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Nilai Ekspor Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 31,86 persen. Dari 16 komoditas ekspor Sulawesi Selatan, jenis komoditas yang memberikan kontribusi peningkatan nilai ekpor terbesar adalah komoditas Nikel dengan nilai 1.179,45 US$. Sedangkan nilai Impor Sulawesi Selatan tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 76,57 persen. Jenis komoditas Impor yang mengalami peningkatan tertinggi adalah Bahan Bakar Mineral sebesar 1.021 persen dari tahun 2021. Capaian rasio ekspor dan impor terhadap PDRB pada tahun 2022 mencapai 154,28 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.127.
Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Ekspor	Juta US$	1.455	1.557	1.474	1.866	2.559
Nilai Impor	Juta US$	1.184	1.154	800	653	1.153
Net Eksport	Juta US$	271	403	674	1.213	1.406
Nilai PDRB di konversi, Milyar Rp. ke Juta US$	Juta US$	32,39	35,64	34,56	38,09	24,06*
Rasio Ekspor + Import Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	Angka	81,48	76,07	65,80	68,13	154,28

**Asumsi = 1 US$ = Rp.15.000,-*
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.4.8. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator yang dapat berfungsi sebagai indikator demografi maupun indkator ekonomi. Sebagai indikator demografi, rasio ketergantungan digunakan untuk mengetahui beban ketergantungan penduduk yang belum atau tidak produktif terhadap penduduk usia produktif disuatu wilayah. Sedangkan sebagai indikator ekonomi, rasio ketergantungan untuk mengetahui suatu daerah dapat digolongkan dalam kategori maju atau masih tahap berkembang.

Tabel II.128.
Rasio Ketergantungan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2022

Indikator	Capaian					
	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk Usia 0 – 14 thn	Jiwa	2.454.795	2.457.016	2.213.433	2.226.095	2.208.567
Penduduk Usia 65+ thn	Jiwa	538.034	553.717	651.470	625.736	651.548
Jumlah penduduk Usia 0-14 dan 65+ thn	Jiwa	2.992.829	3.010.733	2.864.903	2.851.831	2.860.155
Penduduk Usia 15 – 64 thn (Usia Produktif)	Jiwa	5.779.141	5.832.507	6.208.606	6.287.700	6.365.632
Rasio Ketergantungan	Per 100 penduduk produktif	51,79	51,62	46,14	45,36	44,93

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Grafik II. 135.
Rasio Ketergantungan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

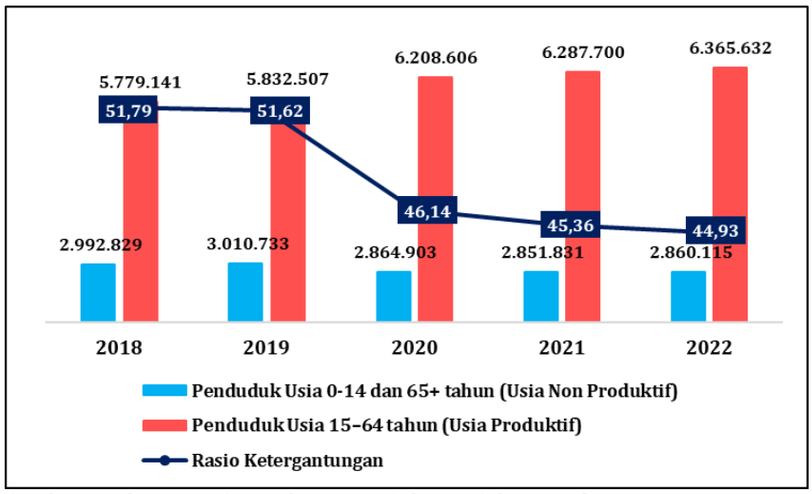

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

Provinsi Sulawesi Selatan sedang memasuki bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2022. Demikian pula beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif menggambarkan tren penurunan dari tahun ke tahun.

2.4.9. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat stabilitas keamanan yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Selain stabilitas politik, aspek keamanan juga merupakan salah satu indikator penting bagi investor untuk berinvestasi pada suatu wilayah tertentu. Data angka kriminalitas di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan. Jumlah kasus kejahatan tertinggi berada di Kota Makassar sebesar 10.951 kasus atau 41 persen dan jumlah kasus terendah tercatat di Kabupaten Bantaeng sebesar 127 kasus atau 0,5 persen dari total kasus kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2022. Capaian penyelesaian tindak pidana pada tahun 2022 sebesar 61,18 persen mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 8,94 persen.

Tabel II.129.
Angka Kriminalitas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kriminalitas	Kasus	12.100	16.730	15.158	15.210	26.684

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019-2023

2.5 Capaian Indikator Pembangunan Daerah

2.5.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

Indikator Kineja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 menetapkan indikator kinerja utama kepala daerah melalui 6 Indikator Tujuan dan 11 Indikator Sasaran yang mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing target indikator tujuan dan sasaran terdapat pada uraian aspek kesejahteraan masyarakat (subBab 2.2) dan aspek daya saing daerah (subBab 2.4).

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, maka dirumuskan program pembangunan daerah yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, maka ditetapkan sejumlah 63 Program Prioritas untuk mendukung pencapaian IKU Gubernur Sulawesi Selatan.

Berikut matriks pencapaian indikator tujuan, sasaran, dan program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2019-2022 berdasarkan target RPJMD Provinsi Sulawesi 2018-2023 yang ditetapkan. Uraian narasi atau

penjelasan terkait pencapaian masing-masing target indikator program prioritas terdapat pada uraian aspek pelayanan umum (sub Bab 2.3).

Tabel II.130.
Capaian IKU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1	**Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Huruf/ Angka**	**B**	**B (60,07)**	**B (61,18)**	**B (66,16)**	**A (81-90)**	**81,68**
Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ Angka	B (65,06)	B (63,02)	B (65,01)	B (68,08)	A (>89-90)	76,49
Sasaran 2	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ Angka	B (4,00)	B (4,02)	A- (4,10)	A- (4,34)	A (4,51-5,0)	96,23
Tujuan 2	**Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah**	**Indeks Williamson**	**Angka**	**0,639**	**0,620**	**0,568**	**0,567**	**0,607**	**107,05**
Sasaran 3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	75,95	78,07	79,44	80,39	83,40	96,39
Tujuan 3	**Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata**	**PDRB Per Kapita ADHB**	**Rp. Juta**	**57,18**	**55,68**	**59,65**	**65,59**	**65,98**	**99,41**
		Tingkat Kemiskinan	**Persen**	**8,69**	**8,99**	**8,53**	**8,66**	**7,45**	**87,07**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran 4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,62	6,31	5,72	4,51	5,69	126,16
Sasaran 5	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	Rasio Gini	Angka	0,389	0,382	0,377	0,365	0,380	104,11
Tujuan 4	**Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**	**IPM**	**Angka**	**71,66**	**71,93**	**72,24**	**72,82**	**73,05**	**99,68**
Sasaran 6	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	64,64	65,29	65,76	66,34	67,05	98,94
Sasaran 7	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	77,58	77,80	77,94	78,41	77,86	100,71
Sasaran 8	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	76,01	76,32	74,76	76,37	77,23	98,89
Sasaran 9	Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	Angka	11.387	15.158	15.210	26.684	24.438	91,58

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 5	**Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**6,92**	**-0,70**	**4,65**	**5,09**	**5,04-6,52**	**100,99**
Sasaran 10	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas Total Daerah	Rp/Angk. Kerja	82.003,37	76.746,81	77.819,96	79.149,92	77.349,12	102,33
Tujuan 6	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan**	**IKLH**	**Poin**	**75,12**	**71,75**	**73,23**	**74,17**	**72,84**	**101,82**
Sasaran 11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan Emisi GRK	Juta Ton CO2Eq	0,89	0,96	1,13	1,36	1,347	100,96

2.5.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2022

Pengolahan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek/fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan malakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja selama periode 5 (lima) tahun. Sebagai gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah tahun 2018-2022 capaian indikator kinerja daerah (IKD) sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.131.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (IKD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI						
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,04	6,91	-0,71	4,64	5,09
2	Laju Inflasi	%	3,5	2,35	2,04	2,4	5,77
3	PDRB Perkapita (ADHB)	Triliun Rp	52,64	57,18	55,68	59,66	65,59
4	Indeks Gini	Angka	0,388	0,391	0,382	0,377	0,365
5	Indeks Wiliamson	Indeks	0,622	0,639	0,620	0,568	0,567
6	Tingkat Kemiskinan	%	8,87	8,56	8,99	8,53	8,66
	• Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	779,64	759,58	776,84	784,98	782,32
	• Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	1,68	1,63	1,65	1,40	1,50
	• Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	91,13	91,44	91,01	91,47	91,34
7	Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultura) terhadap PDRB	%	1,12	1,11	1,13	1,13	1,11
8	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB	%	7,16	6,34	6,5	6,35	5,91
9	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	4,26	3,88	3,94	4,07	4,05
10	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB	%	1,15	1,17	1,19	1,18	1,21
11	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,06	0,06	0,07	0,06	0,05
12	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	%	4,8	4,62	4,67	4,75	5,1
13	Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	%	8,4	8,44	8,53	9,41	9,43
14	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,38	14,8	14,48	14,58	14,64

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
15	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	12,87	13,17	12,76	12,49	12,9
16	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri	%	6,79	7,35	7,35	8,91	9,31
17	Pertumbuhan PDRB Industri	%	0,94	9,92	-4,57	3,02	9,86
	KESEJAHTERAAN SOSIAL						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,90	71,66	71,93	72,24	72,82
	• Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,08	70,43	70,57	70,66	70,97
	• Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,02	8,26	8,38	8,46	8,63
	• Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,34	13,36	13,45	13,52	13,53
	• Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	10.814	11.118	11.079	11.184	11.430
2	Indeks Pendidikan	Angka	63,79	64,64	65,29	65,76	66,34
3	Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Keatas	Tahun	91,81	92,45	92,56	92,49	93,31
4	Indeks Kesehatan	Angka	77,05	77,58	77,80	77,94	78,41
5	Prevalensi Balita Stunting	%	35,6	30,6	Tidak ada Survey	27,4	27,2
6	Tingkat Partispasi Angkatan Kerja	%	63,02	62,9	63,4	64,73	66,18
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,94	4,62	6,31	5,72	4,51
	• Jumlah Penganggur	Ribu Jiwa	213.105	200.304	269.817	252.349	205.725
8	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	94,66	95,03	93,69	94,28	95,49
9	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	36,5	36,9	36,9	37,32	39,81
	SENI, BUDAYA, DAN OLAHRAGA						
1	Jumlah lembaga sanggar kesenian per 10.000 penduduk	Per 10.000	452	471	468	468	468

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
		penduduk					
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	1	1	1	1	1
3	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	25	26	74	74	74
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	PELAYANAN URUSAN WAJIB DASAR						
	Pendidikan						
1	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	%	81,74	86,09	86,44	87,07	86,49
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	60,03	60,14	60,32	60,35	60,44
3	Angka Partisipasi Sekolah Usia 16 - 18 Tahun	%	70,18	70,85	70,89	71,21	70,81
4	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	1,00	0,71	1,35	1,02	3,62
5	Angka Kelulusan (AL)	%	99,98	99,99	99,99	99,99	99,99
6	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	98,15	97,2	92,07	93,82	95,34
7	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Angka	1:15	1:14	1:13	1:13	1:13
8	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 64 Tahun	%	91,38	92,54	93,58	94,16	94,54
9	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	98,63	98,69	98,84	94,83	99,16
	Kesehatan						
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Orang	1.037	919	791	844	1.117
2	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu (Balita)	Orang	1.124	991	843	892	1.176

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
3	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu (Neonatal)	Orang	799	714	623	681	954
4	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	5,76	5,69	5	5	8
5	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	6,26	6,2	5	6	8
6	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	6,21	5,86	4	4	7
7	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka (per 100.000 KH)	92	94	86	129	119
8	Rasio Posyundu peratuan Balita	Angka per 1000 balita	12,8	11,95	12,64	16,6	14,42
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Angka per 1000 Penduduk	1,1	1,2	1,2	1,7	1,9
10	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Angka per 1.000 Penduduk	16	17	18	23	22
11	Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk	Angka per 1.000 Penduduk	43	41	43	60	60
12	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	80,7	82	81,9	99,76	93,86
13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang	%	91,99	90,97	92,44	95,04	94,8

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Memiliki Kompetensi Kebidanan						
14	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	95,27	96,15	73,82	83,51	94,3
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100	99,6	91,8
16	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	103,8	98,50	63,3	102,9	99,6
17	NonPolio AFP Rate per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	3,02	2,32	0,9	1,72	2,9
18	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	60,37	70,8	71,59	69,43	78,29
19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	49	61	45	49	59,6
20	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 100.000 Penduduk	208	214	160	169	228
21	Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis	Per 100.000 Penduduk	8	8	6	7,8	9,8
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	49	61	50	61	71
23	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	%	87	88	89	87	87
24	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
25	Penderita Diare yang ditangani	Orang	167.946	145.457	28.228	5.168	87.402
26	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 penduduk	0,15	0,11	0,09	0,11	0,19
27	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	%	0,013	0,019	0,02	0,026	0,26
28	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
29	Cakupan Kunjungan Bayi	%	96,40	89,96	88,63	98,4	98,57
30	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	89,32	87,96	86,58	88,65	88,15
31	Cakupan Pelayanan Nifas	%	90,09	90,35	91,91	91,33	91,1
32	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	%	58,32	62,87	59,08	60,23	58,56
33	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	71,64	69,71	65,52	75,25	83,75
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	91,00	83,43	91,10	93,4	87,4
35	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100
36	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100
37	CakupanDesa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24jam	%	100	100	100	100	100
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	35,85	39,84	34,78	38,98	40
2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Km/jiwa	0,00345	0,00345	0,00341	0,00319	0,00319
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	84,41	89,77	93,79	93,98	97,36
4	Persentase Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik	%	69,16	62,13	72,5	76	77,86
5	Rasio Jaringan Irigasi	M/Ha	15,83	12,08	12,65	13,03	52,31
6	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	%	88,11	89,38	90,84	91,18	91,96
7	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum aman	%	Belum diukur	Belum diukur	44,39	46,22	46,39

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
8	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan	%	Belum diukur	35,6	25,53	23,15	25,15
9	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	%	84,44	87,8	88,96	91,57	92,24
10	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman	%	Belum diukur	4,7	4,74	3,97	12,92
11	Ketaatan terhadap RTRW	%	65	70	75	80	86
12	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Unit/Jiwa	2,58	2,53	2,53	2,16	2,23
13	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	**%**	25	25	25	21,87	25
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,195	0,200	0,219	0,216	0,217
2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0,049	0,048	0,139	0,139	0,139
	Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	per 10.000 penduduk	34,94	42,13	42,27	47,69	39,4
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	94,00	100	100	100	99,59
3	Persentase Penegakan PERDA	%	80,00	89,00	100	100	99,67
	Sosial						
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	70,48	57,11	77	88,22	95,95
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	70,48	57,02	77,3	90,71	94,6

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	88,29	87,98
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100
5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	100	100	0	0
6	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	0	0	0
7	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	%	1,33	20,01	15,63	100	100
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	1,33	2,10	13,94	17,3	48,8
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100
	PELAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR						
	Tenaga Kerja						
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	63,02	62,9	63,40	64,73	66,18
2	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	94,65	95,03	93,69	94,21	95,49
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	2,94	1,72	2,23	0	1,24
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	61,7	33,33	57,33	60,98	30,6
5	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	3,19	4,36	3,29	5,6	9,49

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
6	Keselamatan dan perlindungan	%	100	100	59,99	30	48,73
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100
8	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	35,34	52,89	29,34	16,35	47,55
9	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	6,92	5,38	13,50	12,35	60
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	70,00	0	100	90
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	98,75	80	81,25	85
12	Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	%	94,65	95,03	93,69	94,28	95,49
13	Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Ketas	%	43,32	45,81	45,14	46,61	46,35
14	Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja	%	36,52	36,85	21,18	37,32	39,81
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	51,25	53,10	48,16	54,38	54,8
2	Proporsi kursi yang dididuduki perempuan di DPR	%	17,86	25,88	25,88	26,88	25,88
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	71	69	74	72	74
4	Rasio KDRT	%	-	0,019	0,0065	0,07*	0,07*
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0,05	0,09	0,06	0,07*	0,07*
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	50,23	50,32	48,16	49	50
7	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak	%	27	21	35	22	23

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Korban Kekerasan						
9	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat	%	100,25	101,32	99,58	100,18	104*
10	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat	%	102,64	100,79	97,24	102,03	106,72
11	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMA/MA/Sederajat	%	108,97	106,11	102,46	97,03	112,2*
12	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	103,30	105,20	99,58	121,83	108,2*
13	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	100,28	100,60	100,38	97,13	100,9*
	Pangan						
1	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	388,24	363,76	332,21	363,8	367,91
2	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	%	44,33	47,88	53,27	61,83	55,04
3	Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai)	%	22,55	24,96	13,66	13,62	18,23
4	Ketersediaan Energi Perkapita	%	3.572	3.879	3.168	3.484,4	3.593
5	Ketersediaan Protein Perkapita	%	103,75	112,67	86,16	94,78	171,65
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100	100	100	100	100
7	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	82,6	83,4	80,4	80,1	83,1
8	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	77,55	78,69	81,81	80,92	81,83
9	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data Timpang)	%	5,21	16,29	7,49	25,64	74,07
	Pertanahan						

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	83,00	92,00	57,00	88,00	Belum Rilis
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	67,00	43,00	67,00	50,00	Belum Rilis
3	Penyelesaian izin lokasi pertanahan	%	62,00	100	49,00	42,00	Belum Rilis
	Lingkungan Hidup						
1	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Indeks Kualitas Air	%	57,70	81,47	54,00	56,82	57,79
7	Indeks Kualitas Udara	%	88,67	88,69	88,73	89,13	90,35
8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	60,41	61,14	63,56	55,4	55,46
9	Indeks Kualitas Air Laut	%	Belum diukur	Belum diukur	70,22	84,82	85,59
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,83	75,12	71,74	73,23	74,17
11	Laporan Inventarisasi GRK	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
12	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Ton	4.365.759	2.914.632	3.500.000	589.007,56	4.934.631
14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	66	62,86	18,46	18,46	29,6
15	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
16	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Kasus	10	17	12	16	18
17	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
18	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	%	66,91	73,33	72,83	51,12	54,48
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Angka	0,87	0,94	0,94	0,96	0,99
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka	0,87	0,92	0,94	0,95	0,97
3	Rasio pasangan berakte nikah	Angka	0,14	0,29	0,32	0,36	0,39
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	Belum diukur	94,39	94,00	95,43	99,42
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	Belum diukur	43,00	46,00	47,79	96,51
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	%	4,08	17,38	17,83	98,89	99,42
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1	1	23	1	1
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	43	43	45	95	96
4	Persentase LPM Berprestasi	%	24,33	24,33	24,33	0	0
5	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Posyandu aktif	%	99,89	99,89	99,89	99,91	97,06
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,02	1,05	2,51	1,04	1,04*
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,44	2,45	2,45	2,29	2,22
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak/keluarga	3	3	3	3	3
4	Rasio Akseptor KB	%	62,91	63,05	71,07	71,07	71,7*
5	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	66,5	71,74	71,86	71,66	61,2
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	-	31	29,07	27,4	27,4
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0	46,99	35	22	22*

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,9	13,7	13,05	20	26,1
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	15,3	24,26	24,24	23,1	13
10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	14,2	17,32	17,24	18,4	18,45*
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	85,93	84,91	78,75	74,5	72,5*
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	72,3	72,31	70,54	70,21	70*
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	50,30	72,33	71,49	70,8	70*
14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	23	23	23	23	23*
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	17	17	18	78,5	78,5*
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100,1	100,3	100,41	98,64	98,64*
17	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	72,86	74,39	76,07	76,98	75,98*
18	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0,08	0,04	0,02	0,04	0,04*
19	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	71,01	71,01	65,4
20	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	75	75	44,21	75	75*
21	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	1,5	1,5	0,13	1,5	1,5*

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Perhubungan						
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Juta Jiwa	13,873	14,749	7,143	8,514	14,005
2	Rasio ijin trayek		0,45	0,38	1,99	0,26	0,2
3	Persentase layanan angkutan darat	%	80	87	90	94	97
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal BIS	Unit	89	89	89	127	127
5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/Kendaraan	0,07	0,08	0,09	0,1	0,108
6	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	11.234.294	10.771.413	11.067.590	11.531.427	12.702.231
	Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	63,85	65,07	85,30	87,17	87,52
2	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	43,91	43,98	49,59	59,69	94,24
3	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	29,38	22,87	21,93	31,44	13,48
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
1	Persentase koperasi aktif	%	65,83	65,31	64,22	55,66	50
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,51	99,52	99,40	99,71	99,71
	Penanaman Modal dan Investasi						
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun rupiah	11,55	10,21	12,54	16,6	14,25
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	911	1,548	2.506	4.506	5.748
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/ proyek	18	8	3	3,69	2,26
4	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rupiah	1,3	2,4	6,1	1,2	1,6
	Kepemudaan dan Olah Raga						
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	9,61	9,46	8,17	8,17	8,73

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
2	Persentase wirausaha muda	%	19,80	18,30	13,80	17,24	31,3
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	30	96	64	64	100
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	36,52	22,38	24,57	24,68	28,16
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	2,65	8,42	6,70	9,07	9,34
6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	81	246	0	84	119
7	Jumlah prestasi olahraga	Medali	81	317	0	52	217
	Statistik						
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka"	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Persandian						
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
	Kebudayaan						
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	9	7	5	0	10
2	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	2	2	2	1	3
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	21	5	3	11	2
	Perpustakaan						
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	732.403	1.098.180	106.933	154.913	1.325.445

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Laki-Laki	Orang	325.430	487.600	52.037	69.376	669.359
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Perempuan	Orang	406.973	610.580	54.896	85.537	656.086
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp.	581.201	582.490	10.028.442	9.256.186	10.348.732
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Unit/Jiwa	0,428	0,428	0,035	0,035	0,23
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	390.672	394.251	66.408	45.256	45.910
5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	3.250	3.500	2.350	4.032	31.098
6	**Kearsipan**						
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	65	56	40	33,3	79,49
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	4.200	368	1.313	1.433	1.865
	PELAYANAN URUSAN PILIHAN						
	Pariwisata						
1	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	kunjungan	8.393.024	8.681.275	367.926	1.612.737	7.590.063
2	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	Kunjungan	263.293	174.817	6.598	3.654	70.997
3	Lama kunjungan Wisata	Hari	5	5	2	1	3
4	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	375.900.000	401.800.000	60.200.000	66.500.000	299.770.000
	Pertanian						
1	Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultura) terhadap PDRB	%	1,12	1,11	1,13	1,13	1,11
2	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB	%	7,16	6,34	6,50	6,33	5,91
3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	4,26	3,88	3,94	4,07	4,05
4	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB	%	1,16	1,18	1,21	1,23	1,25
5	Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)	Ton	136.711	150.462	121.244	136.039	127.383

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
6	Produktivitas Hasil Peternakan (Telur)	Ton	170.767	250.289	235.801	237.898	235.149
7	Produktivitas Hasil Peternakan (Susu)	Ton	3.173	1.888	2.302	2.398	2.318
	Kehutanan						
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	48,61	55,73	60,42	65,61	71,14
2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	14,49	17,43	0,7	0,08	0,03
3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	%	76,45	75,67	75,67	75,67	75,67
	Energi dan Sumber Daya Mineral						
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	95,53	97,8	97,53	98,2	99,89
2	Rasio ketersediaan daya listrik	%	97,00	98,00	90,00	101	99,41
3	Persentase pertambangan tanpa ijin	%	11,33	15,57	16,6	0	34,79
	Perdagangan						
1	Ekspor Bersih Perdagangan	US$1000	828.845.592	1.463.153.049	1.384.609.057	1.677.394.840	2.358.937.318
2	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	%	0,74	0,89	0,98	1,08	Tidak diukur
	Perindustrian						
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	1.156	1.189	1.062	1.635	2.103
	Transmigrasi						
1	Persentase transmigran umum	%	100	100	0	100	100
	Kelautan dan Perikanan						
1	Produksi perikanan	%	79,4	81,1	101,34	110,98	99,70
2	Cakupan bina kelompok nelayan	%	16,23	17,52	10,51	19,11	27,39
	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah	Kelompok	50	55	21	60	86

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	daerah						
	Jumlah kelompok nelayan	Kelompok	311	314	314	314	314
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	47,66	40	12,89	18,11	29,43
	Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	173.412	174.620	50.174,24	77.770,07	128.535,41
	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	366.541	436,55	389.208,2	429.431,2	436.749,6
4	Nilai Tukar Nelayan	%	107,8	107,6	99,65	107,43	109,29
5	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	48,92	58,69	52,33	57,74	58,27
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	Angka	1,01	1,56	1,57	1,57	2,33
7	Volume produksi perikanan tangkap	Ton	366.540,6	398.565,3	389.208,2	429.431,2	436.749,6
8	Konsumsi Ikan	%	120,2	120,52	119,09	114,45	110,85
	Penunjang Urusan						
	Perencanaan Pembangunan						
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	99	97
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	96	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	80,00	100	100	100	100
	Keuangan						
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini	WTP	WTP	WDP	WTP	Belum Rilis
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	42,67	43,23	41,54	44,65	54,1
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,99	0,58	0,64	3,61	2,29
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	35,6	42,19	41,69	38,92	31,08
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	8,54	9,01	13,11	10,63	10,1
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Rasio	25,75 : 74,25	28,96 : 71,04	32,19 : 67,81	0 (PMDN 77/2020)	0 (PMDN 77/2020)
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	13,93	17,49	14,47	16,19	20,37
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan						
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/ Tahun	15	15	15	20	20
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,2	0,1	0,1	0,1	0,03
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	2,9	0,6	0,6	0,17	0,48
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	60	59	56	56	56
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	8.546	8.536	7.907	13.781	12.906

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	16.670	16.243	16.030	16.160	16.147
	Penelitian dan Pengembangan						
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	42	46	46	50	94,44
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	50	50	50	100	100
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	25	50	0	50	41,86
	Pengawasan						
1	Persentase tindak lanjut perangkat daerah terhadap hasil pemeriksaaan APIP	%	67,92	67,92	64,56	73,93	76,29
2	Persentase pemyelesaian tidak lanjut hasil pengawasan umum dan teknis	%	64,13	68,83	68,1	70,04	69,55
3	Jumlah temuan BPK	Kasus	13	18	18	21	18
	Sekretariat Dewan						
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan.Fungsi Pembentukan Perda.dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD						
	ASPEK DAYA SAING						
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Rp.Juta/Ruta	0,504	0,503	0,509	0,527	0,541
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	51,25	52,27	51,21	51,68	50,44
3	Nilai Tukar Petani	Ribu Rupiah	102,29	103,05	96,97	98,55	100,39
4	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa	%	2,66	2,65	3,28	4,62	3,7
5	Produktivitas Total Daerah	Rp/Angkatan Kerja	77.532,6	82.003,37	76.746,81	77.819,96	79.149,92
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	81,48	76,07	65,8	68,13	154,28
7	Rasio Ketergantungan	Angka	51,79	51,62	46,14	45,36	44,93
8	Angka Kriminalitas	Angka	12.100	16.730	15.158	15.210	26.684

Sumber: BPS dan OPD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

2.5.3 Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja pemenuhan SPM Provinsi Sulawesi Selatan diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing 6 (enam) bidang urusan dan jenis pelayanan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.132.
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			Target 2023
		2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Pendidikan					
Pendidikan Menengah					
Persantase Warga Negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	76,62	80,55	83,68	100
Pendidikan Khusus					
Persantase Warga Negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	100	81	80,84	82,73	100
Kesehatan					
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi					
Persantase Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi					
Persentase Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
Pekerjaan Umum					
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota					
Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	100	100	100	100
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota					

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			Target 2023
		2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pegolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100	100	100	100	100
Perumahan Rakyat					
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi					
Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintahan Daerah Provinsi					
Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi peyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	30	100
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi					
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100	100	100	100	100
Sosial					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti					
Persentase Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	100	35,12	7,4	100	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti					
Persentase Warga Negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar	100	3,88	15,22	100	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti					
Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			Target 2023
		2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
dasar lanjutan usai di dalam panti					
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti					
Persentase Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100	100	100	100	100
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi					
Persentase Warga Negara Korban Bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100	15,63	100	100	100

Sumber: OPD Pengelola SPM Prov. Sulsel, Tahun 2023
*Untuk Urusan Pekerjaan Umum: *) Belum ada layanan SPAM/IPLT Regional*
**) SPAM Mamminasata Belum Selesai*

2.5.4 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkatan provinsi. Adapun capaian target TPB/SDGs tahun 2020 hingga 2022 dari 17 tujuan sejumlah 206 indikator disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.133.
Hasil Analisis Terhadap Capaian Target Indikator TPB/SDGs
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN					
	TARGET 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional					
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	RPJMD	%	8,99	8,53	8,66
	TARGET 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan					
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas kesehatan	%	86,48	92,97	100
1.3.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	77,99	47,12	49,43
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Dinas Sosial	%	35,12	7,40	100
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Dinas Sosial	Jiwa	313.357	365.669	364.414
	TARGET 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan,					

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro					
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	BPS	%	92,72	94,35 (BPS=95,44)	94,32
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12- 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40 terbawah)	Dinas Kesehatan	%	-	98,3	
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Kesehatan	%	73,69	73,41 (BPS = 59,66)	73,01
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	BPS	%	90,84	91,18	91,96
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	BPS	%	88,96	91,57	92,24
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (kelompok penduduk 40 terbawah)	BPS	%	5,82	3,51	3,82
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	BPS	%	60,32	60,35	60,44
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	89,27	93,99	96,51

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40 terbawah)	BPS	%	N/A	99,41	97,36
	TARGET 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana					
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang				Meninggal: 27, Terdampak: 21.470	Meninggal: 32, Terdampak: 2.312
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	Meninggal : 78 Terdampak : 70.85	27	32
	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	-	4	6
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	-	76	46
	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	-	21.470	2.312
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Lokasi	24	24	23
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Dinas Sosial	%	100 (1.414 jiwa)	100	100 (26.921 jiwa)

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas Sosial	%	100 (1.414 jiwa)	100	100 (26.921 jiwa)
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks	154,87	154,87	150,07
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	620 Milyar	119 Milyar	89 Milyar
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1
	TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN					
	TARGET 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun					
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	BPS	%	10,14	7,93	10,79
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Kesehatan (SSGI)	%	23	19	21,7
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	4,33	4,02	3,78
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori	Dinas Ketahanan	%	8,12*	10,7*	

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				
	TARGET 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula					
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan (SSGI)	%	30,59	27,4	27,2
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Dinas Kesehatan	%	Tidak Ada Survey	Tidak Ada Survey	Tidak Ada Survey
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan (SSGI)	%	NA	6,2	8,3
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan	%	13,4	9,94	8,5
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	%	67,8	74,60	72,2
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	84,9**	80	83,1
	Konsumsi ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	65,5	65,5	69,5

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERAH					
	TARGET 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup					
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	BPS	%	97,65	95,04	94,08
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	86	129	119
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	BPS	%	92,72	94,35	94,32
	TARGET 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000					
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Kematian per 1.000 kelahiran hidup	5	6	8
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Kematian per 1.000 kelahiran hidup	4	4	7
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Kematian per 1.000 kelahiran hidup	5	5	8
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 imunisasi dasar lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan	%	73,82	91,67	100

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	TARGET 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya					
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	Per 1.000 Penduduk	0,103	0,116	0,19
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Dinas Kesehatan	%	0,02	0,028	0,26
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Per 100.000 penduduk (Capaian dihitung hanya pada data penemuan di faskes/ DOTS)	160	162	228
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Kabupaten	21	21	
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Dinas Kesehatan	%	N/A	100	
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Dinas Kesehatan	Filariasis : Orang	N/A	51.114	
			Kusta : Orang	696		
3.3.5.(a)	Jumlah Provinsi / Kab / Kota dengan eliminasi Kusta	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	17	18	
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	Dinas Kesehatan	%	N/A	0	
	TARGET 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan					
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Dinas Kesehatan	%	3,41	4,1	

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	3,50	9,06	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas Kesehatan		2,76	2,33	
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	22	24	
	TARGET 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membayakan					
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN	%	N/A		
	TARGET 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional					
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Kesehatan	%	73,69	73,41	73,01
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Dinas Kesehatan	%	19,02	21,11	23,14
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	DP3A	kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	29	27,4	29,5
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	DP3A		2,44	2,29	2,22
	TARGET 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang					
3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	BPS	%	5,66	4,22	

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Dinas Kesehatan	Jiwa	795	8.484	920
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	%	86,48	92,97	97,03
	TARGET 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat					
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	BPS	%	24,89	21,11	
	TARGET 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua					
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan	%	90	90	
	TARGET 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil					
3.c.1*	Rasio Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tenaga Kesehatan/100.000 penduduk	43	60	60
	Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas					
	Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.					

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan	%	88,49	88,09	76,15
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	BPS	%	86,44	87,07	86,49
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	BPS	Tahun	8,38	8,46	8,63
	TARGET 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas					
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	BPS	%	86,44	87,07	86,49
	TARGET 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan					
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS	Remaja (15-24)	88,78	94,1	94,81
			Dewasa (15-59)	60,5	67,29	73,16
	TARGET 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan					
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan	BPS	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/sederajat ()	100,97	96,84	99,03

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	Tinggi.					
	TARGET 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.					
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS	%	92,56	92,49	93,31
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	BPS	(umur 15-24 tahun)	99,93	99,78	99,8
	TARGET 4.5 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil					
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan	%		54,15	49,77
			%			
			%	SMA = 51,02		
			%	SMK = 44,25		
			%	SLB = 55,53		
	Tujuan 5 : KESETARAAN GENDER					
	TARGET 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun					
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kebijakan	4	8	7
	TARGET 5.2 Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya					
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak	Dinas Pemberdayaan	%	0,042	0,033	0,03

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Perempuan dan Perlindungan Anak				
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	0,086	0,092	0,011
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100	100	100
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	0,042	0,033	0,03
	TARGET 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan					
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18 tahun	11,25	9,25	9,33
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	20	21,5	21,05
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan	Dinas Pemberdayaan	Kelahiran pada perempuan	29,07	27,40	29,5

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Perempuan dan Perlindungan Anak	umur 15-19 tahun			
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS	%	86,44	87,07	86,49
	TARGET 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.					
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	25,88	25,88	25,88
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	BPS	%	26,42	32,14	37,65
	TARGET 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.					
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	46,88	42,25	26,1
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	%	85,3	87,17	87,52
	Tujuan 6 : AIR BERSIH DAN SANITASILAYAK					
	TARGET 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua					
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki	Dinas perumahan,	%	90,84	91,18	91,96

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	akses terhadap layanan sumber air minum layak	kawasan permukiman dan pertahanan				
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	m3/detik	9,00	8,83	11,509
6.1.1.(C)	Proporsi populasi (rumah tangga) yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	BPS	%	44,39	46,22	46,39
	TARGET 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.					
6.2.1.(a)	Proporsi populasi (rumah tangga) yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	BPS	%	88,71	89,08	87,22
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertahanan	%	88,96	91,57	92,24
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas kesehatan	Desa / Kelurahan	3.047	3.047	3.047
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas kesehatan	Desa / Kelurahan	2.676	2.863	3.012
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem	Dinas perumahan, kawasan permukiman	Kab/ Kota	24	24	16

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	dan pertahanan				
	TARGERT 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global					
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kab/ Kota	15	15	16
6.3.2.(a)	Kualitas air danau	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	0		
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup		0		
	TARGET 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.					
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas kehutanan	RPDAST	0	2	4
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	jaringan informasi	4	24	16
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu	Dinas kehutanan	Ha	90.425,79	175.507,49	196.743,33

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	(HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.					
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	wilayah sungai	4	15	
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	lembaga	5	5	5
	TARGET 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau					
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Dinas kehutanan	Ha	12.510	13.023	12.678,2
6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas kehutanan	DAS	4	2	2
	TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU					
	TARGET 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern					
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	98,43	98,72	99,89
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	KWh	743,58		848,93
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	90	91,67	93,38

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	TARGET 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global					
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	20,74	22	27,5
	TARGET 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.					
7.3.1*	Intensitas energi primer	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	SBM (setara barrel minyak)	-	-	-
	TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI					
	TARGET 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang					
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita (ADHK)	BPS		- 3,28	3,66	4,11
8.1.1.(a)	PDRB per kapita (ADHB)	BPS	Juta Rupiah	55,67	59,65	65,59
	PDRB per kapita (ADHK)	BPS	Juta Rupiah	36,25	37,57	35,11
	TARGET 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.					
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS	%	43,18	46,27	35,17
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS	%	35,78	36,76	36,43
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS	%	91,73	33,24	35,96

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	%	29	30,96	39,22
	TARGET 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya					
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja (Rupiah/Jam)	BPS	%	19.172	19.217	36.450
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	6,31	5,72	4,51
8.5.2(a)	Tingkat setengah pengangguran	BPS	%	9,96	7,42	6,23
	TARGET 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan					
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	%	25,48	23,78	22,61
	TARGET 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal					
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan	%	2,82	1,18	1,32
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan	Jiwa	6.598	3.645	70.977
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan	Jiwa	367.926	1.612.737	7.590.063
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata	Dinas tenaga kerja	%	3,73	Tidak ada survey	Tidak ada survey

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	dalam proporsi terhadap total pekerja.	dan transmigrasi				
	TARGET 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua					
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	%	30	30,41	35,76
	TUJUAN 9 : INDUSTRI,INOVASI DAN INFRASTRUKTUR					
	TARGET 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua					
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	Dinas perhubungan	Km	-	42,7	116
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas perhubungan	Unit	1	1	2
	TARGET 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.					
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Dinas perindustrian	%	13,06	12,47	13,42
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas perindustrian		-4,42	-0,27	9,86
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	%	8,16	16,35	15,45
	TARGET 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.					
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Dinas perindustrian	%	9,11	8,91	Data Tidak Tersedia
	TARGET 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan					

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.					
9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca (sektor limbah)	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	3,4	3,88	7,85
	TARGET 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan					
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	73,39	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	85,3	87,17	87,52
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	49,59	59,69	94,24
	TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN					
	TARGET 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.					
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS	Indeks	0,382	0,377	0,365
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	8,99	8,53	8,66

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan (jumlah desa tertinggal)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kabupaten (Desa)	981	326	195
	TARGET 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut					
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	%	68,4		
	TARGET 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.					
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tenaga kerja dan transmigrasi	%	77,99	47,12	49,43
	TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN					
	TARGET 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh					
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akases terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	%	64,24	69,11	69,9
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	kawasan perkotaan	-	-	-
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota sedang & Kota baru	-	-	-
	TARGET 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.					

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan		11,5	12,7	30,8
	TARGET 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.					
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota Sedang	7	7	Data Tidak Tersedia
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota	1	1	Data Tidak Tersedia
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Bappelitbangda	Institusi/ Kota	-	-	21
	TARGET 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.					
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota Pusaka	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	TARGET 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan					
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	78	27	32

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	Meninggal = 78 Terdampak = 70.854	Meninggal = 27 Terdampak = 21.470	Meninggal : 32 Terdampak : 2.312
	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	-	4	6
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	-	76	46
	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	-	21.470	2.312
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks	157,55	154,87	150,07
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kab/Kota	-	8	Data Tidak Tersedia
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem	-	5	Data Tidak Tersedia
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	620 Milyar	119 Milyar	89 Milyar

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	TARGET 11.6 Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030					
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	30	82,32	54,48
	TUJUAN 12 : KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB					
	TARGET 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.					
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ton	3.500.000	589007,56	5.557.493.578
	TARGET 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali					
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ton/ Hari	19,97	31,82	174.375
	TUJUAN 13 :PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM					
	TARGET 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.					
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko	Badan	Dokumen	1	1	1

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Penanggulangan Bencana Daerah				
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	Meninggal = 78 Terdampak = 70.854	Meninggal = 27 Tercampak = 21.470	Meninggal : 32 Terdampak : 2.312
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	N/A	27	32
	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	N/A	4	6
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	N/A	76	46
	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	N/A	21.470	2.312
	TARGET 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional					
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Bappelitbangda	Dokumen	-	1	1
	TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN					
	TARGET 14.Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur					

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.					
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	87,48	63,87	94,01
	TARGET 14.Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar					
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Dinas kelautan dan perikanan	Regulasi/ Kebijakan	1	-	-
14.b.1.(a)	Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Dinas kelautan dan perikanan	Kab/ Kota	19	19	19
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas kelautan dan perikanan	Nelayan	NA	660	0
	TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN					
	TARGET 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.					
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas kehutanan	%	56,64	0	Data Tidak Tersedia
	TARGET 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global					
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Dinas kehutanan	Ha	100	Data Tidak Tersedia	55,46

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Dinas kehutanan	Ha	12.000	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dinas kehutanan	KPH	16	16	24
	TARGET 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.					
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas kehutanan	%	0,27	0,73	0,71
	TARGET 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.					
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1
	TUJUAN 16 : PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH					
	TARGET 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun					
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	BPS	Kasus	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
		POLDA	Kasus	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS	%	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	TARGET 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak					
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda	Dinas pemberdayaan	%	0,082	0,091	0,011

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	perempuan dan perlindungan anak				
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%	0,053	0,038	0,02
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%	51,31	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	TARGET 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat					
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Pengelola Keuangan Daerah		-	98,44	99,62
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	WDP	WTP	Belum Rilis
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	%	4,01 (A-)	4,10 (A-)	4,34 (A-)
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	%	63,02 (B)	65,61 (B)	66,16 (B)

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	Kabupaten/Kota)					
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Biro Pembangunan Sekretariat Daerah	%	83,39	28,33	28,33
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	%	60,07 (B)	B (60,07)	B (66,16)
	TARGET 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan					
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi	BPS	%			Data Tidak Tersedia
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	%			Data Tidak Tersedia
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik	BPS	%			Data Tidak Tersedia
	TARGET 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.					
16.9.1.(a)	Persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40 bawah yang memiliki akta kelahiran	BPS	%	87,87	89	90,33
	TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN					
	TARGET 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.					
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai	Badan Pendapatan	%	0,67	0,82	

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Daerah				
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Badan Pendapatan Daerah		0,56	0,71	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Badan Pendapatan Daerah	%	43,98	45,57	
	TARGET 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global					
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	73,39	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	TARGET 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi					
17.8.1*	Proporsi individu (rumah tangga) yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	49,59	59,69	94,24
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	TARGET 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan					

Kode Indikator	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian		
				2020	2021	2022
	dengan konteks nasional.					
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%	98,63	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	93,51	98,72	Data Tidak Tersedia
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	%	11	75	Data Tidak Tersedia
	TARGET 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang					
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	%	Ada	Ada	Ada
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Jiwa	100.933	109.937	Data Tidak Tersedia
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	92,69	96,3	Data Tidak Tersedia

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumber- sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Guna menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, selama periode Gubernur Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2018-2022, telah dirumuskan berbagai strategi optimalisasi yang adaptif dengan kondisi makro ekonomi serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Strategi yang ditempuh dirumuskan dalam berbagai paket kebijakan, yang mencakup Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan. Strategi yang ditempuh diderivasi ke dalam bentuk struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa APBD merupakan instrumen kunci dalam sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan. Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Penyusunan Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat

memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkan atas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok- pokok kebijakan fiskal. Untuk itu, pada bagian ini akan diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah lima tahun ke depan. Terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah, desain penganggaran sudah harus menunjukkan besaran anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Dalam rangka me lakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018-2022 dengan perkembangan dan/atau perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang menyebabkan harus dilakukannya perubahan/pergeseran anggaran antar kelompok belanja, anggaran unit organisasi dan antar program dan kegiatan, serta antar jenis belanja.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran pelayanan publik.

Kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan peran dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya, sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah yang telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Analisis kinerja pelaksanaan APBD, selama tahun 2018-2022 dan perbandingannya terhadap kinerja pelaksanaan APBD akhir tahun periode pemerintahan sebelumnya dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil

Pajak dari Provinsi dan Pemerimtah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern.

Untuk jenis pajak daerah yang bersifat self assessment, koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah akan terus diintensifkan dengan harapan adanya kerjasama-kerjasama lintas sektor yang menguntungkan bagi penerimaan pendapatan daerah. Disamping modernisasi pelayanan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan terus ditingkatkan melalui pendataan dan penagihan pajak secara aktif diiringi penegakan sanksi yang efektif. Selain berdampak langsung kepada penerimaan Pajak Daerah, upaya ini juga menunjang penerimaan dari sisi Lain-Lain PAD Yang Sah.

Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah, peningkatan hasil retribusi daerah juga akan mendapat perhatian melalui perbaikan sistem pengelolaan retribusi menjadi lebih efisien dan akuntabel. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah.

Perkembangan kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2018 s/d 2022 menunjukkan kinerja yang semakin membaik yang dengan ditandai peningkatan Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.25 Triliun lebih, sedangkan Rencana Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 9,35 Triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar 0,22 persen. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018–2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 1.
Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2022

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
(sesuai PP 58/2005)	Realisasi	Realisasi	Realisasi	(sesuai PP 12/2019)	Realisasi	Target
Pendapatan Daerah	**9.252.221.942.175,45**	**9.573.910.861.960,70**	**9.365.471.515.325,67**	**Pendapatan Daerah**	**10.009.403.475.558,42**	**9.354.958.029.217,00**
Pendapatan Asli Daerah	**3.948.349.252.423,45**	**4.138.631.215.914,70**	**3.890.209.264.433,67**	**Pendapatan Asli Daerah**	**4.469.113.381.188,42**	**5.075.689.254.356,00**
Pajak Daerah	3.462.184.656.928,00	3.710.611.599.841,00	3.362.622.269.609,30	Pajak Daerah	3.846.736.206.985,26	4.408.955.704.325,00
Retribusi Daerah	70.370.128.268,00	40.884.402.523,60	36.925.378.354,50	Retribusi Daerah	38.393.202.133,68	42.907.998.400,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	108.949.315.359,00	111.357.119.117,00	115.022.553.678,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	115.551.932.611.00	135.785.593.949,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	306.845.151.868,45	275.778.094.433,10	375.638.702.791,87	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	468.432.039.458,48	488.039.957.682,00
Dana Perimbangan	**5.295.519.277.687,00**	**5.388.320.704.592,00**	**5.395.232.629.887,00**	**Pendapatan Transfer**	**5.426.146.349.398,00**	**4.134.714.575.000,00**

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
(sesuai PP 58/2005)	Realisasi	Realisasi	Realisasi	(sesuai PP 12/2019)	Realisasi	Target
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	237.746.371.914,00	169.796.915.880,00	272.130.329.571,00	**Dana Perimbangan**	**5.399.404.966.398,00**	**4.134.714.575.000,00**
Dana Alokasi Umum	2.509.480.255.000,00	2.586.312.342.000,00	2.349.993.034.000,00	**Dana Transfer Umum**	**2.681.354.437.517,00**	**2.614.287.580.000,00**
Dana Alokasi Khusus	2.540.292.650.773,00	2.632.211.446.712,00	2.773.109.266.316,00	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	342.218.564.517,00	274.247.055.000,00
Dana Insentif Daerah	8.000.000.000,00	28.941.848.000,00	4.500.000.000,00	Dana Alokasi Umum	2.339.135.873.000,00	2.340.040.525.000,00
Lain - lain Pendapatan yang Sah	**8.353.412.062,00**	**18.017.093.454,00**	**75.529.621.055,00**	**Dana Transfer Khusus**	**2.718.050.528.881,00**	**1.520.426.995.000,00**
Hibah	8.353.412.062,00	18.017.093.454,00	75.529.621.055,00	Dana Alokasi Khusus Fisik	328.785.757.508,00	321.993.568.000,00
Dana Penyesuaian	-	-	-	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2.389.264.771.373,00	1.198.433.427.000,00
				Lain - lain Pendapatan yang Sah	**114.143.744.972,00**	**144.554.199.861,00**

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
(sesuai PP 58/2005)	Realisasi	Realisasi	Realisasi	(sesuai PP 12/2019)	Realisasi	Target
				Hibah	114.143.744.972,00	144.554.199.861,00
				Dana Penyesuaian	-	-

Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, tahun 2022

Grafik III. 1.
Perkembangan Pendapatan Daerah (Rp)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

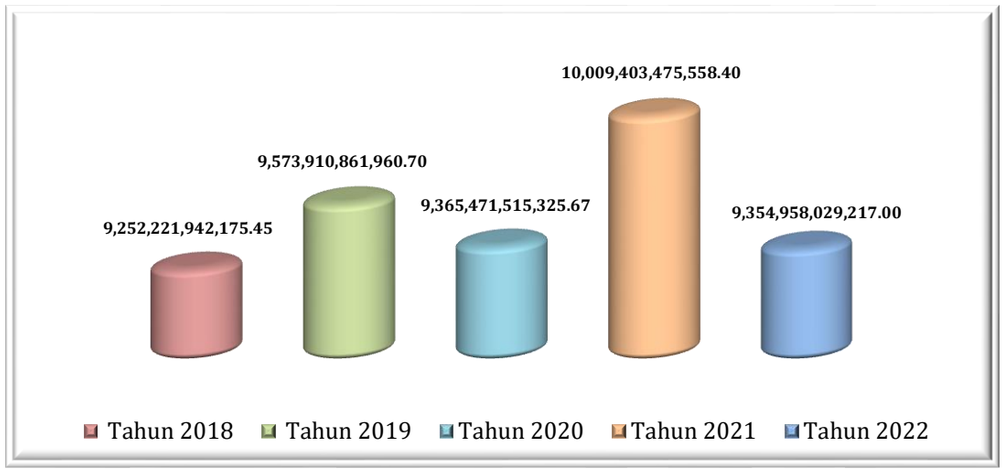

Sumber: Bapenda Prov. Sulsel, Tahun 2022

Kontribusi pendapatan yang bersumber dari dana transfer meskipun masih lebih tinggi dibanding pendapatan asli daerah hingga tahun 2022, namun rata-rata pertumbuhan pendapatan dari sumber PAD lebih tinggi (6,03 persen) dibanding rata- rata pertumbuhan dari sumber pendapatan dari dana transfer pusat (0,53 persen), sehingga pada tahun selanjutnya PAD dapat mendorong kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Selatan yang akan semakin memperkokoh dalam struktur anggaran pendapatan daerah**.** Adapun kinerja pertumbuhan dan postur Pendapatan daerah secara berturut-turut terlihat pada grafik berikut.

Grafik III. 2.
Postur Komponen Pendapatan Daerah (Rp)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

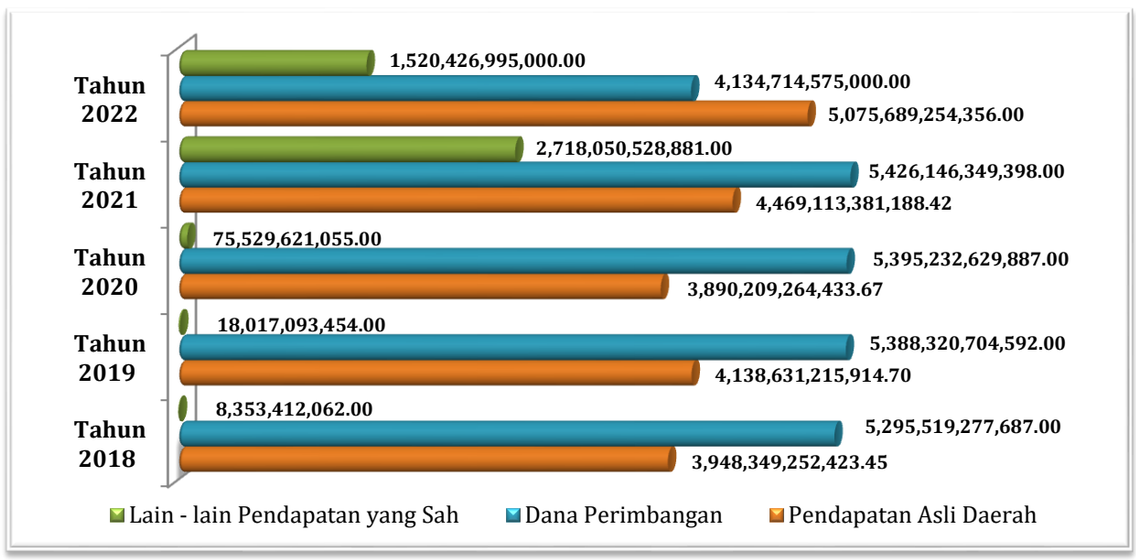

Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, tahun 2022

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah;
2) Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer; dan
3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiskal gap). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah nilainya mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2018 nilai PAD Provinsi Sulawesi Selatan masih sekitar Rp 3,94 Trilyun lebih, mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp 5,07 Trilyun lebih. Perkembangan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Daerah Sulawesi Selatan. Gambaran Perkembangan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III. 3.
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Rp) Tahun 2018-2022

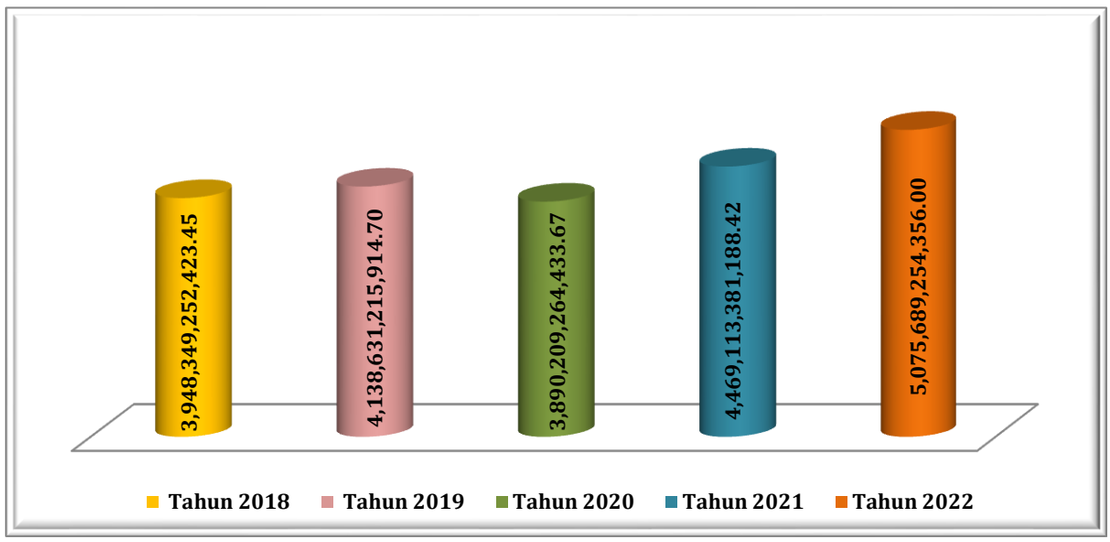

Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, tahun 2022

Dari segi Postur Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun Anggaran 2018-2022 masih didominasi oleh kontribusi dari Pajak Daerah rata–rata (88,48 persen), diikuti dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah rata–rata (6,88 persen), Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rata-rata (2,97 persen), dan yang terakhir adalah Retribusi Daerah rata-rata (1,67 persen). Kontribusi Retribusi Daerah yang

masih minim diikuti dengan penurunan rata-rata pertumbuhan retribusi daerah yang signifikan hingga mencapai 28,18 persen.

Grafik III. 4.
Postur PAD Provinsi Sulawesi Selatan (Rp)
Tahun 2018-2022

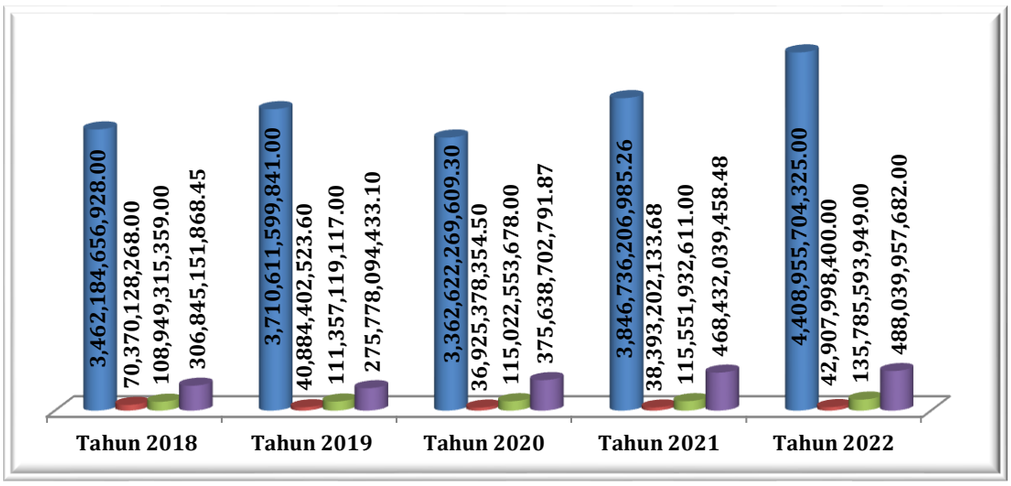

Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2022

Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari **:**

(a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan **Pajak daerah** meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Ketentuan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan pungutan meliputi **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok**. Terhadap pungutan tersebut sesuai amanat Pasal 94 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membagihasilkan sebagian perolehan pungutan Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan.

Saat ini Pajak Daerah masih menjadi tulang punggung PAD Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi Pajak Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata- rata pertumbuhan 6,99 persen dalam kurun waktu 2018-2022.

Grafik III. 5.
Perkembangan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Rp)
Tahun 2018-2022

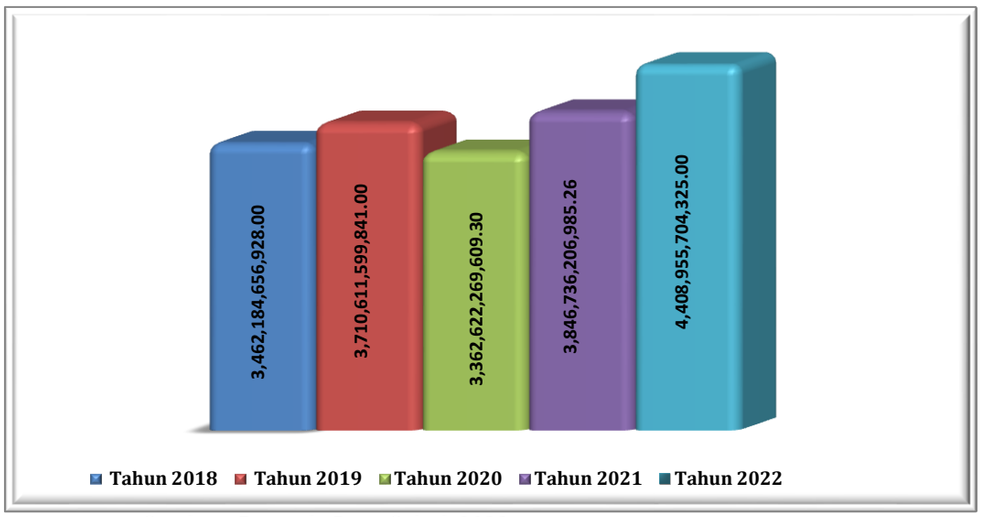

Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2022

Dari segi Postur Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih mendominasi dalam pendapatan Pajak Daerah, seperti grafik dibawah ini.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan PAD sangat dibutuhkan dalam menggerakan ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untukmenarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar. Pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022, berkontribusi cukup kecil terhadap Pendapatan Daerah tetapi tetap dilakukan upaya meningkatkan penerimaannya dengan perbaikan regulasi pengelolaan retribusi. Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha telah diperbarui sesuai dengan kondisi saat ini dan dilakukan penyesuaian terhadap potensi obyek dan tarif retribusi yang menyesuaikan kondisi perkembangan ekonomi. Langkah ekstensifikasi juga dilakukan dengan penambahan jenis retribusi baru yang dipungut berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi. Retribusi juga diarahkan pengelolaannya untuk lebih tertib dan telah dimungkinkan pula pembayaran retribusidaerah secara non tunai.

Realisasi penerimaan retribusi daerah secara kumulatif menunjukkan penurunan disebabkan peralihan kewenangan pengelolaan obyek retribusi serta peralihan status unit pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga pencatatan penerimaannya bukan lagi pada jenis Retribusi Daerah melainkan pada jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, Pada tahun 2018 retribusi daerah memberi kontribusi sebesar Rp. 70, 37 Milyar, namun trendnya terus

menurun hingga 2022 yang hanya memberi kontribusi sebesar Rp. 42,90 Milyar. Hal ini perlu mendapat perhatian tersendiri meskipun komponen retribusi daerah ini proporsinya kecil jika dibandingkan dengan kompenen lainnya. Jika penurunan rata-rata pertumbuhan retribusi daerah tersebut tidak mendapatkan perhatian, maka komponen tersebut dapat mempengaruhi kinerja pendapat asli daerah dimasa periode selanjutnya, seperti tergambar pada grafik berikut.

Grafik III. 6.
Realisasi Retribusi Daerah Sulawesi Selatan (Rp)
Tahun 2018-2022

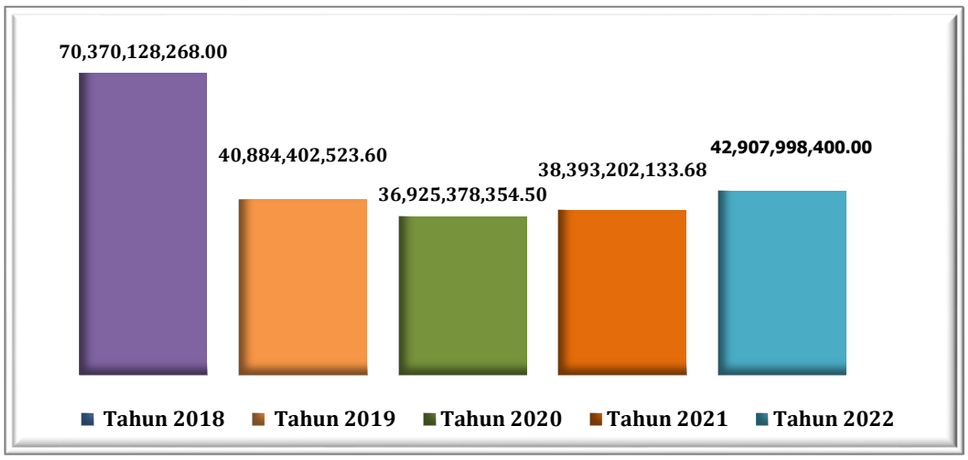

Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2022

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Untuk jenis penerimaan jenis ini masih mengandalkan penerimaan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Sulselbar di samping deviden dari penyertaan modal dari Perusahaan Daerah dan Badan Usaha lainnya.

Selama tahun 2018-2022, realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan masih fluktuatif, hal ini tergambar pada grafik berikut.

Grafik III. 7.
Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanProvinsi Sulawesi Selatan (Rp) Tahun 2018-2022

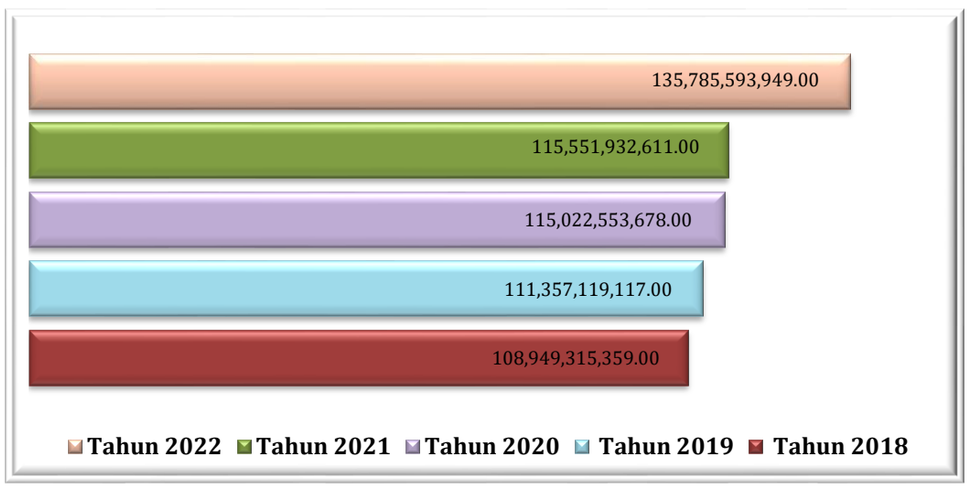

Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2022

Khusus Komponen **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah** terdiri dari: hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; hasil kerja sama daerah; jasa giro; hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak daerah; pendapatan denda retribusi daerah; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; pendapatan dari BLUD; dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pada komponen penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah, kontributor terbesar pada sektor ini adalah penerimaan denda Pajak Daerah. Selain dampak optimalisasi tunggakan Pajak Kendaran Bermotor yang turut berdampak pada peningkatan denda pajak daerah, upaya optimalisasi lain itu juga telah dirintis yakni pola pemanfaatan asset daerah dengan skema sewa. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang mengatur sewa barang milik daerah telah diterbitkan dan selanjutnya akan mulai diterapkan dimulai dengan pendataan obyek-obyek Barang Milik Daerah yang berpotensi PAD dan selanjutnya akan dilakukan penilaian potensi nilai sewa oleh penilai/apraisal. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah periode tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,21 persen.

Grafik III. 8.
Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Rp) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

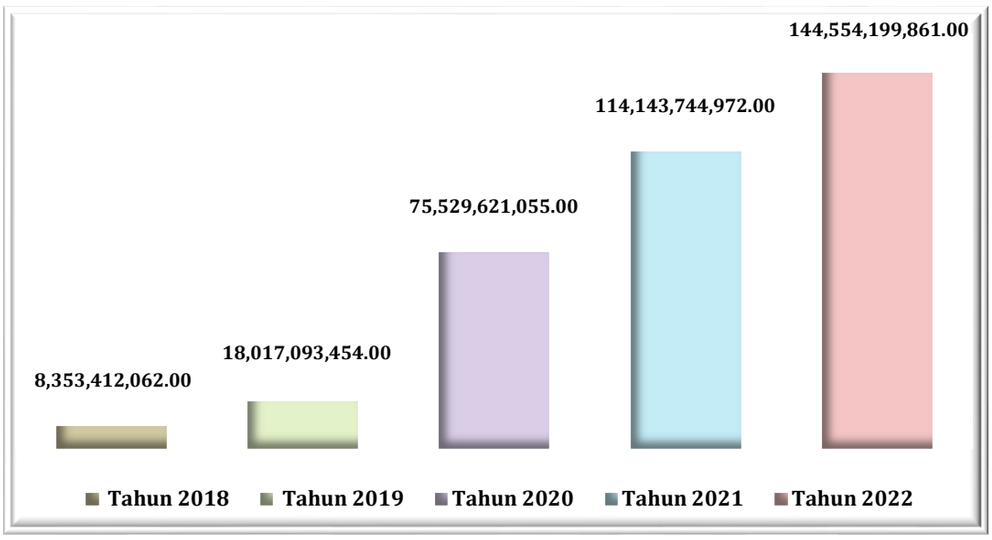

Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2022

b. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer

Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer terdiri dari Dana bagi hasil / bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah. Dana bagi hasil / bagi hasil bukan pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.

Grafik III. 9.
Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak (Rp) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

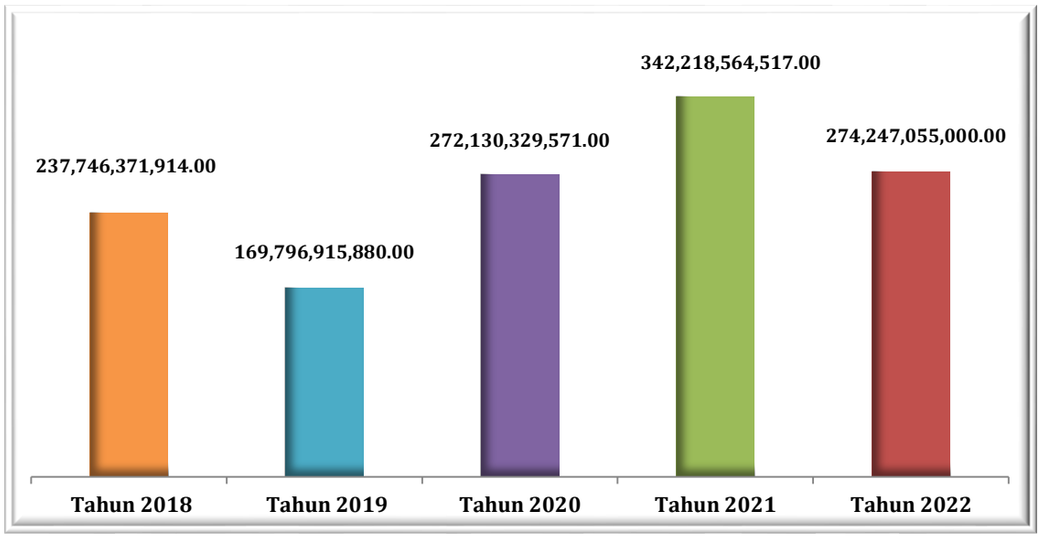

Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2022

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP 55 tahun 2005 Pasal 1 angka 23 dan PP 12 tahun 2019 pasal 37).

Dana Alokasi Umum setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 16,99 persen dalam kurun waktu 2018-2022. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terjadi peningkatan penyaluran DAU tahun 2019 yang disebabkan adanya pendanaan untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tambahan untuk bantuan pendanaan kelurahan.

Penyaluran DAU cenderung stagnan, bahkan DAU tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020 namun ditahun tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan, sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Grafik III. 10.
Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

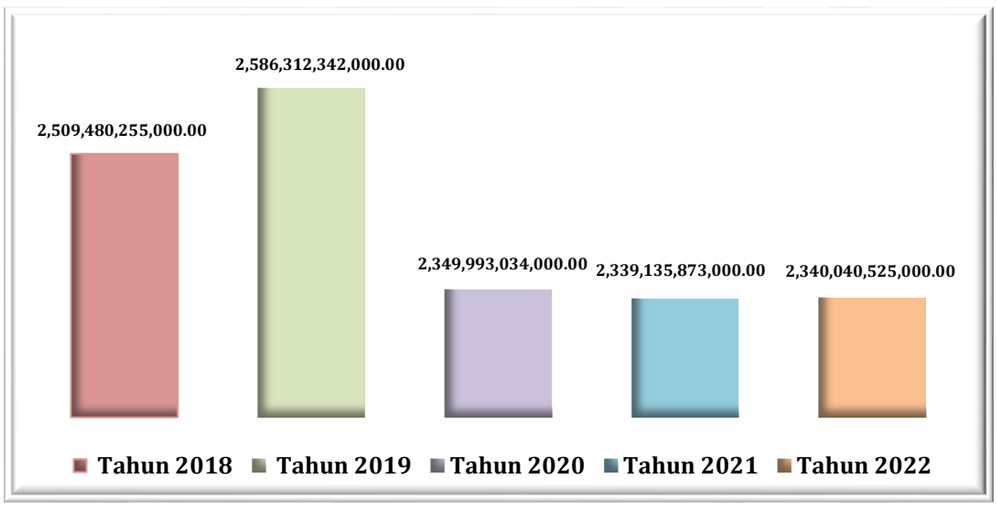

Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2022

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, realisasi Penerimaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik seperti gambar dibawah ini :

Grafik III. 11.
Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus (Rp)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2022

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu (PP 12 tahun 2019 pasal 39). Dana otonomi khusus dialokasikan kepadaDaerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undangundangan (PP 12 tahun 2019 pasal 40). Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan (PP 12 tahun 2019 pasal 41). Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa (PP 12 tahun 2019 pasal 42). Realisasi Dana Insentif Daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan dan rata-rata pertumbuhan 134,22 persen dalam kurun waktu 2018-2022, hal tersebut tergambar pada grafik berikut.

Grafik III. 12.
Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah (Rp)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

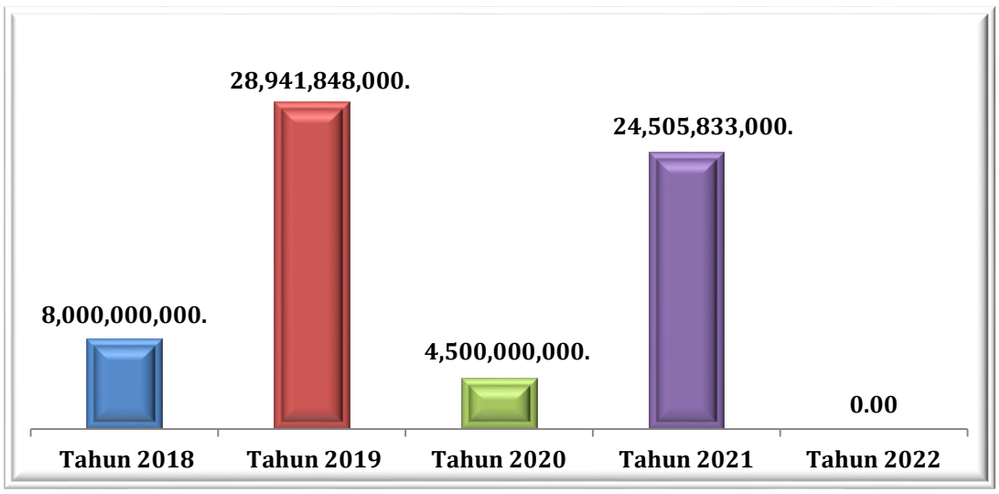

Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2022

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dan Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah selama tahun 2018-2022 bersumber dari hibah. Perkembangan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah selama tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2018 realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 8,35 Milyar lebih dan Pada tahun 2019 menjadi Rp. 8,35 Milyar lebih atau menurun sebesar 41,12persen, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 18,01 Milyar lebih atau meningkat sebesar 115,69 persen terhadap tahun 2018, bahkan di tahun 2022 peningkatannya sangat siginifikan yaitu menjadi Rp. 144,55 Milyar lebih. Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah selama tahun 2018-2022 ditunjukan pada Grafik berikut.

Grafik III. 13.
Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah(Rp)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

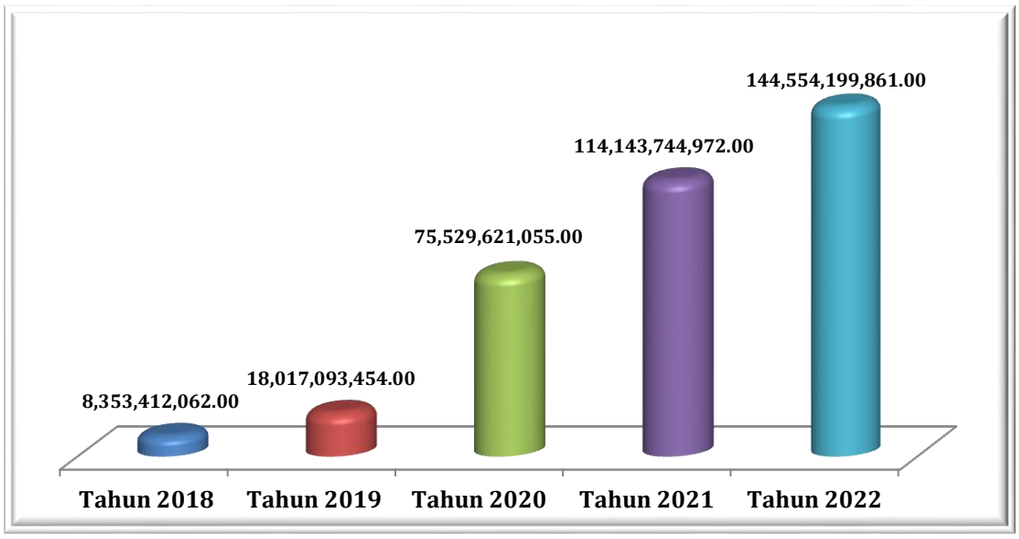

Sumber : Bapenda Prov. Sulsel, 2022

3.1.1.2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Gubernur nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam peraturan Gubernur tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalamiperubahan Nomenkelatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah dalam untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengah ketentuan perundang-undangan dan sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah tahun 2021-2022 terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Realisasi belanja daerah Tahun 2018–2023 mengalami peningkatan pada periode Tahun Anggaran 2018-2023. Pada Tahun Anggaran 2018 Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 9,3 Triliun lebih dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 9,4 Triliun lebih pada Tahun Anggaran 2022 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,45 persen, komponen belanja pegawai masih mendominasi dengan rata-rata persentase dari total belanja. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding). Belanja bunga pada tahun 2018 telah berakhir sehingga tidak ada lagi komponen belanja bunga pada tahun 2019 namun di tahun 2020-2022 kembali direncanakan. Komponen belanja Hibah pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,86 Triliun menurun sebesar Rp. 303 Milyar pada tahun 2022, Belanja bantuan Sosial tahun 2018 sebesar Rp. 600 juta lebih dan Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 818 juta lebih tetapi ditahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 6,24 Milyar lebih. Belanja bagi hasil Tahun 2018 mencapai Rp. 1,3 Triliun lebih dan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,7 Triliun lebih tahun 2019 dibanding tahun dan ditahun 2022 mengami penurunan menjadi Rp. 1,6 Triliun lebih. Untuk belanja Bantuan Keuangan mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebesar 90 persen, dan Belanja tak terduga hanya ada pada tahun 2020 sampai tahun 2022, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel III. 2.
Rata - Rata Pertumbuhan Realiasasi dan Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 - 2022

Uraian (sesuai PP 58/2005)	Realisasi			Uraian (sesuai PP 12/2019)	Realisasi	Target
	2018	2019	2020		2021	2022
Belanja Daerah	**9,322,103,147,943.00**	**9,489,469,127,455.93**	**9,978,069,735,607.69**	**Belanja Daerah**	**10.747.487.403.131**	**9,406,862,731,245**
Belanja Tidak Langsung	**6,548,504,115,658.00**	**6,869,545,370,496.22**	**7,194,321,932,477.90**	**Belanja Operasi**	**7.380.766.399.205,00**	**5,659,091,736,128**
Belanja Pegawai	3,064,236,808,013.00	3,231,400,510,914.65	3,084,732,779,274.00	Belanja Pegawai	3.215.721.446.282	3,114,232,139,368
Belanja Bunga	1,212,859,794.00	0	2,476,741,949.66	Belanja Barang dan Jasa	2.496.138.742.834	2,235,536,073,905
Belanja Subsidi	0	0	0	Belanja Bunga	15.279.131.388	2,481,726,343
Belanja Hibah	1,864,993,851,524.00	1,391,918,320,000.00	1,498,758,095,250.00	Belanja Subsidi	-	0.00
Belanja Bantuan Sosial	600,000,000.00	818,000,000.00	805,000,000.00	Belanja Hibah	1.554.279.504.080	303,751,796,512
Belanja Bagi Hasil	1,383,334,398,528.00	1,733,213,706,105.57	1,534,452,968,568.24	Belanja Bantuan Sosial	1.731.000.000	6,240,225,000.00

Uraian (sesuai PP 58/2005)	Realisasi			Uraian (sesuai PP 12/2019)	Realisasi	Target
	2018	2019	2020		2021	2022
Belanja Bantuan Keuangan	234,126,197,799.00	512,194,833,476.00	805,333,232,979.00	**Belanja Modal**	**1.624.168.814.930**	**1,627,018,355,261**
Belanja Tidak Terduga	0	0	267,763,114,457.00	Belanja Modal	1.624.168.814.930	1,627,018,355,261
Belanja Langsung	**2,773,599,032,285.00**	**2,619,923,756,959.71**	**2,783,747,803,129.79**	**Belanja Tidak Terduga**	**143.734.933.112**	**50,000,000,000**
Belanja Pegawai	3,807,162,825.00	4,571,088,552.00	5,905,800,901.00	Belanja Tidak Terduga	143.734.933.112	50,000,000,000
Belanja Barang dan Jasa	1,687,986,093,900.00	1,645,861,899,471.64	1,594,326,717,801.69	**Belanja Transfer**	**1.696.433.830.505**	**2,070,752,639,856**
Belanja Modal	1,081,805,775,560.00	969,490,768,936.07	1,183,515,284,427.10	Belanja Bagi Hasil	1.434.928.871.615	1,625,075,631,356
				Belanja Bantuan Keuangan	261.504.958.890	445,677,008,500

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Secara umum komponen Pembiayaan daerah terdiri atas **penerimaan Pembiayaan** daerah didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah dan **pengeluaran Pembiayaan Daerah** didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang.

Tabel III. 3.
Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan DaerahProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2022

No.	Uraian	Tahun (Rp.)					Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
2.3	**Pembiayaan**	127,059,727,326.00	7,128,681,556.70	1.009.209.884.368,49	365,892,185,153	51,904,702,028.00	-12.83
2.3.1	Penerimaan Pembiayaan	192,336,065,874.01	57,128,681,556.72	1.009.209.884.368,49	388.592.185.153	219,428,919,963	-21.19
2.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	65,276,338,548.00	50,000,000,000.00	0,00	22.700.000.000	167,524,217,935	-15.57

Realisasi Pembiayaan Daerah selama Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 realisasi sebesar Rp. 127.05 Milyar kemudian pada tahun 2019 menurun sebesar Rp. 7,12 Milyar lebih, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 1,09 triliun lebih, namun ditahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 365, 8 Milyar lebih dan ditahun 2022 kembali turun menjadi Rp. 51,90 Milyar lebih.

3.1.2. Neraca Daerah

Perkembangan neraca daerah, menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yakni keseimbangan antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah. Perkembangan nercara daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode pencatatan 2019-2021, ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel III. 4.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021

No.	Uraian	2019 (Juta)	2020 (Juta)	2021 (Juta)	Rata-rata Pertum-buhan (persen)
1	**ASET**				
01.01	**Aset Lancar**				
01.01.01	Kas	80.184,18	388.596,67	220.367,77	40.07
01.01.02	Piutang	-	110.539,80	168.948,94	15.19
01.01.03	Persediaan	83.415,26	24.867,33	26.781,30	-31.53
	Jumlah Aset Lancar	**163.599,44**	**604.382,85**	**447.013,76**	**39.80**
01.02	**Aset Tetap**				
01.02.01	Tanah	7.547.507,93	7.956.691,01	8.333.334,43	3.36
01.02.02	Peralatan dan Mesin	2.354.696,20	2.843.703,18	3.274.051,78	11.61
01.02.03	Gedung dan Bangunan	5.597.004,53	6.001.640,80	6.418.299,27	4.67
01.02.04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.339.19.43	7.770.859,61	9.012.130,48	-50.30
01.02.05	Aset Tetap Lainnya	306.632,03	368.205,15	427.450,84	11.71
01.02.06	Konstruksi dalam Pengerjaan	711.656,97	849.429,24	341.179,95	-21.73
01.02.07	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	7.853.249,14	8.685.834,39	9.453.499,45	6.38
	Jumlah Aset Tetap	**16.003.767,95**	**17.104.695,60**	**18.352.944,33**	**4.67**
01.03	**Aset Lainnya**				
01.03.01	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	
01.03.02	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-
01.03.03	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	56.600,00	56.600,00	155.669,83	40.11
01.03.04	Aset Tak Berwujud	48.935,45	56.773,00	63.742,00	9.21
01.03.05	Aset Lain-lain	270.218,42	261.297,81	267.177,81	-0.38
01.03.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	15.579,16	27.296,95	82.856,27	-274.55
	Jumlah Aset	**360.174,71**	**409.759,04**	**347.374,86**	**-1.20**

No.	Uraian	2019 (Juta)	2020 (Juta)	2021 (Juta)	Rata-rata Pertum-buhan (persen)
	Lainnya				
	JUMLAH ASET	**16.527.542,10**	**19.636.742,69**	**20.902.452,51**	**8.14**
2	**KEWAJIBAN**				
02.01	**Kewajiban Jangka Pendek**				
02.01.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	3.119,90	4,00	938,00	-33.01
02.01.02	Utang Bunga	-	11.105,50	975,50	-55.55
02.01.03	Utang PPh Pasal 21	-			-
02.01.04	Utang PPh Pasal 22	-			-
02.01.05	Utang PPh Pasal 23	-			-
02.01.06	Utang PPN	-			-
02.01.07	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	133.877,00	22.312,48	155.44
02.01.08	Pendapatan Diterima Dimuka	4.166,85	20.571,92	30.910,51	95.03
02.01.09	Utang Beban	462.796,71	941.306,44	954.649,70	27.30
02.01.10	Utang Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	-			00.00
02.01.11	Utang Jangka Pendek Lainnya	57.78	0	0	-100.00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**470.141,24**	**995.300,34**	**1.121.351,71**	**33.61**
02.02	**Kewajiban Jangka Panjang**	-			
	Utang Pemerintah Pusat	-			00.00
	Utang Jangka Panjang Lainnya	18.500,00	18.500,00	18.500,00	00.00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**252.54**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**488.641,24**	**1.928.633,86**	**1.931.962,71**	**58.13**
3	**EKUITAS DANA**				
03.01	**Ekuitas Dana Lancar**	-			
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	72,064	388.592	73.676	0,74
03.01.02	Pendapatan Yang Ditangguhkan	-	-	-	-
03.01.03	Cadangan Piutang	-	-	-	-
03.01.04	Cadangan Persediaan	-	-	-	-
03.01.05	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-	-

No.	Uraian	2019 (Juta)	2020 (Juta)	2021 (Juta)	Rata-rata Pertum-buhan (persen)
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	72,064	388.592	73.676	**0,74**
03.02	**Ekuitas Dana Investasi**	-	-	-	-
03.02.01	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-
03.02.01	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	-	-	-	-
03.02.02	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	-	-	-	-
03.02.03	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	**0-**
	JUMLAH EKUITAS DANA	**72,064**	**388.592**	**73.676**	**0,74**
	JUMLAH KEWEAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**17,088,247.00**	**21,953,967.00**	**22,908,090.00**	**1.43**

3.1.2.1 Aset

Analisis aset meliputi empat aspek utama, yakni aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Selama periode 2019-2021, Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan perkembangan aset daerah dengan rata-rata pertumbuhan 8,14 persen. Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusi dari aset tetap yang mencapai 4,67 persen. sementara aset lainnya hanya mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan minus 1,20 persen. Pada periode yang sama, aset lancar mengalami kenaikan capaian dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 39,80 persen. Rendahnya pertumbuhan aset daerah secara keseluruhan disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada rata-rata pertumbuhan aset lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aset lancar daerah lebih banyak ditujukan untuk memenuhi kewajiban- kewajiban jangka pendek daerah.

3.1.2.2 Kewajiban

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasi ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar-kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Kewajiban daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019-2021 terus mengalami peningkatan dengan capaian kewajiban rata – rata sebesar 58,13 persen. Peningkatan kewajiban daerah tersebut, terutama didorong oleh komponen utang perhitungan pihak ketiga (PPK) yang bertumbuh negatif rata-rata sebesar - 33,01 persen, kemudian rata-rata pertumbuhan utang bunga yang mencapai negatif 55,55 persen, serta pertumbuhan utang beban sebesar 27.30 persen. Ketiga komponen inilah yang mendorong rata-rata pertumbuhan kewajiban jangka pendek hingga 33,61

persen setiap tahunnya selama periode 2019-2021. Komponen-komponen kewajiban lainnya menunjukkan penurunan yang cukup berarti, terutama yang terkait dengan komponen kewajiban pajak dan bagian lancar utang jangka panjang.

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Secara konseptual, ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah yang terbagi dalam tiga kategori, yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Ekuitas dana Sulawesi Selatan selama periode 2019-2021, mengalami trend positif, meskipun rata- rata pertumbuhan yang relative kecil yakni hanya 2,96 persen setiap tahunnya. Kecilnya rata-rata pertumbuhan ekuitas dana dipengaruhi oleh pertumbuhan negatif dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Sementara Kontribusi terbesar dalam menciptakan pertumbuhan rata-rata ekuitas dana yang positif ditunjukkan oleh komponen ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset lainnya yang mencapai 0,00 persen..

3.1.2.4 Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas)

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Perkembangan rasio keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Rasio Likuiditas

Kondisi Rasio Likiuditas yang diukur dengan rasio lancar mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021, hal ini menunjukkan besarnya aktiva lancar yang dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar mengartikan bahwa semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Untuk mengetahui rincian rasio lancar daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 5.
Rasio Lancar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021

(Dalam Jutaan)

No.	Tahun	Aset Lancar (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio
1	2019	163.599,44	470.141,24	0.35
2	2020	604.382,85	995.300,34	0.61
3	2021	447.013,76	1.121.351,71	0.40

Sumber: APBD Sulsel berbagai seri

Demikian pula yang diukur menggunakan Rasio Quick, rasio ini akan menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibanding dengan aset lainnya. Rasio cepat (Quick Ratio) Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan nilai yang semakin menurun dari tahun 2019 ke tahun 2021, kondisi ini perlu perhatian khusus yang

mempertimbangkan penambahan hutang jangka pendek di tahun-tahun selanjutnya pada tabel berikut.

Tabel III. 6.

Rasio Quick Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021

(Dalam Jutaan)

No.	Tahun	Aset Lancar (Rp)	Persediaan (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio
1	2019	163.599,44	83.415,26	470.141,24	0.17
2	2020	604.382,85	24.867,33	995.300,34	0.58
3	2021	447.013,76	26.781,30	1.121.351,71	0.37

Sumber : Neraca Sulsel berbagai seri

Rasio Likiuditas yang diukur dengan rasio cash menunjukkan fluktuatif selama tahun 2019-2021. Namun demikian, kemampuan membayar utang jangka pendekmenunjukan kondisi yang sangat baik. Rincian rasio Cash daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 7.

Rasio Kas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021

(Dalam Jutaan)

No.	Tahun	Kas (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio
1	2019	80.184,18	470.141,24	0.17
2	2020	388.596,67	995.300,34	0.39
3	2021	220.367.77	1.121.351,71	0.20

Sumber: Neraca Sulsel berbagai seri

B. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas: Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rasio total hutang terhadap total ekuitas pada tahun 2019 hingga 2021 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kisaran nilai 0.03 hingga 0,04. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap pembiayaan pada tahun 2019 dan 2019 lebih tinggi dari tahun 2021, dan pengaruh hutangnya terhadap aktiva sangat kecil. Untuk mengetahui rincian rasio hutang terhadap aset daerah dapat dilihat pada tabel III.6 dan tabel berikut.

Tabel III. 8.
Rasio Total Kewajiban dengan EkuitasProvinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Total Kewajiban	Ekuitas Dana	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas
1	2019	488.641.243.032,00	17.381.912.823.212,00	0.03
2	2020	1.928.633.014.827,86	17.708.109.611.388,83	0.11
3	2021	1.931.962.201.591,71	18.970.490.342.934,80	0.10

Sumber: APBD Sulsel berbagai seri

Tabel III. 9.
Rasio Total Kewajiban dengan Aset Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019-2021

(Dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total Kewajiban (Rp)	Total Aset (Rp)	Rasio
1	2019	488.641,24	16.527.542,10	0.030
2	2020	1.928.633,86	19.636.742,69	0.098
3	2021	1.931.962,71	20.902.452,51	0.092

Sumber: APBD Sulsel berbagai seri

C. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas dihitung dalam analisis keuangan yaitu berupa piutang yang terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan piutang lainnya. Piutang Pemerintah Provinsi di Tahun 2021 sebesar Rp. 168.948.739.977,94 sedangkan di Tahun 2020 sebesar Rp. 110.539.817.803,80.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tergambar dalam APBD selama periode 2018-2022, menguraikan dua aspek penting, yakni (1) proporsi penggunaan anggaran dan (2) hasil analisis pembiayaan. Pada kedua aspek ini telah dicermati sejumlah kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi belanja dan pembiayaan pembangunan daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga sangat terkait pada penguatan kapasitas terhadap pelayanan publik untuk penciptaan kesejehteraan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan diantaranya Penyelamatan Aset Daerah, Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan Peningkatan Kesejahteraan ASN.

Khusus penyelamatan aset daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadakan supervisi dan penyelamatan aset terkait pendanaan, personil, prasarana dan dokumen (P3D). Selaian itu KPK juga mendorong dilakukan rekonsiliasi aset dengan untuk melancarkan proses sertifikasi dan perlindungan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Terkait kebijakan pemberian bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Sulawesi selatan pada tahun 2018-2022 telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan kepada kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Bantuan Keuangan tersebut diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang ditahun 2022 dalokasikan sebesar Rp. 445 Milyar lebih, Pemberian bantuan keuangan di antaranya berdasarkan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal selain itu untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak tersedia alokasi dananya, dan mendukung kebijakan program nasional, dan provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota

Sektor lain yang juga bisa mendapat bantuan keuangan dari pemprov adalah perbaikan layanan kesehatan. Jika ada daerah yang hendak membangun rumah sakit, mereka juga bisa mengusulkan bantuan keuangan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sifatnya anggaran sharing antara APBD pemerintah Kabupaten/Kota, APBD Pemerintah Provinsi, hingga APBN.

Selain bantuan keuangan tersebut diatas, juga diberikan untuk pengembangan sektor pariwisata serta sektor UKM kreatif, terutama untuk kerajinan daerah yang dinilai dapat meningkatkan APBD. Sepanjang program tersebut merupakan program yang produktif dan punya dampak ke masyarakat, maka pemerintah akan membantu. Kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan memberikan tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemberian TPP telah melewati proses fasilitasi Ditjen Otoda Kemendagri dan Korsupgah KPK yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 36 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan

Gubernur No. 130 tahun 2017 tentang pedoman pemberian TPP. Tambahan TPP tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, agar memacu kinerja ASN dan semakin disiplin, inovatif, dan produktif.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan Anggaran belanja untuk kebutuhan aparatur selama tahun 2019-2021 mengalami fluktuatif. Tahun 2019 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp. 3,67 Triliun lebih atau memiliki kontribusi sebesar40.65 persen dari toral pengeluaran daerah. Tahun 2019 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun menjadi Rp. 3,06 Triliun lebih atau memiliki kontribusi sebesar 32.64 persen dari total pengeluaran daerah. Kemudian Tahun 2019 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami peningkatan menjadi Rp. 3,23 Triliun lebih atau memiliki kontribusi sebesar 33.88 persen dari toral pengeluaran daerah. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021 ditunjukan pada tabel III.10.

Tabel III. 10.

Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2021

No.	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (persen)
		(a)	*(b)*	*(a)/(b) x 100 %*
1	2019	3,231,400,510,914	9,573,910,861,960	33,75
2	2020	3,084,732,779,274	9,978,069,735,607	30.92
3	2021	3.215.721.446.282	10,747,487,403,131	29.92

Sumber : BKAD Prov. Sulsel Tahun 2022

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Defisit Rill Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mengalami surplus sebesar Rp. 33,44 Milyar lebih. Sementara tahun 2020 dan 2021 mengalami defisit dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 612,59 Milyar lebih dan Rp. 760,78 Milyar lebih secara berturut turut. Defisit rill anggaran provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2021 secara keseluruhan ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Sementara suplus riil anggaran tahun 2019 menjadi penambah SILPA tahun berkenan. Defisit Riil dan Komposisi penutupan defisit Anggaran, serta realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Sulsel Tahun 2019–2021 secara berturut- turut ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel III. 11.

Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2021

No.	Uraian	Tahun (Jutaan Rp.)		
		2019	2020	2021
1	Realisasi Pendapatan Daerah	9.573.910	9.365.471	10.009.403
				Dikurangi realisasi:
2	Belanja Daerah	9,489,469	9,978,069	10.747.487
3	Pengeluaran Pembiayaan	50,000	0	22.700
(Defisit Riil)		**34,441**	**(612,598)**	**(760,784)**

Sumber : BKAD Prov. Sulsel Tahun 2022

Tabel III. 12.

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2021

No.	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (persen)		
		2019	2020	2021
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	100	100	100
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0

Sumber : BKAD Prov. Sulsel Tahun 2022

Tabel III. 13.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2021

No.	Uraian	2019		2020		2021	
		Rp. Juta	persen dari SiLPA	Rp. Juta	persen dari SiLPA	Rp. Juta	persen dari SilPA
1	Jumlah SiLPA	72,064	100	388.592,18	100	73,676	100
2	Pelampauan Penerimaan PAD						
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan						
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah						
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya						
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
7	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-

Sumber : APBD Sulsel tahunan

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah perubahan Provinsi Sulawesi Selatan yang tersisa selama tiga tahun ke depan yang dilanjutkan dengan proses pemulihan perekonomian pada tahun-tahun selanjutnya. Pada sisi lainnya, dalam kaitannya dengan ruang fiskal daerah, refocusing dana APBD pada setiap OPD berpengaruh pada sulitnya pemerintah daerah dalam mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya.

3.3.1. Asumsi Ekonomi, Sosial, dan Fiskal

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2024-2026. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnyakebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu tiga tahun ke depan.

Asumsi makro ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Sulawesi Selatan lima tahun ke depan, tetapi karena adanya bencana terkait dengan merebaknya wabah covid-19 akan memberikan imbas negatif terhadap

perekonomian Sulawesi selatan di beberapa sektor antara lain : 1) sektor transfortasi terutama transfortasi udara; 2) Sektor industri pengolahan; 3) sektor perdagangan besar dan eceran. Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan pertama 2020 diperkirakan akan jatuh 1-2 persen di bawah level triwulan yang sama tahun sebelumnya. Dan jika wabah ini terus meluas, maka perekonomian Sulawesi Selatan diperkirakan akan mengalami perlambatan lebih dalam hingga 3-4 persen pada triwulan kedua 2020 (y-on-y). Untuk mencegah ekonomi tidak semakin terpukul, pemerintah daerah perlu menyiapkan sejumlah kebijakan seperti di sisi produksi, pemerintah perlu memastikan agar dunia usaha dan industri kecil menengah tetap bergerak melalui penyediaan berbagai kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi (keringanan pajak dan biaya perijinan, pemberian bantuan, dll). Namun demikian Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan yang telah ditetapkan, perekonomian dapat terkendali dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah multiplier effects dari berbagai proyek infrastruktur (on going maupun finishing), seperti bendungan, kereta api, jalan tol, dan smelter, yang memacu kenaikan produksi dan mendorong investasi swasta. Selain itu, permintaan terhadap komoditas ekspor utama Sulawesi Selatan diperkirakan juga masih terjaga dan mendapat pengaruh positif dari kenaikan harga komoditas global.

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Sulawesi Selatan, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat, persentase penduduk miskin yang menurun, indeks pembangunan manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestikdan luar negeri.

Tabel III. 14.

Asumsi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2026

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Target Kinerja			
			Target	Capaian	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,62–5,98	5,09	5,04–6,52	5,23-6,71	5,67-6,82	5,71-6,91
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,10	8,66	7,45	8,31	8,20	8,09

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Target Kinerja			
			Target	Capaian	2023	2024	2025	2026
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,90	4,51	5,69	4,24	4,03	3,83
4	Gini Ratio	Angka	0,398	0,365	0,381	0,361	0,365	0,352
5	PDRB Per Kapita	Juta Rp.	62,37	59,65	65,98	70,70	74,55	75,07
6	Inflasi	%	3,0-1,0	3,0-1,0	3,0-1,0	3,0-1,0	3,0-1,0	3,0-1,0
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,57	72,82	73,05	74,02	74.57	75,07

Sumber : Data diolah, 2022

Asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal khususnya Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023-2026 diperkirakan akan tumbuh positif. Hal ini disebabkan oleh meredanya wabah covid-19.

Tabel III. 15.

Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2026

(Dalam Jutaan)

No.	Indikator	2023		2024		2025		2026	
		Pagu (Rp)	r	Pagu (Rp)	r	Pagu (Rp)	r	Pagu (Rp)	r
1	Pendapatan AsliDaerah	5.373.660	55.52	4.893.650	53.95	5.103.078	53.95	5.321.470	53.95
2	Pendapatan Transfer	4.217.015	43.57	4.049.748	44.65	4.223.061	44.65	4.403.791	44.65
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	88.161	0.91	127.031	1.40	132.467	1.40	138.137	1.40

Sumber : BKAD Prov. Sulsel 2022

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Komponen Pendapatan diproyeksikan berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi:

a. Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum cukup tinggi karena proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah selama tahun 2020-2023 diproyeksikan masih rata-rata sebesar 46,25 persen atau lebih rendah dari dana transfer yang mencapai rata-rata 52,70 persen. Pada kelompok PAD selama tahun 2020-2023 kontribusi terbesar bersumber dari Pajak Daerah sebesar 87,34 persen. Asumsi target Pajak Daerah dalam perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, namun

untuk tahun 2020-2023 dapat dijelaskan bahwa perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, memperhatikan karakteristik Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan pajak langsung bersifat periodikal (masa pajak selama satu tahun) dihitung berdasarkan potensi objek pajak pada akhir tahun 2019 sebanyak 1,96 Juta Objek Pajak dan rata- rata pertumbuhan kendaraan baru selama 4 tahun terakhir sebesar 12,69 persen. Prediksi perubahan jumlah objek hingga tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:
   - Besaran tarif PKB sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi SulawesiSelatan;
   - Prediksi jumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan pendaftaran ulang(tunggakan) setiap tahunnya;
   - Prediksi pertumbuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari trendrealisasi beberapa tahun terakhir;
   - Prediksi pertumbuhan kendaraan baru;
   - Prediksi objek mutasi masuk dan mutasi keluar yang jumlahnya tidakterlalu signifikan.
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), merupakan pajak tidak langsung sifatnya non periodikal, dipungut apabila terjadi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, proyeksinya dihitung berdasarkan perkiraan penjualan kendaraan baru dan potensi peralihan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya;
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dihitung berdasarkan potensi perkiraan penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh penyedia di wilayah Sulawesi Selatan dan perkiraan harga jual bahan bakar minyak oleh Pemerintah yang nilainya selalu berubah mengikuti perkembangan harga jual minyak mentah dunia dan nilai tukar mata uang asing, dengan memperhatikan trend realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor beberapa tahun terakhir;
4) Pajak Air Permukaan, diproyeksikan meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2023, perhitungan ini berdasarkan potensi penerimaan Waterlevy serta jumlah potensi konsumsi air permukaan dan nilai perolehan air, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni perubahan cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, fluktuasi konsumsi air yang dipengaruhi oleh cuaca, dimana pada musim penghujan konsumsi akan berkurang, sebaliknya pada musim kemarau akan terjadi peningkatan konsumsi air permukaan dengan memperhatikan trend realisasi Pajak Air Permukaan beberapa tahun terakhir;
5) Pajak Rokok, dihitung berdasarkan prediksi jumlah cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi serta proporsi penduduk Provinsi Sulawesi Selatan terhadap total penduduk nasional. Selain itu hal yang sangat berpengaruh adalah komitmen terhadap partisipasi Program Jaminan Kesehatan

Nasional yaitu sebesar 37,5 persen dari penerimaan Pajak Rokok, yang apabila tidak dilaksanakan akan dipotong langsung oleh Pemerintah Pusat.

b. Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer diproyeksikan meningkat setiap tahun. Kontribusi DAU dan DAK terhadap dana transfer pusat sangat dominan. Proyeksi tingkat pertumbuhan dana transfer ditentukan dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhannya terhadap pertumbuhan kondisi ekonomi makro nasional.
c. Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengoptimalkan alternatif pembiayaan infrastruktur dan terus mensosialisasikan secara intensif inovasi pembiayaan tersebut kepada pemerintah daerah antara lain Hibah dan Pinjaman melalui Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Pemerintah,ataupun Lembaga yang mendapatkan penugasan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Berbagai sumber-sumber pendanaan alternative strategis diatas, menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan yang dapat mendukung percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel III. 16.
Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2026

Uraian	Target		Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
	2022	2023			
Pendapatan Asli Daerah	**5.003.467.478.294,00**	**5,801,319,086,208.00**	**6,497,361,771,519.19**	**6,854,927,042,262.27**	**7,349,098,161,037.91**
Pajak Daerah	4.241.919.986.385,00	4,974,162,369,090.00	5,665,628,360,999.03	5,972,285,445,307.08	6,373,742,825,500.83
Retribusi Daerah	53.029.583.800,00	49,131,817,751.00	53.887.328.206,40	55.353.734.091,72	56.460.808.773,56
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	137.992.055.248,00	159,362,075,963.00	164.289.817.320,83	168.760.544.726,28	172.135.755.620,80
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	570.525.852.861,00	618,662,823,404.00	613,556,264,992.93	658,527,318,137.19	746,758,771,142.73
Pendapatan Transfer	**4.095.273.480.415,00**	**4,322,253,099,000.00**	**4.407.606.731.040,00**	**4.494.667.435.720,80**	**4.605.669.834.188,82**
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	234.805.960.415,00	259,896,213,000.00	265.094.137.260,00	270.396.020.005,20	277.155.920.505,33
Dana Alokasi Umum	2.340.040.525.000,00	2,525,244,049,000.00	2.575.748.929.980,00	2.627.263.908.579,60	2.692.945.506.294,09

Uraian	Target		Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
	2022	2023			
Dana Alokasi Khusus	1.520.426.995.000,00	1,482,541,340,000.00	1.512.192.166.800,00	1.542.436.010.136,00	1.580.996.910.389,40
Dana Insentif Daerah	-	54,571,497,000.00	54.571.497.000,00	54.571.497.000,00	54.571.497.000,00
Lain - lain Pendapatan yang Sah	**144.492.159.861,00**	**9,509,890,000.00**	**7.710.704.880,44**	**7.920.532.002,93**	**8,078,942,642.99**
Hibah	144.492.159.861,00	9,509,890,000.00	7.710.704.880,44	7.920.532.002,93	8.078.942.642,99
Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
Jumlah	**9.243.233.118.570,00**	**10,133,082,075,208.00**	**10,912,679,207,439.60**	**11,357,515,009,986.00**	**11,962,846,937,869.70**

Sumber : Bapenda Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2022

Komponen Pendapatan diproyeksikan berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi:

a. Upaya intensifikasi dan ekstensifikas yang dilakukan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin inovatif dan modern, membuat kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan semakin tinggi dalam memenuhi kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah selama tahun 2024-2026 diproyeksikan rata-rata sebesar 53,95 persen dibandingkan proporsi dari dana transfer yang mencapai rata-rata 44,65 persen. Pada kelompok PAD selama tahun 2024-2026 kontribusi terbesar bersumber dari Pajak Daerah sebesar 82,68 persen.

Dalam Asumsi Target Pendapatan Daerah dalam RPD Tahun 2024-2026 dapat dijelaskan bahwa perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, memperhatikan karakteristik Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan pajak langsung bersifat periodikal (masa pajak selama satu tahun) dihitung berdasarkan potensi objek pajak pada akhir tahun 2022 dan rata-rata pertumbuhan kendaraan baru selama 4 tahun terakhir. Prediksi perubahan jumlah objek tersebut hingga tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:
   - Besaran tarif PKB sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
   - Prediksi jumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan pendaftaran ulang (tunggakan) setiap tahunnya;
   - Prediksi pertumbuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari trend realisasi beberapa tahun terakhir;
   - Prediksi pertumbuhan kendaraan baru;
   - Prediksi objek mutasi masuk dan mutasi keluar yang jumlahnya tidak terlalu signifikan.
   - Prediksi *optiont* 30 % kepada Kabupaten/Kota

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), merupakan pajak tidak langsung sifatnya non periodikal, dipungut apabila terjadi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, proyeksinya dihitung berdasarkan perkiraan penjualan kendaraan baru dan sesuai dengan Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dihitung berdasarkan potensi perkiraan penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh penyedia di wilayah Sulawesi Selatan dan perkiraan harga jual bahan bakar minyak oleh Pemerintah yang nilainya selalu berubah mengikuti perkembangan harga jual minyak mentah dunia dan nilai tukar mata uang asing, dengan memperhatikan trend realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor beberapa tahun terakhir;
4) Pajak Air Permukaan, diproyeksikan meningkat dari tahun 2024 hingga tahun 2026, perhitungan ini berdasarkan potensi penerimaan Waterlevy serta jumlah potensi konsumsi air permukaan dan nilai perolehan air, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni perubahan cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sesuai peraturan

perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, fluktuasi konsumsi air yang dipengaruhi oleh cuaca, dimana pada musim penghujan konsumsi akan berkurang, sebaliknya pada musim kemarau akan terjadi peningkatan konsumsi air permukaan dengan memperhatikan trend realisasi Pajak Air Permukaan beberapa tahun terakhir;

5) Pajak Rokok, dihitung berdasarkan prediksi jumlah cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi serta proporsi jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan terhadap total jumlah penduduk nasional. Selain itu hal yang sangat berpengaruh adalah komitmen untuk mengalokasikan sebesar 50 persen penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang apabila tidak dilaksanakan akan dipotong langsung oleh Pemerintah Pusat.

b. Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer diproyeksikan meningkat setiap tahun. Kontribusi DAU dan DAK terhadap dana transfer pusat sangat dominan. Proyeksi tingkat pertumbuhan dana transfer ditentukan dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhannya terhadap pertumbuhan kondisi ekonomi makro nasional.
c. Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengoptimalkan alternatif pembiayaan infrastruktur dan terus mensosialisasikan secara intensif inovasi pembiayaan tersebut kepada pemerintah daerah antara lain Hibah dan Pinjaman melalui Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Pemerintah, ataupun Lembaga. Berbagai sumber-sumber pendanaan alternative strategis diatas, menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan yang dapat mendukung percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel III. 17.
Target dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2026

Uraian (sesuai PP 12/2019)	Target (Rp)		Proyeksi (Rp)		
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Belanja Daerah	**9,406,862,731,245**	**9,995,582,075,208.00**	**10,777,679,207,439.60**	**11,192,515,009,986.00**	**11,797,846,937,869.70**
Belanja Operasi	**5,659,091,736,128**	**5,951,050,828,076.00**	**6,534,710,998,016.28**	**5,705,310,456,651.80**	**5,990,310,456,651.80**
Belanja Pegawai	3,114,232,139,368	3,242,569,954,051.00	3,647,344,609,047.60	3,647,344,609,047.60	3,667,344,609,047.60
Belanja Barangdan Jasa	2,235,536,073,905	2,383,376,553,331.00	2,080,997,188,168.68	1,942,947,978,804.20	2,192,947,978,804.20
Belanja Bunga	2,481,726,343	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	10,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
Belanja Hibah	303,751,796,512	312,474,320,694.00	782,089,200,800.00	90,737,868,800.00	105,737,868,800.00
Belanja BantuanSosial	6,240,225,000.00	2,630,000,000.00	4,280,000,000.00	4,280,000,000.00	4,280,000,000.00
Belanja Modal	**1,627,018,355,261**	**1,689,637,708,972.00**	**1,845,877,550,666.35**	**2,579,569,436,205.20**	**2,749,262,386,192.92**
Belanja Modal	1,627,018,355,261	1,689,637,708,972.00	1,845,877,550,666.35	2,579,569,436,205.20	2,749,262,386,192.92
Belanja TidakTerduga	**50,000,000,000**	**61,297,248,214.00**	**30,000,000,000.00**	**40,000,000,000.00**	**50,000,000,000.00**
Belanja TidakTerduga	50,000,000,000	61,297,248,214.00	30,000,000,000.00	40,000,000,000.00	50,000,000,000.00
Belanja Transfer	**2,070,752,639,856**	**2,293,596,289,946.00**	**2,367,090,658,757.00**	**2,867,635,117,129.00**	**3,008,274,095,025.00**
Belanja Bagi Hasil	1,625,075,631,356	1,775,932,742,946.00	2,119,627,111,757.00	2,600,171,570,129.00	2,740,810,548,025.00
Belanja Bantuan Keuangan	445,677,008,500	517,663,547,000.00	247,463,547,000.00	267,463,547,000.00	267,463,547,000.00

Sumber : BKAD & BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2022

Tabel III. 18.

Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2026

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaraan Pembiayaan Daerah	Target		Proyeksi		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**219,428,919,963**				
1.1.	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	219,428,919,963				
1.2.	Pencairan dana cadangan	-				
1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	-				
1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-				
1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-				
1.7.	Penerimaan Piutang Daerah	-				
1.8.	Penerimaan Pengembalian Investasi Perusda	-				
2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**167,524,217,935**	**137,500,000,000.00**			
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-				
2.2.	Penyertaan Modal (investasi) Daerah		2,500,000,000.00		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-				
2.4.	Pembayaran Pinjaman Daerah	167,524,217,935	135,000,000,000.00	135,000,000,000.00	135,000,000,000.00	135,000,000,000.00
	Jumlah Pembiayaan Netto	**51,904,702,028.00**	**-137,500,000,000.00**	**-135,000,000,000.00**	**-165,000,000,000.00**	**-165,000,000,000.00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)					

Sumber : BKAD Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2022

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yaitu: Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhanvisi misi Kepala Daerah; dan Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dituang pada **table III.16 dan table III.17** selama 3 tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

Prioritas Pertama untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk mencapai target belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
d. Belanja Moda Transportasi, besarannya 10 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
e. Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 persen untuk BBH Kab./Kota, 30 persen hak Provinsi dengan komposisi : 50 persen specific grant dan 50 persen block grant, dari yang 50 persen specific grant, 75 persen untuk iuran JKN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

Sedangkan Belanja Mengikat (Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut : Belanja Pegawai; Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok; Belanja DAK BOS; Belanja Operasional Kantor; dan Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD), juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

Prioritas Kedua untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Prioritas Ketiga Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya. Nilai kapasitas riil pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024– 2026, serta pembagian alokasi anggaran berdasarkan prioritas tersebut diatas ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel III. 19.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024-2026

No	Uraian	Sesuai PP 12 Tahun 2019 Proyeksi (Rp.)		
		2024	2025	2026
1	Pendapatan	10.544.178.586.732,00	10.946.073.045.104,00	11.554.662.023.000,00
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran			
4	Pinjaman Daerah			
Total Penerimaan :		**10.544.178.586.732,00**	**10.946.073.045.104,00**	**11.554.662.023.000,00**
Dikurangi				
5	Belanja Operasi (Belanja Pegawai)+ BTT +Belanja Transfer (DBH dan Bantuan Keuangan)	5,611,116,861,243.00	5,821,116,861,243.00	5,981,116,861,243.00
6	Pengeluaran Pembiayaan	135,000,000,000.00	165,000,000,000.00	170,000,000,000.00
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan		**3,324,313,361,613.55**	**3,472,491,451,987.31**	**3,712,282,010,143.10**

Sumber : BKAD & BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2022

Tabel III. 20.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024-2026

No.	Uraian	TARGET (Rp.)			Rata-Rata Porsi Per Tahun (%)
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan	3,324,313,361,613.55	3,472,491,451,987.31	3,712,282,010,143.10	100,00

Sumber : BKAD & Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2022

3.3.4. Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber–sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari alternatif pendanaan dalam membangun. Sumber- sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 3) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 4) Pembiayaan Utang Daerah (Pinjaman Daerah, Obilgasi Daerah, Sukuk Daerah). Adapun penjelasan alternatif pendanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.3.4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selain bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi.

Adapun alokasi pendanaan yang melalui dana dekonsestrasi dan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2019-2021 dapat dilihat pada grafik III.7 dibawah ini :

Grafik III. 14.
Alokasi Pendanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021 (Milyar Rupiah)

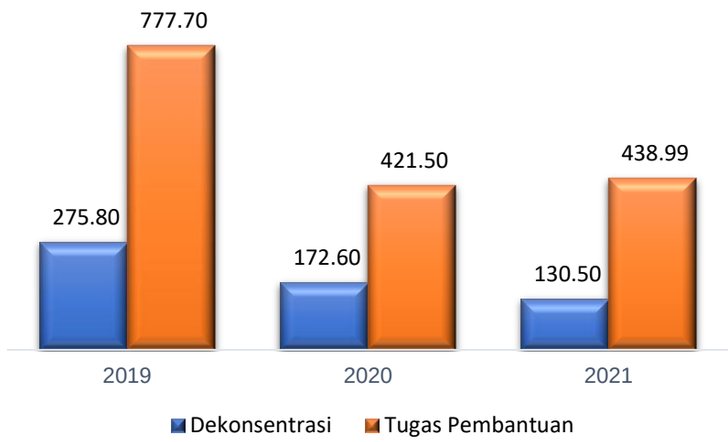

Sumber : Diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022

3.3.4.2 *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Pendanaan pembangunan selain APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang perlu dimaksimalkan yaitu Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Mitra PKBL dan TJSL yang diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini harus berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL lebih diutamakan pada program yang mendukung prioritas pemerintah daerahserta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta berikesinambungan dan berdampak positif terhadap masyarakat, penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Tabel III. 21.
Mitra Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Yang Mendukung Pembangunan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
1.	Japan International Cooperation Agency (JICA)	Regional Development Policy Advisor for Sulawesi Region (JICA RDPA)	1) Mendukung Penguatan Kapasitas Manajemen Pembanguan Daerah di Wilayah Sulawesi 2) Mengidentifikasi isu & program pembangunan daerah yang menjadi prioritas. 3) Memfasilitasi inisiatif dan

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
			kolaborasi berdasarkan hasil pengidentifikasian isu & program pembangunan daerah. 4) Memfasilitasi skema JICA untuk menunjang penguatan kapasitas pembangunan daerah.
2.	USAID ERAT	memperkuat efektifitas Pemerintah Daerah melalui peningkatan mutu pelaksanaan kebijakan dan penyediaan pelayanan di daerah.	1) Penguatan fungsi binwas provinsi ke kab/kota terkait SPM, perencanaan dan penganggaran dalam isu Perkawinan Anak, Stunting, IPM Pendidikan (pra sekolah dan wajib belajar 12 tahun) 2) Pemanfaatan data dan produksi pengetahuan untuk peningkatan kinerja layanan public 3) Pemanfaatan data SP4N LAPOR untuk pencegahan korupsi dan pemantauan pelayanan public 4) Penguatan akses informasi melalui PPID dan partisipasi publik di tingkat provinsi 5) Penguatan peran swasta dalam link and match pendidikan vokasi dan industri " 6) peningkatan kualitas belanja dan tata kelola keuangan daerah
3.	UNICEF	Pendidikan	1) Penanganan Anak Tidak Sekolah berbasis Aksi Kolaborasi bertujuan untuk memastikan anak usia sekolah 7 – 18 tahun bersekolah dan dapat menyelesaikan Wajib Belajar 12 tahun. 2) Pengembangan Anak Usia Dini yang Holistik dan Integratif 3) Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa 4) Penguatan Ketrampilan Abad 21 (Kecakapan Hidup) - pengembangan kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke 21 yaitu pengembangan kemampuan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, berfikir kritis, pemecahan masalah, negosiasi dan ketrampilan lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan 5) Pendidikan dalam keadaan darurat (Satuan Pendidikan

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
			Aman Bencana)
		Perlindungan Anak	1) Penguatan untuk Kebijakan Perlindungan Anak 2) Optimalisasi Peran Anak dan Remaja 3) Perilaku Positif dan Norma Sosial 4) Penguatan Layanan Perlindungan Anak 5) Perlindungan Anak dalam situasi Darurat
		Kesehatan	1) Memperkuat layanan Kesehatan ibu dan bayi baru lahir, melalui penguatan AMPSR 2) Memperkuat layanan kesehatan anak a) Penguatan layanan Manegement Terpadu Balita Sakit (MTBS) untuk Bayi -Balita b) Memperkuat layanan Imunisasi pada anak Bayi - Balita c) Memperkuat layanan Tuberkolosis (TB) pada anak sekolah 3) Memperkuat layanan kesehatan essensial pada kondisi darurat, melalui kesiap-siangaan Kab/Kota untuk menghadapi kondisi darurat. (Persiapan Rencana Kontigensi)
		Nutrisi	1) Memperkuat program gizi anak dan pencegahan stunting 2) Memperkuat program pencegahan dan tatalaksanan wasting 3) Memperkuat program gizin remaja dan gizi ibu
4.	USAID MOMENTUM Private Healthcare Delivery (USAID MPHD)	Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian bayi dengan Meningkatkan cakupan dan pemerataan kualitas pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir milik swasta.	1) Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Fasyankes Swasta (Primer dan Rujukan) di wilayah intervensi: Meningkatkan ketersediaan dan kesiapan fasyankes swasta untuk pemberian layanan KIA berkualitas, dan Penguatan system rujukan efektif dan efisian dengan **pemanfaatan platform SISRUTE MATNEO** dan adanya perjanjian kerjasama

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
			kabupaten kota terkait system rujukan. 2) Meningkatnya kualitas layanan KIB yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan primer dan rujukan dengan jenis kegiatan Pendampingan rumah sakit (RS) swasta untuk meningkatkan mutu layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Meningkatkan kepatuhan fasyankes swasta terhadap standar mutu klinis, mendorong budaya peningkatan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan dan pada pelaksanaan program kesehatan, Memberdayakan pasien, keluarga dan masyarakat 3) Menguatnya kebijakan, komitmen pemerintah dan peran pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan untuk keterlibatan sektor swasta. Melalui Tim Kelompok Kerja Penurunan AKI AKB (Tim POKJA)
5.	FHI360 Program USAID-MADANI	Memperkuat kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/ORMAS) untuk berkontribusi positif/konstruktif dalam pembangunan di daerah dan lahirnya toleransi/nilai-nilai inklusif di tengah masyarakat.	1) Peningkatan/Penguatan Kapasitas, Legitimasi dan Keberlanjutan fasililitasi potensi pemuda dalm pembangunan, melalui Technical Assistensi (TA) dari Servis Provider (SP) dan Provincial Support Program (PSP). 2) Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan dengan Pemerintah Lokal (Pemda). 3) Bantuan teknis dan hibah dana langsung kepada OMS/ORMAS Lokal. 4) Pembentukan Forum Aksi Bersama (Forum Belajar) yang berbasis Multistakholders di tingkat Kabupaten/Kota.
6.	USAID IUWASH Tangguh	Proyek lima tahun untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Indonesia dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi aman, serta perilaku higiene (WASH) di daerah perkotaan	1) Penguatan Tata Kelola dan Pembiayaan Sektor WASH dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA); 2) Peningkatan Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Aman, Berketahanan Iklim, dan Inklusif Masyarakat

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
		yang rentan dan memperkuat layanan WASH dan pengelolaan sumber daya air (PSDA) yang berketahanan iklim. Bermitra dengan Pemerintah Indonesia, USAID IUWASH Tangguh mendukung upaya Indonesia untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk memastikan akses air dan sanitasi untuk semua (Tujuan 6) dan menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman , tangguh, dan berkelanjutan (Tujuan 11).	Miskin; 3) Peningkatan PSDA untuk Mendukung Layanan Air Minum yang Tangguh; dan 4) Peningkatan Adopsi Perilaku dan Peningkatan Partisipasi dan Peran Kepemimpinan Perempuan yang Berkontribusi pada Peningkatan WASH dan PSDA.
7.	Australia - Indonesia Centre (DFAT)	The Partnership for Australia-Indonesia Research (**PAIR**)	1) Transportasi, Logistik dan Rantai Pasok: Bagaimana kereta api, jalur laut, dan jalanan terhubung melalui sistem transportasi antar moda (*intermodal transport*). Bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat dari proses logistik dan rantai pasok yang handal, mengarah pada peningkatan konektivitas antar pelabuhan, kota, dan pedesaan. 2) Komoditas (Rumput Laut): Eksplorasi ekonomi pangan dan integrasinya dengan sistem transportasi, logistik dan rantai pasok. Bagaimana menciptaka pergerakan barang yang cepat, handal, dan efisien dari ladang pertanian ke Pelabuhan 3) Kalangan Muda: Menautkan kesehatan dan kesejahteraan (*health and wellbeing*) kalangan muda dengan pemberdayaan ekonomi, keterampilan, dan pelatihan. 4) GEDSI (Jender, Kesetaraan, Disabilitas dan Inklusi Sosial) – isu lintas sektor dalam berbagai fokus riset PAIR
8.	ICRAF - World Agroforestry (CANADA)	Perencanaan pembangunan, Ketahanan Pangan, Perubahan Iklim, Gender	1) Penguatan tatakelola penggunaan lahan dan penyusunan kebijakan mitigasi dan adaptasi PI 2) Peningkatan kapasitas Pemda

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
			untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan berbasis lahan secara cerdas iklim 3) Peningkatan kebijakan peraturan dan kelembagaan mitigasi dan adaptasi PI 4) Peningkatan Kapasitas Petani dalam mengakses lahan dan mengelolanya dengan baik
9.	Save the Children Indonesia (Multi Donor)	Perlindungan Anak dan Pekerja, Kesehatan, Mata Pencaharian Keluarga	
10.	AIHSP (Australia Indonesia Health Security Partnership)	Peningkatan Ketahanan Kesehatan secara komprehensif melalui Pendekatan 'One Health'	Sistim Pemerintah Indonesia yang lebih kuat untuk ***mencegah***, ***mendeteksi*** dan ***merespon*** kesehatan masyarakat serta darurat kesehatan hewan. Yang berfokus pada Isu Kesehatan Manusia, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Lingkungan.
11.	International Organization for Migration (IOM)	Humanitarian	
12.	Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) Multi Donor	Pengelolaan Pengetahuan (Program inti Yayasan BaKTI) Program INKLUSI – BaKTI (Didanai oleh DFAT Australia) Kerjasama UNICEF BaKTI – Lingkungan Aman dan Ramah Bagi Anak (SAFE4C) dan Pencegahan Kekerasan Seksual Anak Berbasis Online (OCSEA) Kerjasama UNICEF BaKTI – WASH (Air, Sanitasi dan Kebersihan)	Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Timur Indonesia Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial Perlindungan Anak Mendukung Layanan WASH yang Dikelola dengan Aman dan Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan
13.	Yayasan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM)	Penguatan Tata Kelola Lanskap dan SDA Berkelanjutan; Perhutanan Sosial; Adaptasi Perubahan Iklim; Inklusi Sosial	1) Peningkatan kapasitas masyarakat desa 2) Pendampingan kelompok masyarakat untuk peningkatan ekonomi melalui pengembangan usaha lokal 3) Peningkatan akses kelola lahan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan melalui skema-

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
			skema Perhutanan Sosial 4) Meningkatkan aksi kolaboratif bersama multistakeholder (POKJA PPS Provinsi, POKJA PPS Kabupaten, POKJA PRKD) 5) Mendorong inklusi dan akuntabilitas sosial di desa 6) Membangun sistem komunitas cerdas iklim di lanskap DAS
14.	Institut of Community Justice (ICJ) Makassar	Advokasi, pemberdayaan masy dan layanan bantuan hukum	
15.	Yayasan Lestari Mulia	Lingkungan dan Kesehatan	Memperkuat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat
16.	Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Yayasan PerDIK).	Disabilitas dan Inklusi Sosial	Pelayanan Publik yang ramah untuk semua
17.	Yayasan Lestari Mulia	Lingkungan dan Kesehatan	
18.	YASMIB Sulawesi	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	1) Mendorong Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif pada Pemerintah Daerah dan Desa 2) Mendorong Kebijakan layanan public yang responsive gender dan inklusif. 3) Pencegahan Perkawinan Anak, Stunting dan Anak Tidak Sekolah 4) Penguatan Keterbukaan Infornasi Publik 5) Pencegahan Korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi dan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa
19	Pilar Nusantara (PINUS) Sulawesi Selatan	Anggaran & Lingkungan	1) Perencanaan dan penganggaran pembangunan lingkungan yang responsive gender 2) Transfer anggaran provinsi berbasis ekologi
20	PKBI SULAWESI SELATAN	Kesehatan, Keluarga berencana dan Inklusi Sosial	
21	Yayasan Hadji Kalla	Tematik : Pendidikan, Kemanusiaan, Kesehatan dan Lingkungan Berbasis wilayah : Pemberdayaan Desa	1) Beasiswa level perguruan tinggi 2) Peningkatan kapasitas manajemen PAUD dan SD 3) Tanggap darurat bencana 4) Bantuan sembako dhuafa 5) Pelatihan kader pelatih senam

No.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
			jantung sehat 6) Penghijauan kota 7) Integrasi energi terbarukan dan ekonomi peternak sapi 8) Pemberdayaan ekonomi-sosial-lingkungan desa tertinggal
22.	Forum Komunitas Hijau	Sosial lingkungan hidup	
23.	PW MUSLIMAT NU	Pemanfaatan TIK dalam pengembangan Dakwah Washatiyah	
24.	Lembaga Studi Kebijakan Publik	Penelitian, pelatihan, Pemberdayaan masyarakat pada bidang Tata kelola Pemerintahan, Kebijakan Publik, politik dan gender	
25.	KOALISI PEREMPUAN INDONESIA WAILAYAH SULSEL	Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	
26.	Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK Ornop) Sulsel	Demokrasi,, Kepemiluan, Politik, Hukum dan HAM, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak, Inklusi, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Toleransi dan keberagaman, dll	
27.	Yayasan Ruang kerja Ukhuwah	Sosial, Pendidikan, Kemanusiaan dan Lingkungan	

Sumber : Diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022

3.3.4.3 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didasari atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kondisi yang berkembang saat ini menyebabkan banyak pemerintah daerah menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan

kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk "menciptakan pangsa pasar". Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

3.3.4.4 Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan utang daerah tersebut terdiri atas : **(1) PinjamanDaerah** yaitu Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, **(2) Obligasi Daerah** yaitu surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, **(3) Sukuk Daerah** yaitu surat berharga berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan asset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Usulan pembiayaan utang daerah tersebut harus termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan lebih dulu menetapkan nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.

3.3.4.5 Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke depan: Regional InfrastructureDevelopment Fund (RIDF):

Tujuan:

1) Meningkatkan akses pembiayaan infrastruktur di daerah, dengan menyediakan pinjaman mulai dari jumlah kecil hingga besar;
2) Mengatasi ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat;
3) Meningkatkan kapasitas Pemda dalam mengelola pinjaman yaitu dengan pembentukan debt management unit dan pelatihan personil terkait;
4) Mengatasi keterbatasan Pemda dalam penyiapan proyek yang baik, melalui penyediaan fasilitas Project Development Fund ("PDF"); dan
5) Meningkatkan kapasitas Pemda dalam melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur yang berkelanjutan (sustainable development) melalui kepatuhan/compliance terhadap environment and social safeguard.

Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke depan secara lengkap dapat dilihat pada gambar skema berikut :

Gambar III.1
Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke depan

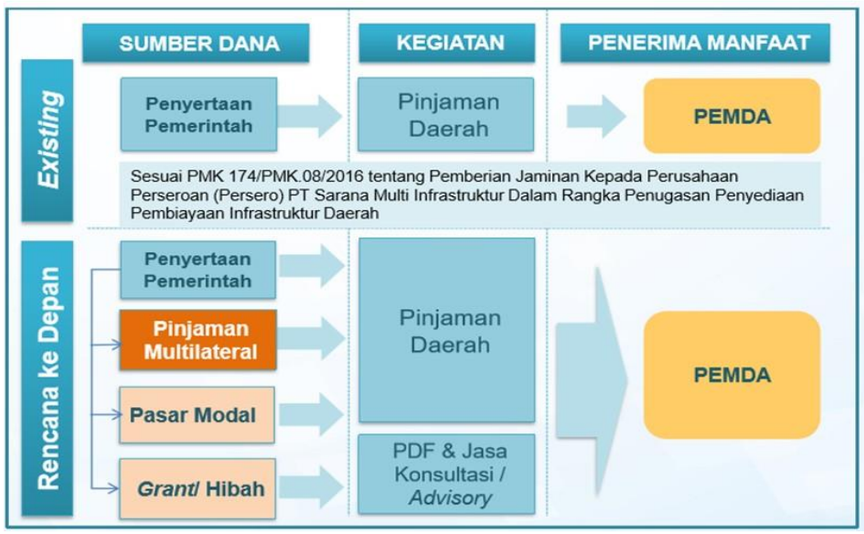

3.4 Proyeksi Kebutuhan Investasi di Sulawesi Selatan dan P. Sulawesi

Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Sulawesi, rencanakebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang sekitar Rp.469.73 Triliun. Dimana di tahun 2022 khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan memperkirakan kebutuhan Investasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan sebesar Rp. 249,72 Triliun.

Tabel III. 22.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Sulawesi 2021-2024

Provinsi	Satuan	Baseline 2020	Kebutuhan Investasi			
			2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	Rp. Triliun		55,15	61,74	69,99	78,85
Sulawesi Tengah	Rp. Triliun		67,46	75,71	86,04	97,54
Sulawesi Selatan	Rp. Triliun		224,84	249,72	280,50	314,77
Sulawesi Tenggara	Rp. Triliun		55,72	62,00	69,94	79,11
Gorontalo	Rp. Triliun		15,09	16,88	18,99	21,37
Sulawesi Barat	Rp. Triliun		16,04	17,55	19,28	21,62

Sumber : RPJMN 2020-2024 dan Data Diolah

Catatan : Perkiran kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan berbagai isu-isu strategis daerah yang berpengaruh terhadap proses pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2024-2026. Pada Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah disajikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih adanya permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam tiga tahun ke depan. Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antar kinerja pembangunan daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa akan datang.

Uraian secara rinci pada bab ini meliputi : permasalahan pembangunan daerah yang dibagi menjadi dua aspek tujuan pembangunan daerah yaitu aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek Daya Saing serta permasalahan menurut penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan isu–isu strategis baik Global, Nasional maupun Isu Strategis Pembangunan Daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah menjelaskan perbedaan hasil pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam periode tertentu dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dibuat. Permasalahan Pembangunan Daerah ini diklasifikasi dalam dua level permasalahan yaitu permasalahan pada level makro (untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah) dan permasalahan pada level mikro (untuk penentuan program prioritas daerah menurut urusan pemerintahan, baik urusan wajib dan urusan pilihan maupun urusan penunjang).

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan dengan menggunakan tiga tingkatan masalah, yaitu *masalah pokok, masalah,* dan *akar masalah*. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah, dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Sementara Masalah adalah uraian dari beberapa penyebab dari masalah pokok, dipecahkan melalui rumusan strategi, sedangkan akar masalah adalah uraian yang lebih rinci dari penyebab masalah, dan dipecahkan melalui arah kebijakan.

Penuntasan permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan tahap demi tahap. Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah.

Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah, telah teridentifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan isu strategis daerah yang ingin diselesaikan dalam tiga tahun ke depan. Bab ini menjelaskan beberapa permasalahan pembangunan daerah, sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan urusan wajib. Masalah pembangunan daerah yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan masalah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Berikut ini diuraikan indikator permasalahan pembangunan daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek Daya Saing :

4.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Stabil

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menunjukkan tren menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2020 namun membaik pada tahun 2021. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 7,04% dan menurun pada tahun 2019 pada 6,91%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi berkontraksi pada angka -0,71 persen yang merupakan angka terendah sedikitnya dalam 10 tahun terakhir bagi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan karena adanya pendemi yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi secara nasional sejak akhir 2019.

Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mencapai angka 4,64%. Membaiknya pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan Tahun 2021 didukung oleh peningkatan PDRB terbesar berasal dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebesar Rp. 13,51 Triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 6,4 persen. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan dengan peningkatan PDRB sebesar Rp. 6,51 Triliun dan kontribusi terbesar ke tiga berasal dari sektor konstruksi dengan peningkatan PDRB sebesar Rp. 6,14 Triliun.

Membaiknya kondisi ekonomi di tahun 2021 disebabkan karena membaiknya lapangan usaha di berbagai sektor sebagai akibat dari peningkatan mobilitas masyarakat akibat membaiknya kondisi pasca penanganan covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka rata-rata mobilitas penduduk pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, utamanya pada lokasi taman meliputi taman nasional, pantai untuk umum, marina, camping ground, plaza, dan taman milik publik, diikuti dengan mobilitas pada area perdagangan retail dan rekreasi meliputi tempat seperti restoran, kafe, pusat perbelanjaan, theme parks, musium, perpustakaan, dan bioskop, kemudian disusul dengan peningkatan mobilitas pada tempat belanja dan farmasi yang meliputi pasar grosir, gudang makanan, pasar petani, toko makanan khusus, toko obat dan apotek.

Perekonomian Sulawesi Selatan Tahun 2022 menunjukkan angka 5,09%. Dibandingkan dengan tahun 2021, pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 22,1 persen; diikuti oleh perdagangan besar-eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,64 persen; Konstruksi sebesar 14,00 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 12,90 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 63,6 persen.

4.1.2. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan IPM Sulawesi Selatan selama periode 5 tahun terakhir memperlihatkan trend peningkatan. Data tahun 2021 IPM Sulawesi Selatan sebesar 72,24, lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional sebesar 72,29. Capaian IPM Sulawesi Selatan ini secara relatif berada di urutan 11 dari 34 Provinsi di Indonesia, lebih rendah dibandingkan sejumlah provinsi dengan tingkat kemajuan pembangunan yang setara dengan Sulawesi Selatan. Pencapaian ini berdasarkan pengklasifikasian BPS dalam lima tahun terakhir telah masuk dalam kategori IPM tinggi. Meskipun demikian masih diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai capaian agar dapat masuk dalam kategori sangat tinggi dengan nilai capaian diatas 80. Hal ini didukung oleh sejumlah faktor komposit IPM yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks ekonomi yang disetarakan dengan indeks daya beli (PPP). Penyebab dari rendahnya IPM Sulawesi Selatan adalah rata-rata lama sekolah hanya 8,46 tahun, dengan kata

lain bahwa lamanya bersekolah hanya sampai kelas VIII (kelas 2 SMP). Beberapa hal yang menjadi akar masalah dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan yaitu masih rendahnya pemeratan akses layanan Pendidikan dan masih rendahnya angka partisipasi murni masyarakat provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami kondisi banyaknya anak yang tidak sekolah (ATS) yang terdiri dari anak yang tidak pernah bersekolah, anak yang putus sekolah dan anak yang lulus pada satu jenjang tertentu tapi tidak lanjut ke jenjang berikutnya. Dari tahun 2019 hingga 2022 terdapat tren peningkatan dengan pertumbuhan 3,11 persen dari tahun 2021 ke tahun 2022 dengan capaian 9,62 persen. Pada tahun 2022 anak usia 7-18 tahun yang masih bersekolah mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar -0,32 persen dengan capaian 90,38 persen. Hal tersebut berarti 9,62 persen sisanya sedang tidak duduk di bangku kolah (anak tidak sekolah). Jika dirinci menurut partisipasi sekolah, terdapat sebesar 0,34 persen anak usia 7-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah. Selain itu, penyebab rendahnya kualitas manusia dari perspektif pendidikan adalah banyaknya penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum memperoleh pendidikan kesetaraan sehingga belum memperoleh ijazah paket A, B dan C serta masih rendahnya angka partisipasi murni masyarakat. Capaian APM SMP dan SM sederajat pada tahun 2018 hingga 2022 meskipun mengalami peningkatan namun berada dibawah capaian nasional. Berdasarkan kewenangan maka capaian APM SM sederajat tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,09 poin atau 0,15 persen dari tahun 2021, namun masih berada dibawah capaian nasional.

Pembangunan sektor kesehatan memperlihatkan bahwa angka harapan hidup (AHH) Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 70,66 tahun, juga lebih rendah jika dibandingkan dengan AHH Nasional 77,94 tahun. Angka Harapan Hidup Sulawesi Selatan yang masih rendah menunjukkan kinerja pembangunan sektor kesehatan yang belum maksimal yang menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu dan anak. Kondisi tersebut diakibatkan oleh belum optimalnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4, Cakupan Kunjungan Bayi, Cakupan Pelayanan Anak Balita, masih rendahnya Rasio Dokter Per Satuan Penduduk, dan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan belum optimal.

Adapun tingkat daya beli masyarakat Sulawesi Selatan yang masih tergolong rendah menjadi salah satu faktor rendahnya pembangunan manusia. Daya beli masyarakat yang disetarakan dengan pengeluaran perkapita sangat tergantung pada tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Data terakhir menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Sulawesi Selatan tahun 2021 yang diukur dari besaran pengeluaran perkapita pertahun masih lebih rendah dari capaian nasional pada tahun yang sama, yang disebabkan karena pendapatan masyarakat masih rendah.

Dari sisi pencapaian IPM dengan data terpilah laki-laki dan perempuan yang digambarkan dalam capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), pada 4 tahun terakhir, indeks ini mengalami tren penurunan setiap tahunnya, yaitu 93,15 di tahun 2018 hingga menurun menjadi 92,85. Secara angka, kondisi ini masih lebih baik dibandingkan dengan indeks IPG nasional, namun demikian secara nasional indeks IPG menunjukkan trend positif dan sebaliknya Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan trend negatif. Data IPG menunjukkan kenaikan IPG perempuan dari 69,53 di tahun 2018, naik menjadi 70,21 di tahun 2019, 70,48 di tahun 2020 dan 70.76 di tahun 2021. namun demikian rentang IPG Perempuan dan laki-laki juga meningkat setiap tahunnya dari 5,11, di

tahun 2018 menjadi 5.21 di tahun 2019, menjadi 5.42 di tahun 2020 dan 5.45 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki semakin tinggi. Namun demikian interpretasi ini bukan berarti bahwa kualitas pembangunan manusia perempuan menurun, tetapi juga dapat diartikan bahwa laju perbaikan kualitas pembangunan laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan laju kualitas pembangunan perempuan.

Ditinjau secara terpilah menurut gender dari tahun 2018 hingga 2021, pengeluaran perkapita yang disesuaikan atau Purchasing Power Parity (PPP) laki-laki jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Meski secara rata-rata pertumbuhan pengeluaran perkapita disesuaikan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, namun kesenjangan PPP laki-laki dan perempuan di Sulawesi Selatan masih cukup lebar. Tercatat di tahun 2021 pengeluaran perkapita disesuaikan laki-laki telah mencapai 16,09 juta rupiah, sementara perempuan sebesar 9,92 juta rupiah. Kondisi ini terkait fakta bahwa jumlah tenaga kerja perempuan yang memang lebih sedikit di banding laki-laki. Salah satu ukurannya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja. Hingga tahun 2021 TPAK Sulawesi Selatan masih di dominasi oleh laki-laki dengan kisaran 80 persen, sementara perempuan masih dalam kisaran 50 persen. Pengeluaran terkait dengan pendapatan, dan pendapatan terkait usaha atau kerja. Dengan melihat kondisi ketenagakerjaan laki-laki dan perempuan, wajar apabila pengeluaran perkapita disesuaikan perempuan menjadi lebih rendah dibanding laki-laki.

Dari sisi Indeks Pemberdayaan Gender (IGD), dimana IDG menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik menunjukkan adanya penurunan capaian IDG di tahun 2021 yang disebabkan oleh masih perlunya peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan proporsi laki-laki dan perempuan yang seimbang, serta partisipasi dan pengambilan keputusan dari aspek ekonomi yang mempertimbangkan kesetaraan posisi pekerjaan dan pendapatan laki-laki dan perempuan. Adapun capaian IDG Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dan 2020 telah melebihi capaian nasional, namun tahun 2021 mengalami penurunan sehingga berada dibawa capaian nasional. Hal ini disebabkan karena terjadi kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan pada kegiatan bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

4.1.3. Meningkatnya Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin

4.1.3.1. Persentase Penduduk Miskin

Secara relatif tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sebesar 8,66 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 8,53% namun masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yaitu sebesar 9,57%. Tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan wilayah di pulau Sulawesi masih berada di bawah Sulawesi Utara namun lebih baik dari provinsi lainnya serta lebih baik dari regional Sulawesi sebesar 10,06%. Kondisi kemiskinan di Sulawesi Selatan masih lebih baik dibanding Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Lampung dan DI Yogyakarta. Faktor utama yang menyebabkan masih tingginya tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan di dorong oleh faktor kualitas manusia yang masih rendah, efek multiplier yang rendah dan daya serap tenaga kerja sektor ekonomi yang masih terbatas. Adapun nilai PDRB perkapita Sulawesi Selatan yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada tahun 2021 Rp. 59,66

juta masih lebih rendah dibandingkan dengan PDB perkapita Indonesia tahun 2021 sebesar Rp. 62,2 juta.

Jika melihat jumlah penduduk miskin menurut daerah, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan masih didominasi penduduk di perdesaan sebesar 11,81% dibandingankan dengan penduduk miskin di perkotaan sebesar 4,98%. Sementara itu, tingkat keparahan kemiskinan dan kedalaman kemiskinan di daerah pedesaan jauh lebih tinggi daripada daerah perkotaan.

4.1.3.2. Kemiskinan Ekstrim

Selain angka kemiskinan yang telah diurai di atas, Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. Provinsi Sulawesi Selatan secara Nasional menempati urutan ke 19 dalam jumlah persentase penduduk yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem dengan jumlah lebih kurang 138.500 orang. Dari segi jumlah penduduk yang tergolong miskin ekstrem, terdapat 5 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah kemiskinan ekstrem terbesar yaitu Kabupaten Jeneponto dengan jumlah 16.630 jiwa, Kota Makassar sejumlah 14.440 jiwa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sejumlah 11.990 jiwa, Kabupaten Luwu Utara sejumlah 10.860 jiwa, Kabupaten Gowa sejumlah 9.060 jiwa dan Kabupaten Maros sejumlah 9.000 jiwa. Dari segi persentase penduduk miskin ekstrem, data menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan berturut-turut adalah Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Maros. Membandingkan data tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat bahwa Kabupaten Bone merupakan kabupaten yang paling banyak mengentaskan jumlah kemiskinan ekstrem yaitu sejumlah 11.390 orang atau menurunkan 1,51% penduduk kategori miskin ekstrem diikuti dengan Kabupaten Pinrang yang mengentaskan 8.920 orang atau 2,35% penduduk kategori miskin ekstrem.

4.1.4. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran daerah yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai 4,51% masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Tengah; 3,00 %, Sulawesi Tenggara; 3,36 %, Sulawesi Barat; 2,34 % dan Gorontalo; 2,58 %. Merujuk pada data tahun 2020 terlihat bahwa masih tingginya tingkat pengangguran Sulawesi Selatan ersebut terutama disebabkan oleh faktor kualitas sumber daya manusia yang masih tergolong rendah. Disamping itu ketersediaan Pendidikan vokasional belum mampu menciptakan *link and macth* antara kurikulum vokasional dengan kebutuhan dunia industri. Tingkat Pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan mempunyai pola distribusi yang hampir sama dari tahun ke tahun. Penganggur dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 10,96 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 3,19 persen. Hal ini menggambarkan kondisi pasar kerja Sulawesi Selatan saat ini sebagian besar diisi oleh mereka dengan pendidikan rendah. Selain itu, ketersediaan kesempatan kerja dari pengelolaan kegiatan dan sektor ekonomi yang masih berorientasi padat modal dari pada padat karya dan adanya kondisi ekonomi nasional dan daerah yang tidak stabil.

Penyerapan tenaga kerja tahun 2022 meningkat utamanya pada sektor pertanian dengan menyerap tenaga kerja sebesar 120,28 ribu orang diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 35,03 ribu orang. Sementara itu terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor adminsitrasi pemerintahan sebanyak 10,37 ribu orang dan diikuti sektor konstruksi sebesar 6,25 ribu orang.

4.1.5. Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat diukur dengan Rasio Gini Sulawesi Selatan masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Rasio Gini Sulawesi Selatan hingga tahun 2022 adalah 0,365 membaik dari tahun 2021 sebesar 0,377. Dibandingkan dengan angka nasional, rasio gini menunjukkan kecenderungan yang terus membaik dan secara relatif menunjukkan ketimpangan yang lebih rendah dari ketimpangan nasional pada tahun 2022 sebesar 0,381. jika melihat perbandingan antara ketimpangan di kota dan di desa maka ketimpangan di desa lebih rendah daripada ketimpangan di kota. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan yang terpusat pada kegiatan ekonomi yang padat modal dan tidak melibatkan sebagian besar pelaku ekonomi serta gap lapisan penduduk di kota lebih tinggi dari di pedesaan yang disebabkan karena lebih beragamnya distribusi pekerjaan di kota disbanding di desa yang lebih homogen.

4.1.6. Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan tingkat kepuasan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan standarisasi dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Berdasarkan data indeks reformasi birokrasi pada tahun 2021 pencapaiannya "B". Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Selain itu organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya berbasis kinerja. Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi masih lebih rendah dibanding dengan provinsi besar terutama di Pulau Jawa yang memiliki kinerja instansi pemerintah yang lebih baik. Adapun permalasahan pembangunan pada tata Kelola pemerintahan yaitu :

1. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah, dimana pada tahun 2021 nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan hanya bernilai B, hal ini disebabkan karena hal-hal berikut : penyusunan indikator tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi outcome dan belum sepenuhnya mengacu pada sasaran RPJMD, cascading kinerja antara sasaran dengan program/kegiatan belum menggambarkan hubungan kausalitas secara optimal, kualitas laporan kinerja di tingkat pemerintah daerah dan OPD belum optimal, dan masih lemahnya evaluasi AKIP perangkat daerah.
2. Masih Rendahnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik. Pengukuran kepuasan terhadap pelayanan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, lebih efektif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Sebagai gambaran hasil capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 dengan kategori nilai "B". Sedangkan hasil nilai pengukuran IPP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar 4,10, mengalami kenaikan sehingga indeks IPP pada kategori nilai "A" telah

melampaui target RPJMD dengan nilai B (3,51-4). Hal ini disebabkan oleh dukungan dalam pelaksanaan 6 (enam) aspek penilaian pelayanan publik yang meliputi : Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Walaupun demikian, dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, dapat dikemukakan bawa pada tahun 2021 kepatuhan terhadap standar pelayanan publik Sulawesi Selatan berada pada tingkat 24 dan pada tahun 2022 turun pada peringkat 29 atau berada pada nilai 61,94 pada zona kuning dengan kategori C dengan opini kualitas sedang.

4.1.7. Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah

Indeks Ketimpangan Williamson Sulawesi Selatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,052 dari tahun 2020 dengan nilai indeks 0,620 (kesenjangan tinggi). Hal ini menunjukkan pembangunan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan belum merata pencapaiannya, ditandai dengan belum meratanya pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dalam menjamin kelancaran distribusi barang dan mobilitas manusia antar daerah, masih kurangnya peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan mengoptimalkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Sulawesi Selatan, terkonsentrasinya kegiatan ekonomi wilayah tertentu, alokasi investasi yang tidak merata, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah berdampak pada semakin tingginya tingkat ketimpangan dan perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi geografis antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan antar provinsi. Disamping itu, jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka wilayah terisolir belum optimal, interkonektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum optimal, infrastruktur transportasi, pertanian, dan energi pada daerah-daerah kepulauan dan terpencil juga belum optimal. Sedangkan untuk capaian Indeks Layanan Infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 hanya mencapai 79,44 yang diukur dari lima komponen komposit yang capaiannya yang masuh minim antara lain : Kemantapan Jalan (17,50), Konektivitas Jalan Provinsi (17,84), Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Regional (20,00), Rasio Elektrifikasi Desa (19,65) dan Rasio Jaringan Irigasi (4,45).

4.1.8. Menurunnya Kualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumber daya alam belum mampu secara maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena lemahnya hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam dengan dukungan sarana-prasarana pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pendapatan masyarakat.

Nilai tambah ekonomi dan tingkat produktivitas faktor produksi daerah yang masih rendah. Hal ini terutama pengelolaan sumberdaya ekonomi yang belum optimal pada daerah-daerah dengan potensi sumberdaya alam yang besar. Selain itu belum optimalnya pengelolaan ekonomi sektor yang bernilai tambah tinggi seperti industri pengolahan dan kegiatan sektor jasa juga menjadi salah satu penyebab masih rendahnya PDRB perkapita di Sulawesi Selatan

Dari sisi pengelolaan sumberdaya alam lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan secara keseluruhan memiliki kontribusi yang paling besar di tahun 2022 yaitu sebesar 23,23 persen. Namun demikian terlihat bahwa sumberdaya alam khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan

mengalami kecenderungan pertumbuhan yang rendah. Pada tahun 2022 pertumbuhan yang dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan hanya 0,16 persen dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang tumbuh tinggi antara lain transportasi dan pergudangan sebesar 37,38 persen, akomodasi dan makan minum sebesar 28,81 persen. Dengan demikian diperlukan usaha untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan salah satunya dengan memperhatikan pemanfaatan sumberdaya alam seara bijak dan tidak over exploitatif.

Disamping itu belum optimalnya pengintegrasian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar ekologi dalam menyelaraskan upaya –upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk keterpeliharaan kualitas lingkungan dan meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) diukur berdasarkan 3 indikator komposit yang harus diperhatikan yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Pada tahun 2021 capaian IKLH hanya sebesar 73,23, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas tutupan lahan. Intensitas dan efektivitas reboisasi, pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan belum optimal, koordinasi dan sinergi antar lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah belum optimal.

Dari segi kebencanaan, berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2018 hingga 2022, Sulawesi Selatan memiliki indeks risiko tinggi, namun mengalami penurunan nilai indeks dengan rata-rata 3,13 poin. Tahun 2022 nilai indeks risiko bencana Sulawesi Selatan sebesar 150,07 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 4,8 poin namun masih dalam kategori indeks risiko tinggi.

Bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung adalah jenis-jenis bencana yang sering terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kurun 2009-2019, trend kejadian ketiga bencana tersebut menunjukkan kenaikan jumlah kejadian. Sementara itu bencana gelombang pasang/ abrasi menunjukkan trend rutin terjadi sekali setahun sejak tahun 2014 (kecuali di tahun 2016 tidak ada kejadian), walaupun meningkat di tahun 2018 terjadi 5 (lima) kali kejadian bencana. Selain itu, terjadi penurunan angka kejadian pada bencana kekeringan dalam kurun waktu 2009-2019. Terjadi penurunan drastis jumlah kejadian dalam kurun 2012-2017, lalu meningkat di tahun 2018 dan 2019. Adapun bencana kebakaran hutan dan lahan, tercatat jumlah kejadian bencana di tahun 2019 adalah yang terbanyak sejak tahun 2009, yakni 27 kejadian. Sangat berbeda dengan jumlah kejadian di tahun 2014, 2015, dan 2018. Jumlah total bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2022 adalah 862 kejadian dengan jenis bencana Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Angin Kencang, Puting Beliung, Kebakaran, Abrasi, Cuaca Ekstrim, Gelombang Pasang, dan Gempa Bumi yang tersebar pada 24 kabupaten/kota.

4.2. Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

4.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM);
b. Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun;
c. Masih tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS);
d. Belum optimalnya penduduk usia 4-18 tahun yang termasuk dalam

penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM);
e. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan melalui online;
f. Masih minimnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di daerah terpencil;
g. Belum optimalnya penduduk usia diatas 25 tahun yang mengenyam pendidikan kesetaraan;
h. Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa;
i. Masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak bersekolah sesuai dengan jenjang Pendidikan mereka;
j. Banyaknya penduduk yang belum menyelesaikan Pendidikan wajib belajar 9 dan 12 tahun.

2. Kesehatan
a. Masih tingginya angka kematian bayi;
b. Masih tingginya angka balita gizi kurang;
c. Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan rujukan;
d. Masih rendahnya Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS;
e. Masih rendahnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani;
f. Masih rendahnya Cakupan Pelayanan Anak Balita;
g. Masih rendahnya Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin;
h. Kurangnya sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada daerah terisolir dan pulau-pulau kecil;
i. Masih rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada ibu, anak, remaja, lansia, kalangan disabilitas dan layanan kesehatan mental;
j. Masih tingginya prevalensi angka stunting.
k. Masih rendahnya cakupan kunjungan Ibu Hamil K6

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Masih kurangnya proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik;
b. Masih kurangnya akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota;
c. Belum optimalnya sinergitas rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
d. Belum optimalnya pengembangan basis data penataan ruang dalam skala Provinsi Sulawesi Selatan.
e. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman
a. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata;
b. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
c. Belum baiknya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a. Masih kurangnya jumlah petugas perlindungan masyarakat;
b. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.

6. Sosial

a. Belum maksimalnya persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial;
b. Masih rendahnya jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial;
c. Belum optimalnya program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya;
d. Belum optimalnya pengelolaan Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat;
e. Belum optimalnya upaya penyelenggaraan kesejahteraan bagi lanjut usia.

4.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK);
b. Masih rendahnya penyelesaian kasus dengan Perjanjian Bersama (PB);
c. Masih rendahnya besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan;
d. Rendahnya besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan;
e. Masih rendahnya tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total penduduk yang bekerja;
f. Belum optimalnya upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan;
g. Masih rendahnya keselamatan dan perlindungan kerja;
h. Rendahnya daya saing tenaga kerja;

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Pelembagaan PUG 7 pada Lembaga Pemerintah belum optimal;
b. Belum optimalnya layanan anak korban kekerasan dan layanan perlindungan perempuan dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga/organisasi masyarakat;
c. Masih rendahnya Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi;
d. Ketersediaan data dan informasi gender dan anak di provinsi dan kabupaten/kota secara kontinyu dan tervalidasi belum terbangun;
e. Ketersediaan lembaga layanan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sosial yang ramah anak masih kurang;
f. Ketersediaan lembaga layanan pusat pembelajaran keluarga yang berbasis pemenuhan hak anak dan berkesetaraan gender masih sangat kurang;
g. Masih rendahnya persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi;
h. Masih kurangnya sistem ruang publik termasuk tranportasi yang ramah untuk perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas;
i. Belum tervalidasinya data dan informasi gender.

3. Pangan

a. Tingkat kesketersediaan pangan utama berupa jagung dan kedelai masih rendah;
b. Tingkat ketersediaan, keterjangkauan dan ketermanfaatan pangan utama masih fluktuatif;
c. Belum terwujudnya sistem logistik daerah yang terintegrasi dan

informatif;
d. Pola konsumsi pangan yang belum berimbang, khususnya untuk kelompok umbi-umbian; pangan hewani; sayur dan buah; serta minyak dan lemak;
e. Rendahnya keragaman pangan rumah tangga miskin.

4. Pertanahan

a. Masih minimnya penyelesaian kasus tanah Negara;
b. Belum optimalnya proses pengadaan tanah (masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pengadaan lahan, kurangnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan sosialisasi kepada masyarakat pada tahapan perencanaan, serta belum dilaksanakannya pemantauan terhadap penerbitan ijin penetapan lokasi);
c. Belum optimalnya jangkauan dan pemahaman Reforma Agraria pada pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan;
d. Masih banyaknya ijin Hak Pakai (HP) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang belum teridentifikasi kesesuaian pemanfaatannya serta yang telah habis masa pakainya;
e. Belum optimalnya pelaksanaan Perda LP2B yang berbasis spasial dan terintegrasi dengan RTR yang berfungsi sebagai perangkat pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

5. Lingkungan Hidup

a. Masih rendahnya sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi;
b. Belum dilegalisasinya dokumen RPPLH sebagai acuan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Sulawesi Selatan;
c. Kemampuan penanganan sampah dan limbah di Sulawesi Selatan masih terbatas;
d. Belum ada pengembangan TPA Regional;
e. Minimnya data dan informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup;
f. Kurangnya sinergitas terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Perangkat Daerah terkait;
g. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
h. Masih rendahnya upaya pencegahan banjir / mitigasi bencana.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sektor pembangunan;
b. Belum optimalnya rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk;
c. Masyarakat belum seluruhnya memiliki dokumen administrasi kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Masih redahnya cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik;
b. Masih belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa;
c. Masih rendahnya tingkat kesehatan dan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan;
d. Masih adanya desa sangat tertinggal.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Angka kelahiran total masih relatif tinggi;
b. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan;
c. Tingginya *unmet need* ber KB ;
d. Tingginya peserta KB yang putus pakai (*drop out*);
e. Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
f. Rendahnya keikutsertaan KB pria;
g. Melemahnya kualitas keluarga dalam menjalankan 8 fungsi keluarga;
h. Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung program bangga kencana;
i. Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga balita, remaja, lansia dan peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga;

9. Perhubungan

a. Belum optimalnya pengembangan koridor dan peningkatan jumlah armada bus angkutan umum massal berbasis jalan berupa Bus Rapid Transit (BRT) untuk membantu mengatasi kemacetan jalan dan peningkatan mobilitas antar wilayah;
b. Masih diperlukannya upaya peningkatan pelayanan pada terminal penumpang tipe B secara kualitas bangunan utama dan penunjang terminal maupun secara kuantitas peningkatan jumlah terminal tipe B di Sulawesi Selatan;
c. Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan sesuai jumlah dan standar, khususnya pada ruas jalan kewenangan provinsi
d. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan pada pelabuhan pengumpan regional di Sulawesi Selatan;
e. Belum maksimalnya sistem jalur kereta api yang padu moda.

10. Komunikasi dan Informatika

a. efektivitas penerapan strategi dan pemanfaatan media komunikasi public masih rendah;
b. Sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum optimal;
c. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah.

11. Koperasi dan UKM

a. Tingkat pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat koperasi relatif terbatas. Hal ini menjadikan koperasi belum menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana perekonomian;
b. Menurunnya jumlah koperasi aktif, akibat terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pengurus koperasi;
c. Tingkat produktivitas dan daya saing UKM belum optimal akibat keterbatasan permodalan serta rendahnya penguasaaan proses produksi dan teknologi;
d. Belum optimalnya pemberdayaan pelaku UMKM.

12. Penanaman Modal

a. Terhambatnya investasi yang disebabkan antara lain permasalahan pada perolehan lahan dan ketersediaan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan;
b. Belum optimalnya upaya pemberian dukungan kemudahan berusaha dan perbaikan iklim berusaha bagi usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan keterbukaan investasi, keterampilan tenaga kerja, teknologi serta peningkatan akses kredit bagi perusahaan kecil;
c. Belum optimalnya koordinasi multi-stakeholder yang melibatkan lembaga pendidikan, pemerintah, bisnis dan kelompok masyarakat yang menangani peluang pekerjaan di sektor industri, masalah ketenagakerjaan dan mengatasi kesenjangan keterampilan industri;
d. Belum optimalnya dukungan peraturan daerah sebagai payung hukum dalam penyertaan modal pemerintah daerah.

13. Kepemudaan dan Olahraga

a. Belum optimalnya prestasi atlet termasuk atlet usia dini dan pelajar;
b. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar;
c. Kurang optimalnya peran serta pemuda dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah;
d. Kurang optimalnya peran serta pemuda dalam menunjang Indeks Pembangunan Pemuda.

14. Statistik

a. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral;
b. Belum optmalnya keterbukaan informasi publik;
c. Belum optimalnya penerapan satu data.

15. Persandian

a. Rendahnya kesadaran dan sistem keamanan informasi.

16. Kebudayaan

a. Masih kurangnya optimalisasi pelestarian dan pengembangan cagar budaya, serta nilai-nilai budaya lokal.

17. Perpustakaan

a. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat;
b. Menurunnya minat baca dan minat pemanfaatan perpustakaan;
c. Belum optimalnya sarpras dan SDM untuk mendukung gerakan literasi masyarakat.

18. Kearsipan

a. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan di instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
b. Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM pengelola arsip digital dalam mendukung reformasi birokrasi;
c. Belum optimalnya Penerapan Sistem Kearsipan Daerah Terintegrasi" untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional yaitu Penerapan *e-arsip* terintegrasi.

4.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan infrastruktur dalam usaha budidaya garam;
b. Masih terbatasnya penggunaan benih berkualitas dan terbatasnya akses dan tingginya harga pakan ikan;
c. Masih kurangnya ketaatan dan upaya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
d. Belum adanya rencana rinci yang diamanatkan oleh RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan;
e. Masih rendahnya penggunaan alat tangkap ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan;
f. Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan upaya pembinaan kepada petani untuk menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
g. Belum optimalnya upaya penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur;
h. Belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan perikanan;
i. Belum adanya peta jalan pengembangan rumput laut berkelanjutan;
j. Belum optimalnya upaya pemasaran hasil laut tangkapan nelayan.

2. Pariwisata

a. Belum optimalnya pengembangan pasar wisatawan ke Sulawesi Selatan;
b. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana destinasi pariwisata;
c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Usaha Pariwisata yang berdaya saing;
d. Rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata tentang sadar wisata dan kewirausahaan;
e. Kurangnya inovasi dan kreasi produk wisata dan produk UKM sektor pariwisata;
f. Pembiayaan untuk pengembangan Usaha Pariwisata di Sulawesi Selatan masih tinggi;
g. Belum optimalnya koneksi transportasi publik antar destinasi pariwisata.

3. Pertanian

a. Terbatasnya jumlah tenaga kerja pertanian termasuk kapasitas dan kualitas SDM pertanian;
b. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian pada beberapa wilayah, khususnya pada Kabupaten pendukung ketahanan pangan Sulawesi Selatan;
c. Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian dan perkebunan sebagai sarana untuk mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
d. Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian karena usaha pertanian masih berorientasi on-farm;
e. Belum tercapainya mutu hasil pertanian dan perkebunan yang diharapkan, dan penerapan budidaya yang lebih ramah lingkungan;
f. Belum optimalnya penggunaan benih dan bibit unggul bersertifikat sehingga berdampak pada tingkat produktivitas;
g. masih rendahnya produktivitas sub sektor peternakan serta

pendampingan kelompok peternak;
h. Menurunnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB di Sulawesi Selatan;
i. Menurunnya produksi sektor pertanian dan perkebunan di Sulawesi Selatan;
j. Masih minimnya penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian termasuk infrastruktur pengairan dan jalan usahatani;
k. Adanya perubahan iklim berupa fenomena iklim ekstrim yang mengakibatkan kekeringan dan banjir;
l. Degradasi kualitas lahan disebabkan penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang berlebihan;
m. Belum optimalnya laboratorium pelayanan uji standar dan mutu bidang pertanian dan bidang perkebunan;
n. Belum optimalnya penggunaan pestisida/obat-obatan pertanian yang ramah lingkungan;
o. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit yang bermutu;
p. Menurunnya minat generasi muda untuk menjalankan usahatani;
q. Belum optimalnya pengembangan kelembagaan petani baik formal maupun informal;
r. Terbatasnya pemanfaatan kelembagaan penyuluhan untuk informasi dan promosi pertanian;
s. Rendahnya harga komoditas tertentu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
t. Rendahnya daya saing komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
u. Belum optimalnya dan belum sepenuhnya dipahami tentang keadilan dan kesetaraan gender untuk diterapkan;
v. Masih terbatasnya pemberian subsidi input produksi;
w. Masih rendahnya jaminan harga dan Jaminan peningkatan pendapatan petani yang berlahan sempit;
x. Belum Optimalnya pengelolaan varietas unggulan di Sulawesi Selatan;
y. Masih minimnya penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian termasuk infrastruktur pengairan dan jalan usahatani;
z. Belum optimalnya distribusi bibit berkualitas dan terjangkau.

4. Kehutanan

a. Kewenangan kegiatan RHL dan Pengelolaan DAS Provinsi Sulawesi Selatan berada di luar kawasan hutan, sementara kawasan hutan merupakan hulu dari kegiatan RHL;
b. Masih terdapatnya konflik kepemilikan dan pemanfaatan kawasan hutan;
c. Masih terdapatnya lahan kritis dan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
d. Belum Optimalnya Pemanfaatan potensi sumber daya hutan, utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan;
e. Menurunnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB;
f. Masih terbatasnya SDM tenaga teknis kehutanan yang berkompetensi Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan;
g. Belum selesainya penataan batas kawasan hutan, sehingga belum terwujud secara fisik dan belum terpenuhinya aspek yuridis kawasan

hutan;

h. Perubahan/alih fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan, pertanian dan penambangan yang berimplikasi pada bertambahnya lahan kritis dan degradasi fungsi kawasan hutan;
i. Belum maksimalnya pelayanan publik bidang kehutanan;
j. Terbatasnya sarana dan prasarana mendukung kegiatan inventarisasi hutan, perlindungan dan Pengamanan hutan;
k. Tidak seimbangnya kapasitas izin industri kehutanan dengan ketersediaan bahan baku kayu;
l. Belum tertibnya penatausahaan hasil hutan;
m. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi serta kontribusinya terhadap penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan;
n. Data detail kondisi dan karaekteristik DAS sebagai dasar perencanaan dalam menyusun rencana kegiatan dan rencana pengelolaan belum ada, sehingga efektifitas pelaksanaan kegiatan tidak dapat mencapai sasaran secara tepat sesuai skala prioritas;
o. Rasio jumlah tenaga Pengamanan Hutan/Polisi Kehutanan dibanding dengan luas Kawasan hutan yang begitu luas belum ideal;
p. Banyaknya produk hukum kehutanan yang belum tersosialisasi dan belum dipahami masyarakat dan para pihak kehutanan di daerah;
q. Masih terjadinya gangguan dan ancaman terhadap keamanan hutan dan kelestarian sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia dan daya alam;
r. Belum optimalnya pelaksanaan operasi/patroli rutin penertiban dan pengamanan hutan serta penanganan tindak pelanggaran di bidang kehutanan;
s. Masih rendahnya dukungan dan peran serta masyarakat dan para pihak terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan;
t. Jejaring pemasaran produk hasil usaha kelompok tani masih bersifat lokal.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Masih maraknya Penambangan Tanpa Ijin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya pemahaman penambangan yang benar (*good mining practice*);
b. Belum optimalnya pemanfaatan EBT sebagai sumber energi dalam rangka peningkatan capaian rasio desa berlistrik;
c. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sulawesi Selatan relatif rendah;
d. Masih bergantung pada penyediaan energi fosil;
e. Masih ada daerah di pulau terpencil, terisolir dan terdepan yang belum teraliri listrik;
f. Jumlah produksi komoditas tambang menurun;
g. penurunan kuantitas air tanah di Sulawesi Selatan;
h. Masih banyak pemanfaatan air tanah tanpa izin;
i. Masih banyaknya penambangan tanpa izin;
j. Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pengelolaan pertambangan belum memadai;
k. Masih tingginya permintaan listrik dan rumah-rumah yang belum teraliri listrik.

6. Perdagangan

a. Rendahnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan retail modern karena belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;
b. Belum optimalnya pelayanan pengujian dan sertifikasi produk dan komoditi unggulan orientasi ekspor;
c. Belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen dan penerapan SNI.

7. Industri

a. Tingkat produktivitas masih rendah;
b. Pembangunan sektor industri pengolahan (*manufacturing industry*) masih belum optimal;
c. Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi;
d. Penempatan industri pengolahan di daerah masih rendah karena pertimbang jarak dengan pasar;
e. Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah;
f. Rendahnya kemampuan kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar;
g. Tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor baik bahan baku, bahan penolong maupun bahan setengah jadi, terutama industri makanan, tekstil dan logam;
h. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang;
i. Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah, khususnya melalui upaya penguatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh, konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi;
j. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB masih rendah;
k. Kurangnya kawasan industri yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

4.2.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

a. Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan;
b. Ketersediaan data terkini yang belum akurat;
c. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal;
d. Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal;
e. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

2. Keuangan

a. Belum optimalnya koordinasi antar instansi di daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan terkait identifikasi serta pemetaan sumber PAD baru dari sektor PAP;
b. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah.

3. Kepegawaian dan Diklat

a. Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNS dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas PNS;
b. Belum optimalnya pemetaan kompetensi PNS sebagai dasar pengembangan kompetensi dan karier.

4. Penelitian dan Pengembangan

a. Belum optimalnya pemanfaaatan hasil litbang dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti;
b. Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.

5. Pengawasan

a. Masih rendahnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun ekternal;
c. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
d. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang berarti OPD belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi OPD;
e. Belum Optimalnya Keterlibatan Masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
f. Penyelesaian Rekomendasi Tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal maupun internal hasil audit masih belum cukup memadai;
g. Pengelolaan aset pemerintah provinsi oleh OPD khususnya dalam pengelolaan administrasi kepemilikan serta inventarisasi aset masih belum tertib;
h. Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan masih berada pada kategori “Infrastructure” atau di “Level 2” dari lima tingkatan (level).

Secara detail, rumusan masalah pokok, masalah, dan akar masalah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV. 1
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal	Masih adanya hambatan pada perbaikan 8 area perubahan	• Belum baiknya koordinasi dan kolaborasi antar institusi strategis terkait pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pengawasan • Belum baiknya integrasi pelaksanaan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi program dan kegiatan • Belum optimlanya penjabaran perencanaan jangka menengah kedalam perencanaan jangka pendek pada tingkat kegiatan dan sub kegiatan • Belum baiknya tatalaksana proses bisnis program dan kegiatan • Belum baiknya pengelolaan tatalaksana kepegawaian
2.	Nilai SAKIP Provinsi	Tata Kelola pemerintahan yang belum optimal	Belum efektifnya kualitas penyelenggaraan kinerja Instansi pemerintahan Daerah	• Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur. • Belum optimalnya penataan dan penguatan kelembagaan. • Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah. • Kurang optimalnya pengawasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. • Belum optimalnya implemen- tasi e-government.
3.	Indeks Pelayanan Publik	Tata Kelola pemerintahan yang belum optimal	Belum optimalnya sistem pelayanan publik	• Belum optimalnya tingkat kepuasan masyarakat, dan Pengembangan baruga layanan publik. • Masih kurangnya pengelolaan informasi publik. • Kurang optimalnya penataan organisasi Pemerintah Daerah
4.	Indeks Layanan Infrastruktur	Ketersediaan Infrastruktur wilayah yang belum memadai	Belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar	• Adanya kesenjangan antar wilayah di Sulsel yaitu pemenuhan perumahan dan pemukiman. Rumah atau tempat tinggal belum merata. • Kurangnya konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan antara pusat kegiatan dengan kawasan perdesaan

No.	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				melalui ketersediaan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi.
			Infrastruktur perhubungan belum memadai	• Belum terpenuhinya jalur penghubung antar kawasan pertumbuhan ekonomi • Masih rendahnya akses ke daerah Terluar, Tertinggal, Terdalam, dan Perbatasan (3TP) • Masih rendahnya kualitas jalan Provinsi secara terintegrasi melalui berbagai sumber pembiayaan dan mengem-bangkan inovasi penggunaan skema KPBU dan/atau pembiayaan swasta.
			Masih terdapat daerah yang terisolir	• Masih rendahnya infrastruktur jalan jalur distribusi dari pusat produksi pertanian di pelosok daerah. • Biaya investasi infrastuktur yang tinggi untuk menghubungkan daerah terisolir • Tidak terhubung langsung dengan jalan provinsi (dibatasi jalan kabupaten) • Anggaran yang terbatas untuk menghubungkan daerah terisolir.
5.	PDRB per kapita	Masih rendahnya PDRB per kapita	Belum optimalnya pertumbuhan PDRB dibandingkan jumlah penduduk	• Masih tingginya pertambahan jumlah penduduk baik secara alami maupun akibat migrasi • Belum optimalnya produktivitas barang dan jasa • Masih tingginya tingkat kemiskinan • Nilai tambah produk masih rendah • Masih tingginya tingkat pengangguran
6.	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi yang belum stabil	Belum optimalnya kontribusi PDRB kawasan (PDRB per kapita); Wilayah Domestik dan Regional	• Rendahnya pengembangan nilai tambah hasil sumber daya alam • Pembangunan yang belum sepenuhnya berorientasi pada pemerataan produk hasil- hasil ekonomi ke seluruh penduduk, • Masih rendahnya pendapatan masyarakat • Adanya kontraksi dari sektor pertanian yang mempengaruhi nilai PDRB. • belum mencukupinya

No.	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				dukungan sarana-prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kurang optimalnya peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut • Kurangnya penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi keunggulan daerah • Adanya kontraksi pada kegiatan-kegiatan ekonomi selama pandemi covid-19
7.	Angka Kemiskinan	Masih tingginya angka kemiskinan	Jumlah penduduk miskin yang meningkat	• Jumlah penduduk rentan miskin yang masih tinggi • Belum baiknya tingkat ketrampilan tenaga kerja • Rendahnya akses terhadap sumberdaya • Rendahnya SDM • Masih rendahnya kualitas data kemiskinan • Adanya lingkaran kemiskinan yang sulit terurai
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Masih Tingginya Jumlah Penduduk miskin	Tingginya jumlah penduduk miskin yang menganggur	• Akses untuk pengembangan kompetensi terbatas • Tingkat produktifitas masyarakat yang rendah. • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terus meningkat • Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki • Rendahnya pemberian skills pada usia produktif agar dapat mandiri sektor sektor usaha mikro, sektor usaha kecil, dan sektor usaha menengah.
		Meningkatnya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja	Masih tingginya pengangguran terbuka	• Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki • Rendahnya Pemberian skills pada usia produktif agar dapat mandiri sektor sektor usaha mikro, sektor usaha kecil, dan sektor usaha menengah, dapat menjadi penyelemat krisis ekonomi seperti Covid -19 • Masih tingginya persebaran persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan

No.	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				• Link and match SMK dengan industri belum tercapai
9.	Indeks Williamson	Masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat	Daerah relatif tertinggal (*Low Growth and Low Income*), merupakan daerah-daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapitanya dibawah rata-rata	• Tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonominya berada di bawah rata-rata. • Kontribusi masing-masing daerah terhadap pemerataan pembangunan wilayah belum merata • Perbedaan karakteristik dan heterogenitas antar wilayah masih sangat besar • Masih kurangnya peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan mengoptimalkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Sulawesi Selatan
10.	Gini Rasio	Masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat	Masih tingginya ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat	• Terdapat kesenjangan pem bangunan antar daerah, desa dan kota masih tinggi • Adanya kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan antar sektor serta antar daerah. • beragamnya jenis pekerjaan di perkotaan dengan pendapatan yang berbeda
11.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Masih Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah	• Minimnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terpencil • Akses pendidikan sulit dijangkau • Faktor ekonomi memaksa siswa tidak melanjutkan sekolah untuk bekerja • Masih tinggi angka Anak Tidak Sekolah (ATS) • Belum optimalnya penduduk usia diatas 25 tahun yang mengenyam pendidikan kesetaraan • Banyaknya penduduk yang belum menyelesaikan Pendidikan wajib belajar 9 dan 12 tahun
			Masih Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah	• Perbedaan tingkat sosial belum merata antara masyarakat miskin dan golongan masyarakat menengah ke atas • Keadaan Geografis: • Ketimpangan pembangunan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain baik secara fisik maupun non fisik

No.	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				• Sebaran sekolah tidak merata: • Sebagian besar pendirian lembaga pendidikan masih berada dan berorientasi di perkotaan,
			Masih Rendahnya Angka Harapan Hidup	• Rendahnya kesejahteraan penduduk • Rendahnya derajat Kesehatan • Masih tingginya kasus gizi buruk balita • Rendahnya asupan pangan dan gizi seimbang • Tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB) • Belum meratanya tenaga Kesehatan
12.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Pembangunan Gender belum optimal	Masih rendahnya IPG	• Belum optimalnya kesetaraan gender di berbagai bidang; • Belum optimalnya pemenuhan hak anak; • Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta • belum kuatnya sinergi layanan untuk penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. • Masih rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan yang mengakibatkan ketidak mampuan mereka bersaing dengan kaum lelaki dalam pembangunan, sehingga posisi penting dalam pemerintahan maupun dunia usaha didominasi oleh kaum lelaki.
13.	Produktifitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja)	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam	Rendahnya produktivitas tenaga kerja sumber daya alam	• Tingkat produktivitas pendapa tan masih rendah • Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usahatani. • Pembangunan sektor industri pengolahan (manufacturing industry) masih belum optimal. • Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi • Belum optimalnya pemberdayaan petani • Pengembangan industri pengolahan di daerah terkendala jarak antara sumberdaya, letak industri dan pasar.
14.	Indeks	Belum	Belum selaras	• Pemanfaatan lahan melebihi

No.	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	antara tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial	daya dukung dan daya tampung lingkungan • Rusaknya sistem ekologi mulai dari hutan hingga pencemaran air, udara dan tanah. • Kurang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan
15.	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	Pengurangan emisi dapat meningkat jika skenario yang berbeda digunakan.	• Pada tingkat tapak, tujuan ekonomi masih lebih diutamakan daripada penurunan emisi GRK • Meningkatnya aktivitas/ kegiatan masyarakat pada sektor-sektor yang mengimisi gas rumah kaca. • Kurang data penurunan emisi GRK yang dapat dipertanggung jawabkan

4.3. Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

4.3.1. Isu Strategis Global

4.3.1.1. *Perang Rusia - Ukraina*

Perang Rusia – Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 menuai berbagai dampak global. Dampak pertama yang dirasakan oleh Indonesia berasal dari sektor perdagangan. Kinerja perdagangan Indonesia yang terganggu akibat adanya konflik Rusia dan Ukraina mengakibatkan menurunnya ekspor nonmigas Indonesia dan menghambat impor gandum dan memiliki potensi menaikkan harga bahan pangan berbahan dasar gandum. Keterbatasan transfer energi dari Rusia ke benua Eropa juga memberikan dampak pada meningkatnya biaya produksi barang-barang dari Eropa utamanya produk teknologi tinggi. Selain itu, dampak berikutnya adalah risiko perlambatan ekonomi global akibat lonjakan inflasi. Kondisi inflasi yang tinggi tersebut akan direspons dengan kenaikan suku bunga secara global sehingga risiko perlambatan ekonomi tersebut mencuat dan menjadi ancaman perekonomian global di tahun 2023 dan akan berefek setidaknya hingga 2 tahun berikutnya.

Dalam hubungan perdagangan Rusia-Indonesia, impor terbesar Indonesia dari Rusia yaitu ingot besi baja (bahan baku baja) sebesar 486 ribu ton dengan

nilai USD326 juta sepanjang tahun 2021. Impor itu menjadi yang terbesar dan berikutnya adalah pupuk buatan sebesar 974,32 ribu ton dengan nilai USD326,03 juta. Walaupun pada tahun 2021 neraca perdagangan Rusia – Indonesia meningkat, namun di tahun 2023 antisipasi terhadap ketidakstabilan perekonomian global perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi khususnya pada bidang pertanian yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Sulawesi Selatan.

4.3.1.2. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)*

Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 target yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030, termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

Hasil kesepakatan bersama tingkat global telah ditindaklanjuti pemerintah Indonesia dengan meratifikasinya dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDG's. Pemerintah Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti komitmen pencapaian target SDG's dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023.

Dalam dokumen Rencana Aksi Daerah pencapaian TPB/SDG's Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan target pencapaian hingga tahun 2023 terhadap 17 tujuan dan 70 target dari pembangunan berkelanjutan. Hasil evaluasi terhadap capaian TPB Prov. Sulawesi Selatan menunjukkan beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian antara lain:

a. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
b. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas;
c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan;
d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan;
e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat;
f. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN;
g. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita;
h. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari;
i. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan;
j. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup;
k. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 imunisasi dasar lengkap

pada bayi;
l. Kejadian Malaria per 1000 orang;
m. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern;
n. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
o. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat;
p. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun;
q. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki
r. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun;
s. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
t. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak;
u. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak;
v. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET);
w. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB;
x. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
y. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita;
z. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri;
aa. Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca;
bb. Koefisien Gini;
cc. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.

4.3.1.3. *Perubahan Iklim*

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan penggunaan lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya.

Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris *(Paris Agreement)* dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement ToThe United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan *Conference of the Parties (COP)* 24 di Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada *Talanoa Dialogue.*

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi

dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca provinsi Sulawesi Selatan. Emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan disumbang oleh beberapa sektor/bidang antara lain pertanian, kehutanan, energi dan transportasi serta bidang limbah. Secara total hasil pengkajian ulang terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 5,6% atau setara dengan 300.000 ton CO2eq setiap tahun yang akan dicapai hingga tahun 2030 dengan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah- daerah yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing.

4.3.1.4. *Transformasi Digital*

Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri.

Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia.

Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerse, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan market place yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya.

Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha MIkro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Jumlah Usaha Mikro Sulawesi Selatan adalah pada tahun 2020 adalah 121.097 atau 3,09% dibanding seluruh pelaku usaha mikro di Indonesia.

Namun demikian, pemasaran menjadi kesulitan terbesar untuk Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Sulawesi Selatan. Transformasi digital para pelaku UMK di Sulawesi Selatan tidak bisa ditawar lagi. Hal ini perlu untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMK itu sendiri sehingga tetap

menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian.

Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif.

Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dengan sistem pertanian digital akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Sulawesi Selatan. Melalui hilirisasi beberapa komoditas unggulan Sulawesi Selatan dengan sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terus mendorong investor lokal menjadi investor hebat di daerah sendiri. Jika ini terwujud, maka daya dorong akan menjadi lebih kuat karena bagaimanapun juga pengusaha lokal yang lebih memahami kondisi SDM dan SDA di Sulawesi Selatan.

Salah satu tantangan investasi dalam era digital adalah masih minimnya kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi. Dari 500 pelaku usaha yang terdaftar pada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan, sekitar 50 % - 60 % yang sudah mampu beradaptasi dengan era digitalisasi. Itupun hanya sekitar 15 % yang telah menerapkan kolaborasi teknologi dalam Enterprise Resource Planning (erp sistem).

Pariwisata menjadi salah satu sumber penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi masa kini telah mengubah secara keseluruhan industri pariwisata melalui media digital. Terdapat lima potensi wisata Sulawesi Selatan yang menjadi fokus optimalisasi pengembangan yaitu wisata budaya, wisata bahari, wisata sejarah, wisata agro serta wisata kuliner yang bakal dielaborasi dengan konsep pengembangan halal tourism. Pengembangan wisata halal akan menjadi paradigma baru bagi Pemerintah Sulawesi Selatan dalam memacu perekonomian serta memangkas ketimpangan ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran.

4.3.2. Isu Strategis Nasional

4.3.2.1. Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II.

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah provinsi yaitu terdiri atas:

a. Pelayanan pendidikan menengah;
b. Pelayanan pendidikan khusus;
c. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;
i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
j. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
n. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

4.3.2.2. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan.

Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk

melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.

Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

4.3.2.3. Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Indonesia akan menyelenggarakan perhelatan politik besar yaitu pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga Pilkada Serentak pada Tahun 2024. Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam salah satu pemerintah provinsi yang habis masa jabatan gubernur pada Tahun 2023 termasuk di dalamnya 8 (delapan) kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa tantangan besar yang dihadapi dalam masa sebelum dan sesudah pemilu dan pilkada. Tantangan terbesar adalah pada masa sebelum pemilu dan pilkada yang akan digelar pada tahun 2024 serta pasca pemilu dan pilkada.

Tantangan pertama adalah penganggaran pemilu dan pilkada. Pemilu dan pilkada langsung memerlukan pendanaan yang tidak sedikit untuk menjamin pelaksanaan pemilu dan pilkada dapat berlangsung dengan baik, aman dan damai dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Oleh karena itu, dalam rencana pembangunan daerah harus diperhitungkan biaya-biaya pelaksanaan yang perlu dikeluarkan pada tahun pelaksanaan.

Untuk menjamin tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, dibutuhkan jaminan distribusi perlengkapan pemungutan suara. Terdapat beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memerlukan perhatian khusus dalam distribusi perlengkapan pemungutan suara yaitu pada daerah yang jauh dari jangkauan seperti daerah pegunungan dan daerah kepulauan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan pelibatan unsur-unsur pendukung dalam distribusi perlengkapan pemungutan suara sehingga dapat terdistribusi sesuai waktu yang ditentukan.

Tantangan selanjutnya adalah netralitas ASN. Tak dapat dipungkiri bahwa ASN memainkan peran sebagai pribadi dan juga Aparat Sipil Negara. Sebagai pribadi memiliki hak untuk menentukan pilihan namun sebagai aparat sipil negara diwajibkan mengedepankan netralitas. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah bagaimana peran aparat sipil negara lebih dikedepankan dari peran pribadi untuk menjamin tidak adanya keberpihakan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Friksi yang terjadi antar golongan dan pemilih tentu tidak dapat dihindarkan sebagai akibat dari bentuk pemilu dan pilkada langsung. Oleh karena itu tantangan selanjutnya pasca pemilu dan pilkada serentak adalah masa pendinginan suasana. Stabilitas politik perlu dijamin sehingga benturan yang terjadi dapat diminimalisir dan ditangani dengan baik. Mengingat

pelaksanaan pemilu dan pilkada yang begitu kompleks, maka dibutuhkan kolaborasi antar stakeholders utamanya pemerintah daerah beserta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk menjamin pelaksanaan pemilu dan pilkada dilaksanakan dengan baik sehingga stabilitas politik pasca pemilu dan pilkada dapat terkontrol dengan baik.

4.3.2.4. Isu Strategis Daerah

1. Mendekatkan Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available)* serta bersifat berkesinambungan *(sustanable).* Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya di masyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible)* oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Rumah sakit regional telah dibangun pada masa RPJMD 2018-2023 agar dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan.

Selanjutnya masih dibutuhkan operasional dan pengembangan rumah sakit regional tersebut dengan dukungan SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak, lansia, perempuan dan penyandang disabilitas.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kemudahan dalam berinvestasi, pengurusan perijinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi pra syarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha.

Selain kondisi ekonomi, hal lain yang juga mempengaruhi adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Demikian juga hak atas rasa aman (perlindungan)bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sesuai posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia. Jika faktor-faktor tersebut dapat diciptakan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

3. Kualitas Infrastruktur yang Menunjang Kegiatan Perekonomian

Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkonektivitas antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur

yang baik. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Strategis. Namun karena kualitas yang kurang baik di kabupaten/kota lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.

Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana Indeks layanan infrastruktur tahun 2021 sebesar 79,44 jaringan jalan dalam mantap pada tahun 2021 baru mencapai 70,01% dari panjang jalan 2.009,35 km. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak berat yang berakibat capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi. Di Sulawesi Selatan persentase jalan provinsi dalam kondisi baik adalah 38,98% dikarenakan masih banyaknya jalan provinsi dalam kondisi rusak berat. Dengan demikian diperlukan adanya penanganan terhadap jalan yang rusak berat agar dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan dan menunjang arus perekonomian antar daerah/wilayah.

4. Pemerataan Pendapatan bagi Warga Sulawesi Selatan

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita masyarakat Sulawesi Selatan pada tahun 2021 adalah 59,66 juta rupiah meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 55,68 juta per tahunnya, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan karena tingkat rasio ketimpangan masih berada pada angka 0,377. Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 8,53 % pada tahun 2021.

5. Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sulawesi Selatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2018, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,78 Juta, atau 49% dari total warga Sulawesi Selatan, sementara untuk tahun 2021 terjadi peningkatan angka usia produktif menjadi 6,2 juta jiwa atau 52% dari total penduduk. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun demikian dari segi kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan IPM, Sulawesi Selatan pada tahun 2021 berada di angka 72,24 atau masih berada di peringkat 11 nasional. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan tahun 2021 adalah 8,46 tahun yang berarti rata-rata lama sekolah hanya sampai kelas VIII atau kelas 2 SMP.

6. Revitalisasi Paradigma Pengelolaan Komoditi

Sumberdaya alam yang terkandung di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/ekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam

adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdayaalam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sumberdaya alam bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, wilayah, dan kebutuhan yang berbeda.

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi seharusnya menjadi salah satu fokus untuk lebih ditingkatkan.

Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama, yaitu:

1. Hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.
2. Mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri.
3. Mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur.
4. Percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (*debottlenecking*).
5. Meningkatkan integrasi pasar domestik.

Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Dengan hilirisasi ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan pada sektor produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

7. Sulawesi Selatan sebagai Poros Maritim

Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km^2 diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar.

Potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola secara bijak akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar dari Pangkep hingga Selayar dan sepanjang Teluk Bone yang merupakan destinasi wisata bahari yang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung seperti shortsea shipping untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan.

Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di nusantara, Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang terbengkalai di Selayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanan dan memodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan yang ada. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akan

menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pusat konektivitas kawasan timur Indonesia.

Aspek sosial dan budaya bagi masyarakat maritim sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan kemaritiman secara komprehensif dan terpadu. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat maritim yang tertutup, berpikir sempit dan tidak berkembang menjadi masyarakat maritim yang dinamis, kreatif dan produktif sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat maritim dan nilai-nilai positif yang selama ini telah ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan memprioritaskan proses pada sektor sosial dan budaya dalam membangun kemaritiman.

Disamping itu jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapa kegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan sebagai upaya membangun jasa kelautan yang efektif dan efisien di Sulawesi Selatan.

Kawasan pesisir Sulawesi Selatan memiliki potensi pengembangan yang sangat tinggi dan merupakan usaha padat karya. Tercatat lebih kurang 33.576 pengelola rumput laut atau 102.873 anggota rumah tangga di Sulawesi Selatan atau 39% dari seluruh anggota rumah tangga di Indonesia yang mengusahakan rumput laut. Potensi ini perlu didukung pemerintah dengan memperpanjang rantai nilai rumput laut untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak.

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 – 2026

Bab ini berisi Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangun sampai dengan kondisi triwulan kedua tahun 2022 serta amanat dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025.

Tujuan pembangunan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam RPD di Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2024-2026 dalam bentuk pernyataan – pernyataan dalam mendukung pencapaian RPJPD. Sedangkan sasaran pembangunan adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan berupa hasil pembangunan daerah. Sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2026 merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasi secara terukur, spesifik dan dapat dicapai secara rasional dalam kurun waktu 3 tahun ke depan (2024-2026). Sasaran ini juga juga memperhatikan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan tahapan akhir dari pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan.

5.1. RPJPD Provinsi Sulawesi Selaran Tahun 2005-2025

5.1.1. Arah Pembangunan Lima Tahun Keempat (2020-2025)

Visi dalam RPJPD ini diartikan sebagai rumusan umum mengenai kondisi ideal Sulawesi Selatan yang diinginkan terwujud pada akhir periode RPJPD yakni tahun 2025. Visi ini dirumuskan dengan memperhatikan visi RPJPN, isu-isu strategis pembangunan daerah dan aspirasi pemangku kepentingan daerah. Visi ini selanjutnya diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD guna menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun RPJMD berkenaan. Adapun visi daerah Sulawesi Selatan 2005-2025 adalah: ”Sulawesi Selatan Menjadi Provinsi Terkemuka Di Indonesia Dengan Pendekatan Kemandirian Lokal Yang Bernafaskan Keagamaan” Visi daerah Sulawesi Selatan ini mengarah pada pencapaian visi pembangunan nasional yaitu ”Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur sebgaimana tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2007. Pada visi ini terdapat tiga pokok visi yakni provinsi terkemuka, kemandirian lokal dan bernafaskan keagamaan. Ketiga pokok visi ini merupakan kesatuan holistik dalam menyatakan kondisi yang hendak diwujudkan oleh tatanan Sulawesi Selatan. Provinsi terkemuka adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai terkait dengan capaian kinerja pada aspek-aspek pembangunan tertentu serta tingkat akselerasi dalam proses pencapaian kinerja tersebut. Kemandirian lokal adalah gambaran tentang pendekatan yang ditempuh dalam mencapai posisi sebagai provinsi terkemuka. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa posisi terkemuka Sulawesi Selatan di Indonesia terwujudkan melalui kemandirian dari wilayah dan masyarakat yang berinterkoneksi satu sama lain. Bernafaskan keagamaan adalah landasan etik dan moral bagi kemandirian lokal dalam terwujudnya

Sulawesi Selatan sebagai daerah terkemuka di Indonesia. Dengan demikian, rumusan visi ini mengaitkan antara kondisi tentang posisi Sulawesi Selatan yang hendak diwujudkan, kondisi tentang pendekatan pembangunan yang hendak dijalankan, dan kondisi tentang landasan etik dan moral dalam perwujudan posisi terkemuka dan perwujudan pendekatan kemandirian lokal. Indikasi-indikasi penting dari setiap pokok visi ini adalah sebagai berikut. Provinsi terkemuka diindikasikan oleh perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah yang capaiannya berada dalam kelompok provinsi di atas rata-rata Indonesia. Dalam perwujudan itu, Sulawesi Selatan menjelma sebagai tatanan yang berkualitas, dalam arti memiliki kapasitas yang tinggi dalam menyesuaikan diri terhadap pergeseran aspirasi masyarakat dan dinamika lingkungan, mampu menyediakan berbagai pilihan pada semua aspek kehidupan (choice) dan memilik kekuatan dalam menentukan pilihan (voice), serta berperan dalam memeliharan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Kemandirian Lokal ditandai oleh kemandirian daerah (kabupaten/kota) dan kemandirian masyarakat (kelompok dan kelembagaan), dimana entitas wilayah dan masyarakat tersebut berinterkoneksi satu sama lain dalam mengelola sumberdaya lokal dan menghasilkan sumberdaya baru (emerging resources). Proses pemanfaatan sumberdaya tersebut berbasiskan pada pengetahuan asli dan kearifan lokal sambil mengadopsi pengetahuan luar dan kearifan global, dengan tetap memanifestasikan identitas diri (self reference) tatanan provinsi Sulawesi Selatan, dan ini tergambarkan dalam bentuk produk spesifik yang memiliki keunggulan lokal. Bernafaskan Keagamaan ditandai oleh kondisi dimana agama berfungsi sebagai acuan utama dalam proses aktualisasi nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan dalam rangka proses adaptasi-kreatif terhadap dinamika lingkungan strategis serta pergeseran aspirasi dari tatanan-tatanan pembentuk Sulawesi Selatan. Pokok visi ini menegaskan bahwa proses pembangunan senantiasa mengacu dan dinafasi oleh tatanan keagamaan yang membentuk perilaku manusia religius dengan nilai-nilai spritual yang merupakan ciri dasar dan tetap melekat pada kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Seluruh gerak pembangunan diharapkan muaranya adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan sikap hidup relegius sehingga terbina suasana kehidupan sosial yang aman dan tenteram. Indikasi dari pokok visi ini adalah terpeliharanya landasan akhlak-moral dan spriritualitas kehidupan dan teraktualisasikannya nilai-nilai budaya masyarakat Sulawesi Selatan Pembangunan lima tahun tahap keempat merupakan tahap terakhir dari RPJPD 2005-2025.Berdasarkan capaian kinerja pembangunan pada lima tahun tahap ketiga (2015-2019) yang fokusnya pada loncatan dalam perekonomian dan posisi Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional, pada pembangunan lima tahun tahap keempat pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pertumbuhan yang berkeadilan menjadi prioritas utama. Prioritas ini sekaligus untuk mengatasi efek pertumbuhan pada tahapan sebelumnya yang menyebabkan kesenjangan sosial-ekonomi antar lapisan dan antar wilayah.

Upaya umum yang diprioritaskan pada pembangunan lima tahun keempat difokuskan dalam mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan dan kesejahteraan berkelanjutan, menguatkan daya saing daerah dan

kemandirian lokal, meningkatan kualitas pelayanan umum, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam, mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih, dan menciptakan sitausi kondusif bagi kehidupan spiritual dan pengamalan agama. Pelaksanaan upaya-upaya umum ini diletakkan dalam prinsip untuk mengejar target-target sasaran yang belum tercapai dan mendorong keseimbangan berbagai aspek dalam komposisi target kinerja sasaran.

Misi-1 RPJPD yakni "Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan"dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Akselerasi dukungan pemerintah Provinsi pada kabupaten dengan capaian pembangunan manusia yang berada di bawah rata-rata provinsi; (2) Penerapan standar pelayanan minimal pada semua jenjang pendidikan; (3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif, efisien dan inovatif; 4) Perwujudan standar pelayanan kesehatan dengan pelaksanaan yang konsisten pada semua pihak;(5) Pengelolaan RSU Daerah dan Unit Pelayanan Kesehatan yang professional dan berstandar tinggi; (6) Peningkatan daya saing tenaga kerja dengan memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga-lembaga pendidikan keterampilan yang di- selenggarakan oleh masyarakat;(7) Pengembangan wirausaha perdesaan; Peningkatan wawasan kebangsaan, integritas diri, serta pembinaan mental dan spiritual pemuda; (8) Peningkatan pembibitan, pembinaan dan minat olahraga yang dilakukan secara sistematis dan terpadu; (9) Peningkatan kualitas peran serta perempuan dan pengarusutamaan gender dalam penyusunan, pelaksanaan dan penerimaan manfaat dari kebijakan pemerintah daerah serta mendukung akses secara nasional; (10) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perdagangan perempuan (trafiking), serta penerapan peraturan perundangan-undangan terkait secara baik; (11) Peningkatan kordinasi pembina-an keluarga berencana; (12) Pengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian serta menjamin adanya perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta bagi pelaku seni dan budaya; (13) Penguatan peran perguruan tinggi dan lembaga budaya/organisasi kesenian tradisional sebagai ujung tombak upaya-upaya penggalian dan pengembangan nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan; (14) Fasilitasi organisasi keagamaan, forum kerukunan antar ummat beragama, dan tokoh-tokoh agama, sehingga dapat melaksanakan fungsi dan perannya dalam meningkatkan peng- hayatan dan pengamalan agama secara baik; (15) Peningkatan kesadaran ummat beragama untuk tidak mudah terprovokasi dalam menerima ajaran agama yang sesat, penghasut dan perusuh.

Misi-2 RPJPD yakni "Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Pengembangan situasi kondusif bagi aktivitas kelompok/organisasi masyarakat yang bergerak dalam kehidupan sosial-budaya; (2) Pergeseran struktur perekonomian menuju perekonomian berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) dan teknologi; (3) Pemeliharaan iklim investasi yang baik, termasuk fasilitasi ketersediaan tanah bagi investasi pada berbagai bidang; (4) Pemeliharaan tatanan kehidupan sosial yang kondusif dan tanggap terhadap berbagai kerawanan dan kerentanan sosial; (5)Fasilitasi

pengembangan science-park dan techno-park; (6) Fasilitasi terwujud-nya masyarakat melek iptek antara lain melalui upaya pengenalan iptek sejak dini pada generasi muda; (7) Pembinaan dan pengembangan desa adat dan komunitasnya; (8) Peningkatan kordinasi antar kabupaten/kota dalam pencapaian target-target pembangunan nasional; (9) Pengembangan kerjasama pembangun-an antara provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain.

Misi 3 RPJPD yakni "Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Pengembangan sistem pengamanan dan perlindungan masya-rakat secara swakarsa pada tataran desa/kelurahan yang sepenuhnya di bawah bimbingan pemerintah desa/kelurahan serta dibina secara teknis oleh aparat keamanan setempat; (2) Pengembangan sistem deteksi dini potensi konflik sosial; (3) Penyelenggaraan agenda reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola kepemerintahan yang baik;Penyelenggaraan agenda reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola kepemerintahan yang baik.(3) Penertiban pengelolaan keuangan dan asset daerah; (4) Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan bahwa basis profesi-onalisme adalah kompetensi dan kapasitas belajar yang di dasarkan pada etika dan moral yang tinggi.

Misi 4 RPJPD yakni "Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial- ekonomi yang berkeadilan" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Pengembangan jalur-jalur pemerataan dalam hal peluang kerja dan peluang usaha; (2) Pengembangan sistem upah kerja yang mendorong peningkatan pendapatan pekerja; (3) Penajaman implementasi program pada kabupaten/kota yang angka kemiskinannya paling tinggi; (4) Pelibatan secara efektif dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab sosial korporasi; (5) Pelibatan multipihak dalam penanganan keamanan pangan; (6) Penguatan akses pasar dengan daya saing harga yang tinggi bagi produk petani, peternak dan nelayan; (7) hilirisasi produk unggulan untuk pengembangan industri strategis; (8) Pengembangan kerjasama regional dan promosi perdagangan; (9) Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan khususnya pada jalur interkoneksi antar wilayah yang penggunanya sudah sangat padat; (9) Pengembangan jaringan transportasi kereta api dalam mengakselerasi pereknomian Sulawesi Selatan dan lintas Sulawesi; (11) Pengembangan sarana-prasarana pelabuhan yang dapat mengakselerasi posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat interkoneksitas logistik di kawasan Timur Indonesia; (12) Pengembangan sumber energi listrik alternatif (PLTMH, energi bayu) terbarukan; (13) Pengelolaan pertambang-an berorientasi pengolahan secara berkelanjutan; (14) Fasilitasi berkembangnya kota cerdas (smart city) di Sulawesi Selatan; (15) Penataan komprehensif terhadap pemanfaatan berbagai sumber daya air terutama dalam menjamin keberlanjutan keterpenuhan kebutuhan air perkotaan; (16) Perlindungan terhadap lahan pangan berkelanjutan melalui mekanisme insentif dan disinsentif; (17) Pemanfaatan secara lestari atas lahan pangan berkelanjutan; (18) Kordinasi kabupaten/ kota dalam perlindungan lahan pangan berkelanjutan; (19) Pemberian fasilitasi bagi investasi sektor swasta pada kawasan andalan cepat tumbuh/kawasan wilayah terpadu; (20) Kordinasi dan fasilitasi akselerasi capaian kinerja pembangunan pada kawasan

tertinggal, terpencil dan pulau-pulau yang jauh dari daratan utama; (21) Pengembangan kerjasama dan sinergi pembangunan antar provinsi pada wilayah perbatasan; (22) Pengendalian pencemaran melalui pemantauan terhadap kondisi tanah, air dan udara, penerapan standar pengelolaan lingkungan pada kawasan-kawasan yang peka terhadap kerusakan lingkungan, implementasi rekomendasi Amdal terhadap penyelenggaraan proyek pembangunan, dan penegakan hukum lingkungan yang konsisten; (23) Fasilitasi dan kordinasi antar kabupaten/kota dalam pemeliharaan dan pemulihan kondisi ekologis daerah aliran sungai serta danau dan kawasan pesisir; (24) Peningkatan kapasitas multipihak dalam pelaksanaan pencegahan, penyelamatan, dan perbaikan kerusakan lingkungan; (25) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta stakeholder masyarakat dan swasta dalam deteksi dini bencana, penanganan saat bencana dan pemulihan pasca bencana; (26) Fasilitasi pengembang-an kota cerdas dan masyarakat kota berbasis pengetahuan (knowledge based society); (27) Dukungan pengembangan interaksi perdesaan-perkotaan serta pertumbuhan kawasan agropolitan dan minapolitan.

Misi 5 RPJPD yakni ”Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional” dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Penggalian dan revitalisasi nilai-nilai serta kearifan lokal kebaharian serta mempromosikannya dalam kancah jagad maritim nusantara; (2) Revitalisasi dan penguatan jalur-jalur perkapalan/pe-layaran niaga Bugis- Makassar dalam mendukung pergerakan logistik Nusantara; (3) Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam kelautan melalui perumusan tata ruang kawasan pesisir dan laut yang diarahkan untuk mendukung ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pada pulau-pulau di Sulawesi Selatan; (4) Pemberian dukungan kepada kekuatan pertahanan dan keamanan nasional dalam operasi strategis pertahanan dan keamanan NKRI.

5.1.2. Sasaran Strategis RPJPD

Pelaksanaan kebijakan prioritas dalam arah pembangunan setiap tahapan pembangunan lima tahun RPJPD memiliki target kinerja berdasarkan sasaran pokok yang hendak dicapai. Adapun target kinerja sasaran pokok pada setiap tahapan pembangunan lima tahun RPJPD ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel V. 1.
Sasaran dan Target RPJPD Sulawesi Selatan

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Target RPJPD Periode 2005-2009	Target RPJPD Periode 2010-2014	Target RPJPD Periode 2015-2019	Target RPJPD Periode 2020-2024	Target Akhir RPJPD 2025
Misi 1: Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan							
1.	Meningkatnya kualitas manusia Sulawesi Sela-tan sebagai dampak dari keterlibatan se-luruh pihak (pemerin-tah, swasta dan masya-rakat) pada berbagai level wilayah (kabupa-ten/kota dan provinsi) dalam berbagai upaya pembangunan. (S1	Indeks Pembangunan Manusia	70,94 (Tahun Dasar 2000)	68,49 (Tahun Dasar 2010)	70,43 (Tahun Dasar 2010)	74,71 (Tahun Dasar 2010)	**75,33 (Tahun Dasar 2010)**
2.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidik-an pada berbagai jenjang pendidikan dengan luaran yang profesional dan memi-liki mentalitas/karak-ter yang mencirikan manusia Indonesia seutuhnya serta tetap berbasis pada nilai-nilai lokal Sulawesi Selatan. (S2)	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Tahun	7,41 (Tahun Dasar 2000)	7,49 (Tahun Dasar 2010)	7,74 (Tahun Dasar 2010)	7,99 (Tahun Dasar 2010)	**8,0(Tahun Dasar 2010)**
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	-	12,9 (Tahun Dasar 2010)	14,68 (Tahun Dasar 2010)	16,47 (Tahun Dasar 2010)	**16,83 (Tahun Dasar 2010)**
3.	Meningkatnya keber-dayaan masyarakat dalam	Angka Harapan	69,80 (Tahun	69,60 (Tahun	70,43 (Tahun	71,27 (Tahun	**71,44**

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Target RPJPD Periode 2005-2009	Target RPJPD Periode 2010-2014	Target RPJPD Periode 2015-2019	Target RPJPD Periode 2020-2024	Target Akhir RPJPD 2025
	mencapai dan memelihara derajat kesehatan yang tinggi dengan pelayanan ke-sehatan yang berkuali-tas dan mudah diakses untuk semua lapisan dan golongan. (S3)	Hidup (AHH) saat lahir	Dasar 2000)	Dasar 2010)	Dasar 2010)	Dasar 2010)	**(Tahun Dasar 2010)**
4.	Meningkatnya keter-serapan angkatan kerja pada bidang pekerjaan yang berkembang dan berdaya saing secaralokal, nasional dan internasional. (S4)	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	8,90	5,10	4,30-3,50	3,50-2,70	**2,70-2,30**
5.	Meningkatnya kualitas kehidupan kepemuda-an dan aktivitas keolahragaan. (S5)	Persentase Jumlah Organisasi Pemuda dan Cabang Olah Raga yang Aktif	70%	70%	80%	80%	**85%**
6.	Meningkatnya kulitas kehidupan pada insti-tusi keluarga, relasi gender dan perlin-dungan terhadap anak. (S6)	Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IPG Meningkat IPA Meningkat	IPG Meningkat IPA Meningkat	IPG Meningkat IPA Meningkat	IPG Meningkat IPA Meningkat	**IPG Meningkat IPA Meningkat**
7.	Terkendalikannya per-tumbuhan penduduk dalam menjamin ke-sejahteraan keluarga. (S7)	Persentase Rata-Rata Pertumbuh-an Penduduk	1,33	1,07	0,96	0,77	**0,74**
8.	Berkembangnya kebudayaan masyarakat yang memiliki karakteristik identitas	Persentase keragaman budaya	60%	70%	80%	90%	**100%**

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Target RPJPD Periode 2005-2009	Target RPJPD Periode 2010-2014	Target RPJPD Periode 2015-2019	Target RPJPD Periode 2020-2024	Target Akhir RPJPD 2025
		dan kekayaan					
	sekali-gus mampu adaptif-inklusif dengan kebudayaan lain. (S8)	budaya yang memperoleh pembinaan/peles-tarian					
9.	Meningkatnya manifestasi spiritual, amal saleh dan pengamalan nilai dan ajaran keagamaan dalam mendukung per-kembangan daerah. (S9)	Persentase kegiatan keagamaan yang men- dapatkan dukungan/ fasilitasi	80%	80%	85%	90%	**100%**
10.	Berkembangnya rasa saling percaya, harmoni antar kelompok, toleransi dan kerukunan, serta kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan dan interaksi ummat beragama. (S 10)	Jumlah insiden terkait kehidupan intra dan antar ummat beragama	Tidak ada insiden	Tidak ada insiden	Tidak ada insiden	Tidak ada insiden	**Tidak ada insiden**
Misi 2: Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar							
11.	Menguatnya ketahanan kelem-bagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalam penyelesaian masalah sosial budaya(S11)	Kondisi peningkatan aktivitas kelembagaan sosial-budaya (Ormas, LSM, yayasan, asosiasi) dalam masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	**Meningkat**

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Target RPJPD Periode 2005-2009	Target RPJPD Periode 2010-2014	Target RPJPD Periode 2015-2019	Target RPJPD Periode 2020-2024	Target Akhir RPJPD 2025
12.	Menguatnya ketahanan kelem-bagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalampenyelesaian masalah ekonomi (S12)	Persentase jumlah koperasi dan UMKM yang aktif	80%	90%	100%	100%	**100%**
13.	Menguatnya ketahanan ke-lembagaanmasyarakat sebagai komunitas pembelajar	Persentase jumlah organisasi sosial-politik,	60%	70%	75%	80%	**100%**
	yang tangguh dan mandiri dalampenyelesaian masalah sosial-politik (S13)	LSM, lembaga kajian yang aktif					
14.	Menguatnya ketahanan kelem-bagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalam perkembangan ilmu-penge-tahuan dan teknologi (S14)	Persentase jumlah unit science park, techno- park, asosiasi keilmuan, lembaga kajian ilmiah yang aktif	100%	100%	100%	100%	**100%**
15.	Menguatnya kapasitas peme-rintahan dan masyarakat desa sesuai karakteristik adat- istiadat lokal dan dinamika kemajuan desa (S15)	Jumlah desa adat yang dibina	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	**Meningkat**
16.	Menguatnya kapasitas otonomi dan kerjasama daerah kabupaten/kota dalam pe-mecahan masalah lintas daerah (S 16)	Jumlah kerjasama dan dialog pembangunan antar	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	**Meningkat**

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Target RPJPD Periode 2005-2009	Target RPJPD Periode 2010-2014	Target RPJPD Periode 2015-2019	Target RPJPD Periode 2020-2024	Target Akhir RPJPD 2025
		kabupaten/kota yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi					
17.	Efektifnya kerjasama antara provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain dalam pemecahan masalah lintas daerah (S 17)	Jumlah kegiatan kerja sama antara provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	**Meningkat**
Misi 3: Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif							
18	Terpeliharanya situasi dan kondisi tertib,tenteram, aman dan harmonis dalam	Kondisi Penurunan Angka Kriminalitas dan	Indeks kriminalitas=	Indeks kriminalitas=	Indeks kriminalitas=	Indeks kriminalitas=	**Indeks kriminalitas =**
	kehidupan sosial kemasyara-katan dankewilayahan (S 18)	Gangguan Kamtibmas	bawah rata-rata provinsi di Indonesia	di bawah rata- rata provinsi di Indonesia	di bawah rata- rata provinsi di Indonesia	di bawah rata-rata provinsi di Indonesia	**di bawah rata- rata provinsi di Indonesia**
19.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang menerap-kan prinsip akuntabilitas, transparansi, bersih dan partisipatif (*clean and good governance*) (S 19)	Opini Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	**WTP**
20.	Berkembangnya sistem pe-layanan yang efektif	Indeks Kepuasan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	**Meningkat**

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Target RPJPD Periode 2005-2009	Target RPJPD Periode 2010-2014	Target RPJPD Periode 2015-2019	Target RPJPD Periode 2020-2024	Target Akhir RPJPD 2025
	dalam pencapaian standar pelayanan minimal (S 20)	Masyarakat					
Misi 4: Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan							
21.	Terwujudnya peningkatan danpemerataan pendapatan masyarakat (S 21)	PDRB Per Kapita & Gini Ratio	Rp. 12,56 (Tahun Dasar 2000) GR= 0,39	Rp. 35,59 (Tahun Dasar 2010) GR = 0,42	Rp. 65,7 (Tahun Dasar 2010) GR = 0,38	Rp. 120,5 (Tahun Dasar 2010) GR = 0,36	**Rp. 124,5 (Tahun Dasar 2010) GR = 0,34**
22.	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (S22)	Angka Kemiskinan dan persen PMKS yang terlayani	21,31	8,50	7,90-6,00	6,00-5,20	**5,20-3,40**
23.	Meningkatnya kualitas ke-daulatan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakatterhadap pangan (S23)	Ranking Indeks ketahanan pangan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	**Meningkat**
24.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakatpetani, peternak dan nelayan/pembudidaya ikan (S 24)	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,65	110,70	116,50	122,50	**126,0**
25.	Tumbuhnya rumpun industri yang kuatdan sehat dalam lingkungan usaha yang kondusif (S 25)	Kontribusi industri dan UMKM terhadap PDRB	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	**Meningkat**
26.	Berkembangnya jaringan per-dagangan komoditas unggul-an sehingga menjangkau pasar-pasar	Volume dan nilai perdagangan dalam	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	**Meningkat**

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Target RPJPD Periode 2005-2009	Target RPJPD Periode 2010-2014	Target RPJPD Periode 2015-2019	Target RPJPD Periode 2020-2024	Target Akhir RPJPD 2025
	komoditas dunia (S 26)	negeri dan ekspor					
27.	Tercukupinya sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung kegiatan sosial- ekonomi yang menjamin keseimbangan dan pemerata-an pembangunan antar-daerah (sub-wilayah) (S 27)	Persentase keman-tapan jalan, kapa-sitas/kualitas baik, dan konektivikasi	79,83	82,05	86,56	91,31	**92,07**
28.	Berkembangnya sarana-pra-sarana perhubungan udara, laut dan darat yang menempatkan Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring lintasan perhubungan kawasan timur Indonesia (S 28)	Persentase peningkat-an jumlah penum-pang yang melewati bandara, pelabuhan, dan terminal	**75%**	**77,73%**	**90%**	**95%**	**100%**
29	Tersedianya pasokan listrik dan energi dari berbagai sumber dengan jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Sulawesi Selatan sebagai bagian dari jaringan interkoneksi pulau Sulawesi (S 29)	Rasio elektrifikasi (%)	76,28	81,14	86,2	91,26	**96,32**
30	Berkembangnya Sulawesi Selatan sebagai kesatuan kawasan komunikasi yang handal serta mendukung berkembangnya e-*commerce, e-government, e-learning*	Persentase wilayah yang memiliki jari-ngan komunikasi	90	100	100	100	**100**

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Target RPJPD Periode 2005-2009	Target RPJPD Periode 2010-2014	Target RPJPD Periode 2015-2019	Target RPJPD Periode 2020-2024	Target Akhir RPJPD 2025
	dan menjadi simpul jejaring/hub dalam layanan komunikasi di Sulawesi dan Indonesia Timur (S 30)	dengan bandwidth yang cukup (persen)					
		Jumlah perusahaan seluler yang menjadikan Sulawesi Selatan sebagai hub dalam beroperasi	5 Operator	7 Operator	8 Operator	9 Operator	**10 Operator**
31	Terwujudnya fungsi air sebagai sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan dalam menjamin kebutuhan pokok hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (S 31)	Luas lahan budidaya yang terairi jaringan irigasi (Hektar)	336,141	476,141	635,141	794,141	**953,141**
		Persentase rumah tangga berakses air bersih	82,6	84	85,4	86,8	**88,2**
32	Terlindunginya kawasan lahan pangan berkelanjutan dari konversi lahan dan degradasi lahan demi terpeliharanya kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan bagi Sulawesi Selatan sebagai daerah surplus pangan nasional (S 32)	Pesentase luas lahan pangan berkelanjutan yang terlindungi	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	**Meningkat**
33	Meningkatnya akselerasi per-tumbuhan dan kecukupan sarana/prasarana wilayah pada kawasan	Persentase pertum-buhan ekonomi ka-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	**Meningkat**

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Target RPJPD Periode 2005-2009	Target RPJPD Periode 2010-2014	Target RPJPD Periode 2015-2019	Target RPJPD Periode 2020-2024	Target Akhir RPJPD 2025
	andalan cepat tumbuh serta kawasan tertinggal, terpencil dan pulau- pulau yang letaknya jauh dari daratan utama (S 33)	wasan Strategis nasional (Kawasan Mam-minasata, Kapet Pare- pare) dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dasar pada kawasan tertinggal, terpencil dan pulau-pulau yang letaknya jauh dari daratan utama					
34	Berkembangnya wilayah per-batasan sebagai pintu gerbang aktivitas sosial- ekonomi dengan provinsi tetangga, sehingga pada satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sedangkan pada sisi lain mendorong berkembangnya sinergi antar provinsi. (S 34)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan dasar pada wilayah perbatasan.	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	**Meningkat**
35	Terpeliharanya daya dukung lingkungan pada daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan pesisir, seiring	Luas lahan kritis di dalam dan di luar	445,219 (Ha)	497,885 (Ha)	445,189 (Ha)	392,523 (Ha)	**339,885 (Ha)**

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Target RPJPD Periode 2005-2009	Target RPJPD Periode 2010-2014	Target RPJPD Periode 2015-2019	Target RPJPD Periode 2020-2024	Target Akhir RPJPD 2025
	dengan terkendalikannya pencemaran lingkungan, serta rehabilitasi lahan kritis secara terus- menerus, melalui keterlibatan multipihak yang kapasitasnya memadai (S 35)	kawasan hutan yang direhabilitasi;					
		Indeks Mutu Lingkungan yang semakin membaik	3 DAS	3 DAS	3 DAS	3 DAS	**3 DAS**
36	Meningkatnya kapasitas pena-nganan bencana skala lintas kabupaten/kota.(S 36)	Persentase korban bencana skala pro-vinsi yang tertangani	Berkurang	Berkurang	Berkurang	Berkurang	**Berkurang**
37	Terwujudnya kawasan per-kotaan dengan akses dan jangkauan pelayanan sosial ekonomi yang memuaskan bagi masyarakatnya (S 37)	Jumlah kota yang efektif berkembang sebagai kawasan yang nyaman dengan pela-yanan social ekonomi yang memuaskan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	**Meningkat**
38	Terwujudnya perdesaan sebagai kawasan yang layak huni, berkeadilan dan berbudaya, dan fungsional dalam peningkatan produk-tivitas masyarakat, serta mewujudkan pusat pelayanan sosial ekonomi dan pemerintahan yang baik. (S38)	Persentase desa kualifikasi mandiri.	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	**Meningkat**
Misi 5: Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional							

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Target RPJPD Periode 2005-2009	Target RPJPD Periode 2010-2014	Target RPJPD Periode 2015-2019	Target RPJPD Periode 2020-2024	Target Akhir RPJPD 2025
39	Berkembangnya posisi Sulawesi Selatan sebagai pilar budaya bahari dan penggerak interkoneksitas maritim di Indonesia Timur (S 39)	Kondisi peningkatan jumlah perahu/kapal yang berlabuh pada pelabuhan Sulawesi Selatan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	**Meningkat**
40	**Menguatnya posisi strategis wiayah kepulauan Sulawesi Selatan dalam mendukung ketahanan nasional (S 40)**	**Jumlah unit per tahanan/keaman-an nasional yang berpangkalan di Sulawesi Selatan**	**Meningkat**	**Meningkat**	**Meningkat**	**Meningkat**	**Meningkat**

5.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 2024-2026

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; danmemenuhi kriteria SMARTC.

Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dapat berlangsung secara fokus, efektif, terukur dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada penyusunan RPD ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sebuah konsep RPD 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025;
2. Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
3. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
4. Permasalahan dan Isu-isu strategis Pembangunan Daerah.

Dari hasil muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut yaitu; dimensi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, dimensi manusia (human), dan dimensi lingkungan.

Keempat dimensi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep RPD yang kemudian diturunkan menjadi prioritas dan rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026. Muatan RPD Tahun 2024-2026 adalah bagian upaya untuk mewujudkan Visi RPJPD yaitu Sulawesi Selatan Menjadi Provinsi Terkemuka Di Indonesia Dengan Pendekatan Kemandirian Lokal Yang Bernafaskan Keagamaan. Disamping itu RPD Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dari RPJMD tahun 2018-2023. Muatan tersebut merupakan muatan pembangunan daerah yang menjadi iklusifitas dimana semua warga Siulawesi selatan dapat merasakan dampak dan manfaat pembangunan secara merata dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, serta berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Bersadarkan hasil pertimbangan tersebut maka ditetapkan 4 Tujuan

yang menjadib acuan prioritas pembangunan pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Tujuan ini dijabarkan ke dalam dua sasaran strategis sebagi berikut:
    a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
    b. Optimalnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata. Tujuan kedua ini dijabarkan melalui sasaran strategis yaitu: meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah. Pencapaian sasaran strategis tersebut melalui peningkatan kinerja kemantapan jalan, cakupan irigasi kondisi baik, ketersediaan Pelabuhan pengumpan, akses air minum layak, akses sanitasi layak, dan rasio elektrifikasi desa,
3. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata. Tujuan ketiga ini dijabarkan kedalam sasaran strategis sebagai berikut:
    a. Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja
    b. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas
    c. Menurunya angka kemiskinan
    d. Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif
    e. Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan. Tujuan kemepat ini dijabarkan pada sasaran strategis Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Kinerja dari tujuan dan sasaran tersebut yang akan menjadi pedoman penyusunan prioritas pembangunan tahunan daerah, sebagai sebagai mana pada table V.2 berikut:

Tabel V. 2.
Tujuan dan Sasaran Pembangaunan 2024 – 2026

Tujuan/Sasaran			Indikator KinerjaTujuan/ Sasaran		Kondisi Awal 2022	Target			Kondisi Akhir RPD Tahun 2026
						2024	2025	2026	
Tujuan 1	**Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel**		1	Indeks Reformasi Birokrasi	66,16 (B)	67,31 (B)	68,76 (B)	70,21 (BB)	70,21 (BB)
	Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	68,08 (B)	68,52 (B)	69,27 (B)	70,03 (BB)	70,03 (BB)
	Sasaran 2	Optimalnya Kualitas pelayanan publik	3	Indeks Pelayanan Publik	4,10 (A-)	A- (4,01 – 4,50)	A-(4,01 – 4,50)	A (4,51 – 5,00)	A (4,51 – 5,00)
Tujuan 2	**Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata**		4	Indeks Williamson	0,687	0,670	0,662	0,653	0,653
	Sasaran 3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	80,39	81,97	82,34	82,73	82,73
Tujuan 3	**Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata**		6	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	65,59	70,7	74,55	78,4	78,4
			7	Gini Rasio	0,365	0,361	0,356	0,352	0,352
	Sasaran 4	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,51	4,24	4,03	3,83	3,83
	Sasaran 5	Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	9	Pertumbuhan ekonomi	5,09	5,23-6,71	5,67-6,82	5,71-6,91	5,71-6,91
	Sasaran 6	Menurunnya Angka kemiskinan	10	Angka Kemiskinan	8,63	8,31	8,20	8,09	8,09
	Sasaran 7	Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	11	IPM	72,82	73,99	74,49	74,98	74,98
	Sasaran 8	Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,14	93,65	93,78	93,90	93,90

Tujuan/Sasaran			Indikator KinerjaTujuan/ Sasaran		Kondisi Awal 2022	Target			Kondisi Akhir RPD Tahun 2026
						2024	2025	2026	
Tujuan 4	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana**		13	IKLH	72,63	73,57	73,62	73,72	73,72
	Sasaran 9	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	14	Potensi Penurunan emisi GRK	1.360.000	1.823.583	2.075.597	2.356.390	2.356.390

BAB VI
ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI SELATAN

6.1. Arahan Nasional Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan yang mengacu pada Visi Indonesia 2045 dan rencana pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana umum tata ruang yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) beserta rencana rincinya yaitu Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Mamminasata.

RTRWN menetapkan sistem perkotaan nasional di Sulawesi Selatan yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi nasional dan/atau pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional di Kawasan Perkotaan Mamminasata dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi dan/atau pusat kegiatan industri dan jasa skala provinsi yaitu Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru dan Parepare. Selain itu RTRWN juga menetapkan kawasan andalan yaitu kawasan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah yang meliputi Kawasan Mamminasata dan Sekitarnya, Kawasan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Bulukumba-Watampone dan Sekitarnya, Kawasan Parepare dan Sekitarnya, Kawasan Andalan laut Kapoposang, Kawasan Andalan laut Teluk Bone, Kawasan Andalan Laut Sangkarrang-Takabonerate, dan Kawasan Andalan Laut Selat Makassar.

Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi sebagai alat operasionalisasi RTRWN yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan mengarahkan pengembangan wilayah Pulau Sulawesi untuk memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan Internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia, pengembangan industri berbasis logistik, lumbung pangan nasional, pusat pengembangan ekonomi kelautan, pusat perkebunan kakao berbasis bisnis, pusat pariwisata, serta pusat pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan panas bumi, dengan mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana.

Sedangkan arahan kebijakan nasional dalam Visi Indonesia 2045 secara umum mengarahkan pengembangan wilayah Sulawesi sebagai basis industry pangan dan gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pulau Sulawesi berpotensi besar baik sebagai penggerak ekonomi maupun sumber keanekaragaman hayati Indonesia yang didukung oleh keunggulan sector pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan. Pengembangan sector pertanian diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan padi nasional di bagian Selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi serta pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi. Peningkatan peran di sektor

jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan di Kawasan Perkotaan Mamminasata dan Kendari serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi untuk perdagangan dari Manado-Bitung dengan luar Indonesia. Pengembangan Kawasan Pariwisata Bunaken dan Wakatobi serta Tana Toraja diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor jasa, sedangkan peningkatan sektor industri pengolahan didorong dengan industri pengolahan pada beberapa kawasan industry antara lain Kawasan Industri Bantaeng, Kawasan Industri Takalar dan Kawasan Industri Morowali dan industri jasa hasil perkebunan kakao dan pengembangan industri barang dari rotan serta pembangunan industri pengolahan logam dasar dan non logam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Sulawesi Selatan sebagai bagian dari wilayah Pulau Sulawesi diarahkan pembangunannya sebagai lumbung pangan padi nasional dan pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari dan ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang didukung oleh keterkaitan jaringan antar wilayah dan memperhatikan kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap. Arahan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional digambarkan sebagai berikut.

Tabel VI. 1.
Arahan Struktur dan Pola Ruang Nasional di Sulawesi Selatan

No.	Kab/Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Kawasan Andalan
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	
1	Kepulauan Selayar			Bagian dari Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan Kawasan Andalan Laut Singkarrang, dengan sektor unggulan agroindustri, pariwisata, perikanan dan pertambangan minyak bumi
2	Bulukumba		Kawasan Perkotaan Bulukumba. Sektor unggulan Agroindustri, Pertanian, Pariwisata, Perikanan	Bagian dari Kaw. Andalan Bulukumba-Watampone dan Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan
3	Bantaeng			Bagian dari Kaw. Andalan Bulukumba-Watampone dan Kaw. Andalan Laut Kapoposang dengan sektor unggulan industri,

No.	Kab/Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Kawasan Andalan
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	
				peternakan berbasis agrobisnis, pariwisata, perikanan dan pertanian
4	Jeneponto		Kawasan Perkotaan Jeneponto. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Pariwisata	Bagian dari Kaw. Andalan Bulukumba-Watampone dan Kaw. Andalan Laut Kapoposang dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perikanan, dan industri pengolahan komoditas pertanian
5	Takalar	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Pertanian, perikanan dan industri		Bagian dari Kaw. Andalan Mamminasata dan Kaw. Andalan Laut Kapoposang dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perikanan dan industri
6	Gowa	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa, pertanian		Bagian dari Kaw. Andalan Mamminasata dengan sektor unggulan pertanian, dan pariwisata
7	Sinjai			Bagian dari Kaw. Andalan Bulukumba-Watampone dan Kaw. Andalan Laut Teluk Bone dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan
8	Maros	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan pertanian, pariwisata, dan industri		Bagian dari Kaw. Andalan Mamminasata dengan sektor unggulan pertanian, perikanan dan industri
9	Pangkajene Kepulauan		Kawasan Perkotaan Pangkejene. Sektor unggulan	Bagian dari Kaw. Andalan Laut Kapoposang dengan sektor unggulan pariwisata dan perikanan

No.	Kab/Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Kawasan Andalan
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	
			Agroindustri, Perikanan, Pariwisata	
10	Barru		Kawasan Perkotaan Barru. Sektor unggulan Agroindustri, perikanan, pertanian, perkebunan	Bagian dari Kawasan Strategis Nasional Parepare, dengan sektor unggulan pertanian, perikanan dan industri
11	Bone		Kawasan Perkotaan Watampone. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan, Pertanian	Bagian dari Kaw. Andalan Bulukumba-Watampone dan Kaw. Andalan Laut Teluk Bone dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, perkebunan, industri dan pertambangan minyak
12	Soppeng			Bagian dari Kaw. Andalan Bulukumba-Watampone dengan sektor unggulan pertanian
13	Wajo			Bagian dari Kaw. Andalan Bulukumba-Watampone dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perikanan dan pertambangan minyak dan gas bumi
14	Sidenreng Rappang			Bagian dari Kawasan Andalan Parepare, dengan sektor unggulan pertanian, dan agroindustry
15	Pinrang			Bagian dari Kawasan Andalan Parepare, dengan sektor unggulan pertanian, perikanan dan agroindustri
16	Enrekang			Bagian dari Kawasan Andalan Parepare, dengan sektor unggulan

No.	Kab/Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Kawasan Andalan
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	
				pertanian, dan perkebunan
17	Luwu			Bagian dari Kawasan Andalan Palopo dan Kawasan Andalan Laut Teluk Bone, dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan
18	Tana Toraja			Bagian dari Kawasan Andalan Palopo, dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, dan pertambangan
19	Luwu Utara			Bagian dari Kawasan Andalan Palopo dan Kaw. Andalan Laut Teluk Bone, dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan
20	Luwu Timur			Bagian dari Kawasan Andalan Palopo dan Kaw. Andalan Laut Teluk Bone, dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan
21	Toraja Utara			Bagian dari Kawasan Andalan Palopo, dengan sektor unggulan pariwisata, dan pertanian
22	Makassar	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		Bagian dari Kaw. Andalan Mamminasata dan Kaw. Andalan Laut Kapoposang dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, industri dan agroindustri
23	Pare Pare		Parepare.	Bagian dari Kaw. Andalan

No.	Kab/Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Kawasan Andalan
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	
			Sektor unggulan Agroindustri, Perdagangan dan Jasa	Parepare dengan sektor unggulan agroindustri
24	Palopo		Palopo. Sektor unggulan Agroindustri, Perkebunan, Pertanian	Bagian dari Kawasan Andalan Palopo dan Kaw. Andalan Laut Teluk Bone, dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, perkebunan dan pertambangan minyak

Sumber : RTRWN dan RTR Pulau Sulawesi, diolah tahun 2022

Selain struktur dan pola ruang, RTRWN juga menetapkan kawasan strategis nasional di Sulawesi Selatan yaitu kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan yang meliputi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Mamminasata, Kawasan Parepare, Kawasan Toraja dan Sekitarnya, Kawasan Penginderaan Jauh Parepare, dan Kawasan Sorowako.

Tabel VI. 2.
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Sulawesi Selatan

No.	Kawasan Strtaegis Nasional	Peran dan Fungsi KSN	Kabupaten/Kota
1.	KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata	KSN dengan sudut kepentingan ekonomi yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang berorientasi pelayanan berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia	Kota Makassar, Kabupaten Takalar, sebagian wilayah Kabupaten Maros, dan sebagian wilayah Kabupaten Gowa
2.	Kawasan Parepare	KSN dengan sudut kepentingan ekonomi yang berfungsi mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang didukung industri pengolahan yang berorientasi ekspor antar provinsi	Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Enrekang
3.	Kawasan Toraja dan Sekitarnya	KSN dengan sudut kepentingan sosial dan budaya dengan fungsi sebagai tempat perlindungan budaya nasional yang didukung	Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara

No.	Kawasan Strtaegis Nasional	Peran dan Fungsi KSN	Kabupaten/Kota
		industri dan jasa wisata	
4.	Kawasan Penginderaan Jauh Parepare	KSN dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi dengan fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa	Kota Parepare
5.	Kawasan Sorowako	KSN dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi dengan fungsi sebagai sumber daya alam strategis nasional berupa nikel	Kabupaten Luwu Timur

Sumber : RTRWN dan RTR Pulau Sulawesi, diolah tahun 2022

Kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Visi Indonesia 2045 mengarahkan pembangunan di wilayah Pulau Sulawesi untuk memperkuat peran Sulawesi sebagai gerbang Kawasan Timur Indonesia dan Hub perdagangan internasional sebagai penopang pertumbuhan dan pusat perdagangan di Kawasan Timur Indonesia melalui hilirisasi industry pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan serta pengembangan pariwisata.

Kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan dalam rangka pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi diarahkan untuk memperkuat peran Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai simpul transportasi dan pusat perdagangan dan jasa, sebagai lumbung pangan nasional, dan pusat industry pengolahan komoditas unggulan sumber daya alam melalui 1) pengembangan pusat produksi ekonomi kelautan, pertanian, dan pertambangan yang didukung pusat industry pengolahan dan jasa ramah lingkungan; 2) peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan; 3) pengembangan destinasi pariwisata unggulan berskala internasional yang didukung sarana dan prasarana penunjang; dan 4) pengembangan fungsi kawasan perkotaan nasional berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan nasional dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Mewujudkan Negara Nusantara Berdaulat, maju dan Berkelanjutan merupakan bagian dari kelompok Agenda Kerangka Implementasi yang terdiri dari 3 (tiga) Agenda yaitu Agenda Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas, Agenda Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta Agenda Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan dalam Visi Indonesia 2045 dilakukan dalam kerangka pembangunan wilayah Pulau Sulawesi, yang meliputi 4 (empat) pilar yaitu: **Pertama**, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi melalui: a) pengendalian urbanisasi dan migrasi berupa perencanaan wilayah perkotaan yang produktif secara ekonomi, layak huni dan inklusif serta penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah karbon, b) pendidikan berkualitas yang merata; dan c) kesehatan untuk semua dengan arah kebijakan perkukatan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pengembangan pelayanan kesehatan primer, dan percepatan penanganan stunting; **Kedua**, pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui; a) pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, pemenuhan prasarana dasar, mendukung pembangunan perkotaan dan perdesaan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan penerapan scenario pembiayaan infratsruktur; b) peningkatan peran EBT dalam pemenuhan kebutuhan energy; c) peningkatan peranan investasi yang didukung oleh pemberian kemudahan dan fasilitas investasi sector strategis, perbaikan system dan layanan perizinan dan pengggiatan investasi hijau; d) peningkatan kapasitas ketenagakerjaan melalui transisi tenaga kerja dari informal ke formal, peningkatan produktivitas pertanian; e) modernisasi industry dengan perbaikan integrasi *supply-chain* dari hulu ke hilir; f) pengembangan pusat ekonomi kreatif dan digital berupa peningkatan kompetensi SDM kreatif, pengembangan skala industry kreatif berorientasi ekspor dan penyediaan fasilitas inovasi dan *start-up*; g) pengembangan destinasi wisata unggulan Asia dan Dunia berupa optimalisasi potensi wisata, adaptasi perubahan pasar, dan peningkatan *market share* wisatawan mancanegara; h) peningkatan kontribusi perikanan, pariwisata bahari dan transportasi laut berupa pemantapan system tata kelola Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Industrialisasi perikanan, pengembangan wisata bahari kelas dunia, pengembangan *water-front city* kota pesisir dan pembangunan struktur armada perikanan modern; i) pengembangan ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan, swasembada karbohidrat dan protein dan kesejahteraan petani berupa pengembangan infrastruktur pertanian, pembangunan SDM pertanian, pemenuhan produk pertanian berstandar internasional, modernisasi industry pertanian, dan peningkatan daya saing global produk pangan dan pertanian; j) penguatan industry berorientasi ekpor dan percepatan pertumbuhan ekspor; k) penguatan komitmen lingkungan hidup menuju ekonomi hijau berupa penurunan emisi GRK, peningkatan kualitas air dan udara serta tutupan hutan dan peningkatan Keanekaragaman Hayati; dan l) penguatan ketahanan pangan dan air melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan penggunaan *System Rice Intensification* (SRI).

Ketiga, Pemerataan Pembangunan, melalui a) pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan berupa peningkatan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif, pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, optimalisasi pembangunan di daerah perdesaan dan memperkecil ketimpangan antara UMKM dengan usaha besar; b) peningkatan kesejahteraan petani berupa: peningkatan kualitas SDM

pertanian dan rumah tangga tani, peningkatan akses terhadap sumber daya produktif termasuk keuangan dan teknologi, perbaikan kelembagaan usaha tani, peningkatan kewirausahaan tani, serta inovasi dan penerapan teknologi pertanian dan pangan; c) pemerataan pembangunan daerah berupa perkuatan dan perluasan basis-basis perekonomian wilayah Timur Indonesia, pengembangan kota-kota baru dan pusat-pusat produkdi dan perdagangan, perkuatan keterkaitan antarwilayah, membangun dan memperkuat rantai industry produk unggulan berbasis sumber daya local, penyediaan prasarana dan sarana tranportasi, informasi dan komunikasi, dan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, pengelolaan sumber air baku dan jaringan air bersih; dan d) pemerataan infrastruktur berupa pemerataan infarstruktur konektovitas antar wilayah, pemerataan infrastruktur prasarana perkotaan dan perdesaan, dan pemerataan infrastruktur prasarana dasar dan lingkungan; dan **Keempat**, Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui a) kelembagaan dan birokrasi yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif; b) pembangunan hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi berupa perbaikan system diberbagai lini layanan public; dan c) pelayanan public yang berkualitas, mudah, cepat dan terjamin.

Skenario pengembangan wilayah Pulau Sulawesi Selatan dalam kerangka Visi Indonesia 2045 digambarkan dalam skenario pengembangan wilayah sebagai berikut:

Gambar VI. 1.
Skenario Pengembangan Wilayah Sulawesi

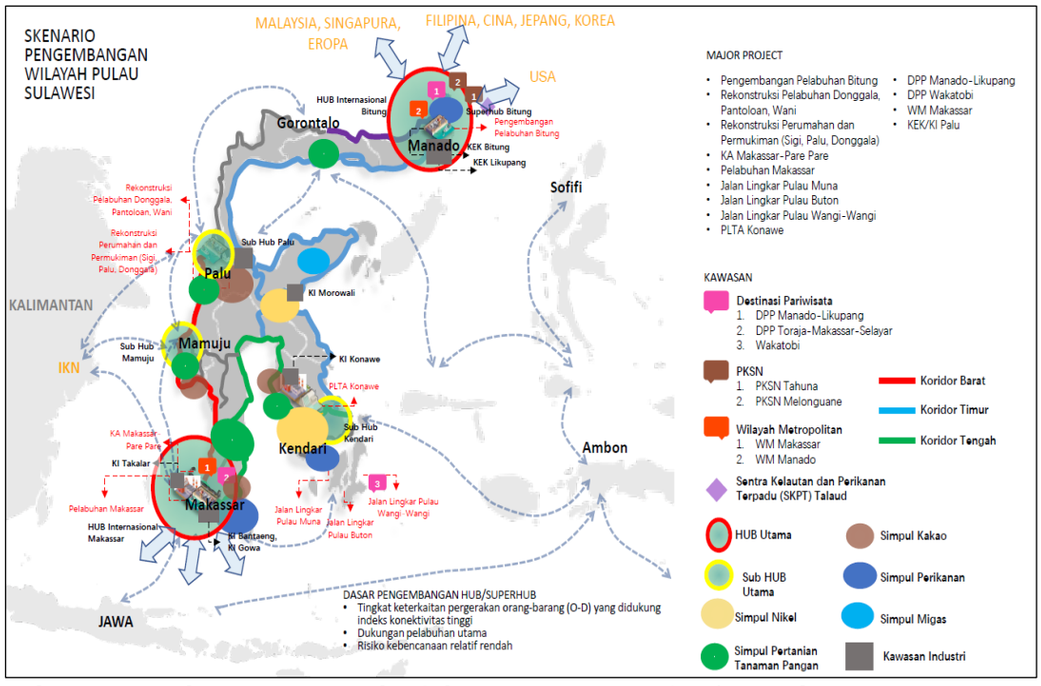

Sumber: Materi Teknis Revisi RTR Pulau Sulawesi, Kementerian ATR/BPN Tahun 2022

6.2. Arahan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Arah kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari tahapan pembangunan lima tahun keempat dari RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025, yang difokuskan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pertumbuhan yang berkeadilan dan mengatasi efek pertumbuhan pada tahapan sebelumnya yang menyebabkan kesenjangan sosial-ekonomi antar lapisan dan antar wilayah.

Upaya umum yang diprioritaskan pada pembangunan lima tahun keempat difokuskan dalam mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan dan kesejahteraan berkelanjutan, menguatkan daya saing daerah dan kemandirian lokal, meningkatan kualitas pelayanan umum, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam, mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih, dan menciptakan sitausi kondusif bagi kehidupan spiritual dan pengamalan agama. Pelaksanaan upaya-upaya umum ini diletakkan dalam prinsip untuk mengejar target-target sasaran yang belum tercapai dan mendorong keseimbangan berbagai aspek dalam komposisi target kinerja sasaran.

Misi-1 RPJPD yakni "Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: 1) Akselerasi dukungan pemerintah Provinsi pada kabupaten dengan capaian pembangunan manusia yang berada di bawah rata-rata provinsi; 2) Penerapan standar pelayanan minimal pada semua jenjang pendidikan; 3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif, efisien dan inovatif; 4) Perwujudan standar pelayanan kesehatan dengan pelaksanaan yang konsisten pada semua pihak; 5) Pengelolaan RSU Daerah dan Unit Pelayanan Kesehatan yang professional dan berstandar tinggi; 6) Peningkatan daya saing tenaga kerja dengan memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga-lembaga pendidikan keterampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat; 7) Pengembangan wirausaha perdesaan; Peningkatan wawasan kebangsaan, integritas diri, serta pembinaan mental dan spiritual pemuda; 8) Peningkatan pembibitan, pembinaan dan minat olahraga yang dilakukan secara sistematis dan terpadu; 9) Peningkatan kualitas peran serta perempuan dan pengarusutamaan gender dalam penyusunan, pelaksanaan dan penerimaan manfaat dari kebijakan pemerintah daerah serta mendukung akses secara nasional; 10) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perdagangan perempuan (*trafficking*), serta penerapan peraturan perundangan-undangan terkait secara baik; 11) Peningkatan kordinasi pembinaan keluarga berencana; dan 12) Pengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian serta menjamin adanya perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta bagi pelaku seni dan budaya; 13) Penguatan peran perguruan tinggi dan lembaga budaya/organisasi kesenian tradisional sebagai ujung tombak upaya-upaya penggalian dan pengembangan nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan; 14) Fasilitasi organisasi keagamaan, forum kerukunan antar ummat beragama, dan

tokoh-tokoh agama, sehingga dapat melaksanakan fungsi dan perannya dalam meningkatkan peng-hayatan dan pengamalan agama secara baik; dan 15) Peningkatan kesadaran ummat beragama untuk tidak mudah terprovokasi dalam menerima ajaran agama yang sesat, penghasut dan perusuh.

Misi-2 RPJPD yakni "Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar", dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: 1) Pengembangan situasi kondusif bagi aktivitas kelompok/organisasi masyarakat yang bergerak dalam kehidupan sosial-budaya; 2) Pergeseran struktur perekonomian menuju perekonomian berbasis pengetahuan *(knowledge-based economy*) dan teknologi; 3) Pemeliharaan iklim investasi yang baik, termasuk fasilitasi ketersediaan tanah bagi investasi pada berbagai bidang; 4) Pemeliharaan tatanan kehidupan sosial yang kondusif dan tanggap terhadap berbagai kerawanan dan kerentanan sosial; 5) Fasilitasi pengembangan *science-park* dan *techno-park*; 6) Fasilitasi terwujudnya masyarakat melek IPTEK antara lain melalui upaya pengenalan sejak dini pada generasi muda; 7) Pembinaan dan pengembangan desa adat dan komunitasnya; 8) Peningkatan kordinasi antar kabupaten/kota dalam pencapaian target-target pembangunan nasional; dan 9) Pengembangan kerjasama pembangunan antara provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain.

Misi 3 RPJPD yakni "Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif", dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: 1) Pengembangan sistem pengamanan dan perlindungan masya-rakat secara swakarsa pada tataran desa/kelurahan yang sepenuhnya di bawah bimbingan pemerintah desa/kelurahan serta dibina secara teknis oleh aparat keamanan setempat; 2) Pengembangan sistem deteksi dini potensi konflik sosial; 3) Penyelenggaraan agenda reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola kepemerintahan yang baik; 4) Penertiban pengelolaan keuangan dan asset daerah; dan 5) Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan bahwa basis profesi-onalisme adalah kompetensi dan kapasitas belajar yang di dasarkan pada etika dan moral yang tinggi.

Misi 4 RPJPD yakni "Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan", dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: 1) Pengembangan jalur-jalur pemerataan dalam hal peluang kerja dan peluang usaha; 2) Pengembangan sistem upah kerja yang mendorong peningkatan pendapatan pekerja; 3) Penajaman implementasi program pada kabupaten/kota yang angka kemiskinannya paling tinggi; 4) Pelibatan secara efektif dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab sosial korporasi; 5) Pelibatan multipihak dalam penanganan keamanan pangan; 6) Penguatan akses pasar dengan daya saing harga yang tinggi bagi produk petani, peternak dan nelayan; 7) hilirisasi produk unggulan untuk pengembangan industri strategis; 8) Pengembangan kerjasama regional dan promosi perdagangan; 9) Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan khususnya pada jalur interkoneksi antar wilayah yang penggunanya sudah sangat padat; 10) Pengembangan jaringan transportasi kereta api dalam mengakselerasi pereknomian Sulawesi Selatan dan lintas Sulawesi; 12) Pengembangan sarana-prasarana pelabuhan

yang dapat mengakselerasi posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat interkoneksitas logistik di kawasan Timur Indonesia; 13) Pengembangan sumber energi listrik alternatif terbarukan (PLTA, PLTMH, dan PLTB); 14) Pengelolaan pertambangan berorientasi pengolahan secara berkelanjutan; 15) Fasilitasi berkembangnya kota cerdas (*smart city*) di Sulawesi Selatan; 16) Penataan komprehensif terhadap pemanfaatan berbagai sumber daya air terutama dalam menjamin keberlanjutan keterpenuhan kebutuhan air perkotaan; 17) Perlindungan terhadap lahan pangan berkelanjutan melalui mekanisme insentif dan disinsentif; 18) Pemanfaatan secara lestari atas lahan pangan berkelanjutan; 19) Kordinasi kabupaten/ kota dalam perlindungan lahan pangan berkelanjutan; 20) Pemberian fasilitasi bagi investasi sektor swasta pada kawasan andalan cepat tumbuh/kawasan wilayah terpadu; 21) Kordinasi dan fasilitasi akselerasi capaian kinerja pembangunan pada kawasan tertinggal, terpencil dan pulau-pulau yang jauh dari daratan utama; 22) Pengembangan kerjasama dan sinergi pembangunan antar provinsi pada wilayah perbatasan; 23) Pengendalian pencemaran melalui pemantauan terhadap kondisi tanah, air dan udara, penerapan standar pengelolaan lingkungan pada kawasan-kawasan yang peka terhadap kerusakan lingkungan, implementasi rekomendasi Amdal terhadap penyelenggaraan proyek pembangunan, dan penegakan hukum lingkungan yang konsisten; 24) Fasilitasi dan kordinasi antar kabupaten/kota dalam pemeliharaan dan pemulihan kondisi ekologis daerah aliran sungai serta danau dan kawasan pesisir; 25) Peningkatan kapasitas multipihak dalam pelaksanaan pencegahan, penyelamatan, dan perbaikan kerusakan lingkungan; 26) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta stakeholder masyarakat dan swasta dalam deteksi dini bencana, penanganan saat bencana dan pemulihan pasca bencana; 27) Fasilitasi pengembangan kota cerdas dan masyarakat kota berbasis pengetahuan (*knowledge based society*); dan 28) Dukungan pengembangan interaksi perdesaan-perkotaan serta pertumbuhan kawasan agropolitan dan minapolitan.

Misi 5 RPJPD yakni "Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional", dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: 1) Penggalian dan revitalisasi nilai-nilai serta kearifan lokal kebaharian serta mempromosikannya dalam kancah jagad maritim nusantara; 2) Revitalisasi dan penguatan jalur-jalur perkapalan/pelayaran niaga Bugis-Makassar dalam mendukung pergerakan logistik Nusantara; 3) Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam kelautan melalui perumusan tata ruang kawasan pesisir dan laut yang diarahkan untuk mendukung ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pada pulau-pulau di Sulawesi Selatan; dan 4) Pemberian dukungan kepada kekuatan pertahanan dan keamanan nasional dalam operasi strategis pertahanan dan keamanan NKRI.

6.3. Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041, mengarahkan pembangunan Sulawesi Selatan sebagai pusat industry pengolahan sumber daya alam, pusat jasa perdagangan dan

pariwisata, dan sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam berbasis mitigasi dan adapatasi bencana yang didukung oleh pelayanan jaringan prasarana wilayah yang berkualitas serta keterkaitan dan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan melalui sinergitas antar wilayah yang konsisten dengan kebijakan nasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 yang ditetapkan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2022 merupakan Perda RTRWP Pertama di Indonesia yang mengintegrasikan tata ruang darat dan tata ruang laut yang merupakan hasil terobosan kebijakan terkait perencanaan tata ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Salah satu kebijakan penataan ruang Sulawesi Selatan yang diatur dalam RTRWP Sulawesi Selatan adalah mewujudkan ruang Sulawesi Selatan yang produktif berbasis keberlanjutan melalui pengembangan system pusat permukiman dan pengembangan kawasan strategis provinsi.

Tabel VI. 3.
Arahan Pengembangan Wilayah Sulawesi Selatan

No.	Kab/Kota	Sistem Pusat Permukiman (Pusat Kegiatan Lokal)	Kawasan Budidaya dan Kawasan Strategis Provinsi
1	Kepulauan Selayar	Kawasan perkotaan Benteng dan Pamatata dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa	a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pergaraman; kawasan pertambangan dan energy; kawasan peruntukan industry; kawasan transportasi; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) Kawasan ekonomi khusus pariwisata; dan kawasan industry perikanan terpadu.
2	Bulukumba		a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energy; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) Kawasan pariwisata; kawasan agrowisata; dan kawasan industry perikanan terpadu.

No.	Kab/Kota	Sistem Pusat Permukiman (Pusat Kegiatan Lokal)	Kawasan Budidaya dan Kawasan Strategis Provinsi
3	Bantaeng	Kawasan perkotaan Bantaeng dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa	a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energy; kawasan peruntukan industry; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) Kawasan agrowisata; dan kawasan Lompobattang.
4	Jeneponto		a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pergaraman; kawasan pertambangan dan energy; kawasan peruntukan industry; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) Kawasan perikanan terpadu.
5	Takalar		a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pergaraman; kawasan pertambangan dan energy; kawasan peruntukan industry; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) Kawasan perikanan terpadu.
6	Gowa		a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pergaraman; kawasan pertambangan dan energy; kawasan peruntukan industry; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) Kawasan pendidikan tinggi Mamminasata; kawasan taman miniature Sulsel di situs kerajaan Gowa; kawasan wisata alam

No.	Kab/Kota	Sistem Pusat Permukiman (Pusat Kegiatan Lokal)	Kawasan Budidaya dan Kawasan Strategis Provinsi
			Malino; perikanan terpadu.
7	Sinjai	Kawasan perkotaan Sinjai dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa	a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energy; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) kawasan industry perikanan terpadu; kawasan agrowisata
8	Maros		a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energy; kawasan peruntukan industry; kawasan transportasi; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) Kawasan eduwisata Pucak; kawasan perikanan terpadu; dan kawasan Geopark.
9	Pangkajene Kepulauan		a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pergaraman; kawasan pertambangan dan energy; kawasan peruntukan industry; kawasan transportasi; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) Kawasan Geopark; kawasan perikanan terpadu
10	Barru		a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energy; kawasan peruntukan industry; kawasan transportasi; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan

No.	Kab/Kota	Sistem Pusat Permukiman (Pusat Kegiatan Lokal)	Kawasan Budidaya dan Kawasan Strategis Provinsi
			dan keamanan; b) kawasan perikanan terpadu; kawasan agrowisata
11	Bone	Kawasan Perkotaan Palattae kawasan perdagangan dan jasa	a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energy; kawasan peruntukan industry; kawasan transportasi; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) kawasan Danau Tempe; kawasan industry perikanan terpadu
12	Soppeng	Kawasan perkotaan Watansoppeng sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional	a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan pertambangan dan energy; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) Kawasan wisata alam Lejja; kawasan Danau Tempe; kawasan agrowisata
13	Wajo	Kawasan perkotaan Sengkang dan Siwa sebagai kawasan perdagangan dan jasa serta simpul tranportasi	a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energy; kawasan peruntukan industry; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) kawasan Danau Tempe; kawasan industry perikanan terpadu; kawasan agrowisata
14	Sidenreng Rappang	Kawasan perkotaan Pangkajene sebagai kawasan perdagangan dan jasa serta pariwisata budaya	a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan pertambangan dan energy; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) kawasan pengembangan peternakan

No.	Kab/Kota	Sistem Pusat Permukiman (Pusat Kegiatan Lokal)	Kawasan Budidaya dan Kawasan Strategis Provinsi
15	Pinrang	Kawasan perkotaan Pinrang kawasan perdagangan dan jasa serta pariwisata budaya	a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energy; kawasan peruntukan industry; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) kawasan perikanan terpadu; kawasan pengembangan peternakan.
16	Enrekang	Kawasan perkotaan Enrekang sebagai kawasan perdagangan dan jasa	a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan pertambangan dan energy; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) kawasan agrowisata; kawasan pengembangan peternakan.
17	Luwu	Kawasan perkotaan Belopa sebagai kawasan pusat pemerintahan dan jasa dan kawasan Batusitanduk sebagai pusat perdagangan dan jasa	a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energy; kawasan transportasi; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) Kawasan ekonomi terpadu
18	Tana Toraja	Kawasan perkotaan Makale sebagai kawasan perdagangan dan jasa serta simpul tranbsportasi	a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan pertambangan dan energy; kawasan transportasi; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan b) Kawasan wisata budaya dan agrowisata
19	Luwu Utara	Kawasan perkotaan Masamba sebagai kawasan perdagangan dan jasa serta simpul tranbsportasi	a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energy; kawasan peruntukan industry; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan

No.	Kab/Kota	Sistem Pusat Permukiman (Pusat Kegiatan Lokal)	Kawasan Budidaya dan Kawasan Strategis Provinsi
			kawasan pertahanan dan keamanan; b) Kawasan ekonomi terpadu
20	Luwu Timur	Kawasan perkotaan Malili sebagai kawasan sentra pengolahan komoditas unggulan sumber daya alam	a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energy; kawasan peruntukan industry; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) Kawasan Danau Matano; Kawasan ekonomi terpadu
21	Toraja Utara	Kawasan perkotaan Rantepao sebagai kawasan perdagangan dan jasa	a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan pertambangan dan energy; kawasan tranpportasi; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) Kawasan wisata budaya dan agrowisata
22	Makassar		a) kawasan perikanan; kawasan peruntukan industry; kawasan transportasi; kawasan pariwisata; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) Kawasan Pusat Bisnis Terpadu; kawasan Sungai Tello; dan Kawasan Pendidikan tinggi Mamminasata;
23	Pare Pare		a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian; kawasan pertambangan dan energy; kawasan transportasi; kawasan pariwisata; kawasan peruntukan industry; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) kawasan agroindustry terpadu
24	Palopo		a) Kawasan hutan produksi; kawasan perkebunan rakyat; kawasan pertanian;

No.	Kab/Kota	Sistem Pusat Permukiman (Pusat Kegiatan Lokal)	Kawasan Budidaya dan Kawasan Strategis Provinsi
			kawasan pertambangan dan energy; kawasan transportasi; kawasan pariwisata; kawasan peruntukan industry; kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan; b) Kawasan ekonomi terpadu

Sumber: Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang RTRWP Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041, diolah Tahun 2023

6.4. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

6.4.1. Capaian Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

1. Capaian Pembangunan Kawasan Makassar

Kebijakan pembangunan Kawasan Makassar diprioritaskan pada penguatan peran Kawasan Makassar sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Mamminasata melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) Baru Toraja-Makassar-Selayar dan penguatan UMKM serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan utamanya dalam penanganan Covid-19. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kawasan Makassar dan sekitarnya dapat digambarkan berdasarkan beberapa indikator pembangunan yang meliputi :

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan kabupaten/kota di Kawasan Makassar pada tahun 2022, mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021, dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,42 poin. Pertumbuhan ekonomi di Kawasan Makassar pada tahun 2021 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,32 poin yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2021 yang mengalami peningkatan sebesar 5,35 poin dari pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Secara rata-rata perubahan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kawasan Makassar lebih tinggi daripada perubahan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, kecuali kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 poin yang lebih kecil daripada perubahan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

Kawasan Makassar memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHK Sulawesi Selatan tahun 2022 yaitu sebesar 51,72 persen yang disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHK Kota Makassar sebesar 36,67 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan, sedangkan kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHK Sulawesi Selatan di Kawasan Makassar adalah Kabupaten Takalar dengan kontribusi sebesar 2,01 persen.

Rata rata perubahan pertumbuhan ekonomi Kawasan Makassar Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 6,86 poin merupakan perubahan pertumbuhan kawasan terbesar dan juga lebih besar daripada perubahan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 5,35 poin. Hal ini didorong oleh akselerasi lapangan usaha perdagangan, konstruksi dan industry pengolahan yang bertumpu di kawasan Makassar sebagai pusat aktivitas perekonomian Sulawesi Selatan.

Grafik VI. 1.
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Makassar Tahun 2021-2022

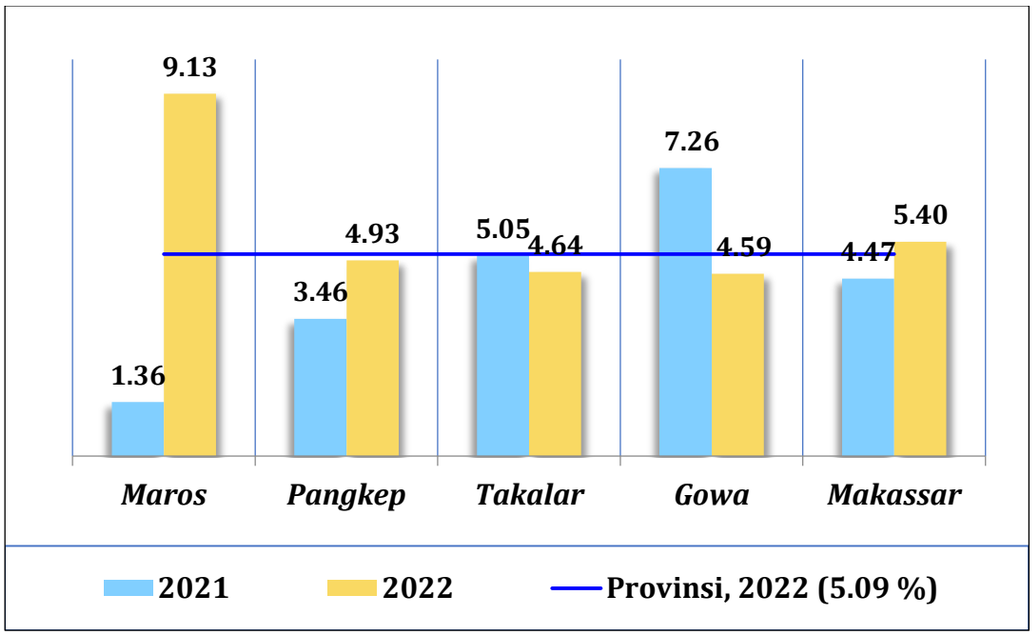

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

2) Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kawasan Makassar tahun 2022, rata rata mengalami peningkatan dibandingkan dengan persentase penduduk miskin tahun 2021, kecuali di kabupaten Takalar dan kabupaten Maros yang menunjukkan penurunan persentase sebesar 0,19 poin persen dan 0,17 poin persen. Peningkatan persentase penduduk miskin di kawasan Makassar didorong oleh karakteristik kawasan sebagai kawasan perkotaan yang lebih berorientasi jasa sehingga kebijakan pembatasan aktivitas akibat pandemic Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat.

Grafik VI. 2.
Capaian Tingkat Kemiskinan Kawasan Makassar
Tahun 2021-2022 (Maret)

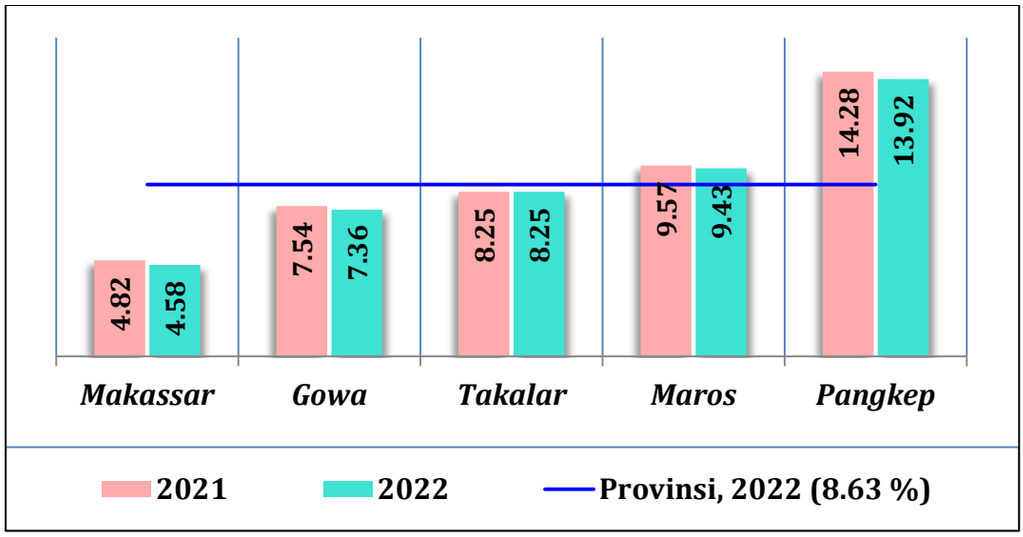

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan pada Agustus 2022, menunjukkan adanya penurunan sebesar 1,21 poin dibandingkan TPT pada Agustus 2021 yang mencapai 4,51 persen. Memperhatikan angka TPT di Kawasan Makassar pada Agustus 2022, maka terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang persentase TPTnya lebih besar dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2022, yaitu Kabupaten Pangkajene Kepulauan dengan persentase sebesar 5,23 persen, kabupaten Maros dengan persentase sebesar 5,04 persen dan Kota Makassar dengan persentase TPT sebesar 11,82 persen.

TPT berdasarkan kabupaten/kota di Kawasan Makassar pada Agustus 2022, mengalami penurunan dibandingkan dengan TPT tahun 2021, dengan rata-rata penurunan persentase sebesar 1,12 poin. Penurunan ini masih lebih rendah daripada rata-rata penurunan TPT di Sulawesi Selatan yang menurun sebesar 1,21 poin dibandingkan dengan TPT Agustus 2021. Kabupaten/kota di Kawasan Makassar yang peningkatan TPTnya di atas peningkatan TPT Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 adalah Kabupaten Maros dengan peningkatan TPT sebesar 3,88 poin, Kabupaten Gowa dengan peningkatan TPT sebesar 4,32 poin dan Kota Makassar dengan peningkatan TPT sebesar 5,60 poin.

Grafik VI. 3.
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Makassar
Tahun 2021-2022 (Agustus)

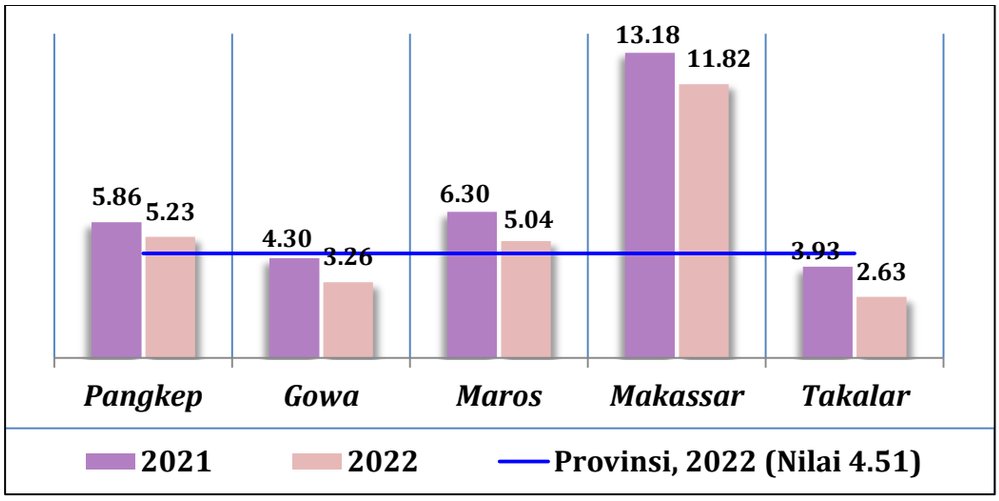

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

4) Rasio Gini

Pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat mengatasi ketimpangan baik ketimpangan pengeluaran penduduk maupun ketimpangan pembangunan antar wilayah. Perkembangan gini rasio pada tahun 2022 mengalami perkembangan lebih yang lebih baik dari tahun 2021 (telah mengalami penurunan) kecuali Kota Makassar. penurunan gambaran ketimpangan pengeluaran penduduk di Kawasan Makassar yang mengalami penurunan dari 0,371 menjadi 0,364 pada tahun 2022. Rasio gini tahun 2022 yang rata-rata pencapaiannya menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada Provinsi Sulawesi Selatan yang capaian rasio gininya sebesar 0,377, kecuali rasio gini Kota Makassar sebesar 0,395. Memperhatikan capaian tersebut, maka Kota Makassar memerlukan perhatian, karena kota Makassar dengan angka rasio gini terbesar di Kawasan Makassar dan sekitarnya.

Grafik VI. 4.
Capaian Rasio Gini Kawasan Makassar Tahun 2021-2022 (Maret)

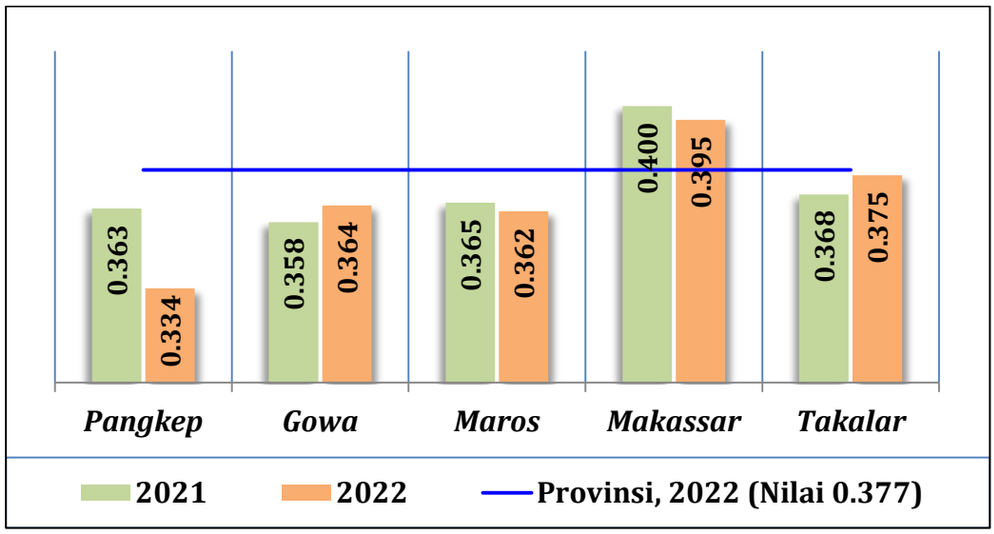

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Sulawesi Selatan tahun 2022 termasuk dalam kategori IPM tinggi dengan capaian sebesar 72,82. Berdasarkan capaian IPM, maka IPM Kota Makassar termasuk dalam kategori IPM sangat tinggi, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Gowa termasuk dalam kategori IPM Tinggi, sedangkan Kabupaten Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan termasuk dalam kategori IPM sedang. Perubahan rata rata IPM tahun 2022 di Kawasan Makassar sebesar 72,64 yang mengalami perubahan sebesar 0,58 dibandingkan tahun 2021, sama dengan perubahan rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Selatan yang juga sebesar 0,58 poin.

Adapun IPM terendah berada pada kabupaten Takalar yaitu 68,31 yang tergambarkan pada pertumbuhan rata-rata lama sekolah sebesar 2 persen dan pertumbuhan PPP sebesar 1,93 persen yang berada di bawah rata rata pertumbuhan Sulawesi Selatan.

Grafik VI. 5.
Capaian IPM Kawasan Makassar Tahun 2021-2022

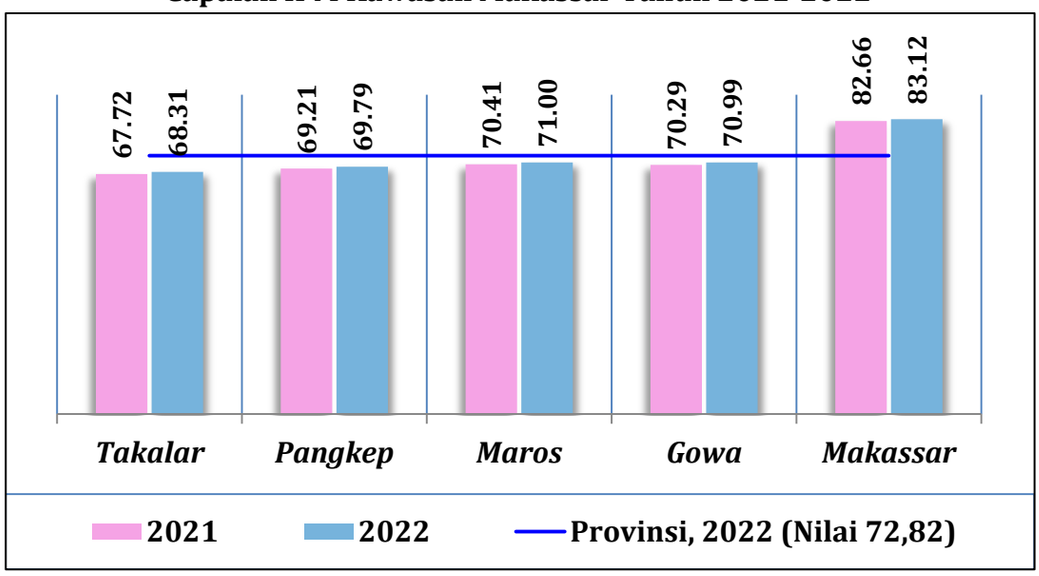

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

6.4.2. Capaian Pembangunan Kawasan Bulukumba

Sebagai upaya mengatasi dampak pandemic Covid-19, maka kebijakan pengembangan kawasan Bulukumba yang diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah, dan pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat yang keberhasilannya tergambar pada beberapa indicator pembangunan sebagai berikut.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di kabupaten pada Kawasan Bulukumba pada tahun 2022 rata rata mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021, kecuali Kabupaten Bantaeng yang

mengalami peningkatan signifikan sebesar 6,59 poin. Penurunan pertumbuhan ekonomi kabupaten tersebut, antara lain disebabkan karena terjadinya kontaksi yang cukup dalam pada sektir pertanian dan perikanan yang merupakan lapangan usaha utama di kabupaten Sinjai, kabupaten Jeneponto, kabupaten Bulukumba, dan kabupaten Kepulauan Selayar.

Pertumbuhan ekonomi rata-rata di Kawasan Bulukumba pada tahun 2022 sebesar 6,32 persen yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2022 yang bertumbuh positif sebesar 0,45 poin menjadi sebesar 5,09 persen. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi rata-rata di Kawasan Bulukumba Tahun 2022 sebesar 6,32 persen tersebut, dikontribusikan oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten Bantaeng sebesar 15,45 persen di tahun 2022.

Kawasan Bulukumba memberikan kontribusi sebesar 10,28 persen terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan tahun 2022 yang disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHB Kabupaten Bulukumba sebesar 2,91 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan, sedangkan kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan Tahun 2022 di Kawasan Bulukumba adalah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kontribusi sebesar 1,25 persen.

Grafik VI. 6.
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Bulukumba Tahun 2021-2022

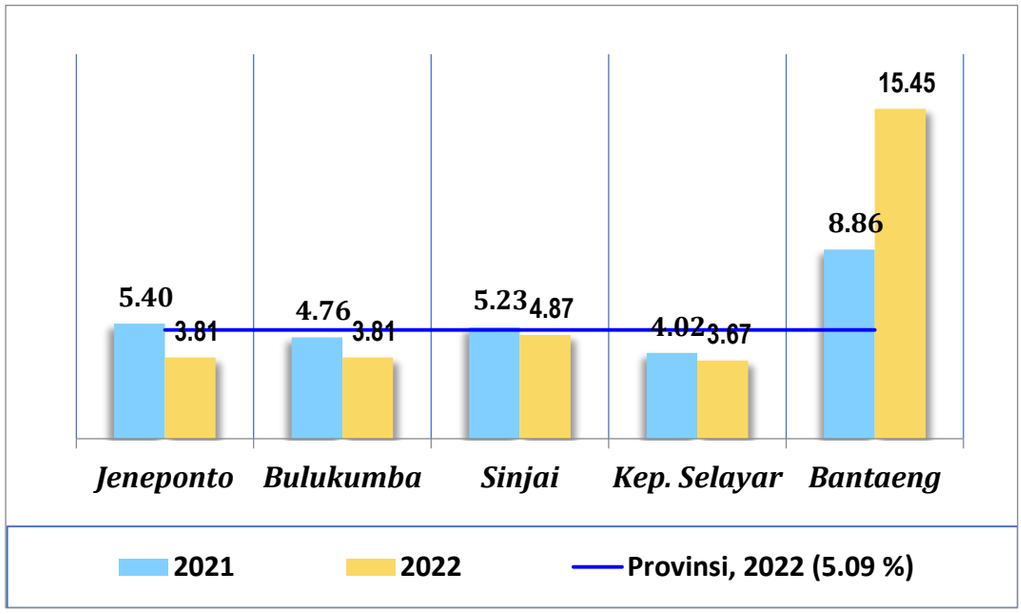

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023.

2) Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di kabupaten pada Kawasan Bulukumba tahun 2022, rata-rata mengalami penurunan dibandingkan dengan persentase penduduk miskin tahun 2021. Walaupun persentase penduduk miskin di Kawasan Bulukumba tahun 2022 menunjukkan penurunan, namun persentase penduduk miskinnya masih lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan, kecuali Kabupaten Bulukumba dengan persentase penduduk miskin tahun 2022 sebesar 7,10 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa, walaupun kinerja penanganan kemiskinan di

Kawasan Bulukumba telah menunjukkan kinerja yang baik dengan rata rata penurunan sebesar 0,24 poin, namun masih perlu ditingkatkan, khususnya di Kabupaten Jeneponto yang persentase kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 13,73 persen dan Kabupaten Kepulauan Selayar yang persentase kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 12,24 persen.

Grafik VI. 7.
Capaian Tingkat Kemiskinan Kawasan Bulukumba Tahun 2021-2022 (Maret)

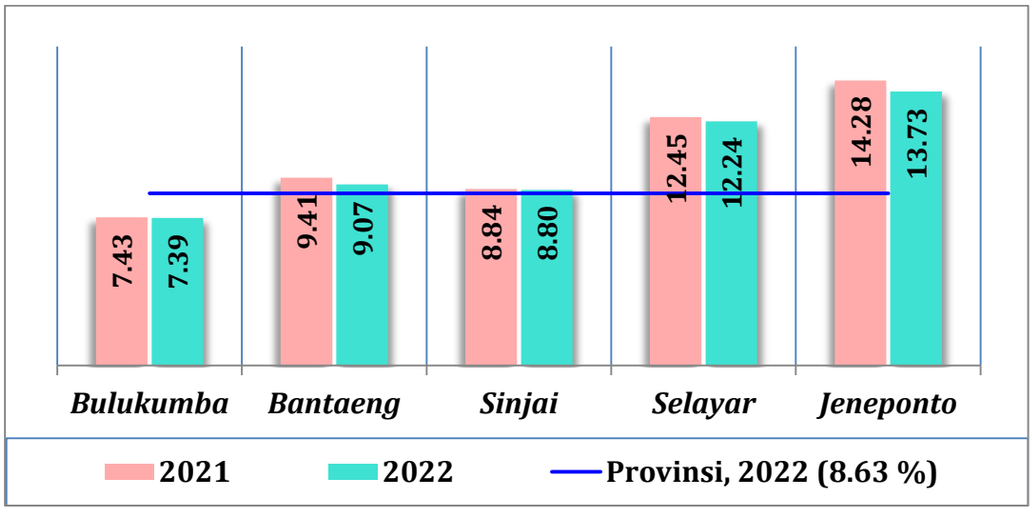

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan pada Agustus 2022 sebesar 4,51 persen yang menunjukkan adanya penurunan sebesar 1,21 poin dibandingkan TPT pada Agustus 2021 yang hanya mencapai 5,72 persen. Memperhatikan capaian angka TPT di Kawasan Bulukumba pada Agustus 2022, maka dapat digambarkan bahwa TPT di kabupaten pada Kawasan Bulukumba lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2022 sebesar 4,51 persen.

Kinerja kabupaten dalam menurunkan tingkat pengangguran di Kawasan Bulukumba pada tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan yang ditunjukkan dari menurunnya persentase TPT di semua kabupaten di Kawasan Bulukumba. Penurunan TPT terbesar di Kawasan Bulukumba adalah kabupaten Bulukumba dengan penurunan sebesar 1,88 poin, sedangkan penurunan terkecil adalah kabupaten Jeneponto sebesar 0,17 poin dibandingkan dengan TPT pada tahun 2021.

Grafik VI. 8.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Bulukumba Tahun 2021-2022 (Agustus)

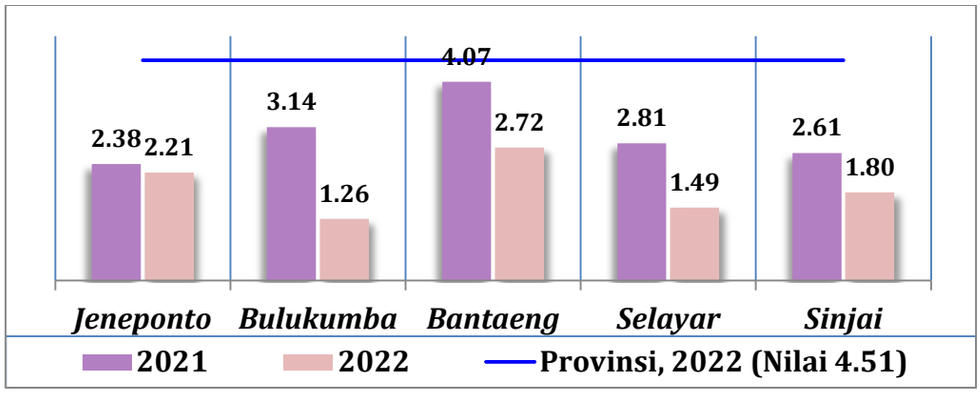

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023.

4) Rasio Gini

Pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat mengatasi ketimpangan baik ketimpangan pengeluaran penduduk maupun ketimpangan pembangunan antar wilayah. Gambaran ketimpangan pengeluaran penduduk di Kawasan Bulukumba, berdasarkan capaian rasio gini tahun 2022 dengan rata rata sebesar 0,345 pencapaiannya menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada Provinsi Sulawesi Selatan yang capaian rasio gininya sebesar 0,377. Capaian penanganan ketimpangan pengeluaran di Kawasan Bulukumba Tahun 2022, juga menunjukkan adanya peningkatan kualitas yang ditandai dengan besarnya perubahan penurunan rasio gini yang lebih besar dari penurunan rasio gini Sulawesi Selatan yang hanya sebesar 0,005 poin.

Grafik VI. 9.
Capaian Rasio Gini Kawasan Bulukumba Tahun 2021-2022 (Maret)

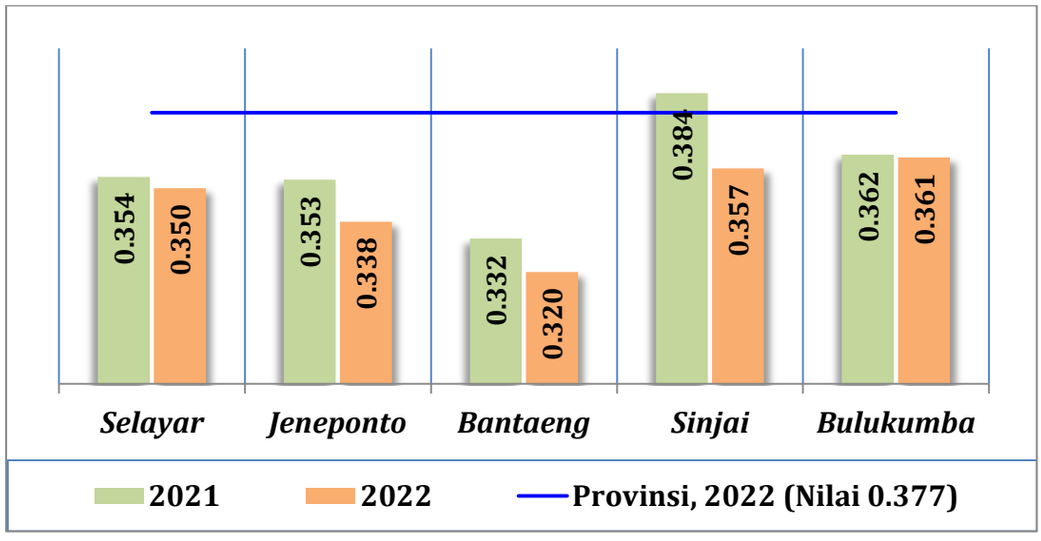

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Sulawesi Selatan tahun 2022 termasuk dalam kategori IPM tinggi dengan capaian sebesar 72,82. Berdasarkan capaian IPM, maka capaian IPM kabupaten di Kawasan Bulukumba, walapun menunjukkan adanya peningkatan capaian dibandingkan dengan capaian tahun 2021, namun masih di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan masih termasuk dalam kategori IPM Sedang, dengan IPM rata-rata sebesar 68,39.

Berdasarkan komponan IPM, hampir semua capaian komponen IPM kabupaten tahun 2022 di Kawasan Bulukumba lebih rendah daripada capaian komponen IPM Sulawesi Selatan tahun 2022, kecuali Kabupaten Bantaeng yang pengeluaran perkapita sebesar Rp. 12.133.000,- di atas pengeluaran perkapita Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 11.430.000,- pada tahun 2022.

Grafik VI. 10.
Capaian IPM Kawasan Bulukumba Tahun 2021-2022

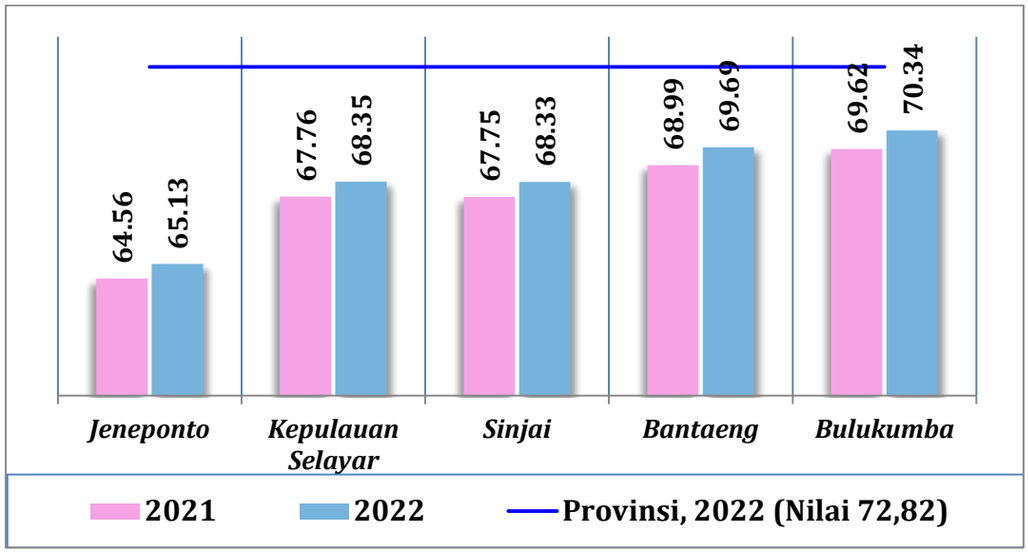

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023.

6.4.3. Capaian Pembangunan Kawasan Watampone dan sekitarnya

Kebijakan pengembangan kawasan pembangunan Watampone diprioritaskan pada penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha mikro dan kecil, pemenuhan standar pelayanan minimal, utamanya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh peningkatan konektivitas dan infrastruktur wilayah guna mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kawasan Watampone, dapat digambarkan berdasarkan beberapa indikator pembangunan yang meliputi:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan kabupaten di Kawasan Watampone dan sekitarnya pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021, kecuali kabupaten Soppeng yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,03 poin dari pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 6,15 persen. Dari 3 (tiga) kabupaten, penurunan tertinggi dialami oleh Kabupaten Wajo yang turun sebesar 4,39 poin. Kabupaten Bone juga mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,3 poin dibandingkan tahun 2021. Adapun kabupaten dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu Kabupaten Soppeng dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 6,18 persen, atau tumbuh sebesar 0,49 persen.

Kawasan Watampone memberikan kontribusi sebesar 13,58 persen terhadap PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHB Kabupaten Bone sebesar 7,21 persen, sedangkan kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan di Kawasan Watampone Tahun 2022 adalah Kabupaten Soppeng dengan kontribusi sebesar 2,28 persen.

Grafik VI. 11.
Capaian Pertumbuhan Ekonomi pada Kawasan Watampone
Tahun 2021-2022

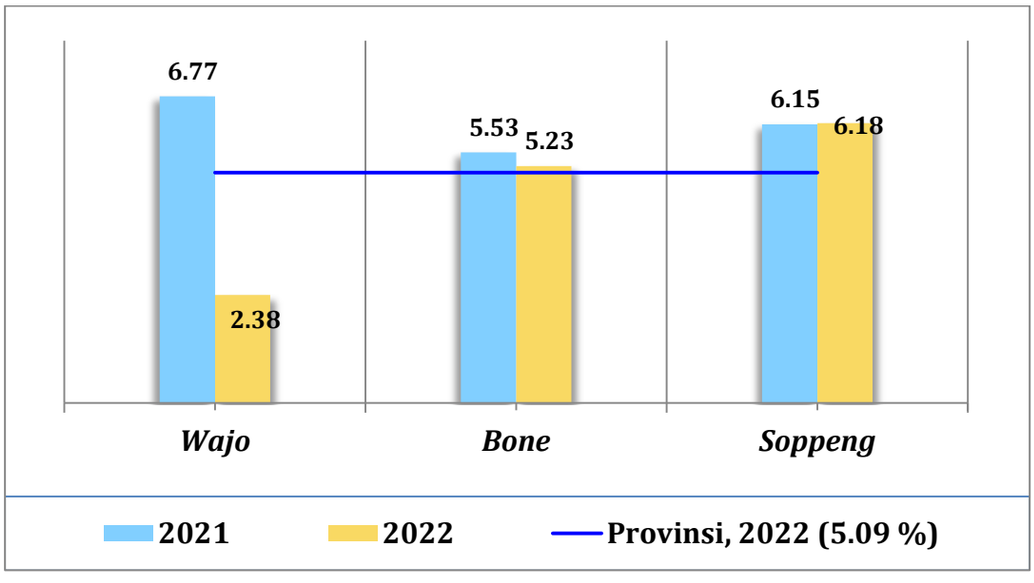

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023.

2) Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kawasan Watampone tahun 2022, rata rata mengalami peningkatan dibandingkan dengan persentase penduduk miskin tahun 2021, kecuali kabupaten Soppeng yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin dengan laju peningkatan persentase yang lebih besar dibandingkan dengan laju peningkatan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami penurunan.

Memperhatikan perubahan persentase penduduk miskin di kabupaten pada Kawasan Watampone tahun 2022, maka perubahan persentase penduduk miskin di kabupaten Wajo merupakan kabupaten dengan tingkat perubahan persentase penduduk miskin terbesar yaitu 0,11 poin. Hal tersebut, menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan di kabupaten Bone dan kabupaten Wajo memerlukan perhatian lebih, karena laju persentase pertumbuhan penduduk miskin sebesar 0,57 persen dan 1,70 persen merupakan laju pertumbuhan persentase penduduk miskin terbesar di Sulawesi Selatan selain Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota Parepare.

Grafik VI. 12.
Capaian Tingkat Kemiskinan Kawasan Watampone Tahun 2021-2022 (Maret)

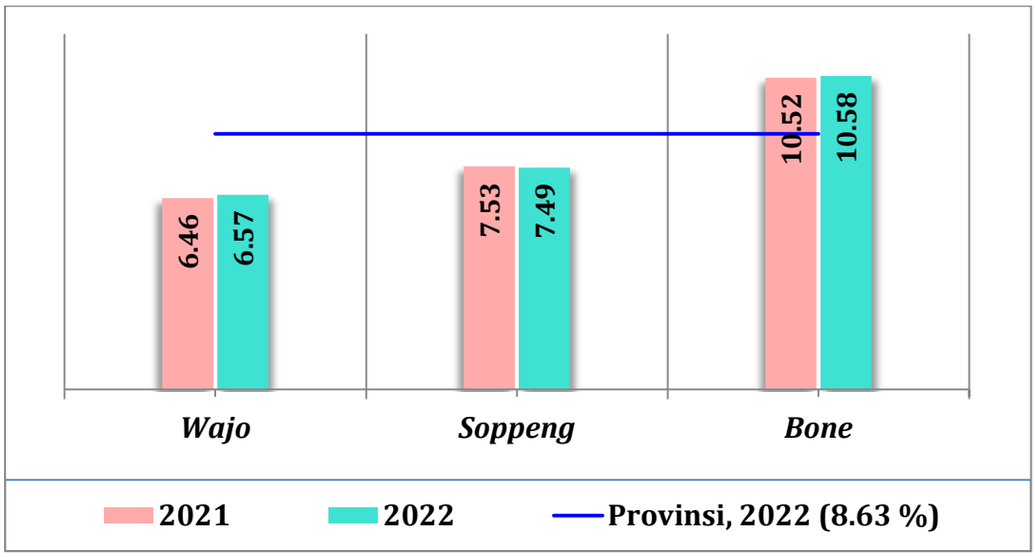

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Memperhatikan angka TPT di Kawasan Watampone pada Agustus 2022, maka rata-rata TPT kabupaten pada Kawasan Watampone sebesar 2.74 persen lebih rendah dibandingkan TPT Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 4.51 persen. TPT berdasarkan kabupaten di Kawasan Watampone pada tahun 2022, seluruhnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan TPT tahun 2021. Walaupun TPT di Kawasan Watampone tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan rata-rata TPT kabupaten tahun 2021, namun laju pertumbuhan penurunannya sebesar 33,36 persen, lebih besar dibandingkan dengan laju penurunan pertumbuhan TPT Sulawesi Selatan sebesar 21,15 persen.

Persentase penurunan TPT tertinggi terjadi di Kabupaten Bone yang menurun sebanyak 1,88 poin atau sebesar 45,30 persen, sedangkan kabupaten dengan persentase penurunan TPT terendah adalah kabupaten Soppeng sebanyak 0,52 poin atau sebesar 13,27 persen.

Grafik VI. 13.
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Watampone
Tahun 2021-2022

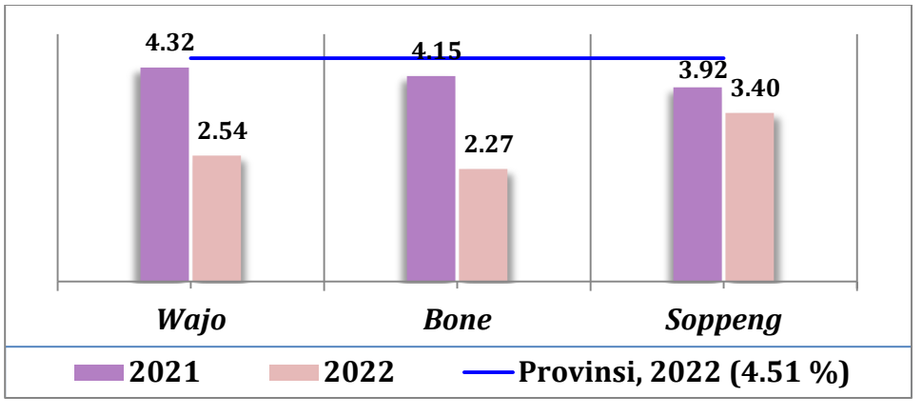

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023.

4) Rasio Gini

Pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat mengatasi ketimpangan baik ketimpangan pengeluaran penduduk maupun ketimpangan pembangunan antar wilayah. Gambaran ketimpangan pengeluaran penduduk di Kawasan Watampone, berdasarkan capaian rasio gini tahun 2022 pencapaiannya menunjukkan adanya penurunan gini ratio menjadi sebesar 0,379 poin yang menandakan adanya peningkatan penanganan ketimpangan pengeluaran penduduk.

Penurunan ketimpangan pengeluaran penduduk di kawasan Watampone berdasarkan kabupaten terjadi di Kabupaten Bone yang ketimpangannya menurun dari angka 0,383 pada tahun 2021 menurun menjadi 0,376 pada tahun 2022 dan di kabupaten Soppeng yang ketimpangannya menurun dari angka 0,406 pada tahun 2021 menurun menjadi 0,386 pada tahun 2022. Sedangkan di kabupaten Wajo terjadi peningkatan ketimpangan dari angka 0,361 pada tahun 2021 menjadi 0,375 pada tahun 2022. Memperhatikan capaian tersebut, maka Kabupaten Wajo memerlukan perhatian untuk menurunkan ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bone dan Soppeng.

Grafik VI. 14.
Capaian Rasio Gini Kawasan Watampone Tahun 2021-2022 (Maret)

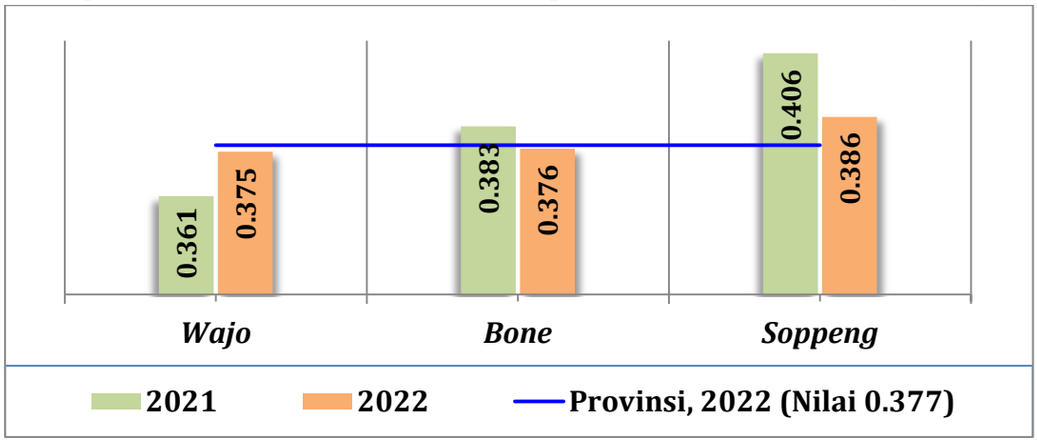

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan capaian IPM tahun 2022, maka IPM kabupaten di Kawasan Watampone termasuk dalam kategori IPM sedang. Walaupun rata rata capaian IPM tahun 2022 di Kawasan Watampone sebesar 68,99 lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPM Sulawesi Selatan sebesar 72,82, namun mengalami pertumbuhan sebesar 0,65 poin, yang lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 0,58 poin.

Berdasarkan komponan IPM, capaian semua komponen IPM kabupaten di Kawasan Watampone lebih rendah daripada capaian komponen IPM Sulawesi Selatan tahun 2022. Jika ditinjau berdasarkan laju pertumbuhan masing-masing capaian komponen IPM, maka laju pertumbuhan komponen pengeluaran perkapita dan laju pertumbuhan komponen angka harapan hidup kabupaten di Kawasan Watampone lebih dibandingkan laju pertumbuhan Sulawesi Selatan pada kedua komponen tersebut. IPM tertinggi dicapai oleh Kabupaten Wajo yaitu sebesar 70,26 dan IPM terendah adalah Kabupaten Bone yang disebabkan rendahnya kemampuan pengeluaran perkapita yang hanya mencapai Rp. 9.277.000.

Grafik VI. 15.
Capaian IPM Kawasan Watampone Tahun 2021-2022

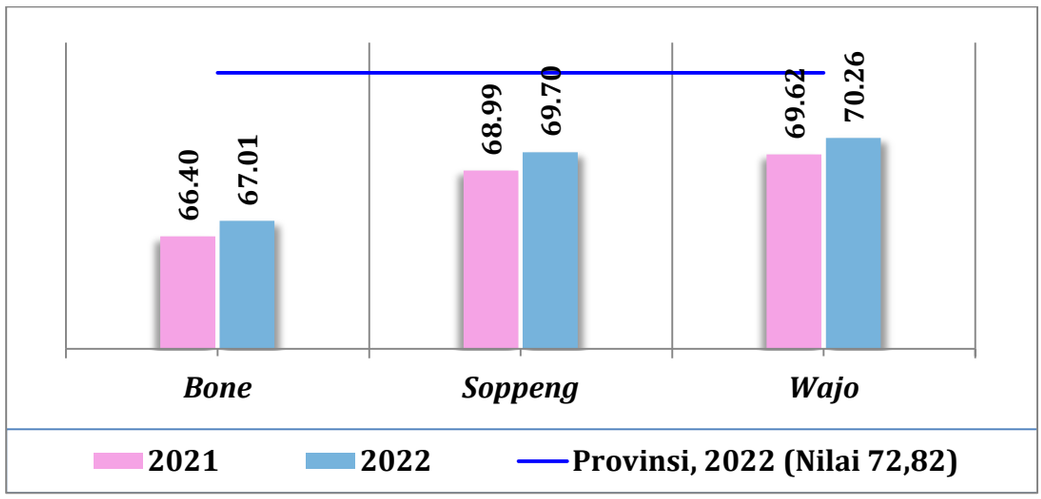

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

6.4.4. Pembangunan Kawasan Parepare dan sekitarnya

Pengembangan kawasan pembangunan Parepare berperan mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, yang dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan mengembangkan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, pengembangan konektivitas serta infrastruktur wilayah dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kualitas layanan kesehatan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kawasan Parepare, dapat digambarkan berdasarkan beberapa indikator pembangunan yang meliputi:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan capaian rata-rata kabupaten/kota di Kawasan Parepare pada tahun 2022, mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021, dengan rata-rata penurunan sebesar 0.40 poin. Pertumbuhan ekonomi pada kawasan Parepare dan sekitarnya pada tahun 2022 bertumbuh negatif sebesar 4,53 persen, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kawasan Parepare lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,70 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Kawasan Parepare dan sekitarnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, walaupun terdapat 2 (dua) kabupaten dan kota yang mengalami pertumbuhan positif yaitu Kota Parepare pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 34,47 persen, dan kabupaten Barru yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,13 persen. Kabupaten Enrekang merupakan kabupaten yang mengalami pertumbuhan ekonomi negative terbesar di Kawasan Parepare pada tahun 2022 yaitu sebesar 41,67 persen, yang antara lain disebabkan menurunnya pertumbuhan pada lapangan usaha pertanian yang merupakan lapangan usaha utama yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah tersebut.

Kawasan Parepare memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 11,19 persen yang disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHB Kabupaten Pinrang sebesar 3,99 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan, sedangkan kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan di Kawasan Parepare adalah Kota Parepare dengan kontribusi sebesar 1,43 persen.

Grafik VI. 16.
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Parepare Tahun 2021-2022

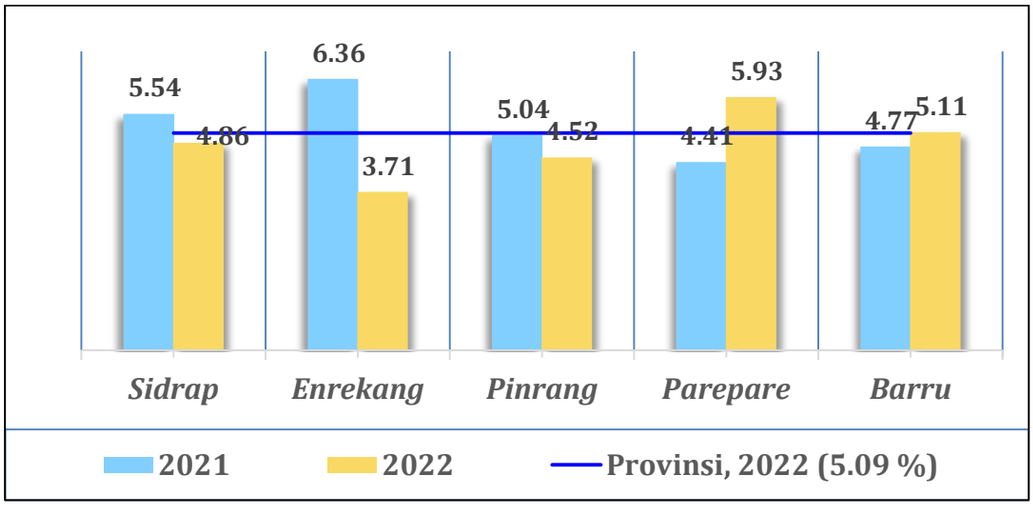

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

2) Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kawasan Parepare tahun 2022, mengalami penurunan dibandingkan dengan persentase penduduk miskin tahun 2021, kecuali pada Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengalami peningkatan sebesar 0,07 poin atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,39

persen dan kota Parepare yang mengalami peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,01 poin atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,19 persen dibandingkan dengan persentase penduduk miskin tahun 2022.

Walaupun persentase penduduk miskin tahun 2022 mengalami peningkatan di kabupaten Sidenreng Rappang menjadi sebesar 5,11 persen dan kota Parepare menjadi sebesar 5,41 persen, namun persentasenya masih lebih kecil dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 8,63 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin di kabupaten Enrekang, yang menurun menjadi 12,23 persen pada tahun 2022 dan di kabupaten Pinrang yang menurun menjadi 8,79 persen namun persentasenya masih lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan. Hal tersebut, menunjukkan bahwa kinerja penanganan kemiskinan pada kedua kabupaten tersebut masih perlu ditingkatkan.

Grafik VI. 17.
Capaian Tingkat Kemiskinan Kawasan Parepare dan sekitarnya,
Tahun 2021-2022 (Maret)

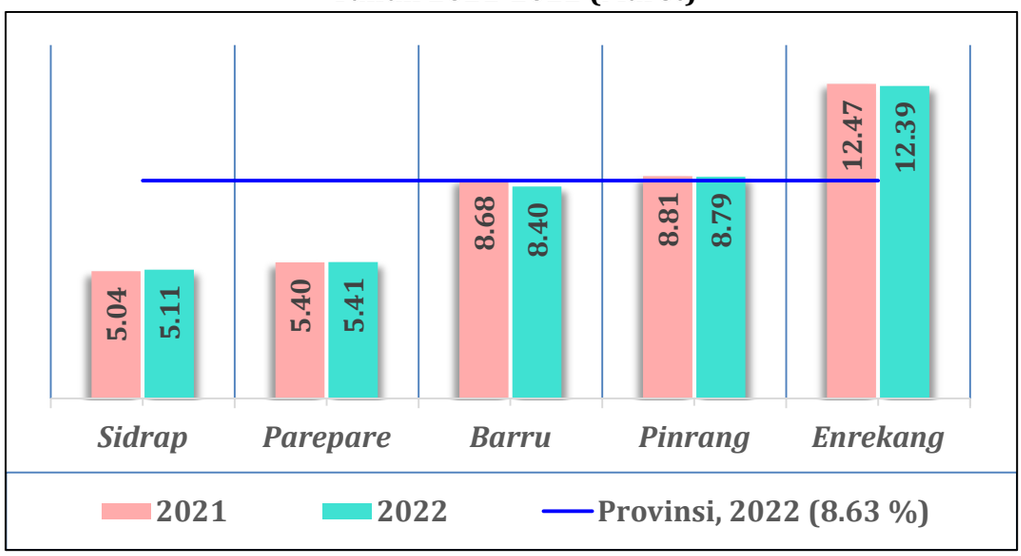

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan pada Agustus 2022, menunjukkan adanya penurunan sebesar 1,21 poin dibandingkan TPT pada Agustus 2021 yang mencapai 5,72 persen. Dari 5 (lima) Kab/Kota di wilayah Pare-Pare dan sekitarnya semuanya mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka. Penurunan tertinggi dialami oleh kabupaten Enrekang sebesar 75,21 persen, sedangkan penurunan tingkat pengangguran terbuka terendah terdapat di kota Parepare dengan persentase sebesar 16,67 persen.

Memperhatikan angka TPT berdasarkan kabupaten/kota di Kawasan Parepare dan sekitarnya pada periode Agustus 2022, maka terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang persentase TPTnya lebih besar dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2022, yaitu Kabupaten Barru dengan persentase sebesar 5,32 persen dan Kota Parepare dengan persentase TPT sebesar 5,69 persen.

Memperhatikan capaian TPT kabupaten/kota di Kawasan Parepare, pada tahun 2022, maka kota Parepare dan kabupaten Barru masih memerlukan

perhatian, karena selain capaian TPT tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 laju pertumbuhannnya juga lebih kecil dibandingkan laju penurunan TPT provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik VI. 18.
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Parepare,
Tahun 2021-2022 (Agustus)

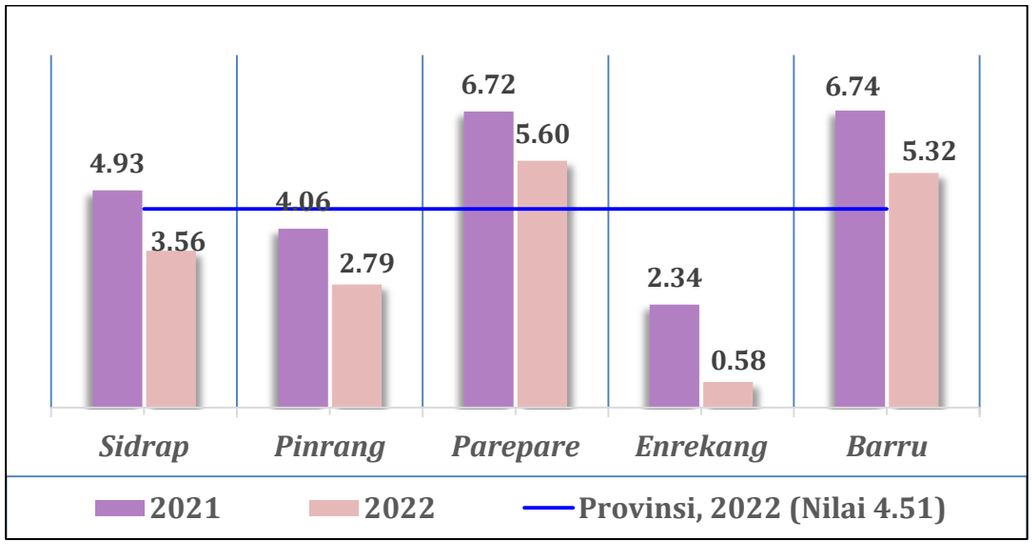

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

4) Rasio Gini

Pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat mengatasi ketimpangan baik ketimpangan pengeluaran penduduk maupun ketimpangan pembangunan antar wilayah. Gambaran ketimpangan pengeluaran penduduk di Kawasan Parepare, secara rata rata menunjukkan adanya peningkatan kinerja, walaupun pencapaiannya menunjukkan kinerja yang lebih rendah daripada Provinsi Sulawesi Selatan yang capaian rasio gininya sebesar 0,377. Kabupaten Barru merupakan satu satunya kabupaten di Kawasan Parepare yang capaian angka rasio gininya pada tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan kinerja yang ditamdai dengan meningkatnya angka rasio gini menjadi 0,366 yang bertambah sebanyak 0,007 poin atau sebesar 1,95 persen.

Sedangkan kabupaten/kota lainnya di Kawasan Parepare telah menunjukkan adanya peningkatan kinerja penanganan yang ditandai dengan menurunnya angka rasio gini pada tahun 2022. Kinerja penanganan ketimpangan pengeluaran penduduk di Kawasan Parepare terbesar adalah kabupaten Enrekang dengan penurunan sebesar 0,016 poin atau sebesar 4,42 persen, sedangkan kinerja penanganan ketimpangan pengeluaran penduduk terkecil adalah kota Parepare yang mengalami penurunan ketimpangan pendapatan masyarat sebanyak 0,002 poin atau sebesar 0,52 persen.

Grafik VI. 19.
Capaian Rasio Gini Kawasan Parepare Tahun 2021-2022 (Maret)

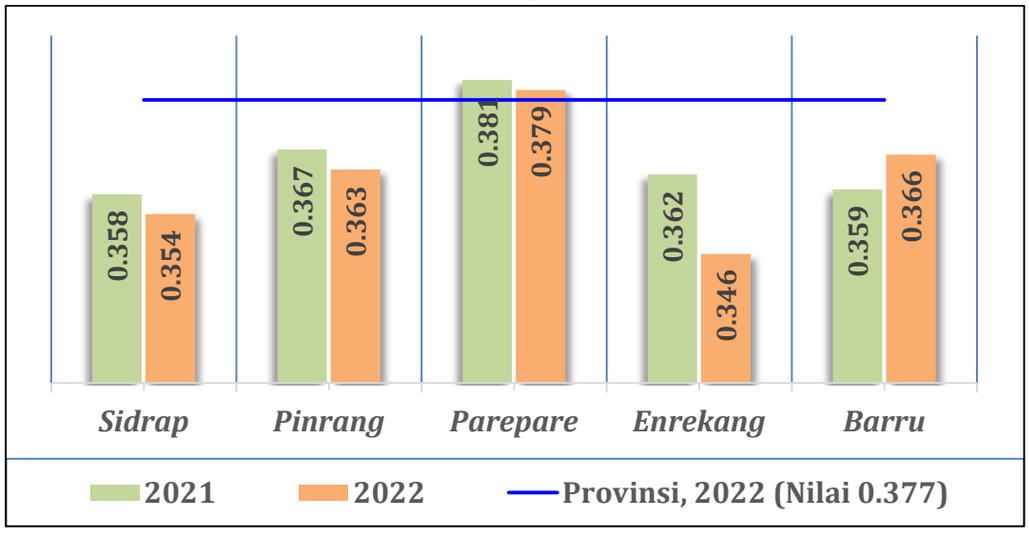

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Sulawesi Selatan tahun 2022 termasuk dalam kategori IPM tinggi dengan capaian sebesar 72,82. Memperhatikan capaian IPM kabupaten/kota pada Kawasan Parepare, maka IPM kabupaten/kota pada kawasan tersebut termasuk dalam kategori IPM Tinggi dengan capaian rata-rata 74,97 poin. Memperhatikan capaian IPM kabupaten/kota, maka kabupaten Barru dengan capaian IPM tahun 2022 sebesar 78,91 dan Kota Parepare dengan capaian IPM tahun 2022 sebesar 78,54 serta kabupaten Enrekang dengan capaian IPM tahun 2022 sebesar 73,39 merupakan kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih besar dibandingkan capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan laju perubahan IPM tahun 2022, maka perubahan IPM terbesar adalah kabupaten Barru dengan perubahan sebanyak 7,78 poin atau sebesar 10,94 persen, sedangkan laju perubahan IPM terkecil adalah kota Parepare dengan perubahan sebesar 0,33 poin, atau sebesar 0,42 persen.

Berdasarkan komponan IPM, komponen Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan komponen IPM yang memerlukan perhatian lebih, dikarenakan capaian AHH kabupaten/kota tahun 2022 di Kawasan Parepare lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang dengan capaian AHH sebesar 70,41 tahun, Kabupaten Barru dengan capaian AHH sebesar 69,35 tahun dan Kabupaten Pinrang dengan capaian AHH sebesar 70,15 tahun. Sedangkan berdasarkan dimensi pengeluaran per kapita pada kabupaten/kota di Kawasan Parepare yang membutuhkan perhatian adalah kabupaten Enrekang dengan pengeluaran perkapita sebesar Rp. 11.183.000,- dan kabupaten Barru dengan pengeluaran perkapita sebesar Rp. 11.275.000,- yang pengeluaran perkapitanya lebih rendah daripada pengeluaran perkapita provinsi Sulawesi Selatan dan laju pertumbuhan lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik VI. 20.
Capaian IPM Kawasan Parepare Tahun 2021-2022

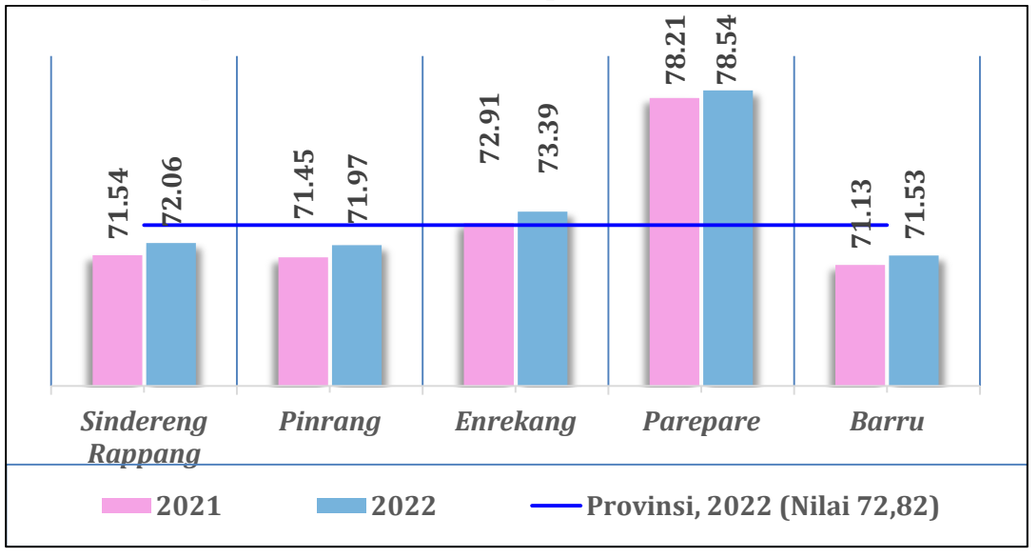

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

6.4.5. Pembangunan Kawasan Palopo dan sekitarnya

Kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam rangka penanganan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemic Covid-19, khususnya pada Kawasan Pembangunan Palopo yang rata-rata persentase penduduk miskinnya di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, kebijakan pembangunan Kawasan Palopo diprioritaskan pada penguatan peran Kawasan Palopo sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Sorowako dan Kawasan Strategis Nasional Toraja sekaligus sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) Baru Toraja-Makassar-Selayar yang didukung oleh penguatan UMKM, penguatan konektivitas dan infrastruktur wilayah, peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kawasan, dapat digambarkan berdasarkan beberapa indikator pembangunan yang meliputi:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan kabupaten/kota di Kawasan Palopo pada tahun 2022, secara rata-rata mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021, yang secara umum dipicu oleh menurunnya kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,88 poin. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut, menunjukkan bahwa kinerja pembangunan yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Palopo menunjukkan adanya penurunan kinerja khususnya pada kabupaten Luwu dan kabupaten Tana Toraja yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi rata-rata di Kawasan Palopo pada tahun 2022 sebesar 4,74 persen lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2022, namun dengan laju pertumbuhan yang lebih besar jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang bertambah sebanyak 0,45 poin atau sebesar 9,70 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Kawasan Palopo dan sekitarnya, secara rata rata lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, walaupun terdapat 2 (dua) kabupaten yang pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi pada tahun 2022, yaitu Kabupaten Luwu yang mengalami kontraksi sebesar 5,65 persen dan Kabupaten Tana Toraja yang mengalami kontraksi sebesar 1,35 persen. Sedangkan kabupaten di Kawasan Palopo yang mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar adalah kabupaten Luwu Timur dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 243 persen, walaupun dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah yaitu sebesar 1,99 persen dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 5,09 persen.

Kawasan Palopo memberikan kontribusi sebesar 15,21 persen terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan tahun 2022 yang disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHB Kabupaten Luwu Timur sebesar 4,33 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan, sedangkan kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan di Kawasan Palopo adalah Kabupaten Tana Toraja dengan kontribusi sebesar 1,48 persen.

Grafik VI. 21.
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Palopo Tahun 2021-2022

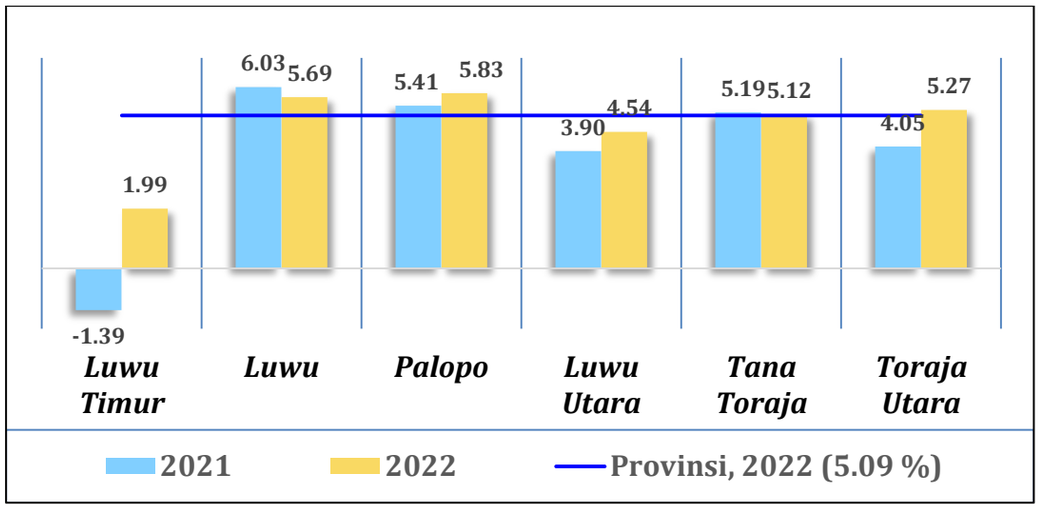

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

2) Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kawasan Palopo tahun 2022, rata rata mengalami penurunan dibandingkan dengan persentase penduduk miskin tahun 2021 sebesar 0,22 poin atau sebesar 2,03 persen. Walaupun persentase penduduk miskin di Kawasan Palopo tahun 2022 rata-rata menunjukkan penurunan, namun masih terdapat 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Toraja Utara dengan persentase penduduk miskin sebesar 11,65 persen, Kabupaten Tana Toraja dengan persentase penduduk miskin sebesar 12,18

persen, Kabupaten Luwu dengan persentase penduduk miskin sebesar 12,49 dan Kabupaten Luwu Utara dengan persentase penduduk miskin sebesar 13,22 persen yang persentase penduduk miskinnya masih lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 8,63 persen. Hal tersebut, menunjukkan bahwa kinerja penanganan kemiskinan pada keempat kabupaten tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya di kabupaten Luwu Utara yang merupakan kabupaten dengan kemiskinan ekstrim.

Grafik VI. 22.
Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota pada Kawasan Palopo dan sekitarnya, Tahun 2021-2022 (Maret)

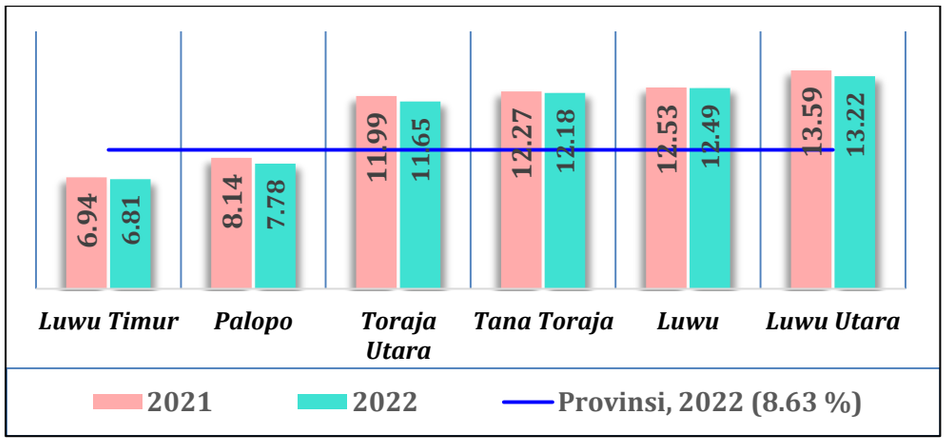

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan pada Agustus 2022, menunjukkan adanya penurunan sebesar 1,21 poin dibandingkan TPT pada Agustus 2021 yang mencapai 4,51 persen. Memperhatikan angka TPT di Kawasan Palopo pada Agustus 2022, secara umum kabupaten/kota pada kawasan tersebut, menunjukkan adanya penurunan persentase TPT dibandingkan dengan persentase TPT Agustus 2021, kecuali pada kota Palopo yang mengalami peningkatan persentase TPT sebesar 43,35 persen.

Secara rata-rata TPT di Kawasan Palopo pada tahun 2022 sebesar 3,94 persen menunjukkan capaian kinerja yang lebih baik dibandingkan capaian TPT Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,51 persen. Memperhatikan capaian TPT berdasarkan kabupaten/kota di Kawasan Palopo dan sekitarnya pada periode Agustus 2022, kabupaten yang berkinerja sangat baik dalam penanganan pengangguran terbuka adalah kabupaten Luwu Utara dengan penurunan TPT sebanyak 1,10 poin atau sebesar 28,13 persen, sedangkan daerah yang berkinerja rendah dalam penanganan pengangguran terbuka adalah kota Palopo yang tergambarkan pada meningkatnya persentase TPT sebanyak 2,48 poin atau sebesar 43,36 persen.

Grafik VI. 23.
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Palopo
Tahun 2021-2022 (Agustus)

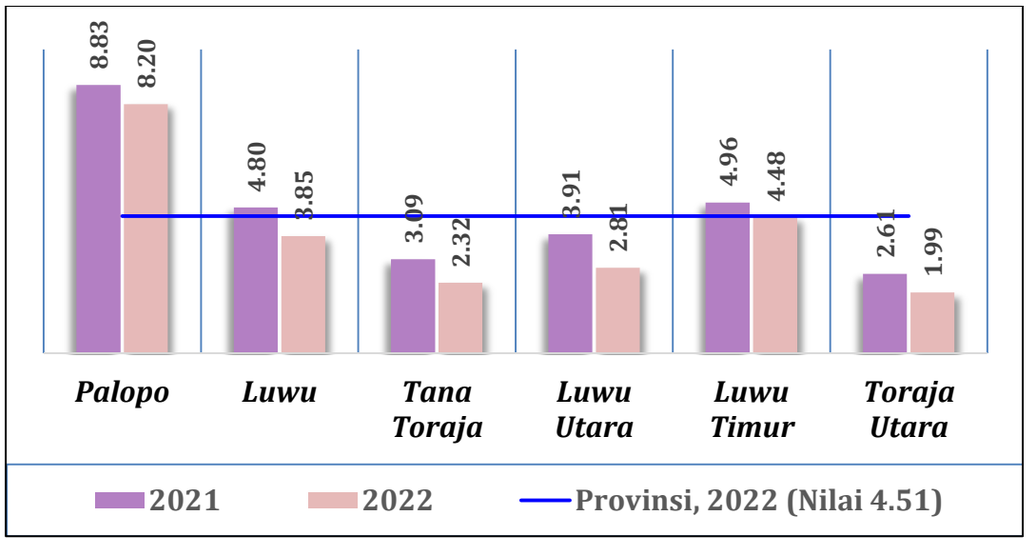

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

4) Rasio Gini

Pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat mengatasi ketimpangan baik ketimpangan pengeluaran penduduk maupun ketimpangan pembangunan antar wilayah. Gambaran ketimpangan pengeluaran penduduk di Kawasan Palopo, berdasarkan capaian rasio gini tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan kinerja penanganan ketimpangan yang tergambarkan pada capaian rasio gini seluruh kabupaten/kota yang lebih rendah daripada capaian rasio gini provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,377, kecuali di kota Palopo yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan sebesar 0,013 poin menjadi sebesar 0,371 dari tahun 2021. Akan tetapi secara rata rata kinerja penanganan ketimpangan di Kawasan Palopo menunjukkan adanya peningkatan yang ditandai dengan menurunnya nilai rasio gini menjadi sebesar 0,364 atau mengalami penurunan sebanyak 0,005 poin.

Rasio Gini tertinggi di Kawasan Palopo tahun 2022 adalah Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,394 poin yang mengalami penurunan dari tahun 2021 yang mencapai 0,396 poin.

Grafik VI. 24.
Capaian Rasio Gini Kawasan Palopo Tahun 2021-2022 (Maret)

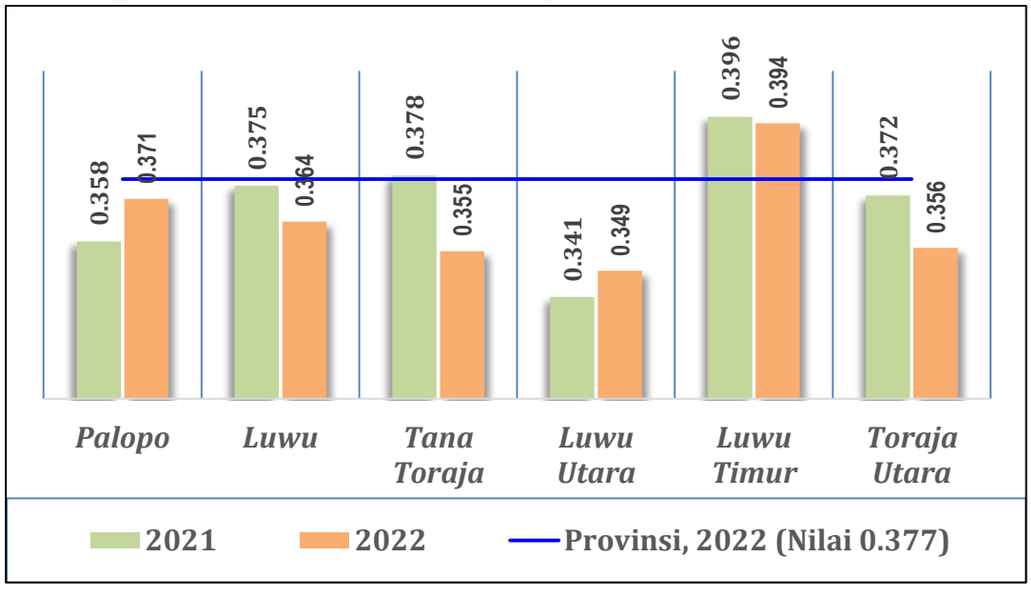

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Sulawesi Selatan tahun 2022 termasuk dalam kategori IPM tinggi dengan capaian sebesar 72,82, demikian halnya IPM kabupaten/kota di Kawasan Palopo dengan rata rata capaian IPM sebesar 72,49. Memperhatikan capaian IPM kabupaten/kota tahun 2022 di Kawasan Palopo, maka terjadi peningkatan kinerja capaian IPM sehingga secara rata-rata IPM berada dalam kategori tinggi, kecuali kabupaten Tana Toraja dengan capaian IPM sebesar 69,88 poin.

Berdasarkan komponan IPM, hampir semua rata-rata capaian komponen IPM kabupaten/kota di Kawasan Palopo lebih baik dibandingkan capaian komponen IPM Sulawesi Selatan tahun 2022, kecuali pada komponen pengeluaran perkapita di Kawasan Palopo Tahun 2022, khususnya pada kabupaten Tana Toraja dengan pengeluaran perkapita sebesar Rp. 7.584.000,- dan kabupaten Toraja Utara dengan pengeluaran perkapita sebesar Rp. 8.494.000,- yang merupakan 2 (dua) kabupaten dengan pengeluaran perkapita terendah di provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan berdasarkan komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) kabupaten yang memerlukan penanganan yang lebih intensif di Kawasan Palopo adalah kabupaten Luwu Utara dengan angka HLS tahun 2022 sebesar 12,58 Tahun dan kabupaten Luwu Timur dengan capaian angka HLS Tahun 2022 sebesar 13,00 Tahun.

Grafik VI. 25.
Capaian IPM Kawasan Palopo Tahun 2021-2022

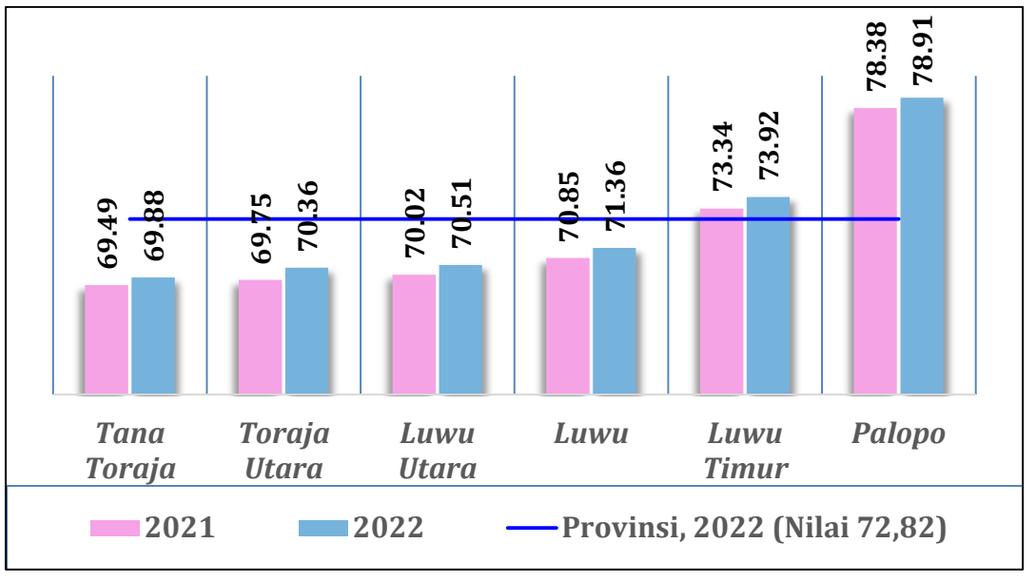

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

6.4.6. Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai upaya meningkatkan efektifitas pengelolaan pembangunan dan fokus peningkatan pemanfaatan keunggulan sumberdaya alam, serta meningkatkan keterkaitan fungsional antarwilayah, maka pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada 5 (lima) kawasan pembangunan (KP) yang mengacu pada rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana arahan penetapan Kawasan Andalan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang meliputi: 1) Kawasan Pembangunan Makassar; 2) Kawasan Pembangunan Bulukumba; 3) Kawasan Pembangunan Watampone; 4) Kawasan Pembangunan Parepare; dan 5) Kawasan Pembangunan Palopo.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan, mengarahkan pembangunan Sulawesi Selatan sebagai pusat industry pengolahan sumber daya alam, pusat jasa perdagangan dan pariwisata, dan sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam berbasis mitigasi dan adapatasi bencana yang didukung oleh pelayanan jaringan prasarana wilayah yang berkualitas serta keterkaitan dan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan melalui sinergitas antar wilayah yang konsisten dengan kebijakan nasional.

Sasaran pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 adalah meningkatnya produktifitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam, meningkatnya aksesibilitas infrastruktur termasuk aksesibilitas pelayanan dasar, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan wilayah yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan memperhatikan sasaran pembangunan kewilayahan tersebut, maka

target pembangunan wilayah Tahun 2026 tergambarkan sebagai berikut.

Tabel VI. 4.
Target Pembangunan Kawasan Tahun 2026

Kawasan Pembangunan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Indeks Gini (Angka)	IPM (Angka)
Makassar dan Sekitarnya	4,78– 6,35	6,56	7,22	0,327	73,99
Bulukumba dan Sekitarnya	4,70 – 6,24	8,50	3,42	0,325	70,30
Watampone dan Sekitarnya	4,95 – 6,35	7,04	2,83	0,356	70,87
Parepare dan Sekitarnya	4,71 – 6,25	6,53	5,37	0,318	75,14
Palopo dan Sekitarnya	4,62 – 6,32	8,70	3,87	0,345	74,10

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, diolah Tahun 2023

Tujuan pembangunan wilayah Sulawesi Selatan akan dicapai melalui integrasi pembangunan dengan mengutamakan kerjasama dan keterpaduan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dan antar wilayah serta antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan yang meliputi: 1) peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah; 2) penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah; 3) peningkatan kualitas sumberdaya manusia; dan 4) penurunan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat.

Tabel VI. 5.
Rencana Kebutuhan Investasi Tahun 2026

Kawasan Pembangunan	Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar)
Makassar dan Sekitarnya	**223.865,481**
Bulukumba dan Sekitarnya	**42.787,686**
Watampone dan Sekitarnya	**38.340,291**
Parepare dan Sekitarnya	**45.574,777**
Palopo dan Sekitarnya	**54.602,058**
SULAWESI SELATAN	**407.170,293**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, diolah Tahun 2023

Pembangunan wilayah dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dirumuskan dengan pendekatan holistik, tematik, dan integratif yang didasarkan pada potensi pengembangan yang diamanatkan dalam kebijakan nasional dan daya dukung lingkungan yang mengacu pada tujuan penataan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang diprioritaskan pada peningkatan produktifitas daya saing produk unggulan berbasis sumber daya alam, pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan wilayah, dan pembangunan infrastrutur yang holistik, terintegrasi dan terjangkau, serta peningkatan

kualitas sumberdaya manusia secara inklusif dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

1. Kawasan Pembangunan Makassar

Kebijakan pengembangan kawasan pembangunan Makassar diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah melalui pengembangan konektivitas antar moda transportasi darat, laut dan udara, pengembangan transportasi massal, pembangunan infrastruktur kelistrikan di pulau pulau kecil, pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, khususnya pada daerah pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kemantapan jalan provinsi. Selain itu pengembangan kawasan Makassar juga dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) Baru Toraja-Makassar-Selayar berupa pembangunan prasarana pariwisata berupa dermaga dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup dan pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon. Pencapaian sasaran penurunan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat diprioritaskan pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan melalui penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah, sedangkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.

Gambar VI. 2.
Arahan Pengembangan Kawasan Pembangunan Makassar

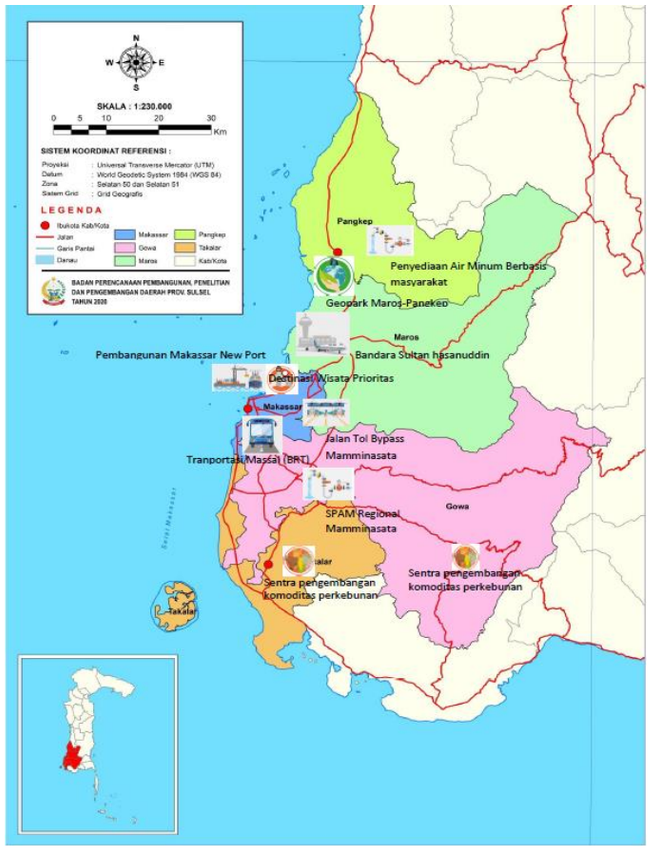

Sumber: Bappelitbangda, diolah Tahun 2023

Pembangunan Kawasan Makassar diarahkan untuk mendukung terwujudnya Sulawesi Selatan yang kompetitif dan inovatif serta produktif, berbasis keberlanjutan dengan target sebagai berikut.

Tabel VI. 6.
Target Pembangunan Kawasan Makassar Tahun 2024-2026

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Capaian Tahun 2022	Target Pembangunan		
			2024	2025	2026
Makassar	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,65	6,06	6,47
	Tingkat Kemiskinan (%)	4,58 (Maret)	4,07	3,65	3,25
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	11,82	11,41	10,05	9,65
	Gini Ratio	0,395	0,383	0,378	0,372
	IPM	83,12	84,07	84,50	84,90
Gowa	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,59	7,67	8,08	8,49
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,36 (Maret)	6,25	5,71	5,18
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,26	3,13	3,06	3,00
	Gini Ratio	0,364	0,353	0,348	0,343
	IPM	70,99	72,26	72,84	73,36
Maros	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	9,13	5,10	5,52	5,93
	Tingkat Kemiskinan (%)	9,43 (Maret)	8,18	7,58	6,99
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,04	4,90	4,84	4,77
	Gini Ratio	0,362	0,351	0,346	0,341
	IPM	71,00	72,23	72,78	73,29
Takalar	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,64	5,70	6,11	6,52
	Tingkat Kemiskinan (%)	8,25 (Maret)	7,47	7,09	6,72
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,63	2,49	2,42	2,36
	Gini Ratio	0,375	0,364	0,358	0,353
	IPM	68,31	69,51	70,05	70,54
Pangkajene Kepulauan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,93	4,79	5,20	5,61
	Tingkat Kemiskinan (%)	13,92 (Maret)	12,75	12,19	11,63
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,23	5,10	5,04	4,98
	Gini Ratio	0,334	0,324	0,319	0,315
	IPM	69,79	71,03	71,60	72,11

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, diolah Tahun 2023

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan di kawasan pembangunan Makassar, direncanakan kebutuhan investasi yang bersumber dari investasi badan usaha dan pemerintah termasuk BUMN sebagai berikut.

Tabel VI. 7.
Kebutuhan Investasi Kawasan Makassar Tahun 2024-2026

Kabupaten / Kota	Realisasi Investasi 2022 (Rp. Miliar)	Rencana Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar)		
		2024	2025	2026
Makassar	94.069,152	131.320,536	149.389,338	167.096,765
Gowa	7.285,779	10,170,948	11.570,400	12.941,863
Maros	5.893,610	8.227,479	9.359,523	10.468,927
Takalar	2.367,124	3.304,505	3.759,182	4.204,766
Pangkajene Kepulauan	4.555,282	7.234,152	8.091,631	8.931,960
Total Investasi	**114.170,946**	**181.312,596**	**202.803,952**	**223.865,481**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, diolah Tahun 2023

2. Kawasan Pembangunan Bulukumba

Kebijakan pengembangan kawasan pembangunan Bulukumba diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah melalui pengembangan konektivitas antar moda transportasi darat, dan laut, pembangunan simpul transportasi berupa terminal dan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan infrastruktur kelistrikan di pulau pulau kecil, pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, khususnya pada daerah pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kemantapan jalan provinsi. Selain itu pengembangan kawasan Bulukumba juga dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, pengembangan destinasi pariwisata, khususnya yang mendukung Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) Baru Toraja-Makassar-Selayar berupa pembangunan prasarana pariwisata yang didukung oleh infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup dan pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon. Pencapaian sasaran penurunan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat diprioritaskan pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan yang didukung oleh penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah, sedangkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Gambar VI. 3.
Arahan Pengembangan Kawasan Bulukumba

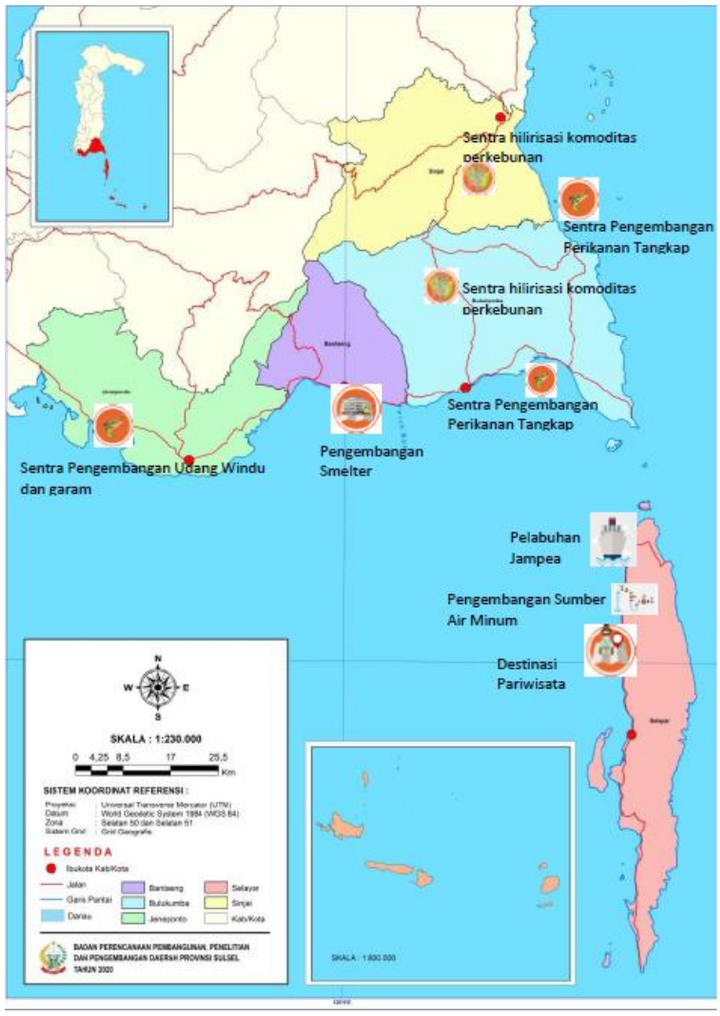

Sumber: Bappelitbangda, diolah Tahun 2023

Pembangunan Kawasan Bulukumba diarahkan untuk mendukung terwujudnya Sulawesi Selatan yang kompetif dan inovatif serta berkelanjutan dengan target sebagai berikut.

Tabel VI. 8.
Target Pembangunan Kawasan Bulukumba Tahun 2024-2026

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Capaian Tahun 2022	Target Pembangunan		
			2024	2025	2026
Bulukumba	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,81	5,15	5,56	5,97
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,39 (Maret)	6,77	6,44	6,11
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,26	2,55	2,48	2,41
	Gini Ratio	0,361	0,350	0,345	0,340
	IPM	70,34	71,69	72,31	72,88
Jeneponto	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,81	5,66	6,07	6,48

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Capaian Tahun 2022	Target Pembangunan		
			2024	2025	2026
	Tingkat Kemiskinan (%)	13,73 (Maret)	12,63	12,11	11,59
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,21	2,72	2,59	2,47
	Gini Ratio	0,338	0,328	0,323	0,318
	IPM	65,13	66,34	66,90	67,40
Sinjai	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,87	5,61	6,02	6,43
	Tingkat Kemiskinan (%)	8,80 (Maret)	8,18	7,88	7,58
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,80	2,21	2,11	2,01
	Gini Ratio	0,357	0,346	0,341	0,336
	IPM	68,33	69,58	70,15	70,66
Bantaeng	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	15,45	8,84	9,25	9,66
	Tingkat Kemiskinan (%)	9,07 (Maret)	8,40	8,08	7,76
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,72	3,34	3,19	3,04
	Gini Ratio	0,320	0,310	0,306	0,301
	IPM	69,69	70,97	71,56	72,09
Kepulauan Selayar	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,67	5,19	5,60	60,01
	Tingkat Kemiskinan (%)	12,24 (Maret)	11,03	10,44	9,87
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,49	1,83	1,75	1,66
	Gini Ratio	0,350	0,339	0,335	0,330
	IPM	68,35	69,44	69,94	70,39

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, diolah Tahun 2023

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan di kawasan pembangunan Bulukumba, direncanakan kebutuhan investasi yang bersumber dari investasi badan usaha dan pemerintah termasuk BUMN sebagai berikut.

Tabel VI. 9.
Kebutuhan Investasi Kawasan Bulukumba Tahun 2024-2026

Kabupaten / Kota	Realisasi Investasi 2022 (Rp. Miliar)	Rencana Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar)		
		2024	2025	2026
Bulukumba	4.348.836	6.906,300	7.724,918	8.527,164
Jeneponto	4.127,165	6.554,268	7.331,159	8.092,512
Sinjai	4.929,023	7.827,684	8.755,515	9.664,790
Bantaeng	5.331,510	8.466,865	9.470,460	10.453,983
Kepulauan Selayar	3.085,099	4.899,384	5.480,118	6.049,237
Total Investasi	**21.821,634**	**34.654,501**	**38.762,170**	**42.787,686**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, diolah Tahun 2023

3. Kawasan Pembangunan Watampone

Kebijakan pengembangan kawasan pembangunan Watampone diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah melalui pengembangan konektivitas antar moda transportasi darat, udara dan laut, peningkatan kapasitas pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan regional, pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, dan peningkatan kemantapan jalan provinsi serta peningkatan kapasitas. Selain itu pengembangan kawasan Watampone juga dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, dan peningkatan kapasitas jaringan sumber daya air guna mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup dan pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon. Pencapaian sasaran penurunan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat diprioritaskan pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan melalui penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah, sedangkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan pendidikan serta pengembangan pusat kegiatan keagamaan (*Islamic Center)*.

Gambar VI. 4.
Arahan Pengembangan Kawasan Watampone

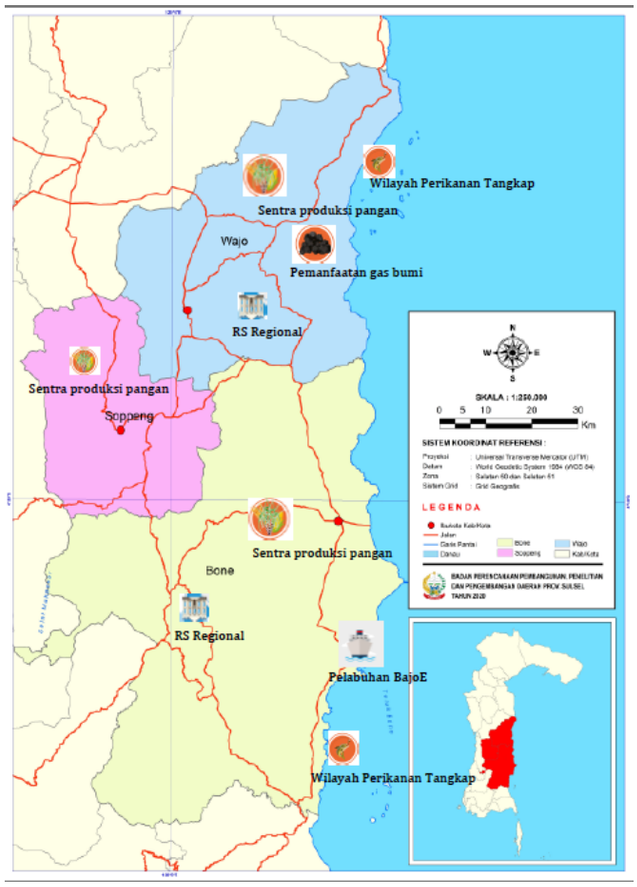

Sumber: Bappelitbangda, diolah Tahun 2023

Pembangunan Kawasan Watampone diarahkan untuk mendukung terwujudnya Sulawesi Selatan yang berkelanjutan, kompetitif dan inovatif serta produktif dengan target sebagai berikut.

Tabel VI. 10.
Target Pembangunan Kawasan Pembangunan Watampone Tahun 2024-2026

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Realisasi 2021	Target Pembangunan		
			2024	2025	2026
Bone	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,23	5,99	6,40	6,81
	Tingkat Kemiskinan (%)	10,58 (Maret)	9,90	9,58	9,26
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,27	2,20	2,17	2,14
	Gini Ratio	0,376	0,365	0,359	0,354
	IPM	67,01	68,31	68,51	68,94
Wajo	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,38	6,76	7,17	7,58
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,57 (Maret)	6,04	5,71	5,39
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,54	2,47	2,44	2,41
	Gini Ratio	0,375	0,364	0,358	0,353
	IPM	70,26	71,54	72,12	72,65

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Realisasi 2021	Target Pembangunan		
			2024	2025	2026
Soppeng	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,18	6,15	6,56	6,97
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,49 (Maret)	7,26	6,87	6,48
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,40	3,28	3,22	3,17
	Gini Ratio	0,386	0,374	0,369	0,364
	IPM	69,70	70,79	71,28	71,73

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, diolah Tahun 2023

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan di kawasan pembangunan Watampone dan Sekitarnya, direncanakan kebutuhan investasi yang bersumber dari investasi badan usaha dan pemerintah termasuk BUMN sebagai berikut.

Tabel VI. 11.
Kebutuhan Investasi Kawasan Watampone Tahun 2024-2026

Kabupaten / Kota	Realisasi Investasi 2022 (Rp. Miliar)	Rencana Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar)		
		2024	2025	2026
Bone	14.889,132	18.500,026	19.655,836	20.788,530
Wajo	7.421,858	8.833,561	9.285,433	9.728,268
Soppeng	5.492,282	6.919,166	7.375,897	7.823,493
Total Investasi	**27.803,272**	**34.252,753**	**36.317,166**	**38.340,291**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, diolah Tahun 2023

4. Kawasan Pembangunan Parepare

Pengembangan kawasan pembangunan Parepare diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah melalui pengembangan konektivitas antar moda transportasi darat, dan laut, pengembangan simpul transportasi berupa pengembangan terminal penumpang tipe B dan pelabuhan pengumpan regional, pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, dan peningkatan kemantapan jalan provinsi serta peningkatan kapasitas jaringan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu pengembangan kawasan Parepare juga dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup dan pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon. Pencapaian sasaran penurunan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat diprioritaskan pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dan penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah, sedangkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan pengelolaan tenaga pendidik dan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan.

Gambar VI. 5.
Arahan Pengembangan Kawasan Parepare

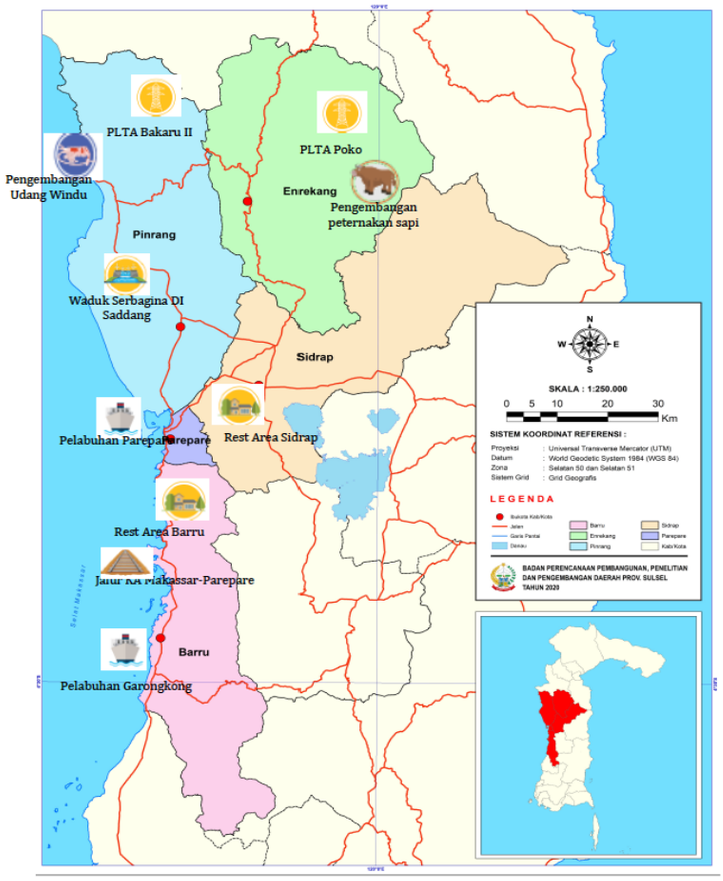

Sumber: Bappelitbangda, diolah Tahun 2023

Pembangunan kawasan Parepare diarahkan untuk mendukung terwujudnya Sulawesi Selatan yang produktif, kompetitif, inovatif dan berkelanjutan dengan target sebagai berikut.

Tabel VI. 12.
Target Pembangunan Kawasan Pembangunan Parepare
Tahun 2024-2026

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Capaian Tahun 2022	Target Pembangunan		
			2024	2025	2026
Parepare	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,93	5,05	5,46	5,87
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,41 (Maret)	4,95	4,58	4,22
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,60	5,43	5,35	5,28
	Gini Ratio	0,379	0,368	0,362	0,357
	IPM	78,54	79,94	80,40	80,82
Sidenreng Rappang	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,86	5,76	6,17	6,58
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,04 (Maret)	4,52	4,13	3,74
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,56	3,47	3,42	3,38
	Gini Ratio	0,354	0,343	0,338	0,334
	IPM	72,06	72,25	72,31	72,35

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Capaian Tahun 2022	Target Pembangunan		
			2024	2025	2026
Barru	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11	5,33	5,74	6,15
	Tingkat Kemiskinan (%)	8,40 (Maret)	7,74	7,43	7,12
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,25	5,22	5,19
	Gini Ratio	0,366	0,355	0,350	0,345
	IPM	71,53	72,39	72,10	72,19
Pinrang	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,52	5,60	6,01	6,42
	Tingkat Kemiskinan (%)	8,79 (Maret)	8,15	7,71	7,28
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,79	2,65	2,59	2,53
	Gini Ratio	0,363	0,352	0,347	0,342
	IPM	71,97	72,57	72,85	73,11
Enrekang	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,71	5,90	6,32	6,73
	Tingkat Kemiskinan (%)	12,39 (Maret)	11,32	10,80	10,29
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,58	0,47	0,41	0,36
	Gini Ratio	0,346	0,336	0,331	0,326
	IPM	73,39	74,21	74,50	74,74

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, diolah Tahun 2023

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan di kawasan pembangunan Parepare, direncanakan kebutuhan investasi yang bersumber dari investasi badan usaha dan pemerintah termasuk BUMN sebagai berikut.

Tabel VI. 13.
Kebutuhan Investasi Kawasan Parepare Tahun 2024-2026

Kabupaten / Kota	Realisasi Investasi 2022 (Rp. Miliar)	Rencana Kebutuhan Investasi (Rp.Miliar)		
		2024	2025	2026
Parepare	3.260,367	5.177,723	5.791,449	6.329,901
Sidenreng Rappang	6.252,628	9.929,673	11.106,657	12.260,102
Barru	3.775,805	5.996,280	6.707,032	7.403,568
Pinrang	7.761,136	12.325,304	13.786,248	15.217,973
Enrekang	3.213,106	5.102,669	5.707,499	6.300,232
Total Investasi	**24.263,041**	**38.531,649**	**43.098,885**	**47.574,777**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, diolah Tahun 2023

5. Kawasan Pembangunan Palopo

Pengembangan kawasan pembangunan Palopo diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah melalui pengembangan konektivitas antar moda transportasi darat, udara dan laut, peningkatan kapasitas pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpan regional, pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, dan peningkatan kemantapan jalan provinsi serta peningkatan kapasitas jaringan sumber daya air guna mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu pengembangan kawasan Palopo juga dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup dan pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon. Pencapaian sasaran penurunan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat diprioritaskan pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan melalui pembangunan rest area yang didukung oleh penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah. Sedangkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan pelayanan kesehatan rujukan serta peningkatan kualitas pendidikan yang merata melalui penguatan upaya Wajib Belajar 12 Tahun.

Gambar VI. 6.
Arahan Pengembangan Kawasan Pembangunan Palopo

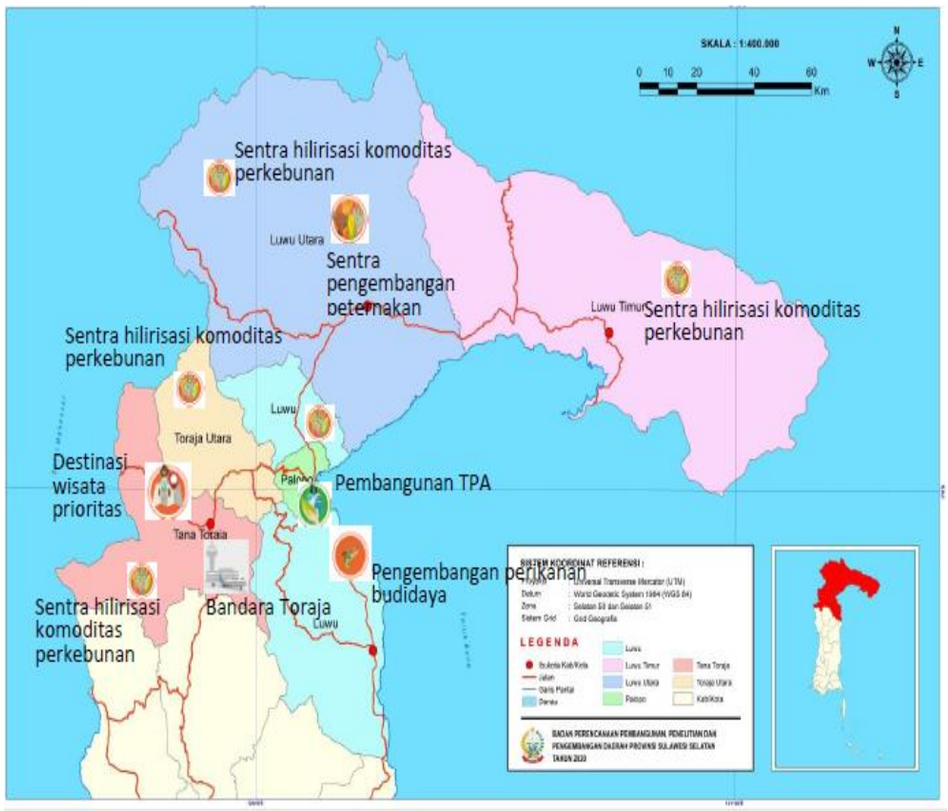

Sumber: Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2023

Pembangunan Kawasan Palopo diarahkan untuk mendukung terwujudnya Sulawesi Selatan yang berkelanjutan, produktif dan kompetitif dengan target sebagai berikut.

Tabel VI. 14.
Target Pembangunan Kawasan Pembangunan Palopo Tahun 2024-2026

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Capaian Tahun 2022	Target Pembangunan		
			2024	2025	2026
Palopo	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,83	5,65	6,06	6,47
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,78 (Maret)	7,17	6,78	6,39
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,20	7,87	7,53	7,20
	Gini Ratio	0,371	0,360	0,355	0,350
	IPM	78,91	79,31	79,53	79,73
Luwu	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,69	6,09	6,50	6,91
	Tingkat Kemiskinan (%)	12,49 (Maret)	11,51	10,94	10,39
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,85	3,75	3,70	3,66
	Gini Ratio	0,364	0,353	0,348	0,343
	IPM	71,36	72,68	73,28	73,82
Luwu Utara	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,54	4,94	5,35	5,76
	Tingkat Kemiskinan (%)	13,22 (Maret)	12,12	11,53	10,96
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,81	2,73	2,69	2,65
	Gini Ratio	0,349	0,338	0,334	0,329
	IPM	70,51	71,52	71,97	72,39
Luwu Timur	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,99	2,86	3,28	3,69
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,81 (Maret)	6,08	5,73	5,39
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,48	4,26	4,15	4,05
	Gini Ratio	0,394	0,382	0,377	0,371
	IPM	73,92	74,87	75,30	75,69

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Capaian Tahun 2022	Target Pembangunan		
			2024	2025	2026
Tana Toraja	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,12	5,59	6,00	6,41
	Tingkat Kemiskinan (%)	12,18 (Maret)	11,19	10,64	10,10
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,32	2,26	2,24	2,21
	Gini Ratio	0,355	0,344	0,339	0,334
	IPM	69,88	71,13	71,70	72,22
Toraja Utara	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,27	5,32	5,73	6,14
	Tingkat Kemiskinan (%)	11,65 (Maret)	10,38	9,74	9,12
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,99	1,95	1,93	1,91
	Gini Ratio	0,356	0,345	0,340	0,335
	IPM	70,36	71,57	72,12	72,62

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2022, diolah Tahun 2023

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan di kawasan pembangunan Palopo dan Sekitarnya, direncanakan kebutuhan investasi yang bersumber dari investasi badan usaha dan pemerintah termasuk BUMN sebagai berikut.

Tabel VI. 15.
Kebutuhan Investasi Kawasan Palopo Tahun 2024-2026

Kabupaten / Kota	Realisasi Investasi 2022 (Rp. Miliar)	Rencana Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar)		
		2024	2025	2026
Palopo	3.461,750	5.497,536	6.149,170	6.787,772
Luwu	6.465,200	10.267,255	11.484,254	12.676,913
Luwu Utara	4.374,290	6.946,722	7.770,132	8.577,073
Luwu Timur	7.027,050	11.159,518	12.482,278	13.778,584
Tana Toraja	2.677,830	4.252,608	4.756,679	5.250,668
Toraja Utara	3.840,820	6.099,529	6.822,519	7.531,049
Total Investasi	**27.846,940**	**44.223,168**	**49.465,032**	**54.602,058**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2022, diolah Tahun 2023

BAB VII
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun dalam menjamin pencapai tujuan dan sasaran RPD dalam kurun waktu 2024 – 2026. Pembahasan pada Bab ini tidak terlepas dari permasalahan dan isu strategis yang dikemukakan pada bab IV dan serta tujuan, sasaran dan arah pembangunan wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana yang diuraikan pada pada Bab V dan Bab VI sehingga dapat dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan penjabaran sebagai berikut.

7.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Arah pembangunan Tahun keempat (2020 -2025) dalam RPJPD provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 – 2025 menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2024 – 2026, mengingat bahwa periode tahun keempat beririsan dengan tahun perencanaan RPD Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Arah pembangunan pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan periode keempat (2020 – 2025) untuk setiap Misi Pembangunan terlihat pada tabel berikut.

Tabel VII. 1.
Misi dan Kebijakan Prioritas RPJPD Sulawesi Selatan 2005-2025
Tahun keempat (2020 – 2025)

No	Misi		Kebijakan Prioritas Keempat (2020-2025)
1	Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan”	1.	Akselerasi dukungan pemerintah Provinsi pada kabupaten dengan capaian pembangunan manusia yang berada di bawah rata-rata provinsi;
		2.	Penerapan standar pelayanan minimal pada semua jenjang pendidikan;
		3.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif, efisien dan inovatif;
		4.	Perwujudan standar pelayanan kesehatan dengan pelaksanaan yang konsisten pada semua pihak;
		5.	Pengelolaan RSU Daerah dan Unit Pelayanan Kesehatan yang professional dan berstandar tinggi;
		6.	Peningkatan daya saing tenaga kerja dengan memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga-lembaga pendidikan keterampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat
		7.	Pengembangan wirausaha perdesaan; Peningkatan wawasan kebangsaan, integritas diri, serta pembinaan mental dan spiritual pemuda; (8) Peningkatan pembibitan, pembinaan dan minat

No	Misi		Kebijakan Prioritas Keempat (2020-2025)
			olahraga yang dilakukan secara sistematis dan terpadu;
		8.	Peningkatan kualitas peran serta perempuan dan pengarusutamaan gender dalam penyusunan, pelaksanaan dan penerimaan manfaat dari kebijakan pemerintah daerah serta mendukung akses secara nasional;
		9	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perdagangan perempuan (*trafficking*), serta penerapan peraturan perundangan-undangan terkait secara baik;
		10	Peningkatan kordinasi pembinaan keluarga berencana;
		11	Pengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian serta menjamin adanya perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta bagi pelaku seni dan budaya;
		12	Penguatan peran perguruan tinggi dan lembaga budaya/organisasi kesenian tradisional sebagai ujung tombak upaya-upaya penggalian dan pengembangan nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan;
		13	Fasilitasi organisasi keagamaan, forum kerukunan antar ummat beragama, dan tokoh-tokoh agama, sehingga dapat melaksanakan fungsi dan perannya dalam meningkatkan penghayatandan dan pengamalan agama secara baik
		14	Peningkatan kesadaran ummat beragama untuk tidak mudah terprovokasi dalam menerima ajaran agama yang sesat, penghasut dan perusuh
2	Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar	1.	Pengembangan situasi kondusif bagi aktivitas kelompok/organisasi masyarakat yang bergerak dalam kehidupan sosial-budaya;
		2.	Pergeseran struktur perekonomian menuju perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) dan teknologi;
		3.	Pemeliharaan iklim investasi yang baik, termasuk fasilitasi ketersediaan tanah bagi investasi pada berbagai bidang;
		4.	Pemeliharaan tatanan kehidupan sosial yang kondusif dan tanggap terhadap berbagai kerawanan dan kerentanan sosial;
		5.	Fasilitasi pengembangan science-park dan techno-park;
		6.	Fasilitasi terwujud-nya masyarakat melek iptek antara lain melalui upaya pengenalan iptek sejak dini pada generasi muda;
		7.	Pembinaan dan pengembangan desa adat dan komunitasnya;
		8.	Peningkatan kordinasi antar kabupaten/kota

No	Misi		Kebijakan Prioritas Keempat (2020-2025)
			dalam pencapaian target-target pembangunan nasional;
3	Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif	1.	Pengembangan sistem pengamanan dan perlindungan masya-rakat secara swakarsa pada tataran desa/kelurahan yang sepenuhnya di bawah bimbingan pemerintah desa/kelurahan serta dibina secara teknis oleh aparat keamanan setempat;
		2.	Pengembangan sistem deteksi dini potensi konflik sosial;
		3.	Penyelenggaraan agenda reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola kepemerintahan yang baik;Penyelenggaraan agenda reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola kepemerintahan yang baik.
		4.	Penertiban pengelolaan keuangan dan asset daerah;
		5.	Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan bahwa basis profesi-onalisme adalah kompetensi dan kapasitas belajar yang di dasarkan pada etika dan moral yang tinggi
4	Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan social ekonomi yang berkeadilan	1.	Pengembangan jalur-jalur pemerataan dalam hal peluang kerja dan peluang usaha;
		2.	Pengembangan sistem upah kerja yang mendorong peningkatan pendapatan pekerja;
		3.	Penajaman implementasi program pada kabupaten/kota yang angka kemiskinannya paling tinggi;
		4.	Pelibatan secara efektif dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab sosial korporasi;
		5.	Pelibatan multipihak dalam penanganan keamanan pangan;
		6.	Penguatan akses pasar dengan daya saing harga yang tinggi bagi produk petani, peternak dan nelayan;
		7.	hilirisasi produk unggulan untuk pengembangan industri strategis;
		8.	Pengembangan kerjasama regional dan promosi perdagangan;
		9	Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan khususnya pada jalur interkoneksi antar wilayah yang penggunanya sudah sangat padat;
		10.	Pengembangan jaringan transportasi kereta api dalam mengakselerasi pereknomian Sulawesi Selatan dan lintas Sulawesi;
		11.	Pengembangan sarana-prasarana pelabuhan yang dapat mengakselerasi posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat interkoneksitas logistic di kawasan

No	Misi		Kebijakan Prioritas Keempat (2020-2025)
			timur Indonesia
		12.	Pengembangan sumber energi listrik alternatif (PLTMH, energi bayu) terbarukan;
		13	Pengelolaan pertambangan berorientasi pengolahan secara berkelanjutan;
		14	Fasilitasi berkembangnya kota cerdas (*smart city*) di Sulawesi Selatan;
		15	Penataan komprehensif terhadap pemanfaatan berbagai sumber daya air terutama dalam menjamin keberlanjutan keterpenuhan kebutuhan air perkotaan;
		16	Perlindungan terhadap lahan pangan berkelanjutan melalui mekanisme insentif dan disinsentif;
		17	Pemanfaatan secara lestari atas lahan pangan berkelanjutan;
		18	Kordinasi kabupaten/ kota dalam perlindungan lahan pangan berkelanjutan;
		19	Pemberian fasilitasi bagi investasi sektor swasta pada kawasan andalan cepat tumbuh/kawasan wilayah terpadu;
		20	Pemberian fasilitasi bagi investasi sektor swasta pada kawasan andalan cepat tumbuh/kawasan wilayah terpadu;
		21	Pengembangan kerjasama dan sinergi pembangunan antar provinsi pada wilayah perbatasan;
		22	Pengendalian pencemaran melalui pemantauan terhadap kondisi tanah, air dan udara, penerapan standar pengelolaan lingkungan pada kawasan-kawasan yang peka terhadap kerusakan lingkungan, implementasi rekomendasi Amdal terhadap penyelenggaraan proyek pembangunan, dan penegakan hukum lingkungan yang konsisten;
		23	Fasilitasi dan kordinasi antar kabupaten/kota dalam pemeliharaan dan pemulihan kondisi ekologis daerah aliran sungai serta danau dan kawasan pesisir;
		24	Peningkatan kapasitas multipihak dalam pelaksanaan pencegahan, penyelamatan, dan perbaikan kerusakan lingkungan;
		25	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta stakeholder masyarakat dan swasta dalam deteksi dini bencana, penanganan saat bencana dan pemulihan pasca bencana;
		26	Fasilitasi pengembang-an kota cerdas dan masyarakat kota berbasis pengetahuan (*knowledge based society*);

No	Misi		Kebijakan Prioritas Keempat (2020-2025)
		27	Dukungan pengembangan interaksi perdesaan-perkotaan serta pertumbuhan kawasan agropolitan dan minapolitan.
5	Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional	28.	Penggalian dan revitalisasi nilai-nilai serta kearifan lokal kebaharian serta mempromosikannya dalam kancah jagad maritim nusantara;
		29.	Revitalisasi dan penguatan jalur-jalur perkapalan/pe-layaran niaga BugisMakassar dalam mendukung pergerakan logistic nusantara
		30.	Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam kelautan melalui perumusan tata ruang kawasan pesisir dan laut yang diarahkan untuk mendukung ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pada pulau-pulau di Sulawesi Selatan;
		31.	Pemberian dukungan kepada kekuatan pertahanan dan keamanan nasional dalam operasi strategis pertahanan dan keamanan NKRI.

Sumber: Perubahan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025

7.1.1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dapat dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab V, perlu dirumuskan strategi pembangunan daerah yang konsisten dan berkesesuaian dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Perumusan strategi pembangunan daerah diharapkan menjadi arahan dan pedoman (*guideline)* dalam menetapkan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah uang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah 9RPD) Tahun 2024-2026 telah dirumuskan dan ditetapkan 12 (Dua Belas) strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan,evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang mampu memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas;
2. Meningkatkan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanaan publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan;
4. Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja termasuk penyandang disabilitas di berbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
5. Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Meningkatkan iklim investasi dan usaha;

7. Meningkatkan pendapatan, kualitas sumber daya manusia serta pemerataan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dalam upaya mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dan kantong-kantong kemiskinan;
8. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat termasuk pendidikan inklusi;
9. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat;
10. Meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial;
11. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Adapun tujuan, sasaran dan strategi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel VII.2 berikut.

Tabel VII. 2.
Tujuan Sasaran dan Strategi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026

Tujuan		Sasaran		Strategi	
1.	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan,evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang mampu memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas
		2.	Optimalnya Kualitas pelayanan publik	2.	Meningkatkan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanaan publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi
2.	Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata	3.	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	3.	Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan
3	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	4.	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	4.	Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja termasuk penyandang disabilitas di berbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
		5.	Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	5.	Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan

Tujuan		Sasaran		Strategi	
			yang berkualitas		ekonomi kreatif
				6.	Meningkatkan iklim investasi dan usaha
		6.	Menurunnya Angka kemiskinan	7.	Meningkatkan pendapatan, kualitas sumber daya manusia serta pemerataan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dalam upaya mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dan kantong-kantong kemiskinan
		7.	Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	8.	Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat termasuk pendidikan inklusi
				9.	Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat
		8.	Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	10.	Meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial
				11	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak
4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana	9.	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	12.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

7.1.2. Arah kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dalam mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dan turunan dari strategi. Perumusan arah kebijakan pembangunan daerah disusun setiap tahunnya dan akan dilaksanakan selama periode RPD (2024-2026). Perumusan arah kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan gambaran keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan disusun untuk periode perencanaan 2024 - 2026 sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Untuk melihat keterkaitan dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 disajikan pada table VII.3 berikut.

Tabel VII.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026

Tujuan/Sasaran			Indikator Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan 2024	Arah Kebijakan 2025	Arah kebijakan 2026
Tujuan 1	**Mengoptimalkan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel**		**1**	**Indeks Reformasi Birokrasi**					
	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan,evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang mampu memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas	Peningkatan sistem manajemen organisasi pemerintahan dan manajemen SDM Aparatur	Peningkatan kompetensi dan kinerja ASN berdasarkan kebutuhan organisasi	Pemantapan manajemen organisasi pemerintahan, kompetensi dan kinerja ASN
							Peningkatan tata kelola dan kinerja pemerintah daerah	Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan	Pemantapan tata kelola dan kinerja pemerintahan dan penatausahaan kinerja keuangan
							Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel	Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel	Pemantapan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel
	2.	Optimalnya kualitas pelayanan Publik	3	Indeks Layanan Publik	2.	Meningkatkan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanaan publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Peningkatan penyediaan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanaan publik berbasis teknologi informasi yang didukung oleh keamanan informasi	Peningkatan kualitas data, informasi dan keterbukaan informasi berbasis teknologi informasi yang didukung oleh keamanan informasi digital serta pengembangan inovasi	Penguatan akses dan kualitas data, informasi dan keterbukaan informasi public yang didukung oleh peningkatan keamanan informasi digital.

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan 2024	Arah Kebijakan 2025	Arah kebijakan 2026
Tujuan 2	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata**	**4**	**Indeks Williamson**					
	3. Meningkatnya aksesibilitas Infrastrktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	3.	Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan memenuhi standar GESI (Gender Equality and Social Inclusion)	Peningkatan keterjangkauan terhadap layanan infrastruktur yang berkualias memenuhi standar GESI (Gender Equality and Social Inclusion)	Pemerataan dan mempertahankan kualitas layanan infrastruktur yang berkualitas memenuhi standar GESI (Gender Equality and Social Inclusion)
Tujuan 3	**Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Secara Merata**	**6**	**PDRB Perkapita ADHB**					
		7	**Gini Rasio**					
	4. Meningkatnya kulaitas dan penyerapan tenaga kerja	8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.	Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja termasuk penyandang disabilitas di berbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja serta kesejahteraan tenaga kerja termasuk bagi penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas dan partisipasi Angkatan kerja di berbagai bidang pembangunan termasuk bagi penyandang disabilitas	Pemantapan kualitas produktivitas tenaga kerja di berbagai bidang pembangunan serta kualitas kompetensi tenaga kerja dengan pemberdayaan angkatan kerja, pelatihan canaker dan instruktur, serta kompensasi yang layak termasuk bagi penyandang disabilitas
	5. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas	9.	Pertumbuhan ekonomi	5.	Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan pengembangan potensi komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan	Peningkatan kualitas produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan	Peningkatan kualitas produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, serta

Tujuan/Sasaran			Indikator Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan 2024	Arah Kebijakan 2025	Arah kebijakan 2026
							potensi wilayah	perikanan, serta pariwisata	pariwisata dan mendorong akses pemasaran yang lebih luas
					6.	Meningkatkan iklim investasi dan usaha	Peningkatan nilai investasi melalui promosi potensi daerah	Mendorong peningkatan persebaran investasi ke daerah yang belum berkembang; peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan/insentif penanaman modal di daerah	Penguatan kelembagaan mendukung industri yang berbasiskan teknologi, inovasi; menguatkan kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM berbasis sektor unggulan wilayah; penguatan Kerjasama Antar Daerah dalam mendorong penanaman modal yang berkelanjutan; peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan/insentif penanaman modal di daerah
	6.	Menurunnya Angka Kemiskinan	10	Angka Kemiskinan	7.	Meningkatkan pendapatan, kualitas sumber daya manusia serta pemerataan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dalam upaya mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dan kantong-kantong kemiskinan	Peningkatan kualitas database masyarakat miskin dan pendampingan pemberian bantuan sosial tepat sasaran dan mendekatkan layanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat Miskin	Peningkatan kualitas SDM masyarakat miskin, penguatan pemberdayaan masyarakat, pemberian kemudahan akses usaha dan pasar berbasis potensi local serta peningkatan kualitas layanan dasar kepada masyarakat miskin	Pemantapan kapasitas dan kualitas SDM masyarakat miskin yang mendorong kemandirian yang didukung oleh pemantapan kualitas layanan dasar bagi masyarakat miskin.

Tujuan/Sasaran			Indikator Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan 2024	Arah Kebijakan 2025	Arah kebijakan 2026
							Rehabilitasi sarana prasarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti dan Peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial	Mendorong kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga keterampilan untuk kemandirian PPKS dan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin melalui dukungan berbagai sektor	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga keterampilan untuk kemandirian PPKS, peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin melalui dukungan berbagai sektor serta pemberian layanan perlindungan sosial yang tepat sasaran
	7.	Meningkatnya Kualitas SDM yang kompetitif dan inklusif	11	IPM	8.	Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat termasuk pendidikan inklusi	Peningkatan akses dan Kualitas Pendidikan menengah, khusus dan vokasi termasuk pendidikan inklusi terutama bagi masyarakat rentan	Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis IT dengan pendekatan yang adaptif dan merata serta memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas	Penguatan dan pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan dan tata kelola pendidikan menengah, khusus dan vokasi yang responsive disabilitas
							Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan kualitas pendidikan	Penguatan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan kualitas pendidikan	Peningkatan sinergi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan
					9.	Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan sarana/ prasarana dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang Inklusif	Peningkatan pemerataan dan kualitas akses pelayanan kesehatan dengan (1) Pemenuhan sarana prasarana; (2) Pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standart melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi

Tujuan/Sasaran			Indikator Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan 2024	Arah Kebijakan 2025	Arah kebijakan 2026
								secara bertahap dan menyeluruh termasuk SDM Kesehatan mental dan disabilitas; (3) Penyusunan kebijakan dan perbaikan baseline data	
							Peningkatan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting	Perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting	Perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan
	8.	Meningkatnya kualitas dan kesetaraan gender dalam pembangunan	12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	10.	Meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial	Penguatan pelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas pelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas penyelenggaraan PUG di seluruh tahapan pembangunan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan,pemantauan, evaluasi, pelaporan) pembangunan daerah
							Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi	Peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi	Peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi
							Peningkatan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal,	Peningkatan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal,	Peningkatan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal, termasuk bagi

Tujuan/Sasaran			Indikator Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan 2024	Arah Kebijakan 2025	Arah kebijakan 2026
							termasuk bagi kelompok rentan	termasuk bagi kelompok rentan	kelompok rentan
					11.	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak	Peningkatan cakupan pemenuhan hak dan perlindungan anak di seluruh sektor pembangunan	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak di seluruh sektor pembangunan	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak di seluruh sektor pembangunan
Tujuan 4	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan**		**13**	**IKLH**					
	9.	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	14	Potensi Penurunan Emisi GRK	12.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Peningkatan pengelolaan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan secara berkelanjutan dan berkeadilan	Pemantapan pengelolaan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan secara berkelanjutan dan berkeadilan	Pemantapan pengelolaan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan secara berkelanjutan dan berkeadilan
							Peningkatan kualitas air, udara dan air laut serta upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas air, udara dan air laut serta upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas air, udara dan air laut serta upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Tujuan/Sasaran			Indikator Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan 2024	Arah Kebijakan 2025	Arah kebijakan 2026
							Peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, termasuk kelompok rentan,serta implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim,	Pemantapan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, termasuk kelompok rentan, serta implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	Penguatan koordinasi antar stakeholder dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim termasuk kelompok rentan, serta implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim

7.2. Tema Pembangunan dan Program Prioritas

Program prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 merupakan program-program yang dapat yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 sekaligus pencapaian visi misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025. Selain itu program prioritas yang telah dirumuskan dan ditetapkan telah memperhatikan permasalahan dan isu strategis. Adapun tema dan prioritas pembangunan daerah serta program prioritas Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026, selanjutnya pada penjelasan berikut.

7.2.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah

Adapun Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

Tema Pembangunan Tahun 2024: **"Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang inklusif"** untuk mewujudkan tema tersebut maka prioritas pembangunan diarahkan pada :

a. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
b. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
c. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
d. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata
e. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Tema Pembangunan Tahun 2025: "**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing".**

Tema Pembangunan Tahun 2026: "**Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan dan Sumberdaya Manusia Kompetitif"**

7.2.2 Program Prioritas

Program Prioritas merupakan program yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mendukung pencapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2026 yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Program prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024- 2026 beserta indikator kinerja disajikan pada tabel VII.4 berikut.

Tabel VII.4
Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I.	**Tujuan : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel**	**Indeks reformasi birokrasi**	Indeks	B (66,16)	B (67,31)		B (68,76)		BB (70,21)		
	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ Angka	B (68,08)	B (68,52)		B (69,27)		BB (70,03)		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	Persentase	50	50	7.138.408.136	75	11.178.156.337	100%	12.401.631.470	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	Persentase	50	50		75		100%		
		Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase	100	100		100		100%		
		Jumlah Akreditasi Program Pelatihan	Sertifikat	5 Sertifikat	6 Sertifikat		7 Sertifikat		8 Sertifikat		
2	PROGRAM	Persentase	Persentase	63	65	3.757.028.224	65,3	4.320.582.457,60	65,6	4.968.669.826	Badan

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	KEPEGAWAIAN DAERAH	pemenuhan kebutuhan ASN									Kepegawaian Daerah
		Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta	Persentase	90	85		86		87		
		Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	Persentase	93	93		94		95		
3	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	Persentase	100	100	2.983.716.666	100	4.638.872.313	100	5.376.672.313	Biro Organisasi
4	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD terhadap RKPD	Persentase	97	100	5.375.311.800	100	5.962.408.574	100	5.996.279.540	Bappelitbangda
		Persentase Konsistensi Program RKPD terhadap APBD	Persentase	100	100		100		100		
		Rata-rata capaian kinerja program Prioritas Pembangunan daerah	Angka	90,03	91		92		93		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase	76,29	81	20.349.001.000	82	21.659.135.903,35	83	22.268.888.087,54	Inspektorat Daerah
		Persentase penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis	Persentase	69	74		75		76		

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Kabupaten/ Kota									
		Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat	Persentase	100	100		100		100		
6	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi perangkat daerah yang terintegrasi	Persentase	44	50	4.481.191.661	55	5.597.775.790	60	5.932.751.030	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
		Persentase Unit kerja yang terkoneksi jaringan internet intra pemerintah Sulawesi Selatan	Persentase	41	44		45		47		
	Sasaran 2: Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Layanan Publik	Indeks	A-(4,10)	A- (4,01 – 4,50)		A- (4,01 – 4,50)		A(4,51-5,00)		
7	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik	Nilai	Belum dilakukan pengukuran	40	12.181.658.320	45	15.534.677.733	50	16.353.083.557	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	Persentase	80	92	1.550.000.000	93	1.736.000.000	95	1.770.720.000	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
9	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentasi hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah	Persentase	Belum dilakukan pengukuran	30	5.509.149.450	40	6.483.342.998	50	7.051.084.930	Bappelitbangda
		Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi dan teknologi	Persentase	11,32	13		15		16		
II	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata**	**Indeks Williamson**	Indeks	0,687	0,670		0,662		0,653		

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Sasaran 3. Meningkatnya aksesibilitas Infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	80,39	81,97		82,34		82,73		
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase	71,95	76,00	649.700.000.000,00	77,00	685.947.214.566,88	78,00	691.647.800.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
11	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas daerah jaringan irigasi yang direhabilitasi	Ha	3.638	6.046	133.524.992.587,77	6.445	141.876.743.933,08	6.138	139.112.170.413,12	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang
		Cakupan pembinaan pengelolaan SDA	Persentase	100	100		100		100		
12	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang beroperasi dan terpelihara	Persentase	100	100	12.590.000.000	100	17.790.000.000	100	17.790.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah penumpang melalui pelabuhan	Orang	1.418.985	1.779.975		1.950.253		2.120.531		
13	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISRIKAN	Persentase rumah tangga berlistrik	Persentase	98,20	100	5.025.429.733	100	9.110.934.518	100	11.119.174.431	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPM)	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (SPM)	Persentase	92	100	84.200.000.000,00	100	82.384.973.672,34	100	81.800.000.000,00	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang
		Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum kewenangan provinsi (SPM)	Persentase	50	100		100		100		
15	PROGAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (SPM)	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air sanitasi layak (SPM)	Persentase	92,2	95	152.895.565,00	96	155.236.363,82	97	156.640.841,67	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang
		Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik	Persentase	0	100		100		100		

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		kewenangan provinsi (SPM)									
16	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh tertangani Kewenangan Provinsi	Persentase	25,39	5,18	7.621.139.954	11,39	9.122.382.791	19,67	10.773.749.911	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
17	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Persentase Rumah tangga dengan akses air minum layak pada kawasan permukiman	Persentase	100%	26,67	18.300.000.000	33,33	35.415.000.000	40,00	37.591.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Persentase drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman	Persentase	92,35	25,71		31,43		42,86		
		Persentase Jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman	Persentase	80	16,67		38,33		45,00		
18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (SPM)	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni(SPM)	Persentase	100	100	4.750.000.000	100	5.300.000.000	100	5.705.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
		Persentase warga Negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layah huni	Persentase	100	100		100		100		
III.	**Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara**	**PDRB Perkapita ADHB**	**Rp.**	**62,43**	**70,7**		**74,55**		**78,4**		
		Gini rasio	**Angka**	**0,365**	**0,361**		**0,356**		**0,352**		

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	merata										
	SASARAN 4 : MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR UNGGULAN DAERAH DAERAH	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	4,51	4,24		4.03		3,83		
19	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Persentase	3.48	4,41	694.828.564	4,92	759.828.564	5,21	889.815.064	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase daya serap tenaga kerja	Persentase	58,17	59,21		60,35		62,5		
20	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	0,24	0,27	3.280.000.000	0,29	3.800.000.000	0,31	4.400.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olah raga
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Persentase	3,81	4,00		4,20		4,40		
21	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	Persentase	83.33	85	3.720.000.000	90	3.870.000.000	92	4.055.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	Persentase	100	100		100		100		
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM dan Wirausaha yang memiliki TK >3	Persentase	3	10%	3.500.000.000	13%	4.025.000.000	15%	4.628.750.000	Dinas Koperasi dan UMKM
	Sasaran 5: Meningkatnya pertumbuhan	Pertumbuhan Ekonomi	persentase	5,09	5,31 – 6,71		5,67 – 6,82		5,71-6,91		

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	perekonomian daerah yang berkualitas										
23	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rupiah	11.813.500.000	11.933.560.000	20.618.000.000	11.960.232.411	30.600.600.000	11.991.430.000	34.323.754.548	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	436.735,716	442.959,6		451.818,7		460.855,1		
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persentase	27,39	29		30		31		
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	Persentase	29,43	30,62		31,23		31,86		
		Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	Persentase	68,42	84,21		89,47		100		
24	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Rupiah	21.712.560.000	21.850.160.000	8.068.000.000	22.187.160.000	11.389.500.000	22.530.900.000	12.397.925.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.095.934,66	4.331.299,7		4.417.925,7		4.506.284,3		
		Persentase ketersediaan benur berkualitas	Persentase	78,51	85		90		95		
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	3,53	2	201.107.467.508,00	2	235.948.255.908,38	2	246.118.587.470,38	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	-5,22	2		2		2		
		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase	-6,9	2		2		2		

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rupiah	154.730.214.500	56.290.226.087		56.301.484.133		56.312.744.429		
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi	Persentase	-2,03	1,16	6.600.000.000	1,18	10.960.000.000	1,20	12.561.000.000	Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Pedaging	Persentase	-6,98	2,12		2,16		2,20		
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Ras Petelur	Persentase	0,54	2,73		2,81		2,90		
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak Perah	Persentase	-0,23	2,23		2,30		2,37		
26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Produksi ikan konsumsi yang dipasarkan	Rupiah	355.500.000	391.940.000	1.680.000.000	411.540.000	2.815.000.000	432.110.000	3.237.250.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi olahan ikan	Ton	5.911,6	6.150,43		6.273,44		6.398,91		
		Persentase pengujian mutu produk perikanan	Persentase	69,05	100		100		100		
27	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan industri	Persentase	7	7,5	13.000.000.000	8	15.950.000.00	8,5	17.800.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdaganagn
28	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPORT	Nilai Ekspor Perdagangan	US $	2.358.936.319	1.967.433.973	540.000.000	2.262.549.068,38	2.540.000.000	2.601.931.428,63	2.940.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	Persentase	0,62	0,62	2.051.144.000	0,62	2.139.309.000	0,62	2.222.244.389,46	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
30	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Omset Usaha Bagi Pelaku UMKM	Persentase	10	10	3.560.556.305,50	10	4.710.056.306	10	5.416.564.751,56	Dinas Koperasi dan UMKM
	Sasaran 6 : Menurunnya Angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	Nilai	8,63	8,31		8,20		8,09		
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial dari yang ditargetkan	Persentase	100	100	2.811.995.700	100	3.078.896.524	100	2.882.239.109	Dinas Sosial
32	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana terhadap luasan lahan pertanian	Poin	0,0073	0,0076	62.500.780.000	0,0080	73.608.000.000	0,0084	76.888.279.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan
		Nilai Produksi Hasil ternak	Rupiah (Juta)	9.689.799	10.248.954	4.320.000.000	10.664.347	8.210.000.000	11.079.740	9.560.000.000	Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan
33	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) Kelompok Tani Hutan	Persentase	Belum dilakukan pengukuran	1,75	1.157.120.000	2,6	2.657.920.000	2,81	4.057.920.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
34	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Dokumen Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang Diterbitkan	Persentase	100	100	1,448,810,700	100	2,032,841,721	100	1,574,857,231	Dinas sosial
		Persentase Potensi	Persentase	100	100		100		100		

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		SumberKesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)									
35	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL(SPM)	Persentase pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi tuna sosial dalam panti	Persentase	100	100	4.197.590.238	100	4.447.398.524	100	4.572.302.666	Dinas Sosial
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebuthan dasarnya dalam panti (SPM)	Persentase	100	100		100		100		
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebuthan dasarnya dalam panti (SPM)	Persentase	100	100		100		100		
		Persentase penyandang lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebuthan dasarnya dalam panti (SPM)	Persentase	100	100		100		100		
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebuthan dasarnya dalam panti (SPM)	Persentase	100	100		100		100		
	Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas SDM yang kompetitif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,82	73,99		74,49		74,98		

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	dan inklusif										
36	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah warga negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	Persentase	83,68	100	1.019.926.490.735,00	100	1.025.442.490.735,00	100	1.024.655.690.735,00	Dinas Pendidikan
		Persentase jumlah warga negara usia 14 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (SPM)	Persentase	82,73	100		100		100		
		Persentase siswa/i SMA/ SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	Persentase	92,68	89,25		91,00		92,75		
		Persentase siswa/i SMA / SMK yang bebas Narkoba	Persentase	99,97	95,38		96,86		98,34		
37	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	% Pemenuhan SDMK Berkualitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase	83,94%	85%	700.000.000	86%	700.000.000	87%	700.000.000	Dinas Kesehatan
38	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (SPM)	% Rumah Sakit yang Terakreditasi	Persentase	80%	85%	133.132.133.372	90%	200.945.883.372	95%	201.744.521.099	Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Persentase	100%	100%		100%		100%		
		Persentase penduduk	Persentase	100%	100%		100%		100%		

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)									
		% Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi	Persentase	94,3%	95%		96%		97%		
		% Anak Berusia Dibawah Lima Tahun (Balita) Gizi Kurang yang Mendapat Tambahan Asupan Gizi	Persentase	82,42%	90%		90,5%		91%		
		Cakupan Kunjungan Lengkap Ibu Hamil (K6)	Persentase	72,75%	75%		76%		77%		
		Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	Persentase	96,32%	97%		98%		99%		
		Angka Kematian Akibat Penyakit Menular	Per 100.000/Penduduk	11/100.000 Penduduk	10/100.000 Penduduk		9,5/100.000 Penduduk		9/100.000 Penduduk		
		% Penduduk sesuai Kelompok Usia yang	Persentase	70%	90%		90%		95%		

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		dilakukan Skirining Penyakit Tidak Menular									
39	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi olah raga	Persentase	3,17	3,20	111.933.641.696	2,00	217.667.533.565	3,00	444.412.533.565	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	Persentase	30	45		75		100		
	Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		92,85 (2021)	93,65		93,78		93,90		
40	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pemenuhan Indikator Prasyarat PUG di Tingkat Provinsi	Persentase	Belum dilakukan pengukuran	65	895.961.700	70	1.050.000.000	75	1.250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase ARG di Tingkat Provinsi	Persentase	37	40		43		45		
		Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg terstandarisasi	Persentase	25	35.5		36		36.5		
41	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase Kab/Kota yg berpredikat KLA (Kab/Kota Layak Anak)	Persentase	83.33	87.5	472.705.000	91.66	645.000.000	95.83	810.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
42	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	Persentase	37.5	54.16	565.092.400	58.33	575.092.400	62.5	750.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
IV.	**Tujuan:Meningkatkan kualitas lingkungan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Poin**	**72,63**	**73,57**		**73,62**		**73,72**		

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	hidup secara berkelanjutan	**(IKLH)**									
	Sasaran 9: Terpeliharanya kulitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Juta ton CO2 eq	1,360.000	1.823.583		2.075.597		2.356.390		
43	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	persentase	13,97	21,15	6.028.375.000,00	28,23	6.013.510.000,00	35,23	8.111.824.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi	persentase	11,85	11,91		11,97		12,02		
		Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	persentase	0,030	0,029		0,028		0,027		
		Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	persentase	3,28	3,57		3,63		3,74		
44	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (DISNAK)	Persentase Kelompok Tani/Ternak Yang Mendapatkan Diseminasi Penyuluhan dan Pemberdayaan	Persentase	1,13	100	1.200.000.000	100	1.890.000.000	100	2.364.670.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
45	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Penurunan emisi GRK sektor energi	Persentase	1	1,3	1.647.623.888	1,4	2.859.991.600	1,5	3.131.989.920	Dinas Energi Sumberdaya Mineral
46	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Penurunan emisi GRK sektor transportasi	Ton Co2 eq	308.537	334.728	16.125.000.000	364.193	22.775.000.000	396.931	23.250.000.000	Dinas Perhubungan
		Cakupan fasilitas	Persentase	3	5		6		7		

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	ANGKUTAN JALAN	keselamatan jalan di ruas jalan Provinsi									
		Jumlah penumpang melalui terminal	Orang	500.981	628.431		688.548		748.666		
		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Persentase	72	33,78		35,27		37		
47	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Perluasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Ha	569.269,53	816.593,22		822.559,65		847.122,4		
		Jumlah produksi garam rakyat	Ton	3.387,78	5	9.010.000.000	6	10.916.000.000	6.9	12.553.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan	Persentase	18	20		22		24		
48	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Potensi Penurunan Emisi GRK sektor persampahan dan limbah	Ton CO2eq	14.135,36	15.258	3.800.000.000	16.436	3.650.000.000	17.697	3.650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
49	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase	54,48	55	1.500.000.000	57	800.000.000	58	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
50	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	Persentase	100	100		100		100		
		Persentase tanggap darurat bencana yang tertangani	Persentase	100	100	8.065.050.000	100	9.189.395.842	100	9.896.989.745	BPBD
		Persentase dokumen kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	Persentase	100	100		100		100		
		Persentase aparat	Persentase	100	100		100		100		

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		kesiapsiagaan yang terlatih									

BAB VIII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

8.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pada dasarnya struktur keuangan pemerintah daerah hampir sama dengan struktur keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah.

Kerangka pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk tiga tahun ke depan periode RPD Provinsi Sulawesi Selatan. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan target dan pendanaan program. Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun ke depan tahun 2024-2026 tergambar pada Table VIII.1

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan tabel VIII.1 untuk tahun 2024 sampai 2026 berdasarkan hasil proyeksi diasumsikan akan mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2022 dan tahun 2023 hal ini diakibatkan karena adanya penurunan pada penerimaan pajak daerah, namun demikian pada tahun 2025 dan tahun 2026 akan mengalami kenaikan , hal ini disebabkan karena semakin membaiknya penerimaan pajak Dearah, sehingga berpengaruh pada pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut ditandai dengan besarnya Kontribusi Pajak Daerah terhadap kelompok PAD selama tahun 2024-2026 yaitu sebesar 82,68 persen.

Adapun Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang diproyeksikan pada tahun 2024 sebesar Rp. 10,912 Trilliun mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp.11,357 Trilliun, demikian juga pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp. 11,962 Trilliun.

Dari sisi belanja, pada tahun 2024 sebesar Rp. 10,912 Trilliun dan tahun 2025 sebesar Rp. 11,357 Trillliun atau mengalami peningkatan sebesar 4,07 %. Sedangkan belanja pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 11,962 Trilliun atau mengalami peningkatan sebesar 5,3 % jika dibanding dengan tahun 2025. Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut, dapat dirumuskan kerangka pendanaan keuangan daerah Sulawesi Selatan untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Struktur Belanja Tahun Anggaran 2024-2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut:

Tabel VIII.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026
Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	URAIAN	PROYEKSI		
		TA. 2024	TA. 2025	TA. 2026
1	2	3	4	5
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**10.912.679.207.440**	**11.357.515.009.986**	**11.962.846.937.870**
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**6.497.361.771.519**	**6.854.927.042.262**	**7.349.098.161.038**
4.1.1	Pajak Daerah	5.415.628.360.999	5.710.843.480.425	6.173.742.825.501
4.1.2	Retribusi Daerah	53.887.328.206	55.353.734.092	56.460.808.774
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	164.289.817.321	168.760.544.726	172.135.755.621
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	863.556.264.993	919.969.283.019	946.758.771.143
4,2	**Pendapatan Transfer**	**4.407.606.731.040**	**4.494.667.435.721**	**4.605.669.834.189**
4.2.1	**Dana Perimbangan**	**4.353.035.234.040**	**4.440.095.938.721**	**4.551.098.337.189**
4.2.1.1	**Dana Transfer Umum**	**2.840.843.067.240**	**2.897.659.928.585**	**2.970.101.426.799**
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	265.094.137.260	270.396.020.005	277.155.920.505
4.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	2.575.748.929.980	2.627.263.908.580	2.692.945.506.294
4.2.1.2	**Dana Transfer Khusus**	**1.512.192.166.800**	**1.542.436.010.136**	**1.580.996.910.389**
4.2.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	1.512.192.166.800	1.542.436.010.136	1.580.996.910.389
4.2.2	**Dana Insentif Daerah**	**54.571.497.000**	**54.571.497.000**	**54.571.497.000**
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**7.710.704.880**	**7.920.532.003**	**8.078.942.643**
4.3.1	Hibah	7.710.704.880	7.920.532.003	8.078.942.643
5	**BELANJA DAERAH**	**10.912.679.207.440**	**11.357.515.009.986**	**11.962.846.937.870**
5.1.	**Belanja Operasi**	**6.534.710.998.016**	**5.705.310.456.652**	**5.990.310.456.652**
5.1.01	Belanja Pegawai	3.647.344.609.048	3.647.344.609.048	3.667.344.609.048
5.1.02	Belanja Barang & Jasa	2.080.997.188.169	1.942.947.978.804	2.192.947.978.804
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	782.089.200.800	90.737.868.800	105.737.868.800
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.280.000.000	4.280.000.000	4.280.000.000
5.2.	**Belanja Modal**	**1.845.877.550.666**	**2.579.569.436.205**	**2.749.262.386.193**
5.2.01	Belanja Modal	1.845.877.550.666	2.579.569.436.205	2.749.262.386.193
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	**30.000.000.000**	**40.000.000.000**	**50.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	40.000.000.000	50.000.000.000
5.4.	**Belanja Transfer**	**2.367.090.658.757**	**2.867.635.117.129**	**3.008.274.095.025**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes	2.119.627.111.757	2.600.171.570.129	2.740.810.548.025
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes	247.463.547.000	267.463.547.000	267.463.547.000
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**135.000.000.000**	**165.000.000.000**	**165.000.000.000**
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	135.000.000.000	135.000.000.000	135.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	30.000.000.000	30.000.000.000

8.2. Program Perangkat Daerah

Arsitektur perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2024-2026, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah.

Perincian pagu pendanaan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal,serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya pencapaian target-target dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang disertai dengan indikator dan terget kinerja.

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Tahun 2024-2026 terdapat 163 program perangkat daerah. Adapun program perangkat daerah dan besaran pagu indikatif setiap program dapat dilihat dalam Tabel VIII.2.

Tabel VIII.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024-2026

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Grandtotal					**10,912,679,207,440.0**		**11,357,515,009,986.0**		**11,962,846,937,870.0**		**34,233,041,155,296.0**	
1			**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					**2,365,221,131,550**		**2,512,431,005,712**		**2,532,083,101,825**		**7,409,735,239,088**	
1	**01**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**					**1,083,918,830,383.0**		**1,089,434,830,383.0**		**1,088,648,030,383.0**		**3,262,001,691,149.0**	
1	**01**	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN spm prioritas	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	%	92,65	89,25	1,019,926,490,735.00	91,00	1,025,442,490,735.00	92,75	1,024,655,690,735.00	92,75	3,070,024,672,205.0	**Dinas Pendidikan**
				Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	%	99,97	95,38		96,86		98,34		98,34		
				Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	%	83,68	100		100		100		100		**Dinas Pendidikan**
				Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional	%	na	100		100		100		100		
				Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	%	82,73	100		100		100		100		
1	01	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM prioritas	Prosentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	%	73,46	74,61	600,000,000.00	75,76	600,000,000.00	76,91	600,000,000.00	76,91	1,800,000,000.0	**Dinas Pendidikan**
				Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	%	86,26	85		86		87		87		
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	%	1 : 13	1 : 13	62,492,339,648.00	1 : 13	62,492,339,648.00	1 : 13	62,492,339,648.00	1 : 13	187,477,018,944.0	**Dinas Pendidikan**
				Persentase Guru SMA yang bersertifikat	%	52,69	53,39		54,09		54,79		54,79		
				Persentase Guru SMK yang bersertifikat	%	46,85	47,41		47,97		48,53		48,53		
1	01	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	%	94,13	100	350,000,000.00	100	350,000,000.00	100	350,000,000.00		1,050,000,000.0	**Dinas Pendidikan**
1	01	6	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN SASTRA	Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	%	45,30	46,45	550,000,000.00	47,60	550,000,000.00	48,75	550,000,000.00	48,75	1,650,000,000.0	**Dinas Pendidikan**
1	**02**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**					**211,052,833,110.0**		**273,387,373,252.0**		**275,747,795,489.0**		**760,188,001,851.0**	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas/SPM)	% Rumah Sakit yang Terakreditasi	%	80%	85%		90%		95%		95%		**Dinas Kesehatan**
				Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100%	100%		100%		100%		100%		**Dinas Kesehatan**
				Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100%	100%		100%		100%		100%		**Dinas Kesehatan**
				% Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi	%	94,3%	95%	133,132,133,372	96%	200,945,883,372	97%	201,744,521,099	97%	535,822,537,843	**Dinas Kesehatan**
				% Anak Berusia Dibawah Lima Tahun (Balita) Gizi Kurang yang Mendapat Tambahan Asupan Gizi	%	82,42%	90%		90,5%		91%		91%		**Dinas Kesehatan**
				Cakupan Kunjungan Lengkap Ibu Hamil (K6)	%	72,75%	75%		76%		77%		77%		**Dinas Kesehatan**
				Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	%	96,32%	97%		98%		99%		99%		**Dinas Kesehatan**
				Angka Kematian Akibat Penyakit Menular	Per 100.000 /Penduduk	11/100.000 Penduduk	10/100.000 Penduduk		9,5/100.000 Penduduk		9/100.000 Penduduk		9/100.000 Penduduk		**Dinas Kesehatan**
				% Penduduk sesuai Kelompok Usia yang dilakukan Skirining Penyakit Tidak Menular	%	70%	90%		90%		95%		95%		**Dinas Kesehatan**
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Darah Pada Fasilitas Kesehatan	%	79	80	9,417,000,000.0	81	9,417,000,000.0	82	9,653,000,000.0	82	28,487,000,000	**UPT Transfusi Darah**
				Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan , UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	98%	85%	7,000,000,000.00	85%	7,000,000,000.00	85%	7,000,000,000.00	95%	21,000,000,000	**UPT Lab. Kesehatan Daerah**
				Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan , Sarana, Prasarana dan Alat Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan , UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	98%									**UPT Lab. Kesehatan Daerah**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	%	91,40	100	3,858,410,850.00	100	2,875,848,568.00	100	2,008,424,232.00	100	8,742,683,650	**UPT RSK Gigi dan Mulut**
				Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	Persen	90	100	21,409,737,913.0	100	18,111,177,219.0	100	19,203,907,424.0	100	58,724,822,556.0	**RSUD Labuang Baji**
				Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam kondisi Baik	%	90,98	100%	2,681,311,649.00	100%	400,000,000.00	100%	218,263,854.00	100%	3,299,575,503.00	**RS Khusus Daerah**
				Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	%	60	61	2,746,402,616.00	62	2,807,133,069.00	63	3,270,542,983.00	100,00	8,824,078,668.00	**RSUD Haji Makassar**
				Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik	%	75%	76%	174,761,781.0	76.50%	170,000,000.0	77%	237,000,000.0	77%	581,761,781.00	**Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah**
				Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik	%	100%	100%	8,000,000,000	100%	8,050,000,000	100%	8,100,000,000	100%	24,150,000,000.00	**Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi**
				Cakupan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	%	70%	65.76%	13,752,962,364	75%	14,388,538,294	85%	14,644,423,586	85%	42,785,924,244.00	**Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat**
1	**02**	**03**	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN(Prioritas)	% Pemenuhan SDMK Berkualitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	83,94%	85%	700,000,000	86%	700,000,000	87%	700,000,000	87%	2,100,000,000	**Dinas Kesehatan**
				Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	%	100	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	150,000,000	**UPT Transfusi Darah**
				Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknisi Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	98%	90%	1,110,001,540.00	90%	1,110,001,540.00	90%	1,110,001,540.00	90%	3,330,004,620	**UPT Lab. Kesehatan Daerah**
				Prosentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	%	99,05	100	250,000,000.00	100	275,000,000.0	100	300,000,000.0	100	825,000,000	**UPT RSK Gigi dan Mulut**
				Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	Persen	65	75	550,000,000.0	80	700,000,000.0	85	950,000,000.0	85	2,200,000,000.0	**Labuang Baji**
				Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	%	62,50	70,00	4,605,869,824.0	75,00	4,721,016,570.00	80,00	4,839,041,984.00	80,00	14,165,928,378.00	**RSUD Haji Makassar**
				Persentase SDM Yang Mengikuti Pelatihan	%	0	100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	150,000,000	100%	300,000,000.00	**Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi**
				Prosentase tenaga kesehatan RSUD yang telah ditingkatkan kapasitasnya	%	89,19%	33%	144,241,201.00	12%	145,774,620.00	20%	148,668,787.00	20%	438,684,608.00	**Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat**
1	**02**	**04**	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, MAKANAN DAN MINUMAN	% Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	%	95%	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	750,000,000	**Dinas Kesehatan**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	% Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS	%	40%	50%	1,170,000,000	55%	1,170,000,000	60%	1,170,000,000	60%	3,510,000,000	**Dinas Kesehatan**
1	**03**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					**1,016,582,410,488**		**1,073,745,592,527**		**1,086,863,931,018**		**3,177,191,934,033.900**	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (Prioritas)	Luas daerah jaringan irigasi yang direhabilitasi	Ha	3.638	6046	90,694,038,513	6445	96,677,414,186.02	6138	92,771,815,262.26	18629	280,143,267,961.640	**Dinas SDA, Cipta karya dan Tata Ruang**
				Cakupan pembinaan pengelolaan SDA	%	100	100	42,830,954,074	100	45,199,329,747.06	100	46,340,355,150.86	100	134,370,638,972.332	
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	%	92	100	84,200,000,000	100	82,384,973,672.34	100	81,800,000,000.00	100	248,384,973,672.340	**Dinas SDA, Cipta karya dan Tata Ruang**
				Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum kewenangan provinsi	%	50	100		100		100		100		
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Pembinaan layanan TPA kewenangan provinsi	%	100	100	200,000,000	100	200,000,000.00	100	200,000,000.00	100	600,000,000.00	**Dinas SDA, Cipta karya dan Tata Ruang**
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Air Limbah Domistik Regional Lintas kab/Kota (SPM)	%	92.2	95	152,895,565	96	155,236,362.82	97	156,640,841.67	97	464,772,769.240	**Dinas SDA, Cipta karya dan Tata Ruang**
				Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik kewenangan provinsi	%	100	100		100		100		100		
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pembinaan layanan drainase kewenangan provinsi	%	100	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	900,000,000.00	**Dinas SDA, Cipta karya dan Tata Ruang**
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Pamerintah Yang difasilitasi	%	85	90	55,347,951,391	95	62,128,424,781.97	100	63,692,708,816.38	100	181,169,084,989.640	**Dinas SDA, Cipta karya dan Tata Ruang**
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitasi penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi	%	77.7	81.2	88,112,753,792	82.4	95,499,252,962.63	83.6	104,574,907,242.72	83.6	288,186,913,997.348	**Dinas SDA, Cipta karya dan tataruang**
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	71.95	76.00	649,700,000,000	77.00	685,947,214,566.88	78.00	691,647,800,000.00	78	2,027,295,014,566.880	**Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi**
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	90	91	1,682,189,619	92	1,756,631,894.55	93	1,801,297,259.98	93	5,240,118,773.367	**Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi**
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	%	86	91.35	3,361,627,534	92.7	3,497,114,352.95	94.05	3,578,406,444.56	94.05	10,437,148,331.114	**Dinas SDA, Cipta karya dan tataruang**
1	**04**		**Urusan Pemerintaha Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**					**31,021,139,954.0**		**50,222,382,791.0**		**54,493,749,911.0**		**135,737,272,656.00**	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (SPM)	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni(SPM)	Persen	100%	100%	4,750,000,000	100%	5,300,000,000	100%	5,705,000,000	100%	15,755,000,000	**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan**
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni(SPM)	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan**
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Prioritas)	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	Persen	25,39%	5,18 %	7,621,139,954	11, 39 %	9,122,382,791	19,67 %	10,773,749,911	50,22%	27,517,272,656	**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan**
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Prioritas	Persentase rumah tangga yang berakses air minum layak dan aman di kawasan permukiman	Persen	100%	26.67%	18,300,000,000	33,33 %	35,415,000,000	40 %	37,591,500,000	100%	91,306,500,000	**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan**
				Persentase kawasan permukiman yang terbangun drainase	Persen	na	25.71%		31,43%		42,85 %		100%		**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan**
				Persentase kawasan permukiman yang terbangun jalan lingkungan	Persen	na	16.67%		38,33 %		45 %		100%		**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan**
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persen	57,14%	7,25 %	350,000,000	14,49 %	385,000,000	21,74 %	423,500,000	43,48 %	1,158,500,000.0	**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan**
1	**05**		**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					**12,496,908,377.0**		**14,351,253,859.0**		**15,549,848,122.0**		**42,398,010,358.00**	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	%	100%	100%	Rp 4,085,000,000	100%	Rp 4,815,000,000	100%	Rp 5,206,000,000	100%	14,106,000,000.00	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	100%	100%	Rp 725,000,000	100%	Rp 835,000,000	100%	Rp 845,000,000	100%	2,405,000,000.00	
				Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	%	100	100		100		100		100		**BPBD**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	%	100	100	7,340,050,000	100	8,354,395,482	100	9,051,989,745	100	24,746,435,227.00	
				Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	%	100	100		100		100		100		
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	% Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	100%	100%	Rp 346,858,377	100%	Rp 346,858,377	100%	Rp 446,858,377	100%	1,140,575,131.00	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	**06**		**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**					**10,149,009,238.0**		**11,289,572,900.0**		**10,779,746,902.0**		**32,218,329,040.00**	
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Dokumen Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang Diterbitkan	%	100%	100%	1,448,810,700	100%	2,032,841,721	100%	1,574,857,231	100%	5,056,509,652.00	**Dinas Sosial**
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100%	100%		100%		100%		100%		**Dinas Sosial**
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	100%	100%	290,358,000	100%	307,198,764	100%	315,619,146	100%	913,175,910.00	**Dinas Sosial**
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL(SPM)	Persentase Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Tuna Sosial dalam panti	%	100%	100%	4,197,590,238	100%	4,447,398,524	100%	4,572,302,666	100%	13,217,291,428.00	**Dinas Sosial**
				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	%	100%	100%		100%		100%		100%		
				Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	%	100%	100%		100%		100%		100%		**Dinas Sosial**
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	%	100%	100%		100%		100%		100%		**Dinas Sosial**
				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	%	100%	100%		100%		100%		100%		**Dinas Sosial**
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIA	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan	%	100%	100%	2,811,995,700	100%	3,078,896,524	100%	2,882,239,109	100%	8,773,131,333.00	**Dinas Sosial**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	**06**	**06**	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Wilayah Provinsi (SPM)	%	100%	100%	1,290,286,600	100%	1,306,891,223	100%	1,315,193,534	100%	3,912,371,357.00	**Dinas Sosial**
1	**06**	**07**	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	%	100%	100%	109,968,000	100%	116,346,144	100%	119,535,216	100%	345,849,360.00	**Dinas Sosial**
2			**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					**230,323,094,523**		**357,449,258,979**		**597,551,058,527**		**1,185,323,412,028.690**	
2	**07**		**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**					**6,544,828,564.0**		**6,759,828,564.0**		**7,104,815,064.0**		**20,409,472,192.00**	
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro	%	66.67%	94.00%	65,000,000.00	95.00%	65,000,000.00	96.00%	80,000,000.00	90.00%	210,000,000.00	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	%	83.33	85.00%	3,720,000,000.00	87.00%	3,870,000,000.00	90.00%	4,055,000,000.00	90.00%	11,645,000,000.00	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
				Prosentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	%	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
2	07	04	PROGRAM PENENPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan	%	9.49	9.50	694,828,564.00	9.60	759,828,564.00	9.70	889,815,064.00	9.70	2,344,472,192.00	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
				Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	%	63.19	63.30		63.60		63.75		63.75		**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	%	63.38	63.40	1,110,000,000.00	63.75	1,110,000,000.00	64.00	1,125,000,000.00	64.00	3,345,000,000.00	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
				Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS	%	49.43	50.00		52.00		54.00		54.00		**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Prosentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	%	62.59	86.00%	955,000,000.00	87.00%	955,000,000.00	88.00%	955,000,000.00	88.00%	2,865,000,000.00	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
				Meningkatnya kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	%	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
2	**08**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					**4,600,588,457**		**5,070,092,400**		**5,910,000,000**		**15,580,680,857.00**	
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pemenuhan Indikator prasyarat PUG di Tk. Provinsi	%	60%	65%	895,961,700.00	70%	1,050,000,000.00	75%	1,250,000,000.00	75%	3,195,961,700.00	**DP3A, Pengendalian Penduduk dan**
				Persentase ARG di Tingkat Provinsi	%	37%	38%		38.50%		39%		39%		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	%	25%	37,5%		38%		38.50%		38.50%		KB
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	%	37.50%	54.16%	1,451,521,333.00	58.33%	1,550,000,000.00	62.50%	1,775,000,000.00	62.50%	4,776,521,333.00	DP3A, Pengendalian Penduduk dan KB
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani	%	90%	95%		95%		95%		95%		
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kab/kota yg menyediakan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga	%	37.50%	54.16%	800,308,024.00	58.33%	825,000,000.00	62.50%	875,000,000.00	62.50%	2,500,308,024.00	DP3A, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak Yg terupdate	%	85%	88%	415,000,000.00	89%	425,000,000.00	90%	450,000,000.00	90%	1,290,000,000.00	DP3A, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	75%	87,5%	472,705,000.00	91,66%	645,000,000.00	95,83%	810,000,000.00	95,83%	1,927,705,000.00	DP3A, Pengendalian Penduduk dan KB
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kabupaten/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	%	37.50%	54.16%	565,092,400.00	58.33%	575,092,400.00	62.50%	750,000,000.00	62.50%	1,890,184,800.00	DP3A, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**09**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**					**5,903,860,000.0**		**6,283,860,000.0**		**6,513,860,000.0**		**18,701,580,000.00**	
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan Masyarakat Yang Aktif	%	72%	75%	830,000,000.00	76%	830,000,000.00	77%	830,000,000.00	77	2,490,000,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Ketersediaan Beras (%)	Persentase	367.91	356.57	2,712,560,000.00	356.57	3,067,560,000.00	356.57	3,272,560,000.00	356.57	9,052,680,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
				Tingkat Ketersediaan Jagung (%)	Persentase	55.04	54.61		54.61		54.61		54.61		
				Tingkat Ketersediaan Kedelai (%)	Persentase	18.23	17.74		17.74		17.74		17.74		
				Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	(kkal/kapita/hari)	3,593.00	3,543.56		3,543.56		3,543.56		3,543.56		
				Ketersediaan Protein (gr/kapita/hari)	(gr/kapita/hari)	171.65	127.36		127.36		127.36		127.36		
				Angka Kecukupan Energi (kkal/orang/hari)	(kkal/orang/hari)	2 077,92	2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		
				Angka Kecukupan Protein (gr/orang/hari)	(gr/orang/hari)	64.18	57.00		57.00		57.00		57.00		
				Persentase Cadangan Pangan	%	0.014	0.014		0.015		0.015		0.015		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	4.82%	6.00%	1,886,300,000.00	5.80%	1,911,300,000.00	5.60%	1,936,300,000.00	5.60%	5,733,900,000.00	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan	%	100%	100%	475,000,000.00	100%	475,000,000.00	100%	475,000,000.00	100%	1,425,000,000.00	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	**10**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**					**1,542,030,900.0**		**1,696,233,990.0**		**1,865,857,389.0**		**5,104,122,279.00**	
2	10	03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaantanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%	100%	100%	355,000,000	100%	461,103,090	100%	461,103,090	100%	1,277,206,180	**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan**
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Prosentase Penyelesaian kasus tanah yang difasilitasi dalam Penyelesaian sengketa tanah	100%	100%	100%	548,000,000	100%	596,100,000	100%	765,723,399	100%	1,909,823,399	**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan**
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi yang diterbitkan	100%	100%	100%	639,030,900	100%	639,030,900	100%	639,030,900	100%	1,917,092,700	**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan**
2	**11**		**Urusan Pemerintaha Bidang Lingkungan Hidup**					**13,115,730,143**		**15,836,317,909**		**16,796,317,909**		**45,748,365,961.180**	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	60	67	520,000,000.00	83	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	720,000,000.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Potensi emisi GRK dari sektor limbah	Ton CO2 e	14135.36	15257.36	3,800,000,000	16435.36	3,650,000,000.00	17697.36	3,650,000,000.0	17697.36	11,100,000,000.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	%	92,85	88,24	750,000,000	94,11	750,000,000.00	100	750,000,000.0	100	2,250,000,000.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah yang dikelola	%	98,64	98,65	4,045,730,143.25	98,66	7,756,317,909.27	98.67	8,236,317,908.66	98,67	20,038,365,961.180	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN & IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rasio Tingkat ketaatan pemarakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	29,6	40	700,000,000	40,63	750,000,000.00	41,170	800,000,000.0	41,170	2,250,000,000.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LIKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Prosentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	73,61	33.33	100,000,000	66.67	150,000,000.00	100	200,000,000.0	100	450,000,000.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	%	87	73.4	800,000,000	86.7	900,000,000.00	100	1,000,000,000.0	100	2,700,000,000.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MAYARAKAT	Cakupan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	%	65.29	88.23	300,000,000.00	94.11	340,000,000.00	100	360,000,000.0	100	1,000,000,000.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	600,000,000	100	640,000,000.00	100	700,000,000.0	100%	1,940,000,000.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	%	54,48	55	1,500,000,000	57	800,000,000.00	58	1,000,000,000.0	58	3,300,000,000.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
2	**12**		**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**					**1,529,029,752.0**		**1,799,029,752.0**		**2,511,029,752.0**		**5,839,089,256.00**	
2	**12**	**02**	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	%	99.42%	99.45%		99.50%		99.65%		99.65%		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
				Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99.42%	99.45%	Rp 525,000,000.00	99.50%	Rp 554,514,876.00	99.65%	Rp 759,514,876.00	99.65%	1,839,029,752.00	
				Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk	%	102.77%	100%		100%		100%		100%		
				Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	54.29%	50%		52%		54%		54%		
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kematian yang dilaporkan	%	100%	100%		100%		100%		100%		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
				Persentase Bayi ber-Akta Kalahiran	%	97.47%	97.60%		97.80%		98%		98%		
				Persentase Pasangan ber-Akta Nikah yang dilaporkan	%	39.86%	39.90%		39.95%		40%		40%		
				Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan Akta Kelahiran	%	96.51%	96.60	Rp 319,514,876.00	96.80%	Rp 400,000,000.00	97%	Rp 616,000,000.00	97%	1,335,514,876.00	
				Persentase Penerbitan Akta Cerai yang dilaporkan	%	100%	100%		100%		100%		100%		
				Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	96.51%	96.60%		96.80%		97%		97%		
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	%	100%	100%	Rp 584,514,876.00	100%	Rp 644,514,876.00	100%	Rp 875,514,876.00	80%	2,104,544,628.00	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase Penyajian Profil Kependudukan	%	100%	100%	Rp 100,000,000.00	100%	Rp 200,000,000.00	100%	Rp 260,000,000.00	100%	560,000,000.00	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	**13**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					**3,867,622,725**		**6,182,299,683**		**8,178,444,337**		**18,228,366,744.250**	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5,45	13,23	351,000,000.0	14,56	702,000,000.00	15,88	1,053,000,000.00	15,88	1,404,000,000.00	**DPMD**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	48,75	7,28		5,95		4,63		4,63		**DPMD**
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang menjalin kerjasama	%	4,3	1,32	352,000,000	2,64	704,000,000.00	3,97	1,056,000,000.00	3,97	2,112,000,000.00	**DPMD**
2	13	04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa Yang Di Fasilitasi	**%**	45,01	17,21	1,949,311,362.30	22,94	2,924,242,498.53	28,76	3,596,821,114.69	28,76	8,470,374,975.515	**DPMD**
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Difasilitasi dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	%	1,44	1,61	1,215,311,362.30	1,64	1,852,057,184.28	1,67	2,472,623,222.16	1,67	5,539,991,768.735	**DPMD**
				Prosentase Posyandu Aktif;	%	99,91	100		100		100		100		
				Prosentase PKK Aktif	%	99	100		100		100		100		
				Persentase BUM Desa Yang Difasilitasi	**%**	3,14	2,64		3,97		5,29		5,29		
2	**14**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					**1,430,000,000.0**		**1,585,000,000.0**		**2,105,000,000.0**		**5,120,000,000.00**	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	%	25%	25,5%	210,000,000.00	30%	215,000,000.00	30,5%	395,000,000.00	30,5%	820,000,000.00	**DP3A, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS peserta KB Aktif	%	64.94%	65,35 %	215,000,000.00	65,36 %	220,000,000.00	65,37 %	475,000,000.00	65.37%	910,000,000.00	**DP3A, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS)	Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	%	25%	25,5%	1,005,000,000.00	26 %	1,150,000,000.00	26,5 %	1,235,000,000.00	26,5 %	3,390,000,000.00	**DP3A, Pengendalian Penduduk dan KB**
2	**15**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**					**28,540,000,000.0**		**34,690,000,000.0**		**36,440,000,000.0**		**99,670,000,000.00**	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	30.8	33.78	2,100,000,000	35.27	2,100,000,000.00	36.76	2,100,000,000.0	36.76	6,300,000,000.00	**Dinas Perhubungan**
				Prosentase Layanan Angkutan Darat;	%	97	97	2,250,000,000	97	2,350,000,000.00	97	2,350,000,000.00	97	6,950,000,000.00	**Dinas Perhubungan**
				Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B Pertahun	Jiwa	500,981	628,431	2,400,000,000	688548.2864	2,650,000,000.00	748666.0064	4,400,000,000.00	748666.0064	9,450,000,000.00	**Dinas Perhubungan**
				Cakupan prasarana Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	60	63.65	6,100,000,000	65.454	6,000,000,000.00	67.254	6,000,000,000.00	67.254	18,100,000,000.00	**Dinas Perhubungan**
				Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan		0.108	0.31	1,800,000,000	0.328	2,100,000,000.00	0.348	2,100,000,000.00	0.348	6,000,000,000.00	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan	Jiwa	1,418,985	1,779,975	240,000,000	1950252.984	240,000,000.00	2120531.184	240,000,000.0	2120531.184	720,000,000.00	**Dinas Perhubungan**
				Jumlah pelabuhan Pengumpan yang beroperasi	Unit	11	11	12,350,000,000	11	17,550,000,000.0	11	17,550,000,000.0	11	47,450,000,000.00	**Dinas Perhubungan**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Dokumen Rencana Perkeretaapian Provinsi	Dokumen	1	1	1,300,000,000	1	1,700,000,000.00	1	1,700,000,000.0	1	4,700,000,000.00	**Dinas Perhubungan**
2	**16**		**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**					**16,662,849,981**		**21,132,453,523**		**22,285,834,587**		**60,081,138,091.00**	
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik	Nilai	-	40	12,181,658,320.00	45	15,534,677,733.00	50	16,353,083,557.00	50	44,069,419,610.00	**Diskominfo**
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Terintegrasi	%	44%	50%	4,481,191,661.00	55%	5,597,775,790.00	60%	5,932,751,030.00	60	16,011,718,481.00	**Diskominfo**
				Persentase Unit Kerja Yang Terkoneksi Jaringan Internet Intra Pemerintah Pemerintah Sulawesi Selatan	%	41%	44%		45%		47%		47		
2	**17**		**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					**9,730,556,305**		**11,805,556,306**		**13,576,389,752**		**35,112,502,362.255**	
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Prosentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	%	12	12	400,000,000.00	12	460,000,000	12	529,000,000.00	12	1,389,000,000.00	**Dinas Koperasi UMKM**
				Prosentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	%	10	10		10		10		10		
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	20	20	420,000,000.00	20	483,000,000	20	555,450,000.00	20	1,458,450,000.00	**Dinas Koperasi UMKM**
				Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhannya terhadap peraturan perundang undangan	%	20	20		20		20		20		
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT	%	20	20	400,000,000.00	20	460,000,000	20	529,000,000.00	20	1,389,000,000.00	**Dinas Koperasi UMKM**
				Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi	%	20	20		20		20		20		
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	%	20	20	900,000,000.00	20	1,035,000,000	20	1,190,250,000.00	20	3,125,250,000.00	**Dinas Koperasi UMKM**
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	%	20	20	550,000,000	20	632,500,000	20	727,375,000.00	20	1,909,875,000.00	**Dinas Koperasi UMKM**
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan UMKM yang diberdayakan	%	10	10	3,500,000,000	10	4,025,000,000	10	4,628,750,000.00	10	12,153,750,000.00	**Dinas Koperasi UMKM**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha	%	10	10	3,560,556,305.00	10	4,710,056,306	10	5,416,564,751.56	10	13,687,177,362.255	**Dinas Koperasi UMKM**
				Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	%	3	3		3	-	3	-	3	0.00	**Dinas Koperasi UMKM**
2	**18**		**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**					**5,000,000,000**		**5,600,000,000**		**5,712,000,000**		**16,312,000,000.00**	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimamfaatkan oleh Investor	%	85	87%	920,000,000.00	90%	1,030,400,000.00	93%	1,051,008,000.00	93%	3,001,408,000.00	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	6.73	6.8	1,150,000,000.00	7	1,288,000,000.00	8	1,313,760,000.00	8	3,751,760,000.00	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
				Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	7.52	7.75		8		9		9		
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	%	80%	92%	1,550,000,000.00	93%	1,736,000,000.00	95%	1,770,720,000.00	95%	5,056,720,000.00	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	%	55%	57%	1,230,000,000.00	59%	1,377,600,000.00	60%	1,405,152,000.00	60%	4,012,752,000.00	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	%	85%	87%	150,000,000.00	88%	168,000,000.00	90%	171,360,000.00	90%	489,360,000.00	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2	**19**		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					**116,263,641,696.0**		**222,767,533,565.0**		**450,912,533,565.0**		**789,943,708,826.00**	
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,24	0,50	3,280,000,000	1,00	3,800,000,000	1,50	4,400,000,000	1,50	11,480,000,000	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	%	3,81	4,50		5,00		5,50		5,50		**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi olah raga	%	3,17	0,4	111,933,641,696	0,11	217,667,533,565	0,5	444,412,533,565	0,5	774,013,708,826	
				Persentasi ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	30	45		75		100		100		**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentasi organisasi pramuka aktif	%	100	100	1,050,000,000	100	1,300,000,000	100	2,100,000,000	100	4,450,000,000	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	**20**		**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**					**1,550,000,000**		**1,726,518,903**		**1,779,474,574**		**5,055,993,477.00**	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	80	90	1,550,000,000.00	92	1,726,518,903.00	94	1,779,474,574.00	100	5,055,993,477.00	**Diskominfo**
2	**21**		**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**					**650,000,000.0**		**778,377,384.0**		**816,890,599.0**		**2,245,267,983.00**	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	21	02	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Keamanan Siber	Nilai	2.08	2.59	650,000,000.00	2.75	778,377,384.00	3	816,890,599.00	3.00	2,245,267,983.00	**Diskominfo**
2	**22**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**					**7,392,356,000.0**		**7,736,157,000.0**		**8,042,611,000.0**		**23,171,124,000.00**	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	%	0.34%	1,28%	2,182,899,000.00	1,92%	2,382,332,000.00	2,88%	2,528,562,000.00	2,88%	7,093,793,000.00	**Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan**
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Sanggar Kesenian yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan	%	7.69%	7%	532,286,000.00	7,5%	618,629,000.00	8%	696,092,000.00	8%	1,847,007,000.00	**Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan**
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi.	%	3.89%	4%	200,000,000.00	4,5%	240,000,000.00	5%	288,000,000.00	5%	728,000,000.00	**Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan**
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGEOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	0.29%	0.2%	677,171,000.00	0.4%	695,196,000.00	0.8%	729,957,000.00	0.8%	2,102,324,000.00	**Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan**
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Prosentase Peningkatan Kunjungan ke musium	%	615.99%	10 %	3,800,000,000.00	20 %	3,800,000,000.00	30 %	3,800,000,000.00	100%	11,400,000,000.00	**Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan**
2	**23**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**					**3,000,000,000.0**		**3,000,000,000.0**		**3,500,000,000.0**		**9,500,000,000.00**	
2	23	02	PROGAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik	Orang	228583	300	2,400,000,000.00	400	2,400,000,000.00	500	2,900,000,000.00	500	7,700,000,000.00	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang di lestarikan	%	100	100	600,000,000.00	100	600,000,000.00	100	600,000,000.00	100	1,800,000,000.00	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**24**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**					**3,000,000,000.0**		**3,000,000,000.0**		**3,500,000,000.0**		**9,500,000,000.00**	
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	79.49	100	1,500,000,000.00	100	1,700,000,000.00	100	2,200,000,000.00	100	5,400,000,000.00	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	%	-	100	1,300,000,000.00	100	1,100,000,000.00	100	1,100,000,000.00	100	3,500,000,000.00	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Penerbitan izin penggunaan arsip tepat waktu	%	-	100	200,000,000.00	100	200,000,000.00	100	200,000,000.00	100	600,000,000.00	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
3			**Urusan Pilihan**					**374,402,963,529**		**464,849,889,946**		**501,484,054,663**		**1,340,736,908,138.470**	
3	**25**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**					**42,721,695,000**		**59,542,100,000**		**66,912,479,548**		**169,176,274,548.250**	
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Perluasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelaniutan	Ha	569,269.53	816,593.22	9,010,000,000.0	822,559.69	10,916,000,000.0	847,122.44	12,553,400,000.0	847,122.44	32,479,400,000.0	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
				Jumlah produksi garam rakyat	Ton	3,387.78	5,000.00		6,000		6,900		17,900		
				Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan	%	49.49	56.89		78.44		100		100		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp.	11,813,500,000.0	11,933,560,000.00	20,618,000,000	11,960,232,411.00	30,600,600,000	11,991,430,000.00	34,323,754,548	11,991,430,000.00	85,542,354,548.25	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	436,735.72	442,959.60		451,818.70		460,858.10		460,858.10		
				Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	27.39	29		30		31		31		
				Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	29.43	30.62		31.23		31.86		31.86		
				Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	%	68.42	84.21		89.47		100.0		100.0		
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp.	21,712,560,000.00	21,850,160,000.00	8,068,000,000.00	22,187,160,000.0	11,389,500,000.00	22,530,900,000.0	12,397,925,000.00	22,530,900,000.0	31,855,425,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah Produksi perikanan budidaya	Ton	4,095,934.66	4,331,299.7		4,417,925.7		4,506,248.3		4,506,248.3		
				Persentase ketersediaan benur berkualitas	%	78.51	85		90		95		95		
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (tidak dianggarkan)	Cakupan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	%	100.00	100.00	3,345,695,000	100.00	3,821,000,000	100.00	4,400,150,000	100.00	11,566,845,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan	Rp.	355,500,000.0	391,940,000.00	1,680,000,000.0	411,540,000.00	2,815,000,000.0	432,110,000.00	3,237,250,000.0	432,110,000.00	7,732,250,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Produksi olahan ikan	Ton	5,911.60	6,150.43		6,273.44		6,398.91		6,398.91		
				Persentase pengujian mutu produk perikanan	%	69.05	100		100		100		100		
3	**26**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**					**5,242,933,000.0**		**5,840,824,000.0**		**6,086,907,389.46**		**17,170,664,389.460**	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	%	0.62%	0.62	2,051,144,000.00	0.62	2,139,309,000.00	0.62	2,222,244,389.46	0.62	6,412,697,389.460	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	%	367,10 %	100 %	1,558,293,000.00	100 %	1,832,169,000.00	100 %	1,905,913,000.00	8,875,000	5,296,375,000.00	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataa
				Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	%	75,73 %	100 %		100 %		100 %		115,000		
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	18.75%	18.75%	525,000,000.00	18.75%	600,000,000.00	18.75%	625,000,000.00	18.75%	1,750,000,000.00	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataa
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan	%	1.55%	2%	1,108,496,000.00	3%	1,269,346,000.00	3,7%	1,333,750,000.00	3,7%	3,711,592,000.00	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataa
				Prosentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	%	14.92%	10%		15%		20%		20%		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	**27**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**					**289,828,247,508.0**		**348,072,130,908.38**		**366,804,784,670.38**		**1,004,705,163,086.760**	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	3,53	2	201,107,467,508	2	235,948,255,908.38	2	246,118,587,470.38	2	683,174,310,886.760	**Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan**
				Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	-5,22	2		2		2		2		
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	-6,9	2		2		2		2		
				Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp	154,730,214,500	56,290,226,087		56,301,484,133		56,312,744,429		168,904,454,649		
				Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi	%	-2.03	1.16	6,600,000,000	1.18	10,960,000,000	1.20	12,561,000,000	1.20	30,121,000,000.00	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
				Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Pedaging	%	-6.98	2.12		2.16		2.20		2.20		
				Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Ras Petelur	%	0.54	2.73		2.81		2.90		2.90		
				Persentase Peningkatan Populasi Ternak Perah	%	-0.23	2.23		2.30		2.37		2.37		
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana terhadap luasan lahan pertanian	Poin	0,0073	0,0076	62,500,780,000.00	0,0080	73,608,000,000.00	0,0084	76,888,279,000.0		212,997,059,000.00	**Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan**
				Nilai Produksi Hasil Ternak (Juta)	Rp	9,689,799	10,248,954	4,320,000,000	10,664,347	8,210,000,000	11,079,740	9,560,000,000	31,993,041	22,090,000,000.00	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	%	na	10	3,700,000,000	10	6,055,000,000	10	7,311,750,000	10	17,066,750,000.00	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT yang tertangani terhadap luas serangan OPT (%)	%	na	80	5,000,000,000.00	84	5,600,875,000.00	88.2	5,900,498,200.0		16,501,373,200.00	**Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan**
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PER	Persentase petani yang menerapkan teknologi	%	na	50	5,400,000,000.0	55	5,800,000,000.00	60	6,100,000,000.0		17,300,000,000.00	**Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan**
				Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	na	20		20		20				**Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Kelompok Tani/Ternak Yang Mendapatkan Diseminasi Penyuluhan dan Pemberdayaan	%	na	100	1,200,000,000	100	1,890,000,000	100	2,364,670,000	100	5,454,670,000.00	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
3	**28**		**Urusan Pemerintan Bidang Kehutanan**					**7,485,495,000.0**		**9,021,430,000.0**		**12,519,744,000.0**		**29,026,669,000.00**	
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Persen	13.97	21.15	6,028,375,000	28.23	6,013,510,000	35.23	8,111,824,000.	35.23	20,153,709,000.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
				Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi	Persen	11.85	11,91		11.97		12.02		12.02		
				Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	Persen	0.030	0.029		0.028		0.027		0.027		
				Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	Persen	3.28	3.57		3.63		3.74		3.74		
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah laporan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	Laporan	1	1	100,000,000.	1	150,000,000	1	150,000,000	3	400,000,000.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) KTH	Persen	belum dilakukan pengukuran	1.75	1,157,120,000	2.60	2,657,920,000.	2.81	4,057,920,000.	2.81	7,872,960,000.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	Persentase lembaga/ forum DAS yang aktif	Persen	16.67	20.83	200,000,000	25.00	200,000,000	29.17	200,000,000	29.17	600,000,000.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
3	**29**		**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**					**9,084,593,021.0**		**14,603,405,038.0**		**17,390,139,055.0**		**41,078,137,114.00**	
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah	%	80	85	631,990,500	90	617,020,240.00	92	720,424,288.00	92	1,969,435,028.00	**Dinas ESDM**
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pemanfaatan WP (Wilayah Pertambangan) sul sel yang terkelola dengan baik	%	na	10	1,779,548,900	12	2,015,458,680.00	13	2,418,550,416.0	13	6,213,557,996.00	**Dinas ESDM**
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor Energi (Ton CO2 eq)	%	na	1,3	1,647,623,888.00	1,4	2,859,991,600.00	1,5	3,131,989,920.0	1,5	7,639,605,408.00	**Dinas ESDM**
3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga berListrik	%	98,89	100	5,025,429,733.00	100	9,110,934,518.00	100	11,119,174,431.0	100	25,255,538,682.00	**Dinas ESDM**
3	**30**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**					**4,680,000,000**		**9,180,000,000**		**11,180,000,000**		**25,040,000,000.00**	
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	%	100	100	270,000,000.00	100	270,000,000.00	100	370,000,000.00	100	910,000,000.00	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Prosentase Penerbitan SKA	%	100	100	270,000,000.00	100	470,000,000.00	100	570,000,000.00	100	1,310,000,000.00	dan Perdagangan
3	30	03	PPROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	100	270,000,000.00	100	570,000,000.00	100	570,000,000.00	100	1,410,000,000.00	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	100	100	1,000,000,000.00	100	2,000,000,000.00	100	2,400,000,000.00	100	5,400,000,000.00	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	$ US	2,358,936,319	1,967,433,973	540,000,000.00	2,262,549,068.38	2,540,000,000.00	2,601,931,428.63	2,940,000,000.00	2,601,931,428.63	6,020,000,000.00	
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang beredar yang diawasi, tertib niaga dan pengaduan konsumen serta pengujian dan sertifikasi mutu produk	%	100	100	2,060,000,000.00	100	2,560,000,000.00	100	3,560,000,000.00	100	8,180,000,000.00	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri	%		100	270,000,000.00	100	770,000,000.00	100	770,000,000.00	100	1,810,000,000.00	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**31**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**					**14,850,000,000**		**18,050,000,000**		**20,050,000,000**		**52,950,000,000.00**	
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri	%	35%	7.5%	13,000,000,000	8	15,950,000,000	8,5	17,800,000,000	8.5%	46,750,000,000.00	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	%	2,1	2,5	1,500,000,000	3	1,700,000,000	4	1,800,000,000	3.5%	5,000,000,000.00	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase peningkatan pengelolaan SIINAS	%	2,2	4	350,000,000	4,5	400,000,000	5	450,000,000	5%	1,200,000,000.00	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**32**		**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**					**510,000,000.0**		**540,000,000.0**		**540,000,000.0**		**1,590,000,000.00**	
3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	%	100%	100%	100,000,000.0	100%	130,000,000.0	100%	130,000,000.0	100%	360,000,000.00	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase penempatan transmigrasi	%	100%	100%	235,000,000	100%	235,000,000	100%	235,000,000	100%	705,000,000.00	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri	%	100%	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	525,000,000.00	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
4			**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**					**248,269,574,135**		**276,211,560,426**		**295,178,684,925**		**819,659,819,486**	
4	**01**		**Sekretariat Daerah**					**69,427,467,171**		**85,262,127,504**		**92,595,486,489**		**247,285,081,163.900**	
4	**01**	**02**	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	%	100%	100%	2,983,716,666	100%	4,638,872,313	100%	5,376,672,313	100%	12,999,261,292.00	**Biro Organisasi**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	**01**	**03**	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan Presentase Jumlah Urusan Pemerintahan yang Difasilitasi, Dimonitoring dan dievaluasi	%	100%	100%	2,227,582,192	100%	2,427,582,192	100%	2,727,582,192	100%	7,382,746,576.00	**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	% Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimamfaatkan	%	88,89	99,2	55,837,826,678	99,3	65,647,862,678	99,4	70,427,862,678	100%	191,913,552,034.00	**Biro Kesejahteraan Rakyat**
				Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas)	%	45,94	46,3		46,35		46,4		45,50		**Biro Kesejahteraan Rakyat**
4	**01**	**05**	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dan dievaluasi	%	100%	100%	3,393,000,000	100%	4,793,167,534	100%	5,551,018,582	100%	13,737,186,115.900	**Biro Hukum**
				Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	%	100%	100%		100%		100%		100%		
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	%	85%	100%	1,503,435,635	100%	2,353,435,635	100%	2,353,435,635	100%	6,210,306,905.00	**Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINSITRASI PEMBANGUNAN	Prosentase capaian program prioritas pembangunan daerah	%	87%	100%	1,200,000,000	100%	2,050,000,000	100%	2,050,000,000	100%	5,300,000,000.00	**Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Presentase Kesesuaian rencana dengan pengadaan barang/ jasa	%	100 %	100 %	2,281,906,000	100 %	3,351,207,152	100 %	4,108,915,089	100 %	9,742,028,241.00	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**
				Presentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang / jasa	%	98,66	100 %		100 %		100 %		100 %		
4	**02**		**Sekretariat Dewan**					**178,842,106,964**		**190,949,432,922**		**202,583,198,436**		**572,374,738,322.163**	
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	% Prolegda yang terealisasi	%	100 %	100 %	178,842,106,964	100 %	190,949,432,922	100 %	202,583,198,436	100 %	572,374,738,322.163	**Sekretariat DPRD**
				% Jumlah Program Kerja DPRD yang terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD	%	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		
				Jumlah Ranperda yang difasilitasi Pembahasannya	Ranperda	15	15		15		15		45		
5			**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**					**2,625,621,714,395**		**3,171,470,151,444**		**3,325,063,540,892**		**9,122,155,406,731**	
5	**01**		**Perencanaan**					**11,272,453,200**		**13,470,840,296**		**14,206,324,161**		**38,949,617,657.400**	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (prioritas)	% Konsistensi Program RPJMD/RPD terhadap RKPD	%	97%	100 %	5,375,311,800	100 %	5,962,408,574	100 %	5,996,279,540	100 %	17,333,999,914.00	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
				% Konsistensi Program RKPD terhadap APBD	%	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		
				Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah	%	90,03%	91%		92%		93%		93%		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM dengan indicator dan target pembangunan nasional bidang PPM Tahun N	%	100%	100%	5,897,141,400	100%	7,508,431,722	100%	8,210,044,621	100%	21,615,617,743.400	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase Kesesuaian sasaran, indicator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indicator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM	%	100%	100%		100%		100%		100%		
				Persentase Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan indicator dan target pembangunan nasional bidang ekonomi dan SDA Tahun N	%	100%	100%		100%		100%		100%		
				Kesesuaian sasaran, indicator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indicator dan target pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan SDA	%	100%	100%		100%		100%		100%		
				Persentase Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan dengan indicator dan target pembangunan nasional bidang Infrastruktur dan kewilayahan Tahun N	%	100%	100%		100%		100%		100%		
				Persentase Kesesuaian sasaran, indicator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indicator dan target pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan	%	100%	100%		100%		100%		100%		
5	**02**		**Keuangan**					**2,590,620,431,618**		**3,129,051,380,793**		**3,278,437,380,388**		**8,998,109,192,799.00**	
5	**02**	**02**	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian RKA Tepat Waktu	%		100%		100%		100%		100%		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Evaluasi Ranperda Tentang APBD & Ranperkada Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota Tepat Waktu	%	100%	100%		100%		100%		100%		
				Evaluasi Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD & Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	%	100%	100%	2,562,572,320,740	100%	3,100,964,779,112	100%	3,249,330,757,008	100%	8,912,867,856,860.00	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**
				Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tepat Waktu	%	100%	100%		100%		100%		100%		
				Tingkat kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100%	100%		100%		100%		100%		
5	**02**	**03**	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Perencanaan Kebutuhan BMD Ditetapkan Tepat Waktu	%	100%	100%		100%		100%		100%		
				Capaian Penetapan Status Penggunaan BMD Sesuai Ketentuan	%	100%	100%	6,550,000,000	100%	7,220,000,000	100%	7,900,000,000	100%	21,670,000,000.00	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**
				Cakupan Barang Milik Daerah Yang Dimanfaatkan	%	100%	100%		100%		100%		100%		
				Persentase Tanah Pemerintah Provinsi Yang Telah Bersertifikat	%	100%	100%		100%		100%		100%		
5	**02**	**02**	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	persentasi keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD	%	100%	100 %	1,182,790,200	100 %	969,376,000	100 %	994,042,500	100 %	3,146,208,700.00	**Badan Pendapatan Daerah**
5	**02**	**04**	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentasi Peningkatan PAD	%	100%	100%	20,315,320,678	100%	19,897,225,681	100%	20,212,580,880	100%	60,425,127,239.00	**Badan Pendapatan Daerah**
5	**03**		**KEPEGAWAIAN**					**3,757,028,224**		**4,320,582,458**		**4,968,669,826**		**13,046,280,507.600**	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;	**%**	63	65		65.3		65.6		65.6		
				Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	**%**	90	85	3,757,028,224	86	4,320,582,458	87	4,968,669,826	87	13,046,280,507.600	**Badan Kepegawaian Daerah**
				Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	**%**	93	93		94		95		95		
5	**04**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**7,138,408,136**		**11,178,156,337**		**12,401,631,470**		**30,718,195,942.811**	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	%	50%	50%	7,138,408,136	75%	11,178,156,337	100%	12,401,631,470	100%	**101,496,835,797**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
				Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	%	50%	50%		75%		100%		100%	
				Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	%	100%	100%		100%		100%		100%	
				Jumlah Akreditasi Program Pelatihan	Sertifikat	5 Sertifikat	6 Sertifikat		7 Sertifikat		8 Sertifikat		8 Sertifikat	
5	**05**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**5,509,149,450**		**6,483,342,998**		**7,051,084,930**		**19,043,577,378.00**	
5	**05**	**02**	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.	%	Belum dilakukan pengukuran	30 %	5,509,149,450	40 %	6,483,342,998	50 %	7,051,084,930	50 %	19,043,577,378.00	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
				Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi dan Teknologi	%	11,32 %	13 %		15 %		16 %		16 %	
5	**07**		**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**					**7,324,243,767**		**6,965,848,563**		**7,998,450,117**		**22,288,542,446.410**	
5	**07**	**02**	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Presentase Pelayanan Badan Penghubung Daerah	Persen	65	86	7,324,243,767	87	6,965,848,563	88	7,998,450,117	86	22,288,542,446.410	**Badan Penghubung Daerah**
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					**26,103,284,000**		**27,783,898,368**		**28,566,076,050**		**82,453,258,419**	
6	**01**		**Inspektorat Daerah**					**26,103,284,000**		**27,783,898,368**		**28,566,076,050**		**82,453,258,418.550**	
6	**01**	**02**	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	% Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	%	76,29	81%	20,349,001,000.00	82%	21,659,135,903.35	83%	22,268,888,087.54	83%	64,277,024,990.890	**Inspektorat Daerah**
				% Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	%	69	74%		75%		76%		76%	
				% OPD yang hasil nilai SAKIP nya meningkat	%	100	100%		100%		100%		100%	
6	**01**	**03**	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	%	100	100	5,754,283,000.00	100%	6,124,762,464.92	100%	6,297,187,962.74	100%	18,176,233,427.660	**Inspektorat Daerah**
				Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti	%	100	100		100%		100%		100%	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	%	100	100		100%		100%		100%		
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					**728,102,482,000**		**50,256,848,000**		**51,060,947,000**		**829,420,277,000.00**	
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					**728,102,482,000**		**50,256,848,000**		**51,060,947,000**		**829,420,277,000.00**	
F	**01**	**02**	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peserta Yang Hadir Pada Pendidikan Idiologi Pancasila dan Karakter bangsa	%	20 %	80%	7,534,680,000	80 %	8,047,036,000	80 %	8,175,787,000	80 %	23,757,503,000.00	**Badan Kesatauan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**03**	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada masyarakat	%	na	80%	590,937,944,000	85%	7,922,757,000	90%	8,049,520,000	90%	606,910,221,000.00	**Badan Kesatauan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**04**	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi dengan Instansi Terkait dibidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat dan Orkemas	%	na	100%	106,373,000	100	113,604,000	100%	115,419,000	100%	335,396,000.00	**Badan Kesatauan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**05**	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase terlaksananya koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dan organisasi bentukan pemerintah di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	%	na	100%	1,378,277,000	100 %	1,471,998,000	100 %	1,495,548,000	100%	4,345,823,000.00	**Badan Kesatauan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**06**	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi Dengan Tim Bentukan Pemerintah di bidang Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Forkopimda	%	na	100%	128,145,208,000	100%	32,701,453,000	100%	33,224,673,000	100%	194,071,334,000.00	**Badan Kesatauan Bangsa dan Politik**
X	**X**	**X**	**PENUNJANG URUSAN**					**4,314,634,963,307**		**4,497,062,397,109**		**4,631,859,473,988**		**13,443,556,834,404.00**	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD		OPD PENANGGUNG JAWAB
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Provinsi	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	Nilai	99,92	100.42	4,314,634,963,307	100.92	4,497,062,397,109	101.43	4,631,859,473,988	101.43	13,443,556,834,404.00	**Semua OPD**
				Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	Nilai	75,42	82.96		87.11		91.47		91.47		
				Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	%	76,29	79,32		83.18		87.05		87.05		
				Persentase peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	%	-27,35	10,20		12.13		15.16		15.16		

BAB IX
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

9.1. Indikator Kinerja Makro

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing–masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut:

Tabel IX. 1.
Target Indikator Kinerja Makro Tahun 2024-2026
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tahun:			Kondisi Akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09	5,23-6,71	5,67-6,82	5,71-6,91	5,71-6,91
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,63	8,31	8,20	8,09	8,09
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,51	4,24	4,03	3,83	3,83
4	Rasio Gini	Angka	0,365	0,361	0,356	0,352	0,352
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka/ Nilai	72,82	73,99	74,49	74,98	74,98
6	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	65,59	70,7	74,55	78,4	78,4

Sumber : Badan Pusat Statstik Tahun 2022

9.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Indikator Kinerja Utama Sulawesi Selatan dibuat untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penetapan IKU bertujuan memberikan gambaran keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah yang disajikan pada tabel berikut ini

Tabel IX. 2.
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir RPD
1	Nilai Sakip Provinsi	68,08 (B)	68,52 (B)	69,27 (B)	70,03 (BB)	70,03 (BB)
2	Indeks Pelayanan Publik	4,10 (A-)	A- (4,01 – 4,50)	A-(4,01 – 4,50)	A (4,51 – 5,00)	A (4,51 – 5,00)
3	Indeks Layanan Infrastruktur	80,39	81,97	82,34	82,73	82,73
4	Tingkat Kemiskinan	8,63	8,31	8,20	8,09	8,09
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,51	4,24	4,03	3,83	3,83
6	Pertumbuhan Ekonomi	5,09	5,23-6,71	5,67-6,82	5,71-6,91	5,71-6,91
7	IPM	72,82	73,99	74,49	74,98	74,98
8	Indeks Pembangunan Gender	93,14	93,65	93,78	93,90	93,90
9	Potensi Penurunan Emisi GRK	1,360.000	1,823,583	2.075.597	2.356.390	2.356.390

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022 diolah

9.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*outcome based*) yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah provinsi.

Adapun capaian indikator Kinerja Kunci Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 serta penetapan target indikator Kinerja Kunci Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 disajikan pada tabel dibawah berikut :

Tabel IX. 3.
Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 - 2026
Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	%	92,65	89,25	91,00	92,75	92,75	Dinas Pendidikan
2	Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	%	99,97	95,38	96,86	98,34	98,34	Dinas Pendidikan
3	Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	%	83,68	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
5	Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	%	82,73	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
6	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa berdasarkan	%	Na	100	100	100	100	Dinas Pendidikan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	Asesmen Nasional							
7	Prosentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	%	73,46	74,61	75,76	76,91	76,91	Dinas Pendidikan
8	Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	%	86,26	85	86	87	87	Dinas Pendidikan
9	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	%	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	Dinas Pendidikan
10	Persentase Guru SMA yang bersertifikat	%	52,69	53,39	54,09	54,79	54,79	Dinas Pendidikan
11	Persentase Guru SMK yang bersertifikat	%	46,85	47,41	47,97	48,53	48,53	Dinas Pendidikan
12	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	%	94,13	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
13	Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	%	45,30	46,45	47,60	48,75	48,75	Dinas Pendidikan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
14	% Rumah Sakit yang Terakreditasi	%	80	85	90	95	95	Dinas Kesehatan
15	Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
16	Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
17	% Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi	%	94,3	95	96	97	97	Dinas Kesehatan
18	% Anak Berusia Dibawah Lima Tahun (Balita) Gizi Kurang yang Mendapat Tambahan Asupan Gizi	%	82,42	90	90,5	91	91	Dinas Kesehatan
19	Cakupan Kunjungan	%	72,75	75	76	77	77	Dinas Kesehatan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	Lengkap Ibu Hamil (K6)							
20	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	%	96,32	97	98	99	99	Dinas Kesehatan
21	Angka Kematian Akibat Penyakit Menular	Per 100.000/Penduduk	11/100.000 Penduduk	10/100.000 Penduduk	9,5/100.000 Penduduk	9/100.000 Penduduk	9/100.000 Penduduk	Dinas Kesehatan
22	% Penduduk sesuai Kelompok Usia yang dilakukan Skirining Penyakit Tidak Menular	%	70	90	90	95	95	Dinas Kesehatan
23	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Darah Pada Fasilitas Kesehatan	%	79	80	81	82	82	UPT Transfusi Darah
24	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan , UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	98	85	85	85	95	UPT Lab. Kesehatan Daerah
25	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	%	91,40	100	100	100	100	UPT RSK Gigi dan Mulut
26	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	Persen	90	100	100	100	100	RSUD Labuang Baji
27	Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	90,98	100	100	100	100	RS Khusus Daerah

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	dalam kondisi Baik							
28	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	%	60	61	62	63	100	RSUD Haji Makassar
29	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik	%	75	76	76.50	77	77	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
30	Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
31	Cakupan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	%	70	65.76	75	85	85	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
32	% Pemenuhan SDMK Berkualitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	83,94	85	86	87	87	Dinas Kesehatan
33	Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	%	100	20	20	20	60	UPT Transfusi Darah
34	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknisi Sumber Daya Manusia	%	98	90	90	90	90	UPT Lab. Kesehatan Daerah

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	Kesehatan							
35	Prosentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	%	99,05	100	100	100	100	UPT RSK Gigi dan Mulut
36	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	%	65	75	80	85	85	Labuang Baji
37	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	%	62,50	70,00	75,00	80,00	80,00	RSUD Haji Makassar
38	Persentase SDM Yang Mengikuti Pelatihan	%	NA	100	100	100	100	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
39	Prosentase tenaga kesehatan RSUD yang telah ditingkatkan kapasitasnya	%	89,19	33	12	20	20	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
40	% Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	%	95	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
41	% Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS	%	40	50	55	60	60	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
42	Luas daerah jaringan irigasi yang direhabilitasi	Ha	3.638	6046	6445	6138	18629	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
								Ruang
43	Cakupan pembinaan pengelolaan SDA	%	100	100	100	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
44	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (SPM)	%	92	100	100	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
47	Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum kewenangan provinsi	%	50	100	100	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
48	Cakupan Pembinaan layanan TPA kewenangan provinsi	%	100	100	100	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
49	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak (SPM)	%	92.2	95	96	97	97	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
50	Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik kewenangan provinsi	%	100	100	100	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
51	Cakupan Pembinaan layanan drainase	%	100	100	100	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	kewenangan provinsi							Ruang
52	Persentase Bangunan Pamerintah Yang difasilitasi	%	85	90	95	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
53	Persentase fasilitasi penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi	%	77.7	81.2	82.4	83.6	83.6	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
54	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	71.95	76.00	77.00	78.00	78	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
55	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	90	91	92	93	93	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
56	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	%	86	91.35	92.7	94.05	94.05	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
URUSAN PEMERINTAHA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
57	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni							Pertanahan
58	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenanangan Provinsi	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
59	Persentase Luas Kawasan Kumuh tertangani kewenangan provinsi	%	25,39	5,18	11,39	19,67	19,67	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
60	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak pada Kawasan Permukiman	%	100	25.71	31.43	42.86	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
61	Persentase drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman	%	92,35	16.67	38.33	45.00	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
62	Persentase Jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman	%	na	25,71	31,43	42,86	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
63	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan	%	100	100	100	100	100	Satuan Polisi

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi							Pamong Praja
64	Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100	BPBD
65	Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	%	100	100	100	100	100	BPBD
66	Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	%	100	100	100	100	100	BPBD
67	Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100	BPBD
68	% Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
69	Persentase Dokumen Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang Diterbitkan	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
70	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)							
71	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
72	Persentase Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Tuna Sosial dalam panti	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
73	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
74	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
75	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
76	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	terpenuhi kebutuhan kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)							
77	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
78	Persentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Wilayah Provinsi (SPM)	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
79	Persentase TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
80	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro	**%**	66.67	94.00	95.00	96.00	90.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
81	Prosentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	**%**	83.33	85.00	87.00	90.00	90.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
82	Prosentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha	**%**	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	dapat mandiri							dan Transmigrasi
83	Prosentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan	%	9.49	9.50	9.60	9.70	9.70	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
84	Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	%	63.19	63.30	63.60	63.75	63.75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
85	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	%	63.38	63.40	63.75	64.00	64.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
86	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS	%	49.43	50.00	52.00	54.00	54.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
87	Prosentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	%	62.59	86.00	87.00	88.00	88.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
88	Meningkatnya kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	%	100	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
89	Persentase Pemenuhan Indikator prasyarat PUG di Tk. Provinsi	%	60	65	70	75	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
90	Persentase ARG di Tingkat Provinsi	%	37	38	38.50	39	39	
91	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	%	25	37,5	38	38.50	38.50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
92	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	%	37.50	54.16	58.33	62.50	62.50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
93	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani	%	90	95	95	95	95	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
94	Persentase kab/kota yg menyediakan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga	%	37.50	54.16	58.33	62.50	62.50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
								Pengendalian Anak dan KB
95	Persentase Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak Yg terupdate	%	85	88	89	90	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
96	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	75	87,5	91,66	95,83	95,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
97	Persentase Kabupaten/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	%	37.50	54.16	58.33	62.50	62.50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
98	Persentase Lumbung Pangan Masyarakat Yang	%	72	75	76	77	77	Dinas Ketahanan Pangan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	Aktif							
99	Tingkat Ketersediaan Beras (%)	%	367.91	356.57	356.57	356.57	356.57	Dinas Ketahanan Pangan
100	Tingkat Ketersediaan Jagung (%)	%	55.04	54.61	54.61	54.61	54.61	Dinas Ketahanan Pangan
101	Tingkat Ketersediaan Kedelai (%)	%	18.23	17.74	17.74	17.74	17.74	
102	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	(kkal/kapita/hari)	3,593.00	3,543.56	3,543.56	3,543.56	3,543.56	
103	Ketersediaan Protein (gr/kapita/hari)	(gr/kapita/hari)	171.65	127.36	127.36	127.36	127.36	Dinas Ketahanan Pangan
104	Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita/tahun)	(kkal/orang/hari)	2 077,92	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Dinas Ketahanan Pangan
105	Angka Kecukupan Protein (gr/kapita/tahun)	(gr/orang/hari)	64.18	57.00	57.00	57.00	57.00	Dinas Ketahanan Pangan
106	Persentase Cadangan Pangan	%	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015	Dinas Ketahanan Pangan
107	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	4.82	6.00	5.80	5.60	5.60	Dinas Ketahanan Pangan
108	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan	%	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	83.1	85.7	87.5	91.7	91.7	Dinas Ketahanan Pangan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
109	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
110	Persentase penyelesaian sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
111	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
112	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	60	67	83	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
113	Potensi emisi GRK dari sektor limbah	Ton CO2 e	14135.36	15257.36	16435.36	17697.36	17697.36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
114	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	%	92,85	88,24	94,11	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
115	Persentase limbah yang dikelola	%	98,64	98,65	98,66	98.67	98,67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
116	Rasio Tingkat ketaatan pemarakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	29,6	40	40,63	41,170	41,170	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
117	Prosentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	73,61	33.33	66.67	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
118	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	%	87	73.4	86.7	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
119	Cakupan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	%	65.29	88.23	94.11	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
120	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
121	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	%	54,48	55	57	58	58	Dinas Lingkungan Hidup dan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
								Kehutanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								
122	Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	%	99.42	99.45	99.50	99.65	99.65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
123	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99.42	99.45	99.50	99.65	99.65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
124	Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk	%	102.77	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
125	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	54.29	50	52	54	54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
126	Persentase Penerbitan Akta Kematian yang dilaporkan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
127	Persentase Bayi ber-Akta Kalahiran	%	97.47	97.60	97.80	98	98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
128	Persentase Pasangan ber-Akta Nikah yang	%	39.86	39.90	39.95	40	40	Dinas

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	dilaporkan							Kependudukan dan Pencatatan Sipil
129	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan Akta Kelahiran	%	96.51	96.60	96.80	97	97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
130	Persentase Penerbitan Akta Cerai yang dilaporkan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
131	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	96.51	96.60	96.80	9	97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
132	Cakupan Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	%	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
133	Prosentase Penyajian Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
134	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5,45	13,23	14,56	15,88	15,88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
135	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	48,75	7,28	5,95	4,63	4,63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
136	Persentase Desa yang menjalin kerjasama	%	4,3	1,32	2,64	3,97	3,97	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
137	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa Yang Di Fasilitasi	%	45,01	17,21	22,94	28,76	28,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
138	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Difasilitasi dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	%	1,44	1,61	1,64	1,67	1,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
139	Prosentase Posyandu Aktif;	%	99,91	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
140	Prosentase PKK Aktif	%	99	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
141	Persentase BUM Desa Yang Difasilitasi	%	3,14	2,64	3,97	5,29	5,29	Dinas Pemberdayaan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
								Masyarakat Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
142	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	%	25	25,5	30	30,5	30,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
143	Persentase PUS peserta KB Aktif	%	64.94	65,35	65,36	65,37	65.37	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
144	Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	%	25	25,5	26	26,5	26,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
145	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	30.8	33.78	35.27	36.76	36.76	Dinas Perhubungan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
146	Prosentase Layanan Angkutan Darat;	%	97	97	97	97	97	Dinas Perhubungan
147	Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B Pertahun	Jiwa	500,981	628,431	688,548.286	748,666.006	748,666.0064	Dinas Perhubungan
148	Cakupan prasarana Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	60	63.65	65.454	67.254	67.254	Dinas Perhubungan
149	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan		0.108	0.31	0.328	0.348	0.348	Dinas Perhubungan
150	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan	Jiwa	1,418,985	1,779,975	1950252.98	2120531.18	2120531.184	Dinas Perhubungan
151	Jumlah pelabuhan Pengumpan yang beroperasi	Unit	11	11	11	11	11	Dinas Perhubungan
152	Jumlah Dokumen Rencana Perkeretaapian Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
153	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik	Nilai	-	40	45	50	50	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
154	Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi	%	44	50	55	60	60	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	Sulawesi Selatan Yang Terintegrasi							Persandian
155	Persentase Unit Kerja Yang Terkoneksi Jaringan Internet Intra Pemerintah Pemerintah Sulawesi Selatan	%	41	44	45	47	47	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
156	Prosentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	%	12	12	12	12	12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
157	Prosentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	%	10	10	10	10	10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
158	Prosentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	20	20	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
159	Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhannya terhadap peraturan perundang undangan	%	20	20	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
160	Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria	%	20	20	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	SEHAT							Menengah
161	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi	%	20	20	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
162	Prosentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	%	20	20	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
163	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	%	20	20	20	20	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
164	Cakupan UMKM yang diberdayakan	%	10	10	10	10	10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
165	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha	%	10	10	10	10	10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
166	Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	%	3	3	3	3	3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
167	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimamfaatkan oleh Investor	%	85	87	90	93	93	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
168	Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	6.73	6.8	7	8	88	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
169	Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	7.52	7.75	8	9	99	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
170	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	%	80	92	93	9	95	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
171	Prosentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	%	55	57	59	60	60	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
172	Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	%	85	87	88	90	90	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
173	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan	%	0,24	0,50	1,00	1,50	1,50	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	ekonomi mandiri							
174	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	%	3,81	4,50	5,00	5,50	5,50	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
175	Peningkatan Prestasi olah raga	%	3,17	0,4	0,11	0,5	0,5	
176	Persentasi ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	30	45	75	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
177	Persentasi organisasi pramuka aktif	%	100	100	100	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
178	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	80	90	92	94	100	Dinas Komunikasi dan Infomatika, Statistik dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
179	Tingkat Kematangan Keamanan Siber	Nilai	2.08	2.59	2.75	3	3.00	Dinas Komunikasi dan Infomatika, Statistik dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
180	Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	%	0.34	1,28	1,92	2,88	2,88	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
181	Prosentase Sanggar Kesenian yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan	%	7.69	7	7,5	8	8	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
182	Prosentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi.	%	3.89	4	4,5	5	5	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
183	Prosentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	0.29	0.2	0.4	0.8	0.8	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
184	Prosentase Kunjungan ke musium	%	615.99	100	100	100	100	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
185	Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik	Orang	228,583	300	400	500	500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
186	Persentase naskah kuno yang di lestarikan	%	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
187	Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	79.49	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
188	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	%	Na	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
189	Persentase Penerbitan izin penggunaan arsip tepat waktu	%	Na	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
190	Perluasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Ha	569,269.53	816,593.22	822,559.65	847,122.40	847,122.40	Dinas Kelautan dan Perikanan
191	Jumlah produksi garam rakyat	Ton	3,387.78	5,000	6,000	6,900	6,900	Dinas Kelautan dan Perikanan
192	Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan	%	18	20	20	24	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
193	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp.	11.813.500.000	11.933.560.000	11.960.232.411	11.911.430.000	11,991,430,000	Dinas Kelautan dan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
								Perikanan
194	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	436,735.72	442,959.60	451,818.70	460,858.10	460,858.10	Dinas Kelautan dan Perikanan
195	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	27.39	29	30	31	31	Dinas Kelautan dan Perikanan
196	Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	29.43	30.62	31.23	31.86	31.86	Dinas Kelautan dan Perikanan
197	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	%	68.42	84.21	89.47	100.0	100.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
198	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp.	21,712,560,000	21.850.160.000	22,187,160,000.0	22,530,900,000.0	22.530.900.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
199	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Ton	4,095,934.66	4,331,299.7	4,417,925.7	4,506,248.3	4,506,248.3	Dinas Kelautan dan Perikanan
200	Persentase ketersediaan benur berkualitas	%	78.51	85	90	95	95	Dinas Kelautan dan Perikanan
201	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	94.01	97.80	99.70	100.00	100.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
202	Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan	Rp.	355,500,000.0	391.940.000	411.540.000	432.110.000	432.110.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
203	Produksi olahan ikan	Ton	5,911.60	6,150.43	6,273.44	6,398.91	6,398.91	Dinas Kelautan dan Perikanan
204	Persentase pengujian mutu produk perikanan	%	69.05%	100	100	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
205	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	%	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
206	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	Kunjungan	7,590,063	7,875,000	8,275,000	8,875,000	8,875,000	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
207	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	Kunjungan	70,997	102,500	107,500	115,000	115,000	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
208	Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	18.75	18.75	18.7	18.75	18.75	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
209	Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang	%	1.55	2	3	3,7	3,7	Dinas Kebudayaan dan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	mendapatkan Pelatihan							Kepariwisataan
210	Prosentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	%	14.92	10	15	20	20	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
211	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	3,53	2	2	2	2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan
212	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	-5,22	2	2	2	2	
213	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	-6,9	2	2	2	2	
214	Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp	154,730,214,500	56.290.226.087	56.301.484.133	56.312.744.429	168,904,454,649	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan
215	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi	%	-2.03	1.16	1.18	1.20	1.20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
216	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Pedaging	%	-6.98	2.12	2.16	2.20	2.20	
217	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Ras Petelur	%	0.54	2.73	2.81	2.90	2.90	

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
218	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Perah	%	-0.23	2.23	2.30	2.37	2.37	
219	Rasio Luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana terhadap luasan lahan pertanian	Poin	0,0073	0,0076	0,0080	0,0084	0,0084	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan
220	Nilai Produksi Hasil Ternak (Juta)	Rp	9,689,799	10,248,954	10,664,347	11,079,740	31,993,041	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan
221	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	%	89.21	10	10	10	10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan
222	Persentase luas serangan OPT yang tertangani terhadap luas serangan OPT (%)	%	Na	80	84	88.2	88.2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan
223	Persentase petani yang menerapkan teknologi	%	Na	50	55	60	60	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
224	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	Na	20	20	20	20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan
225	Persentase Kelompok Tani/Ternak Yang Mendapatkan Diseminasi Penyuluhan dan Pemberdayaan	%	Na	100	100	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
URUSAN PEMERINTAN BIDANG KEHUTANAN								
226	Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	%	13.97	21.15	28.23	35.23	35.23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
227	Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi	%	11.85	11,91	11.97	12.02	12.02	
228	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	%	0.030	0.029	0.028	0.027	0.027	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
229	Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	%	3.28	3.57	3.63	3.74	3.74	
230	Jumlah laporan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak	Laporan	1	1	1	1	3	Dinas Lingkungan Hidup dan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata							Kehutanan
231	Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) KTH	%	belum dilakukan pengukuran	1.75	2.60	2.81	2.81	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
232	Persentase lembaga/ forum DAS yang aktif	%	16.67	20.83	25.00	29.17	29.17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
233	Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah	%	80	85	90	92	92	Dinas ESDM
234	Persentase pemanfaatan WP (Wilayah Pertambangan) sul sel yang terkelola dengan baik	%	na	10	12	13	13	Dinas ESDM
235	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor Energi (Ton CO2 eq)	%	na	1,3	1,4	1,5	1,5	Dinas ESDM
236	Persentase Rumah Tangga berListrik	%	98,89	100	100	100	100	Dinas ESDM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
237	Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	%	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
238	Prosentase Penerbitan SKA	%	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
239	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
240	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
241	Nilai Ekspor Perdagangan	$ US	2,358,936,319	1.967.433.973	2,262,549,068.38	2,601,931,428.63	2,601,931,428.63	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
242	Persentase Barang beredar yang diawasi, tertib niaga dan pengaduan konsumen serta pengujian dan sertifikasi mutu produk	%	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
243	Prosentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam penggunaan dan Pemasaran produk dalam	%	na	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	negeri							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
244	Persentase pertumbuhan jumlah industri	%	35%	7.5%	0	0	8.5%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
245	Prosentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	%	2,1	2,5	3	3,5	3.5%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
246	Prosentase peningkatan pengelolaan SIINAS	%	2,2	4	4,5	5	5%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
247	Persentase Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	%	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
248	Prosentase penempatan transmigrasi	%	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
249	Prosentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri	%	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
SEKRETARIAT DAERAH								
250	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	Biro Organisasi
251	Cakupan Presentase Jumlah Urusan Pemerintahan yang Difasilitasi, Dimonitoring dan dievaluasi	%	100	100	100	100	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
252	% Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimamfaatkan	%	88,89	99,2	99,3	99,4	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
253	Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas)	%	45,94	46,3	46,35	46,4	45,50	
254	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dan dievaluasi	%	100	100	100	100	100	Biro Hukum
255	Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	
256	Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan bagi	%	85	100	100	100	100	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	pimpinan							
257	Prosentase capaian program prioritas pembangunan daerah	%	87	100	100	100	100	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
258	Presentase Kesesuaian rencana dengan pengadaan barang/ jasa	%	100	100	100	100	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
259	Presentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang / jasa	%	98,66	100	100	100	100	
Sekretariat Dewan								
260	% Prolegda yang terealisasi	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
261	% Jumlah Program Kerja DPRD yang terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
262	Jumlah Ranperda yang difasilitasi Pembahasannya	Ranperda	15	15	15	15	45	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
PERENCANAAN								
263	% Konsistensi Program RPJMD/RPD terhadap RKPD	%	97	100	100	100	100	Bappelitbangda
264	% Konsistensi Program	%	100	100	100	100	100	

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	RKPD terhadap APBD							
265	Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah	%	90,03	91	92	93	93	
266	Persentase Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM dengan indicator dan target pembangunan nasional bidang PPM Tahun N	%	100	100	100	100	100	
267	Persentase Kesesuaian sasaran, indicator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indicator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM	%	100	100	100	100	100	
268	Persentase Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan SDA dengan indicator dan target pembangunan nasional bidang ekonomi dan SDA Tahun N	%	100	100	100	100	100	

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
269	Kesesuaian sasaran, indicator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indicator dan target pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan SDA	%	100	100	100	100	100	
270	Persentase Kesesuaian Indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan dengan indicator dan target pembangunan nasional bidang Infrastruktur dan kewilayahan Tahun N	%	100	100	100	100	100	
271	Persentase Kesesuaian sasaran, indicator dan target pembangunan perangkat daerah dengan sasaran, indicator dan target pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	
	KEUANGAN							

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
272	Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian RKA Tepat Waktu	%		100	100	100	100	BKAD
273	Evaluasi Ranperda Tentang APBD & Ranperkada Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota Tepat Waktu	%		100	100	100	100	BKAD
274	Evaluasi Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD & Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	%		100	100	100	100	BKAD
275	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tepat Waktu	%		100	100	100	100	BKAD
276	Tingkat kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	%		100	100	100	100	BKAD
277	Perencanaan Kebutuhan BMD Ditetapkan Tepat	%		100	100	100	100	BKAD

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	Waktu							
278	Capaian Penetapan Status Penggunaan BMD Sesuai Ketentuan	%		100	100	100	100	BKAD
279	Cakupan Barang Milik Daerah Yang Dimanfaatkan	%		100	100	100	100	BKAD
280	Persentase Tanah Pemerintah Provinsi Yang Telah Bersertifikat	%		100	100	100	100	BKAD
281	persentasi keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD	%	100	100	100	100	100	Bapenda
282	Persentasi Peningkatan PAD	%	100	100	100	100	100	Bapenda
KEPEGAWAIAN								
283	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;	%	63	65	65.3	65.6	65.6	BKD
284	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	%	90	85	86	87	87	BKD

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
285	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	93	93	94	95	95	BKD
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
286	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	%	50	50	50	5	50	BPSDM
287	Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	%	50	50	50	50	50	BPSDM
288	Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	%	100	100	100	100	100	BPSDM
289	Jumlah Akreditasi Program Pelatihan	Jumlah	5 Sertifikat	6 Sertifikat	7 Sertifikat	8 Sertifikat	8 Sertifikat	BPSDM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
290	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.	%	Belum dilakukan pengukuran	30	40	50	50	Bappelitbangda

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
291	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi dan Teknologi	%	11,32	13	15	16	16	Bappelitbangda
PENGELOLAAN PENGHUBUNG								
292	Presentase Pelayanan Badan Penghubung Daerah	%	65	86	87	88	86	Badan Penghubung Daerah
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
Inspektorat Daerah								
293	% Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	%	76,29	81%	82	83	83	Inspektorat Daerah
294	% Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	%	69	74%	75	76	76	
295	% OPD yang hasil nilai SAKIP nya meningkat	%	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
296	Presentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	%	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
297	Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD	%	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	yang ditindaklanjuti							
298	Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
299	Persentase Peserta Yang Hadir Pada Pendidikan Idiologi Pancasila dan Karakter bangsa	%	20	80	80	80	80	Kesbangpol
300	Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada masyarakat	%	na	80	85	90	90	Kesbangpol
301	Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi dengan Instansi Terkait dibidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat dan Orkemas	%	na	100	100	100	100	Kesbangpol
302	persentase terlaksananya koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dan organisasi bentukan	%	na	100	100	100	100	Kesbangpol

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPD (TAHUN 2022)	TERGET CAPAIAN				OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD	
	pemerintah di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya							
303	Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi Dengan Tim Bentukan Pemerintah di bidang Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Forkopimda	%	na	100	100	100	100	Kesbangpol
PENUNJANG URUSAN								
304	Rata-rata Nilai SKP ASN perangkat daerah	Nilai	99,92	100,42	100,92	101,43	101,43	Semua OPD
305	Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	Nilai	75,42	86,96	87,11	91,47	91,47	
306	Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	%	72,29	79,32	83,18	87,05	87,05	
307	Persentase peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	%	-27,35	10,20	12,13	15,16	15,16	

9.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel IX. 4.
Penetapan Target Indikator SPM
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026
(Permendagri No.59 Tahun 2021)

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/ Indikator	Target Nasional	Tahun 2022		Target		
			Target	Capaian	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	**PENDIDIKAN**						
1.1	**Pendidikan Menengah**						
1.1.1	warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	100%	76,62%	100%	100%	100%
	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional	100%	100%	na	100%	100%	100%
1.2	**Pendidikan Khusus**						
1.2.1	warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	100%	100%	80	100%	100%	100%
	Rata-rata Kemampuan	100%	100%	na	100%	100%	100%

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/ Indikator	Target Nasional	Tahun 2022		Target		
			Target	Capaian	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Literasi dan Numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional						
2	**KESEHATAN**						
2.1	**Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi**						
2.1.1	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	**Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi**						
2.2.1	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	**PEKERJAAN UMUM**						
3.1	**Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota**						
3.1.1	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	100%	62%	100%	100%	100%
3.2	**Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota**						
3.2.1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%	100%	92,2%	100%	100%	100%
4	**PERUMAHAN RAKYAT**						
4.1	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi**						
4.1.1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi**						
4.2.1	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/ Indikator	Target Nasional	Tahun 2022		Target		
			Target	Capaian	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
5	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**						
5.1	**Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi**						
5.1.1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	**SOSIAL**						
6.1	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti**						
6.1.1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	100%	100%	35.12%	100%	100%	100%
6.2	**Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti**						
6.2.1	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	100%	100%	3.88%	100%	100%	100%
6.3	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti**						
6.3.1	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.4	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti**						
6.4.1	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.5	**Perlindungan dan jaminansosial pada saat dan setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana provinsi**						
6.5.1	Jumlah Warga Negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100%	100%	15.63%	100%	100%	100%

Sumber : OPD Prov. Sulsel Tahun 2022, diolah

BAB X
PENUTUP

10.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tujuan sasaran dan program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengganti RPJMD yang disusun sebagai tindaklanjut dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Periode Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 namun dokumen ini tidak berlaku lagi setelah RPJMD Kepala Daerah hasil pilkada serentak ditetapkan.

Terkait dengan hal tersebut Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahunan dan APBD tetap berpedoman pada dokumen RPD ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Prov. Sulsel terbaru atau lahirnya regulasi baru yang mengatur hal tersebut untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Program-program pembangunan pada tahun 2024 dan 2026 (masa transisi) tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen pengganti RPJMD serta penjabaran RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 utamanya pada tahun 2024 dan 2025. Sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program yang tercantum dalam DOkumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Prioritas, sesuai dengan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;

5. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukukan penyusunan Renstra-PD sesuai dengan periode RPD ini. Renstra-PD ini memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program dan kegiatan perangkat daerah, serta indikator kinerja perangkat daerah. Renstra-PD selanjutnya menjadi acuan dalam penjabaran rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja-PD, hingga penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah.
6. Dalam rangka perencanaan tahunan, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan selama periode berlakunya RPD ini. RKPD disusun setiap tahunnya selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran daerah, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan APBD setiap tahun anggaran;
7. Berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, dan melakukan sosialisasi baik aparat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat sipil guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal;
8. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.
9. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama DPRD dan masyarakat harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dimaksud, dan untuk menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal serta menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, ST.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN